



PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RKPD DIY

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2025



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2022 - 2027.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2025 yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
- (3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
 - b. pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyelaraskan prioritas pembangunan provinsi; dan
 - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2025.
- (4) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. prioritas pembangunan Daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaannya.
- (5) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau partisipasi masyarakat dalam periode 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. BAB 1 : PENDAHULUAN
 - b. BAB 2 : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB 3 : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB 4 : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB 5 : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA

- f. BAB 6 : RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN DAERAH
 - g. BAB 7 : KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
 - h. BAB 8 : PENUTUP
- (2) Rincian uraian RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Perangkat Daerah wajib melaksanakan RKPD Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 8 Juli 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 33



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	1-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	1-9
1.4 Maksud dan Tujuan.....	1-10
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	1-11
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	2-2
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD DIY Sampai Dengan Tahun Berkenaan	2-309
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	2-460
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	3-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	3-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	3-18
BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	4-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	4-1
4.2 Perumusan Tema Pembangunan.....	4-4
4.3 Prioritas Pembangunan tahun 2025.....	4-16
4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	4-38

BAB 5	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA.....	5-1
5.1	Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Se-DIY	5-1
5.2	Arah Kebijakan Pembangunan Keistimewaan	5-5
BAB 6	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	6-1
6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2025.....	6-1
	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	6-2
	Dinas Kesehatan.....	6-220
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.....	6-246
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.....	6-285
	Satuan Polisi Pamong Praja	6-300
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	6-309
	Dinas Sosial	6-330
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6-376
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	6-411
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6-424
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil.....	6-446
	Dinas Perhubungan.....	6-457
	Dinas Komunikasi dan Informatika.....	6-471
	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6-484
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6-500
	Dinas Kebudayaan	6-511
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	6-529
	Dinas Kelautan dan Perikanan	6-553
	Dinas Pariwisata.....	6-572
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6-592

	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6-611
	Sekretariat Daerah.....	6-634
	Paniradya Kaistimewan.....	6-695
	Sekretariat DPRD.....	6-706
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	6-769
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	6-735
	Badan Kepegawaian Daerah	6-788
	Badan Pendidikan dan Pelatihan	6-788
	Badan Penghubung Daerah	6-797
	Inspektorat.....	6-804
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	6-815
BAB 7	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	7-1
7.1	Indikator Kinerja Utama	7-2
7.2	Indikator Kinerja Daerah.....	7-3
BAB 8	PENUTUP	8-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD DIY	1-5
Tabel 1-2	Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah.....	1-10
Tabel 2-1	Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota.....	2-6
Tabel 2-2	Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota.....	2-6
Tabel 2-3	Potensi Ketersediaan Air (juta m ³)	2-18
Tabel 2-4	Debit Rerata Sungai di DIY Tahun 2019-2023 (m ³ /detik)	2-19
Tabel 2-5	Kapasitas Sungai Bawah Tanah di WS POS	2-19
Tabel 2-6	Imbangan Air Hidrologi Rerata Tahunan.....	2-20
Tabel 2-7	Penggunaan lahan di DIY Tahun 2023	2-23
Tabel 2-8	Kawasan Rawan Bencana di Wilayah DIY Tahun 2018 - 2022	2-32
Tabel 2-9	Tingkat Bahaya dan Risiko Bencana di Wilayah DIY Tahun 2022-2026	2-33
Tabel 2-10	Indikator Risiko Bencana di Wilayah DIY tahun 2018- 2023	2-34
Tabel 2-11	Frekuensi Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2017 - 2023	2-35
Tabel 2-12	Korban Bencana DIY Tahun 2019, 2021, dan 2023.....	2-35
Tabel 2-13	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di DIY (Jiwa) Tahun 2019 - 2023	2-36
Tabel 2-14	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018 - 2023	2-38
Tabel 2-15	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota.....	2-39
Tabel 2-16	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2018 - 2023 (%)	2-41
Tabel 2-17	Penanggulangan Kemiskinan di 15 Kapanewonan DIY	2-44

Tabel 2-18	Garis Kemiskinan DIY Menurut Tipe Daerah Tahun 2017 – 2023 (September 2017- Maret 2023).....	2-47
Tabel 2-19	Persentase Komoditas Garis Kemiskinan DIY berdasarkan Jenis Komoditas Makanan dan non Makanan menurut Tipe Daerah, Maret 2023 (%).....	2-48
Tabel 2-20	Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2023 (Juta Rp)	2-51
Tabel 2-21	Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 - 2023	2-52
Tabel 2-22	Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018 - 2023.....	2-53
Tabel 2-23	Perkembangan Tiga Sektor Domian DIY Tahun 2017-2023	2-53
Tabel 2-24	Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota DIY ADHB Tahun 2018-2023 (juta Rupiah)	2-57
Tabel 2-25	Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Perekonomian DIY, Tahun 2019-2023	2-58
Tabel 2-26	Laju Inflasi DIY Tahun 2018-2023	2-58
Tabel 2-27	Perkembangan Jumlah Organisasi Kesenian dan Budaya di DIY Tahun 2018-2023	2-73
Tabel 2-28	Perkembangan Jumlah Organisasi Kesenian dan Budaya di DIY Tahun 2018-2023	2-85
Tabel 2-29	Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana di DIY Tahun 2018-2023.....	2-85
Tabel 2-30	Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2018-2023	2-87
Tabel 2-31	Jumlah Cagar Budaya, Situs, dan Museum di DIY Tahun 2018-2023	2-87
Tabel 2-32	Perkembangan Jumlah Sarana Prasarana, Organisasi serta Kegiatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2023.....	2-89
Tabel 2-33	Kemampuan Literasi, Numerasi Jenjang SMA & SMK, Penyerapan Lulusan SMK dan Kepuasan Dunia Kerja Tahun 2023.....	2-95
Tabel 2-34	Jumlah dan Status Akreditasi Rumah Sakit Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023	2-100
Tabel 2-35	Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan per Penduduk DIY Tahun 2019-2023.....	2-101
Tabel 2-36	Ibu Hamil Resiko Tinggi di DIY menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022.....	2-102

Tabel 2-37	Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan di DIY Tahun 2022	2-103
Tabel 2-38	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2022	2-104
Tabel 2-39	Perkembangan Prevalensi Balita Kurang Energi Protein (KEP) DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022	2-104
Tabel 2-40	Prevalensi Penyakit Tidak Menular DIY dan Nasional Tahun berdasarkan Riskesdas 2013, Riskesdas 2018, dan SKI 2023	2-106
Tabel 2-41	Prasarana Irigasi DIY Tahun 2019-2023.....	2-109
Tabel 2-42	Data Kependudukan DIY Terlayani Air Minum Sampai Tahun 2023.....	2-111
Tabel 2-43	Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2023	2-112
Tabel 2-44	Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga.....	2-113
Tabel 2-45	Jumlah IPAL Komunal Yang Terbangun Sampai Tahun 2023	2-113
Tabel 2-46	Fasilitas Layanan Sampah dan Volume Sampah DIY Tahun 2019-2023	2-113
Tabel 2-47	Data Timbulan Sampah untuk Wilayah Kartamantul Tahun 2023.....	2-115
Tabel 2-48	Kondisi Jalan Provinsi, Tahun 2019-2023	2-117
Tabel 2-49	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi (tersertifikasi) Tahun 2018-2023.....	2-120
Tabel 2-50	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2018-2023.....	2-121
Tabel 2-51	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada 18 SRS Tahun 2022.....	2-124
Tabel 2-52	Penanganan RTLH 2019-2023	2-126
Tabel 2-53	Penanganan PSU Tahun 2023.....	2-127
Tabel 2-54	Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (SK Kabupaten/Kota 2016) dan Progres Penanganan	2-127
Tabel 2-55	Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (10-15 Ha).....	2-128
Tabel 2-56	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada dari Tahun 2019-2023	2-134
Tabel 2-57	Angka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY Tahun 2019-2023	2-136
Tabel 2-58	Perbandingan Indeks Risiko IRBI DIY dengan Rata-Rata Nasional Tahun 2023.....	2-136

Tabel 2-59	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di DIY	2-136
Tabel 2-60	Angka Prevalensi Penyalahgunaan di DIY dan Rata-Rata Nasional Tahun 2019	2-137
Tabel 2-61	Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dari Tahun ke Tahun	2-138
Tabel 2-62	Perkembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di DIY Tahun 2019-2023.....	2-139
Tabel 2-63	Jenis dan Jumlah PSKS di DIY 2019-2023.....	2-141
Tabel 2-64	Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya, Tahun 2019-2023	2-142
Tabel 2-65	Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY (ribu orang), Tahun 2020–2024.....	2-143
Tabel 2-66	Indeks Perlindungan Anak DIY berdasarkan Dimensi Pembentuknya Tahun 2018-2022.....	2-150
Tabel 2-67	Perbandingan Hasil Peta Komposit Tahun 2020 – 2023	2-157
Tabel 2-68	Konsumsi Energi beberapa jenis Kelompok Bahan Pangan di DIY Tahun 2019-2023.....	2-158
Tabel 2-69	Capaian bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan.....	2-161
Tabel 2-70	Capaian Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	2-162
Tabel 2-71	Inventarisasi Tanah Tutupan di DIY.....	2-163
Tabel 2-72	Inventarisasi Tanah Enclave di DIY	2-163
Tabel 2-73	Data Luas Hutan DIY Berdasarkan Status dan Fungsi Hutan	2-168
Tabel 2-74	Luas Lahan Kritis DIY yang telah dilakukan Rehabilitasi 2018-2023	2-168
Tabel 2-75	Penduduk DIY Yang Telah Melakukan Perekaman KTP El Tahun 2023 (Orang).....	2-170
Tabel 2-76	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di DIY Tahun 2017-2023.....	2-171
Tabel 2-77	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY Tahun 2017-2023.....	2-171
Tabel 2-78	Status Indeks Desa Membangun (IDM) di DIY Tahun 2018-2022	2-172
Tabel 2-79	Jumlah LPMD dan LPMK Menurut Kabupaten/Kota di DIY.....	2-173

Tabel 2-80	Jumlah Posyandu Aktif DIY Tahun 2018-2022.....	2-174
Tabel 2-81	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2018-2023	2-174
Tabel 2-82	Jumlah Desa/kelurahan di DIY dan Ketersediaan Profil Desa.....	2-175
Tabel 2-83	Kegiatan Keswadayaan Masyarakat Tahun 2023.....	2-176
Tabel 2-84	Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2018-2023	2-179
Tabel 2-85	Jumlah Kasus Perceraian yang Diputus di PA menurut Sumber Permohonan dan Wilayah PA di DIY Tahun 2022 dan 2023	2-179
Tabel 2-86	Perkembangan <i>Unmet Need</i> KB di DIY Menurut Kabupaten Kota Tahun 2019-2023	2-184
Tabel 2-87	Jumlah Bangkitan dan Tarikan Perjalanan di DIY	2-185
Tabel 2-88	Tabel Derajat Kejenuhan di Ruas Jalan Provinsi Tahun 2022 dan 2023	2-189
Tabel 2-89	Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2017 s.d. 2023	2-199
Tabel 2-90	Trayek AKDP yang terlayani di DIY Tahun 2020 hingga Tahun 2023.....	2-200
Tabel 2-91	Kendaraan Angkutan di DIY Tahun 2018-2023	2-203
Tabel 2-92	Jumlah dan Jenis Transportasi Tradisional Berdasarkan Hasil Survei.....	2-205
Tabel 2-93	Jumlah Kejadian Kecelakaan di DI Yogyakarta Tahun 2020 – 2023.....	2-205
Tabel 2-94	Peringkat Keselamatan Jalan Berdasarkan Jumlah Kejadian Per KM Panjang Ruas Jalan	2-206
Tabel 2-95	Rekapitulasi Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan di DIY Tahun 2023.....	2-207
Tabel 2-96	Rekapitulasi Simpang APILL ATCS Kewenangan Dishub DIY Tahun 2012 – 2022.....	2-208
Tabel 2-97	Panjang Kabel Fiber Optik di DIY	2-211
Tabel 2-98	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten/Kota	2-212
Tabel 2-99	Jaringan Telekomunikasi Bergerak di DIY.....	2-212
Tabel 2-100	Perbandingan Nilai Indeks SPBE Pemda DIY Hasil Pemantauan Tahun 2022 Dan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023.....	2-213
Tabel 2-101	Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2018	2-214
Tabel 2-102	Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2019	2-214
Tabel 2-103	Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2020	2-215

Tabel 2-104	Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2021	2-216
Tabel 2-105	Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2022	2-216
Tabel 2-106	Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2023	2-217
Tabel 2-107	Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2019-2023.....	2-218
Tabel 2-108	Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2023.....	2-220
Tabel 2-109	Perkembangan Investasi di DIY (dalam juta rupiah) Tahun 2019-2023.....	2-221
Tabel 2-110	Jumlah Kelembagaan Pemuda dan Olahraga dan Sarana Olahraga di DIY	2-224
Tabel 2-111	Perbandingan Elemen Data yang Sudah Memiliki Metadata dengan Seluruh Elemen Data	2-226
Tabel 2-112	Penyediaan Data Statistik Tahun 2023	2-228
Tabel 2-113	Jumlah Kasus/Insiden Peretasan pada Sistem Informasi Milik Pemda DIY	2-231
Tabel 2-114	Perkembangan Budaya di DIY Tahun 2019-2023.....	2-232
Tabel 2-115	Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, Tahun 2019-2023	2-234
Tabel 2-116	Jumlah Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional).....	2-235
Tabel 2-117	Jumlah Perpustakaan Desa Tiap Kabupaten Kota Tahun 2019-2023	2-237
Tabel 2-118	Jumlah Pustakawan DIY Tahun 2019 s.d. 2023	2-237
Tabel 2-119	Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2019-2023	2-237
Tabel 2-120	Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah.....	2-238
Tabel 2-121	Data Kearsipan DIY Hingga Tahun 2023	2-240
Tabel 2-122	Sebaran Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif BISMA di DIY	2-246
Tabel 2-123	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif di DIY pada Tahun 2018-2022.....	2-247
Tabel 2-124	Tabel Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2019- 2023 (ton).....	2-249
Tabel 2-125	Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2019-2023.....	2-249
Tabel 2-126	Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2019-2023	2-250
Tabel 2-127	Populasi Ternak di DIY Tahun 2019-2023 (ekor)	2-251
Tabel 2-128	Luas Hutan di DIY berdasarkan fungsi (Ha).....	2-251
Tabel 2-129	Hasil Hutan di DIY Tahun 2018-2023	2-253

Tabel 2-130	Data Usulan Bantuan Listrik Untuk Rumah Tangga Belum Berlistrik Atau Masih Menyalur.....	2-256
Tabel 2-131	Rumah Tangga Miskin Yang Belum Berlistrik Sesuai Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Jauh dari Jaringan Listrik PLN	2-256
Tabel 2-132	Capaian Bauran Energi di DIY Tahun 2022.....	2-258
Tabel 2-133	Data Jenis Energi Baru Terbarukan DIY 2020-2023	2-258
Tabel 2-134	Rerata Penurunan Muka Air Tanah Di DIY tahun 2020 – 2023	2-261
Tabel 2-135	Luas Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	2-263
Tabel 2-136	Nilai Ekspor Impor DIY Tahun 2018-2022 (dalam juta dolar AS)	2-265
Tabel 2-137	Perkembangan Jumlah SIUP Berdasarkan Golongan Usaha di DIY, Tahun 2018-2021	2-265
Tabel 2-138	Perkembangan Margin Perdagangan dan Pengangkutan di DIY (%), Tahun 2018-2021.....	2-266
Tabel 2-139	Perkembangan IKM di DIY, Tahun 2018-2022.....	2-267
Tabel 2-140	Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di DIY, Tahun 2019-2023.....	2-270
Tabel 2-141	Jumlah Nelayan dan Rumah Tangga Perikanan di DIY Tahun 2020-2023	2-273
Tabel 2-142	Jumlah Produk Hukum Daerah DIY Tahun 2019-2023.....	2-274
Tabel 2-143	Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota Tahun 2019-2023.....	2-275
Tabel 2-144	Jumlah Bantuan dan Layanan Hukum Tahun 2019-2023.....	2-275
Tabel 2-145	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik DIY	2-276
Tabel 2-146	Survei Kepuasan Masyarakat 2016-2022.....	2-277
Tabel 2-147	Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan pada Tahun 2019-2023.....	2-278
Tabel 2-148	Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai Tahun 2023	2-284
Tabel 2-149	Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2017-2023.....	2-286
Tabel 2-150	Capaian Sistem Merit DIY Tahun 2018-2023	2-287
Tabel 2-151	Data Pejabat Pensiun 2021 s.d 2024.....	2-287
Tabel 2-152	Capaian Indikator Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih Untuk Mendukung Pembangunan Daerah, 2020-2023.....	2-289

Tabel 2-153	Temuan, Rekomendasi, dan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Tahun 2019-2023	2-292
Tabel 2-154	Capaian kinerja urusan Keistimewaan DIY Tahun 2018-2022	2-299
Tabel 2-155	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/ Kota di DI Yogyakarta Tahun 2018-2022.....	2-304
Tabel 2-156	Persentase Rincian Pengeluaran Konsumsi Bukan Makanan DIY Tahun 2018-2022 (dalam persen).....	2-304
Tabel 2-157	Nilai Ekspor Impor D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022 (dalam juta dolar AS)	2-305
Tabel 2-158	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Tiap 100.000 Penduduk di DIY Tahun 2018-2023	2-306
Tabel 2-159	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk di DIY Tahun 2018-2023	2-306
Tabel 2-160	Data Kasus Kejahatan Jalanan di DIY Tahun 2018-2023	2-307
Tabel 2-161	Rasio Beban Tanggungan Penduduk DIY Tahun 2018-2022	2-307
Tabel 2-162	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2022	2-308
Tabel 2-163	Persentase Penduduk Berusaha Dengan Dibantu Buruh Tetap 2018-2022	2-308
Tabel 2-164	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemda DIY Tahun 2024	2-309
Tabel 2-165	Capaian Kinerja Sasaran Pemda TW I Tahun 2023	2-316
Tabel 2-166	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2023 (%)	2-320
Tabel 2-167	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023	2-321
Tabel 2-168	Perkembangan Nilai IPK Tahun 2019-2022.....	2-328
Tabel 2-169	PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota DIY 2023	2-331
Tabel 2-170	Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Triwulan I Tahun 2024	2-338
Tabel 2-171	Rekapitulasi Capaian Kinerja s.d. TW I Tahun 2024.....	2-373
Tabel 2-172	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2017 - 2023 (%).....	2-462
Tabel 2-173	Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) DIY Tahun 2019 – 2023.....	2-493

Tabel 2-174	Perkembangan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial DIY Tahun 2019 – 2023	2-495
Tabel 2-175	Data Jumlah dan Alasan Dispensasi Kawin Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2023	2-503
Tabel 2-176	Status IDM Tahun 2023 Menurut Kalurahan di DIY	2-520
Tabel 2-177	Jumlah BUMDes/BUMKal DIY Tahun 2017-2023	2-523
Tabel 2-178	Data BUMKal di DIY Menurut Kategori Tahun 2023	2-524
Tabel 2-179	<i>Dependency Ratio</i> Hasil Proyeksi Penduduk 2010-2020.....	2-528
Tabel 2-180	<i>Dependency Ratio</i> Hasil Proyeksi Penduduk 2025-2035.....	2-529
Tabel 2-181	Prioritas Penanganan Ruas Jalan Berdasarkan Peringkat Kinerja terburuk.....	2-533
Tabel 2-182	Trayek AKDP yang terlayani di DIY Tahun 2020 - 2023	2-534
Tabel 2-183	Indeks Fatalitas Kecelakaan di DIY tahun 2017 - 2022.....	2-539
Tabel 2-184	Data Kecelakaan Lalu Lintas di DIY Tahun 2016 – 2022.....	2-540
Tabel 2-185	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B Wates Tahun 2022 - 2023	2-543
Tabel 2-186	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B Jombor Tahun 2022 - 2023	2-546
Tabel 2-187	Data Arsip di Depo Arsip Berdasarkan Jenis	2-558
Tabel 2-188	Keikutsertaan dan Capaian dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.....	2-574
Tabel 3-1	PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2019 - 2023	3-7
Tabel 3-2	Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran (%), 2019 - 2023.....	3-7
Tabel 3-3	Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2019 - 2023.....	3-9
Tabel 3-4	Kemiskinan di DIY Tahun 2019 - 2023 (Maret).....	3-10
Tabel 3-5	Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024 dan Tahun 2025	3-13
Tabel 3-6	Proyeksi Indikator Ekonomi Makro DIY tahun 2025 dan Target Indikator Ekonomi Makro DIY dalam RKP 2025.....	3-16
Tabel 3-7	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.....	3-30
Tabel 4-1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	4-3

Tabel 4-2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2022-2027	4-8
Tabel 4-3	Penyelarasan Prioritas Daerah Tahun 2025 dengan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027.....	4-17
Tabel 4-4	Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah	4-19
Tabel 4-5	Penyelarasan Target Indikator Daerah Hasil Rakortekrenbang dan Pemutakhiran Indikator Makro	4-23
Tabel 4-6	Penyelarasan Target Indikator Urusan Hasil Rakortekrenbang	4-25
Tabel 5-1	Target Indikator Pembangunan Makro Kota Yogyakarta	5-1
Tabel 5-2	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Bantul, Tahun 2025	5-2
Tabel 5-3	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2025	5-3
Tabel 5-4	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2025.....	5-4
Tabel 5-5	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sleman, Tahun 2025	5-4
Tabel 6-1	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Pagu Indikatifnya Tahun 2025.....	6-1
Tabel 7-1	Penetapan Indikator Kinerja Utama DIY.....	7-2
Tabel 7-2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah DIY Tahun 2025	7-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1	Peta Administrasi DIY	2-5
Gambar 2-2	Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY.....	2-7
Gambar 2-3	Peta Kemiringan Lereng DIY	2-9
Gambar 2-4	Peta Curah Hujan DIY	2-10
Gambar 2-5	Peta Geologi DIY	2-13
Gambar 2-6	Peta Jenis Tanah DIY.....	2-14
Gambar 2-7	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) DIY.....	2-17
Gambar 2-8	Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS.....	2-21
Gambar 2-9	Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS.....	2-22
Gambar 2-10	Peta Penggunaan Lahan DIY.....	2-23
Gambar 2-11	Peta Rencana Struktur Ruang DIY Tahun 2023 – 2043	2-28
Gambar 2-12	Peta Rencana Pola Ruang DIY Tahun 2023 – 2043.....	2-29
Gambar 2-13	Peta Rawan Bencana DIY	2-32
Gambar 2-14	Persentase Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	2-36
Gambar 2-15	Komposisi Penduduk DIY Tahun 2023 Berdasarkan Usia.....	2-37
Gambar 2-16	Peta Kepadatan Penduduk DIY.....	2-39
Gambar 2-17	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2018– Maret 2023.....	2-41
Gambar 2-18	Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah Tempat Tinggal di DIY Maret 2013 – Maret 2023	2-42
Gambar 2-19	Target Jumlah Sasaran Kemiskinan Ekstrem 2021-2024	2-43
Gambar 2-20	Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY Tahun 2017-2022 (Maret 2017-Maret 2023)	2-50
Gambar 2-21	Laju Pertumbuhan Tiga Sektor Dominan di DIY, 2018- 2023	2-55
Gambar 2-22	Rasio Gini di DIY dan Indonesia, Tahun 2017 – Maret 2023.....	2-56

Gambar 2-23	Indeks Williamson DIY Tahun 2019 – 2023.....	2-56
Gambar 2-24	Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2017 – 2023.....	2-60
Gambar 2-25	Perkembangan IPM DIY dan Nasional Tahun 2018-2023.....	2-62
Gambar 2-26	Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2023	2-63
Gambar 2-27	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2018-2023	2-65
Gambar 2-28	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2019-2023	2-66
Gambar 2-29	Perkembangan Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2018-2023	2-68
Gambar 2-30	Angka Harapan Hidup DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2023.....	2-69
Gambar 2-31	Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang DIY Tahun 2018 s.d 2023.....	2-70
Gambar 2-32	Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk di DIY Tahun 2018-2023 (Balita)	2-71
Gambar 2-33	Perkembangan Balita <i>Stunting</i> di DIY Tahun 2018-2023 (Persen)	2-73
Gambar 2-34	Perkembangan Jumlah Kematian Ibu di DIY Tahun 2014-2023	2-75
Gambar 2-35	Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY Tahun 2018-2023 (Anak).....	2-76
Gambar 2-36	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di DIY Tahun 2012-2024 (Persen)	2-78
Gambar 2-37	Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Tahun 2020-2024 (Persen)	2-80
Gambar 2-38	Perkembangan Balita Gizi Buruk di DIY Tahun 2016-2022	2-105
Gambar 2-39	Perkembangan Jumlah kasus dan CFR DBD DIY Tahun 2013-2022	2-107
Gambar 2-40	Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi.....	2-117
Gambar 2-41	Rekapitulasi Kasus Narkoba di DIY.....	2-137
Gambar 2-42	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) DIY Tahun 2017-2022.....	2-148
Gambar 2-43	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY Tahun 2017-2022.....	2-149
Gambar 2-44	Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2019-2023.....	2-152

Gambar 2-45	Perkembangan Ketersediaan Energi Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2019-2023	2-153
Gambar 2-46	Produksi Daging Sapi, Kambing, dan Domba di DIY Tahun 2019-2023 (Ton)	2-154
Gambar 2-47	Produksi Telur Unggas Tahun 2019-2023 (dalam ton).....	2-155
Gambar 2-48	Produksi Daging Unggas Tahun 2019-2023 (dalam ton).....	2-156
Gambar 2-49	Indeks Kualitas Air DIY Tahun 2018-2023.....	2-164
Gambar 2-50	Indeks Kualitas Udara DIY Tahun 2018-2023	2-167
Gambar 2-51	Perkembangan TFR di DIY	2-177
Gambar 2-52	<i>Dependency Ratio</i> Menurut Hasil Proyeksi Penduduk.....	2-178
Gambar 2-53	<i>Dependency Ratio</i> Menurut Hasil Proyeksi Penduduk.....	2-179
Gambar 2-54	<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i> DIY Tahun 2018-2022	2-181
Gambar 2-55	<i>Unmet Need</i> DIY Tahun 2019-2023	2-183
Gambar 2-56	Peta Daerah Rawan Kecelakaan di DIY	2-207
Gambar 2-57	Grafik Skor Indeks Pembangunan TIK DIY, 2012-2022.....	2-210
Gambar 2-58	Jumlah Koperasi Per Jenis Usaha DIY Tahun 2023	2-219
Gambar 2-59	Realisasi Investasi PMA dan PMDN DIY Tahun 2019 s.d 2023	2-222
Gambar 2-60	Realisasi Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Kabupaten/ Kota, Triwulan II 2023	2-222
Gambar 2-61	Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2019-2024 (Orang).....	2-242
Gambar 2-62	Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan di DIY Tahun 2020-2023 (Orang)	2-243
Gambar 2-63	Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan di ODTW DIY Tahun 2020-2023 (Orang)	2-244
Gambar 2-64	Perubahan Luas Lahan Sawah di DIY	2-248
Gambar 2-65	Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY 2018-2023	2-255
Gambar 2-66	Perkembangan Jumlah Industri Besar/Sedang di DIY, 2018-2022.....	2-268
Gambar 2-67	Jumlah Perusahaan Industri Besar/Kecil Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2022	2-269
Gambar 2-68	Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2019-2023	2-271
Gambar 2-69	Konsumsi Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), tahun 2019-2022	2-272

Gambar 2-70	Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap DIY (Ton), Tahun 2020-2023.....	2-273
Gambar 2-71	Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah.....	2-280
Gambar 2-72	Distribusi Pendapatan Daerah menurut Komponen di DIY 2019-2023 (%).....	2-282
Gambar 2-73	Grafik Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Penduduk DIY Tahun 2018-2022 (dalam ribu)	2-301
Gambar 2-74	Nilai Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan Tiap Kabupaten/Kota di DIY (dalam ribuan).....	2-301
Gambar 2-75	Perkembangan NTP di DIY Tahun 2019-2023	2-302
Gambar 2-76	NTP Per Subsektor Tahun 2019-2023.....	2-303
Gambar 2-77	Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IGI) Tahun 2019-2022	2-311
Gambar 2-78	Indeks Williamson DIY Tahun 2019-2023.....	2-313
Gambar 2-79	Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2019-2023 per Maret (dalam persen).....	2-320
Gambar 2-80	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2019-2023 (%)	2-321
Gambar 2-81	Perkembangan TPT DIY dan Nasional tahun 2019 - 2023	2-323
Gambar 2-82	Perkembangan Inflasi DIY (%mtm).....	2-324
Gambar 2-83	Perkembangan Inflasi DIY (%yoy)	2-325
Gambar 2-84	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2019-2023.....	2-326
Gambar 2-85	Perkembangan Nilai AKIP Pemda DIY Tahun 2011-2023....	2-333
Gambar 2-86	Grafik Perwujudan Pola Ruang DIY Tahun 2018-2023	2-336
Gambar 2-87	Tingkat Kemiskinan DIY dan Indonesia (Maret 2018 - Maret 2023)	2-461
Gambar 2-88	Indeks Gini DIY dan Nasional Tahun 2016-2022	2-465
Gambar 2-89	Indeks Gini Perdesaan dan Perkotaan DIY Tahun 2016-2022	2-467
Gambar 2-90	Perkembangan Usia Harapan Hidup DIY Tahun 2017-2022	2-497
Gambar 2-91	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DIY 2018-2023.....	2-511
Gambar 2-92	Data capaian IKTL DIY 2018-2023.....	2-512
Gambar 2-93	Angka Kebutuhan <i>Unmeet Need</i> di DIY.....	2-527
Gambar 2-94	Grafik Indeks Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas di DIY Tahun 2017 - 2022.....	2-540

Gambar 2-95	Hasil Giat Penegakan Hukum Angkutan Orang dan Angkutan Barang 2020 - 2022.....	2-541
Gambar 3-1	PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2019 - 2023	3-2
Gambar 3-2	Pangsa Lima Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Lapangan Usaha (%), 2019 - 2023.....	3-3
Gambar 3-3	Pangsa Lima Lapangan Usaha Terendah terhadap PDRB ADHK DIY Tahun 2019 - 2023 (%).....	3-4
Gambar 3-4	Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2019 - 2023.....	3-5
Gambar 3-5	Pertumbuhan Lapangan Usaha dalam PDRB (%), 2023.....	3-6
Gambar 3-6	Laju Inflasi IHK DIY (%), 2019 - 2023	3-8
Gambar 3-7	Perkembangan ICOR DIY (PMTB+Perubahan Inventori), 2019- 2023.....	3-9
Gambar 3-8	Indeks Williamson DIY, Tahun 2019-2023	3-11
Gambar 3-9	Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2019 - 2023 (Maret)	3-12

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen RKPD DIY Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027. Proses penyusunan RKPD DIY Tahun 2025 ini juga bertepatan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2025-2045 sehingga juga menjadi tahun awal tahapan lima tahun pertama dari RPJPD tersebut. Penekanan pada tahun pertama ini terletak pada pengembangan sektor unggulan daerah yang kreatif dan inovatif. Pemikiran-pemikiran baru didorong untuk mencetuskan solusi, ide, gagasan, cara, ataupun produk sebagai solusi permasalahan serta mampu memproses atau melakukan sesuatu untuk memberikan nilai tambah dengan cara baru ataupun berbeda. Harapannya, pembangunan daerah akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pada struktur dan tatanan pembangunan tahunan, dokumen perencanaan daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mempunyai kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PPAS APBD) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD.

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja jangka menengah sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Kedudukan strategis RKPD memerlukan perhatian yang besar dan komprehensif, yang seyogyanya diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD. Proses yang terdiri dari beberapa tahapan dan cakupan yang komprehensif dimaksudkan agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas.

Dokumen RKPD disusun melalui proses bertahap dengan melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

- a. Perumusan rancangan awal RKPD.

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi.
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional.
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan DIY.
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.

- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
- 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
- 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

b. Penyajian rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan.
- 2) Gambaran umum kondisi Daerah.
- 3) Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah.
- 4) Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah.
- 5) Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
- 6) Rencana kerja dan pendanaan Daerah.
- 7) Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- 8) Penutup.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah DIY sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD DIY.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari pemerintah pusat serta masukan/usulan dari Perangkat Daerah di DIY ataupun Pemda kabupaten/kota. Musrenbang RKPD juga menjadi penutup dari proses rapat koordinasi teknis perencanaan (Rakortekrenbang) dengan kabupaten/kota dimana dalam Rakortekrenbang terdapat kesepakatan bersama antara Perangkat Daerah, Bappeda DIY dan Bappeda kabupaten/kota mengenai kegiatan *sharing*. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup :

- a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah DIY dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.
- b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah DIY pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD DIY dilaksanakan.
- c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan DIY.
- d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
- e. Sinergi dengan RKP.

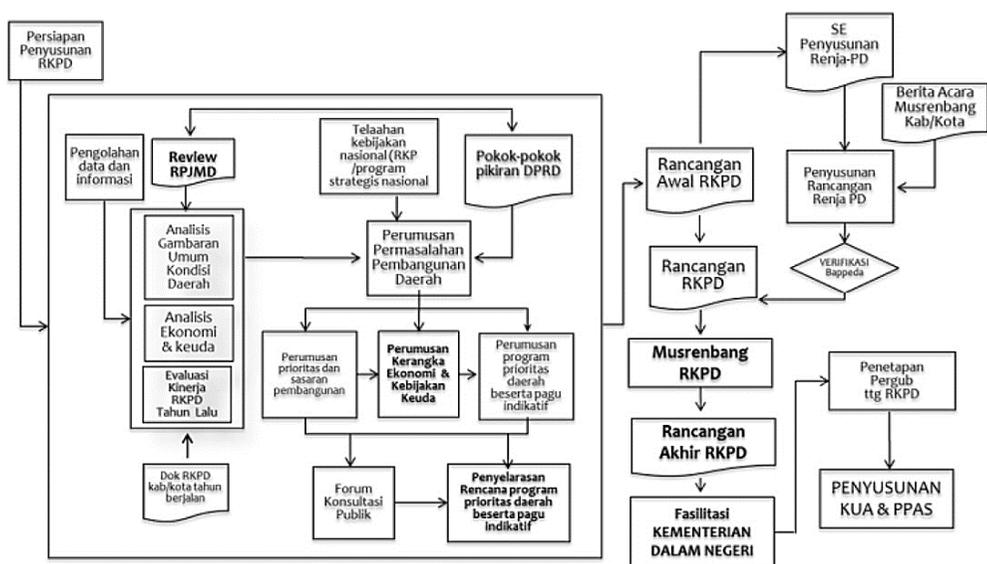
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

6. Penetapan RKPD

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat dengan daerah.

RKPD DIY Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan RPJMD DIY Tahun 2022-2027, Rancangan RKP Tahun 2025, Evaluasi Capaian RKPD periode sebelumnya serta perkembangan/arah kebijakan strategis daerah maupun nasional. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD juga harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional. RKPD yang telah ditetapkan digunakan juga sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Tabel 1-1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPDIY

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RKPDIY Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

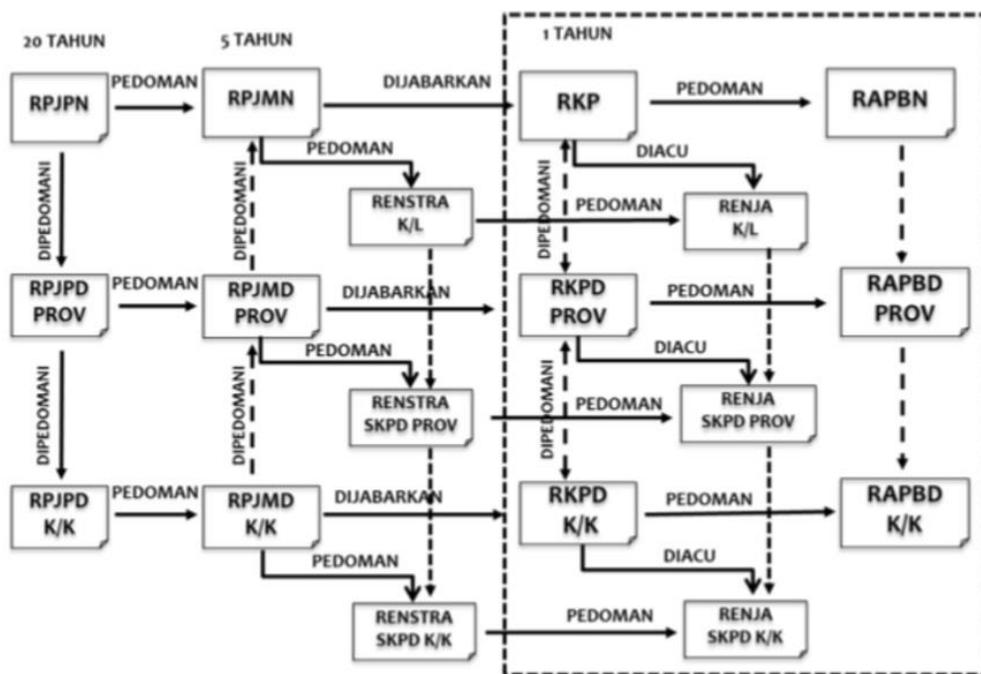
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Tahun 2008 Nomor 52);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12)
29. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);

30. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10);
32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 86);
33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Desain Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
34. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.



Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Tabel 1-2 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. RKPD memuat kondisi geografi daerah, hasil evaluasi pembangunan tahun

sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah, rancangan kerangka keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju.

Tujuan penyusunan RKPD adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/ Badan/ Lembaga Teknis Daerah/ Dinas Daerah/ Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2025.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen RKPD.

2. Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

3. Bab 3 Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

4. Bab 4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas pembangunan tahunan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD dan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan nasional.

5. Bab 5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Memuat mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan agar terjadi sinergitas dalam rangka mendukung capaian pembangunan DIY.

6. **Bab 6 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
7. **Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**
Mengemukakan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditargetkan pada tahun perencanaan RKPD.
8. **Bab 8 Penutup**

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah setingkat provinsi yang terdiri atas Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2012, DIY memasuki sejarah pemerintahan yang baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa DIY mempunyai bentuk dan susunan pemerintahan Istimewa. Bersifat istimewa karena pemerintah daerah di DIY merupakan keberlanjutan dari pemerintahan *nagari* Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dan sekaligus berproses menyesuaikan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY. Terdapat dimensi kesinambungan dan penyesuaian (*continuity and adaptivity*) secara bersamaan. Hal ini dilindungi keberadaannya sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Bentuk dan susunan pemerintahan DIY yang istimewa memiliki nilai dasar yang terbentuk dalam proses panjang yang terus dijaga dan dirawat sebagai kearifan lokal. Asas pendayagunaan kearifan lokal sebagai salah satu asas pengaturan

keistimewaan dilaksanakan untuk menjaga integritas Indonesia sebagai kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Pengakuan dan penegasan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik feodalisme melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dalam konsideran huruf b menyebutkan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya suatu NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945. Penetapan substansi Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-Bhineka-Tunggal-Ika-an. Penetapan substansi Keistimewaan DIY juga bertujuan untuk melembagakan peran dan tanggung jawab. Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Penetapan tersebut berlandaskan asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhineka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis, substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan provinsi. Substansi kewenangan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, wilayah DIY terletak di zona selatan Pulau Jawa bagian tengah, dengan bentuk wilayah yang menyerupai geometri segitiga. Puncak segitiga wilayah DIY merupakan titik batas paling utara yang terletak pada Puncak Gunung Merapi yang mempunyai ketinggian 2.911 m di atas permukaan air laut. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api paling aktif, diantara 127 gunung api aktif yang ada di Indonesia. Bagian alas segitiga wilayah DIY merupakan batas di sisi selatan berupa garis pantai yang menghadap Samudera Hindia memanjang dari timur ke barat sepanjang kurang lebih 113 km. Wilayah DIY umumnya tergolong subur dan berpotensi untuk ditanami berbagai komoditas pertanian

dengan karakteristik potensi sumberdaya alam yang berbeda di setiap kabupaten/kota. Kondisi alam yang indah dan unik juga berpotensi menjadi destinasi pariwisata.

Bentang alam DIY terdiri dari empat fisiografi utama; Satuan fisiografi Pegunungan Selatan, Satuan fisiografi Gunung Merapi, Satuan fisiografi Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo, dan Satuan fisiografi Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan. Satuan fisiografis Pegunungan Selatan merujuk pada kawasan geomorfologi karst yang terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kawasan geomorfologi karst merupakan fenomena bentang lahan *iconic* khas Gunungkidul. Kawasan karst yang kurang potensial untuk pertanian semusim. Wilayah Kabupaten Sleman, kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul bagian utara merupakan satuan fisiografi vulkanik Gunung Merapi. Bentuk lahan ini tersusun dari material vulkan muda yang kaya unsur hara dan sangat subur. Kabupaten Bantul bagian selatan adalah dataran aluvial pantai yang terletak antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo. Kawasan ini juga potensial untuk budidaya pertanian, khususnya pertanian semusim. Bagian barat DIY merupakan wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan fisiografi perbukitan denudasional di sisi utara dan dataran aluvial pantai pada sisi selatan, seperti juga yang ada di Kabupaten Bantul bagian selatan.

Sungai-sungai yang melintas di DIY merupakan salah satu pembentuk karakteristik lahan yang berpotensi memberi pengaruh (baik itu mendukung ataupun sebagai faktor pembatas) pengembangan wilayah, serta perkembangan penggunaan lahan di DIY. Sebagai faktor pendukung, sungai berhubungan dengan ketersediaan sumberdaya air. Sebagai pembatas, sungai berhubungan dengan zona perlindungan setempat dan mungkin juga zona rawan bencana banjir. Beberapa sungai besar yang melintas dan bermuara di wilayah pesisir DIY antara lain Sungai Opak Oyo, Sungai Progo, dan Sungai Bogowonto. Beberapa sungai kecil lainnya adalah Sungai Gajahwong, Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Serang. Semua sungai tersebut bermuara di kawasan pesisir Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Karakteristik batuan yang bersifat larut air pada kawasan karst di Gunungkidul menyebabkan sungai-sungai yang melintas disana menghilang dari permukaan menjadi aliran bawah permukaan (sungai bawah tanah). Beberapa subsistem aliran bawah tanah yang dominan antara lain subsistem Ngobaran, subsistem Baron, dan subsistem Bribin.

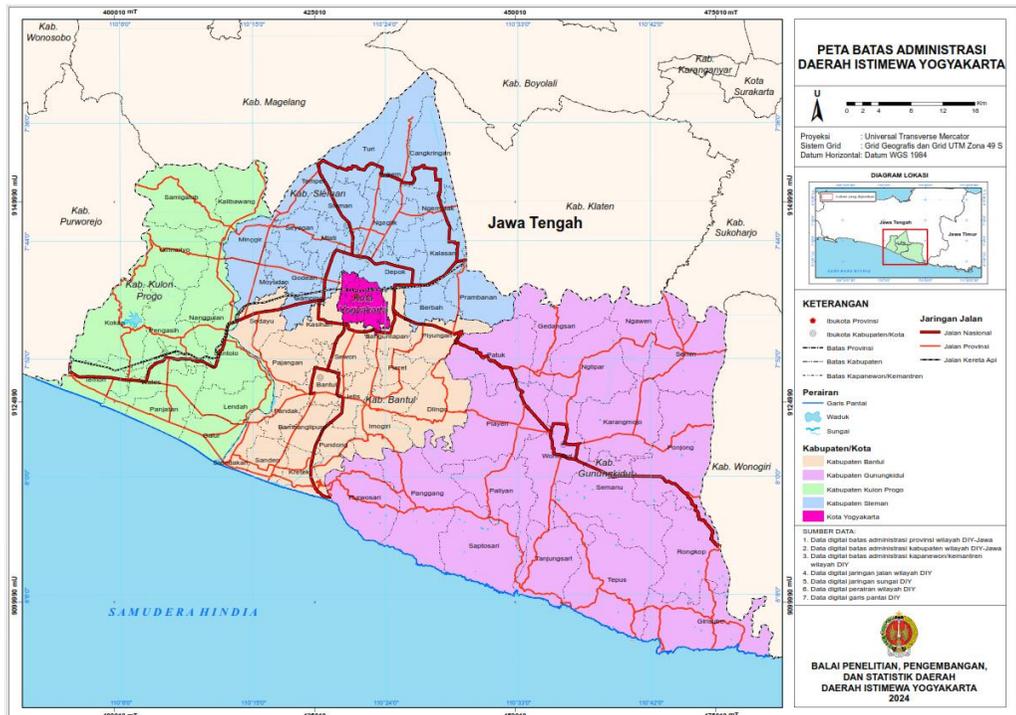
Ditinjau dari aspek demografi, hal yang perlu diperhatikan yaitu jumlah penduduk DIY yang mengalami peningkatan dan perubahan proporsi penduduk

berdasarkan kelompok umur yang akan berpengaruh pada karakteristik sumberdaya manusia yang ada. Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) jumlah penduduk DI Yogyakarta September 2020 sebesar 3.668.719 orang. Dengan luas daratan DIY sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau adalah seluas 3.170,645 km², maka secara general kepadatan penduduk DIY sebanyak 1.157,08 orang per km². Selama 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk DIY sebesar 0,58 persen. Jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di DIY hasil SP2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak ada di Kabupaten Sleman sebanyak 1.125.804 orang dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kota Yogyakarta yaitu 373.589 orang. Uraian dan penjelasan rinci terkait aspek Geografi dan Demografi adalah sebagai berikut.

2.1.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara astronomis wilayah DIY terletak pada posisi 7.33'- 8.12' Lintang Selatan dan 110.00'-110.50' Bujur Timur. Posisi geografis DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa, tepatnya di zona bagian selatan. Seluruh wilayah administrasi DIY dikelilingi oleh wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Bagian barat DIY berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Boyolali, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, bagian selatan dengan Samudera Hindia.



Sumber: BPPSD DIY, 2024

Gambar 2-1 Peta Administrasi DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/kota dan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan dilakukan penyesuaian nomenklatur beberapa perangkat pemerintah daerah. Penyesuaian nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mencantumkan nomenklatur lokal yang meliputi: 1) Kapanewon untuk sebutan Kecamatan di wilayah Kabupaten, dan Kemantren untuk sebutan Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta. Kapanewon dipimpin oleh Panewu dan kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja. 2) Kalurahan untuk sebutan Desa di wilayah Kabupaten dan Kelurahan untuk sebutan desa di wilayah Kota Yogyakarta.

Tingkatan pemerintahan dari atas ke bawah di DIY secara administratif terdiri atas 5 kabupaten/kota, 78 kapanewon/kemantren, dan 438 kalurahan/

kelurahan. Sedangkan jumlah pedukuhan di DIY adalah 4.508 dengan 7.102 Rukun Warga dan 26.896 Rukun Tetangga.

Tabel 2-1 Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten/ Kota	Kapanewon/ Kemantren	Kalurahan/ Kelurahan	Dusun	RW	RT
Kulon Progo	Wates	12	88	930	1.884	4.462
Bantul	Bantul	17	75	934	-	5.681
Gunungkidul	Wonosari	18	144	1.432	1.671	6.864
Sleman	Sleman	17	86	1.212	2.933	7.364
Yogyakarta	Yogyakarta	14	45	-	614	2.525
DIY		78	438	4.508	7.102	26.896

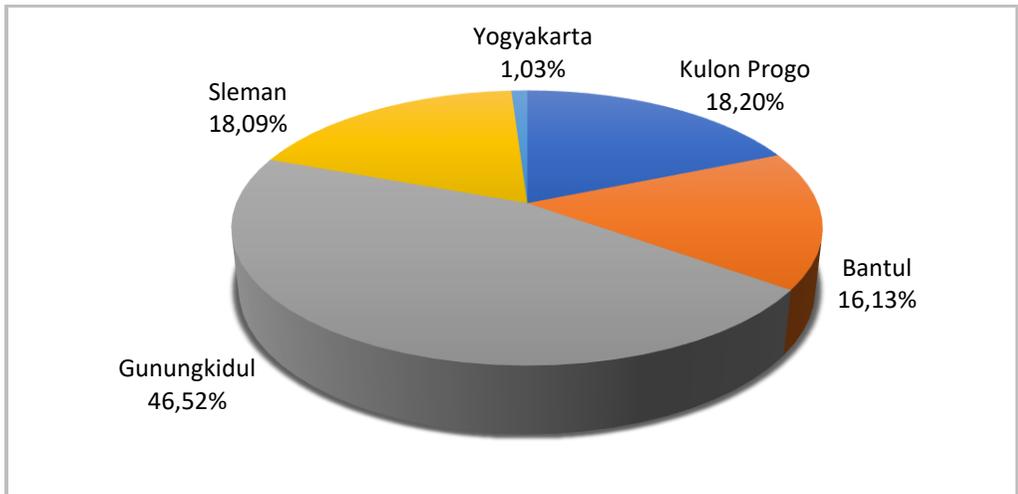
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Luas daratan DIY sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau adalah seluas 3.170,645 Km² atau 0,04% dari total luas Indonesia (1.892.555,47 Km²). DIY merupakan provinsi dengan luasan terkecil kedua di Indonesia setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kabupaten/kota dengan wilayah paling luas di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul dengan persentase luas wilayah sebesar 46,55% dari luas DIY. Sedangkan Kota Yogyakarta merupakan wilayah paling kecil dengan persentase sebesar 1,03% dari luas DIY.

Tabel 2-2 Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

No	Kode	Nama Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Km ²	%	Keterangan
1	34.01	Kab. Kulon Progo	577,224	18,20	Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
2	34.02	Kab. Bantul	511,705	16,13	
3	34.03	Kab. Gunungkidul	1.475,147	46,52	
4	34.04	Kab. Sleman	573,749	18,09	
5	34.71	Kota Yogyakarta	32,819	1,03	
		DIY	3.170,645	100	

Sumber: Kementerian Dalam Negeri 2022



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-2 Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY

2.1.1.1.2 Topografi

Topografi dideskripsikan secara kualitatif sebagai bentuk permukaan lahan, dan secara kuantitatif dinyatakan dalam satuan besaran sudut lereng (% atau derajat), arah lereng, panjang lereng, bentuk lereng dan posisi ketinggian suatu tempat diatas permukaan laut. Topografi DIY dipresentasikan dalam kemiringan lahan dan ketinggian lahan dengan penjabaran sebagai berikut:

1) Kemiringan lahan

Berdasarkan data Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY hasil analisis tahun 2022, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi enam kategori, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.126,48 Km², lahan dengan kemiringan 2-8% seluas 522,73 Km², lahan dengan kemiringan 8-15% seluas 302,80 Km², lahan dengan kemiringan 15-25% seluas 516,52 Km², lahan dengan kemiringan 25-40% seluas 332,83 Km² lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 367,03 Km².

2) Ketinggian lahan

Wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori ketinggian lahan, yaitu wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl sebesar 28,84%, wilayah dengan ketinggian 100-499 mdpl sebesar 65,65%, wilayah dengan ketinggian 500-

999 mdpl sebesar 5,04%, dan wilayah dengan ketinggian di atas 1000 mdpl sebesar 0,47%.

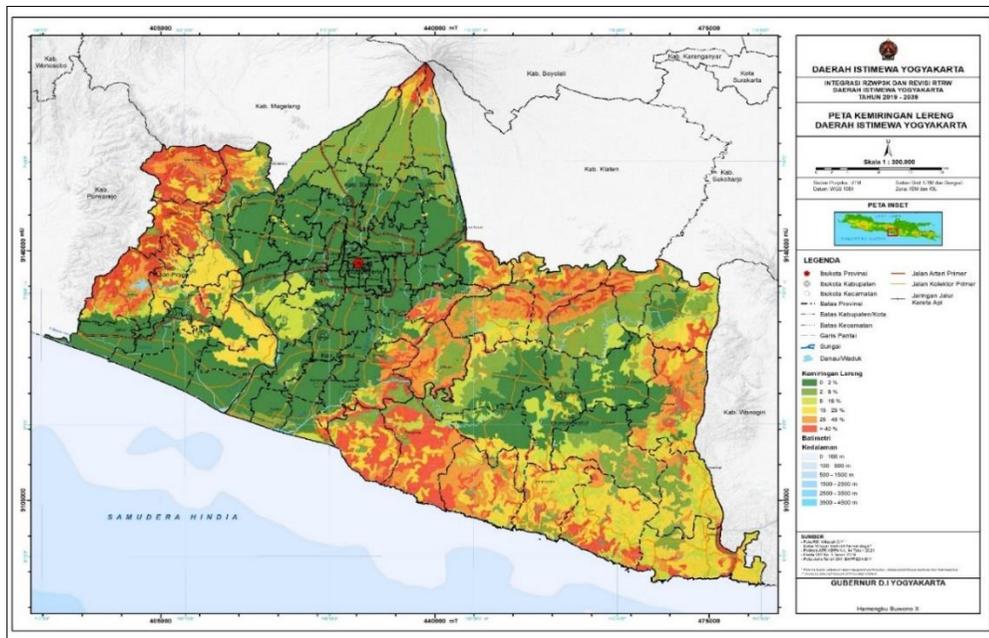
3) Unit Fisiografis

Di Wilayah DIY terdapat empat satuan fisiografi utama yaitu; fisiografi pegunungan selatan karst, fisiografi gunung api, fisiografi dataran aluvial (dataran rendah graben Bantul), dan fisiografi perbukitan denudasional Kulon Progo berikut dataran aluvial pantai di sisi selatan wilayah Kulon Progo. Di selatan DIY terletak Samudera Hindia yang juga kaya akan potensi sumber daya alam laut. Penjelasan tentang satuan fisiografis di DIY sebagai berikut:

- a. Satuan Pegunungan Selatan, seluas $\pm 1.656,25 \text{ km}^2$, ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Bantul bagian timur, yang merupakan kawasan geomorfologi karst berupa perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air permukaan. Di sebelah utara kawasan karst yaitu pada bagian tengah wilayah Kabupaten Gunungkidul berupa cekungan basin Wonosari. Wilayah karst merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
- b. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas $\pm 582,81 \text{ km}^2$, ketinggian 80 – 2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul. Satuan fisiografi ini merupakan bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air.
- c. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas $\pm 215,62 \text{ km}^2$, ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu, daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan fisiografis kawasan pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul. Khusus Pantai Parangtritis,

terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gump pasir tipe *barchan* yang merupakan fenomena langka di dunia;

- d. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas ± 706,25 km², ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil (3160,93).



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Pengolahan Data DEMNAS dan Citra ASTER, 2022

Gambar 2-3 Peta Kemiringan Lereng DIY

2.1.1.1.3 Klimatologi

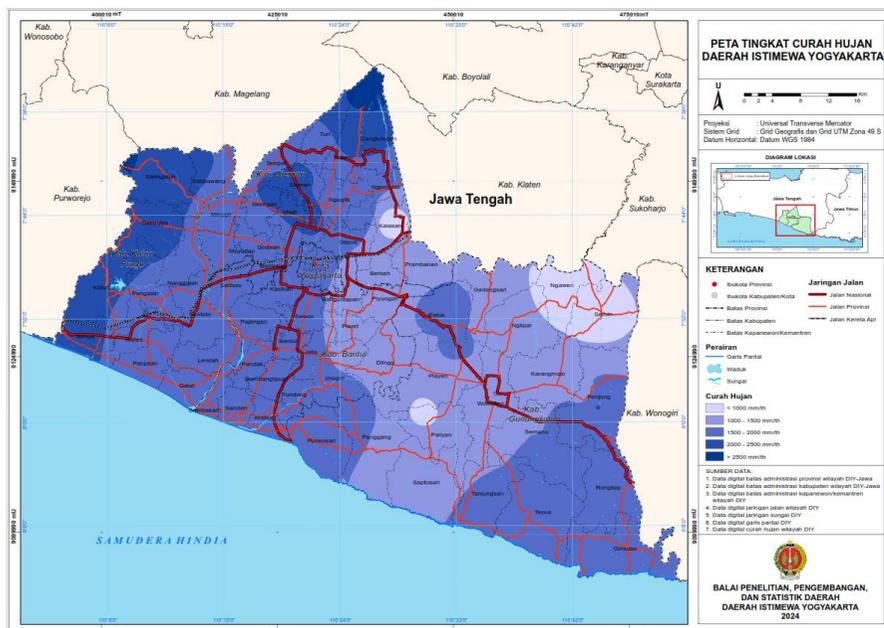
Kondisi iklim sangat mempengaruhi wilayah baik dari segi potensi sumber daya alam maupun potensi bencana alam. DIY terletak di wilayah yang dipengaruhi oleh tiga tipe iklim: musiman, tropis dan maritim. Iklim musiman sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah pada waktu tertentu. Periode pergantian angin normal adalah 6 bulan. Ada dua jenis iklim musiman: monsun barat daya (*monsoon* barat) dan monsun timur laut (*monsoon* timur). Dari Oktober hingga April, angin monsun barat daya bertiup dan dominan membawa hujan.

Monsun timur laut bertiup dari bulan April sampai Oktober, dengan karakter kering sehingga menjadi musim kemarau.

Sebagai bagian dari daerah beriklim tropis, kondisi iklim DIY juga dipengaruhi oleh iklim tropis, dengan suhu tinggi dan curah hujan yang tinggi. Posisinya yang dekat dengan Samudera Hindia, memberi pengaruh akibat adanya banyak penguapan air laut, yaitu kelembaban tinggi dan curah hujan yang tinggi pula.

Parameter iklim seperti curah hujan, suhu, kelembaban dan arah angin memiliki dampak yang signifikan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dianggap sebagai potensi cagar alam dan potensi alam yang berkelanjutan. Berikut adalah catatan DIY untuk tahun 2023:

- 1) Suhu minimum 20,70 °C dan suhu maksimum 33,00 °C.
- 2) Curah hujan bulanan tertinggi pada bulan Februari terjadi di Kabupaten Bantul sebesar 671 mm³ dan terendah sebesar 0 mm³ pada bulan September Oktober di seluruh Kabupaten/Kota.
- 3) Kelembaban rata-rata bulanan Minimum 75,00 dan Maksimum 87,00
- 4) Tekanan 989,50 mb hingga 994,1 mb;
- 5) Kecepatan angin rata-rata bulanan minimum 2 knot dan maksimum 4 knot.



Sumber: BPPSD, 2024

Gambar 2-4 Peta Curah Hujan DIY

2-10

2.1.1.1.4 Geologi dan Jenis Tanah

Formasi geologi DIY terdiri dari Aluvium (Qa), Formasi Gunungapi Merapi (Qvm), Endapan Vulkanik Merapi Muda (Qmi), Endapan Vulkanik Merapi Tua (Qmo), Formasi Kepek (Tm_{pk}), Formasi Wonosari - Punung (Tm_{wl}), Formasi Sentolo (Tm_{ps}), Formasi Oyo (Tmo), Formasi Wuni (Tmw), Formasi Sambipitu (Tm_{ss}), Formasi Semilir (Tms), Formasi Nglanggran (Tm_{ng}), Formasi Kebo-Butak (Tomk), dan Formasi Mandalika (Towm).

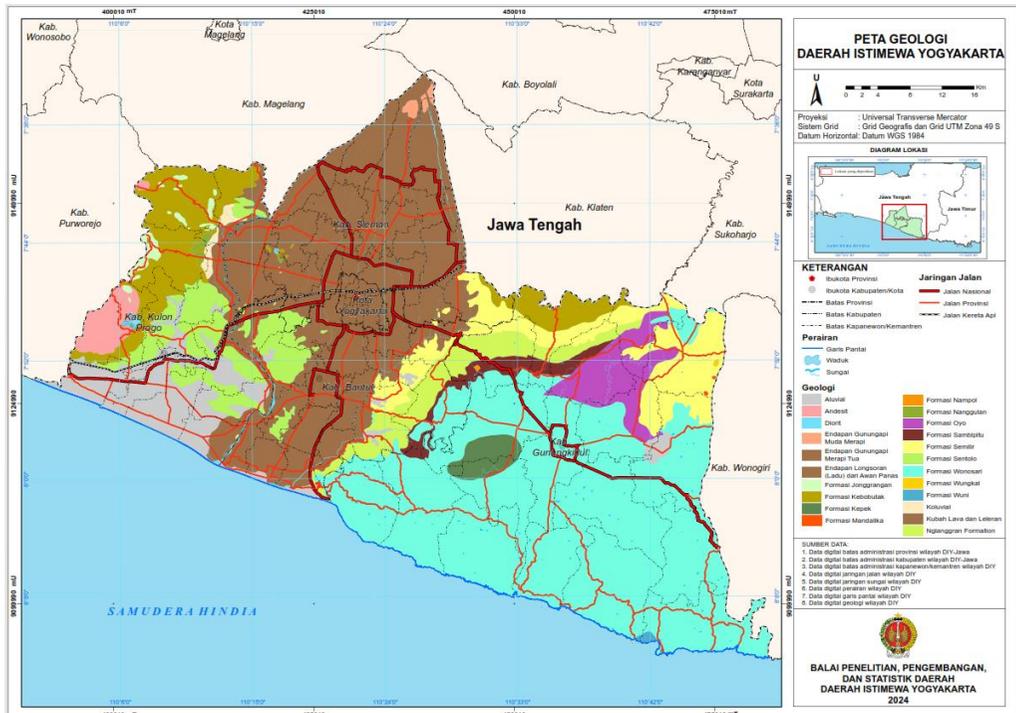
DIY mempunyai struktur geologi lipatan dan patahan. Lipatan terdiri dari antiklin dan sinklin terdapat pada singkapan Formasi Semilir (Tms), Formasi Oya (Tmo), Formasi Wonosari-Punung (Tm_{wl}) dan Formasi Kepek (Tm_{pk}). Patahan berupa sesar turun dengan pola antithetic fault block, terdapat antara lain pada terban Bantul.

- 1) Aluvium (Qa) Aluvium berumur Holosen dijumpai antara lain di Ponjong, sebelah timur Wonosari dan Nglabu sebelah barat laut Bantul, tersusun dari bahan endapan lempung, lumpur, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan berangkal. Wilayah ini mempunyai topografi datar-hampir datar, sehingga merupakan lahan yang baik untuk permukiman dan pertanian.
- 2) Formasi Gunungapi Merapi (Qvm) Formasi ini tersusun dari breksi vulkan, lava, dan tuf sebagai hasil endapan lahar Gunung Merapi yang masih aktif sampai kini. Aktivitas Gunungapi diperkirakan mulai Plestosen Akhir, terdapat di sekitar daerah Kaliurang.
- 3) Formasi Endapan Vulkanik Tua (Qmo) Keadaan formasi ini berpenyebaran relatif sempit yaitu di sebelah selatan G. Merapi yakni G. Plawangan dan G. Dengkeng. Endapan Vulkanik Tua (Qmo) tersusun dari breksi aglomerat dan leleran lava serta andesit dan basal mengandung olivin yang tidak dijumpai pada endapan lebih muda.
- 4) Formasi Kepek (Tm_{pk}) Formasi Kepek berumur Miosen Akhir sampai Pliosen dan terendapkan dalam lingkungan neritik, tersusun dari napal dan batu gamping berlapis baik. Formasi ini dijumpai di sekitar cekungan Karangmojo dan Sawahan.
- 5) Formasi Wonosari-Punung (Tm_{wl}) Formasi Wonosari-Punung berumur Miosen Tengah sampai Pliosen, berpenyebaran sangat luas dari Wonosari ke arah selatan. Formasi ini tersusun dari batu gamping konglomeratan, batu pasir, tufa, dan batu lanau. Di bagian selatan dijumpai batu gamping terumbu koral dengan inti terumbu yang masih membentuk ratusan bukit-bukit kecil membentuk fisiografi "Kerucut Karst" yang terkenal dengan nama Pegunungan Seribu. Karakteristik hidrogeologi dari batugamping

menyebabkan cadangan air tersimpan dalam tanah yang cukup dalam. Sesuatu hal yang sangat sulit untuk menemukan air permukaan di daerah karst karena memang kondisi batuan yang berupa karbonat yang memiliki karakteristik *soluble* dan mudah meloloskan air.

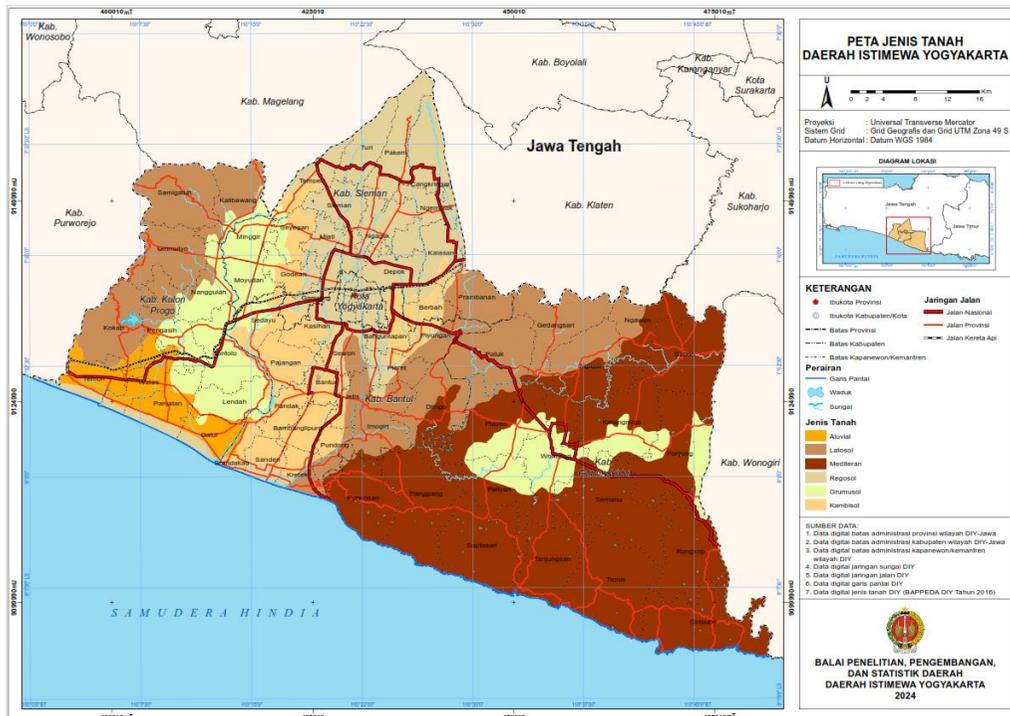
- 6) Formasi Sentolo (Tmps) Formasi Sentolo berumur Awal Miosen sampai Pliosen. Formasi ini dijumpai di bagian barat laut Bantul (Babadan, Ngasem, Kalilugu dan Banjarharjo), barat (Ngalahan, Gotakan dan sebelah barat daya (Krembungan dan Glagahan). Formasi ini tersusun dari batu gamping dan batu pasir napalan.
- 7) Formasi Oyo (Tmo) Formasi Oyo berumur Miosen Tengah sampai Miosen Akhir, berpenyebaran menghampar sepanjang aliran Sungai Oyo, sekitar Karangmojo, Dusun Sambeng, dan Nglipar. Batuan penyusun Formasi ini terdiri dari napal tufaan, tuf andesitan, dan batu gamping konglomeratan.
- 8) Formasi Sambipitu (Tmss) Formasi Sambipitu berumur akhir Miosen Bawah sampai Miosen Tengah, berpenyebaran di Maladan dan Kedungwanglu. Formasi ini tersusun dari batu pasir dan batu lempung.
- 9) Formasi Semilir (Tms) Formasi Semilir berumur Miosen Awal sampai awal Miosen Tengah, berpenyebaran di sekitar Wonosari, Imogiri, Sambeng, Ngawen, Karangmojo, Semin. Formasi ini tersusun dari tuf, breksi batuapung dasitan, batu pasir tufaan, dan serpih perselingan antara breksi tuf, breksi batuapung, tufa dasit, tufa andesit, serta batu lempung tufaan.
- 10) Formasi Kebo Butak (Tomk), Formasi Kebo Butak berumur Oligosen Akhir sampai Miosen Awal, berpenyebaran di wilayah pegunungan bagian utara Nglipar di Pegunungan Mintorogo, Gunung Jogotamu, dan Gunung Butak. Formasi ini tersusun dari batu pasir berlapis baik, batulanau, batulempung, serpih, tuf, dan aglomerat, sedangkan di bagian atas berupa perselingan batu pasir dan batu lempung andesit. Wilayah ini mempunyai lereng curam-hingga sangat curam sehingga proses erosi dan longsor sering terjadi dan perlu tindakan konservasi tanah. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa formasi ini di bagian atasnya merupakan perselingan yang tidak beraturan antara batuan sedimen berlapis (batu pasir dan batulanau) dengan bahan sedimen fasies vulkan berumur lebih muda. Ketidakteraturan susunan formasi tersebut terjadi karena proses pelipatan dan patahan sesudah formasi-formasi tersebut terbentuk.
- 11) Formasi Andesit Tua, Formasi ini diendapkan secara tidak selaras di atas Formasi Nanggulan. Litologinya berupa breksi volkanik dengan fragmen andesit, tuf, lapilli tuf, lapili breksi, sisipan aliran lava andesit, aglomerat, serta batu pasir volkanik yang tersingkap di daerah Kulon Progo. Formasi

ini tersingkap baik di bagian tengah, utara, dan barat daya daerah Kulon Progo yang membentuk morfologi pegunungan bergelombang sedang hingga terjal. Ketebalan formasi ini kira-kira mencapai 600 m. Berdasarkan fosil Foraminifera planktonik yang dijumpai dalam napal dapat ditentukan umur Formasi Andesit Tua yaitu Oligosen Atas.



Sumber: BPPSD DIY 2024

Gambar 2-5 **Peta Geologi DIY**



Sumber: BPPSD DIY 2024

Gambar 2-6 Peta Jenis Tanah DIY

Secara umum kondisi tanah di DIY tergolong cukup subur sehingga memungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Jenis tanah yang ada di wilayah DIY dapat digolongkan dalam beberapa kategori besar sebagai berikut:

- 1) Unit fisiografi vulkanik muda Gunungapi Merapi, mengandung tanah regosol seluas 521,44 Km² atau sekitar 16,43%. Tanah Regosol merupakan salah satu sub jenis tanah Entisol. Yaitu tanah yang berasal dari pelapukan material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lapili. Jenis tanah ini belum mengalami perkembangan sempurna dalam hal struktur maupun teksturnya. Regosol termasuk jenis tanah mineral yang kaya unsur hara sehingga memiliki tingkat kesuburan yang tinggi namun tidak bisa mengikat air. Regosol tersebar hampir diseluruh wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul bagian utara.
- 2) Jenis tanah berikutnya adalah Kambisol yang tersebar seluas 304,45 Km² atau sekitar 9,59%. Tanah Kambisol (menurut sistem FAO) merupakan tanah yang

mempunyai horison B kambik dan horison A umbrik atau molik, serta tidak terdapat gejala hidromorfik. Secara simpel kambisol bisa dikatakan sebagai tahap awal dari jenis tanah latosol. Dengan origin yang hampir sama maka kambisol pun memiliki tingkat kesuburan yang setara dengan latosol. Persebaran kambisol berada pada wilayah Kabupaten Sleman bagian barat dan timur serta hampir keseluruhan wilayah Kabupaten Bantul bagian tengah dan selatan.

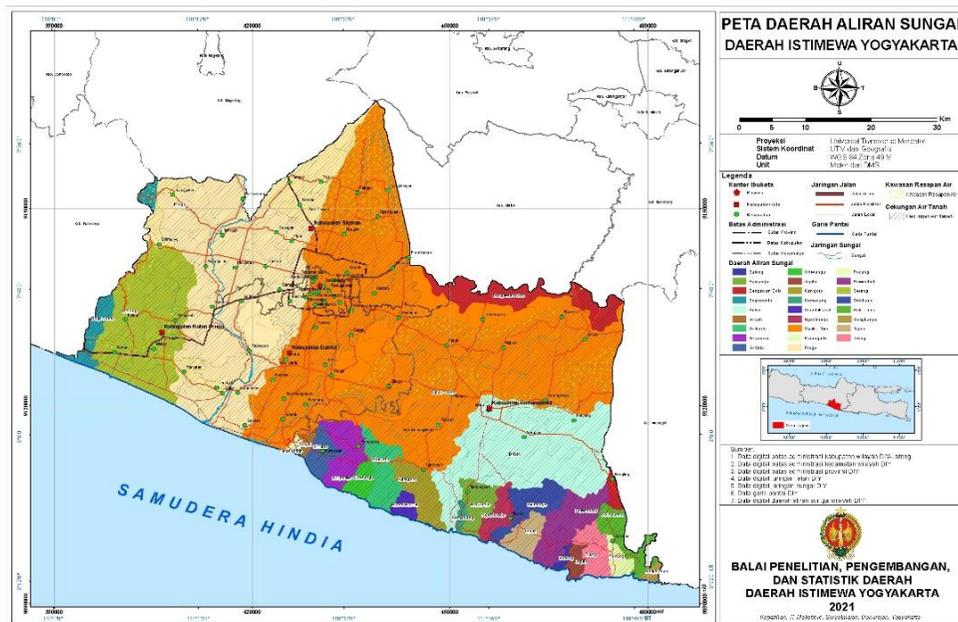
- 3) Jenis tanah aluvial di wilayah DIY tersebar seluas 120,95 Km² atau sekitar 3,81%. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang terbawa aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan dibagian hilir, dan berasosiasi dengan keberadaan sungai sebagai *transport agent* nya dari hulu. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu. Di wilayah DIY tanah aluvial tersebar dikawasan selatan Kabupaten Kulon Progo.
- 4) Di DIY juga ada tanah jenis grumusol seluas 407,31 Km² atau 12,83%. Tanah grumusol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tuffa vulkanik. Kandungan *organic* di dalamnya rendah jadi dapat disimpulkan tanah ini tidak subur dan kurang cocok untuk ditanami komoditas pertanian. Tekstur tanahnya kering dan mudah pecah terutama saat musim kemarau. Grumusol berwarna hitam dan persebarannya berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian tengah. Sifat kembang kerutnya yang tinggi memerlukan *treatment* khusus dalam bidang konstruksi karena sangat berisiko mempercepat kerusakan struktur bangunan atau badan jalan.
- 5) Jenis tanah mediteran adalah yang paling dominan di wilayah DIY yaitu seluas 1139,24 Km² atau 35,90%. Tanah jenis mediteran ini tersebar bagian timur, selatan, dan barat wilayah Kabupaten Gunungkidul. Tanah mediteran merupakan hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen. Warna tanah ini berkisar antara merah sampai kecoklatan. Yang menjadi masalah utama dari jenis tanah mediteran adalah ketersediaan air yang rendah dan tingginya pH tanah (>7). Tanah yang bersifat alkalis ini akan mengikat fosfat sehingga akan menjadi kendala bagi tanaman untuk tumbuh.
- 6) Kategori Jenis tanah yang terakhir distribusi penyebarannya berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo bagian utara dan Gunungkidul bagian utara. Jenis tanah ini adalah latosol, dengan luas penyebaran sekitar 680,11 Km² atau 21,43%. Tanah ini memiliki lapisan solum yang tebal sampai sangat tebal, yaitu dari 30 cm sampai 5 meter bahkan lebih. Memiliki batas horizon yang tidak jelas. Latosol meliputi tanah hasil pelapukan yang intensif dan perkembangan tanah yang lebih lanjut. Keadaan ini menyebabkan pelindian unsur basa, bahan organic, dan silica dengan menyisakan sesquoksida

berwarna merah. Umumnya kandungan unsur hara dari rendah sampai sedang. Tekstur tanah liat, struktur remah dan konsistensi gembur. Fitur menarik dari jenis tanah latosol adalah adanya akumulasi sesquioxides besi atau aluminium yang disebut laterit dan banyak dimanfaatkan untuk pembuatan batu bata, karena karakternya yang menjadi sangat keras pada kondisi udara sangat kering.

2.1.1.1.5 Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi berupa igir perbukitan di mana air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut. DAS menerima, dan menyimpan air hujan yang jatuh di atasnya kemudian mengalirkannya melalui alur alur sungai menuju ke muara (laut ataupun danau).

Wilayah DIY dilewati beberapa Daerah Aliran Sungai yang semuanya bermuara di Samudra Hindia. Sesuai Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan DAS, terdapat empat DAS yang menjadi sasaran DAS, yaitu DAS Opak-Oyo, DAS Progo, DAS Serang dan DAS Bribin. Selain empat DAS utama tersebut terdapat juga beberapa DAS mikro yang bersifat sub surface DAS yang kawasannya berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Pada sisi utara di sekitar perbatasan wilayah DIY juga merupakan daerah tangkapan air DAS Bengawan Solo. Peta kawasan DAS di DIY dapat dilihat pada Gambar Peta Daerah Aliran Sungai di bawah ini.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2021

Gambar 2-7 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) DIY

DAS Progo melintasi wilayah Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten dan Kota Magelang (Jawa Tengah), Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul. DAS Opak-Oyo melintasi wilayah Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. DAS Serang berada di Kabupaten Kulon Progo dimana Sungai Serang berfungsi untuk menyediakan air untuk Bendung Pengasih dan Pekik Jamal, yang mempunyai areal pelayanan masing-masing 2.757 ha dan 1.006 ha. DAS Bribin mencakup areal hulu di Panggung Massive Oyo dan hilir di Pantai Baron. Secara administratif sebagian besar areal DAS Bribin terletak di Kabupaten Gunungkidul.

Kondisi cadangan air tanah di wilayah DIY, dapat dilihat dari kondisi *aquifer* yang ada di wilayah tersebut. Pada prinsipnya, *aquifer* di wilayah DIY dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) *aquifer*, yaitu :

- 1) *Mayor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan besar, dan jumlah air diperkirakan dapat mencukupi banyak tujuan (irigasi

dan air baku). Termasuk daerah *mayor aquifer* adalah Formasi Merapi Muda, Yogyakarta dan Sleman.

- 2) *Minor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan cukup, dan dapat melayani kebutuhan air irigasi sangat terbatas dan air minum. Termasuk daerah *minor aquifer* adalah Formasi Wates, Gumuk pasir.
- 3) *Poor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan kecil, dan hanya dapat memenuhi kebutuhan air minum. Termasuk daerah *poor aquifer* adalah Formasi Jonggrangan dan Sentolo, Formasi Sambipitu dan Oyo, dan Andesit tua.
- 4) *Non Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan sangat kecil, dan praktis tidak ada air tanah. Termasuk daerah *non aquifer* adalah Formasi Kepek, Formasi Kebo, Butak, Semilir, dan Nglanggeran, serta Formasi Nanggulan.

Ketersediaan air pada 4 (empat) DAS yang ada di wilayah DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 2-3 Potensi Ketersediaan Air (juta m³)

NAMA DAS	Tahun					Satuan
	2019	2020	2021	2022	2023	
DAS Serang	141,72	207,00	234,00	240,00	240,00*	Juta m ³
DAS Progo	6.423,39	6.178,00	5.652,00	4.770,00	4.770,00*	Juta m ³
DAS Opak	1.103,39	1.446,00	858,00	1565,00	1565,00*	Juta m ³
DAS Oyo	756,70	1.090,00	529,00	681,00	681,00*	Juta m ³

Keterangan: *) Sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Kebutuhan air untuk tiap DAS yaitu DAS Serang sebesar 123,94 juta m³, DAS Progo sebesar 622,64 juta m³, DAS Opak sebesar 653,04 juta m³, DAS Oyo sebesar 173,84 juta m³, dan DTA Karst sebesar 31,38 juta m³. Sehingga kebutuhan air digunakan untuk domestik, perhotelan, pertanian, peternakan, dan perikanan tahun 2021 sebesar 1.605 juta m³.

Beberapa sungai yang melintas di wilayah DIY memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah karena memiliki potensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Secara kuantitas masing- masing sungai tersebut mempunyai debit berikut ini.

Tabel 2-4 Debit Rerata Sungai di DIY Tahun 2019-2023 (m³/detik)

Sub Elemen	Tahun									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Sungai Progo (Duwet)	0,18	183,54	0,30	561,00	0,20	345,41	18,60	310,00	18,60*	310,00*
Sungai Bedog (Guwosari)	0,18	33,66	0,05	30,90	1,84	28,90	0,01	23,20	0,01*	23,20*
Sungai Code (Kaloran)	0,01	38,25	0,01	12,70	0,18	8,55	0,01	9,45	0,01*	9,45*
Sungai Winongo (Padokan)	0,01	20,06	0,09	25,40	0,01	16,30	0,16	13,60	0,16*	13,60*
Sungai Gadjahwong (Papringan)	0,05	6,66	0,27	6,72	0,49	5,68	0,49	4,74	0,49*	4,74*
Sungai Opak (Pulo)	0,27	4,8	0,06	3,5	0,12	4,91	0,08	8,02	0,08*	8,02*

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024, *) Sementara

Selain sungai permukaan, DIY juga dilintasi Sungai Bawah Tanah (SBT). Wilayah sungai bawah tanah yang berada di Kabupaten Gunungkidul, yang mencakup areal seluas 924,27 Km². Debit rerata SBT Bribin sebesar 0,956 m³/detik, SBT Ngobaran 0,70 m³/detik dan SBT Baron debit rerata 0,80 m³/detik.

Tabel 2-5 Kapasitas Sungai Bawah Tanah di WS POS

Sungai	Kapasitas (Liter/Detik)
Bribin	956
Ngobaran	700
Baron	800

Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, terdapat 3 (tiga) Cekungan Air Tanah (CAT) di DIY yaitu CAT Yogyakarta Sleman, CAT Wates dan CAT Wonosari. CAT Yogyakarta-Sleman terletak pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia. Cekungan ini merupakan cekungan air tanah yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air DIY dan memiliki luas kurang lebih 1.200 Km², meliputi tiga wilayah kabupaten/kota di DIY yakni Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. CAT Wates terletak di sisi selatan Kulon

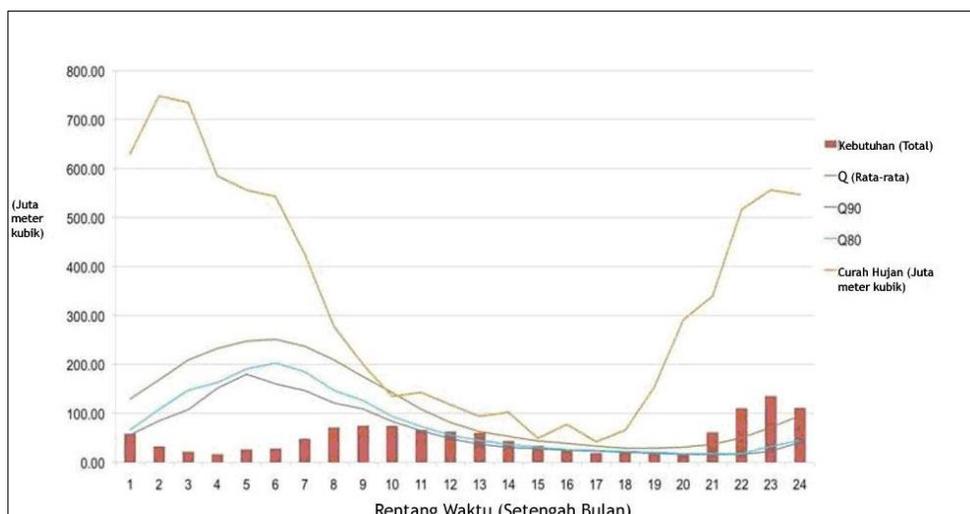
Progo untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Kulon Progo. CAT Wonosari berada di sisi selatan Gunungkidul, untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Gunungkidul.

Potensi ketersediaan air di WS POS secara total sebenarnya melebihi kebutuhan yang ada, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Grafik tersebut menunjukkan potensi yang jauh melebihi kebutuhan, satuan yang digunakan adalah dalam m³/detik sepanjang tahun dengan diskrit waktu per setengah bulan. Namun demikian, kenyataannya pada waktu-waktu tertentu suplai air yang terjadi belum bisa mengimbangi cukupnya prasarana pengambilan air pada lokasi-lokasi tertentu di WS POS. Pada beberapa wilayah memang potensi yang tersedia tidak dapat mencukupi kebutuhan yang ada, untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan setempat atau diambilkan dari wilayah yang mungkin bisa mensuplai.

Tabel 2-6 Imbangan Air Hidrologi Rerata Tahunan

Progo - Opak - Serang	
Imbangan Air - Hidrologi Rerata Tahunan dalam Juta M³	
Curah Hujan pada WS	8.769
	Hujan 2.119 mm/tahun
Hilang dalam sistem	3.469
Aliran WS	5.300
Imbangan Air - Penggunaan Rerata Tahunan dalam Juta M³	
Aliran pada WS	5.300
Konsumsi Bersih	1.060
Irigasi	947
RKI	113
Terbuang ke laut	4.240
Total	5.300

Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015

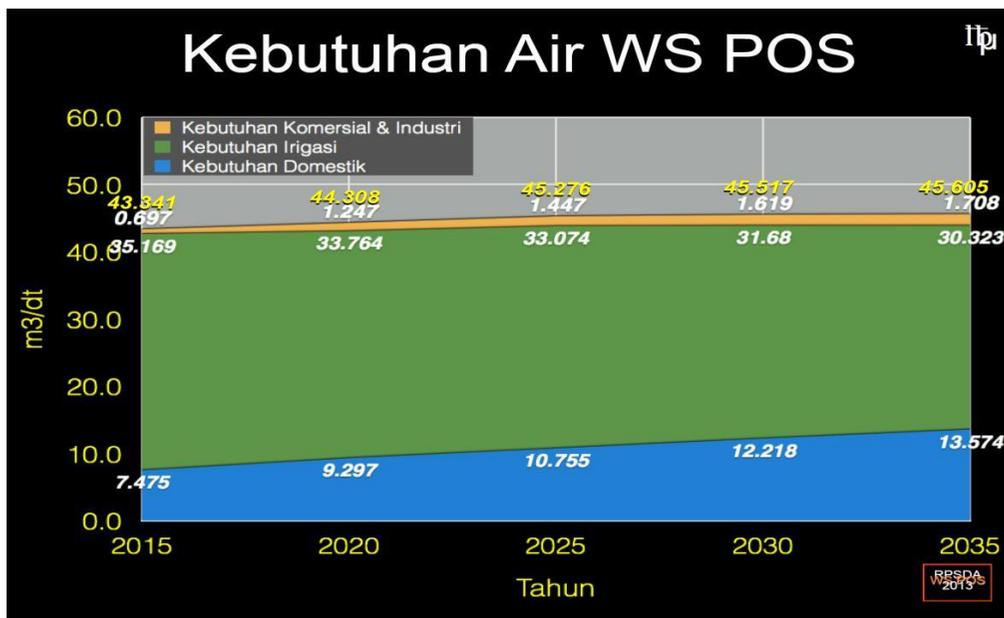


Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015

Gambar 2-8 Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS

DIY merupakan wilayah yang dominan dalam hal kebutuhan air di Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang (WS POS), terdapat kawasan strategis nasional poros Utara-Selatan (Tempel-Parangtritis) dan kawasan strategis nasional Metropolitan Yogyakarta, serta Ekogeowisata Karst di Gunungkidul. Untuk kawasan strategis Provinsi meliputi pusat pengembangan budidaya pertanian di Kulon Progo dan Sleman, pusat pengembangan budidaya pertanian lahan kering di Wonosari.

Total kebutuhan air per periode pada WS POS dibedakan menjadi Irigasi, Domestik, Komersial & Industri. Dapat dilihat bahwa kebutuhan untuk irigasi semakin menurun, hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian, disamping juga adanya peningkatan efisiensi. Kebutuhan irigasi pada tahun 2035 turun 4,849 m³/detik (16%) dibanding pada periode awal Tahun 2015. Untuk kebutuhan domestik mengalami peningkatan permintaan sebesar 5,804 m³/detik (79%), sedangkan kebutuhan komersial & industri terjadi peningkatan 1,011 m³/detik (45%). Dengan demikian komposisi pemakaian air di WS POS mengalami pergeseran dari semula 81% irigasi, 17% domestik, 2% komersial & industri pada Tahun 2015, menjadi 67% irigasi, 29% Domestik, dan 4% komersial & industri pada tahun 2035. Grafik Kebutuhan Air di WS POS selengkapnya disajikan pada Gambar berikut:



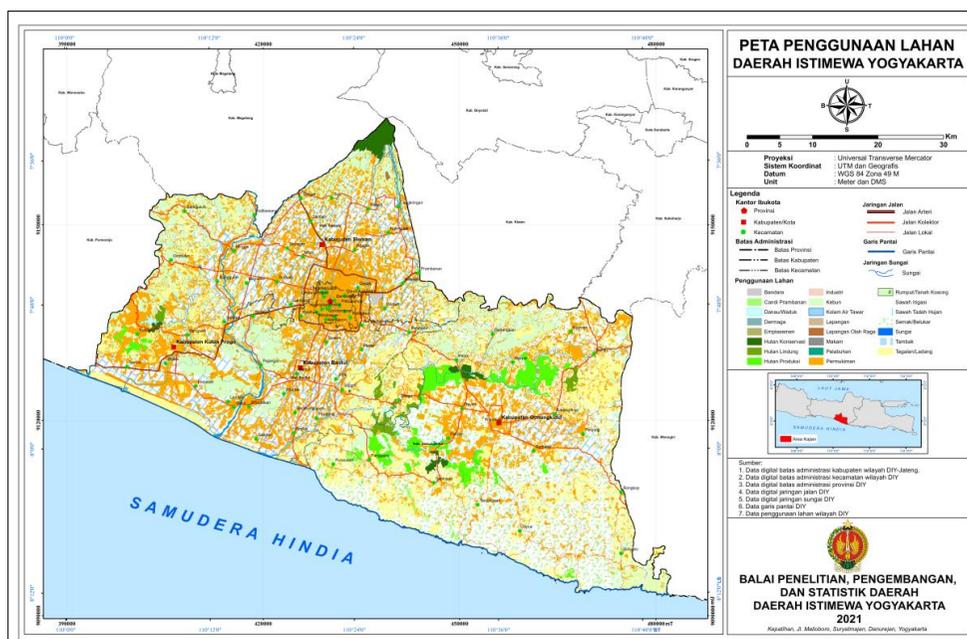
Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015

Gambar 2-9 Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS

2.1.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, persawahan, dan perkebunan. Penggunaan lahan juga dapat dikatakan sebagai pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pengertian penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu pemanfaatan lahan masa kini.

Penggunaan lahan di DIY didominasi permukiman, tanaman semusim lahan kering, kebun dan tanaman campuran, tanaman semusim lahan basah, dan hutan tanaman. Dominasi penggunaan lahan terbesar yaitu permukiman seluas 89.483,47 Ha atau sebesar 28,20%. Berikutnya lahan pertanian yang didominasi tanaman semusim lahan kering seluas 77.534,70 Ha atau sekitar 24,43%, kebun dan tanaman campuran seluas 55.090,38 Ha atau sekitar 17,36%, dan tanaman semusim lahan basah seluas 54.735,94 Ha atau sekitar 17,25%. Hutan tanaman seluas 21.050,31 Ha atau sekitar 6,63%. Penggunaan lahan DIY secara lengkap seperti tercantum pada Tabel berikut.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2021

Gambar 2-10 Peta Penggunaan Lahan DIY

Tabel 2-7 Penggunaan lahan di DIY Tahun 2023

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
Danau/Waduk	151,28	0,06%
Hutan	11.766,47	4,45%
Semak/Belukar	3.377,06	1,28%
Sungai	364,17	0,14%
Tambak	331,51	0,12%
Tegalan/Ladang	107.808,09	40,80%
Bangunan Bukan Permukiman	1.458,09	0,55%
Bangunan Permukiman	90.483	34,25%
Kebun dan Tanaman Campuran	47.716,85	18,06%
Lahan Terbuka	742,93	0,28%

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

2.1.1.1.7 Potensi Sumber Daya Wilayah Pesisir

Batasan wilayah pesisir seperti diatur dalam Undang Undang no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Wilayah pesisir DIY meliputi wilayah pesisir di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul, terdiri dari 13 Kapanewon Pesisir yaitu; Temon, Wates, Panjatan, Galur, di Kabupaten Kulon Progo, Srandakan, Sanden, dan Kretek di Kabupaten Bantul, Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo di Kabupaten Gunungkidul. Luas wilayah pesisir DIY pada matra darat adalah identik dengan luas wilayah kapanewon pesisir yaitu 736,2 Km² atau sekitar 23,1% dari total luas wilayah darat DIY. Ditambah matra lautnya yang sepanjang garis pantai 113 km x 12 mil laut = 2508,6 Km², maka luas total wilayah pesisir DIY adalah 3.244,8 Km². Luas total wilayah pesisir DIY tersebut lebih luas dari luas total seluruh daratan DIY 3.173,87 Km². Wilayah pesisir DIY berupa matra darat dan matra laut tersebut memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1) Perikanan tangkap laut (matra laut)

Kondisi perikanan tangkap di selatan Jawa mempunyai nilai potensi lestari sebesar 320.000 ton/tahun. Sumber daya perikanan tangkap yang potensial di DIY meliputi berbagai jenis ikan pelagis besar dan kecil, ikan demersal, serta ikan karang. Jenis ikan pelagis kecil yang potensial meliputi ikan layang dan ikan kembung. Ikan jenis pelagis besar diantaranya madidihang dan cakalang. Jenis ikan demersal yang nilai produksinya besar adalah ikan layur dan ikan manyung. Di sisi lain, untuk jenis ikan karang yang potensinya besar diantaranya ikan ekor kuning/pisang-pisang dan ikan kerapu karang. Beberapa jenis komoditi lain yang nilai produksinya tinggi dan potensial untuk dimanfaatkan adalah udang jerbung, kepiting, cumi-cumi dan gurita. Potensi sumber daya perikanan laut yang besar tersebut masih belum sebanding dengan tingkat pemanfaatannya. Hingga saat ini tingkat pemanfaatannya masih sekitar 2%. Hal ini berarti terjadi *underfishing* karena pemanfaatannya masih jauh berada di bawah potensi. Oleh karena itu, potensi sumber daya perikanan di selatan DIY masih terbuka luas untuk dimanfaatkan.

Sementara, bila dilihat lebih luas, DIY berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 yang mencakup 8 provinsi yang meliputi selatan Jawa

hingga Nusa Tenggara dengan total potensi 491.700 ribu ton/tahun. Dengan sifat laut yang *open access*, maka peningkatan kapasitas nelayan DIY diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ikan yang lebih luas pula.

2) Ekosistem terumbu karang

Terdapat 7 lokasi yang memiliki ekosistem terumbu karang di DIY yang semuanya terdapat di perairan Kabupaten Gunungkidul. Ekosistem terumbu karang tersebut terdapat di Pantai Ngrehenan, Pantai Gesing, Pantai Ngandong, Pantai Baron, Pantai Drini, Pantai Nglambor, dan Pantai Wediombo. Tutupan karang keras hidup di semua lokasi, namun hanya di Pantai Wediombo yang kondisinya tutupannya relatif lebih baik.

3) Ekosistem Mangrove

Ekosistem mangrove merupakan habitat berisi komunitas tumbuhan air yang berada di daerah tropis sepanjang pantai yang terlindung atau di muara sungai. Ekosistem mangrove sering disebut sebagai hutan bakau, hutan payau, atau hutan pasang surut dan merupakan suatu ekosistem transisi antara darat dan laut. Di dalam hutan mangrove, perairan dan tanah di bawahnya merupakan habitat berbagai satwa dan biota perairan. Luas hutan mangrove di DIY pada tahun 2018 seluas 8 ha di Pantai Baros Kabupaten Bantul dan seluas 9 Ha di kawasan Pasirmendit, Jangkaran, Temon, Kulon Progo. Kawasan hutan mangrove Baros telah ditetapkan dengan SK Bupati Bantul No. 284 Tahun 2014 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir Di Kabupaten Bantul seluas 132 Ha.

Mangrove di DIY tersebar di beberapa lokasi yang dapat dijumpai dengan membentuk suatu ekosistem maupun dalam kelompok-kelompok (spot) yang kecil. Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi di lokasi pendataan, ditemukan 12 spesies mangrove teridentifikasi di kawasan pesisir Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul, yang terdiri dari 6 komponen mangrove mayor (*Avicennia marina*, *Avicennia alba*, *Rhizophora stylosa*, *Rhizophora mucronata*, *Sonneratia caseolaris* dan *Nypa fruticans*) dan 6 komponen mangrove asosiasi (*Acanthus ilicifolius*, *Hibiscus tiliaceus*, *Ipomoea pes-caprae*, *Pandanus tectorius*, *Sesuvium portulacastrum* dan *Terminalia cattapa*)

4) Ekosistem Gumuk Pasir

Di pesisir Parangtritis terbentuk gumuk pasir aeolian tipe barkhan yang jarang dijumpai di wilayah iklim tropika basah. Gumuk pasir di Parangtritis bahkan

merupakan satu-satunya daerah tropis yang terbentuk barukan. Gumuk pasir terbentuk dari pasir yang terbawa ke laut oleh Kali Opak dari material vulkanik hasil letusan Gunung api Merapi.

Ekosistem gumuk pasir dijadikan sebagai habitat oleh berbagai hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dapat hidup pada wilayah gumuk pasir karena gumuk pasir menyimpan cadangan air lensas yang cukup banyak. Tumbuhan yang tumbuh secara alami di kawasan gumuk pasir antara lain adalah rumput katang-katang, kaktus, bunga tapak dara, siwalan, rumput alang-alang, pandan, dan leresede. Lebatnya tumbuhan pada bagian barat gumuk pasir menjadikan gumuk pasir ditempati oleh berbagai hewan khususnya burung.

Berbagai macam jejak aktivitas kebudayaan juga dapat ditemukan di kawasan gumuk pasir dan sekitarnya. Keterdapatannya situs budaya yang ada di kawasan ini menjadikan salah satu magnet kegiatan budaya di kawasan ini. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, terdapat 15 situs alam dan budaya yang terdapat di sekitar kawasan gumuk pasir Kapanewon Kretek. Hal ini membuktikan bahwa gumuk pasir selain memiliki keunikan alam juga memiliki peranan yang penting dalam kegiatan budaya.

5) Pariwisata

Destinasi wisata yang banyak terdapat di pesisir dan pulau-pulau kecil DIY sebagian besar didominasi oleh wisata pantai. Terdapat 70 wisata pantai di DIY yang terdiri dari 60 pantai di Kabupaten Gunungkidul, 6 pantai di Kabupaten Bantul, dan 4 Pantai Kabupaten Kulon Progo yang sering dikunjungi wisatawan nusantara atau wisatawan mancanegara. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatahan DIY Tahun 2012-2025 ditetapkan perwilayahan pembangunan destinasi wisata pesisir, yaitu Kawasan Glagah-Trisik dan sekitarnya; Kawasan Parangtritis-Depok dan sekitarnya; Kawasan Baron-Sundak dan sekitarnya; serta Kawasan Siung-Wediombo-Sadeng dan sekitarnya.

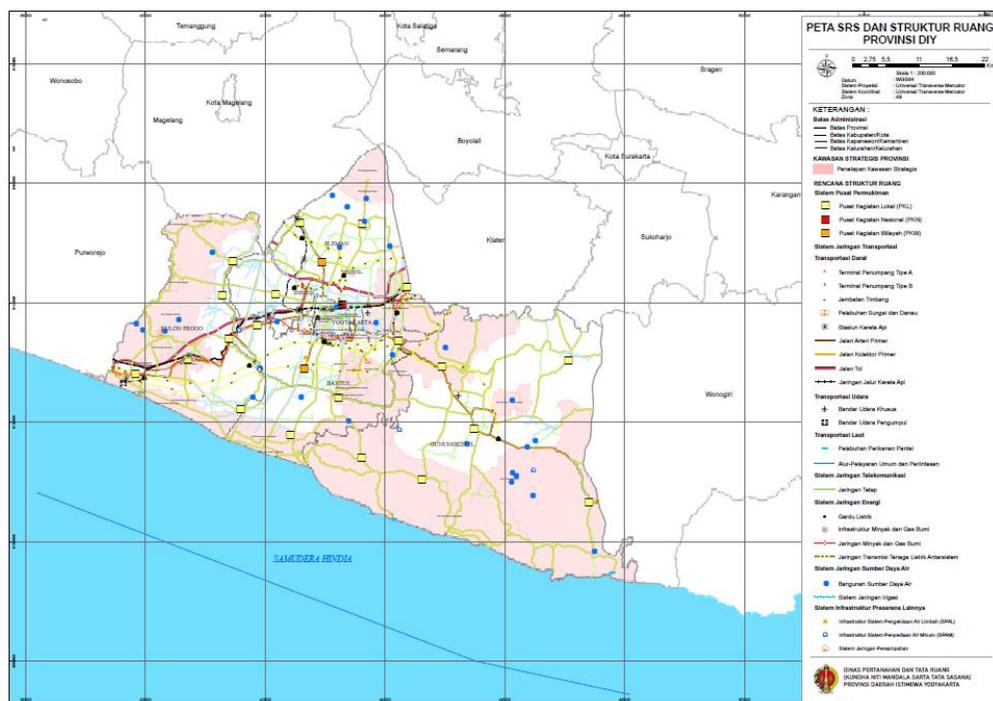
6) Energi Baru Terbarukan

Beberapa potensi energi alternatif yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir DIY antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Potensi tenaga air di DIY yang dapat dimanfaatkan untuk PLTMH mencapai 763,6 Kw. Potensi intensitas radiasi matahari mencapai 4,5kWh/m dengan potensi radiasi maksimum terjadi pada pukul 10.00 WIB - 14.30 WIB hampir diseluruh wilayah untuk pengembangan PLTS. Kapasitas potensi PLTB

di sepanjang pantai Yogyakarta mencapai 10 MW dengan kecepatan angin sebesar 2,5 – 4 m/s. Bahkan di Sundak, Srandakan, Baron dan Pantai Samas kapasitas potensi PLTB mencapai 10 hingga 100 MW dengan kecepatan angin sebesar 4-5 m/s. Selain itu, energi gelombang laut juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi alternatif, terutama di Kapanewon Saptosari.

2.1.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

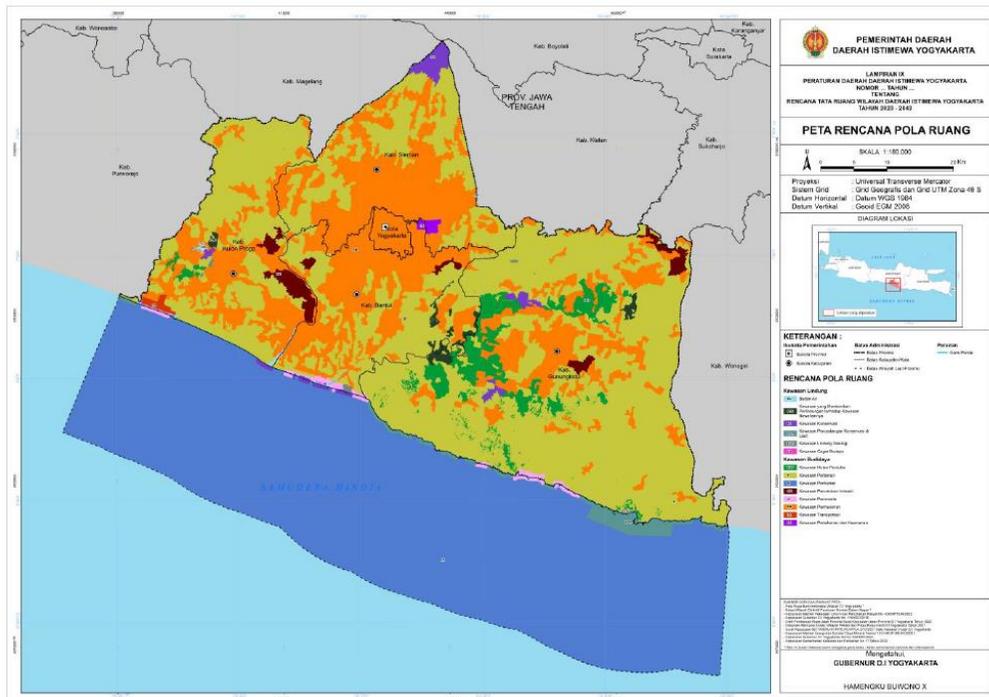
Pengembangan wilayah digambarkan sebagai upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan keruangan atau spasial dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan fisik termasuk mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan. Potensi pengembangan wilayah DIY sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2023-2043 bertujuan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah yang meliputi ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, indikasi program utama jangka menengah dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang berada pada Kawasan budidaya dan Kawasan strategis di wilayah DIY. Berdasarkan Perda DIY No 10 Tahun 2023 tersebut, potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana struktur ruang memperhatikan potensi dan kearifan lokal daerah yang meliputi sistem pusat permukiman yang terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); sistem jaringan transportasi; sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan sistem jaringan prasarana lainnya. Peta rencana struktur ruang DIY berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043

Gambar 2-11 Peta Rencana Struktur Ruang DIY Tahun 2023 – 2043

Sedangkan potensi pengembangan wilayah DIY sesuai rencana pola ruang pada kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan. Peta rencana pola ruang DIY berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043

Gambar 2-12 Peta Rencana Pola Ruang DIY Tahun 2023 – 2043

Potensi pengembangan yang berada pada kawasan strategis di wilayah DIY terdiri atas Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya yang terdiri atas Kawasan Strategis Kasultanan dan Kawasan Strategis Kadipaten.

Kawasan strategis kasultanan terdiri atas Kawasan Keraton; Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri; Kawasan sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak; Kawasan Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede; Kawasan Masjid Pathok Nagoro; Kawasan Gunung Merapi; Kawasan Pantai Samas-Parangtritis; Kawasan Kerto-Pleret; Kawasan Kotabaru; Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo; Kawasan Sokoliman; Kawasan Perbukitan Menoreh; Kawasan Karst Gunungsewu; Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul. Sedangkan Kawasan Strategis Kadipaten terdiri atas Kawasan Puro Pakualaman; Kawasan Makam Girigondo; Kawasan Pusat Kota Wates; dan Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo.

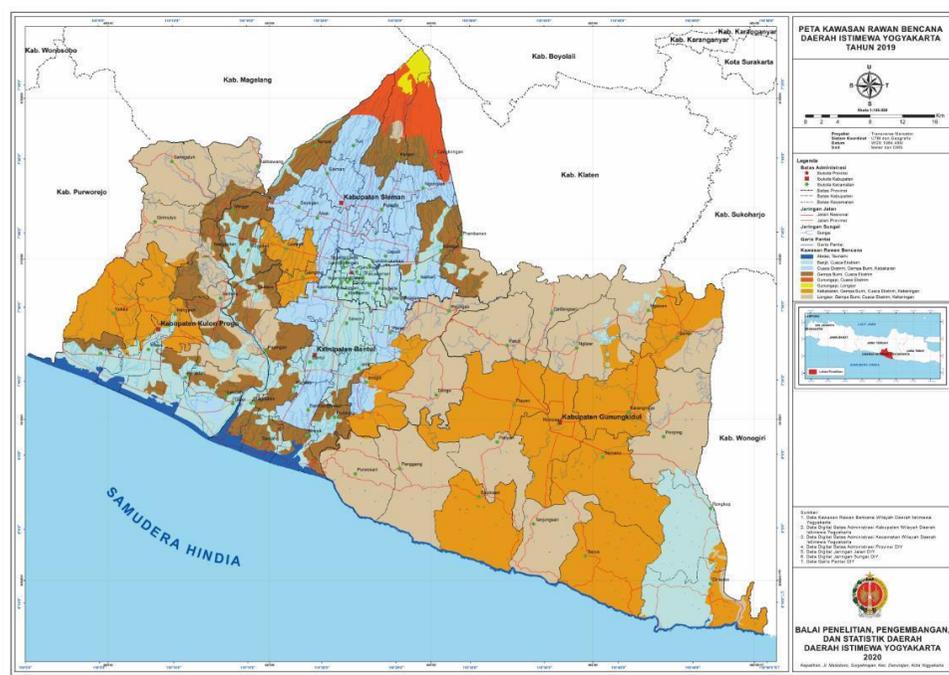
2.1.1.1.9 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana DIY sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 10 tahun 2023 tentang RTRW DIY Tahun 2023-2043, meliputi:

- a. Kawasan rawan bencana alam geologi yaitu kawasan rawan letusan gunung api yang terdapat di Kapanewon Turi, Kapanewon Pakem, dan Kapanewon Cangkringan di Kabupaten Sleman, dengan luas 3.355,86 (tiga ribu tiga ratus lima puluh lima koma delapan enam) ha.
- b. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Kretek; Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Patuk, Kapanewon Playen, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Semin, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Tepus, dan Kapanewon Wonosari; Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Cangkringan, Kapanewon Minggir, Kapanewon Pakem, Kapanewon Prambanan, dan Kapanewon Turi; dan Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Kokap, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Samigaluh, dan Kapanewon Temon.
- c. Kawasan rawan tsunami terdapat di Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, dan Kapanewon Galur; Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Kretek; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon GiriSubo, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Tepus.
- d. Kawasan rawan gelombang pasang terdapat di Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, dan Kapanewon Galur; Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Kretek; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Purwosari, Kapanewon Panggang, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon GiriSubo.

- e. Kawasan rawan bencana banjir di Kawasan di sekitar sungai yang melintasi Kota Yogyakarta; Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Galur, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Kokap, Kapanewon Lendah, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Sentolo, Kapanewon Temon, dan Kapanewon Wates; Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Berbah, Kapanewon Depok, Kapanewon Gamping, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Minggir, Kapanewon Moyudan, Kapanewon Sleman, dan Kapanewon Tempel; Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Bantul, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Panggang, Kapanewon Semin, dan Kapanewon Wonosari.
- f. Kawasan rawan gempa bumi terdapat di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan, di Kabupaten Bantul; Kapanewon Galur, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Lendah, Kapanewon Sentolo dan Kapanewon Pengasih di Kabupaten Kulon Progo; dan Kapanewon Mlati, Kapanewon Depok, Kapanewon Berbah, Kapanewon Prambanan, Kapanewon Kalasan, dan Kapanewon Sleman, di Kabupaten Sleman.
- g. Kawasan rawan bencana kekeringan terdapat di Kabupaten Sleman yakni Kapanewon Prambanan; Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Pengasih, Kapanewon Kokap, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Kalibawang, dan Kapanewon Samigaluh; Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Dlingo; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Girisubo, Kapanewon

Semanu, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Wonosari, dan Kapanewon Playen.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2021

Gambar 2-13 Peta Rawan Bencana DIY

Tabel 2-8 Kawasan Rawan Bencana di Wilayah DIY Tahun 2018 - 2022

No	Jenis Kawasan Rawan Bencana (KRB)	Luas KRB (Ha) pada Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*)
1	KRB Banjir	n/a	n/a	138.546,00	154.155,32	154.155,32
2	KRB Banjir Bandang	n/a	n/a	2.347,00	0,00	0,00
3	KRB Gelombang Ekstrem dan Abrasi	n/a	n/a	119.781,00	2.170,19	2.170,19
4	KRB Kekeringan	n/a	n/a	323.522,00	313.314,97	313.314,97
5	KRB Letusan Gunungapi	n/a	n/a	9.302,00	9.370,56	9.370,56
6	KRB Dampak Cuaca Ekstrem	n/a	n/a	2.155,00	128.300,57	128.300,57
7	KRB Tanah Longsor	n/a	n/a	42.132,00	42.434,54	42.434,54
8	KRB Terdampak Gempa Bumi	n/a	n/a	323.071,00	182.115,00	182.115,00

No	Jenis Kawasan Rawan Bencana (KRB)	Luas KRB (Ha) pada Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*)
9	KRB Terdampak Tsunami	n/a	n/a	7.317,00	7.246,46	7.246,46
10	KRB Bahaya Epidemii dan Wabah Penyakit	n/a	n/a	36,00	36,00	36,00
11	KRB Terdampak Kegagalan Teknologi	n/a	n/a	161,00	146,63	146,63
12	KRB Kebakaran Hutan dan Lahan	n/a	n/a	323.363,00	220.853,54	220.853,54

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2023, *) data sementara*

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Tingkat risiko bencana dianalisis melibatkan variabel Tingkat Bahaya, Tingkat Kerentanan, dan Tingkat Kapasitas yang ada pada suatu daerah. Tingkat Bahaya (*hazard*) diperoleh diantaranya dengan menghitung parameter fisik suatu kawasan seperti topografi, kemiringan lereng, jenis tanah, ketebalan tanah, jenis batuan dasar, penutup lahan, dan parameter lain yang terkait dengan suatu jenis bahaya tertentu. Penilaian Tingkat bahaya juga memperhatikan catatan sejarah kejadian bencana masa lalu pada daerah tersebut. Rincian Tingkat Bahaya, Tingkat Kerentanan, Tingkat Kapasitas, dan Tingkat Risiko Bencana di DIY, seperti tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2-9 Tingkat Bahaya dan Risiko Bencana di Wilayah DIY Tahun 2022-2026

No.	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1.	Banjir	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
2.	Banjir Bandang	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
3.	Covid-19	TINGGI	RENDAH	TINGGI	RENDAH
4.	Cuaca Ekstrim	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
5.	Epidemi Wabah Penyakit	RENDAH	RENDAH	TINGGI	RENDAH
6.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
7.	Gempa Bumi	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
8.	Kebakaran Hutan dan Lahan	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
9.	Kegagalan Teknologi	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH
10.	Kekeringan	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
11.	Letusan Gunungapi Merapi	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
12.	Likuifaksi	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
13.	Tanah Longsor	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

No.	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
14.	Tsunami	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana DIY Tahun 2022-2026

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Tingkat Bahaya di DIY didominasi oleh bencana dengan tingkat bahaya tinggi yakni 11 dari 14 jenis bencana. Adapun bencana dengan tingkat bahaya rendah yaitu Epidemii Wabah Penyakit dan kegagalan teknologi serta likuifaksi dengan tingkat bahaya sedang. Penentuan tingkat bahaya tersebut diperoleh berdasarkan luas kawasan terpapar bahaya, selain itu juga mengacu pada peta bahaya untuk tiap potensi bencana yang mengancam di wilayah DIY.

Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial di DIY antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Sementara itu, potensi bencana yang disebabkan oleh faktor non alam antara lain, gagal teknologi, epidemii, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Namun demikian frekuensi dan kerawanan bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial dan non alam, selama ini masih relatif kecil.

Tabel 2-10 Indikator Risiko Bencana di Wilayah DIY tahun 2018-2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	142,24	140,92	125,15	124,15	119,56 *	108,15

Sumber: Dataku Bappeda DIY 2022, BNPB;IRBI 2020, BNPB; B-002/BNPB/PERB/SS.01.02/01/2023

IRBI dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik, dengan demikian berdasarkan data di atas, Indeks Risiko Bencana di DIY semakin baik dari tahun ke tahun meskipun masih dalam kategori kelas Sedang.

Selama tahun 2018 -2023, bencana alam yang cukup sering terjadi di DIY adalah longsor, angin ribut, kebakaran, dan gempa bumi. Pada tahun 2023, bencana alam paling tinggi adalah gempa bumi yang terjadi sebanyak 1.756 kali. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan korban meninggal akibat bencana karena terjadinya pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, menunjukkan korban meninggal 27, luka luka 176 orang, hilang 13 orang, menderita 16.409 orang dan mengungsi 389 orang.

Tabel 2-11 Frekuensi Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2017 - 2023

No	Jenis Bencana Alam	Tahun						Satuan	Sumber Data
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Longsor	216	506	475	351	617	99	kali/tahun	BPBD
2	Banjir	12	12	15	16	70	14	kali/tahun	BPBD
3	Angin Ribut	147	168	167	156	165	149	kali/tahun	BPBD
4	Kebakaran Rumah dan Pemukiman	270	542	255	187	106	459	kali/tahun	BPBD
5	Gempa Bumi	124	122	135	245	756	1756	kali/tahun	BPBD
6	Gunung Meletus	12	4	9	2	2	1	kali/tahun	BPBD
7	Tsunami	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	kali/tahun	BPBD
8	Badai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	kali/tahun	BPBD
9	Kebakaran Hutan	0	0	0	0	1	250	kali/tahun	BPBD
10	Kekeringan	1	1	1	0	0	2	kali/tahun	BPBD

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Tabel 2-12 Korban Bencana DIY Tahun 2019, 2021, dan 2023

Jumlah Korban Bencana	2019	2021	2023
Meninggal	13	5.269	27
Luka-Luka	50	156.987	176
Hilang	0	0	13
Menderita	0	0	16.409
Mengungsi	29	118	389

Sumber: BPBD DIY, 2024

2.1.1.2 Aspek Demografi

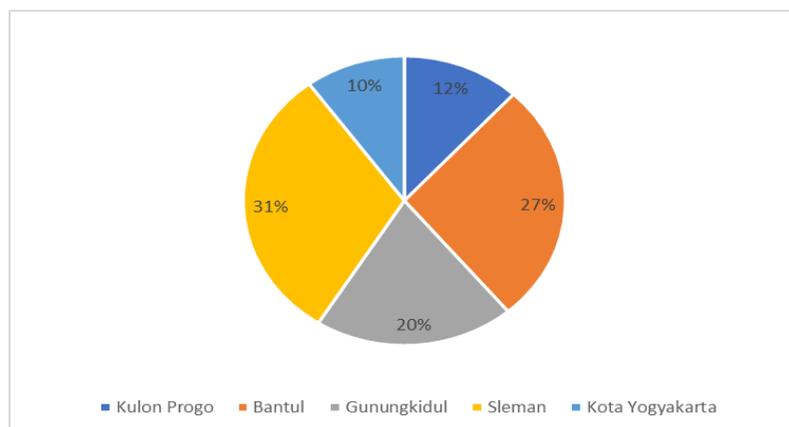
Jumlah penduduk DIY pada tahun 2018 sebanyak 3.802.872 jiwa. Selama beberapa tahun terakhir, *sex ratio* penduduk DIY selalu pada kisaran 97 – 98, yang berarti bahwa proporsi dari jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan angka *sex ratio* penduduk DIY tahun 2018 hingga tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2-13 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di DIY (Jiwa)
Tahun 2019 – 2023**

Rincian	2019	2020	2021	2022	2023
Total	3.802.872	3.842.932	3.668.719	3.687.770	3.712.570
Laki-Laki	1.881.478	1.901.735	1.817.927	1.826.800	1.838.440
Perempuan	1.921.394	1.941.197	1.850.792	1.860.970	1.874.130
Sex Ratio	97,92	97,97	98,22	98,16	98,09

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Sebaran penduduk antar wilayah di DIY tidak merata. Pada tahun 2023 Kabupaten Sleman merupakan wilayah berpenduduk paling banyak, yaitu sebanyak 1.157.290 jiwa atau 30,97% dari total penduduk DIY. Kemudian, Kabupaten Bantul dengan wilayah berpenduduk paling banyak kedua yaitu sebanyak 1.009.430 jiwa atau sekitar 27,02%. Sementara itu, wilayah yang berpenduduk paling sedikit adalah Kota Yogyakarta yaitu sebanyak 375.700 jiwa (10,05%).



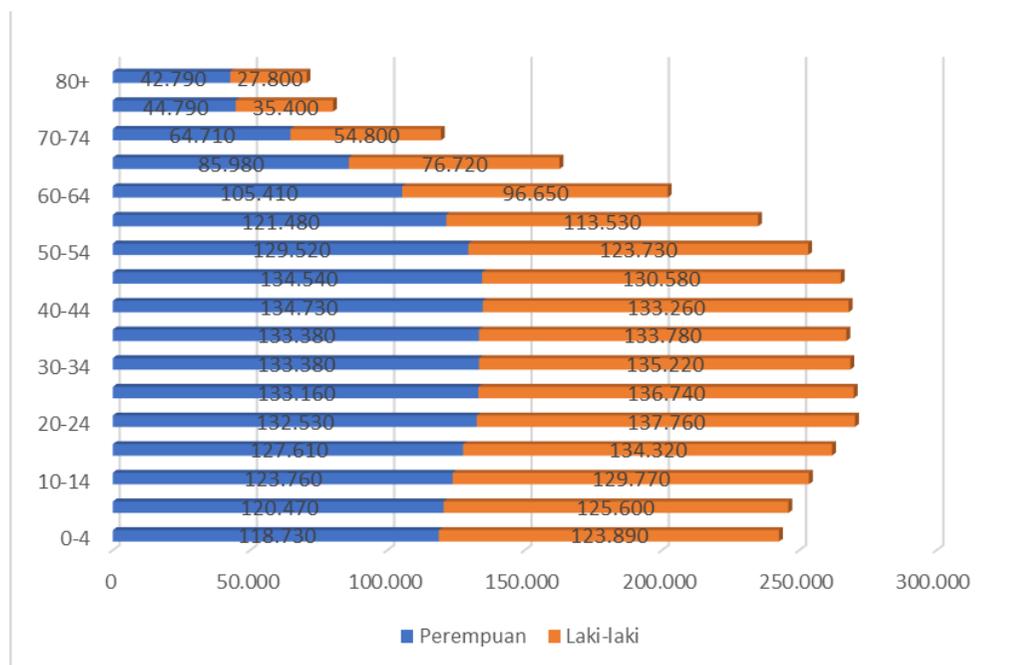
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023 (Data Diolah)

**Gambar 2-14 Persentase Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2023**

Berdasarkan proporsi penduduk menurut usia, mayoritas penduduk DIY pada 2023 mempunyai usia produktif. Kelompok tersebut terdiri dari kelompok usia 20-24 tahun atau sekitar 7,23%, usia 25-29 tahun sekitar 7,22% dan usia 30-34 tahun atau sekitar 7,19% dari seluruh penduduk. Dengan kondisi sumber daya manusia tersebut, dapat diindikasikan bahwa potensi sumber daya manusia yang

berusia produktif di DIY cukup besar dan merupakan modal sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan di DIY.

Komposisi penduduk berdasarkan umur dapat terlihat dalam gambar piramida penduduk berikut.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-15 Komposisi Penduduk DIY Tahun 2023 Berdasarkan Usia

Laju pertumbuhan penduduk dapat digambarkan dalam sebuah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk setiap tahun di antara rentang waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase dari penduduk dasar. Pertambahan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Di dalam demografi dikenal istilah pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Dimana pertumbuhan penduduk alami hanya dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertumbuhan penduduk total dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi). Dari data BPS, tercatat bahwa laju pertumbuhan penduduk di DIY tahun 2023 sebesar 0,64%, dengan laju pertumbuhan terkecil di Kota Yogyakarta sebesar 0,05% dan tertinggi di Kabupaten Selan sebesar 1,00%.

Tabel 2-14 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018 - 2023

Laju Pertumbuhan Penduduk	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Kulon Progo	1,06%	1,05%	0,99%*	0.59%	0.57%	0.54%
Kabupaten Bantul	1,15%	1,16%	1,14%*	0.94%	0.90%	0.86%
Kabupaten Gunungkidul	0,94%	0,89%	0,88%*	0.21%	0.19%	0.17%
Kabupaten Sleman	1,11%	1,07%	1,06%*	1.07%	1.03%	1.00%
Kota Yogyakarta	1,13%	1,04%	0,93%*	0.10%	0.07%	0.05%
DI Yogyakarta	1,08%	1,15%	1,02%*	0.70%	0.67%	0.64%

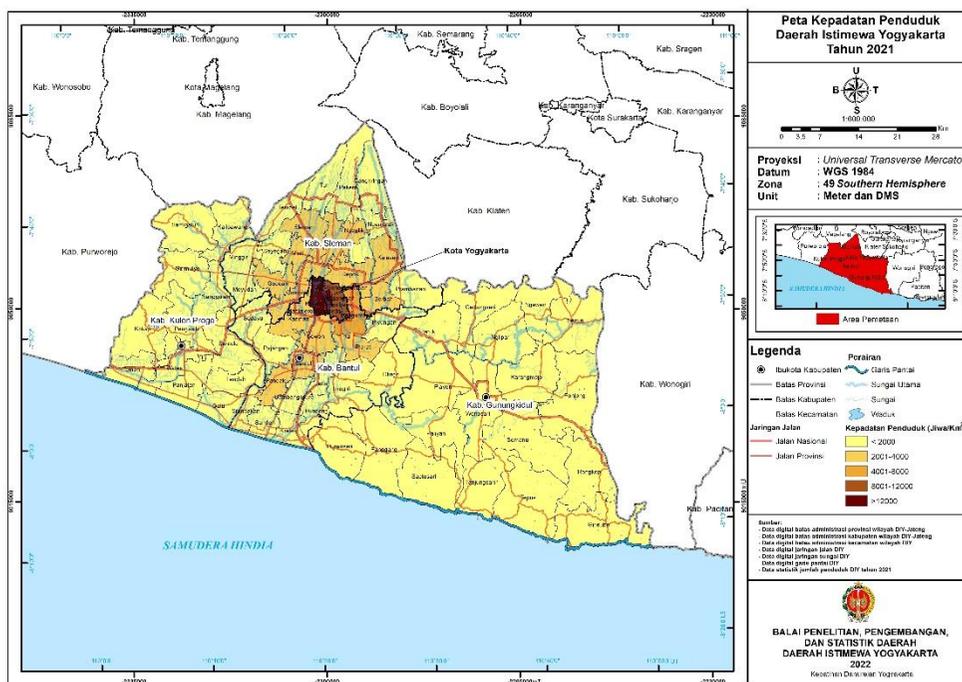
Sumber : BPS Provinsi DIY, 2024 Keterangan: *) Angka Proyeksi

Keterangan : 2016-2020: menggunakan Angka Proyeksi SUPAS 2015

2021-2023: menggunakan Angka Proyeksi Hasil Sensus Penduduk 2020

Secara umum, kepadatan penduduk DIY pada tahun 2021 mencapai 1.165 jiwa per Km². Tingkat kepadatan penduduk di masing-masing kabupaten/kota dari tingkat kepadatan tertinggi ke terendah berturut-turut sebagai berikut: (DIY Dalam Angka 2022)

- 1) Kota Yogyakarta, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 11.560 jiwa per Km²,
- 2) Kabupaten Sleman, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.013 jiwa per Km²,
- 3) Kabupaten Bantul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.992 jiwa per Km²,
- 4) Kabupaten Kulon Progo, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 756 jiwa per Km², dan
- 5) Kabupaten Gunungkidul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 506 jiwa per Km²



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2022

Gambar 2-16 Peta Kepadatan Penduduk DIY

Tabel 2-15 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
DIY	1.206,27	1.151,58	1.165,00	1.262,42	1.173
Kulon Progo	733,83	744,00	756,00	764,36	756
Bantul	2.009,28	1.940,00	1.970,00	2.099,80	1.992
Gunungkidul	500,03	522,00	510,00	522,91	506
Sleman	2.121,78	1.959,00	1.977,00	2.231,66	2.013
Yogyakarta	13.290,43	11.495,00	11.579,00	13.842,77	11.560

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

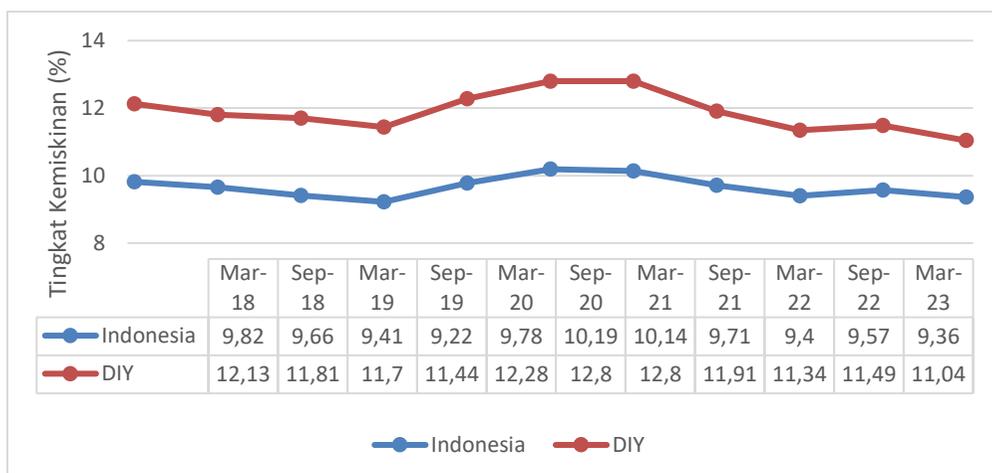
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Sejahtera adalah keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Kesejahteraan penduduk suatu wilayah dari aspek ekonomi diukur dengan menggunakan indikator tingkat kemiskinan dan pendapatan per kapita. Tingkat kemiskinan datanya diperoleh dari survei SUSENAS menggambarkan persentase jumlah penduduk suatu wilayah yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara, indikator pendapatan per kapita yang diperoleh dari data PDRB wilayah menunjukkan besarnya rata-rata pendapatan tiap penduduk suatu wilayah dalam waktu satu tahun. Selanjutnya, untuk melihat kondisi perekonomian yang utuh, diperlukan ukuran-ukuran yang menggambarkan distribusi kesejahteraan suatu wilayah. Indikator ketimpangan terbagi menjadi ketimpangan pendapatan antar penduduk yang ditunjukkan dengan Indeks Gini dan ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson.

2.1.2.1.1 Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan DIY per Maret 2023 sebesar 11,04 persen menurun 0,3 persen dibandingkan Maret 2022, dan menurun 0,45 persen dibandingkan September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 448,47 ribu orang dan turun 15,2 ribu orang terhadap September 2022. Apabila dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 turun 6,3 ribu orang dan angka ini masih berada di atas angka nasional kemiskinan Indonesia per Maret 2023 sebesar 9,36%.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-17 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2018-Maret 2023

Apabila dilihat antar kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul di atas rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Seperti yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya, kondisi ini sejalan dengan ketimpangan PDRB antar wilayah.

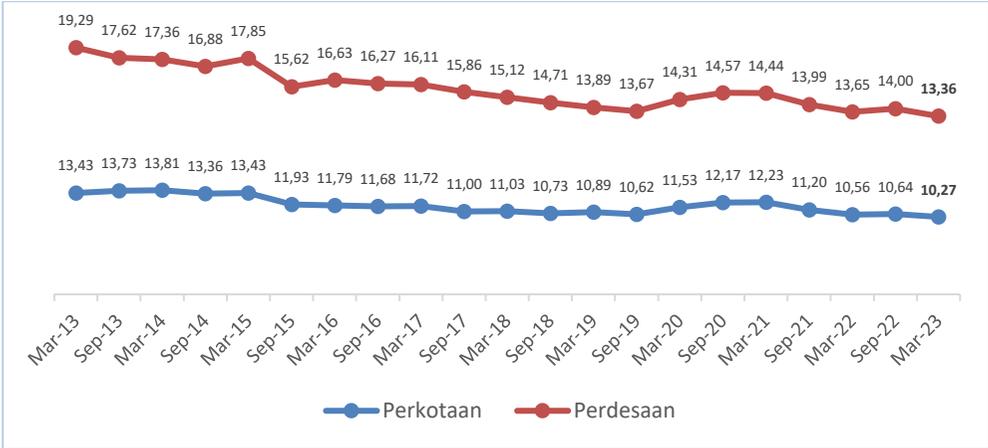
Tabel 2-16 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2018 - 2023 (%)

Nama Wilayah	2018 (Maret)	2019 (Maret)	2020 (Maret)	2021 (Maret)	2022 (Maret)	2023 (Maret)
DIY	12,13	11,7	12,8	12,8	11,34	11,04
Kulon Progo	18,30	17,39	18,01	18,39	18	15,64
Bantul	13,43	12,92	13,5	13,5	10,56	11,95
Gunungkidul	17,12	16,61	17,07	17,69	17,69	15,60
Sleman	7,65	7,41	8,12	8,12	7,74	7,52
Kota Yogyakarta	6,98	6,84	7,27	7,27	6,62	6,49

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2023

Ditinjau dari tipe daerah, tingkat kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan terus menurun dari tahun 2018 ke tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan di mana tingkat

kemiskinan di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan wilayah perkotaan. Kemudian, pada Maret tahun 2023 tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan dan perkotaan mengalami penurunan dibandingkan periode Maret tahun 2022. Hal tersebut konsisten dengan data Kabupaten Gunungkidul yang masih didominasi wilayah perdesaan yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain (1) Mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal sesuai karakteristik wilayah; (2) Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan, memberikan prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada kalurahan-kalurahan dan kampung-kampung paling miskin; (3) Memperbaiki kualitas kegiatan dan *cost effectiveness*, keempat memberikan ruang partisipasi masyarakat serta memberikan semangat. Pemerintah perlu memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dari pengambilan keputusan pembangunan hingga pelaksanaan pembangunan dan mendayagunakan potensi, sumber daya lokal sesuai karakteristik wilayah dan kearifan lokal. Selain hal tersebut, pemerintah juga perlu melaksanakan program penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi dan percepatan pembangunan infrastruktur daerah perbatasan dan wilayah terisolir.

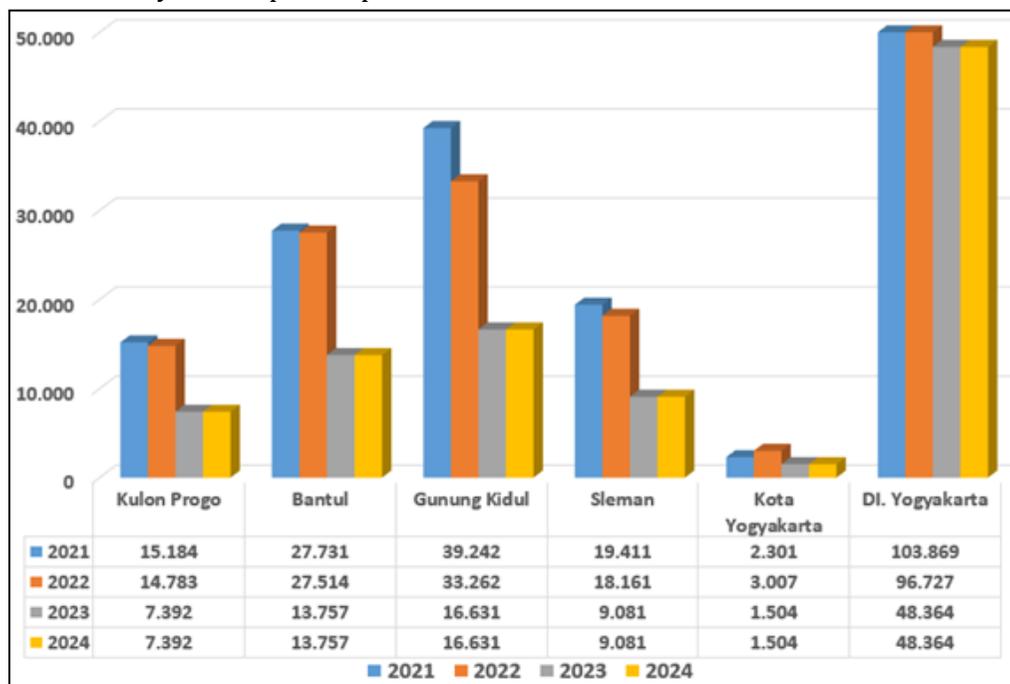


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-18 Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah Tempat Tinggal di DIY Maret 2013 – Maret 2023

Pada Maret 2023, persentase penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan

sebesar 3,09 persen poin. Persentase penduduk miskin periode September 2022 – Maret 2023 di perkotaan turun sebanyak 0,37 persen poin dan di perdesaan turun sebanyak 0,64 persen poin.



Sumber: Sebermas Bappeda DIY, 2024

Gambar 2-19 Target Jumlah Sasaran Kemiskinan Ekstrem 2021-2024

Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh otoritas kependudukan dan catatan sipil (DUKCAPIL) serta memiliki status kesejahteraan (Desil). Data P3KE untuk melengkapi data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi pensasaran program untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program, yaitu yang *exclusion error*, demi menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program bantuan.

DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS diperoleh dari: a. rukun tetangga/rukun warga; b. kepala dusun; c. lurah atau kepala desa atau nama lain; d. potensi dan sumber kesejahteraan sosial; dan/atau e. pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Data tersebut kemudian dilakukan verifikasi dan validasi secara berjenjang. Pendaftaran fakir miskin kedalam DTKS tidak otomatis menjadikan nama tersebut mendapat bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan

Berdasarkan penilaian, terdapat 15 Kapanewonan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi di DIY. Lokasi kemiskinan di 15 (lima belas) Kapanewon tersebut beserta upaya penanggulangan kemiskinannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2-17 Penanggulangan Kemiskinan di 15 Kapanewonan DIY

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
Gunungkidul	Saptosari	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Sosialisasi Generasi Berencana - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal
	Playen	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal - Sosialisasi Generasi Berencana
	Gedangsari	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal - Sosialisasi Generasi Berencana
	Nglipar	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak sekolah yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal - Sosialisasi Generasi Berencana
	Ponjong	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak sekolah yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal - Sosialisasi Generasi Berencana
	Tepus	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih - Pengembangan Wisata berbasis potensi lokal
	Karangmojo	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak (putus) sekolah yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Akses air bersih - Pengembangan wisata berbasis potensi lokal
Kulon Progo	Sentolo	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal
	Kokap	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal - Mitigasi bencana
	Pengasih	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Akses air bersih - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan optimalisasi lahan pekarangan
	Samigaluh	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Akses air bersih - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan pemanfaatan lahan pekarangan - Mitigasi bencana dan konservasi alam
Bantul	Imogiri	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Akses listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi - Mitigasi bencana dan konservasi alam
Sleman	Tempel	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan optimalisasi lahan pekarangan
	Seyegan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal - Pengembangan wisata berbasis potensi lokal
	Prambanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
		- Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal

Sumber: Surat Gubernur DIY, Nomor 401/0161

Garis Kemiskinan (GK) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Adapun GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Adapun Garis Kemiskinan non Makanan menunjukkan banyaknya rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan pokok bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Tabel 2-18 Garis Kemiskinan DIY Menurut Tipe Daerah Tahun 2017 - 2023 (September 2017- Maret 2023)

Periode	Garis Kemiskinan (Rp)	
	Perkotaan	Perdesaan
September 2017	413.631	352.861
Maret 2018	426.580	366.256
September 2018	432.018	369.606
Maret 2019	452.628	378.873
September 2019	472.666	392.748
Maret 2020	487.173	403.173
September 2020	488.461	404.035
Maret 2021	507.007	414.240
September 2021	358.285	438.412
Maret 2022	543.821	455.583
September 2022	573,915	480,767
Maret 2023	598.925	499.942

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun yang didorong oleh peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di DIY. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok.

Tabel 2-19 Persentase Komoditas Garis Kemiskinan DIY berdasarkan Jenis Komoditas Makanan dan non Makanan menurut Tipe Daerah, Maret 2023 (%)

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Pedesaan
Makanan			
Beras	18,26	Beras	22,81
Rokok kretek filter	7,91	Rokok kretek filter	5,87
Daging ayam ras	5,67	Daging ayam ras	4,46
Telur ayam ras	4,30	Telur Ayam Ras	3,88
Kue Basah	2,89	Tempe	3,15
Non Makanan			
Perumahan	8,53	Perumahan	9,28
Bensin	6,36	Bensin	5,48
Listrik	2,44	Listrik	1,51
Pendidikan	2,01	Pendidikan	1,17
Perlengkapan mandi	1,12	Perlengkapan mandi	1,15

Lima Komoditas Penyumbang Terbesar Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah di DIY, September 2022 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Indikator kemiskinan yang lain dan harus diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Adapun faktor yang mempengaruhi indeks kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan adalah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat homogenitas pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin itu sendiri.

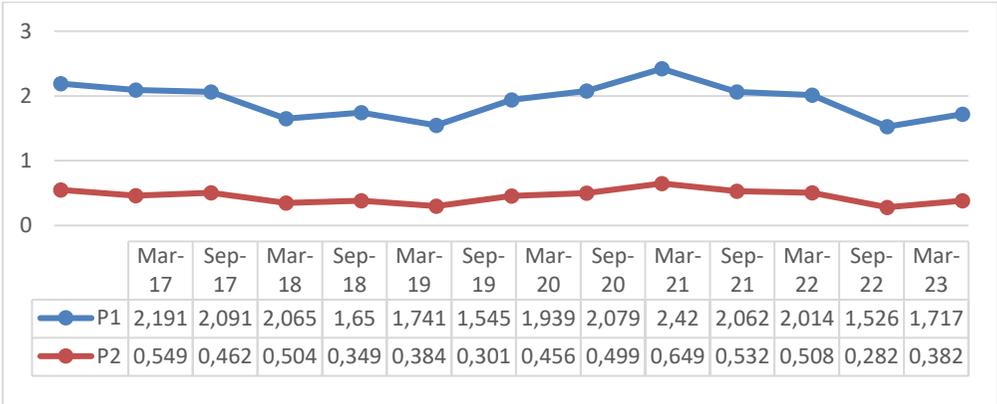
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Dalam kurun 2-48

waktu satu tahun terakhir nilai indeks P1 DIY berfluktuasi meskipun dengan kecenderungan yang menurun. Pada September 2021, indeks P1 tercatat sebesar 2,062. Kemudian, pada Maret 2022, indeks P1 kembali mengalami penurunan menjadi 2,014. Pada September 2022, indeks P1 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 1,53. Pada Maret tahun 2023, indeks P1 kembali mengalami penurunan dibandingkan periode maret 2022 menjadi 1,717. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mulai bergerak mendekati garis kemiskinan. Apabila dibandingkan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan menunjukkan kecenderungan menurun. Namun demikian, nilai indeks P1 di pedesaan lebih besar daripada perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di pedesaan lebih buruk dari pada di perkotaan.

Sejalan dengan indeks P1 yang mulai memperlihatkan kecenderungan menurun, indeks P2 juga menunjukkan adanya kecenderungan menurun pada rentang waktu yang sama. Pada September 2021 indeks P2 tercatat sebesar 0,532. Satu semester kemudian, pada Maret 2022, indeks P2 mengalami penurunan menjadi 0,508. Selanjutnya pada September 2022, nilai indeks P2 kembali turun menjadi 0,28. Pada periode Maret 2023 indeks P2 mengalami penurunan kembali menjadi 0,382. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi.

Pada Maret 2020, indeks P1 tercatat sebesar 1,939 Pada September 2020, nilai indeks P1 naik menjadi 2,079. Pada Maret 2021 indeks P1 kembali meningkat menjadi 2,42 dan mulai menurun pada September 2021 menjadi 2,062. Kemudian, pada Maret 2022, indeks P1 kembali mengalami penurunan menjadi 2,014. Pada September 2022, penurunan indeks P1 kembali terjadi menjadi sebesar 1,53. Pada Maret 2023 penurunan indeks P1 terus berlanjut menjadi 1.171. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mulai bergerak mendekati garis kemiskinan. Dengan kata lain menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin jauh dari garis kemiskinan. Dengan semakin bertambahnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan

peningkatan pengeluarannya. Apabila dibandingkan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan masih menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Adapun indeks P1 di pedesaan mulai memperlihatkan kecenderungan yang menurun. Namun demikian, nilai indeks P1 di pedesaan lebih besar daripada perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di pedesaan lebih buruk daripada di perkotaan Berbeda dengan indeks P1 yang mulai memperlihatkan kecenderungan menurun.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-20 Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY Tahun 2017-2022 (Maret 2017-Maret 2023)

2.1.2.2 Produk Domestik Regional Bruto

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dan sangat tergantung pada potensi sumber daya alam serta faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah.

PDRB DIY selama kurun waktu 2018-2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp129.818.357 juta rupiah dan pada tahun 2023 mencapai Rp180.689.952 juta rupiah atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,94% per tahun. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp10,980 triliun dan Rp16,321 triliun dengan nilai PDRBnya sebesar

Rp149.369.169 juta rupiah dan Rp180.689.952 juta rupiah. Kinerja perekonomian DIY pada tahun 2023 ini didukung oleh semua lapangan usaha yang tumbuh positif bahkan dua diantaranya mencapai dua digit. Lapangan usaha Jasa Keuangan dan Transportasi mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 10,29%, disusul Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,27%.

Tabel 2-20 Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2023 (Juta Rp)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.933.401	13.237.380	14.095.797	14.521.691	16.517.991	18.490.680
Pertambangan dan Penggalian	615.943	713.919	677.483	668.454	713.773	799.916
Industri Pengolahan	15.636.603	18.086.378	17.755.279	18.458.784	19.759.709	21.351.026
Pengadaan Listrik dan Gas	173.689	202.276	198.151	203.054	223.577	249.997
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	121.272	139.653	141.444	153.139	162.572	171.978
Konstruksi	11.303.630	11.303.630	13.325.553	15.147.860	16.440.153	17.037.268
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.241.621	11.958.914	11.639.485	12.169.431	13.683.701	14.766.486
Transportasi dan Pergudangan	6.783.681	7.960.610	6.327.777	6.609.464	8.477.527	10.147.672
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.304.099	14.631.663	12.234.070	13.689.597	16.379.788	18.396.945
Informasi dan Komunikasi	9.789.586	11.262.725	13.455.358	16.015.667	17.073.157	18.179.066
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.640.944	564.5948	558.2173	5.954.918	6.830.313	7.677.066
Real Estate	8.382.668	9.871.072	10.220.305	10.489.736	11.179.576	
Jasa Perusahaan	1.207.970	1.437.497	1.248.376	1.379.630	1.548.813	11.930.690
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.213.350	11.556.325	11.679.911	12.056.096	12.932.982	1.743.870

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jasa Pendidikan	9.711.308	11.472.125	12.276.381	13.234.223	13.913.749	13.504.486
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	3.004.112	3.518.720	4.396.362	4.729.131	5.131.071	15.165.496
Jasa Lainnya	3.109.029	3.655.439	3.134.839	3.888.295	4.721.757	5.798.166
PDRB	129.818.357	141.068.183	138.388.752	149.369.169	165.690.210	5.288.137

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam rangka optimalisasi faktor produksi untuk meningkatkan output, juga diperlukan upaya pengendalian jumlah penduduk.

Peningkatan secara nyata nilai PDRB per kapita DIY ADHB dari tahun ke tahun terus dirasakan hingga tahun 2019. Selama periode 2017-2019, PDRB per kapita ADHB bertambah rata-rata sebesar 7,45%. Nilai PDRB per kapita tahun 2018 adalah Rp34.137 juta kemudian meningkat menjadi Rp36.460 juta di tahun 2019. PDRB Perkapita terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai Rp48.358 juta

Tabel 2-21 Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 - 2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	129.818.358	141.068.183	138.388.752	149.369.169	165.718.436	180.689.953
Penduduk pertengahan tahun (orang)	3.802.872	3.842.932	3.882.288	3.675.662	3.712.580	3.736.505
PDRB per kapita ADH Berlaku (juta rupiah)	34,137	36,708	35,646	38,808	44.637	48.358
Pertumbuhan PDRB per kapita ADH Berlaku (%)	7,81	7,53	-2,89	5,53	10,17	8,34

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Pertumbuhan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2010. Nilai riil PDRB per kapita periode 2018 hingga

2023 tumbuh rata-rata sebesar 4,39%. PDRB per kapita tahun 2023 sebesar Rp31.748 juta meningkat Rp1.337 juta rupiah dari tahun 2022. PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian, selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

Tabel 2-22 Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018 - 2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADH konstan 2010 (juta rupiah)	98.300.243	104.487.543	101.679.600	107.308.555	112.901.323	118.626.842
Penduduk pertengahan tahun (orang)	3.802.872	3.842.932	3.882.288	3.675.662	3.712.580	3.736.505
PDRB per kapita ADH konstan 2010 (juta rupiah)	25,849	27,190	26.191	27,462	30.411	31.748
Pertumbuhan PDRB per kapita ADH konstan (%)	5,36	5,18	-3,67	4,85	4,45	4,39

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

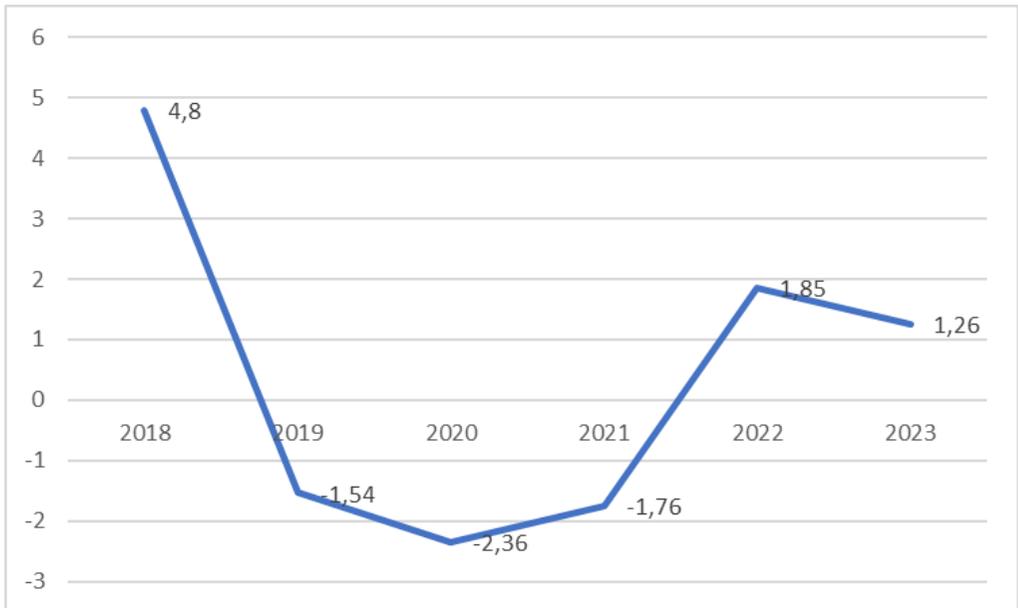
Tabel 2-23 Perkembangan Tiga Sektor Domian DIY Tahun 2017-2023

Sektor Dominan di DIY	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHK (Juta Rp)						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.101.233	8.184.189	8.532.140	8.584.395	9.068.181	9.171.135
Industri Pengolahan	12.486.855	13.200.727	12.624.114	12.670.357	12.893.390	13.442.253
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.383.603	10.217.177	8.489.706	9.130.595	10.263.112	11.158.457
Laju Pertumbuhan per Sektor (%)						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,16	1,02	4,25	0,61	5,12	1,14
Industri Pengolahan	5,12	5,72	-4,37	0,37	1,76	4,26
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,77	8,88	-16,91	7,55	12,40	8,72
Kontribusi per Sektor (%)						

Sektor Dominan di DIY	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9,87	9,39	10,18	9,77	9,97	10,23
Industri Pengolahan	13,00	12,82	12,77	12,35	11,97	11,82
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,22	10,38	8,86	9,13	9,89	10,18
Kontribusi Tiga Sektor Dominan (%)	33,09	32,58	31,81	31,25	31,83	32,23
Pertumbuhan Tiga Sektor Dominan (%)	4,80	-1,54	-2,36	-1,76	1,85	1,36

Sumber: BPS, 2024 diolah

Dari sisi Lapangan Usaha dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan tiga sektor utama terhadap perekonomian DIY. Kegiatan sektor tersebut selama 2018-2023 berkontribusi rata-rata sebesar 29,22% terhadap keseluruhan PDRB DIY. Pada tahun 2022, kontribusi ketiga sektor tersebut sebesar 28,55% terhadap PDRB. Pertumbuhan ketiga sektor tersebut relatif cenderung meningkat, meskipun mengalami kontraksi yang cukup signifikan pada 2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, pertumbuhan ketiga sektor tersebut mulai membaik, dan mencapai 6,08% pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023, kontribusi ketiga sektor tersebut menurun menjadi 32,23% dengan pertumbuhan sebesar 4,71%

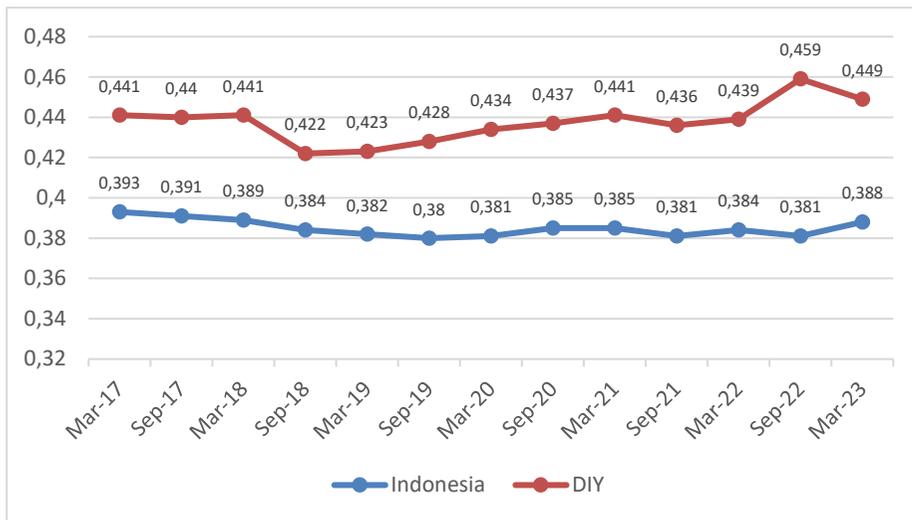


Sumber: BPS, 2024 diolah

Gambar 2-21 Laju Pertumbuhan Tiga Sektor Dominan di DIY, 2018-2023

2.1.2.2.1 Indeks Ketimpangan Pendapatan dan Ketimpangan Wilayah

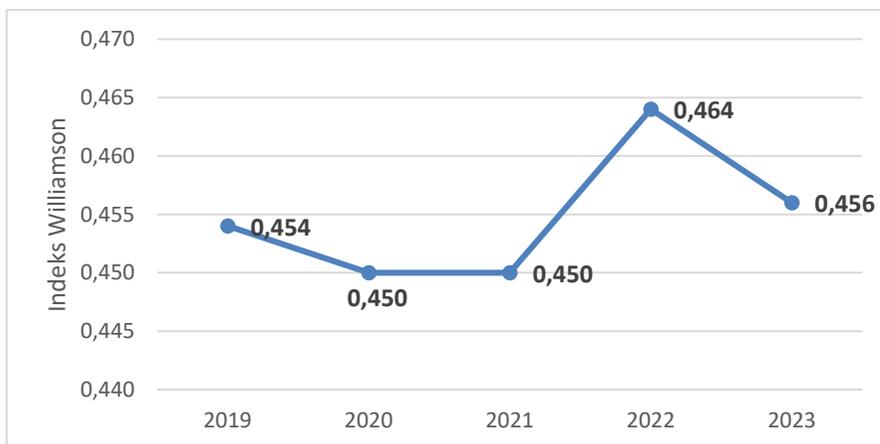
Gambar di bawah menunjukkan perkembangan Rasio Gini di DIY dibandingkan dengan kondisi nasional. Selama periode Maret 2017 – Maret 2023 terlihat bahwa angka Rasio Gini di DIY berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. Pada Maret 2023 rasio gini berada di atas rata-rata nasional yang berarti tingkat kesenjangan penduduk di DIY lebih besar dibandingkan kesenjangan penduduk secara nasional.



Sumber: BPS-Statistik DIY, 2023

Gambar 2-22 Rasio Gini di DIY dan Indonesia, Tahun 2017 – Maret 2023

Indeks Williamson pada periode 2019-2023, pada gambar di bawah, menunjukkan kecenderungan menaik yaitu dari 0,454 di tahun 2019 menjadi 0,456 di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan perekonomian antar daerah (kabupaten/kota) di wilayah DIY sedikit meningkat bahkan cenderung sama.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-23 Indeks Williamson DIY Tahun 2019 – 2023

Berdasar nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kabupaten/kota, dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan kontributor utama perekonomian DIY dengan nilai PDRB terbesar. Sementara itu, Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2023 hanya menempati urutan keempat dalam hal besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Kondisi ini juga tercermin dari sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian Gunungkidul menghasilkan nilai tambah yang relatif lebih kecil.

Tabel 2-24 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota DIY ADHB Tahun 2018-2023 (juta Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	10.312.524	11.995.771	11.654.320	12.443.064	14.315.380	15.847.210
Bantul	24.443.274	26.345.477	26.161.313	28.090.839	31.182.590	34.011.590
Gunungkidul	17.527.716	18.844.736	18.972.196	20.418.147	22.748.830	24.976.310
Sleman	43.803.585	47.580.784	45.833.487	49.500.004	54.702.460	59.431.540
Kota	33.787.580	36.492.640	35.757.539	38.416.518	42.623.750	46.192.50
DIY	129.818.358	141.047.688	138.306.833	149.369.169	180.689.95	138.388.75

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Ketimpangan pembangunan antara wilayah di DIY disebabkan oleh terkonsentrasinya aktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman selama ini menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah di DIY. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh struktur ekonomi tiap kabupaten/kota yang mencerminkan kesenjangan kemampuan daya saing ekonomi dan kapasitas pertumbuhan ekonomi lokal antar kabupaten dan kota. Akibat kesenjangan kapasitas perekonomian, kontribusi PDRB ADHK di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menyumbang lebih 50% dari total PDRB DIY, sementara kontribusi tiga daerah lainnya secara rata-rata sebesar 39,94% pada lima tahun terakhir. Sementara itu, dua kabupaten yaitu Kulon Progo dan Gunungkidul yang luas wilayahnya 65% dari luas wilayah DIY hanya menyumbang sekitar 21,5% dari keseluruhan output DIY selama periode 2018 - 2023.

Tabel 2-25 Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Perekonomian DIY, Tahun 2019-2023

Kabupaten dan Kota	2019	2020	2021	2022*	2023**
Kulon Progo	8,50	8,49	8,48	8,65	8,78
Bantul	18,65	18,91	18,86	18,83	18,85
Gunungkidul	13,35	13,70	13,70	13,74	13,84
Sleman	33,64	33,04	33,12	33,04	32,93
Yogyakarta	25,86	25,85	25,84	25,74	25,60
Total 3 Wilayah (Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul)	2019	2020	2021	2022*	2023**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 diolah

*Angka Sementara

**Angka Sangat Semenetera

2.1.2.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga, sehingga tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhitungan laju inflasi DIY diwakili oleh inflasi Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Tabel 2-26 Laju Inflasi DIY Tahun 2018-2023

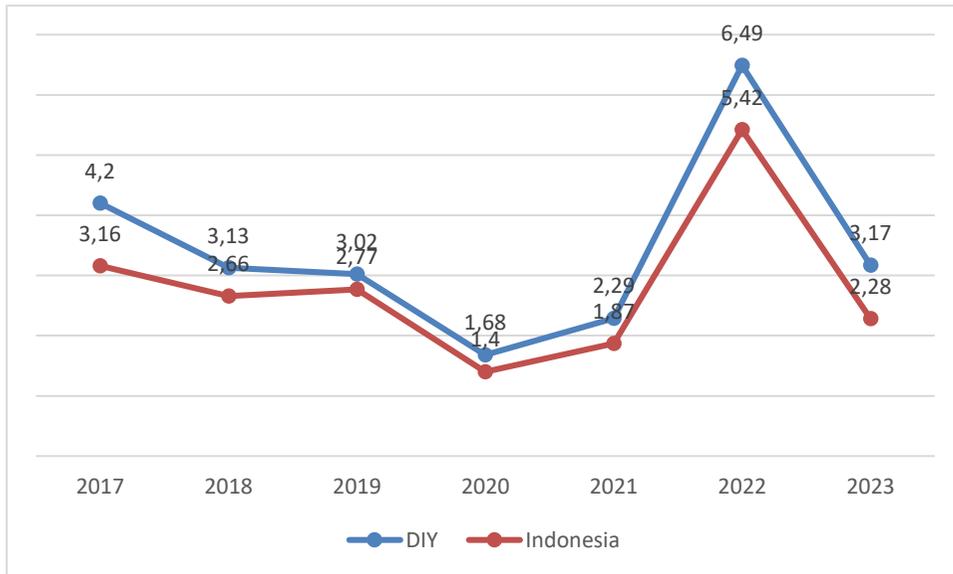
Bulan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	0,55	0,42	0,27	0,54	0,59	0,17
Februari	-0,05	-0,08	0,40	0,14	0,05	0,27
Maret	0,15	0,26	0,07	0,08	0,77	0,60
April	0,10	0,46	-0,24	0,01	1,14	0,22
Mei	0,08	0,42	0,22	0,07	0,75	0,35
Juni	0,46	0,25	0,08	0,05	0,52	0,02
Juli	0,56	0,05	-0,08	0,11	0,47	0,28
Agustus	-0,26	0,07	-0,04	0,05	-0,12	-0,04
September	-0,11	-0,07	0,03	-0,17	1,05	0,29
Oktober	0,13	0,18	0,08	0,24	0,11	0,25

Bulan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
November	0,46	0,31	0,13	0,45	6,54	0,35
Desember	0,57	0,46	0,48	0,71	6,57	0,35
Inflasi Tahunan	2,66	2,77	1,40	2,29	6,49	3,17

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (*demand side*) di mana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (*supply side*) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak pertengahan Maret 2020 membawa perubahan besar terhadap seluruh aspek kehidupan penduduk DIY. Kebijakan pembatasan mobilitas sosial untuk mengantisipasi penyebaran virus dalam berbagai bentuk juga ikut berdampak terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Tahun 2020 Kota Yogyakarta mengalami inflasi sebesar 1,40%. Hal ini disebabkan oleh memburuknya kinerja sebagian besar kategori usaha, terutama yang berbasis mobilitas dan pariwisata. Sementara, pada sisi permintaan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan munculnya pengangguran baru. Pada tahun 2021, digitalisasi membuka informasi kepada seluruh pihak, sehingga membatasi peluang terjadinya permainan harga yang tidak wajar maupun penimbunan stok.

Dari sisi permintaan, terlihat bahwa pola inflasi Kota Yogyakarta mengalami angka tertinggi pada bulan Desember 2022 sebesar 6,57% yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,85%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,92%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 5,11%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,10%; kelompok Kesehatan sebesar 3,89%. Pada tahun 2023 laju inflasi DIY sebesar 3,17% , dapat dilihat bahwa angka inflasi sepanjang 2023 paling tinggi terjadi pada bulan maret sebesar 0,60%.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-24 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2017 - 2023

Secara umum, inflasi Kota Yogyakarta tahun 2017-2023 berfluktuatif dengan memiliki kecenderungan yang menurun selama lima tahun terakhir. Kelompok makanan, minuman dan tembakau masih menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar pada tahun 2023. Hal ini berbeda dengan tahun 2017 yang merupakan kontributor terkecil inflasi. Kurangnya ketersediaan produk bahan pangan sepanjang tahun menyebabkan terganggunya stabilitas harga. Beberapa komoditas pangan yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi tahun 2023 antara lain cabai merah, bawang merah, tomat, cabai rawit, dan gula pasir. Pada tahun 2022, inflasi baik di DIY maupun nasional mengalami peningkatan yang disebabkan oleh tekanan harga global, gangguan *supply* pangan, dan kebijakan penyesuaian BBM, selain juga karena meningkatnya permintaan masyarakat dengan membaiknya kondisi pandemi. Pada tahun 2023 laju inflasi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2022.

2.1.2.3 Fokus Kesejahteraan Sosial

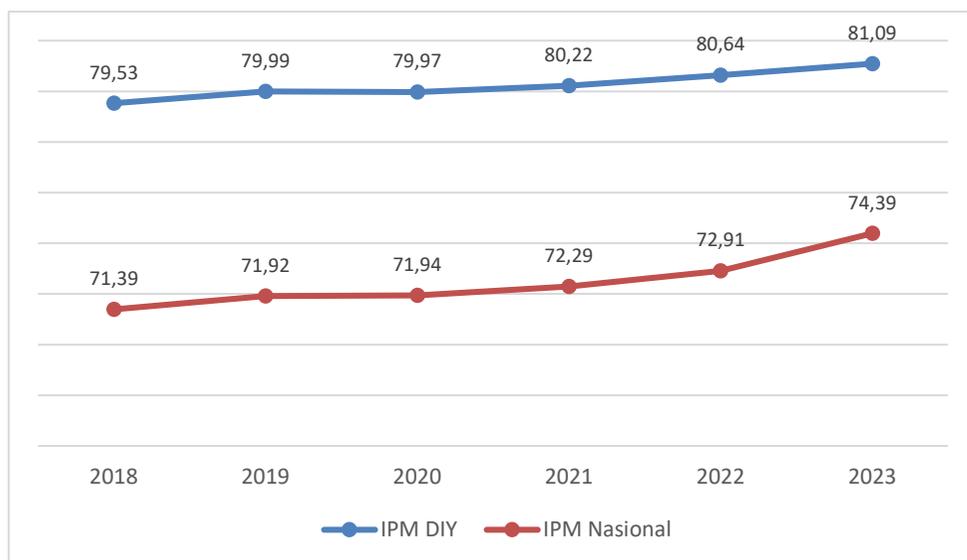
Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya terencana dan sistematis dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan

mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan kesejahteraan sosial. Hal tersebut berkaitan erat dengan akses penduduk dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk intervensi sosial seperti pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Analisis fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa capaian indikator untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini dan menemukan permasalahan yang ada.

2.1.2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu cara untuk melihat kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu dengan melihat capaian IPM. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan IPM yang mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, serta naiknya daya beli masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk DIY yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per kapita. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah.

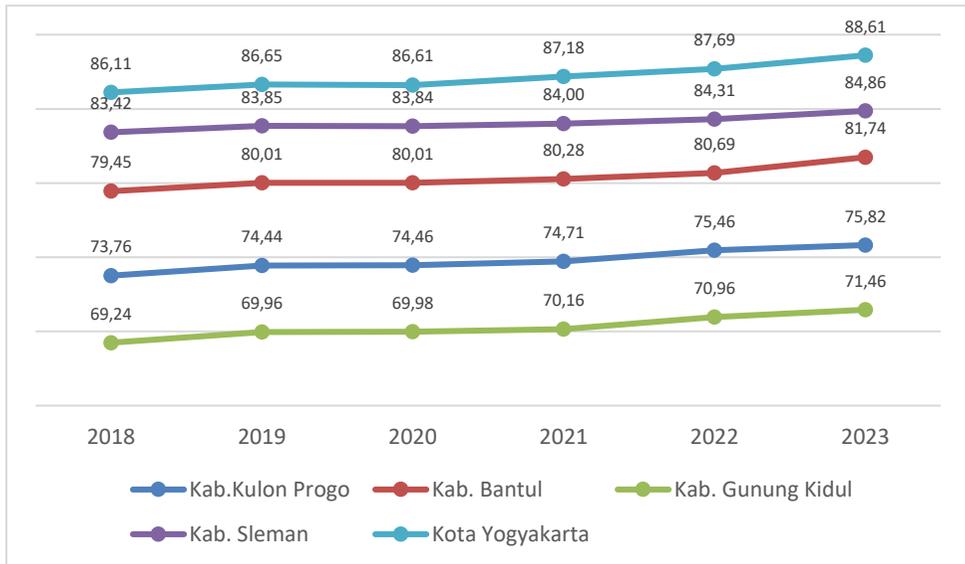
Angka IPM DIY mengalami tren yang meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Capaian IPM sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 dari 79,99 menjadi 79,97. Penurunan ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19. Namun angka IPM meningkat kembali di tahun 2021 setelah pandemi Covid-19 mulai mereda, yaitu mencapai angka 80,22. Posisi IPM DIY pada tahun 2022 mencapai 80,64 (kategori sangat tinggi), tumbuh 0,52 persen dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2023 IPM DIY mencapai 81,09 meningkat 0,44 poin (0,55 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan nilai IPM terjadi pada semua komponen penghitungan IPM.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-25 Perkembangan IPM DIY dan Nasional Tahun 2018-2023

Dibandingkan dengan IPM nasional, perkembangan IPM DIY dari tahun 2018 – 2023 selalu berada di atas IPM nasional. Pada tahun 2018, menunjukkan IPM nasional 71,39 sedangkan IPM DIY telah mencapai 79,53. Sedangkan pada tahun 2023, IPM Nasional menunjukkan angka 74,39 dan untuk DIY mencapai 81,09. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia DIY lebih berkualitas dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional. Tingginya IPM DIY didorong oleh semua indikator penyusun yang memiliki capaian cukup tinggi. Angka harapan hidup dan harapan lama sekolah memberi sumbangan terbesar terhadap capaian IPM DIY. AHH DIY cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik. RLS juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah tersebut.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-26 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2023

Capaian IPM kabupaten/kota di DIY selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa capaian sangat bervariasi, yang berarti bahwa pola pembangunan antarwilayah di DIY masih timpang. Level IPM tertinggi dicapai Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Sleman serta Bantul. Ketiga daerah tersebut memiliki IPM di atas level DIY dan sudah berada pada kategori “sangat tinggi” (IPM > 80). IPM Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul berada dalam kategori “tinggi” (IPM antara 70-80). IPM Gunungkidul tercatat paling rendah namun terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 capaian IPM Gunungkidul pada kategori “sedang”, namun pada tahun 2021 telah meningkat pada kategori “tinggi”.

Pencapaian pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota di DIY selama tahun 2023 mengindikasikan perkembangan pembangunan manusia yang sangat baik karena kabupaten/kota di DIY kini sudah berstatus sangat tinggi dan tinggi. Capaian IPM Kota Yogyakarta mencapai 88,61 dan tercatat paling tinggi di antara kabupaten/kota di DIY, bahkan di Indonesia. Capaian IPM tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Sleman dan Bantul masing-masing sebesar 84,86 dan 81,74. IPM ketiga daerah ini termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi” (IPM ≥ 80). Capaian IPM Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat masing-masing sebesar 75,82 dan 71,46. Masih adanya perbedaan nilai (gap) antara IPM Kota Yogyakarta dan

Kabupaten Gunungkidul yang cukup besar, yakni 17,15 poin, menunjukkan masih adanya ketimpangan yang cukup besar pada pembangunan manusia di DIY.

2.1.2.3.2 Angka Melek Huruf (AMH)

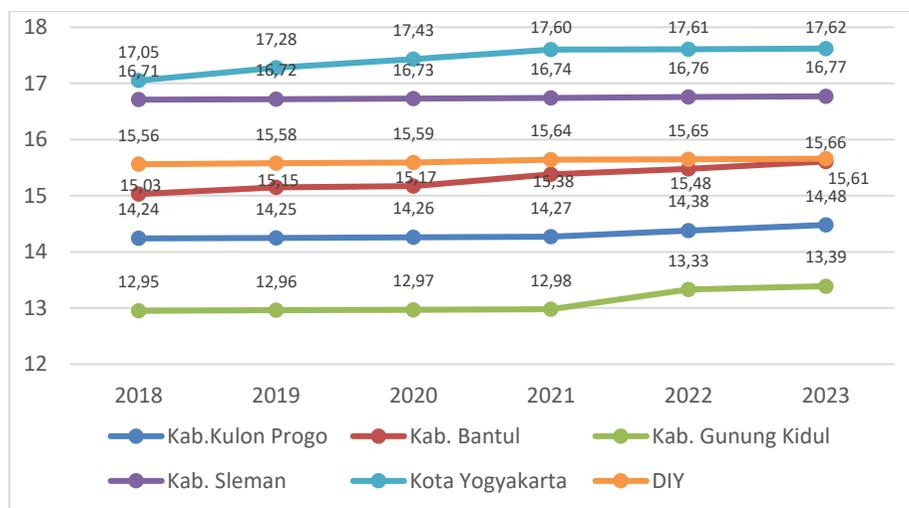
Angka Melek Huruf (AMH) menjadi tolak ukur penting untuk melihat kualitas sumber daya manusia. AMH merupakan indikator dalam urusan pendidikan yang secara langsung merepresentasikan tingkat melek huruf atau tingkat buta huruf di suatu wilayah. Perhitungan AMH dilakukan dengan melihat proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis tanpa harus memahami atau mengerti apa yang dibaca dan ditulis. AMH dahulu digunakan secara umum sebagai salah satu indikator penting yang merepresentasikan meratanya pendidikan di sebuah wilayah, hal tersebut dikarenakan keterampilan membaca dan menulis dianggap sebagai sebuah dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu AMH perlahan tidak lagi dianggap sebagai sebuah tolak ukur penting yang merepresentasikan akses, kualitas, maupun sistem pendidikan di suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena capaian AMH di seluruh daerah telah melonjak pesat, salah satunya dengan program wajib belajar 9 tahun. Bahkan AMH yang sebelumnya masuk ke dalam indikator komposit IPM dikeluarkan dan diganti dengan HLS.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi DIY, AMH di DIY mengalami peningkatan dari 2018 hingga 2021 sebesar 0,39%. Pada tahun 2018 AMH tercatat sebesar 94,93% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 95,22%. Namun pada tahun 2022 AMH mengalami sedikit penurunan sebesar 0,07% dibandingkan tahun 2021, dari angka 95,22% menjadi 95,15%. Pada tahun 2023, AMH DIY kembali mengalami peningkatan sebesar 0,44% dibandingkan tahun 2022 menjadi 95,59%.

2.1.2.3.3 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Indikator angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Pada tahun 2023, HLS DIY meningkat 0,01 tahun menjadi 15,66 tahun (tumbuh 0,06 persen).

Pertumbuhan HLS tahun 2023 ini melambat jika dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh 0,32 persen.



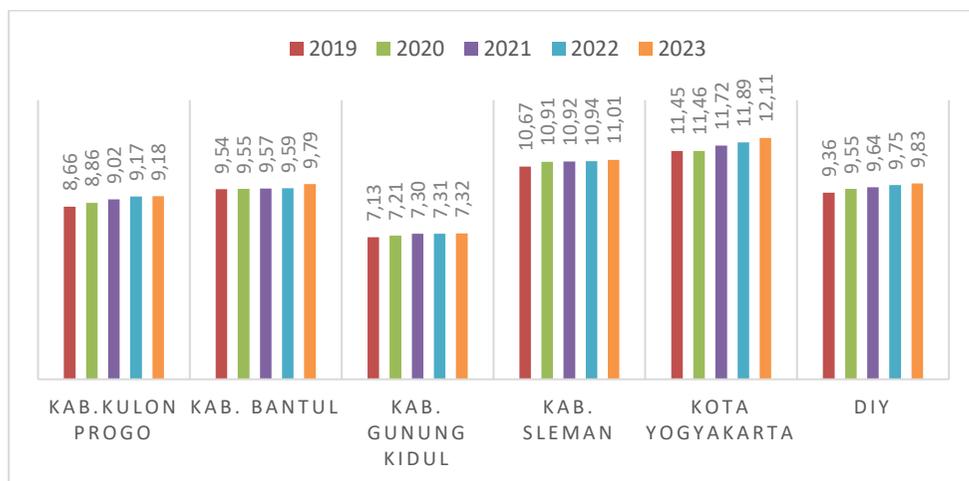
Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-27 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2018-2023

Pada indikator Harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas Gunungkidul pada tahun 2023 sebesar 13,39 tahun, Kulon progo sebesar 14,48 tahun, dan Bantul sebesar 15,61 tahun. Ketiga kabupaten tersebut berada di bawah rata-rata HLS provinsi. HLS Sleman (16,77 tahun) dan Kota Yogyakarta (17,67 tahun) sudah di atas rata-rata provinsi sekaligus tertinggi. Dari data tersebut terlihat bahwa HLS di Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas HLS DIY sedangkan HLS Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul berada di bawah HLS DIY. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan HLS kabupaten/kota di DIY. Dari data tersebut juga terlihat bahwa capaian HLS Gunungkidul terendah di antara kabupaten/ kota di DIY. Meskipun ada peningkatan HLS Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu lima tahun terakhir, namun peningkatannya kurang signifikan. Selain itu, capaian HLS Kabupaten Gunungkidul juga menunjukkan *gap* yang signifikan dibandingkan dengan capaian HLS di kabupaten/ kota di DIY. Hal ini menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu digali dan prioritas untuk diselesaikan di Kabupaten Gunungkidul.

2.1.2.3.4 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Capaian RLS mencerminkan bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). RLS dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: tingkat kemiskinan, aksesibilitas layanan pendidikan, beban ketergantungan keluarga, permasalahan sosial lainnya, dan faktor dari internal peserta didik sendiri. Dalam rangka meningkatkan capaian RLS, diperlukan komitmen dan upaya bersama untuk mewujudkan target tersebut utamanya dalam hal keterjangkauan dan pemerataan akses, serta kesetaraan dan jaminan layanan pendidikan. Berikut adalah perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah DIY dan kabupaten/kota di DIY tahun 2019-2023.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

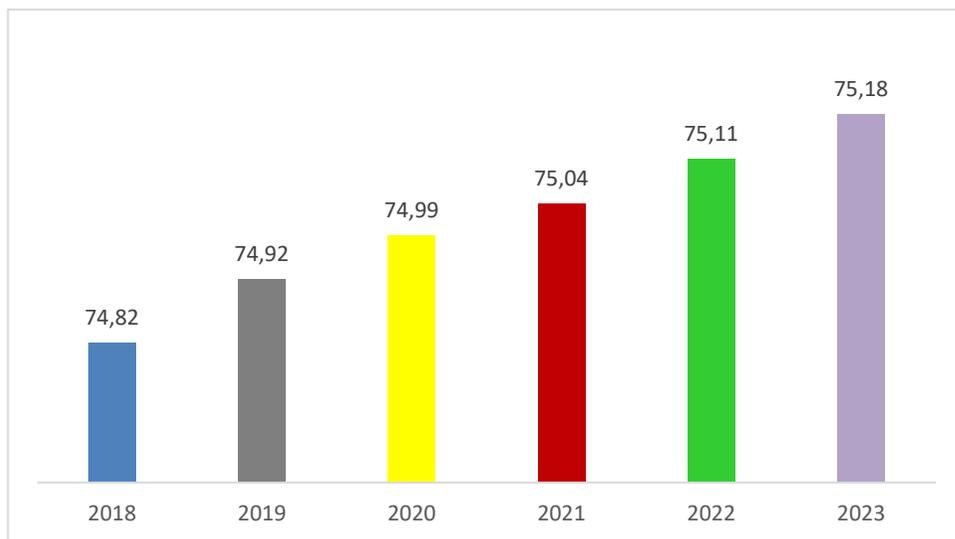
Gambar 2-28 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2019-2023

Dari data tersebut terlihat bahwa selama kurun waktu 2019-2023 terjadi tren peningkatan capaian RLS DIY yaitu dari 9,32 di tahun 2019 menjadi 9,83 tahun di tahun 2023. RLS DIY tahun 2023 mengalami percepatan dengan bertambah 0,08 tahun menjadi 9,83 tahun. Capaian RLS kabupaten/kota di DIY selama kurun waktu tersebut tertinggi adalah Kota Yogyakarta sedangkan capaian terendah

adalah Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2023, RLS tertinggi di Kota Yogyakarta yaitu mencapai 12,11 tahun. Sedangkan RLS terendah sebesar 7,32 tahun berada di Gunungkidul begitu juga Kulon Progo beserta Bantul juga tergolong rendah di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan terdapat ketimpangan yang signifikan antara Kota Yogyakarta yang rata-rata penduduknya menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dengan Kabupaten Gunungkidul yang rata-rata penduduknya menyelesaikan pendidikan hanya di tingkat dasar. Dari gambar di atas juga ditunjukkan adanya ketimpangan (disapritas) capaian RLS yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan.

2.1.2.3.5 Angka Harapan Hidup (AHH)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), AHH merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Derajat kesehatan yang meningkat akan ditandai oleh peningkatan usia harapan hidup. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



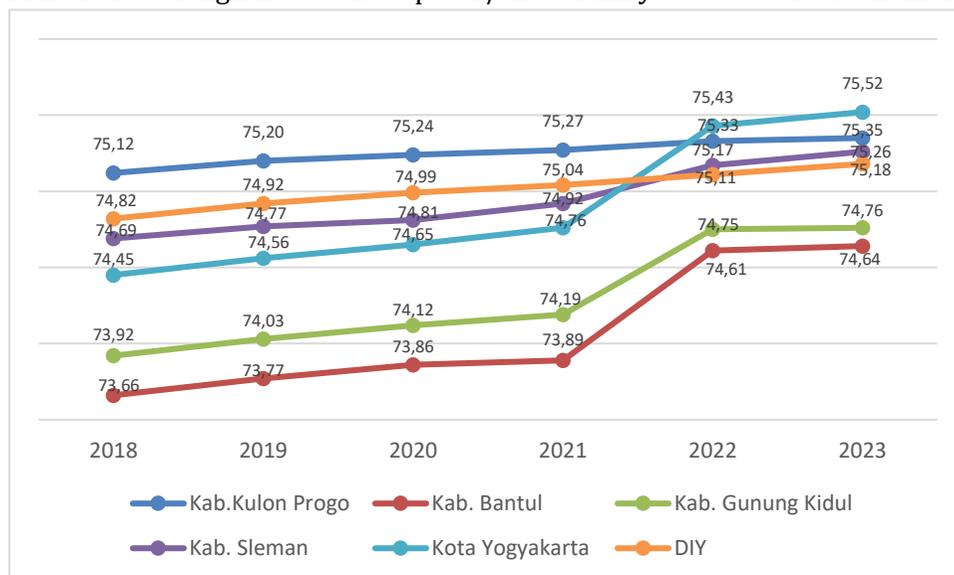
Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-29 Perkembangan Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2018-2023

Angka harapan hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. AHH di DIY dalam kurun waktu selama tahun 2018-2023 terus menunjukkan peningkatan, dari awalnya 74,82 tahun pada tahun 2018 meningkat menjadi 75,18 tahun pada tahun 2023. Capaian tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 0,07 tahun dari tahun 2022. AHH saat lahir di DIY masih merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Pada capaian AHH di kabupaten/kota di DIY selama kurun waktu enam tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023, AHH di Kota Yogyakarta mencapai 75,52 tahun, lebih tinggi dari capaian AHH DIY. Sedangkan capaian AHH pada tahun 2023 terendah di Kabupaten Bantul yang mencapai 74,64. AHH Kabupaten Kulon Progo setiap tahunnya lebih tinggi dari AHH DIY, Mulai tahun 2022 AHH Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman juga lebih tinggi dari

AHH DIY. Sedangkan dua kabupaten/ kota lainnya berada di bawah AHH DIY.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-30 Angka Harapan Hidup DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2023

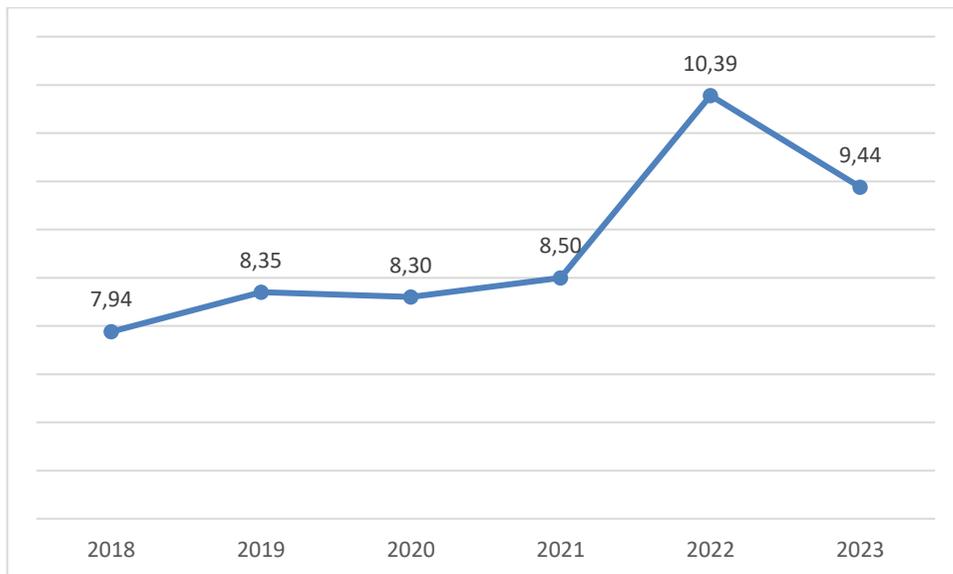
AHH dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesehatan, ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat. Sektor kesehatan sangat berperan dalam pencapaian indikator AHH melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, penurunan angka kesakitan, dan pelayanan kesehatan. Peningkatan AHH yang terjadi di DIY salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan dalam hal kesehatan. Pengaruh kesehatan dalam upaya meningkatkan usia harapan hidup ditunjukkan dengan semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi di masyarakat. Dari capaian peningkatan AHH DIY diprediksi akan berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk lanjut usia.

2.1.2.3.6 Prevalensi Balita Gizi Kurang atau Kekurangan Energi Protein (KEP)

Kualitas hidup SDM salah satunya ditentukan oleh status gizi. Keadaan gizi buruk dan kurang dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit infeksi yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan

fisik, serta mental dan jaringan otak. Kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Prevalensi balita gizi kurang atau Kurang Energi Protein (KEP) di DIY cenderung fluktuatif selama kurun waktu enam tahun terakhir. Pada tahun 2018 prevalensi balita gizi kurang di DIY yaitu 7,94%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 8,35%. Pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dibanding tahun 2019, dari 8,35% menjadi 8,30%. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,20% dibandingkan tahun 2020, dari 8,30% menjadi 8,50%. Sedangkan tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun 2021, dari 8,50% menjadi 10,39%. Pada tahun 2023 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2022, dari 10,39% menjadi 9,44%. Pada tahun 2023, jumlah balita gizi kurang sebanyak 8.656 balita (Dataku Bappeda DIY, 2023).



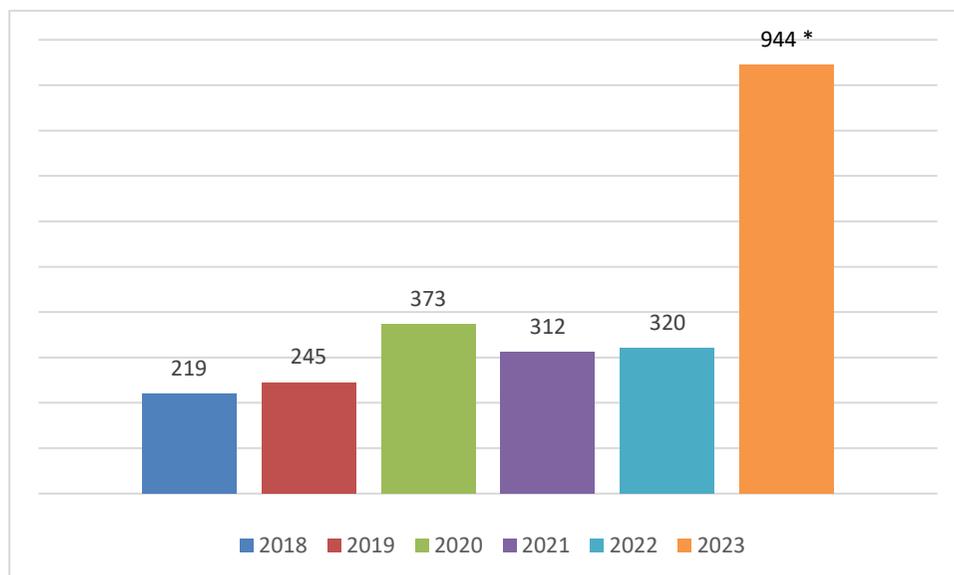
Sumber: Dataku Bappeda DIY dan Dinas Kesehatan DIY, 2023

Gambar 2-31 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang DIY Tahun 2018 s.d 2023

2.1.2.3.7 Balita Gizi Buruk

Pada saat ini, DIY mengalami permasalahan ganda terkait gizi pada balita. Di satu sisi, masih banyak ditemukan balita menderita gizi kurang dan gizi buruk tetapi di 2-70

sisi lain, balita dengan kasus gizi lebih juga ditemukan. Jumlah balita gizi buruk di DIY cenderung fluktuatif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, jumlah balita gizi buruk sebanyak 219 balita. Hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan menjadi 373 balita. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 312 balita. Namun pada tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan menjadi 320 balita. Tahun 2023 jumlah balita gizi buruk mengalami peningkatan cukup tinggi menjadi 944 balita (data sementara)



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar 2-32 Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk di DIY Tahun 2018-2023 (Balita)

2.1.2.3.8 Persentase Balita *Stunting*

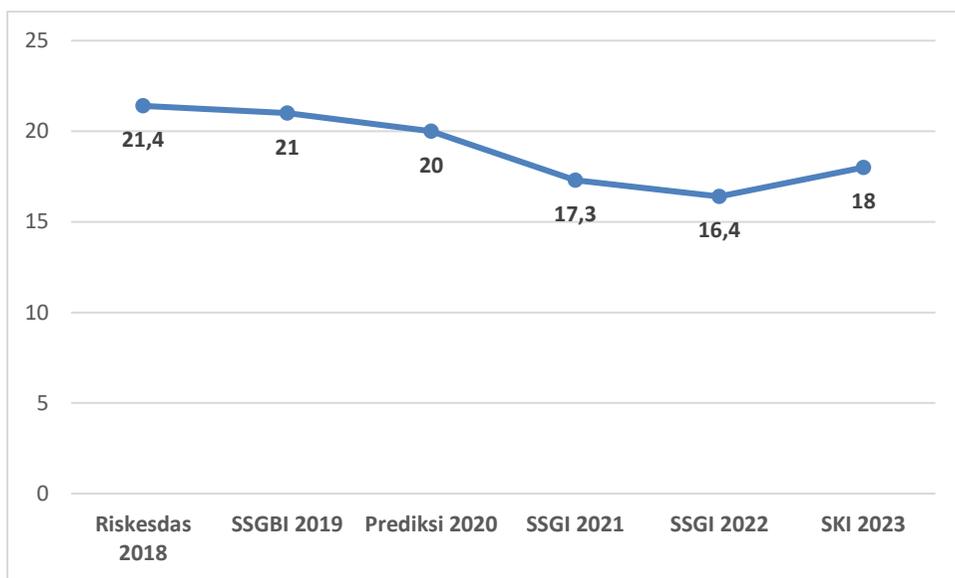
Permasalahan balita *stunting* di DIY masih memerlukan perhatian khusus bila ditinjau dari amanat RPJMN 2020-2024 dimana prevalensi balita *stunting* ditargetkan sebesar 14% di tahun 2024. *Stunting* adalah pertumbuhan yang terhambat (tumbuh pendek). *Stunting* terjadi akibat kegagalan pada saat proses tumbuh kembang seorang anak karena kondisi kesehatan dan asupan gizi yang tidak optimal.

Stunting sering berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi, paparan suatu penyakit, dan asupan gizi yang kurang secara kuantitas dan kualitas. *Stunting*

merupakan masalah kesehatan masyarakat karena berhubungan dengan meningkatnya resiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan motorik terlambat, dan terhambatnya pertumbuhan mental. Anak-anak *stunting* menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang kurang berpendidikan, miskin, kurang sehat, dan lebih rentan terhadap penyakit menular.

Upaya penurunan *stunting* dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya *stunting* dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Sementara itu, intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung *stunting* yang umumnya berada di luar kewenangan sektor kesehatan seperti pangan, sanitasi, dan pengasuhan. Selain mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor.

Prevalensi balita *stunting* berdasarkan data dari hasil survei menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu tahun 2018-2022, tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2023. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan capaian prevalensi *stunting* DIY sebesar 21,4% dan menurun di tahun 2019 mencapai 21% berdasarkan data dari Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI). Pada tahun 2020 tidak dilakukan pengukuran sehubungan terjadinya pandemi Covid-19, tetapi di tingkat pusat menerbitkan buku prediksi *stunting* sebagai dasar pemantauan dan evaluasi kinerja program *stunting*. Pada tahun 2020, prevalensi *stunting* DIY sebesar 20% dan berturut-turut menurun di tahun 2021 sebesar 17,3% dan tahun 2022 sebesar 16,4% berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Sedangkan pada tahun 2023 berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi *stunting* DIY kembali meningkat menjadi 18%. Peningkatan angka prevalensi *stunting* juga diikuti oleh kabupaten/kota di DIY kecuali Kabupaten Sleman.



Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2024

Gambar 2-33 Perkembangan Balita *Stunting* di DIY Tahun 2018-2023 (Persen)

Tabel 2-27 Perkembangan Jumlah Organisasi Kesenian dan Budaya di DIY Tahun 2018-2023

Kabupaten/Kota	2018 (Riskesdas)	2019 (SSGBI)	2021 (SSGBI)	2022 (SSGI)	2023 (SKI)
Kota Yogyakarta	16,93	24,10	17,10	13,80	16,80
Kabupaten Bantul	22,89	19,20	19,10	14,90	20,50
Kabupaten Kulon Progo	22,90	27,20	14,90	15,80	21,20
Kabupaten Gunungkidul	32,51	23	20,60	23,50	22,20
Kabupaten Sleman	14,70	18,50	16	14,90	12,40
DIY	21,41	22,40	17,54	16,60	18

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2024

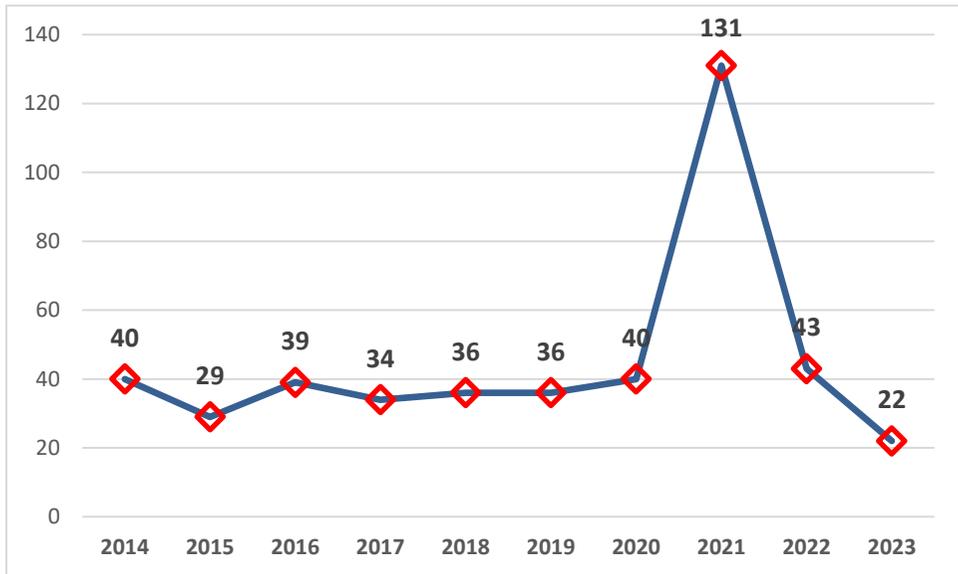
2.1.2.3.9 Angka Kematian Ibu (AKI)

Menurut *World Health Organization* (WHO), kematian ibu atau *maternal death* adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh kejadian yang

berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Menurut BPS, AKI merupakan Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor tiga yaitu fokus dalam upaya penurunan AKI. Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Perkembangan AKI dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian ibu.

DIY belum sepenuhnya mampu menekan kasus kematian ibu, bayi, dan balita. Kasus kematian ibu, bayi, dan balita tercatat fluktuatif dari tahun ke tahun. Khusus untuk kasus kematian ibu, pada tahun 2023 tercatat 22 kasus kematian ibu dari 35.078 kasus kelahiran hidup atau dengan kata lain Angka Kematian Ibu DIY tahun 2022 sebesar 63/100.000 Kelahiran Hidup. Penyebab kematian ibu didominasi oleh permasalahan pendarahan dan gangguan infeksi. Masalah lain yang masih menjadi perhatian adalah faktor ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya sehingga tidak teridentifikasinya keberadaan ibu hamil dengan resiko tinggi. Selama kurun 2014 sampai dengan 2022, terjadi lonjakan kasus kasus kematian ibu di tahun 2021 dengan penyebab utama adalah Covid-19.



Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2024

Gambar 2-34 Perkembangan Jumlah Kematian Ibu di DIY Tahun 2014-2023

Kasus persalinan remaja dan kasus ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) di DIY juga menjadi hal yang perlu diperhatikan di DIY. Kondisi tersebut tentu saja akan meningkatkan resiko pada saat proses persalinan. Jumlah persalinan remaja (≤ 18 tahun) di DIY mencapai 302 kasus di tahun 2023 dengan kasus tertinggi di Kabupaten Sleman dengan 88 kasus.

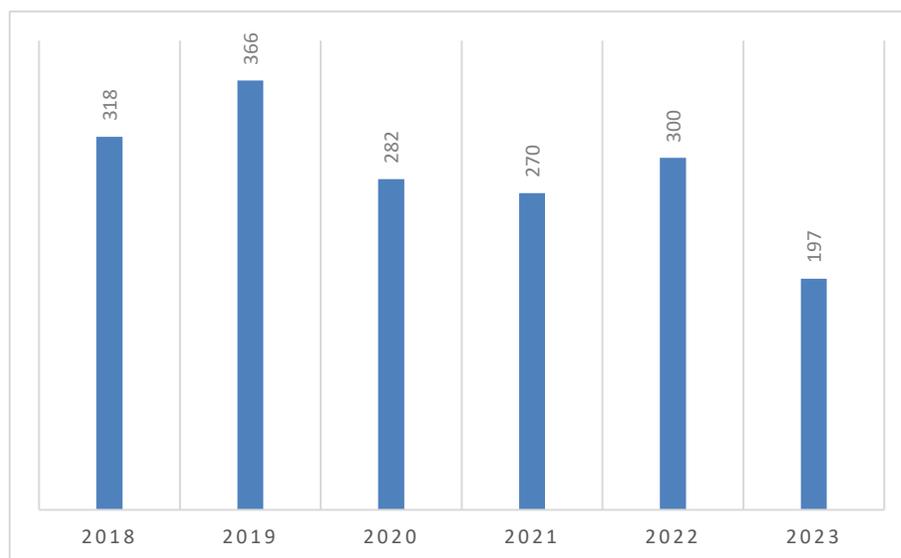
Sedangkan untuk kasus ibu hamil Kurang Energi Kronis di DIY pada tahun 2023 mencapai 12,8%. Kondisi-kondisi ini perlu upaya-upaya kolaboratif dengan multi stakeholder dalam mengurangi resiko persalinan dan menurunkan angka kematian ibu melalui penguatan akses layanan dan informasi kesehatan reproduksi, KIE terkait pencegahan pernikahan dini, perluasan cakupan layanan kesehatan, dan sebagainya.

2.1.2.3.10 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Hal ini juga disebabkan karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan

lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Menurut BPS, angka kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat kematian bayi. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Menurut SDKI tahun 2012, angka kematian bayi di DIY mencapai 25 per 1000 kelahiran hidup. Target SDG's pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 Kelahiran Hidup. Perkembangan AKB di DIY dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian bayi. Dari data kurun waktu 2018-2022 diperoleh informasi perkembangan jumlah kematian bayi di DIY sebagai berikut:



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2-35 Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY Tahun 2018-2023 (Anak)

Dari data tersebut terlihat bahwa kasus kematian bayi mengalami angka yang fluktuatif tapi cenderung menurun. Angka kematian bayi mengalami kenaikan 2-76

dari angka 318 pada tahun 2018 menjadi 366 pada tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 dan 2021 angka kematian bayi di DIY terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 angka kematian bayi sebanyak 282 anak, turun 84 kasus dibandingkan tahun 2019. Sedangkan tahun 2021 turun 12 kasus menjadi 270 anak dibandingkan tahun 2020. Kasus kematian bayi tahun 2021 tertinggi di Kabupaten Gunungkidul (74 kasus) dan terendah di Kota Yogyakarta (30 kasus). Pada tahun 2022, kasus kematian bayi meningkat dibandingkan tahun 2021 menjadi 303 kasus. Kasus kematian bayi tahun 2022 tertinggi di Kabupaten Bantul (90 kasus) dan terendah di Kota Yogyakarta (27 kasus). Sedangkan kasus kematian bayi di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 46 kasus, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 81 kasus, dan Kabupaten Sleman sebanyak 59 kasus. Pada tahun 2023 kasus kematian bayi mengalami penurunan sebanyak 103 kasus menjadi 197. Kasus kematian bayi tertinggi di Kabupaten Kulon Progo (28 kasus) dan terendah di Kota Yogyakarta (14 kasus). Sedangkan kasus di Kabupaten Bantul sebanyak 33 kasus, Kabupaten Gunungkidul 24 kasus dan Kabupaten Sleman 16 kasus. Penyebab umum kematian bayi dan neonatal di DIY adalah asfiksia pada saat lahir karena lama di jalan kelahiran, letak melintang, serta panggul sempit. Selain itu, penyebab lain kematian bayi yang sering dijumpai di DIY antara lain kelainan bawaan.

2.1.2.3.11 Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan wujud masyarakat yang telah memiliki kesiapan potensi untuk mengenali, mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi dan terjadi di wilayahnya secara mandiri. Desa siaga adalah salah satu strategi dalam akselerasi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat antara lain: masih tingginya kematian ibu dan bayi, tingginya masalah gizi buruk dan angka *stunting*, belum teratasi masalah penyakit menular dan meningkatnya penyakit tidak menular serta penyakit yang resiko terjadinya kejadian luar biasa (KLB), bencana alam dan lain-lain. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk ditanggulangi. Melalui penggerakan pemberdayaan masyarakat merupakan cara yang tepat untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan secara dini oleh masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu suatu penggerakan pemberdayaan masyarakat melalui kader dan tokoh masyarakat sebagai penggeraknya. Desa siaga sudah menjadi indikator dalam standart pelayanan minimal Kabupaten/Kota. Data di DIY 100% (438 desa/ kelurahan) telah terbentuk Desa Siaga Aktif.

2.1.2.3.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). TPAK mengindikasikan besarnya potensi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan/ pasokan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. TPAK DIY dalam kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi, namun secara trend mengalami peningkatan. TPAK DIY pada Bulan Februari 2020 tercatat sebesar 71,02%, kemudian pada Februari 2021 dan 2022 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 74,68%. Namun TPAK DIY mengalami penurunan pada Februari 2023 sebesar 73,43%, dan pada Februari 2024 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 73,18% jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2023. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ada penurunan persediaan/ pasokan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di wilayah DIY. Penurunan TPAK disebabkan oleh turunnya jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja pada Februari 2024 dibandingkan periode tahun sebelumnya.



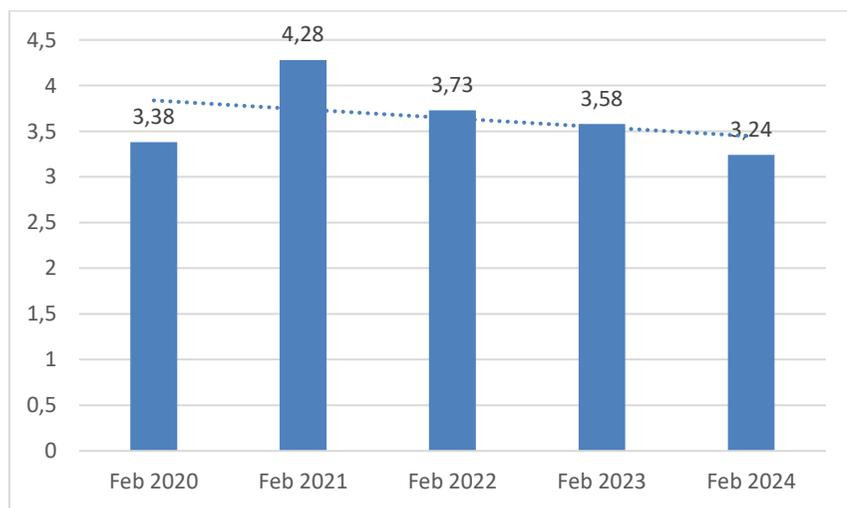
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2-36 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di DIY Tahun 2012-2024 (Persen)

Sementara perkembangan TPAK DIY selama tahun 2020-2024 menurut jenis kelamin menunjukkan TPAK laki-laki memiliki level yang lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. TPAK laki-laki di DIY pada Februari 2024 sebesar 83,19% sedangkan TPAK perempuan sebesar 63,53%. Fenomena ini dapat mengindikasikan bahwa keterlibatan penduduk laki-laki dalam aktivitas perekonomian cenderung lebih dominan dari perempuan. Hal ini terjadi karena terdapat faktor budaya bahwa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah tanggung jawab laki-laki, sementara aktivitas mengurus rumah tangga dilakukan oleh perempuan, sehingga perempuan lebih sedikit masuk ke dalam angkatan kerja.

2.1.2.3.13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

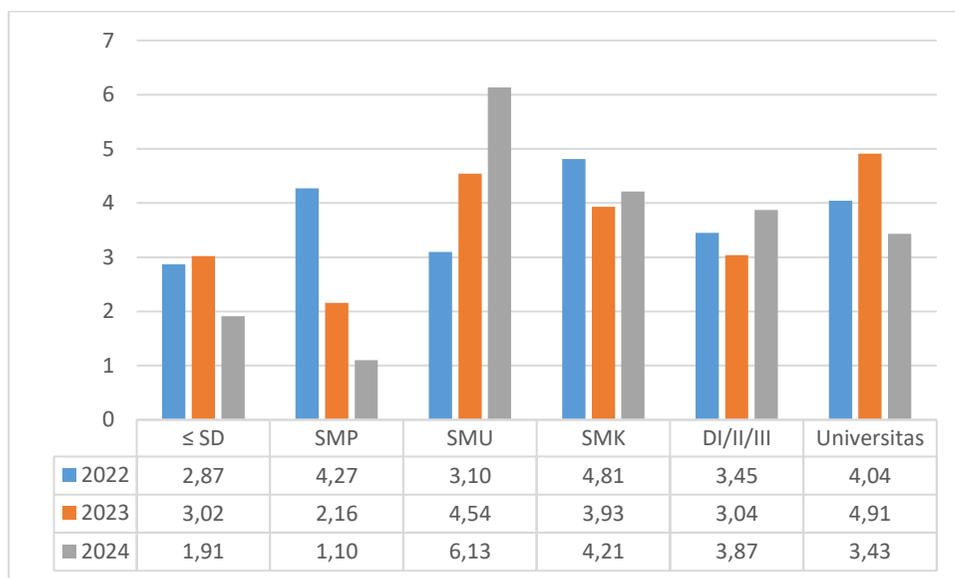
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja. Berikut merupakan gambaran TPT di DIY periode Februari tahun 2020 – 2024.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2-37 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Tahun 2020-2024 (Persen)

Selama lima tahun terakhir, TPT DIY mengalami kecenderungan trend menurun. TPT DIY pada Februari 2020 sebesar 3,38% mengalami peningkatan pada Februari 2023 dengan TPT sebesar 4,28%. Angka tersebut mengalami penurunan pada Februari 2022 dengan TPT sebesar 3,78% dan terus mengalami penurunan hingga sebesar 3,24% pada Februari 2024. Apabila dibandingkan dengan Februari 2023, TPT DIY pada Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 0,34% poin dari semula 3,58% menjadi 3,24%. Kondisi ini menunjukkan kegiatan perekonomian di DIY sudah normal kembali pasca pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari TPT Februari 2024 sudah lebih baik jika dibandingkan kondisi Februari 2020 (sebelum pandemi) yang mencapai 3,38%.



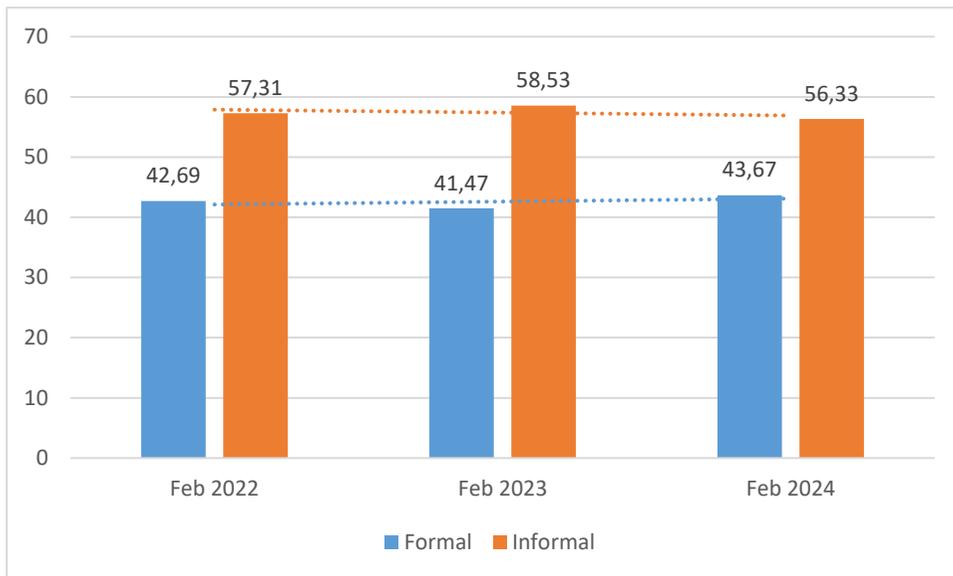
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2-39 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DIY, Tahun 2022-2024 (Persen)

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Februari 2024, TPT untuk jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lainnya sebesar 6,13%. TPT tertinggi kedua yaitu pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 4,21% diikuti oleh TPT pada jenjang Diploma I/II/III sebesar 3,87% dan TPT universitas sebesar 3,43%. Sementara TPT paling rendah adalah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 1,10% dan Sekolah Dasar (SD) ke bawah sebesar 1,91%. Apabila dibandingkan dengan periode Februari 2023, TPT yang mengalami penurunan adalah pada jenjang pendidikan Universitas, SD ke bawah, dan jenjang Sekolah Menengah Pertama. Sementara TPT yang mengalami peningkatan terbesar adalah tamatan SMA yang naik sebesar 1,59% poin, diikuti oleh TPT pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III naik sebesar 0,83% poin, dan SMK naik 0,28% poin dibanding Februari 2023. Kondisi tersebut disebabkan oleh semakin ketatnya persaingan dalam pasar kerja sehingga pencari kerja dituntut untuk memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai, serta mampu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi. Selain itu, hal yang masih menjadi tantangan bersama adalah belum terciptanya *link and match* antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas (lebih selektif) terutama pada tingkat pendidikan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi, sementara untuk pendidikan rendah cenderung lebih mudah diserap dunia kerja karena mau menerima pekerjaan apa saja.

2.1.2.3.14 Rasio Penduduk yang Bekerja di Sektor Formal

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan dibayar, serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya yaitu status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar masuk dalam kategori kegiatan informal. Kualitas pekerjaan di DIY dalam kurun waktu tiga tahun terakhir semakin baik diindikasikan dengan peningkatan *trend* persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor formal. Pada periode Februari 2022 persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor formal sebesar 42,69%, mengalami kenaikan menjadi sebesar 41,47% pada periode Februari 2023. Sementara untuk periode Februari 2024, persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor formal kembali mengalami kenaikan menjadi 43,67% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

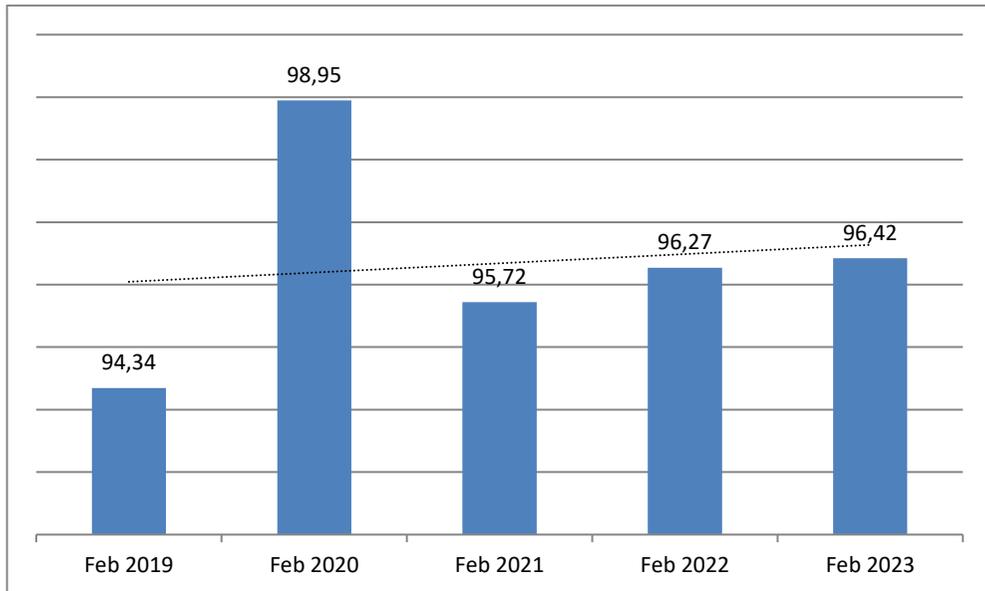


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2-40 Perkembangan Penduduk yang Bekerja di Sektor Formal dan Informal, Tahun 2022 - 2024 (Persen)

2.1.2.3.15 Rasio Penduduk Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau menggambarkan permintaan tenaga kerja. Selama lima tahun terakhir, rasio atau persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja menunjukkan angka yang fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Pada Februari tahun 2019 rasio penduduk yang bekerja sebesar 94,34%, kemudian mengalami peningkatan pada Februari tahun 2020 menjadi 98,95%. Pada Februari tahun 2021 menunjukkan penurunan menjadi 95,72% dan kembali meningkat pada Februari tahun 2022 menjadi 96,27%. Pada Februari tahun 2023 rasio penduduk bekerja juga meningkat menjadi 96,42% dibandingkan tahun 2022.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2019-2023

Gambar 2-41 Perkembangan Angkatan Kerja di DIY Tahun 2019 – 2023 (Persen)

2.1.2.1 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.1.1 Budaya

Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kewenangan kebudayaan DIY diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Sedangkan mengacu pada Perdais No 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan, kebudayaan dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat DIY. Fokus pembangunan kebudayaan dilakukan pada objek kebudayaan meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni. Pengaturan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan terhadap budaya lain, kemampuan mengolah budaya, kesadaran dialogis, kepribadian kuat, kesinambungan, dan kesatuan budaya mandiri.

DIY memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur yang juga dipercayai sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) selain memiliki cakupan keberlakuan di DIY, juga dapat disejajarkan sebagai nilai-nilai budaya nasional atau bangsa. Sebagaimana diatur dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta menyebutkan bahwa Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya (*golong gilig*) secara terpadu (*sawiji*) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (*sengguh*), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (*ora mingkuh*). Tata Nilai Budaya Yogyakarta meliputi *religio-spiritual*; tata nilai moral; tata nilai kemasyarakatan; tata nilai adat dan tradisi; tata nilai pendidikan dan pengetahuan; tata nilai teknologi; tata nilai penataan ruang dan arsitektur; tata nilai mata pencaharian; tata nilai kesenian; tata nilai bahasa; tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya; tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan; tata nilai kejuangan dan kebangsaan; dan tata nilai semangat keyogyakartaan. Tata nilai tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksana bagi setiap warga masyarakat dalam bertingkah laku dan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Kekayaan peninggalan pengetahuan dan teknologi leluhur masyarakat DIY sangat beragam, misalnya *pranata mangsa*, arsitektural dan tata lingkungannya, permainan rakyat dan kelengkapannya, olahraga jemparingan, berkuda, *pawukon*, senjata, alat musik tradisional, tata busana, tata boga, pengobatan tradisional, alat transportasi, sistem bertani, dan lainnya.

Kekayaan budaya bahasa terkandung dalam tradisi dan ekspresi lisan antara lain: sejarah lisan, dongeng, rapalan, parikan, geguritan dan cerita rakyat. Karya bahasa yang sudah dituliskan dalam bentuk manuskrip antara lain serat, prasasti, babad, naskah, dan kitab. Masyarakat juga memiliki ritual tersendiri untuk menghadapi proses seleksi sosial dan alam dengan upacara daur hidup (upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian), keselarasan alam (*merti kali*, labuhan), dan upacara penghormatan leluhur (*Nyadran*, *Ruwahan*, *Suran* dan lain-lain).

Perkembangan kesenian di DIY sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Perkembangan tersebut akhirnya merubah peran dan fungsi dari jenis-jenis seni, seperti seni sakral menjadi *profane* atau yang semula hanya dapat dinikmati oleh kalangan terbatas akhirnya menjadi seni komunal yang dapat dinikmati masyarakat luas. Terdapat juga jenis seni yang mulai menghilang dalam masyarakat karena komunitas pendukungnya mulai

sedikit dan kesempatan untuk tampil tidak pernah ada. Perkembangan kesenian di DIY tidak lepas dari keberadaan Taman Budaya, galeri, *art shop* dan komunitas pelaku/pekerja seni/seniman yang tersebar di beberapa wilayah, juga oleh keberadaan institusi pendidikan yang bergerak di bidang seni seperti SMSR, SMKI, SMM dan ISI, UNY, sanggar, padepokan, yayasan seni, dan lain-lain.

Tabel 2-28 Perkembangan Jumlah Organisasi Kesenian dan Budaya di DIY Tahun 2018-2023

Organisasi Budaya	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Organisasi Seni Rupa	15	25	25	29	29	29
Organisasi Sinematografi	42	44	44	44	44	44
Organisasi Seni Pertunjukan	6.420	8.757	8.757	8.757	8.757	8.757
Tokoh seniman/ budayawan	507	504	968	968	968	968
Kerajinan Properti Budaya	244	276	276	276	276	276
Perusahaan Bioskop	3	3	3	3	3	3
Perusahaan Persewaan dan Penjualan Film	38	38	38	38	38	38

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2024*

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan bioskop dan perusahaan persewaan dan penjualan film tidak mengalami perubahan dalam enam tahun terakhir. Perkembangan organisasi sinematografi, seni pertunjukan dan kerajinan properti budaya di DIY mengalami peningkatan tahun 2018 hingga tahun 2019, namun stagnan dari tahun 2019 hingga 2023. Perkembangan jumlah tokoh seniman/budayawan mengalami tren peningkatan selama lima tahun terakhir, meskipun sempat menurun pada tahun 2019. Produksi film-film pendek produksi Pemerintah Daerah tumbuh berkembang sangat pesat dan beberapa film menjadi viral seperti Film berjudul *Tilik*, *Pemean*, ke Jogja dan lainnya. Sedangkan perkembangan organisasi seni rupa mengalami tren meningkat selama lima tahun terakhir. Namun secara keseluruhan perkembangan jumlah organisasi kesenian dan budaya di DIY mengalami stagnan mulai tahun 2021-2023.

Perkembangan kebudayaan di DIY tidak lepas dari dukungan lembaga maupun sarana prasarana budaya. Perkembangan lembaga dan sarana prasarana di DIY dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 2-29 Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana di DIY Tahun 2018-2023

Organisasi Budaya	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lembaga Budaya	78	186	186	186	186	186
Lembaga Pendidikan Budaya	49	66	66	66	66	66
Prasarana Budaya	107	107	107	107	107	107
Galeri Seni Rupa	63	70	70	70	70	70

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Dari data tersebut terlihat bahwa perkembangan prasarana budaya tidak ada penambahan jumlah selama enam tahun terakhir. Sedangkan lembaga budaya, lembaga pendidikan budaya, maupun galeri seni rupa mengalami tren meningkat pada tahun 2018 hingga 2019, namun stagnan pada tahun 2019 hingga 2023.

Sampai tahun 2023 DIY memiliki 717 jenis upacara adat dan 35 jenis upacara tradisi yang tersebar di kabupaten kota. Kesemuanya masih dilaksanakan di 5 kabupaten/kota, misalnya upacara adat pernikahan, kelahiran, selamatan. Sebagian kecil kegiatan adat dan tradisi yang ada sudah teragendakan, namun sebagian besar sifatnya insidental dan tidak teragendakan secara tetap, antara lain berupa *mitoni, tetakan, pitung dinanan, slametan, nyatus, nyewu* dan lain-lain. Beberapa kalurahan, kelompok organisasi budaya, keluarga memiliki jenis upacara adat yang sama di kalurahan lain, antara lain *merti dusun, ruwatan, labuhan, bersih desa, sedekah bumi* dan sebagainya.

Pengembangan budaya di DIY juga dilakukan dengan pembentukan dan pengembangan desa budaya. Pada tahun 2017 hingga 2020, DIY memiliki 56 desa budaya, dan berkembang pada tahun 2021-2022 menjadi 76 desa budaya. Pada tahun 2023 berkembang menjadi 100 desa budaya. Peraturan Gubernur DIY No. 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya mengatur perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan desa-desa budaya dan kampung budaya di DIY. Selain itu dalam Pergub DIY Nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya mengamanatkan adanya sinergi untuk mengembangkan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Yang dimaksud Desa/Kalurahan Mandiri Budaya adalah desa/kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai keistimewaan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketentraman warga dalam ke-bhinneka tunggal ika-an. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/kegiatan Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa Prima

dan Desa Preneur. Jumlah Desa Mandiri Budaya terus meningkat dari 10 desa pada tahun 2017-2020 menjadi 18 desa di tahun 2021. Pada tahun 2022 sudah ditetapkan 7 desa mandiri budaya, sehingga menjadi 25 desa mandiri budaya.

Tabel 2-30 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2018-2023

Jenis Data	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Upacara adat	478	482	717	717	717	717
Upacara tradisi	35	35	35	35	35	35
Makanan tradisional	208	223	276	276	276	276
Jenis permainan tradisional	58	58	69	69	69	69
Jenis busana tradisional	38	38	38	38	38	38
Sanggar rias tradisional	405	406	536	536	536	536
Cerita rakyat	37	80	63	63	63	63
Naskah kuno	509	509	714	714	714	714

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Pelestarian kebudayaan yang meliputi upacara adat istiadat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional telah dilakukan dengan pembinaan-pembinaan dan fasilitasi festival. Dengan festival upacara adat masyarakat dapat menemukan dan mengenali kembali upacara-upacara adat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional yang sudah langka dalam masyarakat. Selain keanekaragaman budaya dan kesenian, DIY juga memiliki berbagai kekayaan lain berupa bangunan cagar budaya, kawasan cagar budaya, dan benda cagar budaya, situs, dan museum. Perkembangan kekayaan budaya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2-31 Jumlah Cagar Budaya, Situs, dan Museum di DIY Tahun 2018-2023

Jenis Data	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bangunan cagar budaya	1.041	1.077	1.599	1.599	252	252
Kawasan cagar budaya	20	17	17	17	11	11
Benda cagar budaya	808	834	1.685	1.687	342	342
Situs	343	343	343	343	72	74
Museum	44	47	48	48	48	48

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Ruang ekspresi publik untuk mempertunjukkan kemampuan dan hasrat seni, sekaligus arena untuk berperan aktif dalam pelestarian budaya bagi masyarakat sedang diupayakan pembangunan Taman Budaya di Kabupaten/Kota dan rencana

pembangunan pusat kebudayaan berkelas internasional di Yogyakarta. Ekspresi tersebut diwadahi melalui serangkaian gelaran even seni dan budaya seperti: Festival Kebudayaan Yogyakarta, Festival Adat, Gelar Budaya Yogyakarta, Gelar Seni Desa Budaya, Dialog Budaya Yogya Semesta, Fasilitasi Adat Istiadat, Festival Jogja Tempo Dulu, Festival Dhaksinaga di Gunungkidul, Festival Menoreh di Kulon Progo, Festival Paseban di Bantul dan Festival Godong Opo-Opo di Kota, Festival Garis Imajiner di Sleman, Kompetisi Bahasa dan Sastra, dan lain-lainnya.

Pelestarian budaya benda berkolaborasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam penanganan budaya klasik yang berupa candi-candi dan situs. Budaya benda ini merupakan bukti nyata perjalanan bersejarah masyarakat DIY sejak zaman prasejarah hingga sekarang, yang akan menjadi jati diri bangsa. Tahun 2017, ruas jalan antara Tugu – Kraton – Panggung Krapyak yang dikenal dengan Sumbu Filosofi telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional dan masuk *tentative list* Warisan Budaya Dunia UNESCO. Penyiapan teknis dan masyarakat dalam menghadapi Jogja sebagai Kota Warisan Budaya Dunia dengan Sumbu Filosofinya telah dilakukan. Keberadaan filosofi kehidupan yang terkandung dalam Sumbu Filosofi ini sangat langka di dunia. Apabila DIY berhasil masuk dalam Daftar Tetap Kota Warisan Budaya Dunia melalui Kawasan Sumbu Filosofi antara Tugu – Kraton - Panggung Krapyak, dimungkinkan komitmen pihak internasional untuk turut menjaga kelestarian kawasan ini.

2.1.2.1.2 Olahraga

Pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang kuat salah satunya dilakukan dengan olahraga. Selain itu, olahraga juga sebagai sarana penguatan karakter dan kepemimpinan pemuda, untuk itu peningkatan prestasi olahraga sangat penting dilakukan. Pembinaan dalam bidang olahraga dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya, akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat DIY. Bibit-bibit berprestasi terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Pembinaan olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi.

Olahraga memiliki peran strategis dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas fisik (kesehatan) dan karakter bangsa, mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, meningkatkan roda ekonomi. Kegiatan olahraga pada hakikatnya merupakan miniatur kehidupan. Dikatakan demikian karena di dalam

aktivitas olahraga terkandung banyak nilai, di samping orang yang melakukan kegiatan olahraga memiliki tujuan seperti untuk kesehatan, kesenangan dan pengisi waktu luang, adalah juga secara universal dalam olahraga melekat nilai-nilai perjuangan, kepeloporan, kerja sama, persaingan, respek, komunikasi dan integrasi, ketahanan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas, dan lain-lain. Pembangunan olahraga daerah sebagai bagian dalam sistem keolahragaan nasional yang saling mengait antar subsistem secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga.

Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, Youth Center, Amongrogo, Pondok Pemuda Ambarbinangun, GOR Sorowajan, dan Graha Bakti Wanayasa. Selain itu DIY memiliki GOR UNY, Stadion Maguwoharjo, Kridosono, Stadion Tridadi yang sering dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga dan budaya. Stadion Maguwoharjo termasuk stadion olahraga yang besar tingkat nasional dengan kapasitas penonton 30.000 orang. Berikut perkembangan jumlah sarana prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan olahraga serta perkembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga di DIY.

Tabel 2-32 Perkembangan Jumlah Sarana Prasarana, Organisasi serta Kegiatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2023

Jenis Data	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah klub olahraga	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
Jumlah lapangan/gedung olahraga	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
Jumlah kegiatan olahraga	13	12	2	4	4	4
Jumlah organisasi pemuda	74	74	74	56	56	56
Jumlah kegiatan kepemudaan	11	11	4	6	3	3
Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	10	10	10	10	10	10

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah klub olahraga, jumlah lapangan/gedung olahraga dan jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) tidak ada perubahan pada enam tahun terakhir. Jumlah organisasi pemuda mengalami

penurunan dari 74 pada tahun 2020 menjadi 56 pada tahun 2021 hingga 2023. Sedangkan jumlah kegiatan olahraga dan jumlah kegiatan kepemudaan mengalami tren menurun dalam enam tahun terakhir.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Urusan Pendidikan

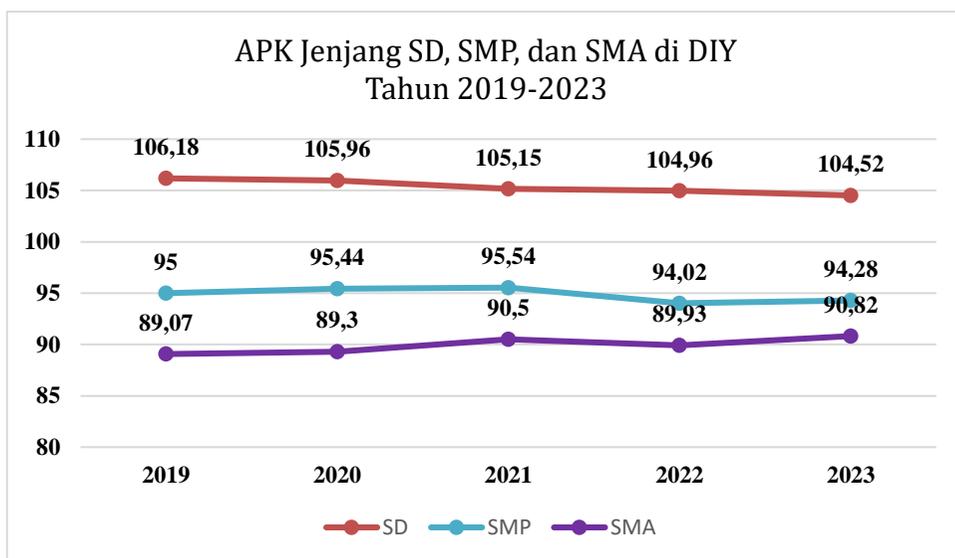
Filosofi yang mendasari pemerintah DIY dalam melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia terangkum dalam "*Hamemayu Hayuning Bawana*". Filosofi itu merupakan basis untuk mewujudkan cita-cita luhur tentang tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berbasis nilai budaya. Salah satu hal utama yang perlu diprioritaskan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu melalui pendidikan.

Pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya yang telah berkembang di masyarakat. Melalui modal dasar kebudayaan dan pendidikan ini pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan pada tercapainya peradaban baru unggul yang menghasilkan 'manusia yang utama' (*jalmâ kang utâmâ*), yang berasaskan 'rasa ke-Tuhan-an, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan. Basis pembangunan tersebut merupakan pengembangan dari konsep semangat *renaissance* di DIY.

1.) Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK DIY tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat dari gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

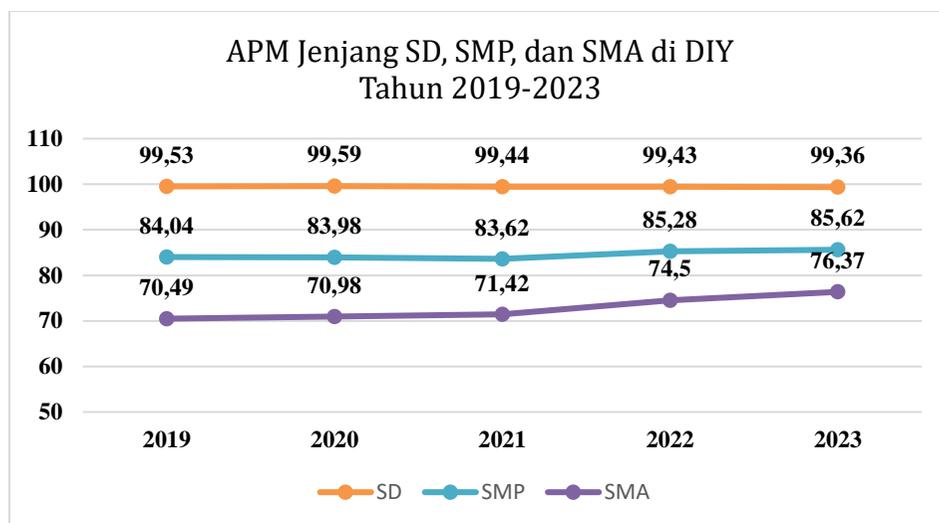
Gambar 2-42 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2023

Dari periode 2019-2023, capaian APK SD/ sederajat menunjukkan capaian di atas 100%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa terdapat anak yang sekolah di SD umurnya di luar 7-12 tahun, dan diduga masih kurang dari 7 tahun. Sementara itu capaian APK SLTP DIY/ sederajat belum 100% yang menunjukkan partisipasi penduduk pada jenjang tersebut masih belum optimal. Sementara APK SLTA cenderung lebih rendah, hal ini diduga banyak anak tamatan SLTP yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA. Tetapi melihat trend peningkatan APK jenjang SLTA dan sederajat menuju angka 100% menunjukkan semakin banyaknya anak usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikan jenjang SLTA/ sederajat.

2.) Angka Partisipasi Murni (APM)

Partisipasi sekolah di suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian APM di wilayah tersebut. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah

dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

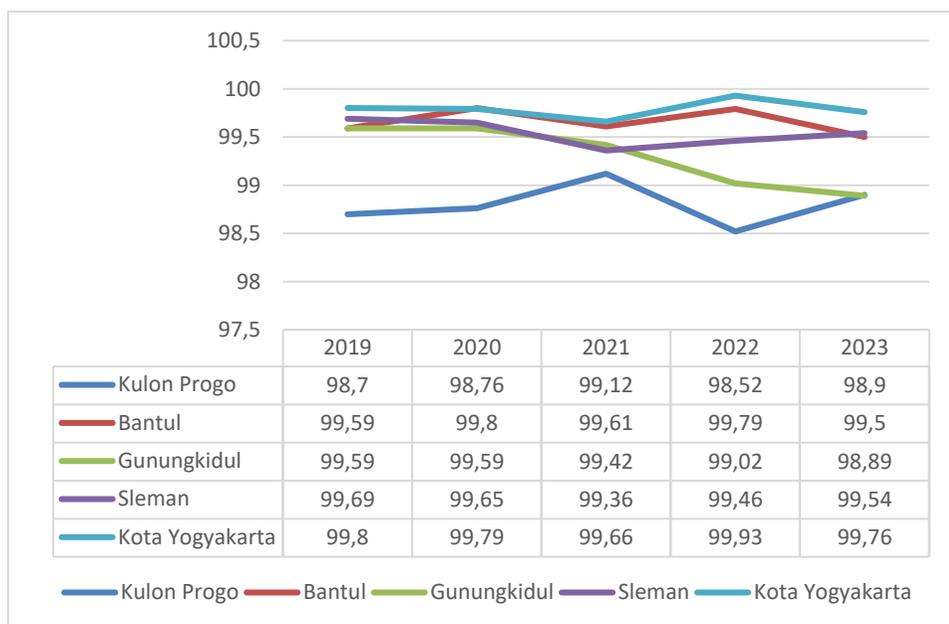


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2-43 Perkembangan Angka Partisipasi Murni DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2023

Perkembangan APM menurut jenjang pendidikan dalam beberapa tahun terakhir terlihat meningkat, level APM terlihat semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Hal ini karena adanya kasus terlambat sekolah untuk jenjang SD dan tinggal kelas untuk jenjang SMP dan SMA. Capaian APM DIY untuk jenjang pendidikan SD tahun 2019 – 2023 dan jenjang pendidikan SMP tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Akan tetapi, tahun 2022 – 2023 capaian APM DIY untuk jenjang pendidikan SMP mengalami peningkatan. Sementara itu, capaian APM tingkat SMA cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2019-2023.

Dilihat dari capaian APM per kabupaten/kota, capaian APM jenjang SD pada tahun 2023 tertinggi di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 99,76% sedangkan yang terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 98,89%. Capaian APM SD Kabupaten Gunungkidul lebih rendah dikarenakan adanya peserta didik baru di Kabupaten Gunungkidul yang masuk SD dengan usia di bawah 7 tahun. Hal ini juga berpengaruh pada capaian APM jenjang SMP dan SMA yang relatif lebih rendah daripada kabupaten lainnya.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2-44 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD Tahun 2019-2023 di tiap kabupaten/kota DIY

3.) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.



Sumber: BPS, 2024 diolah.

Gambar 2-45 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) semua Jenjang di DIY tahun 2019-2023

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa untuk APS SD (usia 07-12 tahun) dan APS SMP (13-15 tahun) selama 5 tahun terakhir menunjukkan capaian mendekati 100%. Sedangkan APS SMA (16-18) tahun menunjukkan trend meningkat menuju angka 90%. Untuk APS PT (19-24 tahun) selama 5 tahun terakhir menunjukkan trend stagnan di kisaran 51%. dari hal tersebut maka perlu mendorong peningkatan APS SMA (16-18 tahun) dan APS PT (19-24 tahun).

4.) Rapor Pendidikan

Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sistem pendidikan pemerintah mengembangkan platform Rapor Pendidikan. Melalui *platform* ini dapat ditunjukkan posisi dan kualitas satuan pendidikan meliputi mutu hasil belajar, keamanan dan inklusivitas, kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta pengelolaan sekolah. Hasil Rapor Pendidikan DIY secara ringkas meliputi kemampuan Literasi, Numerasi, Karakter, serta Penyerapan Lulusan SMK disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2-33 Kemampuan Literasi, Numerasi Jenjang SMA & SMK, Penyerapan Lulusan SMK dan Kepuasan Dunia Kerja Tahun 2023

Nama Indikator	SMA	SMK	Capaian
Kemampuan literasi	93,2	88,06	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum
Kemampuan numerasi	82,48	73,14	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi
Penyerapan lulusan SMK	-	92,21%	Penyerapan lulusan SMK (Bekerja, Melanjutkan Studi, dan/atau Berwirausaha) pada kategori tinggi.
Kepuasan dunia kerja pada budaya kerja lulusan	-	76,16	Persentase lulusan yang mendapatkan penilaian minimal puas dari DUDI memadai.

Sumber : Rapor Pendidikan DIY Tahun 2024, diolah

Dari data di atas Kemampuan Literasi dan kemampuan numerasi peserta didik jenjang SMA dan SMK telah mencapai kemampuan minimum. Kemampuan literasi dan numerasi siswa jenjang SMA lebih tinggi dari pada siswa jenjang SMK. Untuk indikator Penyerapan Lulusan SMK pada kategori tinggi, namun lulusan SMK yang berwirausaha pada kategori Perlu Peningkatan. Untuk Kepuasan dunia kerja pada budaya kerja lulusan pada kategori Memadai.

5.) Akreditasi sekolah

Akreditasi merupakan suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah. Tingkatan akreditasi terdiri dari A (Amat Baik), B (Baik) dan C (Cukup). Untuk mengetahui gambaran mutu pendidikan sekolah SMA/SMK di DIY bisa dilihat dari sekolah dengan nilai akreditasi A. Dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Juni 2024 tercatat total sekolah SMA/SMK sebanyak 381 sekolah. Jumlah sekolah dengan Akreditasi A sebanyak 243 sekolah atau sebanyak 63,78 persen. Terdapat 111 sekolah atau 29,13 persen sekolah dengan akreditasi B, 15 sekolah dengan akreditasi C dan 5 sekolah tidak terakreditasi. Upaya

peningkatan layanan pendidikan dan sarpras sekolah yang sesuai standar masih harus terus didorong agar semakin banyak sekolah yang masuk kategori akreditasi A.

2.1.3.1.2 Urusan Kesehatan

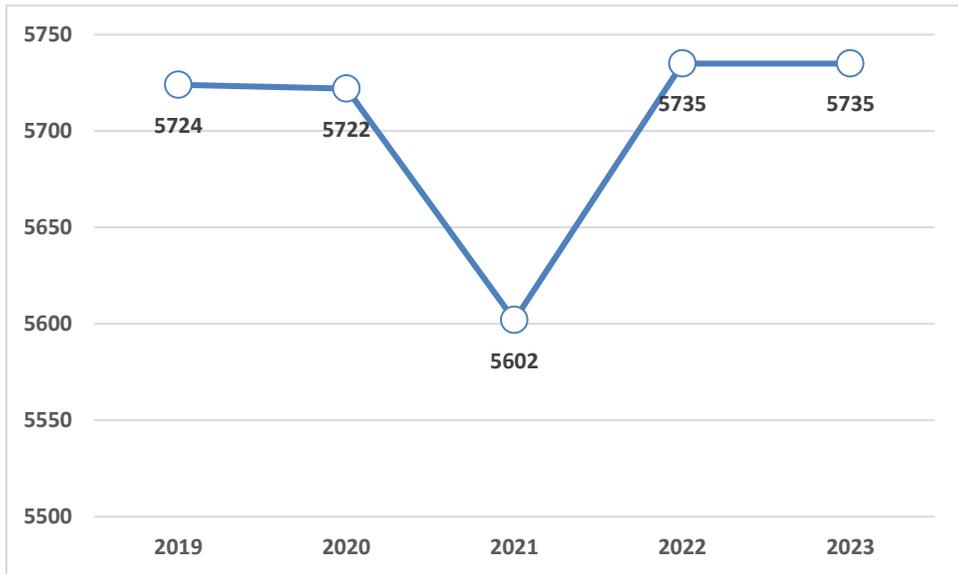
Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Menurut Kategori

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi.

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi.

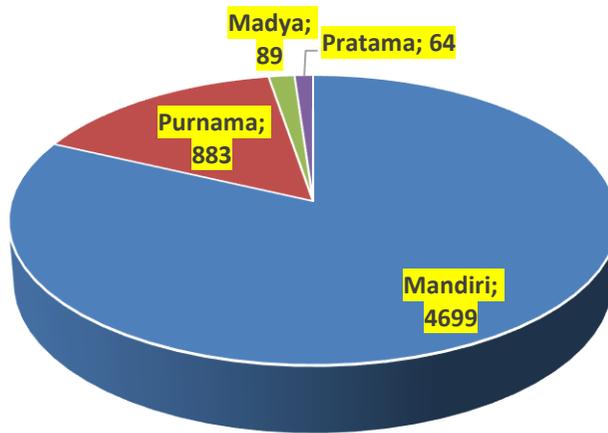
Penguatan partisipasi masyarakat di lini bawah melalui posyandu sangat berperan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dengan sasaran pelayanan KIA, imunisasi, pemeliharaan gizi masyarakat, dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Data jumlah Posyandu di DIY secara umum mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2021. Pada tahun 2023 tercatat jumlah Posyandu di DIY sebanyak 5.735 posyandu, dari jumlah tersebut posyandu yang aktif sebanyak 5.582 posyandu.



Sumber : Dataku Bappeda DIY dan Dinas Kesehatan DIY, 2024

Gambar 2-47 Jumlah Posyandu di DIY Tahun 2019 - 2023

Berdasarkan strata, posyandu dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan yaitu pratama, madya, purnama, dan mandiri. Sebagian besar posyandu di DIY telah berstatus purnama dan mandiri, dari 5.375 posyandu di DIY sebanyak 64 posyandu berstatus pratama dan 89 berstatus madya.



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2024

Gambar 2-47 Jumlah Posyandu di DIY berdasarkan Strata Tahun 2023

Posyandu memiliki peran yang penting dalam melakukan layanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil dan anak balita termasuk pemantauan tumbuh kembang anak balita. Untuk itu penguatan posyandu harus terus diupayakan melalui penguatan kader, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat, dan penguatan kolaborasi dengan lintas sektor.

2. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk

Puskesmas adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di DIY tahun 2023 sebanyak 399 unit dengan rasio sebesar 9,79 per 100.000 penduduk. Angka ini menurun dibanding tahun 2021 dan 2022, dimana jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di DIY berturut-turut sebanyak 426 dengan rasio sebesar 10,73 per 100.000 penduduk dan 421 unit dengan rasio 10,47 per 100.000 penduduk.

Menurut standar nasional berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang jumlah puskesmas yang harus tersedia dalam suatu wilayah, setiap 120.000 penduduk harus terdapat minimal satu puskesmas. Sementara itu, jumlah penduduk DIY tahun 2023 berdasarkan proyeksi BPS adalah 4.073.097 jiwa. Dengan demikian kebutuhan puskesmas minimal yang harus dipenuhi sebanyak 34 unit, sedangkan total puskesmas di DIY tahun 2023 adalah 121 unit yang tersebar merata pada setiap kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintah DIY dirasa belum perlu untuk menambah jumlah puskesmas karena jumlah saat ini sudah lebih dari cukup untuk melayani semua penduduk.

Standar nasional untuk penyediaan Puskesmas Pembantu, berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, menyatakan bahwa minimal harus terdapat satu puskesmas pembantu untuk setiap 30.000 penduduk di suatu wilayah. Total penduduk DIY tahun 2023 menurut proyeksi BPS sebanyak 4.073.097 jiwa sehingga kebutuhan Pustu minimal sebanyak 136 unit. Namun demikian jumlah Pustu yang ada di DIY sampai tahun 2023 sebanyak 278 unit yang berarti bahwa DIY saat ini telah memenuhi standar pelayanan kesehatan terutama dalam penyediaan Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu.

3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Berdasarkan jenis dan pengelolaannya, rumah sakit dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Fasilitas pelayanan rujukan di DIY relatif telah memadai dari sisi pelayanan. Pada tahun 2023, jumlah rumah sakit di DIY sebanyak 80 rumah sakit yang terdiri dari 62 RS Umum dan 18 RS Khusus. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan jumlah di tahun 2022 yang sebanyak 79 rumah sakit. Dengan jumlah penduduk DIY tahun 2023 berdasarkan proyeksi kependudukan BPS yang sebanyak 3.736.490 jiwa, rasio RS di DIY 2,14 per 100.000 penduduk atau dengan kata lain 1 RS di DIY melayani 46.729 jiwa

Persebaran rumah sakit di DIY masih belum sepenuhnya merata, keberadaan rumah sakit sebagian besar berada di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Persentase rumah sakit yang ada di Kabupaten Sleman sebesar 35% dan 23% berada Kota Yogyakarta. Ketimpangan juga terjadi pada ketersediaan tempat tidur (TT) rumah sakit, angka ketersediaan TT RS di DIY sebanyak 2,2 TT/1.000 penduduk. Angka tersebut sudah melebihi dari standar nasional yang sebesar 1 TT/1.000 penduduk tetapi untuk persebarannya terkonsentrasi di wilayah

Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk Kabupaten Gunungkidul ketersediaan TT masih di bawah standar nasional.

Tabel 2-34 Jumlah dan Status Akreditasi Rumah Sakit Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi			
		Paripurna	Utama	Madya	Jumlah
1	Kota Yogyakarta	15	3	-	18
2	Kabupaten Bantul	15	1	-	16
3	Kabupaten Kulon Progo	9	-	-	9
4	Kabupaten Gunungkidul	7	2	-	9
5	Kabupaten Sleman	25	1	2	28
DIY		71	7	2	80

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah Bed Occupancy Ratio (BOR). BOR berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh RS digunakan oleh masyarakat dan seberapa jauh masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR antara 60%-85%. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DIY, BOR rumah sakit di DIY tahun 2022 menunjukkan angka BOR masih tergolong rendah yaitu 39,60% dari semua kelas tempat tidur, dengan tempat tidur sebanyak 9.278 TT. Apabila dilihat dari capaian masing-masing RS, tingkat BOR sangat bervariasi, terdapat beberapa RS yang capaiannya sudah efektif tetapi ada beberapa RS yang masih rendah.

Berdasarkan standar nasional tentang kebutuhan jumlah Rumah Sakit yang diatur dalam Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001, bahwa setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit Rumah Sakit. Jika melihat jumlah penduduk DIY saat ini maka jumlah kebutuhan Rumah Sakit yang ada adalah sebanyak 17 unit. Sedangkan jumlah rumah sakit yang ada pada tahun 2022 adalah 79 unit, jumlah tersebut lebih dari cukup untuk melayani penduduk DIY

4. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi.

Pada tahun 2022, jumlah tenaga medis di DIY adalah sebanyak 5.587 orang yang terdiri dari 3.354 dokter umum, 987 dokter gigi, dan 1.246 dokter spesialis. Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun tersebut tercatat 0,10. Pada tahun 2023, jumlah tenaga medis di DIY menurun menjadi 5.111 orang yang terdiri dari 2.786 dokter umum, 1.024 dokter gigi, dan 1.301 dokter spesialis. Sedangkan rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2023 tercatat tidak mengalami perubahan yaitu 0,10. Hal ini karena seiring bertambahnya jumlah tenaga kesehatan, jumlah penduduk di DIY juga makin bertambah.

Tabel 2-35 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan per Penduduk DIY Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Dokter umum	1.446	1.937	2.350	3.354	2.786
Dokter spesialis	1.062	1.397	1.227	1.246	1.301
Dokter gigi	555	487	710	987	1.024
Rasio dokter per penduduk	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1
Perawat	8.269	9.507	10.757	10.360	10.654
Bidan	2.046	2.356	2.281	2.850	2.828

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Aspek yang tidak kalah penting dan mendasar dalam pembangunan sektor kesehatan ini adalah peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan bagi warga yang meliputi ibu, anak, remaja, penduduk usia produktif, dan lanjut usia. Meskipun pemenuhan akses dan layanan kesehatan relatif baik, namun pemerintah DIY perlu mengoptimalkan agar mendapatkan tataran kualitasnya yang prima. Sehingga pertumbuhan penduduk yang ditandai dengan transisi demografi dapat berjalan secara maksimal.

5. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Pada tahun 2023, jumlah perawat di DIY tercatat sebanyak 10.654 sedangkan jumlah bidan sebanyak 2.828. Total penduduk DIY tahun 2023 menurut proyeksi BPS sebanyak 4.073.907 jiwa. Dengan demikian rasio perawat di DIY tahun 2023 sebesar 261 per 100.000 penduduk, angka ini di atas angka standar nasional yang sebesar 117 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio bidan di DIY tahun 2023 sebesar 69 per 100.000 penduduk, angka ini masih di bawah standar nasional yang sebesar 100 per 100.000 penduduk.

6. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Data cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2022 sebesar 97,05% meningkat bila dibandingkan dengan capaian 2021 yang sebesar 87,35%.

Capaian tersebut tidak menggambarkan sepenuhnya kondisi penanganan komplikasi kebidanan di populasi karena denominator yang digunakan adalah angka proyeksi ibu hamil resiko tinggi. Setiap komplikasi yang terjadi akan diberikan penanganan secara definitif sesuai standar. Penurunan cakupan penanganan komplikasi bisa disebabkan karena jumlah kasus komplikasi yang terjadi mengalami penurunan karena deteksi dini terhadap bumil risti yang baik dan pemantauan serta penanganan yang baik terhadap bumil risti sehingga tidak terjadi komplikasi.

Tabel 2-36 Ibu Hamil Resiko Tinggi di DIY menurut Kabupaten/Kota, 2020-2022

Wilayah	Tahun								
	2020			2021			2022		
	Perkiraan Bumil dengan komplikasi Kebidanan	Bumil dengan komplikasi Kebidanan yang ditangani	%	Perkiraan Bumil dengan komplikasi Kebidanan	Bumil dengan komplikasi Kebidanan yang ditangani	%	Perkiraan Bumil dengan komplikasi Kebidanan	Bumil dengan komplikasi Kebidanan yang ditangani	%
Kulon Progo	962	962	100	962	962	100	962	962	100
Bantul	2.954	2.954	100,0	2.954	2.954	100,0	2.954	2.954	100,0
Gunungkidul	1.073	1.073	100,0	1.073	1.073	100,0	1.073	1.073	100,0
Sleman	1.738	1.237	71,00	1.738	1.237	71,00	1.738	1.237	71,00
Yogyakarta	2.909	2.137	73,46	2.909	2.137	73,46	2.909	2.137	73,46
DIY	9.636	8.363	86,78	9.636	8.363	86,78	9.636	8.363	86,78

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2023

7. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Salah satu upaya dalam menurunkan Angka Kematian Ibu adalah melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan akan meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan baik saat proses persalinan maupun pasca persalinan karena terdapat tenaga kesehatan yang kompeten dan lingkungan yang mendukung.

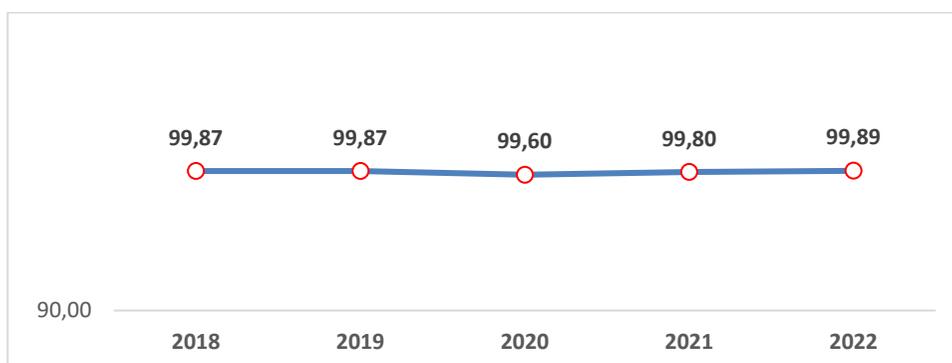
Persentase persalinan di fasilitas kesehatan untuk DIY sudah cukup tinggi yaitu hampir 100%. Pada tahun 2022, dari 36.016 persalinan di DIY 35.981 persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan (99,89%). Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sudah 100% persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan.

Tabel 2-37 Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan di DIY Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Persalinan	Jumlah Persalinan di Faskes	%
Kota Yogyakarta	2.495	2.495	100
Kab. Bantul	10.894	10.885	99,9
Kab. Kulon Progo	4.119	4.103	99,6
Kab. Gunungkidul	6.583	6.528	99,8
Kab. Sleman	11.970	11.970	100

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2023

Perkembangan jumlah persalinan di fasilitas kesehatan di DIY cenderung tinggi dari tahun ke tahun. Dari tahun 2018 sampai dengan 2022 tercatat sudah mencapai hampir 100%.



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2023

Gambar 2-47 Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan di DIY Tahun 2018-2022

8. Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

UCI (*Universal Child Immunization*) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), Ibu hamil, Wanita Usia Subur (WUS) dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT. Data menunjukkan peningkatan cakupan desa/kelurahan

UCI DIY mencapai angka 100%. Hal ini berarti tujuan UCI sudah tercapai sempurna di DIY.

Tabel 2-38 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Persalinan	Jumlah Persalinan di Faskes	%
Kota Yogyakarta	2.495	2.495	100
Kab. Bantul	10.894	10.885	99,9
Kab. Kulon Progo	4.119	4.103	99,6
Kab. Gunungkidul	6.583	6.528	99,8
Kab. Sleman	11.970	11.970	100

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2023

9. Prevalensi Balita Kurang Energi Protein

Status gizi akan menentukan kualitas hidup sumberdaya manusia ke depan. Kondisi gizi buruk dan kurang dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, terutama penyakit yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan jaringan otak.

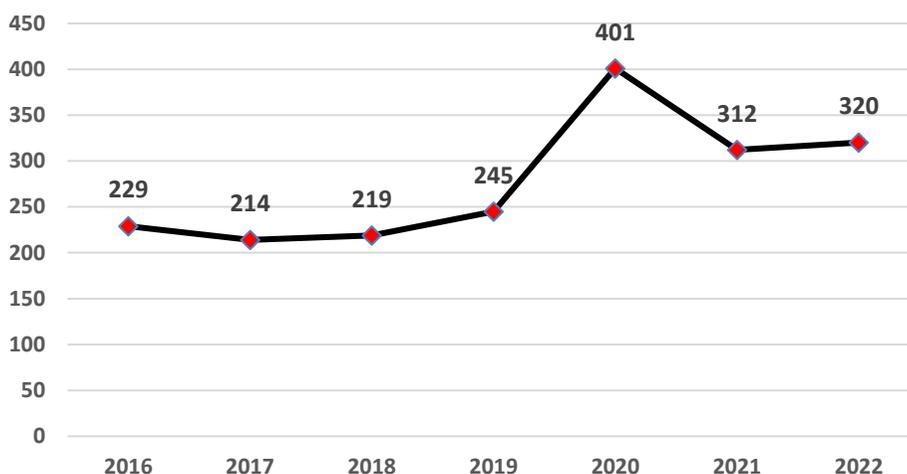
Salah satu permasalahan gizi di DIY yang masih menjadi perhatian adalah terkait Prevalensi Balita Kurang Energi Protein (KEP). Angka Prevalensi Balita KEP (Balita Gizi Buruk dan Kurang) di DIY cenderung mengalami kenaikan dan berkisar antara 7,9 di tahun 2018 sampai 10,4 di tahun 2022. Angka Prevalensi Balita KEP tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 11,9 dan terendah di Kabupaten Sleman yang sebesar 8,7.

Tabel 2-39 Perkembangan Prevalensi Balita Kurang Energi Protein (KEP) DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Yogyakarta	8,53	8,46	10,70	10,50	11,90
2	Kabupaten Bantul	8,46	8,62	7,90	8,50	11
3	Kabupaten Kulon Progo	11,84	9,89	10,40	10,50	11,40
4	Kabupaten Gunungkidul	7,06	7,18	9,20	9,10	11
5	Kabupaten Sleman	7,84	8,17	6,50	7	8,70
DIY		7,94	8,35	8,30	8,50	10,40

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2023

Khusus untuk jumlah balita gizi buruk di DIY, perkembangannya mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2022 dengan jumlah balita gizi buruk tertinggi di tahun 2020 sebanyak 401 balita. Pada tahun 2022, jumlah balita gizi buruk sebanyak 320 balita. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2021 yang sebanyak 312 balita.



Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2023

Gambar 2-38 Perkembangan Balita Gizi Buruk di DIY Tahun 2016-2022

Upaya Pemerintah DIY dalam penanganan balita gizi buruk diantaranya dengan pemberian makanan tambahan, penyediaan rumah pemulihan gizi dan peran kader gizi di posyandu dalam deteksi dini balita gizi buruk.

10. Pola Penyakit

Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, prevalensi beberapa Penyakit Tidak Menular (PTM) menunjukkan prevalensi yang tinggi dan masih berada di atas rata-rata nasional seperti kanker, Diabetes Melitus (DM), ginjal kronis, stroke, hipertensi, jantung, asma, dan gangguan jiwa. Apabila disandingkan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 dan Riskesdas Tahun 2018, capaian prevalensi beberapa penyakit tersebut cenderung menurun kecuali prevalensi Diabetes Melitus.

Tabel 2-40 Prevalensi Penyakit Tidak Menular DIY dan Nasional Tahun berdasarkan Riskesdas 2013, Riskesdas 2018, dan SKI 2023

PTM		Riskesdas 2013	Riskesdas 2018	SKI 2023	Satuan
Asma	DIY	6,9	4,5	3,5	Persen
	Nasional	4,5	2,4	1,6	
Kanker	DIY	4,1	4,86	3,6	Permil
	Nasional	1,4	1,79	1,2	
Stroke	DIY	10,3	14,6	11,4	Permil
	Nasional	7	10,9	8,3	
Ginjal Kronis	DIY	0,3	0,43	0,23	Persen
	Nasional	0,2	0,38	0,18	
Diabetes Melitus	DIY	2,6	3,1	3,6	Persen
	Nasional	1,5	2	2,2	
Jantung	DIY	0,6	2	1,67	Persen
	Nasional	0,5	1,5	0,85	
Hipertensi	DIY	25,7	32,86	30,4	Persen
	Nasional	25,8	34,11	29,2	
RT dengan ART Gangguan Jiwa Skizofrenia/Psikosis	DIY	2,7	10,4	9,3	Permil
	Nasional	1,7	6,7	4	

Sumber : Kementerian Kesehatan RI, 2023 diolah

Beberapa penyakit menular yang menjadi permasalahan utama secara nasional menurut Kementerian Kesehatan RI adalah HIV AIDS, Tuberkulosis (TB), malaria sedangkan untuk DIY selain ketiga penyakit menular di atas, Demam Berdarah Dengue (DBD) juga menjadi permasalahan karena kasusnya masih tinggi dan masih terdapat kasus kematian akibat DBD.

Pada tahun 2022, jumlah akumulasi kasus HIV di DIY sebanyak 6.784 kasus dengan penemuan kasus baru HIV sebanyak 916 kasus. Penemuan tertinggi di Kabupaten Sleman sebanyak 340 kasus dan terendah di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 28 kasus. Jumlah kasus seluruhnya sebanyak 6784 kasus didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 69,1%. Kelompok usia dengan kasus tertinggi adalah pada rentang usia 20-29 tahun sebanyak 32,3%

Untuk penyakit TB, success rate penyakit TB pada tahun 2022 sebesar 84,30% menurun dari tahun 2021 yang sebesar 88,05. Permasalahan penanganan TB di

DIY adalah masih rendahnya cakupan penemuan TB (*case detection rate*) yaitu 5.374 kasus dari target penemuan sebesar 10.530 (51,04%). Capaian tersebut naik signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 33,50%. Selain faktor penemuan, perlu juga diwaspadai adanya kenaikan jumlah penderita TBC kebal obat (*Multi Drug Resistance/MDR*). Pelibatan peran lintas sektor dan masyarakat merupakan salah satu strategi dalam upaya peningkatan cakupan penemuan kasus TB di DIY.

Penyakit menular lain yang menjadi perhatian di DIY adalah malaria. Meskipun seluruh kabupaten/kota di DIY telah mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria, tetapi masih terdapat kasus malaria di yang terjadi. Daerah perbukitan menoreh merupakan daerah endemis malaria yang penanganannya diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di daerah perbukitan menoreh.

Demam Berdarah Dengue (DBD) juga merupakan penyakit menular yang memerlukan perhatian di DIY karena tingginya kasus dan angka kematiannya seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan HIV-AIDS. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, pada tahun 2022 kasus DBD di DIY sebanyak 2.253 naik dari tahun sebelumnya yang sebanyak 1.187 kasus dengan *Case Fatality Rate (CFR)* sebesar 0,8 turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,01.



Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2023

Gambar 2-39 Perkembangan Jumlah kasus dan CFR DBD DIY Tahun 2013-2022

Secara umum untuk mengendalikan penyakit menular strategi yang perlu dilakukan yaitu perluasan cakupan akses kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam *surveillans* berbasis masyarakat, dan penyediaan obat dan vaksin.

2.1.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yaitu melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air (Drainase), Sub Urusan Keciptakarya (Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya), Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Jasa Konstruksi, Sub Urusan Penataan Ruang.

1. Sub Urusan Sumber Daya Air

Daerah irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi terbagi dalam tiga kewenangan yaitu kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi terdiri dari:

- a. Daerah Irigasi (DI) yang luasnya lebih dari 3000 Ha. DI ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, di DIY meliputi DI Kalibawang (7.152 Ha), DI Karangtalun (5.159 Ha), dan DI lintas yaitu DI Tuk Kuning (Kabupaten Klaten 115 Ha, Kabupaten Sleman 149 Ha).
- b. Daerah Irigasi yang luasnya 1000 - 3000 Ha. DI ini merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam hal ini Pemda DIY, mempunyai kewenangan seluas 13.987 Ha meliputi 6 DI (9.078 Ha) dan 35 DI lintas kabupaten/Kota (4.909 Ha).
- c. Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha. DI ini merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, meliputi 100 DI kewenangan Kabupaten Bantul (8.633 Ha), 182 DI kewenangan Kabupaten Gunungkidul (5.818 Ha), 90 DI kewenangan Kabupaten Kulon Progo (1.533

Ha), 853 DI kewenangan Kabupaten Sleman (21.953 Ha), dan 10 DI kewenangan Kota Yogyakarta (49 Ha).

Pada tahun 2023 berdasarkan Sinkronisasi data ePAKSI dan data P3A, total luas fungsional dari 41 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY adalah 10.259,24 ha yang terlayani air irigasi dari luasan 13.987 ha atau setara dengan 73,35%. Luas layanan irigasi di DIY sebesar 13.987 ha dengan luas irigasi dalam kondisi baik 5.789,45 ha dan panjang jaringan sarana irigasi dalam kondisi baik 132.401,39 meter. Luas lahan pertanian terlihat menurun karena adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian, diversifikasi tanaman dari padi ke non padi, peningkatan efisiensi yang menyebabkan penghematan penggunaan air.

Tabel 2-41 Prasarana Irigasi DIY Tahun 2019-2023

No	Elemen	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Layanan Irigasi (ha)	13.987,00	13.987,00	13.987,00	13.987,00	13.987,00
2	Panjang Jaringan Sarana Irigasi Dalam Kondisi Baik	119.826,87	133.068,78	100.480,21	132.401,39	132.401,39
3	Luas Layanan Irigasi Dalam Kondisi Baik	5.466,75	6.040,97	4.387,94	5.789,45	5.789,45

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

Berdasarkan Neraca Sumber Daya Alam tahun 2022 diperoleh hasil bahwa ketersediaan air pada 4 (empat) daerah aliran sungai (DAS) dan 1 (satu) daerah tangkapan air (DTA) yang ada di wilayah DIY yaitu DAS Serang pada tahun 2021 sebesar 234 juta m³ dan di tahun 2022 sebesar 209,03 juta m³, pada DAS Progo tahun 2021 5.653 juta m³ dan di tahun 2022 sebesar 227,71 juta m³, DAS Opak tahun 2021 sebesar 858 juta m³ dan pada tahun 2022 sebesar 667,28 juta m³, DAS Oyo pada tahun 2021 sebesar 529 juta m³ dan pada tahun 2022 sebesar 529 juta m³, DTA Karst pada tahun 2021 sebesar 1534 juta m³. Kebutuhan air untuk tiap DAS yaitu DAS Serang sebesar 123,94 juta m³, DAS Progo sebesar 622,64 juta m³, DAS Opak sebesar 653,04 juta m³, DAS Oyo sebesar 173,84 juta m³, dan DTA Karst sebesar 31,38 juta m³. Kebutuhan air digunakan untuk domestik, perhotelan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

Dalam penyediaan dan pengelolaan air baku bagi masyarakat sampai tahun 2023 pemerintah DIY telah melaksanakan pengelolaan embung yang berjumlah 25 embung yang tersebar di DIY (Sleman: 8 unit, Bantul: 3 Unit, Kulon Progo: 4 unit,

Gunungkidul: 9 Unit, Kota Yogyakarta: 1 unit). Pada daerah sulit air pemenuhan air baku melalui sumur air tanah dalam. Sesuai dengan capaian akhir tahun 2023, layanan penyediaan air dari sumur bor sejumlah 55 titik dari 151 titik di seluruh kabupaten di DIY, dan terlayani sumber air lain (PDAM, SPAMDES, dan lainnya) sebanyak 21 titik, sehingga masih ada 75 titik yang belum terlayani.

Pelaksanaan pengelolaan sungai di DIY merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satu poin penting dalam pengelolaan sungai adalah penanganan drainase. Berdasarkan data, terdapat total genangan sebanyak 51 titik dengan luas 6,86 ha, dan sudah ditangani seluas 5,44 ha setara 34 titik sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan data tersebut masih perlu penanganan seluas 1,42 ha setara dengan 17 titik.

2. Sub Urusan Keciptakarya

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum. Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berakses air minum dengan total penduduk DIY.

Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum layak. Melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta dukungan dari APBN Ditjend Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui kegiatan pembangunan SPAM Regional, SPAM IKK, Optimalisasi SPAM IKK dan swadaya masyarakat, hingga tahun 2023 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai 95,49% dari jumlah penduduk DIY. Sebagai penunjang kinerja sasaran penduduk berakses air minum dapat disajikan data cakupan pelayanan air minum per kabupaten/kota di DIY dalam tabel berikut:

Tabel 2-42 Data Kependudukan DIY Terlayani Air Minum Sampai Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah KK	Perpipaan	Non Perpipaan	Non akses
1	Kulonprogo	155.969	67.751	81.459	6.759
2	Bantul	339.774	72.819	221.098	45.857
3	Gunungkidul	262.751	108.093	149.204	5.454
4	Sleman	385.022	90.489	294.533	-
5	Yogyakarta	143.691	31.396	112.295	-
Total DIY		1.287.207	370.548	858.589	58.070
			28,79%	66,70%	4,51%
			1.229.137		
			95,49%		

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2024

Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan baik cakupan penduduk berakses air minum maupun meningkatkan persentase penggunaan air minum perpipaan. Melalui SPAM Regional, SPAM IKK dan SPAM Pedesaan dengan penekanan pada keberfungsian (kapasitas produksi, SR/HU, jumlah jiwa terlayani serta distribusi air mengalir). Selain itu dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu menunjang pencapaian target SDGs seperti pengurangan jumlah rumah tangga tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi dasar.

Layanan pengelolaan air limbah domestik erat kaitanya dengan peran Pemerintah DIY untuk menyediakan sanitasi yang layak bagi rumah tangga. Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan baik oleh rumah tangga sendiri maupun bersama dengan rumah tangga lain tertentu yang dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota merupakan salah satu upaya layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak dan aman. Penyelenggaraan dalam pelayanan pengelolaan air limbah domestik disebut dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan SPALD meliputi Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.

Kapasitas terpasang pengolahan air limbah sampai dengan saat ini sebesar 75.000 SR. Pada tahun 2023, sudah tersambungkan 27.205 SR. Sehingga persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman adalah sebesar 97,69% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-43 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2023

No	Kabupaten	BABS	Akses Belum Layak	Akses Layak			Jumlah
				Individu	Bersama	Akses Aman	
1	Kulon Progo	-	3.008	126.860	9.861	16.240	155.969
2	Bantul	-	13.682	239.046	3.667	83.379	339.774
3	Gunungkidul	-	9.494	178.857	51.931	22.469	262.751
4	Sleman	-	2.034	269.508	14.753	98.727	385.022
5	Yogyakarta	-	1.507	84.797	7.854	49.532	143.691
Total DIY		-	29.726	899.068	88.066	270.347	1.287.207
		0,00%	2,31%	69,85%	6,84%	21,00%	100,00%
		2,31%		97,69%			

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2024

Peningkatan pelayanan rumah tangga berakses sanitasi juga didukung melalui kegiatan di Kabupaten dan Pusat, berupa Peningkatan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah Terpusat sistem jaringan perpipaan SPALD-Terpusat Sewon Kabupaten Bantul, berupa peningkatan kapasitas pengolahan yang semula 25.000 SR bertambah menjadi 75.000 SR. Penambahan layanan jaringan infrastruktur jaringan limbah terpusat diprioritaskan pada daerah-daerah yang sudah melewati jaringan limbah terpusat namun Sambungan Rumah (SR) nya belum ada. Prioritas penambahan layanan jaringan infrastruktur limbah terpusat tersebut dibagi menjadi 2 skala yaitu skala desa dan skala kecamatan. Penanganan limbah komunal diprioritaskan pada daerah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 jiwa/Ha, dan merupakan daerah yang tidak terlayani jaringan pipa limbah terpusat dan berada pada daerah cekungan.

Pemasangan Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Terpusat Sewon pada tahun 2023 adalah 27.205 SR dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-44 Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah (SR)	
		s.d 2022	2023
1	Kota Yogyakarta	19.194	19.831
2	Kabupaten Bantul	3.124	3.506
3	Kabupaten Sleman	3.870	3.868
Jumlah Total		26.188	27.205

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

Selain sambungan rumah tangga dengan sistem IPAL Terpusat, telah dilaksanakan juga program peningkatan akses sanitasi berbasis masyarakat, yaitu dengan pembangunan IPAL Komunal. Jumlah IPAL Komunal yang sudah terbangun sampai tahun 2023 sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini:

Tabel 2-45 Jumlah IPAL Komunal Yang Terbangun Sampai Tahun 2023

No	Wilayah	Jumlah IPAL Komunal
1	Kota Yogyakarta	88
2	Kabupaten Bantul	145
3	Kabupaten Sleman	176
4	Kabupaten Gunungkidul	78
5	Kabupaten Kulon Progo	33
Jumlah Total		520

Sumber: Data Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, 2023

Pelayanan persampahan DIY terdiri dari pelayanan melalui pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan menuju TPA. Terdapat 3 TPA di wilayah DIY yaitu TPA Piyungan yang mulai tanggal 30 April 2024 sudah tidak melayani pembuangan sampah dari Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Kartamantul: Yogyakarta, Sleman dan Bantul), TPA Kulon Progo, dan TPA Gunungkidul.

Tabel 2-46 Fasilitas Layanan Sampah dan Volume Sampah DIY Tahun 2019-2023

Elemen	2019	2020	2021	2022	2023	satuan
Jumlah TPS	287	565	565	647	647*	Unit

Elemen	2019	2020	2021	2022	2023	satuan
Daya Tampung TPS	600	660	720	780	450	Ton
Jumlah Depo Sampah	103	101	92	92	91	Unit
Jumlah TPA	3	3	3	3	3	Unit
Jumlah TPST	61	57	69	69	69*	Unit

Sumber : Dataku Bappeda DIY 2024, *) Sementara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Berikut neraca pengelolaan sampah di DIY tahun 2019-2022:



Gambar 2-40 Neraca Pengelolaan Sampah di DIY Tahun 2019-2022

Pelayanan persampahan DIY terdiri dari pelayanan melalui pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan hingga akhirnya ditampung di TPA. Terdapat 3 (tiga) TPA di wilayah DIY yaitu TPA Piyungan yang melayani Kawasan Perkotaan

Yogyakarta, merupakan wilayah kartamantul meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul; TPA Kulon Progo di Banyuroto dan TPA Gunungkidul di Wukirsari. TPA Regional Piyungan telah beroperasi sejak tahun 1996 dan saat ini sudah dalam kondisi penuh, begitu pula 2 (dua) TPA lainnya yang juga hampir penuh. Kondisi tersebut memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari seluruh pihak penghasil sampah untuk dapat mengurangi sampah seoptimal mungkin dari sumbernya. Penutupan TPA Regional Piyungan dilakukan pada lahan 10 ha yang umur teknisnya telah habis pada tahun 2021-2023. Data timbulan sampah di tahun 2023 untuk wilayah kartamantul sebagai berikut:

Tabel 2-47 Data Timbulan Sampah untuk Wilayah Kartamantul Tahun 2023

No	Bulan	Rata-Rata Volume Sampah (Ton/Hari)
1	Januari	764
2	Februari	765
3	Maret	739
4	April	657
5	Mei	708
6	Juni	605
7	Juli	485
8	Agustus	114
9	September	231
10	Oktober	281
11	November	313
12	Desember	333

Sumber: DLHK DIY, 2024

Data timbulan sampah tahun 2023 tersebut mulai mengalami penurunan disebabkan adanya penutupan layanan pada tanggal 23 Juli 2023 – 5 September 2023 berdasarkan Surat Sekda DIY Nomor 658/8312 dan per tanggal 28 Juli 2023

TPA Regional Piyungan dibuka secara terbatas. Selanjutnya pada Bulan Agustus hingga Mei 2024 TPA Regional Piyungan dibuka kembali untuk layanan pembuangan sampah dengan pembatasan kuota. Pada Akhir Mei 2024 Zona Transisi 1 dan 2 di TPA Regional Piyungan ditutup untuk layanan sampahnya. Hal ini juga menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur DIY tertanggal 19 Oktober 2023 tentang Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota dan kesepakatan final pengakhiran pengelolaan sampah di TPA Regional Piyungan mulai 1 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kabupaten/Kota pada tanggal 4 April 2024.

3. Sub Urusan Jalan

Pemerintah pusat telah menetapkan fungsi dan status jalan Nasional melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer-1. Pemda DIY menindaklanjuti Kepmen PUPR tersebut dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 327/KEP/2022 tentang Penetapan Jalan Strategis Provinsi, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 328/KEP/2022 tentang Penetapan Fungsi Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3 dalam Sistem Jaringan Jalan Primer, dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41/KEP/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi. Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 328/KEP/2022 panjang ruas jalan Kolektor 2 adalah 104,143 Km dan jalan kolektor 3 adalah 307,587 Km. Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 327/KEP/2022 panjang jalan strategis Provinsi adalah 262,655 Km. Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 41/KEP/2023 terdapat perbedaan panjang ruas jalan provinsi dari yang sebelumnya sepanjang 760,450 KM menjadi sepanjang 674,585 KM. Perubahan tersebut didasari dengan adanya ruas jalan yang *upgrade* (semula berstatus jalan kabupaten menjadi berstatus jalan provinsi dan atau semula berstatus jalan provinsi menjadi berstatus jalan nasional) dan *downgrade* (semula berstatus jalan nasional menjadi berstatus jalan provinsi dan atau semula berstatus jalan provinsi menjadi berstatus jalan kabupaten). Penanganan jalan perlu dilakukan baik dengan pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kemantapan namun juga perlu dilakukan peningkatan jalan baik berupa peningkatan kapasitas, rekonstruksi jalan, maupun rehabilitasi jalan dan jembatan DIY.



Sumber: Lampiran Keputusan Gubernur DIY Nomor 41/KEP/2023

Gambar 2-41 Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi

Kondisi kemantapan ruas jalan provinsi mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir masa RPJMD tahun 2017-2022. Kondisi kemantapan jalan yang menurun tersebut diakibatkan laju penanganan lebih kecil daripada laju kerusakan jalan. Berikut data kondisi jalan provinsi di DIY dari tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 2-48 Kondisi Jalan Provinsi, Tahun 2019-2023

No	Sub Elemen	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jalan Baik (Km)	357,37	366,52	341,84	301,205	311,526
2	Jalan Sedang (Km)	201,45	177,66	194,45	232,480	164,609
3	Jalan Rusak Ringan (Km)	143,99	155,05	156,94	171,615	170,450
4	Jalan Rusak Berat (Km)	57,65	61,23	67,22	55,150	28,00

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Berdasarkan data tersebut, jalan provinsi dalam kondisi mantap yang terdiri dari kondisi jalan baik dan sedang pada tahun 2023 sepanjang 476,135 Km atau setara 70,58%.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas wilayah di DIY sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu terdapat penambahan panjang jalan nasional dan jalan provinsi sepanjang 15,03 km yang terdiri dari pembangunan jalan ruas Tawang - Ngalang segmen 2 dan 3 direncanakan 2,83 km terbangun 2,83 km, pembangunan JJLS segmen Tepus - Jerukwudel tahap II direncanakan sepanjang 5,00 km terbangun 10,925 km, pembangunan jalan Prambanan - Gayamharjo direncanakan sepanjang 0 km terbangun sepanjang 1,275 km, sehingga pada akhir tahun 2023 total panjang jalan yang terbangun adalah 1.012,93 km atau sebesar 99,17% terhadap kebutuhan panjang jalan yang direncanakan 1.021,36 km.

Panjang Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang direncanakan secara keseluruhan yaitu sepanjang 116,07 Km. Realisasi JJLS hingga akhir tahun 2023 antara lain:

1. Lahan sudah bebas untuk 2 lajur sepanjang 116,07 Km (100%);
2. Lahan sudah bebas untuk 4 lajur sepanjang 79,38 km (68,39%);
3. Konstruksi jalan yang telah terbangun untuk 2 lajur sepanjang 109,07 Km (93,97%) dan untuk 4 lajur sepanjang 5,10 Km (4,39%).

Pembangunan jaringan jalan JJLS sampai dengan akhir tahun 2023 masih berproses pada pekerjaan konstruksi pembangunan Jembatan Srandakan 3 (Jembatan Pandansimo) dan ruas Kretek-Girijati.

Penambahan panjang jalan provinsi yang diperoleh dari pengembangan ruas jalan Prambanan-Gading sampai dengan tahun 2023 telah terbangun 19,775 kilometer atau 71,7%, sehingga masih terdapat segmen yang belum terbangun yaitu Prambanan-Gayamharjo sepanjang 7,805 kilometer.

Proyek Strategis Nasional berupa pembangunan Jalan Tol di wilayah DIY terdiri dari 2 ruas yaitu Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo dan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen. Panjang total trase jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo adalah 96,58 km yang dibagi menjadi 3 seksi, yaitu seksi 1 sepanjang 35,65 km (Kartasura sampai dengan Batas Provinsi Jateng - DIY), seksi 2 sepanjang 22,36 km (Batas Provinsi Jateng - DIY sampai dengan Junction Sleman) dan seksi 3 sepanjang 38,57 km (Junction Sleman sampai dengan Kulon Progo, Batas Provinsi Jateng - DIY). Target operasional keseluruhan jalan tol ini direncanakan dapat digunakan pada tahun 2026. Jalan tol Yogyakarta - Bawen direncanakan memiliki panjang 75,82 km, segmen yang berada di wilayah Yogyakarta yaitu pada seksi 1 sepanjang 8,8 km (konstruksi *elevated* 4,9 km dan sisanya konstruksi *at grade*).

4. Sub Urusan Jasa Konstruksi

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki ketugasan untuk penyelenggaraan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi. Pemda DIY telah melakukan pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi dalam rangka melakukan tanggung jawab dalam bidang jasa konstruksi.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, meliputi penyelenggaraan pelatihan Tenaga Ahli konstruksi, dan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. Selain hal tersebut, terdapat pula kewenangan tambahan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan tujuan yang akan dicapai, salah satu di antaranya adalah meningkatkan kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri, kewenangan gubernur antara lain adalah meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan SNI.

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan melalui antara lain:

1. Pengendalian mutu produk konstruksi melalui pengujian bahan bangunan maupun komponen konstruksi oleh Laboratorium Pengujian Konstruksi yang terakreditasi;
2. Penyebarluasan informasi ke-PU-an serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, pameran, Klinik Konstruksi, pengembangan muatan materi sistem informasi ke-PU-an; dan
3. Pembinaan jasa konstruksi melalui fasilitasi pelatihan serta sertifikasi keahlian bagi para tenaga kerja konstruksi. Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diukur berdasarkan pembobotan secara proporsional persentase kinerja: Pelayanan Jasa Pengujian, Pembinaan Jasa Konstruksi, dan Pengkajian & Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum.

Pada tahun 2023 layanan Jasa Pengujian yang dilakukan melalui layanan penerbitan sertifikat/Laporan Hasil Uji (LHU) sejumlah 1.203 dokumen LHU (terdiri dari 1.165 LHU Pelayanan Umum Lab. Konstruksi dan 38 LHU uji Aspiratif). Penyelenggaraan Jasa Konstruksi lainnya yaitu Pembinaan jasa konstruksi melalui fasilitasi pelatihan serta sertifikasi keahlian bagi para tenaga kerja konstruksi. Pembangunan infrastruktur saat ini membutuhkan banyak permintaan tenaga konstruksi yang ahli dan terampil. Tenaga konstruksi harus

memiliki sertifikat keahlian melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga/ badan seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberi jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan kehandalan sektor konstruksi. Pada tahun 2023 terdapat jumlah permintaan Tenaga Ahli sebanyak 12.008 orang, sedangkan yang tersedia sebanyak 4.467 orang.

Fenomena di atas tersebut, memberikan gambaran bahwa adanya gap kebutuhan pasar tenaga ahli konstruksi di DIY. Di sisi lain beban pekerjaan tenaga ahli semakin berat karena harus menangani beberapa proyek pada saat yang bersamaan. Selain itu, insentif tenaga ahli di DIY dinilai masih sangat relatif kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain. Hal inilah yang menjadi penyebab para tenaga ahli cenderung lebih memilih pekerjaan yang ada di luar DIY.

Berdasarkan data berikut terlihat bahwa, jumlah tenaga ahli Konstruksi yang tersertifikasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami penurunan. Puncak penurunan jumlah tenaga ahli Konstruksi terjadi di tahun 2020 yang hanya sejumlah 30 orang. Hal ini disebabkan karena adanya kasus lonjakan Covid-19 pada pertengahan tahun, sehingga peserta yang mendaftar hanya sedikit. Pada tahun 2021 sudah mulai mengalami tren peningkatan jumlah peserta sertifikasi tenaga ahli dibanding tahun sebelumnya, sejumlah 92 orang.

Tabel 2-49 Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi (tersertifikasi) Tahun 2018-2023

Data	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tenaga Ahli Konstruksi (tersertifikasi)	orang	300	297	30	92	100	150

Sumber: DPUP ESDM DIY, 2024

Hingga Desember tahun 2023 telah dilakukan sertifikasi terhadap 150 orang Tenaga ahli Konstruksi tersertifikasi. Pada Surat Edaran Menteri PUPR No. 02/SE/M/202 menyatakan bahwa, biaya sertifikasi ditanggung oleh APBN sehingga Balai PJK hanya dapat melaksanakan kegiatan pelatihan tenaga ahli, sedangkan kegiatan sertifikasi dilaksanakan oleh pusat (LPJKN). Selain itu, ada juga SE Menteri PUPR No. 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, menyebabkan permohonan SBU dan SKK yang telah

dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi pada Masa Transisi dihentikan terhitung mulai tanggal 6 Desember 2021. Dengan berlakunya dua SE tersebut di atas, mengakibatkan dampak lain yaitu Asosiasi Profesi sebagai mitra rekrutmen peserta mengaku kesulitan dalam mendapatkan peserta yang bersedia mengikuti sertifikasi sebagai akibat masa transisi LPJK yang mengubah kebijakan Tata Kelola Jasa Konstruksi secara umum.

5. Sub Urusan Penataan Ruang

Penyelenggaraan tata ruang wilayah DIY, sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara bijaksana, berdayaguna, dan berhasil guna dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Penyelenggaraan penataan ruang di DIY mengacu pada Peraturan Daerah DIY Nomor 10 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2023-2043, mulai dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan ruang di DIY dilakukan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang tentunya telah mendasar pada kesesuaian terhadap rencana tata ruang. Data menunjukkan bahwa, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya yang ada di dalam Dokumen RTRW mengalami tren peningkatan. Apabila dilihat secara rata-rata, tren peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 1,39%. Peningkatan pesat terjadi pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 2,09%. Pada tahun 2023, terdapat kenaikan lebih pesat sebesar 2,25% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Di bawah ini data kesesuaian pemanfaatan ruang di DIY dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2-50 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2018-2023

Uraian		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	Target Kesesuaian (%)	76,50	78,50	79,50	81,00	82,5	81,50
	Realisasi Kesesuaian (%)	77,05	78,85	78,95	81,04	82,62	84,87
	Belum Terwujud (%)	13,57	15,34	15,24	13,26	12,18	10,97
	Tidak Sesuai (%)	09,38	05,81	05,81	05,72	5,21	4,39

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian kesesuaian pemanfaatan ruang pada tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai sebesar 82,62% dari

target sebesar 82,5% atau tercapai sebesar 100,14%. Capaian ini diperoleh dengan membandingkan total luas kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan luas total kawasan lindung dan budidaya. meskipun target pada tahun 2022 tercapai, masih terdapat perwujudan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya, diantaranya pada kawasan lindung perwujudan yang tidak sesuai paling tinggi pada kawasan sempadan sungai sebesar 23,51%, kawasan sempadan pantai sebesar 18,87% dan kawasan cagar alam geologi sebesar 16,04%. Sedangkan pada kawasan budidaya perwujudan yang tidak sesuai paling tinggi pada kawasan peruntukan industri sebesar 34,56%, kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi sebesar 14,47% dan kawasan peruntukan perkebunan sebesar 11,68%.

Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang terkait juga dengan capaian dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang. Capaian persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang pada tahun 2022 sebesar 80,26% dari target sebesar 78,70% atau tercapai sebesar 101,98%. Hasil penilaian keterpaduan program RTRW DIY tahun 2022 sebesar 80,26% dengan klasifikasi berkualitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi aktual program/kegiatan OPD/Instansi di DIY pada tahun 2022 sudah selaras dan mengacu pada program RTRW DIY. Penilaian keterpaduan program RTRW DIY terdiri dari perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang dan perwujudan Kawasan strategis. Dari ketiga komponen tersebut nilai terendah ada pada perwujudan struktur ruang yang bernilai 64,13% dengan klasifikasi kurang berkualitas. Sedangkan untuk perwujudan pola ruang dan perwujudan kawasan strategis menunjukkan hasil klasifikasi berkualitas dengan nilai 90,70% dan 100%. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa beberapa program pada indikasi program struktur ruang RTRW DIY masih banyak yang belum terlaksana pada tahun 2022. Selain perwujudan struktur ruang, hasil penilaian keterpaduan program pola ruang menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah cukup baik untuk mendukung perwujudan pola ruang dan kawasan strategis sesuai dengan RTRW.

Pada tahun 2023 pengukuran kesesuaian pemanfaatan ruang didasarkan pada struktur ruang dan pola ruang dengan capaian sebesar 84,87% dari target sebesar 81,50% atau tercapai sebesar 104,13%. Berdasarkan hasil penilaian perwujudan pola ruang keseluruhan yang belum terwujud sebesar 10,73% dan yang tidak sesuai mencapai 4,39% dengan peruntukan terbesar pada kawasan lindung berupa kawasan lindung geologi sebesar 47,19% dan kawasan budidaya terbesar pada kawasan pertanian sebesar 12,99%.

2-122

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota yang merupakan turunan dari Rencana Tata Ruang (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Terdapat 22 RDTR yang direncanakan dilakukan penetapan di DIY berdasar PP 21 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kabupaten Kulon Progo terdapat 6 RDTR, dengan rincian 1 RDTR telah ditetapkan yaitu RDTR Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (Perbup Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2023), dan 3 RDTR sedang pemenuhan kelengkapan persub serta 2 RDTR sedang proses penyusunan;
- b. Kabupaten Sleman terdapat 4 RDTR, 3 diantaranya telah ditetapkan yaitu RDTR Kawasan Sleman Barat (Perbup Sleman Nomor 57 Tahun 2021), RDTR Kawasan Sleman Timur (Perbup Sleman Nomor 3 Tahun 2021) dan RDTR Kawasan Sleman Tengah (Perbup Sleman Nomor 80 Tahun 2023) dan sisanya 1 RDTR proses pemenuhan kelengkapan persub yaitu RDTR Kawasan Sleman Utara;
- c. Kota Yogyakarta terdapat 1 RDTR yaitu RDTR Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan yaitu Perwal Kota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021
- d. Kabupaten Bantul terdapat 4 RDTR, 1diantaranya telah ditetapkan yaitu RDTR WP Pantai Selatan Bantul dan 3 RDTR lainnya proses pemenuhan kelengkapan persub.
- e. Kabupaten Gunungkidul terdapat 7 RDTR, 1 diantaranya telah ditetapkan yaitu RDTR Siung Wediombo (Perbup Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021), 5 RDTR lainnya proses pemenuhan kelengkapan persub dan sisanya (1 RDTR) proses penyusunan.

Sementara itu, untuk penataan ruang keistimewaan telah diatur dalam Perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang dilakukan dengan cara mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan fungsi satuan ruang. Capaian ketersediaan dokumen perencanaan ruang SRS sampai dengan tahun 2023 yaitu telah tersusun sebanyak 18 rencana rinci dari 18 SRS yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Pergub Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043, telah tersusun 7 rencana induk dari 18 SRS dan telah tersusun 17 RTBL di 18 SRS. Dari sisi pemanfaatan telah tersusun sebanyak 20 DED di kawasan SRS, telah dilaksanakan 23 pembangunan konstruksi di kawasan SRS dan telah dilaksanakan pengendalian terhadap 14 SRS dari 18 SRS.

Mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 rencana penyusunan Rencana Induk (RI) SRS di klusterisasi menjadi 9 klaster sebagai berikut

1. Tahun 2023 terdapat 4 klaster, yaitu :
 - a. RI SRS Karst Gunungsewu dan RI SRS Sokoliman (Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub)
 - b. RI SRS Pantai Selatan Gunungkidul, RI SRS Pantai Samas-Parangtritis, RI SRS Pantai Selatan Kulon Progo (Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub)
 - c. RI SRS Merapi (Evaluasi Rapergub)
 - d. RI Prambanan-Candi Ijo (Evaluasi Rapergub)
2. Tahun 2024 terdapat 2 klaster,
 - a. RI SRS Kerto Pleret dan RI SRS Makam Raja Raja Mataram di Imogiri dan RI SRS Masjid dan Makam Raja Raja Mataram di Kotagede (Penyusunan, Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub);
 - b. 2. RI SRS Sumbu Filosofi, RI SRS Keraton, RI SRS Pura Pakualaman, dan RI SRS Kotabaru (Penyusunan, Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub)
3. Tahun 2025 terdapat 2 klaster
 - a. RI SRS Masjid Pathok Negoro (Babadan, Dongkelan, Mlangi, Plosokuning) (Penyusunan, Evaluasi);
 - b. RI SRS Makam Girigondo dan RI SRS Pusat Kota Wates (Penyusunan, Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub)
4. Tahun 2026 terdapat 1 klaster yaitu RI SRS Perbukitan Menoreh (Review dan Evaluasi)

Tabel 2-51 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada 18 SRS Tahun 2022

No	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Sesuai		Belum Terwujud		Tidak Sesuai		Total
		Luas (ha)	Persentase	Luas (ha)	Persentase	Luas (ha)	Persentase	
1	SRS Kraton	260,81	97,11	6,55	2,44	1,22	0,45	268,58
2	SRS Imogiri	1.984,84	96,6	69,89	3,4	0	0	2054,73
3	SRS Sumbu Filosofi	934,72	94,02	44,59	4,48	14,87	1,5	994,18
4	SRS Kotagede	229,62	90,91	18,09	7,16	4,85	1,92	252,57
5	SRS Masjid Pathok Negoro	213,81	70,83	76,98	25,5	11,08	3,67	301,87
6	SRS Merapi	4.593,26	87,78	420,85	8,04	218,37	4,17	5232,48
7	SRS Pantai Samas-Parangtritis	2.450,51	81	383,53	12,68	191,28	6,32	3025,32
8	SRS Kerto Pleret	2.460,20	96,17	98,06	3,83	0	0	2558,26
9	SRS Kotabaru	142,97	79,57	25,43	14,15	11,27	6,27	179,67

No	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Sesuai		Belum Terwujud		Tidak Sesuai		Total
		Luas (ha)	Persentase	Luas (ha)	Persentase	Luas (ha)	Persentase	
10	SRS Prambanan-Candi Ijo	6.572,12	81,46	1.137,77	14,1	358,03	4,44	8067,92
11	SRS Sokoliman	7.413,21	72,06	2.672,77	25,98	201,18	1,96	10287,16
12	SRS Perbukitan Menoreh	14.833,11	58,86	7.198,77	28,57	3.168,61	12,57	25200,49
13	SRS Kars Gunungsewu	47.126,47	78,02	13.211,22	21,87	66,49	0,11	60404,18
14	SRS Pantai Selatan Gunungkidul	37.361,46	95,83	1.526,10	3,91	100,39	0,26	38.987,96
15	SRS Puro Pakualaman	83,62	95,75	2,71	3,11	0,99	1,14	87,32
16	SRS Makam Girigondo	69,15	63,71	38,81	35,75	0,57	0,53	108,54
17	SRS Pusat Kota Wates	2.096,95	64,22	926,35	28,37	241,86	7,41	3.265,15
18	SRS Pantai Selatan Kulon Progo	5.408,45	84,89	602,71	9,46	360,3	5,65	6371,46
	Total	134.235,28	82,71	28.461,19	14,05	4.951,37	3,24	167.647,84

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2022

Berdasarkan tabel di atas, capaian kesesuaian pemanfaatan ruang SRS keistimewaan pada tahun 2022 sebesar 82,71%, belum terwujud sebesar 14,05% dan tidak sesuai sebesar 3,24%. Nilai kesesuaian paling rendah terdapat pada SRS Perbukitan Menoreh yaitu sebesar 58,86%, belum terwujud paling tinggi pada SRS Makam Girigondo sebesar 35,76% dan tidak sesuai paling tinggi pada SRS Perbukitan Menoreh yaitu sebesar 12,57%. Pada tahun 2023 dilakukan penilaian keterpaduan program pada arahan program 18 SRS dengan program-program yang dilaksanakan oleh OPD di DIY. Nilai keterpaduan program sebesar 31,45% yaitu terdapat 764 program OPD yang telah terpadu dengan 2.292 arahan program dalam perencanaan ruang SRS.

2.1.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam kerangka pembangunan manusia dan merupakan kegiatan yang bersifat multisektor dimana hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Memastikan bahwa setiap warga negara mampu menjangkau dan menghuni rumah yang layak merupakan tanggung jawab negara, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam bertempat tinggal.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan pembangunan multisektoral yang penyelenggaraannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang (*adequate shelter for all*), Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjangkau, mudah diakses dan terjangkau berikut sarana dan prasarana pendukungnya.

Mulai pada tahun 2023 *Baseline* RTLH DIY mengacu pada RPD 2023-2026 sejumlah 56.991 unit. Perubahan *baseline* RTLH dari RPJMD 2017-2022 ke RPD 2023-2026 memberikan sedikit pengaruh terhadap perhitungan capaian penanganan RTLH di DIY. Pada RPJMD 2017-2022 tercantum *baseline* RTLH sejumlah 65.578 unit sedangkan pada RPD 2023-2026 tercantum 56.991 unit. Perubahan *baseline* disebabkan oleh penanganan RTLH yang telah dilakukan oleh Pemda DIY dan berbagai pihak serta adanya penambahan jumlah penduduk DIY yang menyebabkan munculnya *backlog* kepemilikan maupun hunian yang baru.

Penanganan RTLH di DIY hingga tahun 2023 telah mencapai 68,32% terhadap jumlah RTLH Kab./kota se-DIY dari perhitungan akumulasi *baseline* RLTH di RPJMD 2017-2022 dan RPD 2023-2026. Sedangkan rincian penanganan RTLH pada tahun 2023 sejumlah 5.658 unit yang terdiri dari BSPS 938 unit, verifikasi rumah layak oleh BSPS 616 unit, APBD Kab/Kota 1.616 unit, Kemensos 17 unit, NGO Habitat 80 unit, dana Desa 8 unit, verifikasi rumah layak oleh kab/kota 235 unit, verifikasi rumah layak oleh DIY 538 unit, BAZNAS 170 unit, BPD DIY 15 unit, APBD DIY Relokasi korban bencana 3 unit, Danais Arsitektur Khas Jogja 434 unit, APBD DIY 988 unit. Penanganan RTLH dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-52 Penanganan RTLH 2019-2023

Lokasi	Database KAB	Ter Tangani TH 2019	Ter Tangani TH 2020	Ter Tangani TH 2021	Ter Tangani TH 2022	Ter Tangani TH 2023
Kota Yogyakarta	2.187	552	345	655	152	283
Kab. Kulon Progo	8.108	2.400	1.093	427	1.079	1.078
Kab. Bantul	7.486	2.361	1.722	1.415	634	731
Kab. Sleman	13.716	2.130	1.536	921	1.374	1.343
Kab. Gunungkidul	25.494	3.112	1.861	1.340	1.700	2.223
Jumlah	56.991	10.555	6.557	4.758	4.939	5.658

Sumber: DPUP ESDM DIY, 2024

Dalam rangka dukungan terhadap lingkungan perumahan dan permukiman, pada tahun 2023 telah dilakukan penyediaan PSU (prasarana dan saran utilitas) layak dan PJU (penerangan jalan umum) di kawasan permukiman DIY sebanyak 666 lokasi, sebagai berikut:

Tabel 2-53 Penanganan PSU Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah PSU	Jumlah PJU
Kabupaten Bantul	58	161
Kabupaten Sleman	169	54
Kabupaten Kulon Progo	27	21
Kabupaten Gunungkidul	143	13
Kota Yogyakarta	15	5

Sumber: DPUP ESDM DIY, 2023

Terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, berdasarkan SK Kabupaten/Kota Tahun 2016 yang menjadi *baseline* RPJMD 2017-2022 Pemda DIY mendapat kewenangan untuk menangani kawasan kumuh seluas 110,39 Ha yang tersebar di kabupaten Bantul, Kulon Progo, Sleman dan Kota Yogyakarta. Progres penanganan kawasan kumuh sampai dengan akhir tahun 2021 telah mencapai 100% (seperti yang terlihat pada tabel berikut ini).

Tabel 2-54 Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (SK Kabupaten/Kota 2016) dan Progres Penanganan

Kabupaten/Kota	Kapanewon/Kemantren	Kelurahan/Desa	Luas (Ha)	Lokasi	Tahun Penanganan	Status Penanganan
Yogyakarta	Gondomanan	Ngupasan	12.91	RW 1,2,4,5,6,7,8,9	2017	Selesai 100%
		Prawirodirjan		RW 1,2,3,5,6,8,10,11,12,14,15,16,17,18	2017	Selesai 100%
	Wirobrajan	Pakuncen	10.17	RW 8,10,11	2018	Selesai 100%
		Patangpuluhan		RW 5,6,7,10	2018	Selesai 100%
		Wirobrajan		RW 6,7,9	2018	Selesai 100%
	Ngampilan	Ngampilan	13.51	RW 1,2,9,11,12	2019	Selesai 100%
		Notoprajan		RW 1,2,3,4	2019	Selesai 100%
			JUMLAH 1	36.59		
Bantul	Sewon	Pendowoharjo	11.71	Cepit RT05	2018	Selesai 100%
		JUMLAH 2	11.71			
Sleman	Depok	Condong Catur	11.39	Padukuhan Ngropoh, Dusun Ngropoh RT02/RW23	2018	Selesai 100%

Kabupaten / Kota	Kapanewon/ Kemantren	Kelurahan/ Desa	Luas (Ha)	Lokasi	Tahun Penanganan	Status Penanganan
	Ngaglik	Sardonoharjo	11.68	Padukuhan Turen, Dusun Tegalrejo RT05/ RT02	2018	Selesai 100%
		JUMLAH 3	23.07			
Kulon Progo	Galur	Brosot	14.16	Padukuhan III Pulo (RT02/RW01 & RW05, RW06)	2018	Selesai 100%
			12.93	Padukuhan Bantengan Lor	2018	Selesai 100%
	Pengasih	Pengasih	9.52	Padukuhan Dayakan (RT16,17/RW 06)	2019	Selesai 100%
			2.41		2019	Selesai 100%
		JUMLAH 4	39.02			
JUMLAH 1 s/d 4 KEWENANGAN PROVINSI			110.39			

Sumber: DPUP ESDM DIY 2021

Pada Tahun 2020/2021 telah diterbitkan kembali SK Kawasan Kumuh dari Kabupaten/kota terbaru, dimana dalam SK tersebut terdapat luasan kawasan yang menjadi Kewenangan DIY dalam penanganannya seluas 160,05 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-55 Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (10-15 Ha)

No.	Kabupaten/ Kota	Kapanewon	Kel/Kal	RW/Dusun	Luas (Ha)	Prioritas
1	Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	3, 6, 7	12,29	
			Purbayan	8, 11, 13		
			Rejowinangun	3		
2		Wirobrajan	Pakuncen	1, 5, 6	13,75	
			Patangpuluhan	1, 2, 5, 7, 10		
			Wirobrajan	1, 10, 12		
3		Gondokusuman	Baciro	18, 20	10,64	
			Klitren	5		
			Terban	1, 10, 11		
Total Kota Yogyakarta (Ha)					36,68	
4	Bantul	Banguntapan	Jambidan	Pamotan RT 1, 3, 4, 5	10,92	
5			Potorono	Salakan RT 1, 3, 4, 5, 6	10,29	
6		Bantul	Trirenggo	Bogoran RT 1, 3	12,64	

No.	Kabupaten/ Kota	Kapanewon	Kel/Kal	RW/Dusun	Luas {Ha}	Prioritas
7		Sewon	Panggunharjo	Jaranan RT 1, 2, 3, 4, 5,	12,44	
8		Pajangan	Guwosari	Dukuh RT 1, 2, 3, 6	10,53	
9		Pajangan	Sendangsari	Benyo RT 4, 7, 8, 9	13,52	
Total Kabupaten Bantul (Ha)					70,34	
10	Sleman	Ngaglik	Sariharjo	Jongkang	14,22	
Total Kabupaten Sleman (Ha)					14,22	
11	Kulon Progo	Sentolo	Banguncipto	RT 012- RW006 Padukuhan Ploso	13,11	1
			Sentolo	RT 013-RT 014 RW 007, RT 015 RW 008, Padukuhan Sentolo Lor		
				RT 019 - RT 020 RW 010 Padukuhan Sentolo Kidul		
Total Kabupaten Kulon Progo (Ha)					13,11	
12	Gunungkidul	Playen	Logandeng	Padukuhan Siyono Wetan (RT58, 59, 61, 62, 63, 65/ RW 10) Padukuhan Siyono Kidul (RT 42, 43/ RW 08)	14,55	2
13		Wonosari	Wonosari	Padukuhan Gadungsari (RT 1, 2, 3. RW 10, RT12, RT 9, 11/ RW 13)	11,15	3
Total Kabupaten Gunungkidul (Ha)					25,70	
Total DIY		13 Kawasan			160,05	

Penanganan perumahan pada kawasan miskin seyogyanya dilakukan secara terintegrasi, sehingga akan tuntas per kawasan, selain penanganan dalam bentuk pembangunan baru rumah layak huni maupun peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan Prasarana dan Sarana Umum yang juga

diintegrasikan dengan pembangunan prasarana dan sarana Air Minum dan Sanitasi. Selain itu, untuk memenuhi SPM, bidang perumahan dan kawasan permukiman melakukan kegiatan relokasi bagi korban bencana berupa penyediaan rumah yang layak huni. Mulai tahun 2020, kewenangan penyediaan rumah bagi korban bencana semula menjadi kewenangan BPBD beralih menjadi kewenangan DPUPESDM. Menindaklanjuti data BPBD terdapat 5 rumah yang perlu direlokasi. Kemudian terdapat tambahan usulan dari kalurahan di Kapanewon Cangkringan sebanyak 5 rumah, sehingga total terdapat 10 rumah yang perlu direlokasi. Relokasi baru mulai dilaksanakan di tahun 2023 sebanyak 3 unit rumah, kemudian di tahun 2024 rencana relokasi untuk 3 unit rumah.

2.1.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Perundang-Undangan, memelihara ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam hal ini Pemda DIY wajib melindungi masyarakat dari segala gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, untuk menciptakan suasana kondusif yang menjadi modal utama bagi suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan.

DIY merupakan Kota Pendidikan, Kota Budaya, dan Kota Wisata sehingga DIY bagaikan magnet bagi warga daerah lain untuk berkunjung, bahkan menjadi warga yang menetap. Situasi ini menjadikan DIY sebagai daerah yang multi etnis dan multi kultur. Implikasinya, DIY mengalami perkembangan kehidupan perkotaan dengan segala aspek yang berpengaruh di dalamnya yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di antaranya :

- a. Aksi kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang mengancam keselamatan masyarakat masih marak terjadi dan cenderung meningkat setiap tahun. Data Polda DIY menyebutkan bahwa jumlah kasus *klithih*/kejahatan jalanan yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 56 kasus, tahun 2021 sebanyak 51 kasus dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 76 kasusan pada tahun 2023 turun menjadi 70 kasus.
- b. Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan / atau tanpa berizin.

- c. Pelanggaran Perda dan Perkada yang masih marak dilakukan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke DIY, sebagai contoh masih banyaknya wisatawan yang melanggar Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya. Contoh lainnya adalah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh pelaku usaha di wilayah DIY berupa pemasangan spanduk / reklame tanpa berizin dan melintang di atas jalan sehingga membahayakan pengguna jalan dan menjadikan Jogja sebagai kota sejuta reklame.
- d. Kondisi DIY sebagai destinasi wisata dan kota ramah wisata menyebabkan banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang suka memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan atau pengemis seperti manusia silver dan pengamen akustik di setiap perempatan lampu merah di wilayah DIY.
- e. Maraknya aktivitas penambangan liar di sungai, pesisir pantai, bukit, dan gunung/lereng gunung yang dilakukan tanpa berizin dan merusak lingkungan.

Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kamtibmas di lingkungan wilayahnya dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat memberikan dorongan untuk memprioritaskan kepentingan bersama, sehingga kestabilan keamanan di masyarakat dapat diwujudkan.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat menggunakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (*crime total*). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang mengindikasikan bahwa masyarakat merasa semakin tidak tentram dan tidak aman. Sejalan dengan itu upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa tentram dan aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan di DIY. Terciptanya dan terpenuhinya rasa tentram dan aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi.

Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas DIY yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan DIY dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera dan bermartabat. Mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan keamanan adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Dengan terbitnya Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Penanganan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib yang meliputi : Tertib Jalan, Tertib Sungai, Tertib Kawasan Pantai, Tertib Kelautan, Tertib Lingkungan, Tertib Sumber Daya Mineral, Tertib Kehutanan, Tertib Perizinan, Tertib Pendidikan, dan Tertib Tata Ruang. Pemda DIY mempunyai harapan besar supaya upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lebih ditingkatkan dan diintensifkan lagi.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dibentuklah Kader Penegak Perda dan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Yang Membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah warga masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab terhadap Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta didorong rasa kebersamaan, kekeluargaan secara sukarela mengabdikan diri di bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat di Desa/Kelurahan. Selanjutnya masih dalam semangat untuk merangsang keterlibatan masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, Pemda DIY akan melakukan penguatan dan revitalisasi fungsi Satlinmas dan Kelompok Jaga Warga.

Kelompok Jaga Warga dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kelompok Jaga Warga Dan Omah Jaga Warga. Jaga Warga merupakan suatu upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Jaga Warga berupaya mengoptimalkan pranata sosial yang sudah ada di masyarakat, yaitu lembaga sosial-kemasyarakatan berbasis nilai-nilai luhur masyarakat, seperti kelompok siskamling, kelompok pengajian, kelompok

pemuda, kelompok pedagang/pengusaha, kelompok pengelola pariwisata, kelompok petani/nelayan, kelompok peduli bencana, dan lain-lain

Jaga Warga berperan sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan keterlindungan warga masyarakat, yang bekerja sama dengan Kepala Dusun/Lingkungan/Rukun Warga (RW), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepolisian Sektor. Jaga Warga berupaya melibatkan secara aktif seluruh komponen warga masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah atau potensi sosial yang ada dan berupaya secara mandiri mencari solusi penyelesaiannya. Keberadaan Jaga Warga juga mendukung peran TNI/Polri dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman. Keberadaan Jaga Warga juga diharapkan mampu menjadi mata dan telinga serta menjadi sumber informasi dalam rangka deteksi dini dan cegah dini akan berbagai potensi konflik, pelanggaran norma sosial, dan tindak kriminal di masyarakat.

Di satu sisi, baik Polri maupun TNI pada dasarnya telah memiliki konsep tertentu dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan keterlindungan warga seperti kebijakan dan strategi Polmas (Pemolisian Masyarakat) di dalam penyelenggaraan tugas Polri serta keberadaan Bintara Pembina Masyarakat (Babinsa) yang dibentuk oleh TNI di mana keduanya merupakan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Diharapkan TNI/Polri bisa bekerja sama, membangun sinergi serta menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan fungsi keterlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Jaga Warga tersebut. Melalui Jaga Warga, permasalahan-permasalahan yang diperkirakan muncul di lingkungan dapat diketahui sejak dini dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah mufakat sebagaimana tercantum di dalam Pancasila, serta meminimalisir penyelesaian melalui jalur hukum (kecuali memang diperlukan).

Berdasarkan data di bawah ini, jumlah pelanggaran perda dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan angka yang fluktuatif. Jumlah pelanggaran perda yang terkecil berada di angka 63 kasus di tahun 2020 dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Tabel 2-56 Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada dari Tahun 2019-2023

No.	Bidang Urusan	Elemen	Tahun					Satuan
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	2.187	63	907	382	160	Unit/Kasus

Sumber : Dataku Bappeda DIY 2024

Beberapa upaya untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keamanan di DIY, dilakukan upaya-upaya strategis melalui Koordinasi Kemitraan yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta Bina Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Selain itu, Pemda DIY juga melakukan program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat meliputi kegiatan pengawasan dan koordinasi keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing, pendataan dan identifikasi, verifikasi dan inventarisasi orsospol dan ormas di DIY, koordinasi penyelenggaraan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), penyelenggaraan Cipta Kondusif Daerah, pengembangan budaya sadar hukum di masyarakat, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Upaya di atas sangat penting mengingat sistem dan institusi sosial yang lahir dan diselenggarakan oleh masyarakat merupakan basis utama dalam menjaga ketahanan masyarakat sehingga mampu menghadirkan ketentraman, ketertiban, dan pada akhirnya melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu pranata-pranata sosial yang telah ada maupun yang nantinya akan dibentuk dalam masyarakat agar dapat berjalan harmonis dan bersinergi antara yang satu dengan lainnya menjadi penting untuk diatur.

Upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan telah dilakukan oleh berbagai pihak namun masih diperlukan keterpaduan, sinergitas serta peran serta aktif dari masyarakat yang lebih tahu dan memahami kondisi situasi di sekelilingnya dengan menggunakan kearifan lokal, dengan kembali memunculkan budaya adiluhung yang sudah ada dan memang ada, dan sekarang sudah mulai luntur apalagi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ternyata dampaknya sangat besar, baik itu dampak negatif ataupun positif.

Tingkat kriminalitas yang antara lain tergambar dari crime rate per 100.000 penduduk di wilayah DIY selama kurun 2021-2023 berkisar di angka 137-139. Adapun secara total tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah DIY ada di angka 5.331 pada 2021 dan sedikit turun menjadi 5.193 kasus pada tahun 2023. Kasus-kasus yang paling menonjol di antaranya kasus narkoba, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), *cyber crime*, dan pencurian dengan kekerasan (curas). Beberapa tindak pidana terlihat mengalami kenaikan di tahun 2023, diantaranya kasus narkoba tahun 2023 sebanyak 631 kasus, meningkat dari tahun 2022 yang sebanyak 464 kasus. Kasus *cyber crime* meningkat drastis dari 41 kasus di tahun 2022, menjadi 105 kasus pada tahun 2023. Kasus KDRT dari 75 kasus tahun 2021 menjadi 123 kasus tahun 2023 serta penggelapan sebanyak 360 kasus pada tahun 2022 menjadi 572 kasus di 2023. (Dataku Bappeda DIY, 2023)

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY Pasal 5 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa tujuan keistimewaan DIY adalah untuk “mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat” serta mewujudkan visi dan misi Arah Renaisans Keterlindungan Warga DIY, maka dilakukan berbagai upaya antisipatif guna menanggulangi dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang berpotensi menciptakan tindak kriminal, pelanggaran norma sosial, dan permasalahan terkait kondisi kesejahteraan di masyarakat. Selain itu juga dilakukan upaya untuk menghilangkan rasa ketakutan guna menciptakan rasa aman dan tentram pada diri setiap anggota masyarakat secara keseluruhan, baik tergabung dalam kelompok mayoritas atau minoritas kesukuan, agama, afiliasi politik, dan status kelas ekonominya.

Kondisi ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat juga akan mempengaruhi kehidupan dan penghayatan demokrasi di DIY. Tingkat kualitas penghayatan demokrasi di DIY diukur dengan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia). IDI adalah indikator komposit yang dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi. Tingkat perkembangannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga- Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS RI, capaian nilai IDI DIY Tahun 2023 sebesar 85,62 (berada pada kategori tinggi), sekaligus menempati peringkat pertama secara nasional dan menempatkan DIY pada Tingkat demokrasi yang ‘Baik’.

Aspek kebencanaan di DIY menjadi salah satu faktor yang berpengaruh atas kondisi ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Kondisi risiko bencana di DIY pada tahun 2023 berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di DIY adalah sebesar 108,15. Dengan skor IRBI sebesar 108,15, risiko bencana di DIY masih pada kategori sedang.

Tabel 2-57 Angka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY Tahun 2019-2023

Tahun	Angka Indeks
2019	140,92
2020	140,92
2021	126,34
2022	119,56
2023	108,15

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

Tabel 2-58 Perbandingan Indeks Risiko IRBI DIY dengan Rata-Rata Nasional Tahun 2023

Tahun	IRBI DIY	IRBI Rata-Rata Nasional
2023	108,15	132,25

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

Berdasarkan tabel di atas, jika disandingkan secara nasional maka IRBI DIY lebih baik dari IRBI rata-rata nasional, menandakan bahwa DIY berhasil dalam mengelola penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mengurangi risiko bencana di daerahnya.

Selanjutnya berdasarkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY sesuai rilis terakhir pada tahun 2019 angka prevalensi tercatat sebesar 2,30%.

Tabel 2-59 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di DIY

Tahun 2014	Tahun 2017	Tahun 2019
2,18%	1,77%	2,30%

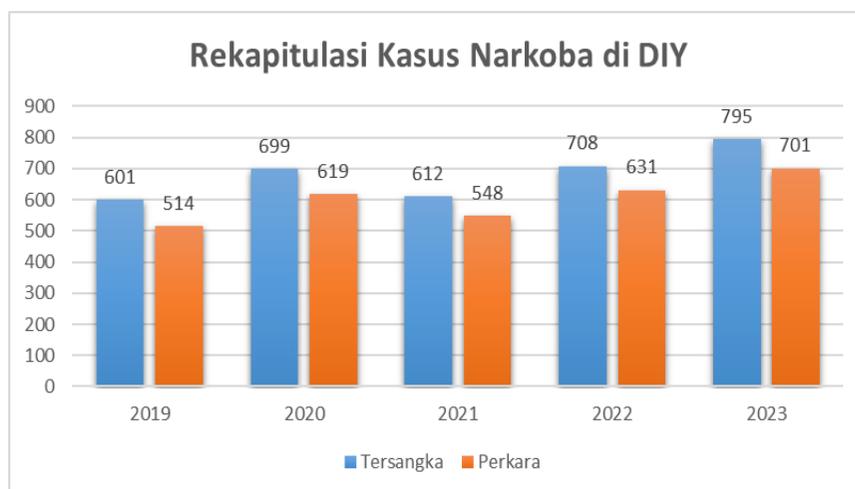
Sumber : Badan Narkotika Nasional, 2019

Tabel 2-60 Angka Prevalensi Penyalahgunaan di DIY dan Rata-Rata Nasional Tahun 2019

Peringkat	Provinsi	Angka Prevalensi Tahun 2019 (%)
1	Sumatera Utara	6,5%
2	Sumatera Selatan	5,0%
3	DKI Jakarta	3,3%
4	Sulawesi Tengah	2,8%
5	DIY	2,3%
Rata-Rata Nasional		1,8%

Sumber : Badan Narkotika Nasional, 2019

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan secara nasional, angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di DIY tahun 2019 berada pada peringkat 5 secara nasional dengan angka prevalensi sebesar 2,3%. Angka Prevalensi ini juga lebih tinggi dari rata-rata Angka Prevalensi secara nasional sebesar 1,8%. Selain itu, jika melihat pada data yang diberikan oleh Ditres Narkoba Polda DIY kepada Badan Kesbangpol DIY, di tahun 2023 jumlah kasus penyalahgunaan narkoba DIY cenderung meningkat dari jumlah kasus di tahun 2021 dan 2022. Hal ini menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY cukup tinggi dan perlu penanganan lebih lanjut. Adapun perkembangan jumlah kasus narkoba di DIY dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Ditres Narkoba Polda DIY, 2023

Gambar 2-42 Rekapitulasi Kasus Narkoba di DIY

Dalam hal kondisi politik, stabilitas kondisi politik harus terjamin sebagai salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu secara umum. Kesuksesan pemilihan umum diukur dari beberapa hal, diantaranya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, inklusif dan kondusif serta angka partisipasi masyarakat yang optimal. Namun demikian, beragam tantangan masih melingkupi dalam beragam lini, antara lain adalah masih adanya peluang terjadinya partisipasi yang kurang optimal, potensi munculnya konflik sosial dan polarisasi politik, politik uang, netralitas ASN, *black campaign* dan praktik menyimpang lainnya. Berikut matriks partisipasi pemilu di DIY.

Tabel 2-61 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dari Tahun ke Tahun

Wilayah	Pileg			Pilpres					Pilkada			
	2004	2009	2014	2004		2009	2014	2019	2005/ 2006	2010/ 2011	2015/ 2017	2020
				Putaran I	Putaran II							
Kota Yogyakarta	75.04	66.64	75.88	79.08	75.61	69.21	77.76	84.81	53.32	64.46	70.8	-
Kabupaten Bantul	92.11	74.08	81.2	85.24	82.63	79.11	81.31	87.89	76.52	73.69	75.33	80.32
Kabupaten Kulon Progo	87.04	73.37	80.64	85.41	82.96	73.46	79.32	86.5	75.66	69.7	79.32	-
Kabupaten Sleman	81.3	72.68	81.4	78.81	76.04	77.61	81.72	87.82	77.69	70.67	72.26	75.99
Kabupaten Gunungkidul	82.41	75.14	78.53	79.12	75.26	75.36	76.89	82.96	75.27	71.87	70.12	80.18
DIY	84.13	72.94	80.02	80.93	77.79	75.97	79.84	88.68	71.69	70.08	73.57	70.83

Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY

2.1.3.1.6 Urusan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial ditempuh dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan advokasi serta sinergi.

Tabel 2-62 Perkembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di DIY Tahun 2019-2023

No	Jenis PMKS	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Anak Berhadapan Dengan Hukum	55	N/A	72	122	175
2	Anak Balita Terlantar	620	N/A	441	431	255
3	Anak Dengan Kedisabilitas	2.075	N/A	1.971	2012	2553
4	Anak Jalanan	72	N/A	47	132	66
5	Anak Korban Tindak Kekerasan	13	N/A	10	165	77
6	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	10	N/A	29	25	98
7	Anak Terlantar	9.607	N/A	7.902	5200	5128
8	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	225	N/A	170	157	258
9	Fakir Miskin	322.459	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Gelandangan	197	N/A	123	72	58
11	Korban Bencana Alam	8	N/A	7.687	21.908	16.178
12	Korban Bencana Sosial	117	N/A	80	59	77
13	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	4.979	N/A	4.515	4.165	3.815
14	Kelompok Minoritas	1021	N/A	124	138	130
15	Korban Penyalahgunaan Napza	439	N/A	323	242	224
16	Korban Trafifcking	1	N/A	1	6	8
17	Korban Tindak Kekerasan	697	N/A	560	470	332
18	Lanjut Usia Terlantar	37.442	N/A	33.129	26.525	25.780

No	Jenis PMKS	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
19	Orang dengan HIV/AIDS	4.193	N/A	5.127	5.617	6.393
20	Penyandang Disabilitas	27.129	N/A	26.866	28.137	26.512
21	Pemulung	465	N/A	412	327	300
22	Pengemis	147	N/A	111	64	61
23	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	327	N/A	278	208	177
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12.365	N/A	12.407	11.526	11.819
25	Tuna Susila	259	N/A	361	90	100

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2024

Data PPKS di DIY dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif, terlihat pada Tabel Perkembangan PPKS DIY di atas, dari masing-masing jenisnya terdapat data yang menunjukkan arah peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2023 menunjukkan data jumlah terbesar ada pada Penyandang Disabilitas sebanyak 26.512 orang, Lanjut Usia Terlantar sebanyak 25.780 orang, dan Korban Bencana Alam sebanyak 16.178 orang.

Pada tahun 2023, data yang mengalami peningkatan mayoritas terjadi pada masyarakat rentan seperti Anak dan Perempuan. Hal tersebut terlihat pada data Anak Berhadapan Dengan Hukum menjadi 175 orang, Anak Dengan Kedisabilitasannya menjadi 2.553 orang, Anak Memerlukan Perlindungan Khusus menjadi 98 orang, Korban Trafficking menjadi 8 orang, Orang Dengan HIV/AIDS menjadi 6.393 orang, dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi menjadi 11.819 orang. Pemberian jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial perlu diprioritaskan untuk kelompok tersebut tanpa mengesampingkan intervensi untuk PPKS lainnya.

1. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan perorangan atau Lembaga pemerintah maupun swasta yang sudah berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dalam membantu pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, keberadaan PSKS penting sebagai mitra pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap PPKS. Pembinaan terhadap PSKS penting terutama untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan dan kerawanan sosial.

Tabel 2-63 Jenis dan Jumlah PSKS di DIY 2019-2023

No	Jenis PSKS	Tahun					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pekerja Sosial Profesional	3	N/A	3	3	8	Orang
	Pekerja Sosial Fungsional	36	N/A	36	41	45	Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat	5130	N/A	5057	3073	3122	Orang
3	Taruna Siaga Bencana	1068	N/A	1091	662	581	Orang
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	381	N/A	316	283	316	Lembaga
5	Karang Taruna	438	N/A	438	438	438	Lembaga
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	12	N/A	12	12	7	Lembaga
7	Keluarga Pioner	30	N/A	30	N/A	N/A	Keluarga
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	263	N/A	229	304	310	Lembaga
9	Penyuluh Sosial Masyarakat	43	N/A	120	120	120	Orang
10	Penyuluh Sosial Fungsional	7	N/A	6	10	7	Orang
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	78	N/A	78	78	78	Orang
12	Dunia Usaha	57	N/A	238	237	238	Lembaga

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2024

Terdapat 12 jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di DIY yang membantu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PPKS melalui panti dan di luar panti/masyarakat. Pemda DIY memiliki UPT di bawah Dinas Sosial DIY yang bertugas melaksanakan pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial/rehabilitasi medis yang terdiri dari: (a) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD); (b) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW); (c) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL); (d) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR); (e) Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA); (f) Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW).

Tabel 2-64 Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya, Tahun 2019-2023

No	Nama Balai / Panti Sosial	Kapasitas Daya Tampung				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	185	185	185	185	185
2	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	60	60	70	70	70
3	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	300	300	300	300	300
4	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	80	80	80	80	80
5	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	224	228	214	228	228
6	Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	140	140	125	140	140

Sumber: Dinas Sosial DIY 2024

Data maksimal Kapasitas Daya Tampung Balai/Panti di DIY tersaji pada table diatas. Pada BRSBKL kapasitas sangat besar dikarenakan terdapat 2 gedung balai/panti yang tempatnya berbeda yaitu Bina Karya untuk warga balai/panti yang sudah di rehab dan mendapatkan pelatihan untuk dapat mandiri sehingga siap bekerja dan Bina Laras merupakan balai/panti untuk orang dengan gangguan jiwa yang sedang dalam proses rehabilitasi. BPSTW untuk lansia juga memiliki 2 gedung balai/panti yang terletak di daerah Sleman dan Bantul, BPSTW digunakan untuk menampung lansia terlantar rujukan dari daerah-daerah di DIY serta dapat digunakan secara regular oleh lansia yang menginginkan tinggal di balai/panti dengan membayar. BRSPA untuk anak juga memiliki 2 balai/panti yang terletak di Sleman dan Gunungkidul.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Urusan Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya penting dalam menggerakkan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor

produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas lapangan kerja dalam suatu daerah. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

1. Penduduk Usia Kerja (PUK)

Konsep ketenagakerjaan menurut ILO (International Labor Organization) membagi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka).

Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, tetapi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru lebih lambat. Hal ini menyebabkan tidak semua angkatan kerja mampu terserap oleh pasar tenaga kerja karena ketidakseimbangan antara supply dan demand tenaga kerja sehingga terjadilah pengangguran.

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di DIY pada Februari 2024 sebanyak 3.012,98 ribu orang. Sebagian besar penduduk usia kerja tersebut merupakan angkatan kerja yaitu 2.204,94 ribu orang (73,18%), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 808,04 ribu orang.

Tabel 2-65 Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY (ribu orang), Tahun 2020–2024

Jenis Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	2.160,74	2.299,91	2.237,78	2.233,81	2.204,94
- Bekerja	2.087,77	2.201,51	2.154,30	2.153,90	2.133,61
- Penganggur	72,97	98,40	83,48	79,91	71,33
Bukan Angkatan Kerja	881,89	858,75	758,53	808,11	808,04
Penduduk Usia	3.042,64	3.158,65	2.996,31	3.041,92	3.012,98

Jenis Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Kerja					
TPAK (Persen)	71,02	72,81	74,68	73,43	73,18
TPT (Persen)	3,38	4,28	3,73	3,58	3,24

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Komposisi angkatan kerja di DIY pada Februari 2024 terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 2.133,61 ribu orang dan penduduk yang menganggur sebanyak 71,33 ribu orang.

Komposisi penduduk bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan utama menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di DIY pada Februari 2022-Februari 2024 masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu pada Februari 2024 penyerapan tenaga kerja di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 24,62%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,02%, dan sektor Industri Pengolahan sebesar 15,08%.

Peningkatan persentase penduduk bekerja pada beberapa sektor tersebut antara lain karena pada periode tersebut memasuki masa panen tanaman pangan, adanya pengangkatan dan penandatanganan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah, dan meningkatnya permintaan ekspor, utamanya ekspor hasil produksi pertanian dan industri pengolahan (tekstil/garmen, kertas), serta meningkatnya permintaan usaha pencetakan dan aktivitas *event* menjelang Pemilu 2024.

Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di DIY masih bisa dipertahankan terbukti dengan diterimanya penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Tahun 2020 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk dua (2) kategori yaitu IPK Terbaik Peringkat Ketiga berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Sedang dan IPK Terbaik pada Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (*labor supply*) untuk 2-144

memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY dalam kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi, namun secara trend mengalami peningkatan. TPAK DIY pada Bulan Februari 2020 tercatat sebesar 71,02%, kemudian pada Februari 2021 dan 2022 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 74,68%. Namun TPAK DIY mengalami penurunan pada Februari 2023 sebesar 73,43%, dan pada Februari 2024 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 73,18% jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2023. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ada penurunan persediaan/ pasokan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di wilayah DIY. Penurunan TPAK disebabkan oleh turunnya jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja pada Februari 2024 dibandingkan periode tahun sebelumnya.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Tidak sebandingnya ketersediaan lapangan kerja dengan pertambahan jumlah angkatan kerja menyebabkan sebagian jumlah angkatan kerja tidak bisa mendapatkan pekerjaan/menganggur. Mekanisme pasar kerja tergantung adanya permintaan dan penawaran (*supply and demand*) tenaga kerja. Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja disebabkan karena masih adanya “Gap” antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi pencari kerja sehingga menyebabkan terjadinya penganggur terbuka. Penganggur terbuka juga disebabkan masa tunggu bagi angkatan kerja baru untuk mendapatkan pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, serta mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sebagian besar penganggur terbuka di DIY berada dalam kelompok usia muda dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi (SMA/SMK, Diploma 3, dan Sarjana) tetapi belum mempunyai keterampilan khusus dan belum memiliki pengalaman kerja. Kondisi ini perlu dijembatani untuk menghubungkan dunia industri/usaha dengan dunia pendidikan. *Link & match* berbasis market driven dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan perlu segera dilakukan.

Pengangguran atau ketiadaan pekerjaan serta standar upah yang rendah merupakan salah satu akar dari kemiskinan. Meskipun dalam beberapa tahun

terakhir, cenderung mengalami tren penurunan, angka pengangguran terbuka di DIY masih dinilai cukup tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa potensi wilayah yang tersedia di Yogyakarta ternyata belum semua mampu memberi peluang kerja bagi penduduk usia kerjanya. Supply tenaga kerja yang lebih tinggi di perkotaan, baik dari daerah perkotaan sendiri maupun kaum urban, turut berperan menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. Akibatnya, pengangguran di perkotaan cenderung lebih kentara dibandingkan di pedesaan.

Selama lima tahun terakhir, TPT DIY mengalami kecenderungan trend menurun. TPT DIY pada Februari 2020 sebesar 3,38% mengalami peningkatan pada Februari 2023 dengan TPT sebesar 4,28%. Angka tersebut mengalami penurunan pada Februari 2022 dengan TPT sebesar 3,78% dan terus mengalami penurunan hingga sebesar 3,24% pada Februari 2024. Apabila dibandingkan dengan Februari 2023, TPT DIY pada Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 0,34% poin dari semula 3,58% menjadi 3,24%. Kondisi ini menunjukkan kegiatan perekonomian di DIY sudah normal kembali pasca pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari TPT Februari 2024 sudah lebih baik jika dibandingkan kondisi Februari 2020 (sebelum pandemi) yang mencapai 3,38%.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Februari 2024, TPT untuk jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lainnya sebesar 6,13%. TPT tertinggi kedua yaitu pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 4,21% diikuti oleh TPT pada jenjang Diploma I/II/III sebesar 3,87% dan TPT universitas sebesar 3,43%. Sementara TPT paling rendah adalah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 1,10% dan Sekolah Dasar (SD) ke bawah sebesar 1,91%. Apabila dibandingkan dengan periode Februari 2023, TPT yang mengalami penurunan adalah pada jenjang pendidikan Universitas, SD ke bawah, dan jenjang Sekolah Menengah Pertama. Sementara TPT yang mengalami peningkatan terbesar adalah tamatan SMA yang naik sebesar 1,59% poin, diikuti oleh TPT pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III naik sebesar 0,83% poin, dan SMK naik 0,28% poin dibanding Februari 2023. Kondisi tersebut disebabkan oleh semakin ketatnya persaingan dalam pasar kerja sehingga pencari kerja dituntut untuk memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai, serta mampu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi. Selain itu, hal yang masih menjadi tantangan bersama adalah belum terciptanya *link and match* antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas (lebih selektif) terutama pada tingkat pendidikan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi, sementara untuk pendidikan rendah cenderung lebih mudah diserap dunia kerja karena mau menerima pekerjaan apa saja.

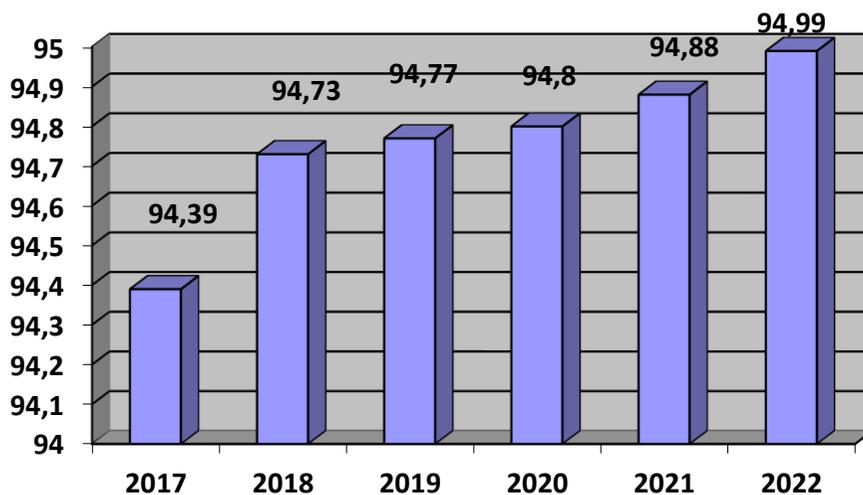
2.1.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Diskriminasi gender dalam kehidupan bermasyarakat telah menyebabkan perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Mengingat bahwa kondisi ini bertentangan dengan nilai keadilan sosial yang menjadi inti sila kelima Pancasila, Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan kebijakan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan yang diimplementasikan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam hal akses; partisipasi; kontrol; dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki agar manfaat pembangunan dapat diperoleh secara adil. Dalam pengukurannya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan sebagai indikator utama.

Sementara itu, dalam hal perlindungan anak, Pemerintah Daerah DIY memandang anak sebagai penentu masa depan bangsa. Untuk dapat menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan menjadi modal pembangunan bangsa pada masa depan, diperlukan pembangunan anak yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak pada tahun 1989, anak memiliki empat hak antara lain: 1) Hak kelangsungan hidup; 2) Hak perlindungan; 3) Hak tumbuh kembang; dan 4) Hak berpartisipasi. Selain hak-hak anak, Konvensi Hak Anak juga berisi lima kluster substantif yaitu: 1) Hak sipil dan kebebasan; 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan; 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta 5) Perlindungan khusus. Dalam pengukurannya, Indeks Perlindungan Anak digunakan sebagai indikator utama.

1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Indeks ini memperhitungkan indikator-indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia, yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. Pada tahun 2022, DIY telah menjadi daerah dengan capaian IPG terbaik secara nasional dengan angka capaian IPG sebesar 94,99. Angka ini meningkat 0,11 poin dari capaian IPG tahun 2021 yang berada pada angka 94,88.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-43 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) DIY Tahun 2017-2022

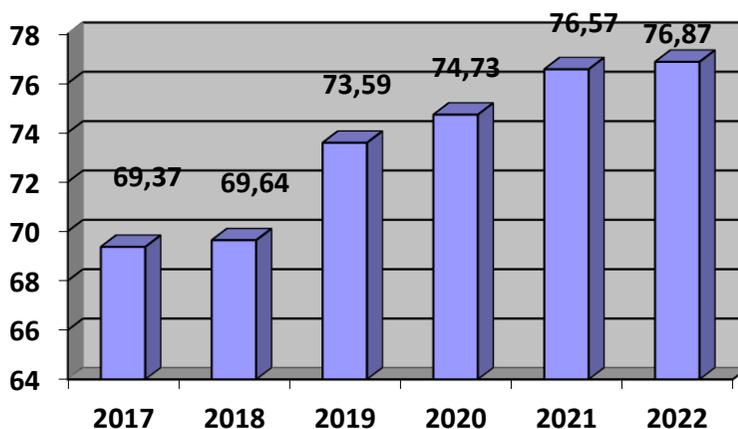
Kecenderungan angka IPG DIY yang capaiannya tinggi dan selalu meningkat ini utamanya didukung oleh proses perencanaan dan penganggaran yang secara disiplin telah dilaksanakan secara responsif gender di berbagai perangkat daerah Pemerintah Daerah DIY. Analisis gender yang dilakukan pada proses perencanaan dan pernyataan anggaran gender pada proses penganggaran telah menghasilkan berbagai kebijakan, program, kegiatan, dan inovasi pembangunan yang responsif gender. Beberapa di antaranya yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender, Peraturan Daerah (PERDA) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, *kanal politik* perempuan yang bekerja sama dengan Mojok.co, kelas Prima Sarira Ayu yang merupakan wahana edukasi peningkatan kapasitas ekonomi dan politik perempuan, Jaminan kesehatan sosial untuk korban kekerasan, *rebranding* program Desa Prima dari pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi desa yang responsif gender terhadap perempuan dan anak, serta pengembangan aplikasi Prima Center untuk mendata kelompok pemberdayaan ekonomi perempuan dan memotret kondisi perempuan dan anak di kalurahan-kalurahan yang menjadi lokus program Desa Prima.

2. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi indikator pengukuran tingkat partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Indeks ini mengadopsi dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang disusun oleh UNDP. Indikator- indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD DIY periode 2017-2022. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemda DIY untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dapat meningkat sehingga mampu mengakselerasi terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di DIY.

Data dari BPS menunjukkan bahwa komitmen Pemda DIY tersebut telah membuahkan hasil peningkatan capaian IDG DIY pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Hingga tahun 2017, capaian IDG DIY di bawah rata-rata nasional dan menempati urutan ke-18 dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia. Namun, capaian IDG di DIY terus mengalami peningkatan signifikan setelah IDG menjadi salah satu IKU dalam RPJMD DIY 2017-2022. Bahkan pada tahun 2022 IDG DIY berada di atas angka rata-rata nasional yang berada pada poin 76,87.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-44 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) DIY Tahun 2017-2022

Kenaikan IDG ini paling signifikan didukung oleh peningkatan pada elemen persentase perempuan sebagai tenaga profesional. Pada tahun 2022 persentase perempuan sebagai tenaga profesional ada pada angka 53,09% atau naik 0,91% dari capaian tahun 2021 yang berada pada angka 52,18%. Peningkatan pada elemen sumbangan pendapatan perempuan didukung oleh beberapa faktor, utamanya yaitu semakin banyaknya jumlah perempuan yang masuk dalam dunia kerja pasca pandemi. Sementara itu, elemen sumbangan pendapatan perempuan pada tahun 2022 berada pada angka 41,37% atau naik 0,11 poin dibandingkan capaian tahun 2021 yang berada pada angka 41,26%. Lebih lanjut, elemen keterlibatan perempuan di parlemen masih pada angka yang sama dengan tahun 2021 yaitu 20%.

Untuk peningkatan IDG selanjutnya, dibutuhkan upaya yang lebih serius oleh Pemerintah Daerah DIY untuk mendorong pemberian upah yang adil bagi perempuan dan laki-laki pekerjaan yang bekerja pada pekerjaan dengan nilai yang sama. Selain itu, upaya mendorong keterwakilan perempuan di parlemen pun perlu diperkuat mengingat DIY belum memenuhi kuota *affirmative action* yang mensyaratkan minimal 30% perempuan sebagai anggota parlemen.

3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) menggambarkan capaian upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Indonesia sesuai amanat Konvensi Hak Anak (KHA). Indeks ini diharapkan dapat menjadi ukuran capaian pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memastikan program dan kebijakan telah efektif dan efisien dalam menjawab berbagai permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak dan melahirkan sistem perlindungan anak yang terintegrasi di lintas sektor.

Tabel 2-66 Indeks Perlindungan Anak DIY berdasarkan Dimensi Pembentuknya Tahun 2018-2022

Tahun	Satuan	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus	IPA DIY	IPA Indonesia
2018	Indeks	74,59	86,94	79,16	72,16	78,98	78,66	62,72
2019	Indeks	77,18	89,94	84,02	75,92	80,44	81,71	66,26
2020	Indeks	80,99	90,75	85,16	79,12	71,82	81,53	66,89

2021	Indeks	53,31	88,18	84,29	32,53	78,46	68,35	61,38
2022	Indeks	58,29	89,36	84,75	35,35	82,49	71,08	63,30

Sumber KemenPPA, 2023

Sejak awal rilis di 2018, IPA DIY selalu lebih tinggi dari IPA Indonesia. Bahkan IPA DIY menjadi yang tertinggi secara nasional di tahun 2020 dan tahun 2022. Namun, capaian IPA DIY masih fluktuatif. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika lingkungan DIY semasa pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak tidak bisa berjalan optimal di tahun 2020 dan 2021. Kondisi membaik di tahun 2022 seiring berakhirnya masa pandemi dan masyarakat dapat beraktivitas normal kembali sehingga pemenuhan hak anak dapat berjalan lebih baik pada semua dimensi, dengan performa yang sangat baik pada dimensi “Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif” dan dimensi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

2.1.3.2.3 Urusan Pangan

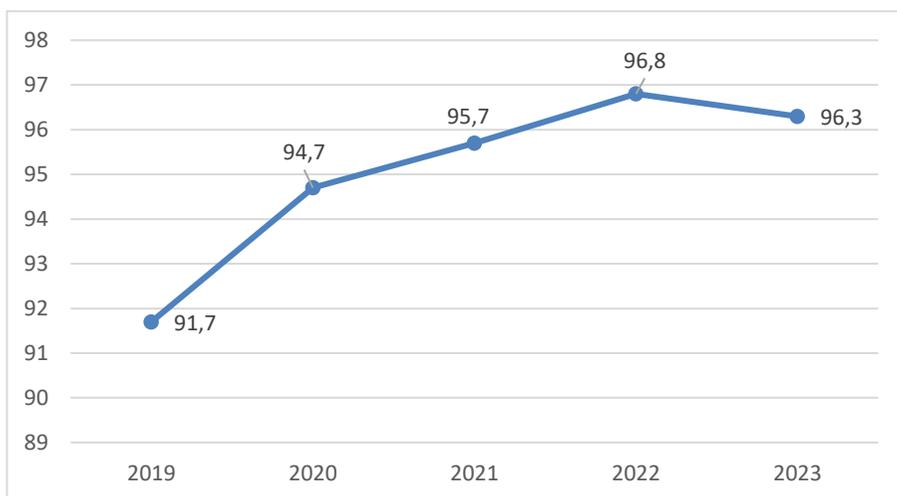
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah NKRI sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Selaras dengan hal tersebut, maka peningkatan kedaulatan pangan merupakan salah satu agenda prioritas untuk kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Ketahanan pangan dilihat dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor PPH dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan serta digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Tujuan dari PPH adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna

memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) dengan skor ideal 100.

Berdasarkan hasil Susenas BPS, skor PPH di DIY dari tahun 2019 hingga 2022 terus meningkat. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan sebesar 0,03. Meskipun demikian, skor PPH di DIY tetap lebih tinggi dibandingkan dengan skor nasional yang mencapai 94,1. Skor PPH mencerminkan tingkat dan kualitas konsumsi pangan. Capaian skor PPH di atas 90 merupakan kategori cukup ideal yang mendekati angka ideal 100, sehingga kualitas konsumsi pangan di DIY masih lebih baik dari tingkat nasional. Namun, perlu diperhatikan bahwa tingkat konsumsi pangan di DIY masih didominasi oleh kelompok padi-padian, khususnya beras serta kelompok sayur dan buah. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan keseimbangan antara 9 kelompok bahan pangan. Sasaran utamanya adalah penurunan konsumsi beras dan terigu dengan mendorong peningkatan konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, dan buah/biji berminyak yang capaiannya masih di bawah standar yang dianjurkan dengan berbasis pada pangan lokal. Hal ini menjadi tantangan yang harus menjadi fokus penanganan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu, perlu didukung dengan perubahan pola konsumsi pangan yang dimulai dari sejak usia dini serta keterlibatan 4 pilar, yaitu masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah. Upaya tersebut dilakukan melalui program/ kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui bentuk kampanye, gerakan, edukasi, promosi dan sosialisasi.



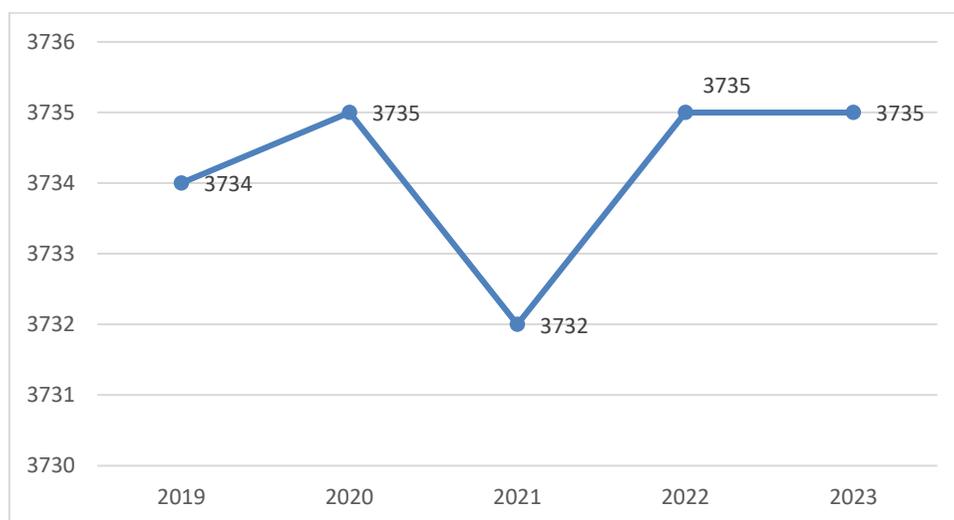
Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2-45 Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2019-2023

Tercapainya indikator skor PPH didukung pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang didorong oleh perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya B2SA terus digalakkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, salah satunya melalui usaha pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Lahan pekarangan rumah tangga dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan gizi keluarga sehingga pola konsumsi B2SA dapat tercapai. Skor PPH yang semakin tinggi menunjukkan kualitas konsumsi yang semakin baik dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

2. Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi dengan baik, didukung oleh peningkatan produksi pertanian dan adanya koordinasi intensif dengan para pihak terkait. Tingkat ketersediaan energi tahun 2023 tercapai 3.735 kkal/kapita/hari dengan tingkat konsumsi energi sebesar 2.053 kkal/kapita/hari. Ketersediaan energi selama tahun 2019-2023 cenderung stabil walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021.



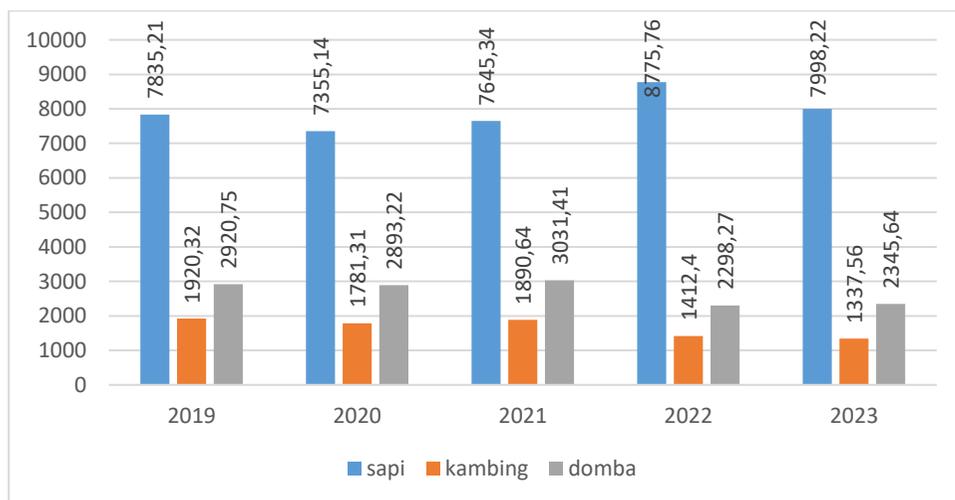
Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2-46 Perkembangan Ketersediaan Energi Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2019-2023

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 201/KEP/2018 tentang Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemda, jenis pangan pokok untuk cadangan pangan berupa beras ditetapkan sebanyak 322 ton. Pada tahun 2022, terjadi pengeluaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk bantuan bencana sebesar 11,658 ton, sehingga sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah cadangan pangan sebesar 280,884 ton. CPPD tersebut dititipkan di BULOG sebesar 31,875 ton dan di Taru Martani sebesar 249,009 ton. Pada tahun 2023 dialokasikan anggaran pengadaan CPPD sebesar 24,865 ton, sehingga jumlah cadangan pangan pemerintah berupa beras telah mencapai 305,749 ton dan seluruhnya dikelola di PT Taru Martani.

Selama tahun 2023 tidak ada penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah DIY. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi DIY selama tahun 2023 aman, baik dari dampak bencana alam, gejolak harga pangan, maupun gejolak sosial yang dapat memicu kerawanan pangan.

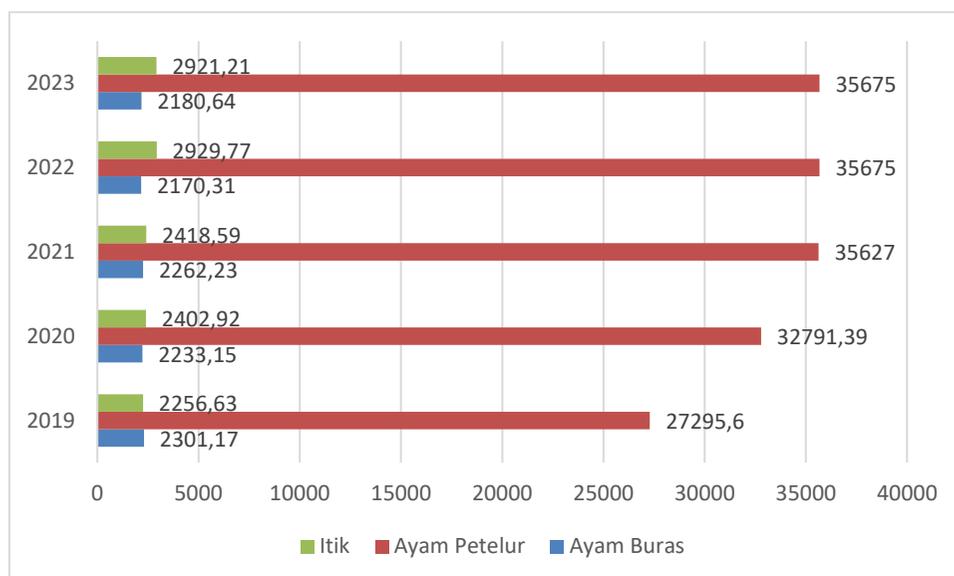
Produksi daging sapi pada periode 2019-2023 mengalami kecenderungan peningkatan dengan produksi terbesar pada tahun 2022 sebesar 8.775,76 ton. Sementara itu, produksi daging domba dan daging kambing pada periode sama cenderung mengalami penurunan. Kecenderungan penurunan produksi daging kambing dan domba sejalan dengan kecenderungan penurunan populasi kambing dan domba di DIY.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2-47 Produksi Daging Sapi, Kambing, dan Domba di DIY Tahun 2019-2023 (Ton)

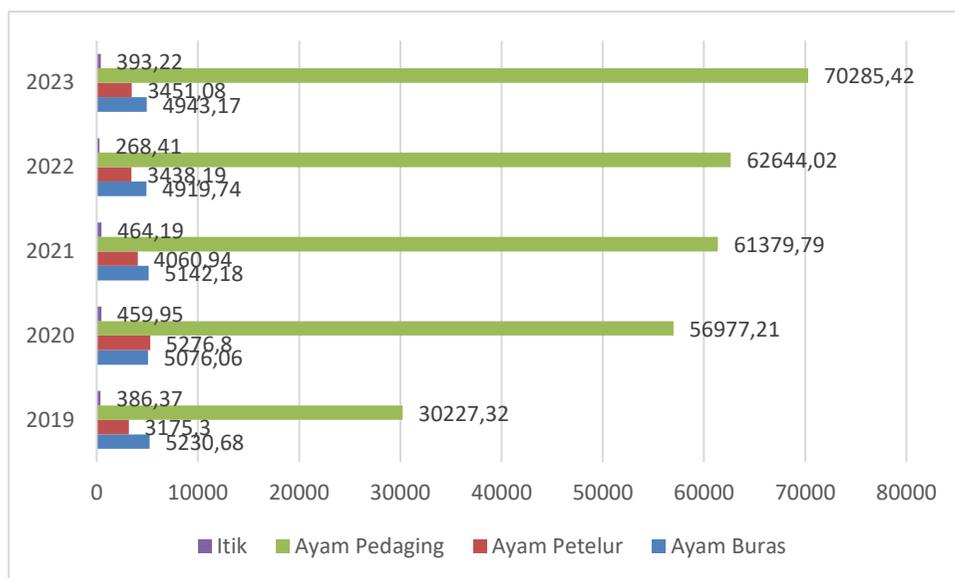
Produksi telur ayam petelur dan itik memiliki kecenderungan meningkat dalam periode tahun 2019-2023. Sementara itu, produksi telur ayam kampung justru trendnya menurun dalam periode yang sama. Minat peternak untuk beralih ke budidaya ternak ayam petelur adalah penyebab menurunnya produksi telur ayam kampung. Produksi telur unggas di DIY disajikan dalam gambar di bawah ini:



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2-48 Produksi Telur Unggas Tahun 2019-2023 (dalam ton)

Kecenderungan peningkatan produksi daging dari ayam pedaging meningkat sangat signifikan dalam periode tahun 2019-2023. Hal ini sejalan dengan meningkatnya permintaan terhadap makanan berbasis ayam seiring dengan pulihnya pariwisata DIY pasca pandemi. Data produksi daging unggas secara rinci dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2-49 Produksi Daging Unggas Tahun 2019-2023 (dalam ton)

3. Distribusi Pangan

Aspek distribusi dan akses pangan juga terus diperkuat dan ditingkatkan. Salah satu upaya dalam mengatasi gejolak harga pangan dilakukan melalui kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI)/Pasar Mitra Tani (PMT) yang merupakan bagian dari program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Lembaga ini diharapkan dapat mendorong stabilisasi harga sehingga konsumen dapat membeli komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar.

Akses pangan ke masyarakat juga terus diperluas dengan adanya fasilitasi bantuan pemerintah yang diberikan kepada gapoktan di daerah rawan pangan. Fasilitasi ini diberikan untuk mendekatkan pangan ke masyarakat sehingga tersedia pangan secara kontinyu dengan harga yang terjangkau.

Upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan di DIY dilakukan melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Lembaga Akses Pangan Masyarakat dan pelaksanaan gelar pangan murah. Saat ini, sudah difasilitasi sebanyak 164 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari target 392 Gapoktan untuk stabilisasi harga komoditas gabah/beras, jagung, kedelai dan ubi kayu/gaplek, 31 Gapoktan dari target 94 Gapoktan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga.

Terkait dengan aspek kerawanan pangan, peta komposit *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) tahun 2023 menunjukkan adanya penurunan jumlah kapanewon yang masuk ke dalam kategori rawan (Prioritas 1, 2 dan 3). Di sisi lain, terdapat peningkatan kapanewon yang masuk dalam kategori aman (Prioritas 6). Perkembangan hasil komposit FSVA tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2-67 Perbandingan Hasil Peta Komposit Tahun 2020 – 2023

Prioritas	Jumlah Kapanewon				Persentase			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Prioritas 1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritas 2	0	1	1	0	0,00	1,28	1,28	0,00
Prioritas 3	1	4	3	3	1,28	5,13	3,85	3,85
Prioritas 4	17	16	5	12	21,79	20,51	6,41	15,38
Prioritas 5	35	40	30	22	44,87	51,28	38,46	28,21
Prioritas 6	25	17	39	41	32,05	21,79	50,00	52,56

Sumber: DPKP DIY, 2024

Berdasarkan analisis yang menghasilkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*), hingga akhir tahun 2023 masih ada 3 Kemantren di Kota Yogyakarta yang masuk dalam daerah rentan rawan pangan, berada pada skala prioritas penanganan ke-3 (kategori agak rentan) dari 6 skala prioritas yang ada dan perlu mendapat penanganan lintas sektor secara berkelanjutan sesuai penyebabnya. Namun terdapat perubahan lokasi pada dua kemantren, yaitu kemantren Mantrijeron dan Kraton berubah menjadi kemantren Gedongtengen dan Gondomanan. Ketiga kemantren tersebut masuk dalam kategori rentan rawan pangan dengan indikasi indikator angka kesakitan, indikator kemiskinan, indikator persentase rumah tangga tanpa akses air bersih, dan indikator persentase balita stunting.

4. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Konsumsi energi kelompok padi-padian tahun 2023 sebesar 101 kg/kap/tahun lebih tinggi dibanding tahun 2022 yang mencapai 98,40 kg/kap/tahun. Konsumsi energi kelompok daging tahun 2023 sebesar 17 kg/kap/tahun lebih tinggi dibanding tahun 2022 sebesar 16,29 kg/kap/tahun. Konsumsi energi kelompok telur, susu, dan ikan di tahun 2023 secara berturut turut adalah 8,4 kg/kap/tahun, 3,4 kg/kap/tahun, dan 11,2 kg/kap/tahun. Untuk konsumsi kelompok telur mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 8,51 kg/kap/tahun, sedangkan

kelompok susu sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,48 kg/kapita/tahun dan konsumsi ikan juga menurun sebesar 1,2 kg/kap/tahun.

Tabel 2-68 Konsumsi Energi beberapa jenis Kelompok Bahan Pangan di DIY Tahun 2019-2023

Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi Energi (Kg/Kap/Tahun)				
	2019	2020	2021	2022	2023
I. Padi-padian	104,50	102,40	100,90	98,40	101
a. Beras	83,40	82,20	81,40	80,60	81
b. Jagung	0,80	1,40	0,70	0,70	0,70
c. Terigu	20,30	18,80	18,80	17,10	19,30
II. Umbi-umbian	11,70	12,90	16,70	15,49	15,10
a. Singkong	7,20	8,30	11,40	10,90	10,70
b. Ubi jalar	1,80	1,90	2,40	2,20	2,10
c. Kentang	2,70	2,70	2,90	3,20	2,30
III. Pangan Hewani	42,40	42,00	39,98	40,68	40
a. Daging ruminansia	7,80	6,90	5,50	5,48	5,8
b. Daging unggas	10,70	11,00	10,80	10,81	11,20
c. Telur	8,10	7,90	8,50	8,51	8,40
d. Susu	3,80	3,70	3,50	3,48	3,40
e. Ikan	12,00	12,50	12,40	12,40	11,20

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan mengamanatkan bahwa urusan pangan melibatkan lintas sektor yang menangani pangan segar dan olahan. Berbagai permasalahan keamanan pangan merupakan akibat banyaknya produk pangan yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu mengandung bahan berbahaya (cemaran kimia), cemaran mikroba (cemaran biologis) serta benda-benda yang tidak diperbolehkan dalam pangan (cemaran fisik). Oleh karena itu pengawasan keamanan pangan terus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait melalui Jejaring Keamanan Pangan Daerah yang bersifat koordinatif berdasarkan kewenangan masing-masing OPD dengan harapan potensi cemaran kimia, fisik, biologis pada pangan segar dan olahan dapat dicegah atau diminimalisir mulai dari proses produksi dengan *Good Agriculture Practices (GAP)/Good Farming Practices (GFP)*, pasca panen dengan 2-158

Good Handling Practices (GHP), pengolahan dengan *Good Manufacturing Practices* (GMP), distribusi dengan *Good Distribution Practices* (GDP) dan *Good Retailing Practices* (GRP), sehingga pangan segar dan olahan sampai ditingkat konsumen dalam kondisi aman dikonsumsi.

Adanya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) mendukung terjaganya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang dikonsumsi masyarakat DIY melalui pengawasan pre market dan post market. Pada tahun 2023 telah dilakukan pengawasan keamanan pangan dan pengujian post-market terhadap 58 produk PSAT berupa sayur dan beras curah yang beredar di 5 kabupaten/kota di DIY. Hasilnya menunjukkan bahwa 100% PSAT yang menjadi sampel, aman untuk dikonsumsi.

Khusus untuk pengawasan *pre-market* berupa penjaminan keamanan pangan dan dukungan peningkatan ekspor PSAT, OKKPD-DIY telah menerbitkan 28 izin edar Produk Domestik (PD) PSAT dan 4 Sertifikat Penerapan Penanganan yang baik (SPPB) PSAT. Selain itu dilakukan pula *Surveillance* kepada beberapa pelaku usaha PSAT yang sudah mendapatkan sertifikat/register dengan hasil semuanya dinyatakan masih konsisten dalam pemenuhan standar keamanan pangan.

2.1.3.2.4 Urusan Pertanahan

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Selain kedudukan sebagai daerah otonom, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Pemda DIY juga berkedudukan sebagai daerah istimewa dimana Urusan Pertanahan menjadi salah satu urusan yang diamanahkan sebagai urusan keistimewaan.

Sebagai daerah bekas Swapraja, urusan pertanahan di DIY memang bersifat khusus. Pada masa Swapraja, Kasultanan Nyayogyakarta Hadiningrat (selanjutnya disebut Kasultanan) dan Kadipaten Pakualaman (selanjutnya disebut Kadipaten) memberikan hak pemanfaatan tanah kepada masyarakat dan Kalurahan (penyebutan Desa pada waktu itu) dengan sejumlah hak pemanfaatan adat, seperti *magersari*, *ngindung*, *angango turun-temurun*, dan *hanggayuh* (atau *anggaduh*) melalui *serat kekancingan*.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY mengatur tentang 5 (lima) kewenangan istimewa bagi DIY, salah satunya kewenangan istimewa bidang pertanahan. Kewenangan istimewa adalah

kewenangan tambahan tertentu bagi DIY di samping wewenang yang sudah ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintah Daerah DIY mengundangkan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY. Pasal 45 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan umum Pemerintah Daerah DIY dalam urusan pertanahan, diantaranya izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal 50

Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan khusus Pemerintah Daerah DIY dalam pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, yang dilakukan dengan:

1. Memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
2. Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Urusan pertanahan dalam UU Nomor 13/2012 dan Perdais DIY No 1/2013 ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Seluruh bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten padadasarnya dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam peraturan perundangan. Dalam Pasal 3 Perdais DIY Nomor 1/2017 tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan/atau untuk kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terdiri dari penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemanfaatan berupa perlindungan, penggunaan dan pelepasan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Dalam rangka menjalankan urusan pertanahan Pemda DIY telah melakukan penerbitan IPL sebagai bagian dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini dilakukan untuk mendukung program strategis nasional dan program prioritas daerah. Izin penggunaan lokasi (IPL) yang telah diterbitkan dari tahun 2015-2023 sebanyak 26 SK IPL.

Pada tahun 2022 telah terbit Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di DIY sebagai dasar

pelaksanaan pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten serta acuan dalam penyesuaian sertifikat pada tanah kalurahan.

Capaian sasaran pemda bidang pertanahan diukur berdasarkan indikator bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan. Pada tahun 2022 capaian sebesar 22.242 bidang didapatkan dari realisasi pendaftaran sertifikasi tanah kasultanan dan kadipaten sebanyak 13.837 bidang Tanah SG/ PAG ditambah dengan pendaftaran sertifikasi tanah desa sebanyak 8.405 bidang. Pada tahun 2023 realisasi pendaftaran mengalami kenaikan dari 22.242 bidang menjadi 25.993 bidang tanah terdiri dari pendaftaran tanah SG/PAG sebanyak 13.958 bidang ditambah dengan pendaftaran sertifikasi tanah desa sebanyak 12.035 bidang. Capaian indikator tersebut dari tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-69 Capaian bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan

No	Sasaran/ Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa						
1	Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	Bidang	10.279	12.437	15.335	22.242	25.993

Sumber: DPTR DIY, 2024

Capaian program pemda fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa dari tahun 2018-2023 mengalami peningkatan. Capaian ini diukur melalui indikator persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa. Pada tahun 2022 capaian sebesar 98,12% dari target tahun 2022 sebesar 88,67%. Capaian ini didukung melalui realisasi pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten (bobot 60%) yaitu sebesar 50,05% yang terdiri dari aspek pendaftaran tanah, pemeliharaan dokumen dan pengawasan ditambah realisasi pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten (bobot 40%) sebesar 24,06% yang terdiri dari aspek pendaftaran tanah desa, penetapan peraturan desa dan pengajuan kekancingan. Pada tahun 2023

program pemda terkait urusan pertanahan menjadi program pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan dengan indikator capaian fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa. Capaian fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa pada tahun 2023 sebesar 21,89% dari target di tahun 2023 sebesar 20,94%. Capaian ini diperoleh melalui perhitungan rerata dari persentase pendaftaran sertifikat bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa ditambah dengan persentase kesesuaian pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa. Capaian pendaftaran sertifikat bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa tahun 2023 sebesar 25.993 bidang tanah terdiri dari pendaftaran tanah SG/PAG sebanyak 13.958 bidang ditambah dengan pendaftaran sertifikasi tanah desa sebanyak 12.035 bidang. Sementara itu kesesuaian pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa sampai dengan akhir tahun 2023 dicapai berdasarkan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan yaitu rekomendasi kesesuaian pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah desa sebanyak 2.007 rekomendasi dan kesesuaian pemanfaatan tanah desa sebanyak 165 rekomendasi.

Tabel 2-70 Capaian Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa

No	Program/ Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa						
1	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	%	31,57	46,51	61,25	74,11	98,12

Sumber: DPTR DIY, 2023

Pemenuhan alas hak terkait tanah/sertifikasi juga dilakukan pada tanah dengan status tertentu seperti adanya tanah tutupan, tanah enclave dan tanah yang diperoleh dari proses tukar menukar dengan tanah kas desa. Tanah dengan status tertentu sampai dengan saat ini belum dapat dilakukan legalisasi atau diberikan

alas hak yang mengakibatkan pemanfaatan tanah belum dapat dilakukan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2-71 Inventarisasi Tanah Tutupan di DIY

No	Kabupaten	Kapanewon/ Kalurahan	Bidang	Luas	Keterangan
1	Bantul	Kap. Kretek Kal. Prangtritis	256 bidang	1.080.840 m ²	Terletak di eks Padukuhan Sono dan Grogol
		Kap. Sanden Kal. Gadingharjo	21 bidang	80.207 m ²	Terletak di Padukuhan Karanganyar
2	Kulon Progo	Kap.Kokap Kal. Hargomulyo	1 bidang	104.115 m ²	Terletak di Padukuhan Tapan, Grindang dan Tlogolelo

Sumber : DPTR, 2023

Tabel 2-72 Inventarisasi Tanah Enclave di DIY

No	Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Luas (m ²)
Tanah Enclave Kasunanan				
1	Bantul	Imogiri	Karangtengah, Kebonagung, Girirejo, Karangtalun, Mangunan, Imogiri	21.909.603
		Dlingo	Temuwuh, Jatimulyo, Muntuk, Dlingo, Terong	48.308.074
		Pleret	Segoroyoso, Wonolelo, Bawuran	14.890.068
		Banguntapan	Singosaren, Jagalan	1.007.301
		Total		87.091.776
Tanah Enclave Mangkunegaran				
2	Gunungkidul	Gedang Sari	Tegalrejo	10.086.716
		Ngawen	Beli, Jurangjero, Kampung, Sambirejo, Tancep. Watu Sigar	48.896.943
		Total		58.983.659
Tanah enclave Kasunanan + Tanah enclave Mangkunegaran				94.725.707

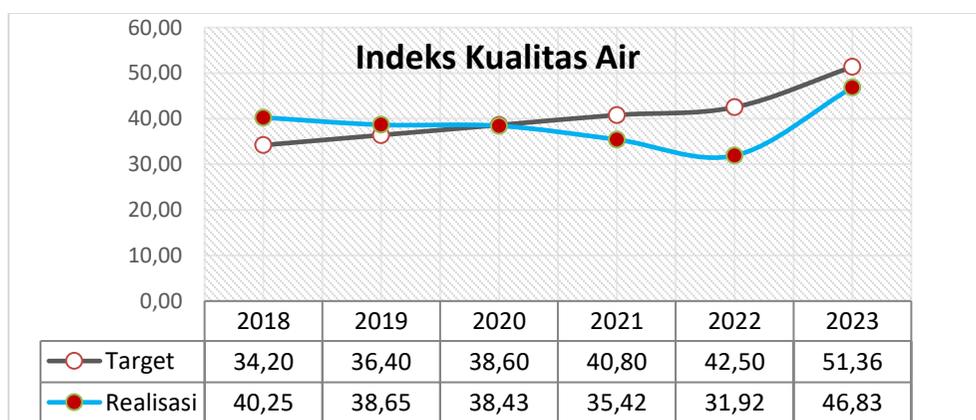
Sumber : DPTR, 2023

2.1.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

1. Kualitas Air Sungai

Air merupakan kebutuhan utama makhluk hidup di bumi. Air yang bersih, sehat dan aman penting untuk kelangsungan hidup manusia yang lebih baik. Kondisi kualitas air direpresentasikan dengan perhitungan nilai indeks kualitas air (IKA). IKA merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air berupa nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKA DIY dihasilkan dari pemantauan kondisi kualitas air sungai yang telah mengalami pencemaran atau belum dan menjadi salah satu upaya didalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan pengendalian pencemaran air sungai.

Sampai dengan tahun 2022, IKA dihasilkan berdasarkan pemantauan terhadap 10 (sepuluh) sungai secara periodik setiap tahun, yaitu pada Bulan Juni, Agustus dan Oktober. Pemantauan dilakukan pada titik – titik pantau dari hulu sampai hilir. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk memotret kondisi kualitas air sungai telah mengalami pencemaran atau belum yang menjadi salah satu langkah dalam upaya penentuan kebijakan program dan kegiatan dalam pengendalian pencemaran air sungai. Sedangkan mulai tahun 2023, terdapat perubahan metode perhitungan indeks dimana IKA merupakan agregasi IKA hasil pemantauan yang dilakukan oleh provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan periode 2018-2023, IKA DIY sebagaimana grafik berikut.



Sumber: DLHK DIY, 2023

Gambar 2-50 Indeks Kualitas Air DIY Tahun 2018-2023

Berdasarkan grafik IKA sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 , tren IKA mengalami penurunan sebesar 8,33 poin dari semula 34,20 di tahun 2018 menjadi 31,92 di tahun 2022 dan naik menjadi 46,83 di tahun 2023. Kondisi IKA sangat dipengaruhi oleh kondisi tingkat pencemaran sungai yang dinilai melalui indeks pencemar. Identifikasi yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi IKA DIY antara lain :

- a. Pembuangan limbah padat dan limbah cair ke sungai baik yang berasal dari rumah tangga maupun peternakan dan UMKM.
- b. Operasional kegiatan industri dan izin pembuangan limbah industri belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar.
- c. Degradasi fungsi lahan pada daerah resapan air akibat adanya penurunan kerapatan vegetasi dan menyebabkan air hujan kurang efektif terserap tanah sehingga berpotensi menurunkan debit air sungai. Berkurangnya debit air sungai mengakibatkan konsentrasi zat pencemar meningkat meskipun volume zat pencemar relatif tetap.
- d. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan pada sektor pertanian masih banyak.
- e. Konversi lahan pertanian, perkebunan dan hutan menjadi daerah permukiman, kawasan perdagangan dan pusat produksi barang atau jasa mengakibatkan peningkatan volume limbah dan sampah yang masuk ke sungai.
- f. Pertambahan beban pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga.

Dalam rangka meningkatkan kualitas air, Pemerintah DIY melaksanakan program kerja dalam mengatasi pencemaran air tanah oleh bakteri koli di daerah perkotaan dengan mengidentifikasi sumber pencemar dan membuat inovasi terkait penanggulangan pencemaran bakteri koli, salah satunya adalah pembuatan IPAL komunal atau sekarang disebut Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD T) - Skala Permukiman.

Selain hal di atas, juga dilakukan program Merti Kali oleh komunitas pecinta sungai maupun oleh pemda yang didukung oleh masyarakat. Namun sayangnya sumber masalah yaitu pengaturan tata kelola air limbah dari sumber pencemar di bagian hulu masih lemah.

2. Kualitas Air Tanah

Pengukuran kualitas air tanah pada tahun 2023 dilakukan oleh Dinas Kesehatan DIY. Kegiatan dilakukan terakhir pada tahun 2022. Pengujian terhadap air tanah dengan sampel air sumur diambil pada pengkajian dilakukan di 5 Kabupaten/Kota. Lokasi-lokasi tersebut telah ditentukan melalui studi awal dan dipastikan dapat mewakili karakteristik air tanah yang terdapat di wilayah DIY. Lokasi sampel pengujian kualitas air tanah ini dipilih dari sumur-sumur warga yang berada dekat dengan sumber pencemar tertentu seperti kawasan industri, sentra kerajinan, TPA, dan rumah sakit.

Salah satu dampak pencemaran air tanah terhadap manusia adalah penyakit diare. Berdasarkan data IKPLHD (2023) tahun 2023 tercatat ada 7.756 penderita penyakit diare di DIY. Berdasarkan urutan 10 penyakit yang paling banyak di DIY, diare menjadi penyakit di urutan keempat sehingga dampak dari pencemaran air tanah serta penurunan kualitas air tanah menjadi hal yang perlu menjadi perhatian.

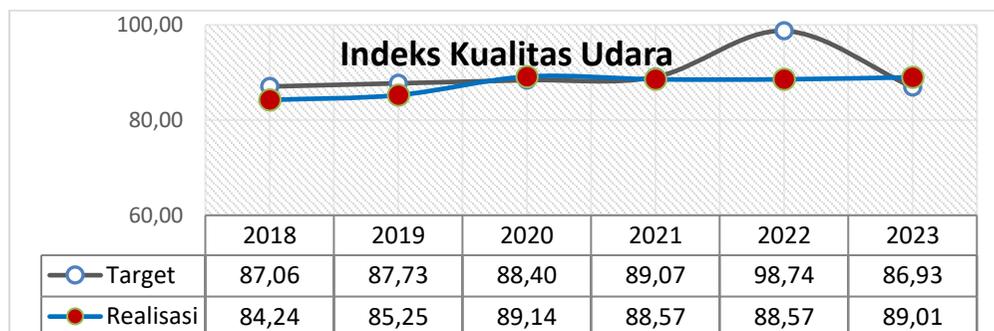
Hal-hal yang mempengaruhi penurunan kualitas air tanah antara lain:

- Perubahan penggunaan lahan yang belum sesuai tata ruang, sehingga resapan air tanah berkurang karena semakin banyaknya lahan terbangun yang menghalangi infiltrasi air bukan ke dalam tanah.
- Pengelolaan jamban terpadu yang belum optimal, khususnya bagi keluarga yang memiliki jarak jamban dengan sumur yang masih di bawah 10 meter. Selain itu beberapa IPAL komunal yang dibangun pemerintah, kurang dalam pemeliharannya, sehingga menjadi jenuh dan justru IPAL komunal ini menjadi sumber pencemaran air yang baru.
- Pertumbuhan kegiatan perdagangan dan jasa di DIY yang masih menggunakan air tanah untuk keperluan operasional sehari-hari tanpa didukung penggunaan teknologi hemat air yang dapat mengurangi penggunaan air tanah secara berlebihan.
- Kebiasaan masyarakat yang kurang sadar terhadap kebersihan lingkungan dengan masih melakukan pembuangan limbah domestik sembarangan.

3. Kualitas Udara

Sebagaimana halnya indeks kualitas air, kualitas udara dinyatakan dalam bentuk nilai indeks kualitas udara (IKU). Pemantauan udara di DIY pada tahun 2021 tidak lagi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melainkan oleh Pemerintah Pusat dengan metode *Manual Passive*. Lokasi pemantauan udara

meliputi perwakilan daerah padat transportasi, industri, permukiman dan perkantoran. Berdasarkan kondisinya, indeks kualitas udara DIY periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana grafik berikut ::



Sumber: DLHK DIY, 2023

Gambar 2-51 Indeks Kualitas Udara DIY Tahun 2018-2023

Berdasarkan grafik IKU sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 , tren IKU mengalami peningkatan sebesar 4,77 poin dari semula 84,06 di tahun 2018 menjadi 89,01 di tahun 2023. Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun di tahun 2022 realisasinya tidak mencapai target akan tetapi di tahun 2023 realisasinya sebesar 89,01 atau sebesar 102,39% dari target sebesar 86,93 yang tercantum didalam RPJMD DIY 2022-2027.

Pemda DIY tetap melakukan upaya seperti pengurangan debu dilakukan dengan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan memperluas jangkauan kendaraan umum bus Trans Jogja. Operasional bus Trans Jogja juga sebagai upaya agar masyarakat menjadikan transportasi umum tersebut menjadi transportasi utama dalam melakukan mobilitas di DIY. Selain itu penertiban terhadap proyek-proyek pembangunan agar memenuhi pelaksanaan pembangunan yang ramah lingkungan. Kegiatan seperti *car free day* setiap minggu juga dilakukan sebagai salah satu upaya mengurangi pencemaran udara di DIY.

4. Kondisi Hutan dan Lahan

Berdasarkan status hutan, luas hutan DIY mencapai 84.921,65 ha yang terdiri atas hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah seluas 19.035,09 ha dan hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (hutan rakyat) dengan luasan mencapai 65.886,56 ha.

Data luasan hutan DIY berdasarkan status dan fungsi hutan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-73 Data Luas Hutan DIY Berdasarkan Status dan Fungsi Hutan

No	Status/Fungsi	Luas (ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Berdasarkan status hutan					
1	Hutan Negara	19.036,42	19.036,42	19.036,42	19.035,09	19.035,09
2	Hutan rakyat	78.400,27	79.262,58	79.262,58	65.886,56	65.886,56
B	Berdasarkan fungsi hutan					
1	Hutan konservasi	3.455,42	3.455,42	3.455,42	3.454,09	3.454,09
2	Hutan lindung	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
3	Hutan produksi	13.421	13.421	13.421	13.421	13.421

Sumber : Dataku Bappeda DIY 2023

Berdasarkan kondisinya, masih terdapat lahan kritis baik diluar maupun didalam kawasan hutan yang memerlukan penanganan. Luas lahan kritis secara nasional ditetapkan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana surat keputusan tentang penetapan lahan kritis nasional terakhir ditetapkan tahun 2018 dengan SK Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional. Berdasarkan surat keputusan tersebut, luas lahan kritis di DIY ditetapkan seluas 79,123,00 ha. Sampai dengan tahun 2023, DIY telah melakukan kegiatan reboisasi dan penghijauan untuk mengurangi luasan lahan kritis melalui rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) baik melalui sumber dana APBD/APBN maupun swasta yang dilakukan oleh DIY periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2-74 Luas Lahan Kritis DIY yang telah dilakukan Rehabilitasi 2018-2023

No	Tahun Pelaksanaan RHL	Luas (ha)	% rehabilitasi lahan kritis
1	2018	311,04	0,39
2	2019	1.099,00	1,39
3	2020	985,42	1,25

No	Tahun Pelaksanaan RHL	Luas (ha)	% rehabilitasi lahan kritis
4	2021	922,22	1,17
5	2022	1.162,50	1,47
6	2023	683,00	0,86

Sumber : DLHK DIY, 2023

Berdasarkan parameter yang digunakan untuk menentukan nilai IKTL, kondisi tutupan lahan sangat berpengaruh terhadap nilai IKTL sebagai komponen nilai IKLH. Kualitas lahan dinilai melalui perhitungan IKTL dimana nilai IKTL menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Untuk menghitung IKTL, diperlukan data luas tutupan lahan (LTL) yang dihitung dari penjumlahan luas sebagai berikut:

1. Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.
2. Semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen),
3. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati,
4. Rehabilitasi hutan dan lahan.

2.1.3.2.6 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Data administrasi kependudukan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial, dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pemanfaatan data kependudukan, serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang hasilnya digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka tertib administrasi kependudukan di DIY adalah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan satu kesatuan dari beberapa kegiatan administrasi kependudukan sebelumnya yaitu Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Implementasi sistem administrasi

kependudukan secara terpadu dimulai dari pembangunan, *updating data* dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing berupa Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan penyelesaian data kependudukan berskala Provinsi dan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Tahun 2023, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kepemilikan KTP di DIY secara lebih luas untuk menyambut kontestasi Pemilu tahun 2024. Salah satunya adalah kegiatan jemput bola perekaman KTP-el yang dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah atas di DIY baik negeri, swasta, maupun kejuruan yang bekerja sama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.

Tabel 2-75 Penduduk DIY Yang Telah Melakukan Perekaman KTP El Tahun 2023 (Orang)

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Wajib KTP Telah Perekaman	Angka Perekaman
2017	3.587.921	2.736.850	2.695.705	98,50%
2018	3.631.015	2.778.157	2.728.559	98,21%
2019	3.656.108	2.801.298	2.781.908	99,31%
2020	3.671.189	2.817.907	2.809.057	99,69%
2021	3.677.446	2.827.301	2.812.568	99,48%
2022	3.693.834	2.841.337	2.833.136	99,71%
2023	3.722.296	2.891.488	2.874.185	99,40%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan - Setda DIY 2024

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tahun 2023 jumlah penduduk wajib memiliki KTP di DIY sebanyak 2.891.488 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 3.722.296 orang. Sementara itu jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.874.185 orang atau dengan kata lain persentase angka perekaman KTP-el sebesar 99,40%. Persentase angka perekaman pada tahun 2023 mengalami penurunan dikarenakan adanya dinamika kependudukan yang fluktuatif.

Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak sebesar 99,21%, bisa diartikan bahwa dari jumlah anak total di DIY (penduduk berusia di bawah 18 tahun) sebesar 882.780 orang, ada sekitar 875.780 anak yang sudah memiliki akta kelahiran

0,79% dari jumlah anak tersebut belum memiliki akta kelahiran. Sedangkan di bidang penerbitan akta kematian, jumlah pembuatan akta kematian pada tahun 2023 sebanyak 37.891 dokumen.

Tabel 2-76 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di DIY Tahun 2017-2023

Tahun	Jumlah Anak	Jumlah Anak Memiliki Akta Kelahiran	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak
2017	954.963	905.692	94,84%
2018	960.762	906.734	94,38%
2019	952.767	900.449	94,51%
2020	956.606	904.743	94,58%
2021	952.330	899.391	94,44%
2022	895.931	880.552	98,28%
2023	882.780	875.780	99,21%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY, 2024

Selanjutnya, tiap anak usia 0-17 tahun kurang satu hari juga diwajibkan untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Di DIY total kepemilikan KIA sejumlah 818.731. Sampai dengan Desember 2023 terdapat 697.070 anak atau 85,14% yang telah memiliki KIA. Hal ini perlu menjadi perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut. Selain itu, dengan memiliki KIA, anak mendapatkan keuntungan berupa insentif maupun potongan harga pada beberapa instansi/lembaga/badan usaha yang bekerja sama dengan Pemda DIY.

Tabel 2-77 Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY Tahun 2017-2023

Tahun	Jumlah KIA	Wajib KIA	Persentase Kepemilikan
2017	136.885	851.071	16,08%
2018	319.279	852.858	37,44%
2019	476.662	854.810	55,76%
2020	563.773	824.684	68,36%
2021	635.866	848.361	74,95%
2022	671.513	848.773	79,12%

Tahun	Jumlah KIA	Wajib KIA	Persentase Kepemilikan
2023	697.070	818.731	85,14%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Total wajib Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY sejumlah 818.731. Sampai dengan akhir 2023, terdapat 697.070 anak atau 85,14% yang telah memiliki KIA dari total 818.731 wajib KIA di DIY. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya. Mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses Pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut.

2.1.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pendekatan pemberdayaan memandang masyarakat sebagai sumber daya manusia yang harus dikembangkan potensinya dan diberikan kontrol terhadap berbagai sumber daya untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan. Dalam pemberdayaan masyarakat, setiap warga turut berperan aktif dalam upaya peningkatan kapasitas yang akan berujung pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Upaya meningkatkan pemberdayaan fokus pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Tabel 2-78 Status Indeks Desa Membangun (IDM) di DIY Tahun 2018-2022

Tahun	Status IDM				
	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
IDM 2018	0	5	175	183	29
IDM 2019	0	0	139	204	49
IDM 2020	0	0	99	226	67
IDM 2021	0	0	72	211	109
IDM 2022	0	0	11	197	184

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022

Kondisi Desa/Kalurahan di DIY jika dilihat dari penilaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui instrumen IDM pada Tahun 2022, seluruh Desa/Kalurahan di DIY tidak ada yang masuk dalam kriteria tertinggal. Namun demikian, masih terdapat 11 Desa/Kalurahan dengan status berkembang dari total 392 Desa/Kalurahan di DIY.

Bentuk partisipasi masyarakat diwujudkan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat baik di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kesejahteraan keluarga, antara lain sebagai berikut.

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kalurahan atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Permasalahan mengenai LPM adalah bagaimana peran LPM sebagai salah satu lembaga sosial yang terdapat di kalurahan dalam proses pembangunan. Seluruh kalurahan/kelurahan di DIY telah membentuk LPM dan di setiap kabupaten/kota dan tingkat provinsi juga telah terbentuk asosiasi LPMD/LPMK.

Tabel 2-79 Jumlah LPMD dan LPMK Menurut Kabupaten/Kota di DIY

No	Kabupaten/ Kota	LPMD	LPMK	Jumlah
1	Kab. Bantul	75	-	75
2	Kota Yogyakarta	-	46	46
3	Kab. Kulon Progo	87	-	87
4	Kab. Gunungkidul	144	-	144
5	Kab. Sleman	86	-	86
	Total	392	46	438

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2023

2. Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM). Penyelenggaraan Posyandu berkonsep demokrasi, dimana pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat. Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini.

Tabel 2-80 Jumlah Posyandu Aktif DIY Tahun 2018-2022

Kabupaten / Kota	2018			2019			2020			2021			2022		
	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi
Kulon Progo	960	776	80,83	960	792	82,50	960	827	86,14	959	698	72,8	959	951	99,17
Bantul	1.141	913	80,01	1.141	913	80,01	1.139	912	80,07	1.016	754	74,2	1.148	1.125	98
Gunungkidul	1.465	1245	84,98	1.468	1.299	88,48	1.469	1.345	91,55	1.470	1.374	93,5	1.470	1.469	99,93
Sleman	1.529	1197	78,28	1.530	1.233	80,58	418	158	37,79	1.534	1.035	67,5	1.535	1.443	94,01
Kota Yogyakarta	623	379	60,83	623	366	58,74	623	393	63,08	623	445	71,4	623	594	95,35
DIY	5.718	4510	78,87	5.722	4.603	80,44	4.609	3.635	78,86	5.602	4.306	76,9	5.735	5.582	97,33

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2023

Jumlah Posyandu yang aktif tercatat meningkat dari 4.306 di tahun 2021, menjadi 5.582 di tahun 2022. Kabupaten Gunungkidul adalah wilayah yang paling berhasil mendorong Posyandu untuk menjalankan perannya secara aktif sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, yang ditunjukkan dengan data bahwa 99,93% posyandu secara aktif memberikan pelayanan kesehatan di tahun 2022.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di desa. BUMDesa dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah kalurahan setempat yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan pemerintahan kalurahan.

Lembaga perekonomian kalurahan seperti UED-SP, Pasar Desa, Badan Kredit Desa yang sudah terbentuk didorong untuk menjadi unit usaha dari BUMDesa. BUMDesa pada dasarnya merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kalurahan melalui pengembangan usaha ekonomi. Data BUMDesa di DIY tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2-81 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2018-2023

No	Kabupaten	Jumlah kalurahan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bantul	75	50	50	68	68	72	75

No	Kabupaten	Jumlah kalurahan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Kulon Progo	87	87	87	87	87	87	87
3	Gunungkidul	144	92	119	133	133	144	144
4	Sleman	86	50	50	55	61	63	72
	Jumlah	392	279	306	343	349	366	378

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

4. Profil Kalurahan dan Kelurahan

Profil kalurahan dan kelurahan bertujuan untuk menjadi penyelenggara pusat data kalurahan dan kelurahan di seluruh Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengguna Profil kalurahan dan kelurahan yang diregistrasi mulai dari tingkat kalurahan/kelurahan sampai dengan tingkat nasional, sehingga dimasa kini dan yang akan datang sistem ini bisa berfungsi sebagai sarana untuk menggali data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai kalurahan dan kelurahan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kalurahan, DIY mendorong setiap kalurahan agar dapat menyusun profil kalurahan yang sesuai standar. Upaya yang dilakukan melalui pelatihan *entry* profil desa, pembentukan Tim Pokja Profil Kalurahan/Kelurahan, serta dijadikannya Profil Kalurahan sebagai syarat utama dalam penilaian lomba kalurahan sehingga semua desa termotivasi untuk menyusun profil yang memenuhi standar.

Tabel 2-82 Jumlah Desa/kelurahan di DIY dan Ketersediaan Profil Desa

No	Kabupaten/Kota	kalurahan/ kelurahan	Kalurahan Yang Telah Mempunyai Profil Kalurahan				%
			2018	2019	2020	2021	
1	Kabupaten Kulon Progo	88	88	88	88	88	100,00
2	Kabupaten Bantul	75	75	75	75	75	100,00
3	Kabupaten Gunungkidul	144	144	144	144	144	100,00
4	Kabupaten Sleman	86	86	86	86	86	100,00
5	Kota Yogyakarta	45	45	45	45	45	100,00
	Jumlah	438	438	438	438	438	100,00

Sumber: DP3AP2 DIY, 2022

5. Partisipasi Keswadayaan Masyarakat

Kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui asas gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Data tentang keswadayaan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2-83 Kegiatan Keswadayaan Masyarakat Tahun 2023

No	Kab/Kota	Sumber Dana				
		Prov	Kab/Kota	APBDes/Kal	Swadaya Masyarakat	Lain-lain
1	Kulon Progo	75.000.000	1.347.680.000	84.483.500	865.775.000	
2	Bantul	225.000.000	1.000.000.000	60.000.000	130.000.000	
3	Gunungkidul	225.000.000	675.000.000		21.930.000	
4	Sleman	225.000.000	600.000.000	35.000.000	75.000.000	
5	Yogyakarta	225.000.000	1.199.848.800			100.000.000
Total	7.369.717.300	1.175.000.000	4.822.528.800	179.483.500	1.092.705.000	100.000.000,00

Sumber: TMMD, 2024

Berdasarkan data tersebut, kegiatan yang sumber dana berasal dari swadaya masyarakat mencapai 14,82%.

2.1.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

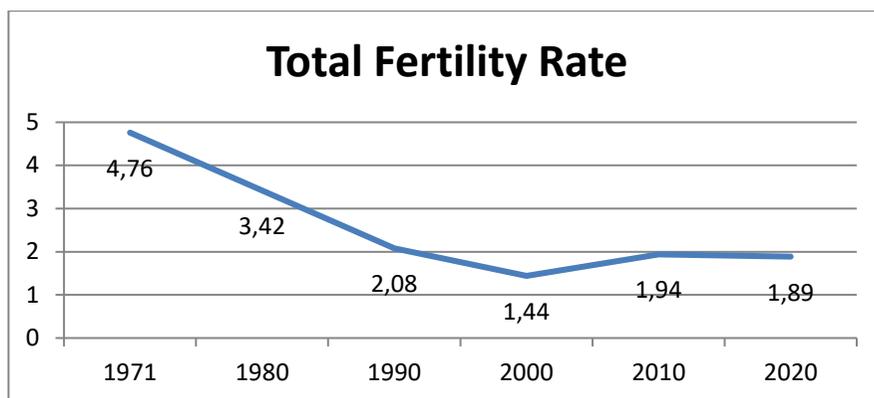
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pembahasan mengenai pengendalian penduduk di DIY perlu memperhatikan beberapa indikator utama yang perlu ditinjau dalam rangka memastikan penduduk tumbuh seimbang, yaitu Angka Fertilitas dan Angka Ketergantungan Penduduk. Sementara itu, pembahasan mengenai keluarga berencana perlu meliputi beberapa pencapaian utama dan isu strategis dalam pembangunan bidang ini, yakni Penggunaan Kontrasepsi Modern, Median Usia Kawin Pertama Perempuan, dan Unmet Need.

1. Angka Fertilitas atau *Total Fertility Rate (TFR)*

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Hasil Sensus Penduduk dan *Long Form* Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa TFR DIY menurun secara konsisten sejak tahun 1971 hingga tahun 2020 yaitu dari TFR 4,76 di tahun 1971

menjadi TFR 1,89 di tahun 2020. Kondisi seperti ini merupakan salah satu tanda bahwa pembangunan kependudukan di DIY sudah sejak lama memperhatikan pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk serta mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS).



Sumber : Sensus Penduduk (SP) dan Long Form SP2020, BPS

Gambar 2-52 Perkembangan TFR di DIY

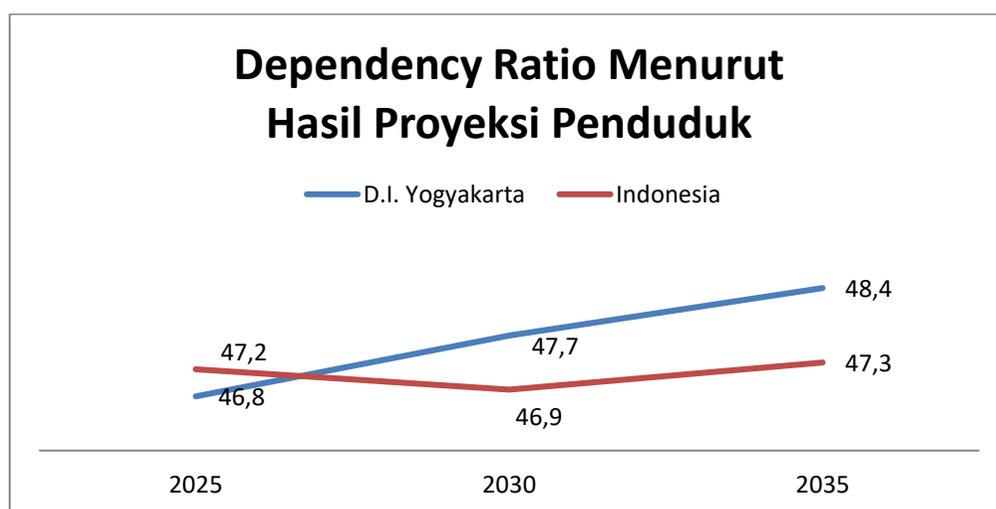
Selanjutnya, setelah tahun 2020 angka TFR DIY terdata stabil di angka 1,81-1,93. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terakhir yakni tahun 2023 menunjukkan bahwa nilai TFR DIY ada pada angka 1,81 atau lebih rendah 0,12 poin dari tahun sebelumnya.

Kondisi TFR yang sudah di bawah poin 2,1 dan terus turunnya angka fertilitas ini berimplikasi pada komposisi penduduk DIY. Berdasarkan data proyeksi penduduk periode 2010-2035, penduduk yang belum produktif di DIY semakin menurun jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jumlahnya tercatat sekitar 22,1% dari total keseluruhan penduduk dan diproyeksikan mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 18,6% pada tahun 2035. Sementara itu, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang pada 2010 tercatat sekitar 68,6% akan menurun perlahan pada kisaran 67,4 di tahun 2035 mendatang. Penurunan proporsi usia penduduk ini akan berdampak peningkatan *Dependency Ratio* (beban ketergantungan) di tahun-tahun mendatang.

2. Angka Ketergantungan Penduduk atau *Dependency Ratio*

Angka Ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif dengan banyaknya penduduk usia produktif. Saat ini, DIY merupakan provinsi di Indonesia yang paling tinggi nilai

ketergantungannya. Berdasarkan data BPS Provinsi DIY, nilai *Dependency Ratio* DIY tahun 2022 adalah 44,42%. Angka ini turun dari capaian tahun 2021 yang ada pada angka 45,52 dan capaian tahun 2020 yang ada pada angka 45,40. Namun, hasil Proyeksi Penduduk memperlihatkan bahwa *Dependency Ratio* DIY diperkirakan akan merambat naik di angka 46,8 pada tahun 2025 hingga menyentuh angka 48,4 di tahun 2035. Pada angka tersebut, diestimasikan *Dependency Ratio* DIY lebih tinggi dari rata-rata nasional mulai tahun 2030 sampai tahun 2035.



Sumber : BPS, 2023

Gambar 2-53 *Dependency Ratio* Menurut Hasil Proyeksi Penduduk

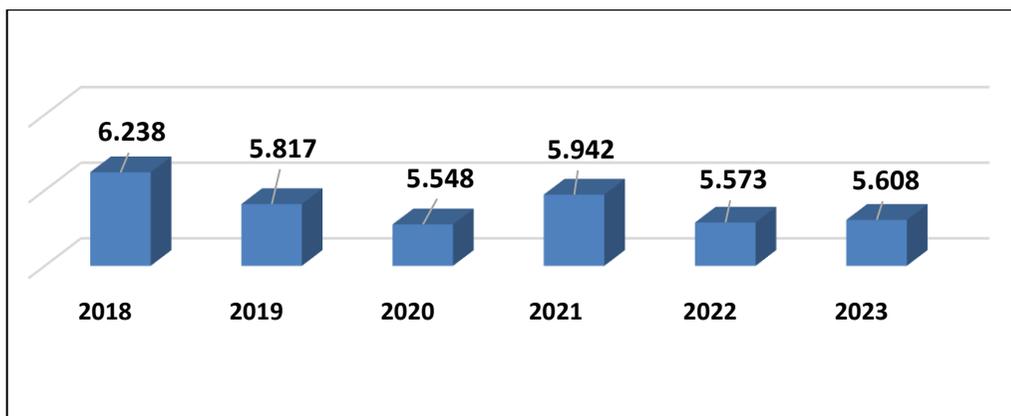
Semakin tinggi *Dependency Ratio* maka semakin besar kondisi kependudukan akan menghambat pembangunan karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari golongan produktif harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang belum dan sudah tidak produktif. Tanggungan penduduk yang tinggi akan mempersulit mobilisasi dana masyarakat dan anggaran pemerintah untuk investasi lebih produktif. *Dependency Ratio* yang tinggi juga akan membawa tantangan pada penyediaan bahan makanan dan bahan baku lainnya yang berpotensi menurunkan Usia Harapan Hidup penduduk.

3. Perceraian

Angka perceraian di DIY tercatat mengalami penurunan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Namun pada tahun 2021, angka perceraian di DIY meningkat cukup tajam yakni penambahan sebanyak 394 kasus dan kemudian kembali menurun 2-178

pada tahun 2022 meskipun ada sedikit peningkatan kembali pada tahun 2023. Data mengenai angka perceraian di DIY sejak tahun 2018 hingga 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2-84 Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-54 Dependency Ratio Menurut Hasil Proyeksi Penduduk

Berdasarkan sumber permohonan, perceraian dibagi dalam kategori permohonan suami serta gugatan istri. Data menunjukkan bahwa angka perceraian dari gugatan istri jauh lebih tinggi atau meningkat dari 3.768 kasus di tahun 2022 menjadi 4.301 di tahun 2023. Sementara peningkatan angka perceraian dari kategori permohonan suami dari 1.233 kasus di tahun 2022 bertambah menjadi 1.337 kasus di tahun 2023.

Tabel 2-85 Jumlah Kasus Perceraian yang Diputus di PA menurut Sumber Permohonan dan Wilayah PA di DIY Tahun 2022 dan 2023

No	Wilayah PA	2022			2023		
		Jumlah Kasus	Sumber Permohonan		Jumlah Kasus	Sumber Permohonan	
			Permohonan Suami	Gugatan Istri		Permohonan Suami	Gugatan Istri
1	PA Wates	514	122	392	1.327	337	990
2	PA Bantul	998	228	770	548	127	421
3	PA Wonosari	1.292	343	949	1.475	352	1123
4	PA Sleman	1.596	395	1.201	1.625	394	1231

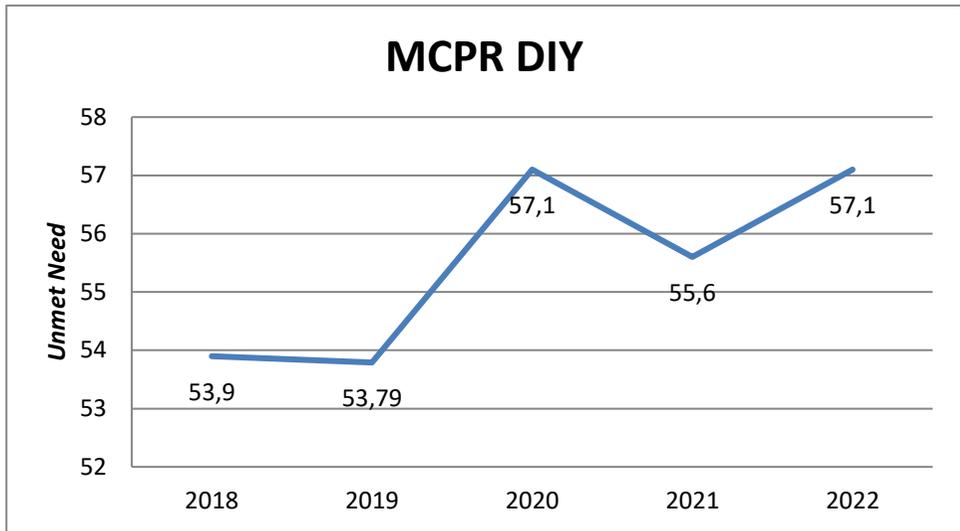
No	Wilayah PA	2022			2023		
		Jumlah Kasus	Sumber Permohonan		Jumlah Kasus	Sumber Permohonan	
			Permohonan Suami	Gugatan Istri		Permohonan Suami	Gugatan Istri
5	PA Yogyakarta	601	145	456	663	127	506
	Jumlah	5.573	1.233	3.768	5.638	1.337	4.301

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

4. Modern Contraceptive Prevalence Rate

Berdasarkan proyeksi penduduk periode 2010-2035 yang disusun BPS, jumlah penduduk DIY pada tahun 2010 tercatat sebesar 3,467 juta jiwa dan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya sehingga tahun 2035 diperkirakan jumlah penduduk DIY akan mencapai 4,348 juta jiwa. Jumlah ini cukup besar terlebih dengan mengingat bahwa luas wilayah DIY hanya sekitar 0,16% dari luas wilayah Indonesia secara keseluruhan. Kepadatan penduduk diperkirakan akan mencapai 1.365 jiwa per Km² atau meningkat 26% dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2010. Melihat tingkat kepadatan penduduk tersebut, sudah sepatutnya Pemda DIY mengencangkan berbagai upaya yang dapat menekan Laju Pertumbuhan Penduduk secara efektif. Salah satunya adalah dengan mengencangkan penggunaan alat kontrasepsi modern.

Istilah kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Dengan demikian kontrasepsi adalah pencegahan terjadinya konsepsi yang merupakan sebuah proses pertemuan sel telur dengan sperma sehingga terjadi kehamilan. Berdasarkan caranya, kontrasepsi dibagi menjadi dua, yaitu kontrasepsi sederhana dan kontrasepsi modern. Kontrasepsi sederhana terdiri dari kontrasepsi tanpa alat dan dengan alat/obat sederhana. Sedangkan kontrasepsi modern terdiri atas kontrasepsi hormonal, IUD, dan kontrasepsi mantap dengan tubektomi dan vasektomi.



Sumber: BKKBN Perwakilan DIY, 2024

Gambar 2-55 Modern Contraceptive Prevalence Rate DIY Tahun 2018-2022

Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR) adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan persentase dari populasi reproduktif yang menggunakan metode kontrasepsi modern pada suatu titik waktu tertentu. Penentuan MCPR penting untuk memahami seberapa efektif program kontrasepsi dalam mencapai tujuan kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk. Berdasarkan data di atas, masih terjadi fluktuasi pada kepesertaan kontrasepsi modern oleh masyarakat DIY. Angka terendah ada pada tahun 2019 yakni pada poin 53,79, dan kondisi terbaik ada pada tahun 2020 dan 2022 yaitu pada angka 57,1. Salah satu faktor yang menghambat peningkatan MCPR di DIY adalah karena sebagian masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi saat ini lebih memilih untuk ber-KB dengan cara tradisional dengan pertimbangan untuk menghindari efek negatif dari obat atau alat KB terhadap tubuh.

Namun, penggunaan kontrasepsi modern memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencegah kehamilan jika dibandingkan kontrasepsi sederhana. Oleh karena itu, menggalakan penggunaan kontrasepsi modern menjadi penting bagi pemerintah sebagai upaya mencegah kondisi melambungnya angka kehamilan yang tidak diinginkan di masyarakat dan menjaga *Total Fertility Rate* ada pada angka ideal 2,1 sebagai upaya menjaga penduduk tumbuh seimbang.

5. **Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan Usia 25-49 Tahun**

Usia kawin pertama (UKP) adalah usia pada saat seorang perempuan menikah pertama kali atau pada saat perempuan memulai kehidupan dengan pasangan yang pertama. Semakin muda usia kawin pertama yang dilakukan seseorang, maka akan mempengaruhi tingkat fertilitas dan fekunditas (potensi fisik untuk melahirkan anak). Semakin muda usia kawin pertama berarti masa reproduksi yang dimiliki oleh seorang perempuan akan lebih panjang dibandingkan perempuan yang kawin di atas usia 20 tahun dan memberikan peluang lebih besar bagi wanita untuk memiliki anak lebih banyak. Dalam persoalan makro, hal ini akan menyebabkan meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk suatu daerah.

BKKBN menetapkan usia perkawinan yang ideal adalah usia minimal 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki, karena diusia tersebut baik wanita dan laki-laki sama-sama sudah memiliki tingkat kematangan yang cukup dalam hal kesehatan reproduksi dan emosional. Dalam masa reproduksi, usia di bawah 21 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Hal ini dikarenakan dalam usia 20 tahun atau kurang seorang remaja masih dalam proses tumbuh kembang dan rentan terhadap berbagai resiko kesehatan yang mungkin terjadi selama proses kehamilan dan kelahiran.

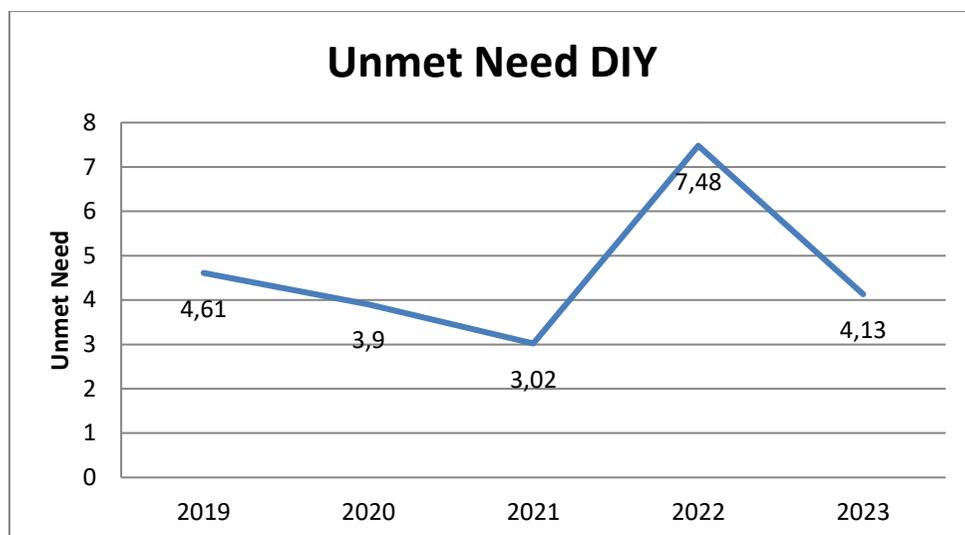
Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023 (PPK-23) menunjukkan bahwa MUKP Perempuan di Indonesia adalah 22,3 tahun. Sementara, MUKP di DIY satu tahun lebih tinggi yaitu berada pada angka 23,50 tahun.

6. ***Unmet Need***

Salah satu masalah dalam pengelolaan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia adalah masih tingginya angka *Unmet Need* KB. *Unmet need* ialah suatu kondisi ketika perempuan usia subur (PUS) membutuhkan program KB, namun tidak dapat melaksanakan KB karena beberapa alasan, mulai dari alasan kesehatan, ketidakcocokan, hingga tidak didukung oleh suami dan keluarga. Angka *Unmet Need* memberikan gambaran seberapa baik sistem kesehatan dan kondisi sosial suatu daerah mendukung kemampuan perempuan untuk mewujudkan pilihan mereka untuk menunda atau membatasi kelahiran. *Unmet Need* ini merupakan ukuran yang bersifat inverse, dimana semakin rendah angka *Unmet Need* maka semakin baik kondisinya.

Pada tahun 2024 ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan kembali berupaya menekan angka *Unmet Need* mengingat secara

nasional masih banyak akseptor yang selayaknya mendapatkan layanan KB selama pandemi Covid-19 belum terlayani hingga akhir 2023.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2-56 *Unmet Need* DIY Tahun 2019-2023

Berdasarkan data di atas, kebutuhan ber-KB masyarakat DIY selama awal dan pertengahan pandemi Covid-19 cenderung masih dapat terpenuhi dengan baik. Namun pada akhir masa pandemi yaitu tahun 2022, *Unmet Need* DIY mengalami peningkatan yang signifikan sehingga mencapai angka 7,48. Meskipun demikian, angka ini masih berada di bawah angka *Unmet Need* Indonesia yang berada pada poin 14,7.

Unmet need menjadi tantangan bagi program keluarga berencana (KB) karena ketika kondisi ini terjadi, perempuan usia subur kemudian cenderung menggunakan cara-cara pencegahan kehamilan yang sifatnya alami dan harus dilakukan berulang kali. Karena banyaknya factor yang mempengaruhi pelaksanaan kontrasepsi alami, terdapat potensi perempuan tersebut berhenti berKB. Dengan demikian, kejadian *Unmet Need* menyebabkan munculnya kehamilan yang tidak diinginkan yang pada gilirannya berimplikasi pada kondisi kesehatan bayi, serta meningkatkan *Total Fertility Rate* yang pada gilirannya akan berefek pada *Dependency Rate* (beban ketergantungan).

Tabel 2-86 Perkembangan *Unmet Need* KB di DIY Menurut Kabupaten Kota Tahun 2019-2023

No	Kabupaten /Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kulon Progo	10,25	8,23	8,89	12,90	11,81
2	Bantul	10,55	9,99	9,20	17,20	15,33
3	Gunungkidul	9,48	8,82	8,87	13,90	12,32
4	Sleman	9,04	7,95	7,13	19,10	17,50
5	Yogyakarta	14,15	12,10	12,05	20,50	17,01

Sumber : *Dataku Bappeda DIY, 2024*

2.1.3.2.9 Urusan Perhubungan

Sektor perhubungan berperan dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan atau barang baik dalam suatu wilayah maupun antar wilayah. Pergerakan mobilitas tersebut harus dapat diwujudkan dalam suatu penyelenggaraan layanan transportasi yang aman, nyaman, mudah, murah, selamat dan berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022 – 2027, guna mendukung Visi Gubernur DIY Tahun 2022 – 2027 yakni Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kelurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Dinas Perhubungan DIY telah menetapkan tujuan organisasi perangkat daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan DIY Tahun 2022 – 2027 yakni Terwujudnya Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY. Guna mewujudkan tujuan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan DIY tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran perangkat daerah yang akan dicapai pada tahun 2022 hingga tahun 2027. Sasaran Dinas Perhubungan DIY yang berkaitan langsung dengan Urusan Perhubungan meliputi:

1. Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum, dengan Indikator Sasaran adalah Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum;

2. Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan, dengan Indikator Sasaran adalah Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan;

Kedua indikator sasaran tersebut mencerminkan hal-hal besar yang menjadi fokus utama dalam penataan transportasi di wilayah DIY, yakni Peningkatan Pelayanan Angkutan, Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Peningkatan Keselamatan Transportasi, Perwujudan Kawasan Rendah Emisi Kendaraan Bermotor, Penggunaan Angkutan Ramah Lingkungan serta Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi dan Perparkiran.

Dalam konteks pembangunan di wilayah DIY, mobilitas berkelanjutan direncanakan tidak hanya sekedar mendukung pembangunan di DIY tetapi harus mampu menjadi bagian dari arah pembangunan di DIY, yang mengedepankan sektor wisata, pendidikan dan budaya. Artinya transportasi harus menjadi bagian dari pendidikan, wisata dan budaya yang berkelanjutan.

Guna mewujudkan mobilitas berkelanjutan tidak dapat terlepas dari bagaimana pola perjalanan yang meliputi bangkitan dan tarikan perjalanan dapat terporet secara holistik. Pola perjalanan ini menjadi dasar dalam menentukan bagaimana supply dan demand transportasi dapat dipenuhi secara optimal. Baik pola perjalanan yang berbasis orang maupun barang.

Tabel 2-87 Jumlah Bangkitan dan Tarikan Perjalanan di DIY

Rank	Kecamatan	Bangkitan (perjalanan/hari)	Tarikan (perjalanan/hari)
Kabupaten Kulon Progo			
1	Wates	33.961	49.676
2	Sentolo	37.562	30.779
3	Pengasih	33.620	29.157
4	Lendah	32.960	26.222
5	Panjatan	25.815	21.408
Kabupaten Bantul			
1	Kasih	68.628	54.245

Rank	Kecamatan	Bangkitan (perjalanan/hari)	Tarikan (perjalanan/hari)
2	Banguntapan	68.121	51.843
3	Sewon	57.835	52.628
4	Bantul	39.131	60.472
5	Imogiri	37.676	30.763
Kabupaten Gunungkidul			
1	Wonosari	53.440	64.766
2	Playen	40.816	35.718
3	Ponjong	32.615	28.381
4	Semanu	32.092	27.382
5	Karangmojo	30.780	27.430
Kabupaten Sleman			
1	Depok	114.371	168.411
2	Mlati	77.381	78.533
3	Ngaglik	76.346	70.734
4	Gamping	76.057	63.162
5	Sleman	55.035	68.497
Kota Yogyakarta			
1	Umbulharjo	48.808	76.739
2	Gondokusuman	28.668	52.851
3	Jetis	17.677	40.186
4	Mergangsan	22.157	31.110
5	Mantriaron	26.155	25.455

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui jumlah pergerakan terbesar berada di Kabupaten Sleman dengan zona berasal dari Kapanewon Depok, Kapanewon Mlati, Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Gamping dan Kapanewon Sleman dan diikuti oleh Kota Yogyakarta.

2-186

Konektivitas antara daerah yang satu dengan daerah lain adalah adanya berbagai jaringan antara daerah yang memungkinkan bagi pemindahan barang dan jasa atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan aksesibilitas terdiri dari prasarana (sistem jaringan jalan) yang ada beserta ketersediaan sarana untuk melakukan pergerakannya (angkutan pribadi maupun angkutan umum).

Penyediaan prasarana/simpul transportasi di DIY terutama di wilayah perkotaan Yogyakarta meliputi Terminal, *Park and Ride*, Stasiun Kereta Api, dan Bandar Udara.

a. Terminal

Di DIY terdapat 2 (dua) titik Terminal Tipe B, yaitu: Terminal Jombor yang berlokasi di Kabupaten Sleman, dan Terminal Wates yang berlokasi di Wates, Kulon Progo.

b. *Park and Ride*

Sistem *Park and Ride* di DIY sebenarnya sudah diakomodasi di dalam titik-titik simpul *eksisting*, seperti di Bandara, Stasiun KA, dan Terminal Bus (khususnya di Terminal Tipe A, B dan sebagian Tipe C, karena sesuai dengan regulasi yang ada maka setiap titik-titik simpul tersebut harus menyediakan lahan parkir. Namun perlu dicatat bahwa wilayah DIY hanya memiliki 2 (dua) terminal Tipe A (yaitu Terminal Giwangan dan Terminal Dhaksinarga) dan 2 (dua) terminal Tipe B (yaitu Terminal Jombor dan Terminal Wates). Selain itu adalah terminal Tipe C yang berada di tiap-tiap Kabupaten.

Secara titik lokasi di dalam wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta atau Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) lokasi-lokasi *Park and Ride* sebenarnya telah terimplementasi dalam bentuk simpul-simpul terminal bus, seperti Terminal Giwangan (di sisi selatan), Terminal Jombor dan Terminal Condongcatur (di sisi utara, Tipe C di Kabupaten Sleman), Terminal Prambanan (di sisi timur, Tipe C di Kabupaten Sleman), dan pada TKP (Tempat Khusus Parkir) Ngabean milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang berada dekat dengan pusat kota. Dari sisi pelayanan angkutan perkotaan, masyarakat pada titik-titik simpul tersebut juga telah dilayani dengan angkutan Bus Trans Jogja sejak tahun 2008. Selain *Park and Ride* yang berlokasi pada terminal di Kota maupun Kabupaten di DIY, Pemerintah Daerah DIY sejak tahun 2008 telah menyediakan 4 (empat) fasilitas *Park and Ride* yang melayani angkutan umum perkotaan Trans Jogja, yaitu:

1. *Park and Ride* Prambanan
2. *Park and Ride* Bandara Adi Sucipto

3. *Park and Ride* Dongkelan
 4. *Park and Ride* Gamping
- c. Tempat Khusus Parkir (TKP)
Pemerintah Daerah DIY hingga tahun 2023 telah menyediakan 3 (tiga) tempat khusus parkir yaitu:
1. Tempat khusus parkir Abu Bakar Ali (saat ini dikelola oleh pihak swasta);
 2. Tempat khusus parkir Ketandan; dan
 3. Tempat khusus parkir Beskalan.
- d. Bandara
DIY memiliki 2 Bandara yaitu Bandar Udara Internasional Adisutjipto dan Bandar Udara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA) merupakan bandar udara baru di Yogyakarta yang menggantikan Bandar Udara Internasional Adisutjipto Per tanggal 29 Maret 2020. Terdapat beberapa antarmoda pendukung pada Bandar Udara International Yogyakarta, yaitu Damri, Satelqu, dan Kereta Api Bandara YIA.
- e. Stasiun Kereta Api
Terdapat 3 stasiun yang melayani perjalanan melalui moda berbasis rel di DIY yaitu Stasiun Yogyakarta (YK) yang dikenal sebagai Stasiun Tugu merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe A, Stasiun Lempuyangan (LPN) yang merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe B dan Stasiun Maguwo (MGW) yang merupakan stasiun kereta api bandara kelas II. Stasiun Sedayu sebagai terminal bongkar muat dan pergudangan, Stasiun Rewulu sebagai terminal khusus bahan bakar minyak, dan Balai Yasa Pengok sebagai bengkel kereta api.

Kinerja Urusan Perhubungan sampai dengan Tahun 2023

- A. Kinerja Lalu Lintas (V/C) Ratio di Jalan Provinsi
Degree of Saturation (DS) atau biasa disebut derajat kejenuhan merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja lalu lintas yang sangat penting dikaji untuk mengetahui kemampuan dari suatu ruas dalam melayani arus lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan tersebut. Nilai *Degree of Saturation (DS)* atau derajat kejenuhan diperoleh dari hasil volume lalu lintas dibagi dengan kapasitas jalan atau disebut dengan (V/C) Ratio. Nilai derajat kejenuhan atau (V/C) Ratio maksimum yang masih diperbolehkan ialah $DS \leq 0,75$ yang diartikan ruas jalan tersebut masih dapat melayani kendaraan yang lewat dengan baik, sedangkan apabila lebih dari itu maka jalan

tersebut sudah tidak mampu melayani kendaraan yang lewat dan memerlukan alternatif penanganan. Nilai derajat kejenuhan pada ruas-ruas jalan provinsi di DIY disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2-88 Tabel Derajat Kejenuhan di Ruas Jalan Provinsi Tahun 2022 dan 2023

No,	Ruas Jalan	Panjang Ruas (meter)	V/C Ratio			perubahan	Ruas Jalan	Panjang Ruas (meter)	V/C Ratio		
	Keputusan Gubernur DIY Nomor, 118/KEP/2016		2022				Keputusan Gubernur DIY Nomor, 41/KEP/2023		2023		
			V	C	V/C Rasio				V	C	V/C Rasio
A	KABUPATEN BANTUL	162,150					152,685				
1	Yogyakarta Bakulan (Parangtritis) depan ISI	8,350	1519	2555	0,59	sama	Yogyakarta Bakulan (Parangtritis) depan ISI	8,350	1519	2555	0.59
2	Yogyakarta - Barongan (Pasar Jejeran)	9,800	1728	2414	0,72	sama	Yogyakarta - Barongan (Pasar Jejeran)	9,800	1728	2414	0.72
3	Barongan - Bibal	9,800	1115	1882	0,59	sama	Barongan - Bibal	9,800	1115	1882	0.59
4	Sedayu - Pandak	15,200	1133	2914	0,39	sama	Sedayu - Pandak	15,200	1133	2914	0.39
5	Bantul - Srandakan	8,950	2019	2771	0,73	berubah	Palbapang - Srandakan	10,400	2019	2771	0,73
6	Palbapang - Samas	12,650	1652	2946	0,56	sama	Palbapang - Samas	12,000	1652	2946	0.56
7	Palbapang - Simpang Kweden	2,650	866	2229	0,39	sama	Palbapang - Simpan	2,650	866	2229	0.39

No,	Ruas Jalan		V/C Ratio			perubahan	Ruas Jalan	Panjang Ruas (meter)	V/C Ratio		
	Keputusan Gubernur DIY Nomor, 118/KEP/2016	Panjang Ruas (meter)	2022						2023		
			V	C	V/C Rasio				V	C	V/C Rasio
							g Kweden				
8	Bakulan - Barongan	3,175	1050	2453	0,43	sama	Bakulan - Barongan	3,175	1050	2453	0.43
9	Dawung - Makam Imogiri	1,600	1069	2207	0,48	sama	Dawung - Makam Imogiri	1,600	1069	2207	0.48
10	Sampakan Singosaren (Timur Sp, Kids Fun)	15,000	1138	1910	0,6	sama	Sampakan - Singosaren (Timur Sp, Kids Fun)	15,000	1138	1910	0.6
11	Imogiri - Dodokan	15,000	1349	2646	0,51	sama	Imogiri - Dodokan	15,000	1349	2646	0.51
12	Patuk - terong	6,000	375	2914	0,13	sama	Patuk - terong	6,000	375	2914	0.13
13	Terong - Dlingo	6,400	1132	1826	0,62	sama	Terong - Dlingo	6,400	1132	1826	0.62
14	Siluk - Kretek	10,500	283	3007	0,09	sama	Siluk - Kretek	10,500	283	3007	0.09
15	Srandakan - Poncosari - Pandansimo	6,500	1246	2652	0,47	sama	Srandakan - Poncosari - Pandansimo	6,500	1246	2652	0.47
16	Poncosari - Kretek	12,350	427	1946	0,22	sama	Poncosari - Kretek	12,880	427	1946	0.22
17	Pandansimo Samas	5,800	61	3819	0,02	Jalan Nasional					
18	Samas Parangtritis	5,600	-	-	-	Jalan Nasional					

No,	Ruas Jalan		V/C Ratio			perubahan	Ruas Jalan	Panjang Ruas (meter)	V/C Ratio		
	Keputusan Gubernur DIY Nomor, 118/KEP/2016	Panjang Ruas (meter)	2022						2023		
			V	C	V/C Rasio				V	C	V/C Rasio
19	Parangtritis - Batas Bantul 1	4,125	-	-	-	Jalan Nasional					
20	Parangtritis - Batas Bantul 2	1,500	213	2857	0,07	Jalan Nasional					
21	Gedongkuning - Wonocatur	1,200	1735	2365	0,73	sama	Gedongkuning - Wonocatur	1,200	1735	2365	0.73
22						baru	Ngablak - Bawuran	1,030	-	-	-
23						baru	Yogyakarta - Dongkelan	200	-	-	-
24						baru	Bantul - Pandak	5,000	-	-	-
B,	KABUPATEN KULON PROGO	174,840						154,440			
1	Milir - Dayakan	3,600	1085	2089	0,52	sama	Milir - Dayakan	3,600	1085	2089	0.52
2	Dayakan - Pengasih	860	1367	2120	0,64	sama	Dayakan - Pengasih	860	1367	2120	0.64
3	Sentolo - Pengasih	6,700	515	2480	0,21	sama	Sentolo - Pengasih	8,210	515	2480	0.21
4	Pengasih - Sermo	5,600	396	2184	0,18	sama	Pengasih - Sermo	5,600	396	2184	0.18
5	Sermo - Klepu	2,270	442	1927	0,23	sama	Sermo - Klepu	2,270	442	1927	0.23
6	Kebonagung 1 - Nanggulan	800	1288	2519	0,51	sama	Kebonagung 1 -	800	1288	2519	0.51

No,	Ruas Jalan	Panjang Ruas (meter)	V/C Ratio			perubahan	Ruas Jalan	Panjang Ruas (meter)	V/C Ratio		
	Keputusan Gubernur DIY Nomor, 118/KEP/2016		2022				Keputusan Gubernur DIY Nomor, 41/KEP/2023		2023		
			V	C	V/C Rasio				V	C	V/C Rasio
7	Nanggulan - Tegalsari	11,750	1090	2439	0,45	sama	Nanggulan - Tegalsari	11,750	1090	2439	0,45
8	Tegalsari - Klepu	19,950	170	2458	0,07	sama	Tegalsari - Klepu	19,950	170	2458	0,07
9	Klepu - Siluwok	8,160	493	2977	0,17	sama	Klepu - Siluwok	8,160	493	2977	0,17
10	Kebonagung 2 - Dekso	1,000	1389	2625	0,53	sama	Kebonagung 2 - Dekso	850	1389	2625	0,53
11	Dekso - Samigaluh - Pagerharjo	17,100	1151	2139	0,54	sama	Dekso - Samigaluh - Pagerharjo	17,690	1151	2139	0,54
12	Sentolo - Nanggulan	9,750	1476	2977	0,5	sama	Sentolo - Nanggulan	9,750	1476	2977	0,5
13	Nanggulan - Dekso	5,370	1311	3069	0,43	sama	Nanggulan - Dekso	5,370	1311	3069	0,43
14	Dekso - Klanganon	11,380	1271	2793	0,46	sama	Dekso - Klanganon	11,380	1271	2793	0,46
15	Sentolo - Brosot	16,850	1178	2075	0,57	sama	Sentolo - Brosot	16,850	1178	2075	0,57
16	Brosot - Toyan	13,500	880	1404	0,63	sama	Brosot - Toyan	15,000	880	1404	0,63
17	Karangnongko - Nagung	3,450	933	2456	0,38	sama	Karangnongko - Nagung	3,450	933	2456	0,38
18	Nagung - Cicikan	4,800	790	1291	0,61	sama	Nagung - Cicikan	4,800	790	1291	0,61
19	Demren - Glagah	2,650	356	2118	0,17	sama	Demren - Glagah	2,650	356	2118	0,17

No,	Ruas Jalan		V/C Ratio			perubahan	Ruas Jalan	Panjang Ruas (meter)	V/C Ratio		
	Keputusan Gubernur DIY Nomor, 118/KEP/2016	Panjang Ruas (meter)	2022						2023		
			V	C	V/C Rasio				V	C	V/C Rasio
20	Cogot - Ngrengang	19,350	618	3100	0,2	sama	Cogot - Ngrengang	4,850	618	3100	0.2
21	Ngeremang - Pandansimo	4,500	123	3067	0,04	Jalan Nasional					
22	Ngrengang - Brosot	4,850	703	2877	0,24	Jalan Nasional					
23	Sindutan - Cogot	600	1164	3069	0,38	sama	Sindutan - Cogot	600	1164	3069	0.38
C,	KAB, GUNUNGKIDUL	306,840					KAB, GUNUNGKIDUL	244,905			
1	Gading - Playen	2,950	1013	2564	0,4	sama	Gading - Playen	2,830	1013	2564	0.4
2	Playen - Gledag	3,990	1550	2654	0,58	sama	Playen - Gledag	3,990	1550	2654	0.58
3	Playen - Paliyan	8,920	1223	2652	0,46	sama	Playen - Paliyan	8,920	1223	2652	0.46
4	Paliyan - Saptosari	5,300	538	2821	0,19	sama	Paliyan - Saptosari	5,300	538	2821	0.19
5	Legundi - Panggang	3,000	634	1826	0,35	sama	Legundi - Panggang	3,000	634	1826	0.35
6	Bibal - Panggang	5,800	1535	1826	0,84	sama	Bibal - Panggang	5,800	1535	1826	0.84
7	Panggang - Girijati	11,325	459	2490	0,18	sama	Panggang - Girijati	11,325	459	2490	0.18
8	Dodogan - Playen	7,350	627	2387	0,26	sama	Dodogan - Playen	7,510	627	2387	0.26
9	Wonosari - Mulo	5,900	860	2204	0,39	sama	Wonosari - Mulo	5,900	860	2204	0.39
10	Mulo - Tepus	15,520	991	1849	0,54	sama	Mulo - Tepus	15,520	991	1849	0.54
11	Mulo - Baron	14,290	1150	1950	0,59	sama	Mulo - Baron	14,290	1150	1950	0.59
12	Wonosari - Karangmojo	7,000	1066	1936	0,55	sama	Wonosari - Karangmojo	7,000	1066	1936	0.55

No,	Ruas Jalan	Panjang Ruas (meter)	V/C Ratio			perubahan	Ruas Jalan	Panjang Ruas (meter)	V/C Ratio			
	Keputusan Gubernur DIY Nomor, 118/KEP/2016		2022				2023		Keputusan Gubernur DIY Nomor, 41/KEP/2023	V	C	V/C Rasio
			V	C	V/C Rasio							
13	Karangmojo - Semin	14,030	1008	2274	0,44	sama	Karangmojo - Semin	14,030	1008	2274	0,44	
14	Karangmojo - Ponjong	5,000	519	1246	0,42	sama	Karangmojo - Ponjong	5,000	519	1246	0,42	
15	Ponjong - Tambakromo	9,500	392	3354	0,12	sama	Ponjong - Tambakromo	9,500	392	3354	0,12	
16	Semin - Bulu	8,410	885	3069	0,29	sama	Semin - Bulu	8,410	885	3069	0,29	
17	Semin - Blimbing	5,680	494	2654	0,19	sama	Semin - Blimbing	5,680	494	2654	0,19	
18	Pandaan - Candirejo	3,470	681	3162	0,22	sama	Pandaan - Candirejo	3,470	681	3162	0,22	
19	Wonosari - Nglipar	7,690	589	1223	0,48	sama	Wonosari - Nglipar	7,690	589	1223	0,48	
20	Sambipitu - Nglipar	10,790	730	1882	0,39	sama	Sambipitu - Nglipar	10,300	730	1882	0,39	
21	Nglipar - Semin	19,400	1005	2075	0,48	sama	Nglipar - Semin	19,400	1005	2075	0,48	
22	Ngalang - Hargomulyo	7,700	576	2646	0,22	sama	Ngalang - Hargomulyo	7,700	576	2646	0,22	
23	Hargomulyo - Watugajah	3,300	294	1870	0,16	sama	Hargomulyo - Watugajah	3,700	294	1870	0,16	
24	Jepitu - Wediombo	4,800	316	1930	0,16	sama	Jepitu - Wediombo	5,700	316	1930	0,16	
25	Jerukwudel - Ngungap	3,700	313	1992	0,16	Jalan Nasional						

No,	Ruas Jalan		V/C Ratio			perubahan	Ruas Jalan	Panjang Ruas (meter)	V/C Ratio		
	Keputusan Gubernur DIY Nomor, 118/KEP/2016	Panjang Ruas (meter)	2022				Keputusan Gubernur DIY Nomor, 41/KEP/2023		2023		
			V	C	V/C Rasio				V	C	V/C Rasio
26	Jerukwudel - Sadeng	6,900	142	1992	0,07	sama	Jerukwudel - Sadeng	7,900	142	1992	0,07
27	Purwodadi - Pantai Siung	3,900	312	2784	0,11	berubah	Ngeloi - Pantai Siung	5,850	312	2784	0,11
28	Batas Bantul 1 - Girijati	1,125	179	2976	0,06	berubah	Batas Bantul - Girijati	2,510	179	2976	0,06
29	Batas Bantul 2 - Girijati	3,200	109	2794	0,04	Jalan Nasional					
30	Girijati - Legundi	13,400	250	2794	0,09	Jalan Nasional					
31	Legundi - Saptosari	10,400	895	2976	0,3	Jalan Nasional					
32	Saptosari - Planjan	9,200	332	2880	0,12	Jalan Nasional					
33	Planjan - Tepus	13,100	-	-	-	Jalan Nasional					
34	Tepus - Jerukwudel	18,000	414	1946	0,21	Jalan Nasional					
35	Jerukwudel - Baran - Duwet	11,600	421	2976	0,14	Jalan Nasional					
36	Planjan - Baron	4,300	347	2880	0,12	Jalan Nasional					
37	Baron - Tepus	15,000	157	3007	0,05	berubah	Baron - Pulang Sawal	10,300	157	3007	0,05
38	Bedoyo - Pracimato	1,900	414	2857	0,14	sama	Bedoyo - Pracimato	1,900	414	2857	0,14
39						baru	Rejosari - Baron	790	-	-	-

No,	Ruas Jalan	Panjang Ruas (meter)	V/C Ratio			perubahan	Ruas Jalan	Panjang Ruas (meter)	V/C Ratio			
	Keputusan Gubernur DIY Nomor, 118/KEP/2016		2022				2023		Keputusan Gubernur DIY Nomor, 41/KEP/2023	V	C	V/C Rasio
			V	C	V/C Rasio							
40						baru	Tepus - Kanigoro	2,200	-	-	-	
41						baru	Gayamharjo - Tawang	1,800	-	-	-	
42						baru	Tawang - Ngalang	9,600	-	-	-	
43						baru	Ngalang - Gading	4,090	-	-	-	
44						baru	Gading - Karangtengah	6,000	-	-	-	
D,	KABUPATEN SLEMAN	116,320					KABUPATEN SLEMAN	122,555				
1	Yogyakarta - Pulowatu	11,300	1442	2185	0,66	sama	Yogyakarta - Pulowatu	10,748	1442	2185	0,66	
2	Yogyakarta - Kaliurang (Gardu PLN)		1954	2177	0,9	berubah	Yogyakarta - Pakem	11,250	1954	2177	0,9	
3	Yogyakarta - Kaliurang (RSJ Grasia)	26,090	786	2105	0,37	berubah	Pakem - Kaliurang	9,300	786	2105	0,37	
4	Yogyakarta - Kebonagung 1 (DPN Giant Swalayan)		1806	2021	0,89	berubah	Yogyakarta - Demakijo	2,200	1806	2021	0,89	
5	Yogyakarta - Kebonagung 1 (Sentra Genteng)	15,600	-	-	-	dihapus						
6	Prambanan - Piyungan	10,300	1598	2519	0,63	sama	Prambanan - Piyungan	10,300	1598	2519	0,63	
7	Klangon - Tempel (mang engking)	22,480	960	2053	0,47	sama	Klangon -	21,749	960	2053	0,47	

No,	Ruas Jalan		V/C Ratio			perubahan	Ruas Jalan	Panjang Ruas (meter)	V/C Ratio		
	Keputusan Gubernur DIY Nomor, 118/KEP/2016	Panjang Ruas (meter)	2022						2023		
			V	C	V/C Rasio				V	C	V/C Rasio
							Tempel (mang engking)				
8	Mlati -Cebongan	4,000	1539	2413	0,64	berubah	Jombor - Cebongan	4,480	1539	2413	0,64
9	Cebongan - Seyegan	3,000	1311	2184	0,6	sama	Cebongan - Seyegan	3,000	1311	2184	0,6
10	Seyegan - Balangan	5,000	1043	2567	0,41	sama	Seyegan - Balangan	5,000	1043	2567	0,41
11	Balangan - Kebonagung 2	5,250	1097	2821	0,39	sama	Balangan - Kebonagung 2	6,303	1097	2821	0,39
12	Tangisan - Blaburan	900	587	2624	0,22	sama	Tangisan - Blaburan	900	587	2624	0,22
13	Denggung - Wonorejo	2,500	1383	2401	0,58	sama	Denggung - Wonorejo	2,500	1383	2401	0,58
14	Wonorejo - Tambakan	2,000	1472	2821	0,52	sama	Wonorejo - Tambakan	2,000	1472	2821	0,52
15	Besi - Jangkang	3,700	1438	2482	0,58	sama	Besi - Jangkang	3,700	1438	2482	0,58
16	Jangkang - Koroulon	2,300	929	2053	0,45	sama	Jangkang - Koroulon	2,300	929	2053	0,45
17	Koroulon - Joholanang	1,900	1344	2482	0,54	sama	Koroulon - Joholanang	1,900	1344	2482	0,54

No,	Ruas Jalan	Panjang Ruas (meter)	V/C Ratio			perubahan	Ruas Jalan	Panjang Ruas (meter)	V/C Ratio			
	Keputusan Gubernur DIY Nomor, 118/KEP/2016		2022				2023		Keputusan Gubernur DIY Nomor, 41/KEP/2023	V	C	V/C Rasio
			V	C	V/C Rasio							
18						baru	Demakjo - Kebona gung	15,175	-	-	-	
19						baru	Prambanan - Gayamharjo	9,750	-	-	-	
Panjang Ruas Jalan		760,150	Panjang Ruas Jalan					674,585				
Jumlah Derajat Kejenuhan / V/C Ratio di Ruas Jalan DIY Tahun 2022					0,38	Jumlah Derajat Kejenuhan / V/C Ratio di Ruas Jalan DIY Tahun 2023					0,42	

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2023

Berdasarkan data V/C Ratio sesuai Studi Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang pada ruas Jalan Provinsi pada tahun 2023 dapat diperoleh hasil bahwa rata - rata kinerja lalu lintas di ruas jalan provinsi mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 0,38 meningkat pada tahun 2023 sebesar 0,42.

B. Kinerja Angkutan Umum

Pengembangan angkutan umum di perkotaan DIY dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi perjalanan orang menggunakan angkutan pribadi yang pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi kemacetan jalan. Trans Jogja adalah layanan angkutan umum yang mengusung Layanan Angkutan umum yang berada di wilayah DIY yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, terdapat beberapa jenis yang meliputi Angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek. Selain layanan angkutan berbasis jalan terdapat juga layanan angkutan berbasis rel.

Layanan angkutan dalam trayek meliputi :

Angkutan Perkotaan Yogyakarta

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja yang dilayani sampai saat ini sejumlah 18

rute seperti dan untuk trayek tambahan (Teman Bus trayek 12, 13, 14) Layanan angkutan perkotaan di wilayah perkotaan Yogyakarta saat ini didukung oleh Bus Trans Jogja dan layanan Teman Bus (*Buy The Service*). Pada tahun 2022 angkutan Umum Perkotaan dengan sistem *Buy The Service* telah melayani 18 jalur dan 95 armada. Layanan operasional Trans Jogja dimulai pada pukul 06.00 WIB – 21.30 WIB dan selama pandemi mengalami pengurangan waktu operasional dari pukul 06.00 WIB – 19.00 WIB. Kemudian untuk layanan *Buy The Service* dengan Koridor Ngaglik sejumlah 6 Bus, Godean sejumlah 10 Bus dan Ngemplak sejumlah 14 Bus dengan cadangan sebanyak 4 Bus.

Tabel 2-89 Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2017 s.d. 2023

No.	Tahun	Penumpang Terangkut Trans Jogja	
		penumpang/ hari	penumpang/ tahun
1.	2017	7.321	5.317.484
2.	2018	8.056	5.880.610
3.	2019	7.150	5.282.737
4.	2020	7.607	2.776.667
5.	2021	4.132	1.508.450
6.	2022	8.345	3.045.957
7.	2023	14.974	5.465.574

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Angkutan Antar Kota dalam Provinsi, Pada tahun 2017 sampai tahun 2019 jumlah armada untuk layanan AKDP cenderung stabil, namun pada tahun 2020 sampai dengan 2021 banyak perusahaan otobus yang pailit sehingga Perusahaan otobus tidak dapat mengoperasikan armadanya. Kondisi di lapangan AKDP hanya beroperasi secara terbatas dari trayek yang telah ditetapkan karena pertimbangan keekonomisan. Operator harus mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi dan tidak sepadan dengan pendapatan.

Berdasarkan hasil studi evaluasi Kinerja Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi pada tahun 2021, dari 45 Trayek yang terdaftar dalam SK Gubernur hanya terdapat 5 trayek yang beroperasi secara rutin dan trayek tersebut dilayani oleh Damri melalui intervensi pemerintah pusat.

Tabel 2-90 Trayek AKDP yang terlayani di DIY Tahun 2020 hingga Tahun 2023

NO	TRAYEK		Terlayani				Status
			2020	2021	2022	2023	
1	51	Jogja - Wonosari	1	1	1	1	Terlayani
2	51	Jogja - Imogiri - Panggang	1	1	1	1	Terlayani
3	52,A	Jogja - Paris - Panggang	1	1	1	1	Terlayani
4	61	Jogja - Imogiri	1	1	1	1	Terlayani
5	62	Jogja - Parangtritis	1	1	1	1	Terlayani
6	62,A	Jogja - Imogiri - Paris	1	1	1	1	Terlayani
7	63	Jogja - Bantul - Samas	1	1	1	1	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 15)
8	64,A	Jogja - Bantul - Pandansimo	1	1	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 15)
9	64,B	Jogja - Bantul - Sorobayan	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 15)
10	71	Jogja - Wates	1	0	0	0	Tidak Operasi
11	71,A	Jogja - Wates - Kutogiri	0	0	0	0	Tidak Operasi
12	71,B	Jogja - Wates - Kalibiru	0	0	0	0	Tidak Operasi
13	72	Jogja - Srandakan - Bantul - Wates	1	1	1	1	Terlayani
14	72,A	Jogja - Srandakan - Palbapang - Wates	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 15)
15	72,B	Jogja - Srandakan - Glagah - Wates	0	0	0	0	Tidak Operasi
16	73,A	Jogja - sentolo - Brosot	0	0	0	0	Tidak Operasi

NO	TRAYEK		Terlayani				Status
			2020	2021	2022	2023	
17	73,B	Jogja - Bantul - Brosot	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 15)
18	74,A	Jogja - Wates - Toyan - Congot	0	0	0	0	Tidak Operasi
19	74,B	Jogja - Wates - Glagah - Congot	0	0	0	0	Tidak Operasi
20	75	Jogja - Wates - Kokap	0	0	0	0	Tidak Operasi
21	75,A	Jogja - Wates - Sangon	0	0	0	0	Tidak Operasi
22	75,B	Jogja - Wates - Tangkisan	0	0	0	0	Tidak Operasi
23	76	Jogja - Godean - Girimulyo	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 12)
24	76,A	Jogja - Godean - Keji - Girimulyo	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 12)
25	76,B	Jogja - UGM - Godean - Girimulyo	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 12)
26	77	Jogja - Godean - Dekso	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 12)
27	77,B	Jogja - Godean Nanggulan - Dekso	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 12)
28	78	Jogja - sentolo - Samigaluh	0	0	0	0	Tidak Operasi
29	78,A	Jogja - sentolo - Dekso - Samigaluh	0	0	0	0	Tidak Operasi
30	79 A	Jogja - Sentolo - Kalibawang	0	0	0	0	Tidak Operasi
31	79,B	Jogja - Gamping - Sentolo - Kalibawang	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 7,8,10
32	81	Jogja - Jombor - Tempel	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja

NO	TRAYEK		Terlayani				Status
			2020	2021	2022	2023	
							Trayek 2A,2B,5A,5B,8)
33,	82	Jogja - Kaliurang	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 14)
34	82,A	Kaliurang - UGM - Condongcatur	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 1B,2A,3B,5A)
35	83	Jombor - UGM - Concat - Jogja	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 1B,2A,3B,5A)
36	84	Jombor - UGM - Prambanan	1	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 1A,3A)
37	91,A	Lingkar 1 - Jogja - Gamping - Tempel - Prambanan - Jogja	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 12)
38	91,B	Lingkar 1 - Jogja - Prambanan - Tempel - Gamping - Jogja	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja
39	92,A	Lingkar 2 - Jogja - Godean - Tempel - Janti - Jogja	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja
40	92,B	Lingkar 2 - Jogja - Janti - Tempel - Godean - Jogja	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja
41	93	Jogja - Bandara YIA	1	1	1	1	Terlayani oleh DAMRI
42	94	Pakem - Tempel - Bandara YIA	0	0	0	0	Sleman - Bandara YIA terlayani oleh DAMRI
43	95	Palbapang - Bandara YIA	1	1	1	1	Terlayani oleh DAMRI
44	96	Terminal Jombor - Bandara YIA	1	1	1	1	Terlayani oleh DAMRI
45	97	Stasiun Tugu - Bandara YIA	1	1	1	1	Terlayani oleh DAMRI
Yang terlayani Angkutan			15	13	12	12	
Jumlah Trayek			45	45	45	45	

2-202

NO	TRAYEK	Terlayani				Status
		2020	2021	2022	2023	
Rasio		0,333	0,289	0,267	0,267	

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2023

Angkutan Pedesaan Dalam Provinsi.

Berdasarkan hasil Studi Evaluasi Kinerja Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi pada tahun 2021 terdapat potensi penanganan angkutan pedesaan provinsi yang terdiri dari trayek:

- 1) Imogiri – Panggang – Parangtritis
- 2) Jogja – Imogiri
- 3) Jogja – Parangtritis
- 4) Gamping – Sentolo – Wates – YI
- 5) Godean – Terminal Kenteng – Dekso – Kalibawang - Samigaluh

Layanan Angkutan Tidak Dalam Trayek meliputi :

Angkutan Sewa Khusus, Angkutan sewa khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, Pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.

Taksi, Angkutan orang dengan menggunakan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer

Data jumlah dan jenis angkutan di DIY tahun 2018-2023 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah jenis angkutan. Penurunan sangat drastis tercatat pada jenis angkutan AKDP dan taksi.

Tabel 2-91 Kendaraan Angkutan di DIY Tahun 2018-2023

No	Jenis Angkutan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angkutan AKDP	493	482	98	54	26	26
2	Taksi	1025	505	503	503	164	164

No	Jenis Angkutan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Angkutan Perkotaan	315	184	149	172	172	172
4	Angkutan Sewa Khusus	0	0	0	0	55	52

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2023

Layanan Angkutan berbasis Rel :

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang rencana induk Perkeretaapian Provinsi Tahun 2017 - 2036, strategi pengembangan perkeretaapian khususnya di DIY berada pada pengembangan Jalur Utara - Selatan dan Timur - Barat. Pengembangan jaringan perkeretaapian meliputi jaringan kereta api penumpang dan Jaringan kereta Api barang.

Salah satu layanan angkutan umum berbasis rel saat ini adalah layanan kereta api jarak jauh, perkotaan dan Bandara. Layanan tersebut masuk dalam koridor Bandara Kulon Progo - Kedundang - Yogyakarta - Brambanan. Pada koridor tersebut terdapat Layanan angkutan kereta api perkotaan dengan relasi perjalanan Yogyakarta - Solo dan sebaliknya, untuk kereta api bandara relasi Stasiun Yogyakarta - Wates - Bandara Internasional Yogyakarta.

Angkutan Tradisional

Transportasi tradisional merupakan kegiatan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan secara tradisional, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), yang sangat berperan dalam pembangunan secara menyeluruh. Transportasi tradisional juga sangat berkaitan dengan penggunaan lahan, baik di desa maupun kota. Menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.5 Tahun 2016, Transportasi tradisional adalah sarana angkutan umum dengan kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang dan/atau ditarik oleh hewan yang oleh masyarakat masih diakui keberadaannya meliputi Becak dan Andong yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Berdasarkan hasil Kajian Pendataan Pendaftaran Jenis Jumlah dan Pentapan Wilayah Operasi Transportasi Tradisional tahun 2022, diperoleh data jumlah dan jenis transportasi tradisional di DIY sebagai berikut.

Tabel 2-92 Jumlah dan Jenis Transportasi Tradisional Berdasarkan Hasil Survei

Jenis Kendaraan	Jumlah
Becak Wisata	63
Becak Non Wisata	52
Andong	32
Total	147

Sumber: Kajian Pendataan Pendaftaran Jenis Jumlah dan Pentapan Wilayah Operasi Transportasi Tradisional, 2022

Kinerja Keselamatan Jalan

Data kecelakaan diperoleh dari data yang tercatat dalam *Integrated Road Safety Management System (IRSMS)* Kepolisian Republik Indonesia yang diperoleh Ditlantas Polda DIY. Data tersebut merekam seluruh kejadian kecelakaan di DIY untuk seluruh jenis ruas jalan dan status jalan dari Jalan Desa, Jalan Kota/Kabupaten, Jalan Provinsi hingga Jalan Nasional pada tahun 2020 hingga tahun 2023.

Tabel 2-93 Jumlah Kejadian Kecelakaan di DI Yogyakarta Tahun 2020 – 2023

Tahun	DIY	Kab. Bantul	Kab. Gunungkidul	Kab. Kulon Progo	Kota Yogyakarta
2020	4.559	1.623	577	591	499
2021	5.350	1.917	664	815	464
2022	7.830	2.606	982	715	682
2023	6.868	2.144	861	877	250

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

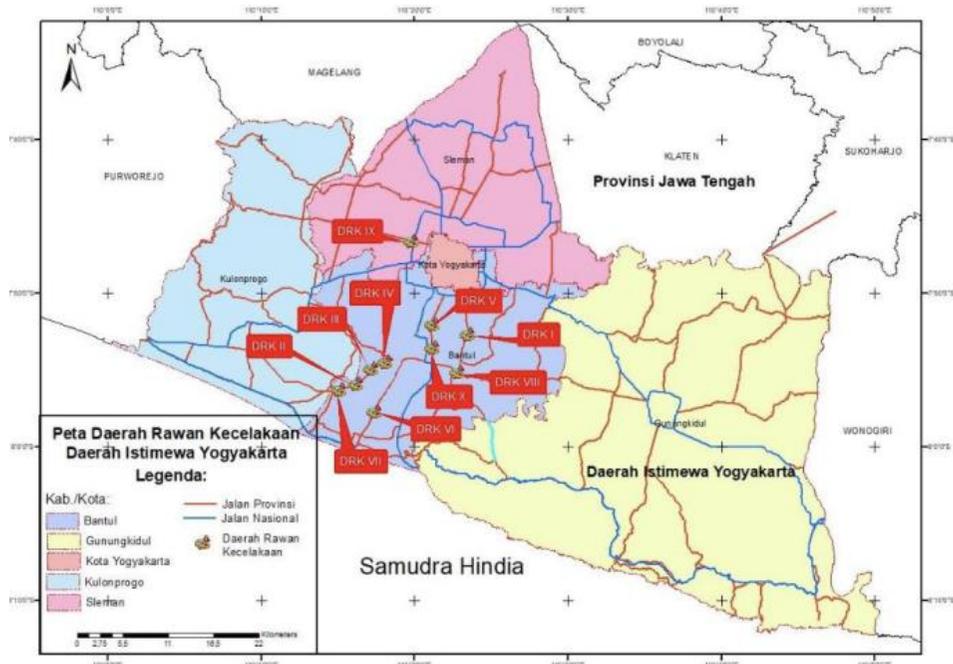
Tren kenaikan angka kejadian kecelakaan hampir terjadi di seluruh wilayah kecuali kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul masih berada pada posisi tertinggi, Angka kejadian kecelakaan tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Faktor dominan terjadinya kecelakaan didominasi

oleh faktor manusia seperti tidak menaati peraturan lalu lintas, lengah, melebihi batas kecepatan maksimal dan beberapa faktor eksternal diluar kewenangan Dinas Perhubungan DIY seperti kondisi jalan yang belum ideal seperti lebar bahu, lebar lajur dan jarak pandang yang belum memadai dan genangan air hujan

Tabel 2-94 Peringkat Keselamatan Jalan Berdasarkan Jumlah Kejadian Per KM Panjang Ruas Jalan

Rank	No Ruas	Nama Ruas	Kabupaten	Panjang	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus /km
1	021	Gedongkuning - Wonocatur	Bantul	1,20	30	25,00
2	001	Yogyakarta - Bakulan (Parangtritis)	Bantul	8,35	119	14,25
3	005	Bantul - Srandakan	Bantul	8,95	120	13,41
4	008	Bakulan - Barongan	Bantul	3,18	37	11,65
5	002	Yogyakarta - Barongan	Bantul	9,80	109	11,12

Sumber:: Studi Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan, 2022



Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Jalan DIY Pilar Ke 3, 2023

Gambar 2-57 **Peta Daerah Rawan Kecelakaan di DIY**

Dalam rangka pemenuhan fasilitas sarana prasaranan perlengkapan jalan sebagai fungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan, sampai dengan tahun 2023 telah dilakukan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan pada jalan provinsi di DIY.

Tabel 2-95 **Rekapitulasi Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan di DIY Tahun 2023**

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Satuan	Terpasang	Kebutuhan	Persentase	Kekurangan
1	APJ Tenaga listrik	Unit	3,345	12,164	27%	8,819
2	APJ Tenaga Surya	Unit	312	3,044	10%	2,732
3	Warning Light	Unit	122	376	32%	254
4	Rambu Lalu Lintas	Unit	3,242	4,255	76%	1,013
5	RPPJ	Unit	439	727	60%	288

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Satuan	Terpasang	Kebutuhan	Persentase	Kekurangan
6	Cermin Tikung	Unit	590	1,003	59%	413
7	Guardrail (Pagar Pengaman)	Meter	5,780	19,520	30%	13,740
8	Deliniator	Unit	4,630	9,760	47%	5,130
Rata-rata terpasang					43%	

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2024

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah transportasi

Dalam pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi di sektor transportasi diharapkan mampu memberikan pelayanan bagi ketertiban dan kelancaran berlalu lintas yaitu dalam meningkatkan keselamatan, mobilitas, mengurangi biaya dan mengurangi kerusakan lingkungan, yang dapat mendukung terwujudnya transportasi berkelanjutan sehingga dapat digunakan untuk kebijakan mengurangi kemacetan dan emisi bahan bakar, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, maka perlu mengintegrasikan operasi transportasi, infrastruktur kendaraan, serta pengguna jalan melalui pengembangan sistem pengendalian lampu lalu lintas (ATCS), sistem manajemen dan pengawasan dalam mendukung lalu lintas angkutan barang di jalan yaitu *Intelligent Transport System* (ITS) dengan harapan dapat menekan angka kecelakaan dan memperpanjang umur jalan dan pengembangan sarana transportasi berbasis listrik dengan harapan udara kota tetap bersih dan ramah lingkungan. Berikut disajikan data Simpang APILL ATCS Kewenangan Dishub DIY Tahun 2012 - 2022.

Tabel 2-96 Rekapitulasi Simpang APILL ATCS Kewenangan Dishub DIY Tahun 2012 - 2022

No	Tahun Pemasangan	Nama Simpang		
1.	2012	1. Bandara Adisucipto 2. Maguwo	3. Janti 4. UIN	5. Demangan
2.	2013	1. Galeria 2. Gramedia 3. Monjali 4. Kentungan	5. Condongcatur 6. Seturan 7. Pelemgurih 8. Prambanan	9. Ketandan 10. Pasar Kembang 11. Patran

No	Tahun Pemasangan	Nama Simpang		
3.	2014	1. Blok o 2. Druwo 3. Dongkellan 4. Tempel 5. Giwangan 6. Tugu	7. MM UGM 8. Kleringan 9. Melia 10. Basen 11. Bantulan 12. Demak Ijo	13. Pogung 14. Jujur 15. Kronggahan 16. Ngasem 17. Pakem 18. Kotagede
4.	2015	1. Sedayu 2. Kasihan 3. Klodran 4. Gamping	5. Madukismo 6. Proliman 7. Sampakan 8. Jejeran	9. Jati Kencana 10. Selokan Mataram 11. Damai Timur 12. Borobudur Plaza
5.	2016	1. Toyan 2. Pedes 3. Beran 4. Denggung	5. Wojo 6. Ngeplang 7. Kamdanen 8. Raden Ronggo	9. Piyungan 10. Wiyoro 11. Besi 12. Karangnongko
6.	2017	1. Manding	2. Kenteng	
7.	2018	1. Palbapang		
8.	2020	1. Siluwok	2. Glagah	3. Tambak
9.	2022	1. Brosot	2. Srandakan	

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2023

2.1.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

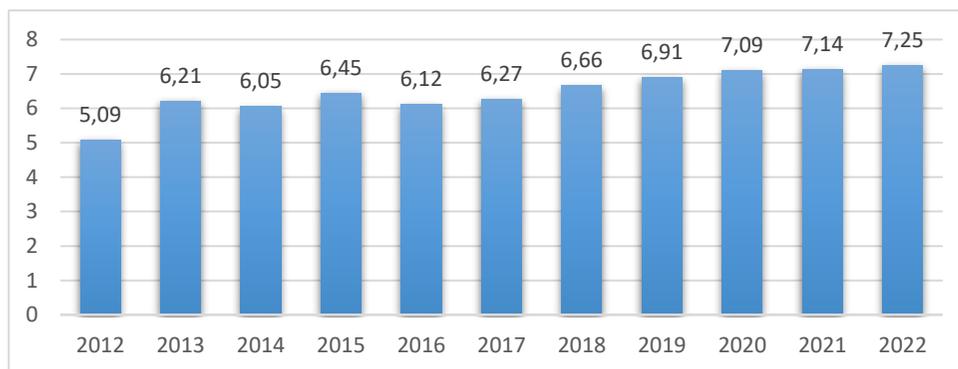
Informasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Pemda DIY memiliki saluran informasi yang resmi melalui portal <http://jogjaprovo.go.id>. OPD DIY juga mempunyai berbagai saluran informasi melalui website instansi. Pemda DIY menggunakan berbagai aplikasi dan sistem informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam pelayanan publik maupun keperluan internal.

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi di Pemda DIY juga didesain pengembangan ekosistem kultural DIY berbasis digital berupa pengembangan sistem informasi berbasis multimedia terpadu yang berfungsi sebagai alat bantu untuk penyebaran informasi budaya, pariwisata, dan pendidikan pada khususnya, dan berbagai informasi pemerintah daerah pada umumnya kepada masyarakat. Sasaran yang akan diraih melalui pengembangan ekosistem kultural berbasis

digital tersebut adalah memberdayakan dan mendorong pemerintah daerah, swasta dan seluruh lapisan masyarakat dalam menumbuhkan sinergi budaya, pariwisata dan pendidikan untuk mensukseskan perwujudan visi jangka panjang DIY sebagai pusat unggulan pendidikan, pariwisata, dan budaya se-Asia Tenggara.

Sistem tersebut akan menjadi infrastruktur para pemangku kepentingan budaya, pariwisata dan pendidikan daerah untuk melakukan kolaborasi, inventarisasi, pengolahan, hingga penyebaran/distribusi informasi dalam bentuk multimedia. Informasi tersebut untuk selanjutnya akan sangat berguna untuk kepentingan sosialisasi dan promosi, dapat disebarluaskan secara digital melalui berbagai platform, seperti videotron, kios interaktif, web, aplikasi ponsel, dan sebagainya sehingga jangkauan penyebaran informasi berpotensi menjadi lebih luas, lebih cepat, dan lebih efektif.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia tahun 2022 mencapai 5,85, meningkat dibandingkan dengan 2021 sebesar 5,76 pada skala 0–10. Untuk DIY, Indeks Pembangunan TIK pada tahun 2022 mendapat skor 7,25, meningkat 0,11 poin dari tahun 2021 dengan skor 7,14.



Sumber data: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Gambar 2-58 Grafik Skor Indeks Pembangunan TIK DIY, 2012-2022

Meskipun cenderung terdapat peningkatan, sesuai dengan kategori terbaru capaian skor indeks pembangunan TIK DIY pada tahun 2012-2022 masuk di kategori sedang pada range skor 5,01-7,50.

Pembangunan TIK di DIY salah satunya ditopang dengan pembangunan jaringan tetap dan bergerak. Untuk pembangunan jaringan tetap sejak tahun 2013 telah dibangun jaringan fiber optik dengan rincian sebagai berikut :

2-210

Tabel 2-97 Panjang Kabel Fiber Optik di DIY

Tahun	Panjang Kabel Fiber Optik (Meter)		
	Kabel Tanam	Kabel Udara	Total
2013	12.227	-	12.227
2014	21.876	12.007	33.883
2015	3.140	13.154	16,294
2016	-	1.000	1.000
2017	-	702	702
2018	-	11.575	11.575
2019	-	4.450	4.450
2020	-	379.875	379.875
2021	-	5.350	5.350
2022	-	22.500	22.500
2023	-	41.690	41.690
Total	37.243	492.303	492.856

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2023

Jaringan Intra pemerintah Daerah dikembangkan untuk menghubungkan semua unit kerja OPD Pemda DIY secara aman. Pada tahun 2023 tercatat ada 283 unit kerja Pemda DIY dengan 272 unit kerja sudah terhubung ke jaringan intra pemerintah daerah dan 11 unit kerja belum terhubung ke jaringan intra pemerintah daerah. Rincian 272 unit kerja yang sudah terhubung, sebagai berikut:

- a. 196 unit kerja terhubung dengan menggunakan kabel serat optik;
- b. 75 unit kerja terhubung dengan menggunakan media *wireless*;
- c. 1 unit kerja terhubung dengan VPN.

Sebagai tindak lanjut Pemda DIY atas amanat Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Jaringan Intra Pemerintah Daerah Pemda DIY terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Pusat pada tahun 2023. Dengan keterhubungan tersebut, interkoneksi antara Pemda DIY dengan Pemerintah Pusat berjalan lebih aman.

Jaringan Intra Pemerintah Daerah DIY juga sudah terhubung dengan jaringan intra pemerintah kabupaten/kota di DIY. Pemerintah Kabupaten/Kota juga sudah membangun jaringan intra pemerintah sampai dengan kantor kelurahan /

kalurahan di DIY, baik menggunakan media *wireless* ataupun dengan kabel serat optik dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2-98 Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Wireless	FO	Total
Gunungkidul (144 kalurahan)	122	22	144
Kulon Progo (87 kalurahan dan 1 kelurahan)	88	0	88
Sleman (86 kalurahan)	31	55	86
Bantul (75 kalurahan)	48	27	75
Yogyakarta (45 kalurahan)	0	45	45
TOTAL (438 kalurahan dan kelurahan)	289	149	438

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2023

Jaringan telekomunikasi bergerak di DIY telah menjangkau hampir seluruh Kalurahan/Kelurahan di DIY. Hal ini dapat dilihat dari data BPS Provinsi DIY (DIY dalam angka 2023) yang menyatakan hanya ada 1 Kalurahan di DIY yang tidak mendapatkan sinyal internet telepon seluler. Cakupan jaringan telekomunikasi bergerak di DIY secara lebih rinci dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2-99 Jaringan Telekomunikasi Bergerak di DIY

Kabupaten/ Kota	4G/LTE			3G/H/H+/EVDO			2.5G/E/GPRS			Tidak Terjangkau Sinyal		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kulon Progo	61	77	74	19	10	11	6	1	3	2	-	-
Bantul	54	67	771	20	7	4	1	1	-	-	-	-
Gunungkidul	82	96	113	50	41	27	12	7	3	-	-	1
Sleman	75	74	79	10	12	7	1	-	-	-	-	-
Yogyakarta	43	45	45	2	-	-	-	-	-	-	-	-
DIY	315	359	359	101	70	49	20	9	6	2	-	1

Sumber : Provinsi DI Yogyakarta Dalam Angka 2023, BPS 2023

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika juga mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas 2-212

proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Tabel 2-100 Perbandingan Nilai Indeks SPBE Pemda DIY Hasil Pemantauan Tahun 2022 Dan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023

Indeks SPBE	2022	2023	Keterangan
SPBE Pemda DIY	3,02	4,22	Naik 1,20
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	2,50	4,80	Naik 2,30
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,50	4,80	Naik 2,30
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	2,30	4,20	Naik 1,90
Aspek 2 – Perencanaan Strategis SPBE	2,00	4,25	Naik 2,25
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,50	4,25	Naik 1,75
Aspek 4 – Penyelenggara SPBE	2,50	4,00	Naik 1,50
Domain 3 – Manajemen SPBE	1,82	3,36	Naik 1,54
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	2,00	3,38	Naik 1,38
Aspek 6 – Pelaksanaan Audit TIK	1,33	3,33	Naik 2,00
Domain 4 – Layanan SPBE	3,99	4,38	Naik 0,39
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	4,10	4,20	Naik 0,10
Aspek 8 – Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,83	4,67	Naik 0,84

sumber: LHE SPBE Kementerian PANRB, 2022 dan 2023

Keunggulan penerapan SPBE di DIY adalah kebijakan internal tata kelola, perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Keunggulan ini juga didukung dengan terbitnya Pergub DIY nomor 22 tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang mengamatkan arah koordinasi secara menyeluruh baik internal maupun antar perangkat daerah, dengan K/L/pemda lainnya yang di ikuti juga dengan adanya arsitektur dan peta rencana SPBE yang memuat seluruh unsurnya secara lengkap.

Layanan TIK juga telah terdokumentasi dengan baik serta menunjukkan layanan yang diberikan oleh teknologi tersebut mampu mendorong efektivitas SPBE di DIY. Pada aspek layanan administrasi pemerintahan terkonfirmasi dengan adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang perencanaan penganggaran dan keuangan yang dibuktikan dengan penggunaan aplikasi

berbagi pakai SIPD. Layanan Pengadaan barang dan jasa juga terkonfirmasi dengan penggunaan aplikasi SPSE dari LKPP, dan layanan lainnya.

1. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di DIY dengan indikator persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi dapat dilihat dari hasil Komisi Informasi DIY. Adapun data sengketa informasi beberapa tahun terakhir secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-101 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2018

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
1.	Kades Caturtunggal, Depok, Sleman	001/I/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Sela
2.	Camat Ngemplak, Sleman	002/V/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Kesepakatan Damai
3.	Kades Tirtoadi, Mlati, Sleman	003/VIII/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	Kantah Kota Yogyakarta	004/IX/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
5.	Kantah Kab. Bantul	005/IX/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
6.	PPID Utama Pemda DIY	006/IX/KID DIY-PS/2018	Anggaran	Putusan Ajudikasi
7.	Kepala Desa Wonokromo, Pleret, Bantul	007/X/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Kesepakatan Damai
8.	PPID Utama Kab. Sleman	008/X/KID DIY-PS/2018	Anggaran	Damai
9.	Kades Sidomoyo, Godean	009/X/KIDDIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Ajudikasi

Sumber : Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel 2-102 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2019

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
1.	Kepala Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, DIY	001/II/KID DIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
2.	Kepala Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, DIY	002/IV/KID DIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi

2-214

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
3.	Kepala Desa Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY	003/V/KID DIY- PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	Kantor Pertanahan Bantul, DIY	004/V / KIDDIY- PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
5.	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	005/VII / KIDDIY- PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi

Sumber : Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel 2-103 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2020

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
1.	Kepala Desa Wonokromo Kec. Pleret, Kab. Bantul, DIY	001/II/KID DIY- PS/2020	Pertanahan	Penetapan Pencabutan
2.	Pemerintah Kabupaten Sleman	002/I/KID DIY- PS/2020	Anggaran	Kesepakatan Mediasi Damai dan Putusan Ajudikasi
3.	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	003/II/KID DIY- PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	Pemerintah Daerah DIY	004/III/KIDDIY- PS/2020	Anggaran	Putusan Mediasi
5.	Kades Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, DIY	005/IV/KIDDIY- PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
6.	Kades Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, DIY	006/VII/KIDDIY- PS/2020	Pertanahan	Penetapan Pencabutan
7.	Kades Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, DIY	007/VIII/KIDDIY- PS/2020	Pertanahan	Putusan Mediasi
8.	Kepala Desa Sendangagung, Kec. Minggir, Kab. Sleman, DIY	008/X/KIDDIY- PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
9.	Kepala Desa Sinduadi Kec. Mlati, Kab. Sleman, DIY	009/XI/KIDDIY- PS/2020	Anggaran	Putusan Mediasi
10.	Kepala Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab.Sleman DIY	010/XI/KIDDIY- PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi

Sumber : Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel 2-104 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2021

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
1.	Lurah Lumbungrejo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman	001/I/KID DIY-PS/2021	Pertanahan	Putusan Mediasi
2.	Lurah Widodomartani, Kec. Ngemplak Kab. Sleman	002/VI/KIDDIY-PS2021	Pertanahan	Putusan Mediasi

Sumber : Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel 2-105 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2022

No	Termohon	No. Registrasi	Objek	Keterangan
1.	Lurah Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul	001/II/KIDDIY-PS/2022	Pertanahan	Putusan Mediasi
2.	Lurah Depok, Panjatan, Kulon Progo	002/II/KIDDIY-PS/2022	Pertanahan	Putusan Mediasi
3.	Lurah Maguwoharjo, Depok, Sleman	003/II/KIDDIY-PS/2022	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	Pemerintah Daerah DIY	004/IV/KIDDIY-PS/2022	LHKPN	Putusan Ajudikasi
5.	Pemkab Sleman	005/V/KIDDIY-PS/2022	Data informasi diri Bupati dan wakil bupati	Putusan Ajudikasi
6.	Pengadilan Negeri Yogyakarta	006/V/KIDDIY-PS/2022	Salinan eksekusi	Putusan Mediasi
7.	Pemkot Yogyakarta	007/V/KIDDIY-PS/2022	Data informasi diri Bupati dan wakil bupati	Putusan Ajudikasi
8.	Pemkab.Kulon Progo	008/v/KIDDIY-PS/2022	Data informasi diri Bupati dan wakil bupati	Putusan Ajudikasi
9.	Komisi Informasi Provinsi Jawa tengah	009/VI/KIDDIY-PS/2022	Data informasi diri Komisioner	Putusan Ajudikasi
10.	Perkumpulan Simponi	010/VII/KIDDIY-PS/2022	Aggaran	Putusan Ajudikasi

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2022

Tabel 2-106 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2023

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
1.	Lurah Kalurahan Pendowoharjo, Sewon, Bantul	001/IV/KIDDIY-PS/2023	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
2.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	002/VI/KIDDIY-PS2021	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
3.	Lurah Kalurahan Jogotirto, Berbah, Sleman	003/VI/KIDDIY-PS/2023	Pertanahan	Putusan Mediasi
4.	Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	004/VII/KIDDIY-PS/2023	Dokumen administrasi kenaikan pangkat/jabatan	Putusan Ajudikasi
5.	Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman	005/V/KIDDIY-PS/2023	Pertanahan	Putusan Mediasi
6.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	006/V/KIDDIY-PS/2023	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
7.	Lurah Kalurahan Parangtritis, Kretek, Bantul	007/IX/KIDDIY-PS/2023	Pertanahan	Putusan Mediasi
8.	Pemerintah Daerah DIY	008/XI/KIDDIY-PS/2023	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
9.	Kelompok Tani Gerogol Parangtritis x Pemda DIY	009/XII/KIDDIYPS/2023	Pertanahan	Putusan Mediasi

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2024

2. Sub Urusan Aplikasi Informatika

Sebagaimana tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan subdomain untuk halaman daring informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin kedaulatan informasi di Pemerintah Daerah DIY dilaksanakan melalui pemanfaatan domain resmi website pemerintah daerah di mana masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang

ada telah menggunakan domain resmi jogjaprovo.go.id dan juga penggunaan aplikasi-aplikasi berbasis web yang bisa diakses publik lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2021 ada 441 domain web pemerintah dan aplikasi daerah yang sudah menggunakan domain resmi.

2.1.3.2.11 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan UKM memiliki peran penting dalam pembangunan daerah terutama dalam hal mewujudkan pembangunan perekonomian yang inklusif. Secara khusus, koperasi dalam sistem perekonomian Pancasila dipandang merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Namun demikian, saat ini koperasi menghadapi tantangan iklim usaha yang lebih kompetitif dengan aktor-aktor pelaku usaha korporasi. Jika dilihat dari sisi jumlah maupun volume, terjadi peningkatan kinerja perkoperasian di DIY dalam kurun waktu. Jumlah koperasi meningkat dari 1.918 koperasi pada tahun 2019 menjadi 2.086 koperasi pada tahun 2023. Namun demikian, peningkatan tersebut jika dilihat lebih dalam lagi proporsi jumlah koperasi aktifnya justru mengalami penurunan dari 89,78% pada tahun 2019 menjadi 83,12% tahun 2023.

Dibandingkan dengan tahun 2019, volume usaha koperasi relatif meningkat sebesar 12,55%. Volume usaha koperasi yang pada tahun 2019 mencapai Rp 4,3 triliun meningkat hingga Rp 4,8 triliun rupiah. Dalam perkembangan selama lima tahun terakhir, volume usaha koperasi sempat mengalami penurunan signifikan ketika masa pandemi Covid-19. Namun demikian, seiring dengan pemulihan perekonomian daerah, volume usaha koperasi mengalami peningkatan kembali bahkan sudah lebih baik dibandingkan dengan masa sebelum pandemi terjadi.

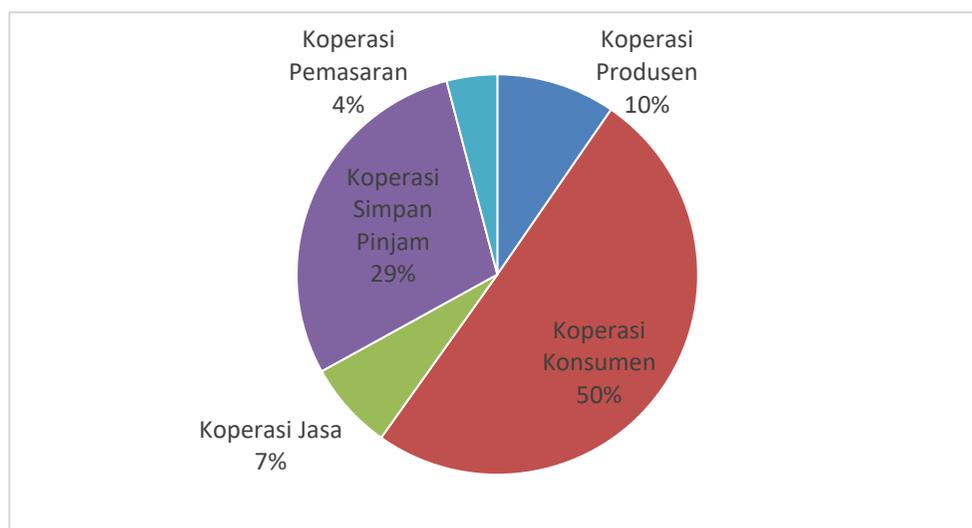
Tabel 2-107 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi	1.918	1.938	1.988	2.008	2.086
1.1	Koperasi Aktif	1.722	1.758	1.717	1.698	1.734
1.2	Koperasi Pasif	196	180	271	310	352
4	Volume Usaha Koperasi (juta rupiah)	4.325.218	4.142.871	4.272.359	4.404.185	4.867.928
5	Aset Koperasi (juta rupiah)	4.562.978	4.422.833	4.003.885	4.394.943	4.832.730

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Tantangan bagi koperasi adalah masih rendahnya peran koperasi di DIY dalam geliat perekonomian daerah. Jika dilihat dari besaran kontribusi volume usaha koperasi terhadap PDRB DIY (ADHB) maka peran koperasi masih sebatas 2,69% pada tahun 2023. Bahkan capaian tahun 2023 tersebut relatif lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 3,07%. Pertumbuhan volume usaha koperasi relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian DIY.

Koperasi di DIY didominasi oleh jenis usaha Koperasi Konsumen yaitu sebanyak 50% dari total jumlah koperasi. Di sisi lain, koperasi produsen hanya berperan sekitar 10% dari total jumlah koperasi di DIY. Hal tersebut sejalan dengan struktur PDRB DIY yang didominasi konsumsi rumah tangga. Konsumsi dan konsmen memiliki peran dalam menggeliatkan perputaran uang di daerah. Tantangan bagi DIY adalah sejauh mana kegiatan konsumsi tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, perlu didorong keterkaitan antara barang/jasa yang dihasilkan oleh tiap jenis koperasi di DIY.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023 (diolah)

Gambar 2-59 Jumlah Koperasi Per Jenis Usaha DIY Tahun 2023

Perekonomian DIY didominasi oleh kegiatan usaha mikro. Pada tahun 2023, terdapat 324.408 Usaha Mikro, 16.069 Usaha Kecil dan 2.109 Usaha Menengah. Pendataan UMKM memang memiliki tantangan seiring dengan jumlah populasi

yang besar, bentuk usaha yang sebagian besar belum formal hingga dinamisnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku. Namun demikian, melalui SiBakul Jogja, Pemda DIY berupaya untuk melakukan tata kelola data UMKM dengan lebih baik. Dilihat dari aspek jenis usahanya, sektor usaha yang dominan di DIY adalah sektor perdagangan (52%) dan sektor industri pengolahan (33%).

Tabel 2-108 Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2023

	Mikro	Kecil	Menengah
Sektor Pertanian	3,649	336	26
Sektor Perdagangan	169,526	7,454	1,093
Sektor Kelautan dan Perikanan	1,281	24	5
Sektor Kehutanan	12	1	1
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	52	40	4
Sektor Transportasi	6,884	85	19
Sektor Komunikasi	90	19	6
Sektor Pariwisata	135	20	2
Sektor Jasa Kesehatan	135	48	22
Sektor Konstruksi	514	134	49
Sektor Real Estate, Usaha Persewaan	1,253	227	48
Sektor Jasa Pendidikan	376	30	3
Sektor Industri Pengolahan	109,756	4,526	412
Ekonomi Kreatif	12,337	998	120
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	18,408	2,127	299
Jumlah	324,408	16,069	2,109

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023 (diolah)

2.1.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kinerja perekonomian daerah didorong oleh pertumbuhan investasi. Dengan demikian, Pemerintah Daerah senantiasa mengupayakan iklim yang kondusif untuk investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Kegiatan investasi, terutama PMDN, diharapkan dapat mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.

Kegiatan penanaman modal adalah tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi baru. Secara tidak langsung, kawasan di sekitar lokasi kegiatan investasi diharapkan dapat ikut menikmati dampak adanya kegiatan ekonomi tersebut.

2-220

Sementara itu, kegiatan PMA juga memiliki peran strategis dalam membawa teknologi baru ke DIY. Kegiatan PMA yang sering diikuti kehadiran tenaga kerja asing, mesin atau metode kerja modern diharapkan dapat memberikan pengetahuan teknologi industri baru di DIY.

Investasi DIY diutamakan untuk industri berbasis keunggulan lokal seperti pariwisata dan industri kreatif. Kegiatan investasi di DIY diupayakan untuk jenis kegiatan industri yang ramah lingkungan. Dengan demikian, investasi yang tumbuh di DIY diharapkan tetap sesuai dengan daya dukung lingkungan serta karakteristik masyarakatnya. Perkembangan investasi di DIY dalam kurun 2019 – 2023 menunjukkan pertumbuhan yang positif baik PMA maupun PMDN. Tahun 2023 secara kumulatif total investasi tumbuh sebesar 16%. Realisasi Investasi di DIY sampai dengan Tahun 2023 (kumulatif) mencapai Rp 42,1 triliun dengan investasi PMDN mencapai Rp 29,9 triliun dan PMA mencapai 12,1 triliun seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2-109 Perkembangan Investasi di DIY (dalam juta rupiah) Tahun 2019-2023

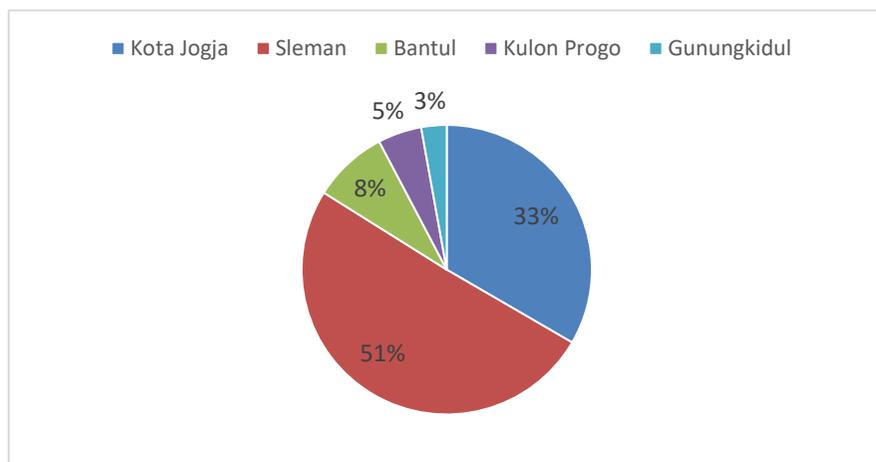
Tahun	Investasi PMDN	Investasi PMA	Total Investasi	Growth	Growth%
2019	17.248.001,99	9.345.955,08	26.593.957,07	6.518.285,52	32,47%
2020	19.931.377,69	9.485.961,96	29.417.339,65	2.823.382,58	10,62%
2021	22.692.648,19	9.803.584,43	32.496.232,62	3.078.892,97	10,47%
2022	24.967.647,19	11.437.953,24	36.405.600,44	3.909.367,82	12,03%
2023	29.983.131,00	12.118.877,80	42.102.008,91	5.696.408,47	16%

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2-60 Realisasi Investasi PMA dan PMDN DIY Tahun 2019 s.d 2023



Sumber: DPMPTSP DIY, 2024

Gambar 2-61 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Kabupaten/ Kota, Triwulan II 2023

Pada tahun 2023, distribusi investasi di DIY masih didominasi oleh Kabupaten Sleman dengan persentase investasi sebesar 51%, diikuti oleh Kota Yogyakarta dengan 33%. Kemudian, Bantul mencatatkan 8% dari total investasi DIY, sementara Kulon Progo dan Gunungkidul masing-masing menyumbang 5% dan 2-222

3%. Meskipun terdapat pertumbuhan investasi yang positif, beberapa permasalahan yang mungkin timbul antara lain kesenjangan investasi antara kabupaten/kota yang bisa mengakibatkan disparitas pembangunan ekonomi, serta perluasan infrastruktur dan pelayanan publik untuk mendukung pertumbuhan investasi secara merata di seluruh wilayah DIY. Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dalam investasi yang dilakukan.

2.1.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan

Tujuan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga adalah mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, bakat, dan minatnya melalui berbagai upaya untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan peran aktif pemuda dalam masyarakat dan pembangunan, penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian pemuda sehingga terbentuk sikap positif pemuda dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Guna mencapai tujuan pembinaan pemuda dan olahraga di DIY, maka diperlukan sebuah sistem perencanaan pembangunan yang terstruktur dan terukur dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Mengacu pada UU Nomor 40 tahun 2009, perencanaan pembangunan kepemudaan dimaknai sebagai rencana pelayanan kepemudaan yang berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembangunan kepemudaan di DIY tidak terlepas dari pedoman yang diatur dalam UU kepemudaan. Mengacu pada kebijakan tersebut, pembangunan kepemudaan DIY diarahkan pada pembangunan *softskill* dan *hardskill* pemuda. Pengembangan pemuda yang bersifat *character building* yang meliputi menumbuhkan kepemimpinan, patriotisme, dinamika, semangat profesionalitas, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat merupakan pengembangan *softskill*. Sedangkan pengembangan *hardskill* pemuda dilakukan dengan melakukan peningkatan kapasitas pemuda melalui pemberian pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan bagi pemuda.

Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, *Youth Center*, Amongrogo, Pondok Pemuda Ambarbinangun, GOR Sorowajan, dan Graha Bakti

Wanayasa. Jumlah klub olahraga pada tahun 2023 terdapat 1.207 buah dan lapangan/gedung olahraga sebanyak 3.280 unit. Data kelembagaan dan sarana olahraga DIY sebagai berikut

Tabel 2-110 Jumlah Kelembagaan Pemuda dan Olahraga dan Sarana Olahraga di DIY

Uraian	Tahun					Satuan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Pemuda dan Olahraga						
Jumlah Klub Olahraga	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	Klub
Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	Unit
Jumlah kegiatan olahraga	12	2	4	4	4	Kali
Jumlah organisasi pemuda	74	74	56	56	56	Unit
Jumlah kegiatan kepemudaan	11	4	6	3	3	Kali
Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	10	10	10	10	10	Unit

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

2.1.3.2.14 Urusan Statistik

Dalam penyelenggaraan urusan statistik di lingkup pemerintah, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang diamanatkan dalam kebijakan Satu Data Indonesia merupakan terobosan penting untuk mewujudkan perbaikan tata kelola data. Data yang valid merupakan salah satu kunci pembangunan nasional. Data yang valid sangat dibutuhkan dalam menyusun perencanaan, anggaran, bahkan membuat kebijakan, sehingga eksekusi dari kebijakan tersebut memperoleh hasil yang positif. Pengambilan keputusan penting tidak boleh dilakukan tanpa adanya data. Oleh karena itu, sudah sepantasnya semua pihak ikut mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia, baik itu pemerintah pusat hingga daerah, guna mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik di masa depan.

Perpres tersebut menjadi pondasi bagi pelaksanaan tata kelola data di Instansi Pusat maupun Daerah untuk menghasilkan data yang berkualitas. Kebijakan Satu Data Indonesia nantinya diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemangku kepentingan, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, mendorong keterbukaan dan transparansi data, serta mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN).

Kebijakan Satu Data Indonesia di DIY ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY No 3 Tahun 2020 Tentang Satu Data Pembangunan Daerah (DIY). Dalam penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah DIY dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia tersebut dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah DIY. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam mewujudkan tersedianya data yang berkualitas, akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, maka penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan dengan empat prinsip, yang meliputi:

1. Data harus memenuhi standar data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran dan satuan. Standar data untuk statistik lintas instansi ditetapkan oleh Pembina Data Statistik dalam hal ini adalah BPS RI.
2. Data harus memiliki metadata, yaitu informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
3. Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas, adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
4. Data harus menggunakan kode referensi dan atau data induk, adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Kode Referensi dan /atau data induk dibahas dan sepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Dari keempat prinsip Satu Data Indonesia tersebut, saat ini prinsip satu data yang dapat dipenuhi adalah metadata, sehingga formulasi penghitungan indikator urusan statistik adalah perbandingan elemen data yang sudah memiliki metadata dengan seluruh elemen data. Penghitungan capaian per tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2-111 Perbandingan Elemen Data yang Sudah Memiliki Metadata dengan Seluruh Elemen Data

Tahun	Jumlah elemen Data yang sudah memiliki Metadata	Jumlah keseluruhan elemen Data	Persentase
2023	5.135	7.503	68,44%

Sumber: BPPSD DIY, 2023

Beberapa turunan dari Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2020 yang telah disusun diantaranya adalah Keputusan Gubernur Nomor 34/KEP/2022 tentang Pembentukan Forum Satu data Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang didalamnya juga membentuk Simpul Jaringan DIY. Forum ini memiliki tugas umum untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyusun daftar data dan rencana aksi serta menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Pembangunan Daerah DIY yang meliputi penyelenggaraan data statistik dan geospasial. Selanjutnya, telah terbit Keputusan Gubernur Nomor 262/KEP/2022 tentang Penunjukan Unit Penyelenggara Jaringan Informasi Geospasial Nasional di DIY, yang terdiri Koordinator, Unit Produksi, Unit Pengelolaan dan Unit Penyebarluasan Informasi Geospasial.

Selain itu, DIY telah menyusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia DIY tahun 2022-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY nomor 251/KEP/2022, yang merupakan pedoman penyelenggaraan Satu Data Indonesia DIY tahun 2022-2024. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Statistik merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Tugas dan Fungsi Urusan Statistik adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis serta pelayanan data dan informasi pembangunan daerah yang berupa data geospasial dan data non geospasial.

Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah (BPPSD) sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY melaksanakan program dan kegiatan urusan Statistik, Penelitian dan Pengembangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diubah dengan ketentuan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 118 tahun 2022 tentang tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi statistik tersebut UPT BPPSD Bappeda DIY telah memiliki *tool* dalam pengelolaan data berupa Aplikasi Dataku untuk data statistik (non spasial) dan Aplikasi Geoportal untuk data spasial, serta mengembangkan pengelolaan data dan informasi menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan satu basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, lengkap dan terintegrasi, serta untuk menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, telah dilakukan koordinasi, kerja sama, dan sinkronisasi yang sinergis antara instansi penyedia data baik instansi vertikal di daerah, Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, dan stakeholders penyedia data lainnya. Hal tersebut harus diimbangi dengan pengembangan instrumen yang memadai sebagai sarana bagi pengumpulan dan penyajian data yang akurat dan terpercaya.

Portal Satu Data Pembangunan Daerah DIY merupakan portal resmi data terbuka tingkat daerah yang dikelola oleh Bappeda DIY, dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Portal Satu Data Pembangunan Daerah DIY, merupakan wujud upaya dalam memperbaiki tata kelola data, manajemen data dan kualitas data dalam konteks perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional. Penyebarluasan data melalui sistem informasi pada tingkat provinsi dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia, aplikasi Dataku dan Geoportal DIY.

Dataku dan Geoportal DIY dikelola secara online oleh seluruh Perangkat Daerah (OPD DIY) dan instansi vertikal di DIY serta Kabupaten/Kota sebagai sumber data sekunder. Masing-masing Perangkat Daerah dan instansi memiliki *Person in Charge* yang kemudian disebut dengan Tim Satu Data Pembangunan Daerah dan bertanggung jawab terhadap validitas dan ketersediaan data pada variabel tertentu. Tim Satu Data Pembangunan Daerah memiliki kemampuan personil yang cekatan dalam updating data dan dapat mempublikasikan data secara akurat. Setiap OPD, instansi, dan kabupaten/kota memiliki user dan password dan wajib melakukan input data secara online pada aplikasi Dataku dan Geoportal DIY sesuai dengan periodisasi dan kelompok yang menjadi tanggung jawabnya. Dataku dapat diakses pada alamat <http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/>.

Gambaran umum tentang penyediaan data statistik telah dituangkan dalam *Standard Operating Procedure (SOP)* Aplikasi Dataku Nomor: 557/11996 tanggal

15 Juni 2021 dan telah diperbarui dengan SOP Nomor: 050/16219 tanggal 12 September 2022 yang ruang lingkupnya meliputi: Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Verifikasi dan Validasi Data, Penyimpanan dan Penyebarluasan Data, Penambahan Elemen Data, Penghapusan Elemen Data dan Integrasi Data

Tabel 2-112 Penyediaan Data Statistik Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Sektor/Bidang Urusan	47
2	Cakupan Tahun/Series	2009-2023
3	Jumlah Elemen Data	7503
4	Produsen Data/Sumber Data/Instansi yang Terlibat	50
5	Jumlah Pengakses Data di Aplikasi Dataku Tahun 2023	376.663
6	Jumlah Pengguna Data di Aplikasi Dataku Tahun 2023	281.183
7	Jumlah total hits Aplikasi Dataku	807.556

Sumber: BPPSD DIY, 2024

Geoportal DIY adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemda DIY dalam penyelenggaraan tata kelola data geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah. Geoportal DIY dapat diakses pada alamat <http://geoportal.jogjaprovo.go.id/>.

Sebagai upaya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis sistem informasi geografis dalam inventarisasi dan pengelolaan sumber daya wilayah, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku pembina data geospasial dengan Nota Kesepakatan Nomor 1.1/KA-BIG/HK.01.03/9/2022 dan Nomor 119/15301/2022 tentang Penyelenggaraan, dan Pengembangan data dan Informasi Geospasial di DIY. Disamping itu juga bekerja sama dengan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di DIY yang memiliki fakultas atau jurusan kebumihutan. Diantaranya menyusun Rencana kerja dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (PPIDS) yang telah ditetapkan pada tanggal 28 September 2022, dengan nomor 119/02937/2022 dan Nomor 902809/UN1/FTK/LKFT/HK/2022 tentang Penyelenggaraan, dan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial di DIY. Pemenuhan kebutuhan SDM disesuaikan dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang Informasi Geospasial (IG) Pasal 2 Ayat 3, Tenaga

2-228

Profesional yang Tersertifikasi di Bidang IG terdiri atas Geografer, Surveyor, Tenaga Ahli Bidang IG, dan Tenaga Terampil Bidang IG.

Dalam hal teknologi dalam rangka berbagi pakai data geospasial, DIY telah menerapkan geoportal yang dikembangkan dengan *platform open source* yaitu *Geonode*. Dalam berbagai data dilakukan menggunakan *services* yang disediakan oleh geoportal tersebut diantaranya *Web Map Service (WMS)*, *Web Feature Service (WFS)* dan *Catalogue Services for Web (CSW)*. WMS dan WFS berkaitan pada berbagi pakai data dalam bentuk layanan dimana WMS data peta diberikan dalam bentuk image sementara pada WFS data peta diberikan dalam bentuk feature sehingga masih dapat dikelola lagi. Disediakan CSW memungkinkan katalog data yang terdapat pada Geoportal DIY dapat dikoneksikan dan dibaca oleh Geoportal Pusat/ Ina-Geoportal dan dimonitor oleh BIG melalui sistem monitoring geoportal Simojang.

Kondisi eksisting Aplikasi Geoportal saat ini cukup optimal. Namun demikian effort menuju kondisi yang optimal selalu diupayakan dengan cara perluasan jangkauan kompilasi data geospasial dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh OPD Pemda DIY untuk berkontribusi membangun data geospasial tematik sesuai tugas dan fungsi OPD masing masing, dengan meningkatkan literasi geospasial dikalangan ASN pada umumnya agar pemahaman tentang geospasial dan tentang kebutuhan data geospasial menjadi lebih baik. Kompilasi data geospasial dilaksanakan dengan kegiatan desk OPD untuk mengupayakan terwujudnya produsen data tunggal untuk sebuah data geospasial dengan tema/sub tema tertentu dan skala tertentu. Untuk meningkatkan akurasi dalam pengelolaan data geospasial tersebut diperlukan standar yang ditetapkan bersama. Desk data geospasial menghasilkan sekitar 150 tema data dengan konten unsur lokasi di dalamnya dan berpotensi dikembangkan menjadi data geospasial. Geoportal DIY saat ini berisi 55 tema data geospasial dan terus akan dikembangkan. Sebagian besar berupa data pendukung penyusunan rencana tata ruang serta data geospasial dasar.

Terkait dengan pemanfaatan data geospasial, JIGD DIY juga telah memanfaatkan data penginderaan jauh sebagai sumber data, utamanya data penginderaan jauh sistem satelit yang berupa data digital hasil perekaman sensor satelit penginderaan jauh dari berbagai jenis sensor satelit. Perolehan data digital penginderaan jauh satelit di JIGD DIY melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Nasional Citra Satelit Penginderaan Jauh yang merupakan *event* rutin tahunan yang diselenggarakan oleh PUSTEKDATA LAPAN (sekarang tergabung dalam PUSDATIN BRIN). Dalam rakornas citra satelit tersebut terdapat

mekanisme identifikasi kebutuhan data digital citra satelit di daerah. Sejak tahun 2019 JIGD DIY selalu mengajukan form kebutuhan data digital citra satelit yang meliputi beberapa jenis sensor, meliputi sensor optik baik itu multispektral dan pankromatik yaitu LANDSAT TM, MODIS, SPOT MS, PLEIADES, dan juga jenis sensor radar seperti TERRA SAR. Dewasa ini yang paling sering dicari pemanfaat adalah data citra resolusi sangat tinggi (CRST) seperti citra satelit PLEIADES yang memiliki resolusi spasial 2m untuk sensor multispektral dan 0.5 meter untuk sensor pankromatik. Pemanfaatan data digital citra satelit resolusi sangat tinggi ini biasanya digunakan sebagai bahan penyusunan peta dasar skala detil untuk penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan juga untuk mengidentifikasi perubahan pemanfaatan lahan, dalam rangka monitoring kesesuaian pemanfaatan ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Zonasi Ruang yang berlaku.

2.1.3.2.15 Urusan Persandian

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah, bahwa Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah DIY pada Tahun 2023 meliputi penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dengan kegiatan meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi;
2. Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi;
3. Pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan Informasi Non-Elektronik;
4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi; dan
5. Melakukan pembinaan penyelenggaraan persandian ke kabupaten/kota se-DIY dan anggota Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (FORKOMSANDA) dalam hal Pemda DIY sebagai wakil pemerintah pusat.

Disamping itu, dalam rangka penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, Pada Tahun 2023 Di Pemerintah Daerah DIY telah digelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 82/KEP/2022 tentang Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY. JKS yang terbentuk meliputi:

1. JKS Pemerintah Pusat dengan Pemda DIY (difasilitasi Kemendagri dan BSSN);
2. JKS Pemerintah Daerah Provinsi se-Indonesia (difasilitasi Kemendagri dan BSSN);
3. JKS Pemerintah Daerah DIY dengan Kabupaten/Kota se-DIY (difasilitasi Kemendagri dan BSSN);
4. JKS Komunikasi Internal Pemerintah Daerah DIY;
5. JKS Internal Perangkat Daerah (OPD se-DIY);
6. JKS Pimpinan A (Gubernur/Wakil Gubernur dengan TAPD);
7. JKS Pimpinan B (Gubernur/Wakil Gubernur dengan Ka-OPD)
8. JKS Pimpinan C (antar Kepala OPD)
9. JKS Pengamanan VIP

Untuk mewadahi personil sandi di DIY dan Jawa Tengah, telah dibentuk Forum Komunikasi Sandi (Forkomsanda Jateng DIY). Khusus Forkomsanda DIY secara rutin melaksanakan pertemuan setiap 3 bulan sekali untuk membahas segala permasalahan persandian yang ada, sedangkan untuk tempat pelaksanaan dilaksanakan secara bergiliran. Namun disayangkan, pelaksanaan operasional persandian pada Pemerintah DIY sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Jumlah kasus/insiden peretasan sistem informasi milik Pemerintah Daerah DIY (Pemda DIY) pada tahun 2020 sebanyak 10 insiden dan naik menjadi 13 insiden pada tahun 2021 dan 26 insiden pada tahun 2022. Jumlah kasus/insiden pada sistem informasi milik Pemda DIY naik drastis menjadi 190 insiden pada tahun 2023. Kenaikan jumlah kasus/insiden peretasan pada sistem informasi milik Pemda DIY yang cukup drastis ini perlu perhatian lebih lanjut.

Tabel 2-113 Jumlah Kasus/Insiden Peretasan pada Sistem Informasi Milik Pemda DIY

Tahun	Jumlah Peretasan
2017	10 insiden
2018	13 insiden
2019	12 insiden
2020	10 insiden
2021	13 insiden
2022	26 insiden

Tahun	Jumlah Peretasan
2023	190 insiden

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2024

2.1.3.2.16 Urusan Kebudayaan

Kemajuan peradaban sangat terkait dengan aset kebudayaan yang dimiliki masyarakat dan bagaimana upaya untuk memelihara dan mengembangkannya. DIY telah menunjukkan upaya tersebut dengan komitmen untuk menjadikan kebudayaan sebagai payung dan arus utama dalam pembangunan di segala bidang.

Sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia, DIY memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika mulai membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang merdeka. Nilai-nilai adiluhung seperti Hamemayu Hayuning Bawana, Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi, Golong Gilig, serta sifat-sifat satriya yang berpegang pada etos Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh telah terwujud dalam kehidupan masyarakat maupun penataan ruang wilayah yang kini dikenal sebagai DIY.

Kebudayaan sebagai mainstream di segala bidang telah menjadi *spirit* pembangunan di DIY terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Dengan ditetapkan Undang-undang tersebut maka Pemda DIY berkewajiban melaksanakan kewenangan aspek kebudayaan dalam rangka melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, perilaku dan tradisi luhur yang mengakar dalam kehidupan masyarakat DIY. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, sejumlah kemajuan kebudayaan baik yang sifatnya kebendaan maupun bukan kebendaan di berbagai sektor telah dihasilkan.

Tabel 2-114 Perkembangan Budaya di DIY Tahun 2019-2023

Aspek	Tahun					Satuan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Group kesenian	8.826	8.826	8.826	8.826	388*	Grup
Jumlah Gedung kesenian	107	107	107	107	107	Unit
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	347	332	513	503	269	Kali

Aspek	Tahun					Satuan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah desa mandiri budaya (desa/2-233ampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima)	5	10	18	25	32	Desa
Jumlah peristiwa sejarah yang diarsipkan	144	206	262	262	262	arsip
Jenis Makanan Tradisional	276	276	276	276	276	jenis
Jenis Busana Tradisional	38	38	38	38	38	jenis
Lembaga Budaya	186	186	186	186	186	lembaga
Motif Batik	235	235	235	235	235	motif
Motif Lurik	64	66	66	66	66	motif

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Memperhatikan perkembangan kebudayaan di DIY, selama kurun waktu 2019 hingga 2023 terdapat beberapa data yang perubahannya cukup signifikan terutama di tahun 2023. Misalnya untuk jumlah group kesenian data yang tersedia semula pada tahun 2019 adalah 8.826 grup namun pada tahun 2023 menjadi 388. Perbedaan signifikan data jumlah grup kesenian disebabkan sistem validasi data yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap kelompok, organisasi, maupun sanggar seni/budaya yang tercatat sudah memiliki Nomor Induk Kebudayaan (NIK) serta masih aktif berkegiatan. Data jumlah grup kesenian akan masih bertambah mengingat proses validasi masih terus berjalan. Selain kelompok kesenian dan gedung kesenian, perkembangan pembangunan budaya DIY dapat ditunjukkan dari banyaknya penyelenggaraan *event* festival seni dan budaya walaupun cenderung mengalami penurunan. Banyaknya *event* yang terselenggara diharapkan akan mengangkat perekonomian masyarakat DIY dan menunjang pariwisata di DIY.

Dilihat dari fase-fase perjalanan peradaban di DIY, sumber sejarah dibedakan dalam periode prasejarah, Mataram Kuno, Mataram Islam, Kasultanan Yogyakarta, Kolonial, dan Pasca Kemerdekaan (Kontemporer). Setiap fase peradaban meninggalkan simbol-simbol eksistensi sebagai warisan budaya benda dan cagar budaya yang beragam dan tentunya harus dilindungi dan dilestarikan.

Kepeloporan DIY dalam penyusunan kebijakan pelestarian cagar budaya dapat dilihat dari telah dijabarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ke dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Upaya pelestarian cagar budaya di DIY diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

2-233

2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah, Peraturan Gubernur DIY Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, Peraturan Gubernur DIY Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Pelestarian kawasan cagar budaya ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2013 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Jumlah aset peninggalan sejarah di DIY dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2-115 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, Tahun 2019-2023

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Benda Cagar Budaya yang dilestarikan	1.685	1.687	1.687	342	342*	Buah
Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	17	17	17	11	11	Kawasan
Situs budaya yang dilestarikan	343	343	343	72	74	Situs
Museum Sejarah	48	48	48	48	48	Buah
Monumen sejarah	89	89	89	89	89	Buah
Jumlah peristiwa sejarah yang diarsipkan	144	206	262	262	263	arsip

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Catatan: *) Perbedaan data jumlah cagar budaya (benda, situs, dan kawasan) dikarenakan semenjak tahun 2022 data yang dicantumkan adalah khusus untuk data cagar budaya yang berada pada tingkatan provinsi saja, dan tidak lagi mencakup cagar budaya tingkat kabupaten/kota.

Runtutan masa dari prasejarah, Hindu, Budha, Islam, Cina, masa kolonialisme Belanda dan Inggris hingga kemerdekaan meninggalkan cagar budaya yang beragam dengan karakteristik cagar budaya masing-masing. Saat ini tersedia sarana kebutuhan sehari-hari manusia yang ditinggalkan para leluhur. Contohnya : istana, masjid, gereja, candi, vihara, pabrik, perguruan tinggi, taman pendidikan. Kemunculan bangunan baru di dalam Kawasan Cagar Budaya mempunyai segi yang bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif karena merupakan fasilitas

pelengkap yang penting bagi perekonomian dan pariwisata, bersifat negatif jika kemunculannya tidak terkendali.

Pengelolaan budaya benda dan tak benda merupakan hal yang sangat penting, sehingga jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi mencerminkan pelestarian dan pengelolaan di DIY. Upaya Pemda DIY dalam mendapatkan apresiasi budaya benda dan budaya tak benda DIY dilakukan melalui: perlindungan (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi), pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Meskipun demikian, capaian sangat bergantung dengan kebijakan pemerintah pusat maupun lembaga Internasional (UNESCO) dalam melakukan penetapan Budaya Benda maupun Tak Benda. Perkembangan jumlah warisan budaya DIY yang diakui sebagai kekayaan budaya baik nasional maupun internasional pada periode 2017 hingga 2022 menunjukkan peningkatan dan pada tahun 2022 sudah terdapat total 337 warisan budaya yang sudah diapresiasi baik pada skala nasional maupun internasional.

Tabel 2-116 Jumlah Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	179	208	244	274	300	337

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2022

2.1.3.2.17 Urusan Perpustakaan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan dasar penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia yaitu perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Sementara itu pasal 7 ayat 1b menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Sebagai sebuah sistem pengelolaan dokumentasi dan rekaman atas berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan manusia, perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perpustakaan tidak lagi terbatas menghimpun dan mengelola hasil karya manusia, namun keberadaannya menjadi pusat sumber daya pengetahuan

2-235

yang dinamis. Perpustakaan merupakan pintu gerbang pengetahuan, menyediakan kebutuhan dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan kebebasan dan budaya bagi individu maupun kelompok.

Menurut hasil penelitian UNESCO, indeks minat baca masyarakat di Indonesia baru mencapai 0,001 (artinya setiap 1000 penduduk hanya ada satu orang yang berminat membaca). Berdasarkan World Bank dan *International Association for the Evaluation of Education Achievement*, skor membaca Indonesia terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Hasil penelitian BPAD menyatakan bahwa indeks minat baca DIY berada di atas rata-rata nasional, tetapi masih rendah, hanya mencapai 0,049 atau setiap 1000 penduduk DIY hanya 49 yang berminat membaca. Padahal banyak negara yang membuktikan keberhasilan pelestarian peradaban bangsanya adalah melalui pembangunan perpustakaan dan tradisi membaca yang kuat yang didukung masyarakat bibliofil (masyarakat yang sangat suka membaca, menikmati dan mengapresiasi buku, menjadikan buku sebagai *way of life* dan aset negara).

Salah satu wahana dan media pembelajaran yang dimiliki oleh bangsa ini untuk mewujudkan impiannya menjadi bangsa *bibliofil* adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan dapat menjadi *icon* peradaban baru dan *Renaissance* Yogyakarta. Pembangunan perpustakaan juga dijiwai oleh amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.

Upaya meningkatkan budaya baca masyarakat DIY didukung oleh perpustakaan pemerintah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan komunitas, dan lainnya. Pemerintah DIY memiliki sejumlah perpustakaan yang keberadaannya menyebar, seperti unit perkantoran Jalan Tentara Rakyat Mataram 29, perpustakaan unit Grhatama Pustaka Jl. Janti Banguntapan Bantul, perpustakaan unit Malioboro yang mengutamakan koleksi humaniora, dan Rumah Belajar Modern Sewon, Banguharjo, Bantul.

Perkembangan minat baca masyarakat terutama yang menjangkau hingga pedesaan DIY didukung oleh peningkatan perpustakaan desa. Perpustakaan desa menjadi wahana belajar masyarakat. Di DIY sejak tahun 2015 setiap desa/kelurahan telah memiliki perpustakaan desa/kelurahan dan telah

menerima bantuan sarana prasarana perpustakaan dalam bentuk buku, rak buku dan computer melalui hibah Pemda DIY.

Tabel 2-117 Jumlah Perpustakaan Desa Tiap Kabupaten Kota Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Kulon Progo	88	88	88	88
Kabupaten Bantul	75	75	75	75
Kabupaten Gunungkidul	148	148	148	148
Kabupaten Sleman	86	86	86	86
Kota Yogyakarta	45	45	45	45

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Kunjungan masyarakat ke perpustakaan dinilai semakin meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Koleksi perpustakaan pun semakinberagam dan memiliki keunikan.

Tabel 2-118 Jumlah Pustakawan DIY Tahun 2019 s.d. 2023

Kabupaten /Kota	Tahun					Satuan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Pustakawan DIY	66	65	70	90	93	Orang
Jumlah Pustakawan Kabupaten/Kota	54	54	54	70	77	Orang
Kabupaten Kulon Progo	11	11	11	12	12	Orang
Kabupaten Bantul	12	13	13	16	15	Orang
Kabupaten Gunungkidul	8	8	8	10	9	Orang
Kabupaten Sleman	8	7	7	13	15	Orang
Kota Yogyakarta	15	15	15	27	26	Orang

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Tabel 2-119 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2019-2023

Sub Elemen	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	3.001.428	1.601.069	2.132.858	2.521.812	2.129.481
Jumlah pengunjung perpustakaan					

Sub Elemen	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pemda DIY	793.695	566.226	892.446	995.492	248.873
Kabupaten Kulon Progo	341.944	152.919	214.541	176.997	180.902
Kabupaten Bantul	365.381	198.112	240.224	198.185	1.412.776
Kabupaten Gunungkidul	361.799	175.899	198.872	164.069	127.106
Kabupaten Sleman	598.961	231.492	293.542	242.172	154.654
Kota Yogyakarta	539.648	276.421	293.233	241.918	193.899
Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	3.196.500	3.220.511	3.265.200	3.265.200	3.514.577

Sumber: *Dataku Bappeda DIY & DPAD DIY, 2024*

Pembangunan perpustakaan di DIY telah berhasil melestarikan pustaka lama sehinggamampu menerobos zaman modernisasi dan komputerisasi. Hingga 2023, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah DIY sebagai berikut.

Tabel 2-120 Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah

Sub Elemen	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di Perpustakaan daerah	245.350	252.017	257.132	225.584	246.826	256.998
Jumlah koleksi eksemplar buku yg tersedia di Perpustakaan	350.930	359.444	359.691	357.510	384.671	411.211

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2024*

Layanan-layanan unggulan perpustakaan DIY yang lainnya antara lain adalah *Jogja Library for All (JLA)* yang memadukan konsep perpustakaan, kearsipan dan permuseuman untuk koleksi pustaka dan arsip, *Center of Excellence, Kyoto Corner*, *Yogyasiana*, *Pustaka Nusantara*. Pengelolaan pustaka di DIY sudah menunjukkan inovasi teknologi melalui pelayanan pustaka dari manual ke digital, *Radio Frequency Identification (RFID)*, *Jogja Library for All*, *Jogja Mobile Library*, *Webgis*, *Layanan Surat Kabar dan Pustaka Digital* serta yang terbaru adalah *iJogja* yaitu perpustakaan digital yang dapat diakses melalui *smart phone/PC*. Otomasi pelayanan perpustakaan sudah dikembangkan secara bertahap.

Jogja Mobile Library adalah aplikasi khusus yang dibuat untuk semakin memudahkan kita mendapatkan informasi buku perpustakaan di wilayah DIY. Aplikasi ini selain untuk mencari informasi buku yang sedang di cari di perpustakaan, bisa juga untuk mencari *update* informasi buku baru di perpustakaan favorit yang ada DIY.

Layanan *Center of Excellence* Budaya Jawa menyediakan layanan perpustakaan dan informasi yang merepresentasikan khazanah pustaka budaya se-Jawa, tidak hanya dari Yogyakarta. Koleksi berupa buku dan audiovisual yang hanya dinikmati di tempat. Kegiatan- kegiatan yang mendukung layanan *Center of Excellence* ini antara lain adalah diskusi tentang kebudayaan Jawa, macapat dan bedah pustaka langka. Juga pengalihan huruf dan pengalihan bahasa terhadap buku-buku yang berhuruf dan berbahasa Jawa. Selain itu ada layanan pustaka Nusantara yang menyajikan koleksi buku, majalah, audio visual tentang budaya dan daerah wisata dari beberapa provinsi di Indonesia.

Aplikasi iJogja diharapkan akan mempopulerkan sistem peminjaman perpustakaan digital di DIY. Aplikasi ini dibuat agar dapat meningkatkan kecepatan dan kepraktisan dalam layanan perpustakaan khususnya perpustakaan digital. Dengan adanya aplikasi ini maka untuk meminjam buku tidak memerlukan pelayanan petugas untuk mengambilkan buku dan menerima pengembaliannya karena sudah dibatasi jangka waktu peminjamannya. Kemudian juga memperluas jangkauan layanan aksesibilitas layanan perpustakaan yang tidak terbatas pada ruang dan waktu karena dilakukan secara *online* internet, sampai akhir tahun 2016 koleksi digital yang dapat dipinjam yaitu 2.232 koleksi.

Jogja Library Center yang berdiri pada masa revolusi kemerdekaan merupakan cikal bakal perpustakaan negara dan menyimpan koleksi-koleksi Yogyakarta yang berupa dokumen yang bernilai sejarah. JLC melayani audiovisual baik film, *Compact Disc*, *VCD*, radio dan televisi. Layanan surat kabar dan majalah yang terbit tempo dulu hingga kontemporer tersedia di JLC Malioboro ini. Selain itu, bangunan JLC merupakan juga peninggalan bersejarah (*heritage*). Lingkungan yang mendukung minat baca dengan ruang berlantai kayu yang sejuk, koneksi internet dan *wifi area*, mini theater atau ruang audio visual, dan ruang diskusi. Sudut-sudut layanan yang ada di JLC antara lain adalah *Center of Excellent*, *Kyoto Corner* yaitu bentuk kerja sama dalam penyediaan layanan pustaka dilakukan antara Pemda DIY dan Prefektur Kyoto adalah *Kyoto Corner* (Kedai Buku Kyoto) yang memiliki koleksi 481 judul, 581 eksemplar, kemudian juga ada Layanan Surat Kabar dan Pustaka Digital.

Rumah Belajar Modern Sewon ini merupakan proyek percontohan di DIY yang nantinya akan dikembangkan pula di Kabupaten/Kota di DIY. Fasilitas yang ada di Rumah Belajar Modern Sewon antara lain, perpustakaan anak yang sangat lengkap, arena permainan anak yang lengkap pula setelah anak membaca buku mereka bisa bermain di arena permainan atau bermain games maupun berinternet, perpustakaan keluarga, ruang kreativitas bagi masyarakat umum yang mana masyarakat membaca sekaligus mengaplikasikan kandungan bacaan seperti menyulam, merajut, membatik dan memasak, membuat hantaran pengantin dan souvenir. Selain itu disediakan juga ruang aula, arena olahraga, ruang pertunjukan,ceramah.

Gedung perpustakaan Grhatama Pustaka menyediakan layanan perpustakaan yang sudah berdiri megah di pusat perkotaan Jogja Expo Center. Tantangan ke depan dalam pengembangan perpustakaan di DIY adalah menjadi Ibu Kota Buku Dunia. Setiap tahun UNESCO dan tiga penerbit buku raksasa *the International Publishers Association (IPA)*, *the International Booksellers Federation (IBF)*, *the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)* menetapkan ibu kota buku dunia untuk kurun masa 12 bulan antara dua perayaan yaitu hari buku Internasional dan hari Hak Cipta Internasional (23 April). Proses menuju Ibukota Buku di dunia perlu dimulai sejak sekarang dengan menggalang dukungan kerja sama dari pemerintah kabupaten/kota, penerbit, penulis, perpustakaan, dunia pendidikan, dunia kebudayaan, masyarakat, dan lainnya.

2.1.3.2.18 Urusan Kearsipan

Potensi kearsipan di DIY dipengaruhi oleh sejarah panjang DIY baik sebagai provinsi maupun sebagai kerajaan. Keistimewaan DIY perlu dikuatkan melalui strategi pengelolaan arsip yang optimal. Bukti-bukti otentik perjalanan peradaban DIY terkandung di dalam arsip. Banyak pihak bertanggung jawab atas penyelamatan arsip.

Tabel 2-121 Data Kearsipan DIY Hingga Tahun 2023

Sub Elemen	Tahun						Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Pengelolaan arsip secara baku	36	39	48	48	48	86	Unit
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	5	5	4	5	5	5	Kegiatan
Jumlah Arsiparis	91	84	93	102	102	95	Orang

Sub Elemen	Tahun						Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Arsip yang dimanfaatkan	5.500	6.605	9.370	19.439	8.965	8.047	Berkas
Jumlah pengunjung layanan Arsip Statis	81.145	82.177	36.292	4.717	24.238	22.530	Orang

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

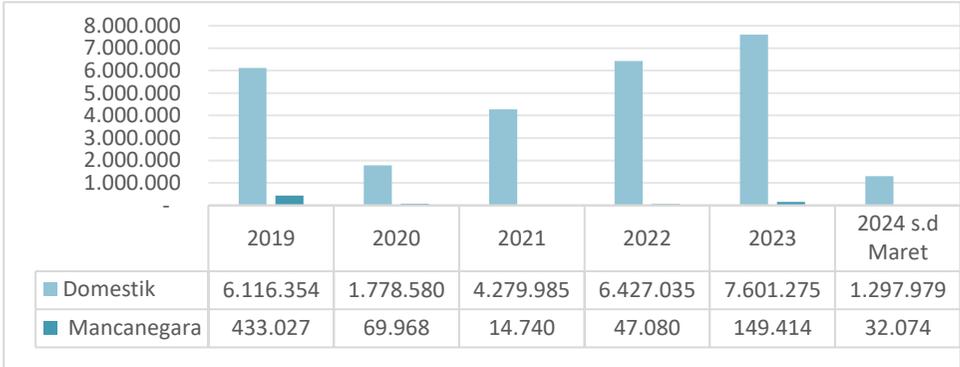
DIY telah mengembangkan aplikasi sistem informasi kearsipan statis (SIKS) dan aplikasi sistem informasi daftar katalog khasanah arsip statis (SIDKKAS). Sistem ini dapat diibaratkan pameran virtual kearsipan DIY yang merupakan mozaik peradaban DIY dari masa ke masa untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai kaedah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Urusan Pariwisata

Dalam kurun waktu tahun 2019-2024, dinamika sektor pariwisata bergerak sangat dinamis. Pada tahun 2020 pariwisata DIY mengalami penurunan drastis dalam jumlah kunjungan wisatawan ke DIY, baik dari domestik maupun mancanegara yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Kunjungan wisatawan domestik ke DIY hanya mencapai 1.778.580 kunjungan, sementara kunjungan wisatawan asing hanya mencapai 69.968 kunjungan, Tahun 2019 saat kondisi normal jumlah wisatawan di DIY mencapai 6.11.354 orang untuk wisatawan domestik dan 433.027 untuk wisatawan mancanegara. Meski terjadi penurunan drastis, pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah wisatawan domestik ke DIY yaitu sebanyak 4.279.985 kunjungan, meskipun untuk kunjungan wisatawan mancanegara masih rendah hanya mencapai 14.740 kunjungan. Di tahun 2022, geliat sektor pariwisata DIY berangsur-angsur mulai pulih yang ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang mencapai 47.080 wisatawan, sementara wisatawan domestik mencapai 6.427.035 wisatawan. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan domestik dengan jumlah 7.601.275 orang sedangkan untuk wisatawan mancanegara berjumlah 149.414 orang, jumlah kunjungan tersebut mampu melampaui jumlah pada tahun-tahun sebelumnya.

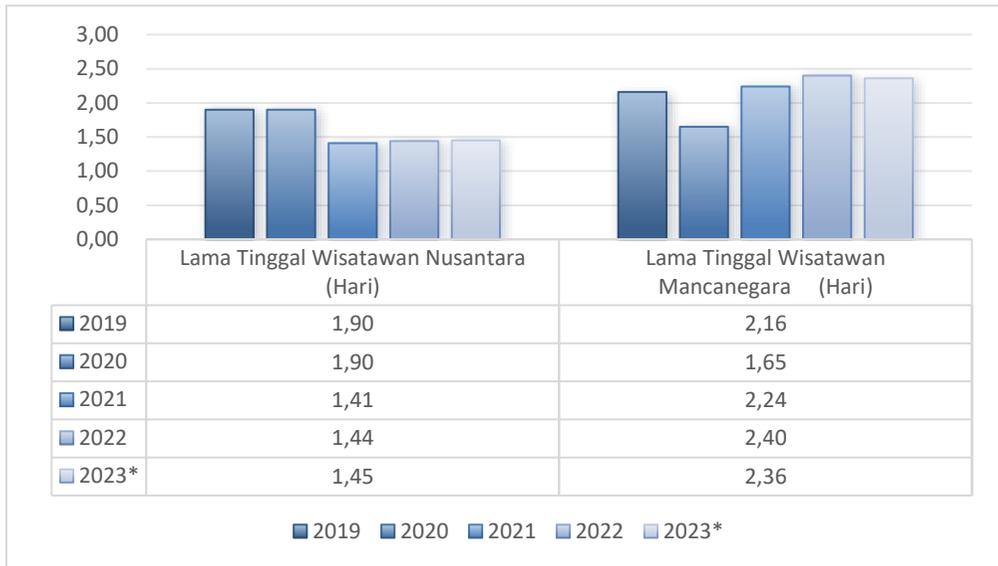
Dengan bangkitnya sektor pariwisata di DIY, pada awal tahun 2024 sampai dengan bulan Maret ini untuk jumlah kunjungan wisatawan domestik telah mencapai 1.297.979 orang dan untuk wisatawan mancanegara berjumlah 32.074 orang. Dilihat dari angka tersebut dalam kurun waktu triwulan pertama ini jumlah yang tercatat memberi kesan optimis akan adanya kenaikan jumlah kunjungan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2024 (diolah)

Gambar 2-62 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2019-2024 (Orang)

Bersamaan dengan meningkatnya jumlah wisatawan ke Yogyakarta dimana DIY masih menjadi Destinasi favorit kedua oleh berbagai kalangan wisatawan untuk dijadikan daerah tujuan wisata selain Bali, beragamnya objek wisata di DIY baik wisata alam, wisata buatan maupun wisata minat khusus telah berhasil mempengaruhi lama tinggal wisatawan di DIY. Penyelenggaraan berbagai jenis event dan festival dalam bidang musik, olahraga, kuliner, kebudayaan dan lain sebagainya telah dilakukan serta kajian-kajian berkaitan dengan pariwisata telah dirancang sebagai contoh terkait *Wellness Tourism* sebagaimana yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa DIY menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan pariwisata unggulan dan tujuan wisata alternatif selain Bali dan Solo terkait Tema Pembangunan Pariwisata dalam hal ini *Wellness Tourism*. Berbagai upaya dilakukan guna mencapai target lama tinggal (*Length of Stay*) wisatawan di DIY di DIY.



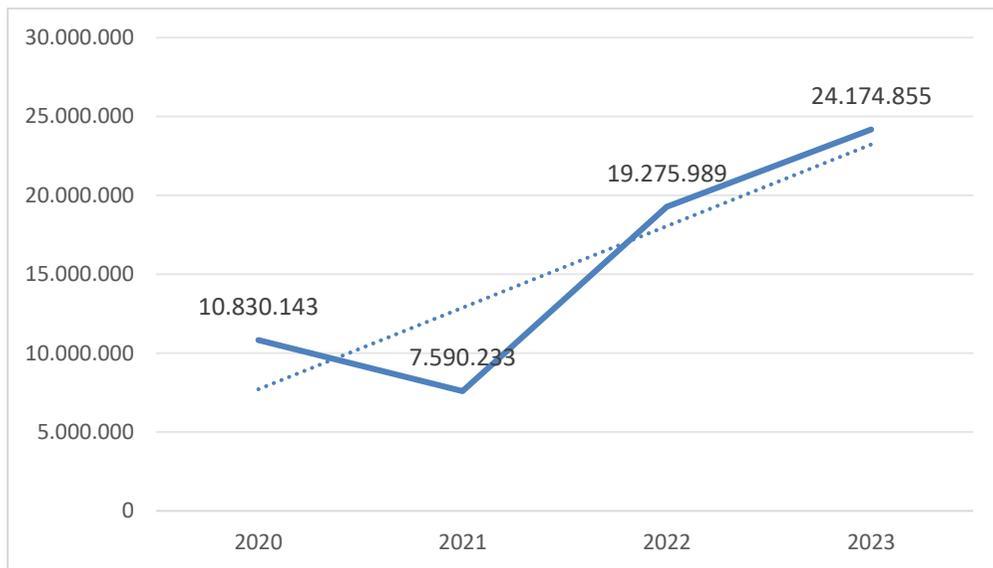
Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2024

Keterangan *sementara

Gambar 2-63 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan di DIY Tahun 2020-2023 (Orang)

Perkembangan lama tinggal wisatawan mancanegara pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,40 hari dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 2,24 hari, pada tahun 2023 capaian lama tinggal wisatawan tercatat sementara sebesar 2,36 hari. Sedangkan untuk lama tinggal wisatawan nusantara mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 1,41 hari dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 1,65 hari, namun pada tahun 2022 lama tinggal wisatawan nusantara mulai mengalami kenaikan menjadi 1,44 hari dan pada tahun 2023 naik menjadi 1,45 hari.

Sampai dengan tahun 2023, kunjungan wisatawan di Objek dan Daerah Tujuan Wisata (ODTW) mengalami peningkatan yang signifikan. Pulihnya sektor pariwisata di DIY dengan berbagai jenis suguhan wisata di dalamnya yang mana pemerintah telah mengupayakan berbagai program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan kondisi pasca Pandemi Covid-19 dengan mengedepankan program *Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability* (CHSE) dengan mempersiapkan kemampuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menerapkan prinsip-prinsip kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dan terus berprinsip pada pariwisata berkelanjutan.



Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2024

Gambar 2-64 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan di ODTW DIY Tahun 2020-2023 (Orang)

Pada tahun 2023, Jumlah Kunjungan Wisatawan di ODTW mengalami kenaikan sebanyak 24.174.855 orang dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2022 sebanyak 19.275.989 orang. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum pariwisata dapat pulih, pada tahun 2021 Jumlah Kunjungan Wisatawan ODTW mengalami penurunan cukup drastis yaitu hanya sebesar 7.590.233 orang lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebanyak 10.830.143 orang akibat pandemi. Meskipun telah mengalami peningkatan yang baik, pemerintah akan terus berupaya mengembangkan pariwisata di DIY guna ketercapaian target dengan tetap memperhatikan regulasi, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat DIY.

Sektor Ekonomi Kreatif yang saat ini masuk dalam urusan Pariwisata sebagaimana yang ditetapkan oleh Kememnparekraf menjadi komposisi yang baik dimana kepariwisataan dan ekonomi kreatif merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan karena kegiatan pariwisata selalu terkait dengan produk/jasa yang bernilai yang dapat dinikmati atau dibelanjakan oleh wisatawan. Saat ini Potensi ekonomi kreatif DIY belum dioptimalkan dengan baik untuk menghasilkan dampak yang lebih besar dan menjadi sumber keunggulan DIY. Pengembangan pendekatan Ekonomi Kreatif DIY adalah melalui terintegrasinya hulu sampai ke

hilir mencakup aspek kreasi (penciptaan), produksi, distribusi (pemasaran, promosi), konsumsi (pemanfaatan produk ekraf lokal) dan perlindungan (HKI).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyusun kriteria untuk Potensi Ekonomi Kreatif di DIY yang dapat dilihat pada situs <https://katakreatif.kemenparekraf.go.id>. Sektor ekonomi kreatif di DIY tersebar di kabupaten/kota dengan keunggulan dan potensi yang berbeda-beda, berikut ini adalah potensi ekonomi kreatif yang ada di kabupaten/kota di DIY :

- a) Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi unggulan pada sektor Ekonomi Kreatif salah satunya adalah subsektor Seni Pertunjukkan yang telah mendapatkan penghargaan 9 Kabupaten / Kota Kreatif Tahun 2022 dari Kemenparekraf sebagai Kabupaten Kreatif dengan subsektor unggulan Seni Pertunjukan. Namun tidak hanya Seni Pertunjukan saja, masih terdapat dua subsektor unggulan lain yakni kuliner dan kriya.
- b) Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi unggulan pada sub sektor kuliner, salah satu potensi andalannya adalah produk gula semut atau yang lebih dikenal dengan nama *coconut sugar*. Tidak hanya gula semut, salah satu produk unggulan kuliner lainnya adalah dawet sambel yang menjadi kreasi kuliner yang diunggulkan dari Kabupaten Kulon Progo.
- c) Kabupaten Bantul yang memiliki potensi unggulan yaitu sub sektor Kriya yang mendapat penghargaan 9 Kabupaten / Kota Kreatif Tahun 2022 dari Kemenparekraf sebagai Kabupaten Kreatif dengan subsektor unggulan Kriya. Bantul memiliki beberapa sentra kriya yang tersebar di berbagai daerah seperti Sentra Industri Batik Kayu Kreet, Tembi dan Sentra Batik Wukirsari, Sentra Kerajinan Kulit Manding dan Sentra Kerajinan Gerabah Kasongan. Subsektor unggulan Kriya di bantul ini juga berkembang berdampingan dengan potensi lain seperti fesyen, kuliner, dan seni pertunjukan.
- d) Kabupaten Sleman dalam sektor ekonomi kreatif memiliki potensi unggulan pada subsektor film, video dan animasi. Kabupaten Sleman telah melahirkan kreator yang sangat kompeten yang dibuktikan dengan adanya permintaan dari jaringan TV Internasional kepada studio animasi. Film animasi *BATTLE OF SURABAYA (There Is No Glory In War)* merupakan salah satu hasil karya para kreator Kabupaten Sleman bersama dengan Universitas Ilmu Teknologi AMIKOM Yogyakarta.
- e) Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya, dan kota wisata. Didukung oleh masyarakat yang terkenal dengan kreativitasnya

dengan beragam komunitas yang ada di dalamnya dan beragam potensi kreatifnya termasuk industri kreatif digital. Yogyakarta telah menjadi rumah bagi pelaku industri kreatif digital yang menjadikan Kota Yogyakarta memiliki sub sektor unggulan yaitu aplikasi dan gim. Berdirinya Rumah Ekonomi Kreatif Prawirotaman yang menjadi ekosistem bagi para pelaku Ekraf, banyaknya *co-working space* serta tersedianya 17 universitas dan 8 sekolah tinggi yang memiliki jurusan yang linear dengan subsektor aplikasi dan gim tentunya menjadi pendukung bergeraknya sub sektor aplikasi dan gim di Kota Yogyakarta.

Tabel 2-122 Sebaran Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif BISMA di DIY

No	Sub Sektor Ekraf	Jumlah (Presentase)
1	Kuliner	26,65
2	Kriya	10,68
3	Fesyen	14,30
4	TV dan Radio	1,46
5	Penerbitan	1,03
6	Musik	2,30
7	Arsitektur	1,08
8	<i>App dan Games</i>	6,63
9	Periklanan	0,85
10	Fotografi	1,98
11	DKV	3,95
12	Seni Pertunjukan	1,51
13	Desain dan Produk	4,14
14	Seni Rupa	0,99
15	Film, video dan animasi	4,28
16	Desain Interior	1,22
	Sub Sektor Lainnya	14,96

Sumber : Update Data BISMA per 30 Juni 2019

Berdasarkan data statistik pada BISMA (*Bekraf Information System on Mobile Application*) yaitu aplikasi informasi kreatif yang dikembangkan Badan Ekonomi Kreatif (saat ini bergabung menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) untuk memajukan Usaha Kreatif di Indonesia pada Tahun 2019, DIY memiliki 2.126 Pelaku Usaha pada 17 sub sektor Ekonomi Kreatif.

Tabel 2-123 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif di DIY pada Tahun 2018-2022

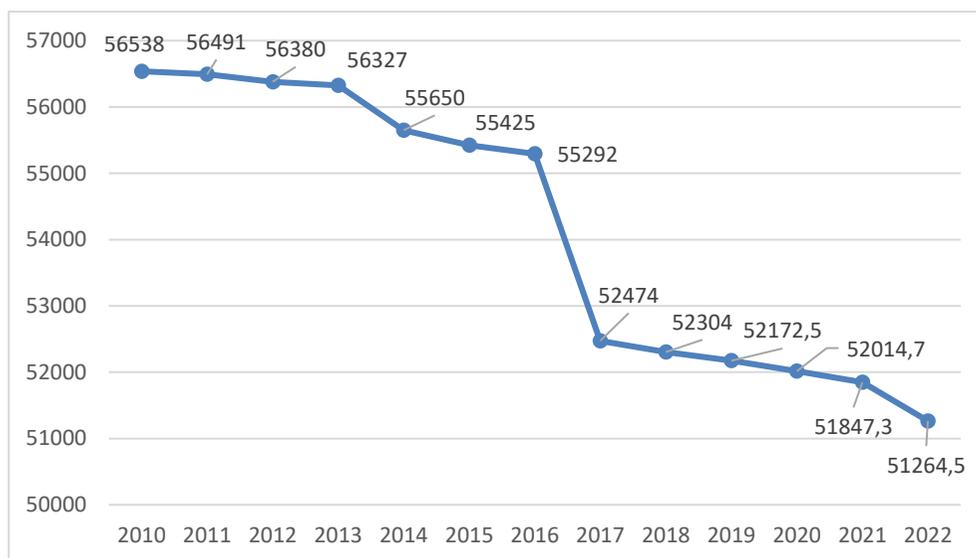
Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
DI Yogyakarta	441,821	476,529	429,851	482,882	547,028
DKI Jakarta	1,006,508	945,921	998,923	1,089,729	1,167,869
Jawa Barat	4,168,861	4,153,055	4,413,407	5,091,580	5,572,995
Jawa Tengah	3,616,999	3,658,732	3,521,605	3,996,946	4,369,878
Jawa Timur	3,068,178	3,060,176	3,203,426	3,524,217	3,863,866
Bali	529,044	575,634	507,094	559,195	619,131

Sumber : Publikasi Statistik Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2018-2022

Menurut Statistik Tenaga Kerja pada sektor Ekonomi Kreatif, Jumlah Tenaga Kerja sektor Ekonomi Kreatif di DIY pada Tahun 2022 sebanyak 547.028 tenaga kerja. Jumlah tersebut terpaut jauh dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Namun, Provinsi Bali dengan keunggulan pariwisatanya pun hanya memiliki 619,131 tenaga kerja ekraf di Tahun 2022. Potensi Ekonomi Kreatif di DIY masih perlu dioptimalkan agar dapat menstimulus masyarakat DIY untuk memiliki minat bekerja pada sektor Ekonomi Kreatif.

2.1.3.3.2 Urusan Pertanian

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan yang terjadi di DIY meningkatkan kebutuhan terhadap lahan, termasuk diantaranya lahan sawah. Alih fungsi lahan terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Perkembangan lahan sawah di DIY dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2011-2023

Gambar 2-65 Perubahan Luas Lahan Sawah di DIY

Pada periode 2010 hingga 2022 terjadi penurunan luas lahan sawah sebesar 5.273,5 ha atau 9,33%. Bila dirata-rata setiap tahun terjadi penurunan sebesar 439,46 ha atau 0,8%. Khusus pada tahun 2017 terjadi penurunan yang sangat besar seluas 2.818 ha dikarenakan beberapa proyek pembangunan yang dilaksanakan pada tahun tersebut, diantaranya pengadaan tanah Bandara Internasional Yogyakarta dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

Sektor pertanian terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Dalam hal ini tanaman pangan, hortikultura dan peternakan menjadi fokus utama dalam sektor pertanian DIY. Komoditas yang berkontribusi paling dominan terhadap produksi tanaman pangan di DIY adalah ubi kayu, padi, jagung dan kacang tanah. Komoditas ubi kayu menyumbang 51,79% dari total produksi tanaman pangan tahun 2023, disusul dengan komoditas padi sebesar 26,12%, jagung sebesar 17,66%, dan kacang tanah sebesar 3,71%. Hampir semua komoditas tanaman pangan mengalami kecenderungan peningkatan produksi pada tahun 2019-2023. Namun pada tahun 2023, komoditas padi sawah mengalami penurunan produksi disebabkan dampak el-nino yang menyebabkan pergeseran musim tanam.

**Tabel 2-124 Tabel Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2019-2023
(ton)**

Komoditas	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023*
Padi Sawah	621.202	653.128	670.059	678.142	656.140
Padi Ladang	189.778	195.013	204.982	206.212	208.766
Jagung	309.221	366.031	358.880	349.465	362.236
Kacang Kedelai	5.041	7.969	8.675	6.956	10.306
Kacang Hijau	226	531	508	614	467
Kacang Tanah	80.682	75.119	78.845	71.421	76.159
Ubi Kayu	778.806	1.073.314	882.073	1.054.322	1.062.333
Ubi Jalar	3.149	2.765	2.717	2.360	3.831

**) Angka Sementara*

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Sub sektor hortikultura terdiri dari tanaman sayuran, tanaman obat/biofarmaka, tanaman buah-buahan, dan tanaman hias. Bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit memiliki nilai ekonomi tinggi dan masuk dalam kelompok komoditas pangan utama karena ketersediaan dan harganya sangat berpengaruh terhadap inflasi dan perekonomian. Produksi komoditas hortikultura unggulan di DIY tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-125 Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2019-2023

No	Komoditas	Produksi (ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023*
1	Cabai besar	32.933	44.521	38.378	1.719	2.423
2	Cabai rawit	10.040	15.052	15.933	15.197	21.427
3	Bawang merah	16.998	18.811	29.809	22.306	33.088
4	Mangga	58.130	29.833	33.456	27.066	10.845
5	Durian	6.265	6.771	9.258	8.849	13.601
6	Pisang	47.554	66.730	68.207	78.045	75.541
7	Salak	41.120	54.996	57.290	54.498	51.838
8	Semangka	8.909	8.909	5.184	8.298	11.940
9	Melon	24.016	22.230	14.550	7.001	10.884
10	Jahe	4.550	4.532	5.121	4.969	4.821
11	Kunyit	3.102	3.085	3.374	3.287	3.539

**) Angka Sementara*

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Komoditas cabai rawit, bawang merah, durian, semangka, pisang, jahe, dan kunyit dalam lima tahun terakhir trend produksinya meningkat. Sementara itu, cabai besar produksinya menurun sangat signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Hal tersebut dimungkinkan disebabkan oleh peralihan budidaya ke komoditas lain.

Subsektor perkebunan merupakan lapangan usaha yang cukup menjanjikan di DIY dikarenakan nilai ekonomisnya yang tinggi. Kontributor utama produksi perkebunan DIY adalah kelapa dikarenakan populasinya yang banyak dan pemeliharaannya relatif mudah. Perkembangan produksi komoditas perkebunan unggulan DIY disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2-126 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2019-2023

No	Komoditas	Produksi (ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023*
1	Kelapa	48.065,92	48.375,90	46.788,00	52.760,76	53,225,62
2	Tebu	9.425,97	11.035,49	11.488,06	6.410,79	6.137,39
3	Kakao	1.792,47	1.893,99	1.990,88	1.900,72	1.820,66
5	Tembakau Rakyat	692,89	744,47	834,56	253,55	253,61
6	Kopi	512,56	514,09	511,79	536,65	534
7	Mete	233,55	262,75	292,06	290,97	280,25
8	Teh	219,01	220,26	225,48	198,12	151,04

* Angka Sementara

Sumber data: Dataku Bappeda DIY, 2024

Komoditas kelapa, kopi, dan mete merupakan 3 komoditas unggulan perkebunan yang mengalami kecenderungan peningkatan produksi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan produksi didukung oleh kegiatan intensifikasi dan penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang dilakukan secara swadaya oleh petani. Pada tahun 2023 dilakukan peremajaan tanaman rusak untuk komoditas kelapa melalui hibah bibit kelapa genjah kopyor di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 2.500 bibit, Gunungkidul 500 bibit, dan Sleman 1.000 bibit

Peternakan di DIY masih didominasi oleh ternak unggas dan ternak kecil yang populasinya cenderung meningkat dalam periode lima tahun terakhir. Sementara itu, populasi sapi perah dari tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Sapi Perah merupakan jenis ternak yang tidak dominan dilakukan di DIY karena baik iklim maupun topografi DIY tidak terlalu cocok untuk pengembangan ternak sapi perah.

2-250

Tabel 2-127 Populasi Ternak di DIY Tahun 2019-2023 (ekor)

Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023*
Sapi potong	304.423	309.259	317.425	323.308	303.191
Sapi perah	3.870	3.520	3.469	3.500	3.371
Kambing	407.226	416.400	440.748	417.386	428.157
Domba	143.957	148.191	149.231	144.617	140.164
Ayam ras petelur	3.567.652	4.618.205	3.614.663	4.712.467	4.835.021
Ayam ras pedaging	6.244.881	6.184.378	6.733.162	6.841.974	7.156.738
Itik	411.044	437.690	445.680	445.699	447.849

*) Angka Sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

2.1.3.3 Urusan Kehutanan

Penyelenggaraan urusan kehutanan dimaksudkan untuk mendapatkan aneka manfaat dari fungsi hutan melalui prinsip pengelolaan hutan lestari. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, hutan yang dikuasai oleh negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Hutan yang dikelola dengan baik dan benar akan memberikan manfaat yang sangat besar secara ekonomi, sosial dan lingkungan bahkan budaya. Selain wilayah hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan, DIY juga memiliki wilayah dengan status hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (hutan rakyat) seluas ± 65.886,56 ha. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan DIY adalah sebagai berikut.

Tabel 2-128 Luas Hutan di DIY berdasarkan fungsi (Ha)

No	Fungsi Hutan	Luas (ha)	%	Keterangan
1	Hutan konservasi	3.316,87	17,33	Dikelola oleh Kementerian LHK dan Balai TAHURA DLHK DIY
2	Hutan lindung	2.297,61	12,01	Dikelola oleh Dinas LHK melalui UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta
3	Hutan produksi	13.519,47	70,66	Dikelola oleh Dinas LHK melalui UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta
	Total	19.133,95	100,00	

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2023

a. Hutan Konservasi

Pasca berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan hutan konservasi yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah pengelolaan kawasan taman hutan raya (TAHURA). DIY mengelola kawasan konservasi hutan Bunder berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/Menhut-II/2004 tentang Penetapan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Kelompok Hutan Bunder menjadi Taman Hutan Raya. Luas kawasan TAHURA bunder seluas 634,10 ha sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.144/Menhut-II/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang penetapan Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Bunder seluas 634,10 ha yang dikelola oleh Balai TAHURA Bunder yang merupakan UPTD Dinas LHK.

Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi menjadi salah satu isu utama pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Penilaian efektifitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam kerangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perbaikan yang perlu dilakukan. Penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi daratan di Indonesia menggunakan *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Berdasarkan penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan oleh Kementerian LHK pada tahun 2022, nilai efektifitas pengelolaan TAHURA Bunder termasuk dalam kategori efektif dengan nilai 70%, namun demikian nilai tersebut masih dapat ditingkatkan.

b. Hutan Lindung

Hutan lindung ditetapkan sebagai kawasan lindung karena keberadaannya didalam menjaga ekosistem. Penetapan kawasan hutan menjadi hutan lindung didasari oleh fungsi hutan sebagai penyedia cadangan air bersih, penahan erosi, habitat flora dan fauna, serta fungsi lainnya. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu melalui pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), sedangkan dalam blok perlindungan pada hutan lindung, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan. Berdasarkan keputusan menteri LHK nomor SK.122/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi DIY seluas 15.581 ha, yang terdiri dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Hutan lindung DIY

seluas 2.160 ha yang dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta. Pemanfaatan kawasan hutan lindung DIY sampai dengan saat ini mampu menggerakkan perekonomian desa di sekitar kawasan hutan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan. Pemanfaatan kawasan hutan lindung DIY didominasi untuk pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang dikerjasamakan dengan koperasi atau kelompok tani hutan yang berada di sekitar kawasan hutan seperti seperti di Mangunan, Kalibiru dan lainnya.

c. Hutan Produksi

Hutan dengan fungsi sebagai hutan produksi di DIY seluas 13.519,47 ha yang dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 122 tahun 2018 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta wilayah kerja Balai KPH Yogyakarta seluas 15.581 yang didalamnya termasuk kawasan hutan dengan fungsi lindung seluas 2.160 ha. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang fungsinya ditetapkan untuk memproduksi/menghasilkan hasil hutan utamanya adalah hasil hutan kayu.

Hasil yang dikelola Balai KPH Yogyakarta menghasilkan produk utama berupa kayu dan daun minyak kayu putih. Selain tanaman jati, tanaman kayu putih menjadi salah satu hasil hutan bukan kayu yang potensial terus dikembangkan. Daun kayu putih yang diolah menjadi minyak kayu putih memberikan kontribusi pendapatan asli daerah yang signifikan dibandingkan dengan hasil hutan berupa kayu. Perlu upaya untuk terus meningkatkan tata kelola hutan produksi melalui pengelolaan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan berkelanjutan. Data mengenai hasil hutan di DIY tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-129 Hasil Hutan di DIY Tahun 2018-2023

No	Uraian	Volume					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Hasil Hutan non HPH						
a.	Kayu Bulat (m3)	457,45	1.103,90	2.249,84	2.566,26	2.070,67	2.215,00
b	Kayu Hutan Rakyat	120,235,40	153.069,32	69.085,70	95.420,08	92.158,89	93.818,78
c	Kayu Gergajian (m3)	1,025,30	6.171,34	3.931,62	2.982,38	2.827,58	3.429,79

No	Uraian	Volume					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
d	kayu olahan (m ³)	1.025,30	1.065,12	22.783,69	7.505,71	8.408,87	9.302,31
2	Hasil Hutan Ikutan						
	Bambu (batang)	3.304.247	127.330	4.822.205	13.500.256	13.500.000	-
4.	Produksi hasil hutan non kayu						
a.	Produksi Daun kayu putih (ton)	n/a	5.358,25	4.384,75	4.599,00	4.415,00	2.216,50
b	Minyak kayu putih (liter)	n/a	39.323	40.353,00	42.317,00	40.160,00	19.529,00

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

Selain kerusakan hutan, kondisi permasalahan lain yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berupa tanah adalah terjadinya lahan kritis yang disebabkan oleh adanya proses degradasi lapisan tanah oleh proses erosi tanah yang berkepanjangan. Lahan kritis yang disebabkan oleh proses erosi ini banyak ditemukan di wilayah pegunungan tua yang sudah tidak lagi memperoleh suplai pembentukan tanah kecuali dari proses biologis yang berupa dekomposisi bio massa dan pelapukan batuan oleh makhluk hidup. Dari total lahan kritis seluas 79.123 Ha berdasarkan SK Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional, selama periode 2018-2023 DIY telah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 5.163,18 ha atau sebesar 6,53% baik dengan upaya sendiri maupun dukungan dari stakeholder.



Sumber : DLHK DIY, 2023

Gambar 2-66 Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY 2018-2023

2.1.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Sub Urusan Ketenagalistrikan

Ketersediaan energi listrik adalah salah satu parameter penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pengelolaan energi listrik yang benar dan terarah merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan makin meningkatnya peran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya energi, termasuk di dalamnya sektor ketenagalistrikan. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, yaitu pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana pembangunan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok tidak mampu.

Pemerintah terus fokus dalam pemerataan akses listrik yang ramah lingkungan ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah dan rumah tangga di Indonesia akan mendapatkan aliran listrik 100%. Hal ini juga dilakukan oleh Pemda DIY untuk bisa melayani akses listrik sesuai standar keselamatan untuk rumah tangga di DIY. Pencapaian rasio elektrifikasi di DIY sampai dengan tahun 2023 sebesar 99,99% dan rasio desa berlistrik sebesar 100% sesuai data SILM PT. PLN dan Rasio Elektrifikasi yang diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM RI. Berdasarkan data usulan bantuan listrik terbaru dari Kapanewon se-DIY pada tahun 2023 diperoleh data rumah tangga yang masih menyalur sebanyak 4.947 rumah tangga sebagai berikut:

Tabel 2-130 Data Usulan Bantuan Listrik Untuk Rumah Tangga Belum Berlistrik Atau Masih Menyalur

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	
		2022	2023
1	Gunungkidul	2.385	2.044
2	Kulon Progo	893	567
3	Sleman	1.433	1.009
4	Bantul	2.087	1.304
	Total	6.798	4.947

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2024

Data tersebut merupakan data terbaru, di mana belum dilakukan verifikasi apakah seluruh NIK yang masuk dalam daftar usulan adalah bersubsidi atau non subsidi. Berdasarkan data usulan perluasan jaringan listrik pedesaan ke PLN untuk menangani rumah tangga miskin yang jauh dari jaringan listrik (gerumbul), di 15 kapanewon miskin adalah sebagai berikut:

Tabel 2-131 Rumah Tangga Miskin Yang Belum Berlistrik Sesuai Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Jauh dari Jaringan Listrik PLN

No.	Kabupaten	Jumlah Sasaran Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga
1	Gunungkidul	7	22
2	Bantul	2	5
3	Kulon Progo	5	37
4	Sleman	1	10
	Jumlah	15	74

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2024

Penambahan jumlah sambungan listrik sesuai standar keselamatan sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sudah tercapai 13.907 sambungan rumah (SR) yang ditambah dengan sambungan baru pelanggan PLN bersubsidi yang dilakukan oleh Dinas PUPESDM DIY, program CSR, program BPBL (APBN) dan secara mandiri sehingga sampai dengan tahun 2023 tercapai 16.147 unit.

Adapun rincian penambahan jumlah rumah tangga miskin berakses listrik tahun 2023 yaitu:

- a) Kegiatan yang bersumber dari APBD TA 2023 dianggarkan penambahan rumah tangga miskin berakses listrik yang telah terpasang 47 unit (tahap 1) dan 58 unit (tahap 2) dari target total sejumlah 116 unit (tahap 1 dan 2), terpasang 105.
- b) Kegiatan melalui APBN telah terpasang sejumlah 2000 unit.
- c) Berdasarkan data laporan Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Teknis dan data progres APBD DIY, terdapat penambahan 88 unit rumah tangga miskin ber akses listrik di DIY.
- d) Kegiatan melalui CSR/*Light Up Dream* PLN 42 unit.
- e) Kegiatan penanganan RTLH terintegrasi 5 unit

2. Sub Urusan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi

Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah DIY Tahun 2020-2050 merupakan kebijakan Pemda DIY mengenai rencana pengelolaan energi tingkat daerah yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Rencana Umum Energi Nasional. RUED memiliki visi yaitu terpenuhinya kebutuhan energi di DIY secara berkelanjutan, berkeadilan, dan optimal dalam rangka mencapai ketahanan dan kemandirian energi di DIY. Sasaran energi DIY meliputi penyediaan dan pemanfaatan energi, pasokan energi dan cadangan energi, pemenuhan kebutuhan energi final, konservasi energi, diversifikasi pasokan energi, peningkatan akses energi masyarakat. Pasokan energi ke DIY adalah merupakan penyediaan energi berupa bahan bakar minyak (BBM) dan gas (LPG) dari PERTAMINA serta energi listrik dari PLN yang dipasok melalui sistem kelistrikan Jawa Madura Bali (JAMALI). Pasokan energi bahan bakar adalah berupa Minyak Bumi, Gas Bumi dan EBT BBN (yaitu biofuel yang terkandung dalam BBM) dari PERTAMINA. Pasokan energi listrik adalah terdiri

atas pasokan listrik dari PLN melalui sistem kelistrikan JAMALI serta EBT listrik lokal. Pemakaian energi final adalah pemakaian BBM, BBN, gas (LPG), dan listrik. Kebutuhan energi sektoral adalah kebutuhan energi total untuk seluruh sektor pengguna (baik berupa bahan bakar maupun listrik) yaitu sektor-sektor transportasi, industri, rumah tangga, komersial, serta sektor lainnya.

Kebijakan terkait dengan EBT dan konservasi energi sesuai dengan RUED DIY adalah meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat DIY, mengakselerasikan pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi di DIY, mengoptimalkan peningkatan nilai tambah penggunaan energi di DIY, serta mendorong pengelolaan energi yang berwawasan lingkungan di DIY. Bauran energi yang telah dicapai DIY pada tahun 2022 berdasarkan surat dari Dewan Energi Nasional pada bulan Desember tahun 2023 adalah 93,53% minyak bumi, 6,47% energi baru terbarukan (EBT), gas bumi 0%, dan batu bara 0%. Potensi EBT di DIY terbatas pada tenaga surya, biogas, air dan angin, namun dapat dieksploitasi dengan teknologi tepat guna agar dapat menghasilkan energi yang optimal dan menekan konsumsi energi fosil. Berikut capaian bauran energi di DIY tahun 2022.

Tabel 2-132 Capaian Bauran Energi di DIY Tahun 2022

No.	Jenis	TOE	Persentase (%)
1.	Energi Baru Terbarukan	57.997	6,47
2.	Minyak Bumi	838.296	93,53
3.	Gas bumi	0	0
4.	Batu bara	0	0

Sumber : Dewan Energi Nasional, 2023

Capaian EBT di DIY terdiri dari listrik sebesar 13.267 TOE dan non listrik 44.729 TOE. Minyak bumi masih mendominasi, dan DIY tidak memiliki pembangkit gas bumi dan batubara. Berikut data potensi jenis energi baru terbarukan di DIY dan dengan kondisi yang sudah terpasang.

Tabel 2-133 Data Jenis Energi Baru Terbarukan DIY 2020-2023

Sub Elemen	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
PLTS				

Sub Elemen	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Potensi				
Kapasitas (MWp)	10,00	10,00	10,00	10,00
TOE	8.695,65	8.695,65	8.695,65	8.695,65
Terpasang				
Kapasitas (MWp)	0,604	0,629	0,742	3,043
TOE	525,22	546,96	645,22	2.646,36
PLTBayu				
Potensi				
Kapasitas (MWp)	100,00	100,00	100,00	100,00
TOE	165,92	165,92	165,92	165,92
Terpasang				
Kapasitas (MWp)	0,063	0,063	0,063	0,063
TOE	94,72	94,72	94,72	94,72
PLTBagasse				
Potensi				
Kapasitas (MWp)	2,50	2,50	2,50	2,50
TOE	873,00	873,00	873,00	873,00
Terpasang				
Kapasitas (MWp)	2,50	2,50	3,84	3,84
TOE	873,00	873,00	9.237,91	9.237,91
PLTSampah				
Potensi				
Kapasitas (MWp)	30,00	30,00	30,00	30,00
TOE	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00
Terpasang				
Kapasitas (KWp)	5,00	5,00	5,00	5,00
TOE	2,00	2,00	2,00	2,00
Bioethanol				
Potensi				
Kapasitas (Juta Liter)	36,00	36,00	36,00	36,00
TOE	18.060,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00
Biogas Ternak Sapi				
Potensi				
Kapasitas (Unit)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Sub Elemen	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
TOE	2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00
Terpasang				
Kapasitas (Unit)	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
TOE	961,68	961,68	961,68	961,68
Biogas Sanitasi				
Potensi				
Kapasitas (Unit)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOE	92,00	92,00	92,00	92,00
Biogas Ampas Tahu				
Potensi				
Kapasitas (Unit)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOE	91,00	91,00	91,00	91,00
Biomassa Pellet				
Potensi				
Kapasitas (Ton)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOE	548,00	548,00	548,00	548,00

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Berdasarkan data di atas, terdapat tren kenaikan pada kapasitas PLTS terpasang dan kapasitas PLTBagasse yang terpasang selama tahun 2020–2023. Peningkatan terjadi cukup signifikan pada kapasitas PLTS terpasang yang semula di tahun 2022 hanya 0,742 kemudian meningkat menjadi 3,043 di tahun 2023. Pada kapasitas PLTBagasse terpasang juga mengalami peningkatan di tahun 2022–2023 menjadi 3,84 dari yang semula hanya 2,50 di tahun 2020–2021. Energi baru terbarukan dengan jenis listrik berupa PLTS, PLTBayu, PLTBagasse, PLTSampah dengan kondisi sudah terpasang namun belum optimal sesuai dengan potensinya, sedangkan non listrik yang sudah terpasang berupa biogas ternak sapi.

3. Sub Urusan Kegeologian

Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah telah memuat ketentuan-ketentuan pemberian izin (bagi pelaku usaha) untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan usaha maka perizinan pengusahaan air Tanah beralih dari Pemda DIY ke Badan Geologi Kementerian ESDM.

2-260

Sampai saat ini kondisi penurunan muka air tanah di DIY masih dalam kategori aman yaitu <20%. Kondisi air tanah dalam kategori aman ini harus dijaga, apalagi di DIY pemanfaatan air tanah masih lebih tinggi dibandingkan air permukaan. Hal ini salah satunya disebabkan karena harga air baku untuk air tanah lebih rendah daripada tarif air permukaan, yang mengakibatkan porsi penggunaan air tanah oleh pelaku usaha lebih besar daripada penggunaan air permukaan. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah yang telah dilakukan Pemda DIY, kondisi rerata penurunan muka air tanah di DIY dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2-134 Rerata Penurunan Muka Air Tanah Di DIY tahun 2020 – 2023

Sub Elemen	Tahun				Satuan
	2020	2021	2022	2023	
Kulon Progo					
Musim Kemarau	5,49	2,76	3,46	2,08	%
Musim Hujan	4,45	2,45	2,51	1,11	%
Bantul					
Musim Kemarau	4,57	4,53	4,59	4,14	%
Musim Hujan	3,39	3,32	3,69	3,43	%
Gunungkidul					
Musim Kemarau	n/a	n/a	n/a	n/a	%
Musim Hujan	n/a	n/a	n/a	n/a	%
Sleman					
Musim Kemarau	7,52	7,27	7,07	7,28	%
Musim Hujan	5,64	5,56	5,62	4,88	%
Kota Yogyakarta					
Musim Kemarau	10,26	9,92	9,54	10,81	%
Musim Hujan	8,11	8,07	8,24	7,87	%

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2024

Rerata penurunan muka air tanah pada musim kemarau lebih tinggi dibandingkan pada saat musim hujan. Rerata penurunan muka air tanah di Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya karena pengusahaan air tanah di Kota Yogyakarta lebih banyak dibandingkan Kabupaten lainnya. Rerata penurunan muka air tanah baik pada musim hujan dan musim kemarau masih dalam kategori aman yaitu kurang dari 20%. Namun, pengusahaan air tanah harus mempertimbangkan perbandingan antara total volume pengusahaan air tanah

dengan total volume cadangan dinamis air tanah yang dapat dimanfaatkan. Apabila volume pengusahaan air tanah lebih kecil dari volume ketersediaan air tanah, maka keberadaan air tanah pada akuifer tetap terjaga/tersedia dengan jumlah yang mencukupi. Diperlukan upaya berkesinambungan antara *stakeholder* terkait agar dapat mengendalikan air tanah dan menjaga keberlangsungan sumber air untuk kebutuhan hidup di masa depan. Di Kabupaten Gunungkidul tidak terdapat data rerata penurunan muka air tanah karena kondisi atau tipe cekungan air tanah Wonosari berbeda dengan cekungan air tanah Yogyakarta – Sleman dan Wates. Kondisi cekungan air tanah Wonosari berupa akuifer celah atau sungai bawah tanah, sehingga sebarannya sangat tidak merata dan data muka air tanah tidak mudah untuk digeneralisir.

4. Sub Urusan Mineral dan Batubara

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lingkup kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan ke pemerintah daerah provinsi yaitu:

- a. pemberian sertifikat standar dan pemberian izin;
- b. pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; serta
- c. pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

Selain itu pemerintah pusat juga mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

- a. pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- b. penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu dan penetapan harga patokan batuan;
- c. pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Logam Jenis Tertentu dan Batuan. Wilayah pertambangan DIY sebagai dasar 2-262

pengelolaan pengusahaan pertambangan mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimana mengalami perubahan luasan wilayah pertambangan menjadi seluas 42.944 hektar yang telah mempertimbangkan dan mengakomodir perubahan peruntukan dan kepentingan masing-masing Kabupaten di DIY. Ke depan perlu dilakukan review wilayah pertambangan untuk mengetahui kembali kelayakan potensi komoditas tambang, penyesuaian dengan Peraturan Daerah Rancangan Tata Ruang Wilayah terbaru, kepentingan Kabupaten serta aspirasi dari masyarakat.

Luas pengusahaan pertambangan yang diperoleh dari luas izin yang diterbitkan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Kontrak Karya (KK) di DIY sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 3.938,87 hektar, atau sebesar 9,17% dari luasan kawasan peruntukan pertambangan. Berikut data luas pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2-135 Luas Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan

No.	Jenis Izin	Luas (Ha)
1.	Izin Usaha Pertambangan (IUP)	907,85
2.	Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT JMI	2.977,09
3.	Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	28,93
4.	Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	25
	Total	3.938,87

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2024

Perbaikan lingkungan pasca tambang dilakukan melalui penyusunan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang yg telah disetujui Gubernur, disusun oleh pemegang IUP sebelum IUP terbit. Pelaksanaan dilakukan oleh pemegang IUP dan penilaian dilakukan oleh Pemda bersama Inspektur Tambang Kementerian ESDM. Sedangkan pada lokasi pertambangan rakyat, Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang dilakukan oleh Pemda dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemegang IPR bersama Pemda. Rencana reklamasi dan pasca tambang disesuaikan dengan kondisi lapangan, kesepakatan dengan pemilik lahan dan kesesuaian dengan tata ruang. Bentuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang

telah dilakukan yaitu pengembalian alur sungai melalui penguatan tanggul, revegetasi dan pembuatan jenjang agar tidak terjadi longsor.

Pertambangan tanpa izin (PETI) masih banyak terjadi di DIY. Pemda DIY melalui BP3ESDM bertugas menginventarisasi lokasi dan data PETI seperti jumlah dan jenis alat serta jumlah pekerja. Dalam usaha penyelesaian permasalahan PETI telah dilakukan operasi gabungan antara pemda melalui OPD terkait dengan aparat penegak hukum. Namun, beberapa kali operasi gabungan yang telah dilakukan ini mengalami kegagalan, di mana saat di lapangan, semua kegiatan pertambangan tersebut dihentikan serta alat berat dan pekerja telah dimobilisasi.

2.1.3.3.5 Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor dominan pendorong pertumbuhan ekonomi di DIY. Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta dukungan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor perdagangan seperti pergudangan, pasar modern, pasar tradisional dan lainnya.

Sektor perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perkembangan perdagangan luar negeri di DIY dapat dilihat dari kegiatan ekspor dan impor. Pada tahun 2021, nilai ekspor DIY tercatat senilai 557 Juta US\$ jauh lebih besar dibanding tahun 2020 yang tercatat sebesar 398,80 Juta US\$. Sedangkan sampai Desember 2022, nilai ekspor DIY mencapai 583,3 Juta US\$ dengan negara tujuan terbesar Amerika Serikat disusul Jerman dan Jepang. Sedangkan nilai ekspor DIY menurut golongan barang, didominasi 3 komoditas dengan kontribusi terbesar yaitu golongan pakaian jadi bukan rajutan sebesar 36,62%; perabot, penerangan rumah sebesar 11,67% dan barang rajutan sebesar 11,04%. Sementara itu, sampai Desember 2022 nilai impor DIY mencapai 145,6 Juta US\$. Impor DIY diantaranya berasal dari Tiongkok, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Thailand, Vietnam. Negara pemasok barang impor terbesar adalah Tiongkok dan Hongkong masing-masing sebesar 38,67% dan 18,68%. Sedangkan kelompok komoditas impor terbesar adalah filamen buatan sebesar 24,73% dari total impor, disusul kain tenunan khusus sebesar 9,68% dan kain rajutan sebesar 8,10%.

Tabel 2-136 Nilai Ekspor Impor DIY Tahun 2018-2022 (dalam juta dolar AS)

Parameter	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor (nilai FOB)	424,71	403,70	398,80	557,00	583,30
Impor (nilai CIF)	101,97	95,40	124,50	153,80	145,60
Rasio E/I	4,17	4,23	3,20	3,62	4,00

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Perkembangan di sektor perdagangan dalam negeri dapat dilihat dari banyaknya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Tercatat pada tahun 2018-2021 jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdaftar di DIY cenderung peningkatan. Realisasi jumlah kumulatif penerbitan SIUP pada tahun 2021 sebanyak 66.316 SIUP, meningkat cukup drastis apabila dibandingkan dengan realisasi SIUP pada tahun 2018 yang tercatat sejumlah 52.199 SIUP. Dilihat dari klasifikasinya, usaha perdagangan di DIY pada periode 2018-2021 masih didominasi oleh golongan pengusaha kecil, tercatat di tahun 2021 sebanyak 45.468. Sementara itu, sejak perizinan menggunakan OSS (*Online Single Submission*) terbitan SIUP menjadi cukup sulit untuk dikategorikan menjadi pengusaha besar, menengah, mikro, kecil. Data perkembangan jumlah SIUP berdasarkan golongan usaha di DIY pada tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-137 Perkembangan Jumlah SIUP Berdasarkan Golongan Usaha di DIY, Tahun 2018-2021

No	Golongan Usaha	2018	2019	2020	2021
1	Pengusaha Besar	1.125	1.145	1.158	1.165
2	Pengusaha Menengah	3.235	7.199	9.531	11.101
3	Pengusaha Kecil	44.404	44.627	45.155	45.468
4	Pengusaha Mikro	3.435	5.317	6.652	8.585
Jumlah		52.199	58.288	62.496	66.319

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Ukuran besarnya output dari kegiatan perdagangan dapat dilihat dari margin perdagangan dan pengangkutan (MPP). MPP menggambarkan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian yang mengikutsertakan pengangkutan, nilai MPP yang tinggi menunjukkan rantai distribusi perdagangan yang tidak efisien. Pola distribusi sejumlah komoditas pangan di DIY cukup bervariasi, pada tahun

2021 semua komoditas mengalami kenaikan MPP dari tahun 2019. Nilai MPP untuk komoditas beras dan daging ayam ras pada tahun 2021 berturut-turut sebesar 25,73% dan 33,49%, lebih besar daripada nilai nasional 11,31% dan 25,49%. Sementara itu, komoditas yang sering mendorong terjadinya inflasi seperti bawang merah dan cabai merah memiliki MPP yang cukup tinggi dibanding dengan komoditas beras dan daging ayam ras. Pada tahun 2021, nilai MPP untuk komoditas bawang merah sebesar 43,22%, melonjak cukup tinggi dari MPP pada tahun 2019 yang hanya mencapai 27,97%. Hal yang sama juga terjadi pada komoditas cabai merah, pada tahun 2021 nilai MPP untuk cabai merah sebesar 33,78% jauh lebih tinggi daripada tahun 2019 yang hanya mencapai 27,97%. Namun demikian, nilai MPP untuk komoditas bawang merah dan cabai merah di DIY masih di bawah dari capaian nasional yang pada tahun 2021 berturut-turut sebesar 47,39% dan 40,41%

Tabel 2-138 Perkembangan Margin Perdagangan dan Pengangkutan di DIY (%), Tahun 2018-2021

Komoditas	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Daging Ayam Ras	22,06	33,37	n/a	33.49
Beras	22,02	14,82	17,78	25.73
Cabai Merah	46,72	27,97	n/a	33.78
Bawang Merah	60,53	27,97	n/a	43.22

Sumber: BPS RI, 2022

2.1.3.3.6 Urusan Perindustrian

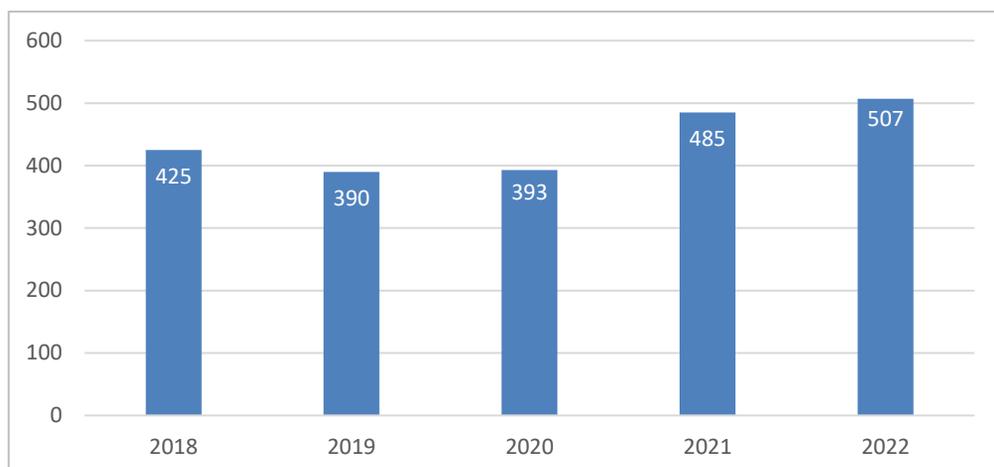
Industri di DIY didominasi oleh sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan jumlah sebesar 98.408 unit usaha pada tahun 2022. Walaupun terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya, IKM masih dihadapkan pada tantangan baru terkait dengan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar yang cepat. Pandemi Covid-19 telah mempercepat transformasi pola konsumsi dan digitalisasi, memaksa IKM untuk berubah secara digital agar tetap kompetitif. Namun, masih banyak IKM yang kesulitan dalam menerapkan teknologi digital dan memanfaatkannya secara efisien untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Oleh karena itu, mendukung peralihan digital di kalangan IKM menjadi salah satu prioritas untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan sektor ini dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah.

Tabel 2-139 Perkembangan IKM di DIY, Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Unit Usaha	94.840	97.013	96.597	96.954	98.408
Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	351.425	360.242	355.319	356.634	361.984
Nilai Investasi (Rp ribu)	1.949.721.275	2.084.560.293	1.992.422.000	1.999.794.000	2.029.791.000
Nilai Produksi (Rp ribu)	12.749.270.525	13.041.847.616	12.465.398.000	12.511.520.000	13.224.676.000
Nilai Bahan Baku dan Penolong (Rp ribu)	7.335.019.754	7.537.466.747	7.204.311.000	7.230.967.000	7.339.432.000

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2023*

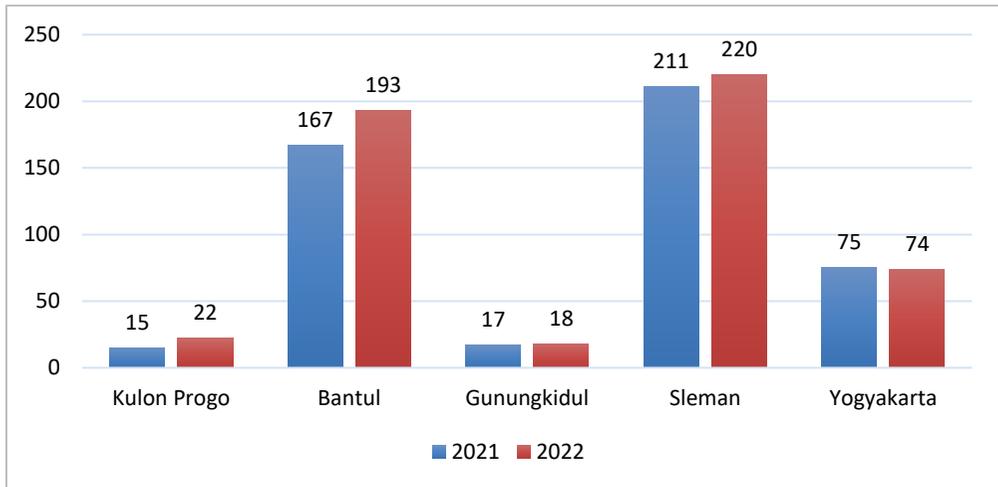
Selama periode 2018-2022, jumlah perusahaan Industri Besar/Sedang di DIY mengalami tren kenaikan secara umum. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2019, dengan hanya 390 perusahaan dibandingkan dengan 425 perusahaan pada tahun 2018, namun mulai tahun 2020 jumlahnya kembali meningkat secara bertahap. Meskipun demikian, pertumbuhan ini tidak selalu diiringi dengan peningkatan kesejahteraan atau kemajuan yang merata di seluruh sektor. Beberapa perusahaan mungkin masih menghadapi tantangan seperti akses pendanaan yang terbatas, persaingan global yang ketat, atau kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Selain itu, perusahaan-perusahaan ini juga dihadapkan pada tuntutan untuk terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar yang dinamis. Oleh karena itu, meskipun jumlahnya meningkat, masih diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di sektor Industri Besar/Sedang DIY.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-67 Perkembangan Jumlah Industri Besar/Sedang di DIY, 2018-2022

Pada tahun 2022, terdapat penurunan jumlah perusahaan industri besar/ sedang di Kota Yogyakarta, yang turun menjadi 74 perusahaan dari sebelumnya 75 perusahaan pada tahun 2021. Sementara itu, semua kabupaten lainnya mencatat penambahan jumlah perusahaan industri besar/ sedang. Namun, terdapat ketimpangan dalam distribusi perusahaan industri besar/ sedang antar wilayah. Kabupaten Sleman masih menjadi wilayah dengan jumlah perusahaan industri besar/ sedang terbanyak, mencapai 220 perusahaan pada tahun 2022, mengalami penambahan 9 perusahaan dari tahun sebelumnya. Kabupaten Bantul mencatat peningkatan jumlah perusahaan industri besar/ sedang yang paling signifikan, dari 167 pada tahun 2021 menjadi 193 pada tahun 2022. Selain itu, tantangan aksesibilitas terhadap sumber daya seperti infrastruktur dan kualitas tenaga kerja menjadi isu penting yang perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan industri yang berkelanjutan di seluruh daerah DIY.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2-68 Jumlah Perusahaan Industri Besar/Kecil Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2022

Berdasarkan kelompok usaha, pada tahun 2022, tiga kelompok usaha yang paling dominan di DIY adalah industri makanan, pakaian jadi, dan furnitur, dengan masing-masing tercatat sebanyak 88, 69, dan 73 perusahaan secara berurutan. Sementara itu, kelompok usaha dengan jumlah perusahaan terendah, yaitu di bawah 10 perusahaan, mencakup industri minuman, tembakau, kertas, barang dari kertas, produk batu bara, minyak bumi, gas alam, farmasi, obat kimia, obat tradisional, karet, barang dari karet, plastik, logam dasar, komputer, barang elektronik, optik, peralatan listrik, suku cadang, aksesoris kendaraan bermotor, trailer, semi trailer, dan alat angkutan lainnya. Tantangan yang muncul antara lain adalah kurangnya akses terhadap pasar yang memadai, persaingan yang ketat, serta kebutuhan akan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing di sektor-sektor ini.

2.1.3.3.7 Urusan Transmigrasi

Pemda DIY sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerja sama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin. Selama kurun 2019-2023, Pemerintah Daerah DIY telah memberangkatkan transmigrasi sebanyak kurang lebih 150 KK terdiri dari 468

jiwa. Jika dilihat dari daerah asal transmigran, selama kurun waktu 2019 hingga 2023 mayoritas transmigran berasal dari Bantul dengan jumlah 44 KK, sedangkan jumlah terendah dari Kulon Progo dengan jumlah 16 KK. Berikut adalah data realisasi pelaksanaan transmigrasi menurut daerah asal di DIY selama 2019-2023.

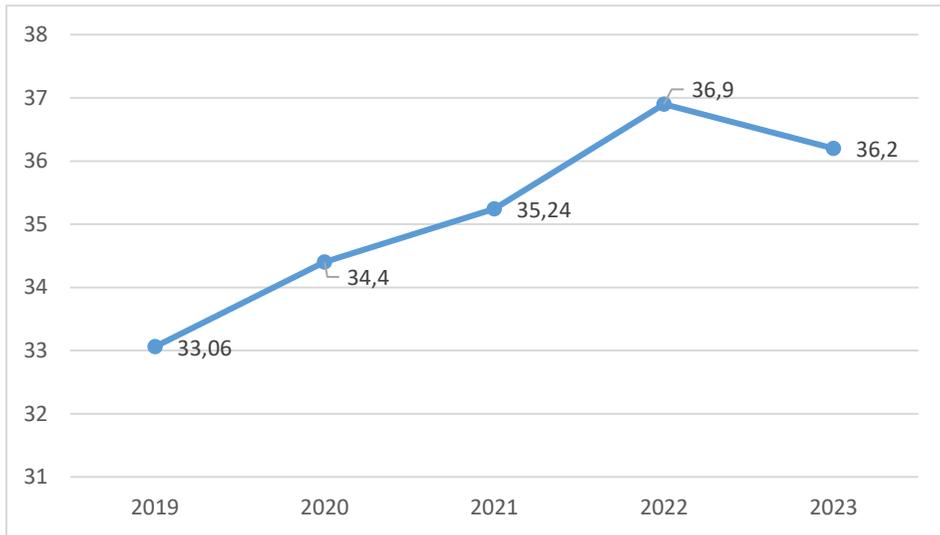
Tabel 2-140 Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di DIY, Tahun 2019-2023

Kabupaten/ Kota	Tahun									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Yogyakarta	10	30	0	0	10	30	0	0	4	13
Sleman	13	43	0	0	13	43	0	0	5	18
Bantul	20	54	0	0	20	54	0	0	4	12
Kulon Progo	7	24	0	0	7	24	0	0	2	7
Gunungkidul	15	50	0	0	15	50	0	0	5	16
Jumlah	65	201	0	0	65	201	0	0	20	66

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2024*

2.1.3.3.8 Urusan Kelautan dan Perikanan

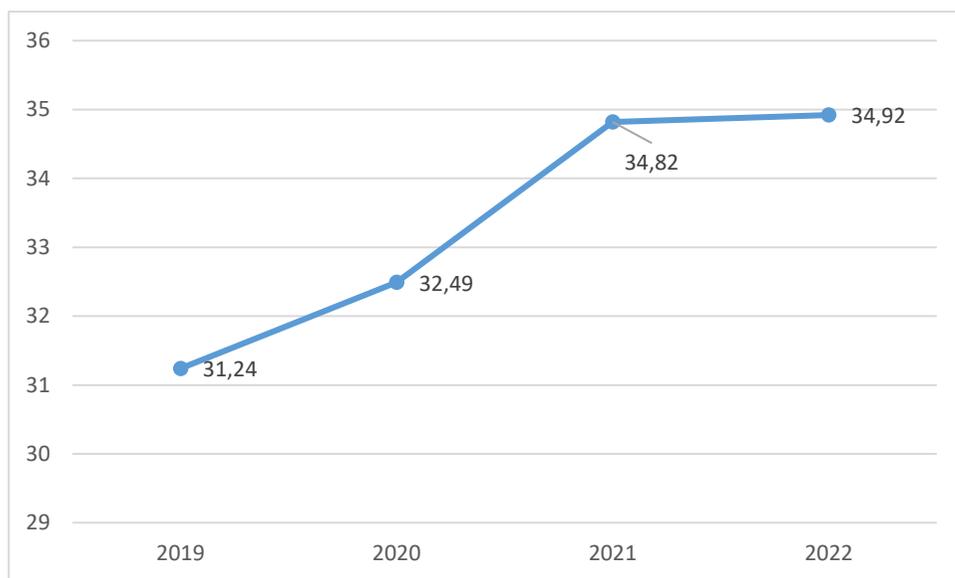
Ketersediaan ikan per kapita DIY cenderung mengalami peningkatan pada periode tahun 2019-2023. Namun ketersediaan ikan di DIY mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu sebesar 36,2 kg/kapita/tahun. Hal ini kemungkinan disebabkan pasokan ikan dari luar daerah mengalami penurunan, sedangkan di sisi lain produksi perikanan dari DIY terus meningkat. Tingkat ketersediaan ikan DIY ditunjukkan dalam gambar berikut:



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2-69 Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2019-2023

Konsumsi ikan di DIY pada kurun waktu 2019-2022 menunjukkan tren meningkat. Konsumsi ikan di DIY tahun 2022 mencapai 34,92 kg/kapita/tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asupan kebutuhan protein dari ikan. Namun demikian konsumsi ikan DIY masih relatif lebih rendah dibandingkan capaian nasional yang mencapai 56,48 kg/kapita/tahun. Oleh karena itu, kegiatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) memegang peranan penting dalam upaya peningkatan konsumsi ikan melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Tingkat konsumsi ikan di DIY dapat dilihat pada gambar berikut:



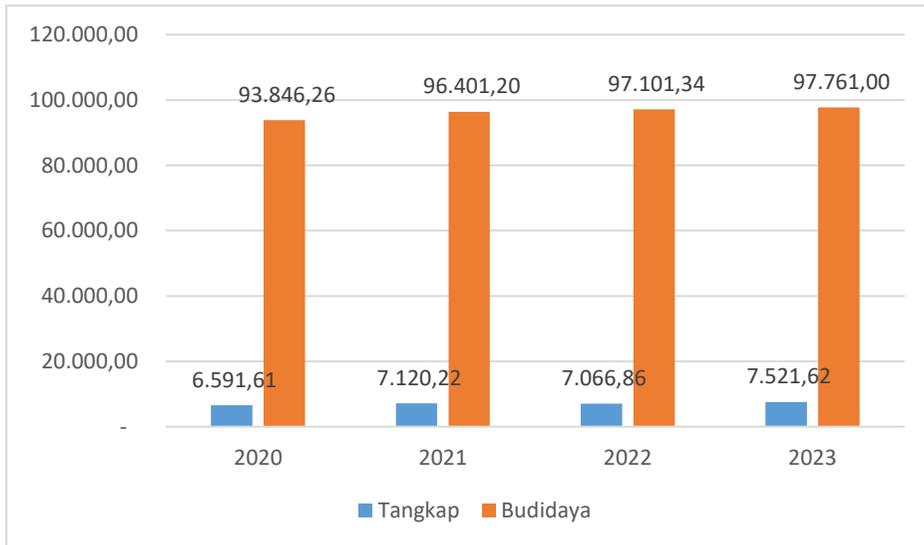
Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2-70 Konsumsi Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), tahun 2019-2022

Pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di DIY didukung peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya mendominasi jumlah produksi perikanan DIY secara keseluruhan. Pada tahun 2023, produksi perikanan budidaya 97.761 ton, atau 92,86% dari total produksi perikanan DIY. Faktor pendukung capaian produksi perikanan budidaya diantaranya penggunaan benih yang unggul, keberhasilan pengendalian hama penyakit ikan, permintaan pasar yang cukup tinggi untuk ikan hasil budidaya, dan penggunaan pakan mandiri.

Sementara itu, produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 tercatat 7.521,62 ton atau 7,14% terhadap seluruh produksi perikanan di DIY. Hal ini berarti proporsi produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 6,75% Faktor pendukung capaian produksi perikanan tangkap diantaranya didukung oleh cuaca yang mendukung untuk mencari ikan, ketersediaan ikan yang cukup melimpah terutama pada akhir tahun, serta harga jual yang relatif stabil. Berikut grafik pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap DIY selama kurun waktu 2019-2023.

2-272



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2-71 Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap DIY (Ton), Tahun 2020-2023

Hal yang cukup berpengaruh pada sektor perikanan di DIY adalah sumber daya manusia yang terus meningkat. Jumlah nelayan laut di DIY pada tahun 2023 sejumlah 3.929 orang merupakan jumlah nelayan tertinggi. Nelayan dari kabupaten Gunungkidul berkontribusi sebesar 54,47% dari total jumlah nelayan di DIY, sedangkan nelayan kabupaten Bantul peranannya yang terkecil, yaitu sebesar 12,88%. Jumlah nelayan Gunungkidul di DIY yang besar didukung oleh prasarana penangkapan ikan laut berupa pelabuhan yang ada di sana yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng. Jumlah nelayan DIY secara rinci terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 2-141 Jumlah Nelayan dan Rumah Tangga Perikanan di DIY Tahun 2020-2023

Kabupaten	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	340	340	350	1283
Bantul	435	427	624	506
Gunungkidul	2188	1722	1153	2140
Jumlah	2963	2489	2127	3929

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

2.1.3.4 Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Urusan Sekretariat Daerah

1. Jumlah Produk Hukum Daerah

Produk hukum daerah yang diantaranya adalah Peraturan Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah DIY (eksekutif) bersama DPRD DIY (legislatif) menyusun Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Disamping menyusun Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah DIY juga menyusun produk hukum lain guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Data mengenai jumlah produk hukum daerah DIY yang dihasilkan selama 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2-142 Jumlah Produk Hukum Daerah DIY Tahun 2019-2023

No	Produk Hukum	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Peraturan Daerah (Perda)	14	12	8	13	12
2	Perda Keistimewaan	0	0	0	1	0
3	Peraturan Gubernur	82	123	132	110	94
4	Keputusan Gubernur	321	399	469	408	457
5	Instruksi Gubernur	4	7	39	32	5
6	Surat Edaran Gubernur	12	12	42	16	10
7	Keputusan Sekretaris Daerah	42	71	94	64	65
8	Perjanjian Gubernur	4	11	11	10	14
9	Perjanjian Sekda	23	51	39	64	18
Jumlah		502	686	834	718	675

Sumber : *Dataku Bappeda DIY, 2024*

Atas berbagai produk hukum daerah tersebut telah dilakukan pendokumentasian dan penyebarluasan. Penyebarluasan produk hukum daerah dilakukan melalui sosialisasi langsung ke masyarakat, pengunggahan melalui Jaringan Dokumentasi informasi hukum (JDIH), dan penyampaian Lembaran daerah dan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan ke pemangku kepentingan.

Disamping itu, Pemerintah Daerah DIY juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota di DIY melalui kegiatan konsultasi, fasilitasi, evaluasi dan klarifikasi produk hukum kabupaten/kota. Adapun data pembinaan dan pengawasan terhadap Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota di DIY disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2-143 Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota Tahun 2019-2023

No.	Keterangan	Tahun					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Nomor Register	75,00	72,00	72,00	30,00	30,00	Nomor Register
2	Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi	27,00	27,00	29,00	5,00	15,00	Keputusan Gubernur
3	Jumlah Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota	48,00	45,00	43,00	40,00	65,00	Produk Hukum

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

Terkait dengan penyelesaian kasus hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah sebagai salah satu resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat dinamika yang cukup fluktuatif atas penyelesaian permasalahan kasus hukum baik secara litigasi ataupun non litigasi. Berikut data bantuan dan layanan hukum tahun 2019-2023:

Tabel 2-144 Jumlah Bantuan dan Layanan Hukum Tahun 2019-2023

No.	Keterangan	Tahun					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Putusan Pengadilan	10,00	8,00	6,00	1,00	4,00	Putusan
2	Jumlah Telaah Penyelesaian Permasalahan Non Litigasi	n/a	n/a	n/a	8,00	46,00	Dokumen
3	Jumlah Laporan Penyelesaian Kasus	100,00	100,00	100,00	100,00	105,00	Laporan

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

2. Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik merupakan hasil penilaian terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan sesuai

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian ini dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang berperan sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik baik yang dilakukan oleh pemerintah termasuk BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang seluruhnya atau sebagian dananya berasal dari APBN atau APBD. Penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 yang menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik ini berpedoman pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Penilaian terhadap standar pelayanan publik pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mencakup 9 variabel dan 19 indikator. Adapun 9 variabel tersebut, yaitu Standar Pelayanan Publik ; Maklumat Layanan; Sistem Informasi Pelayanan Publik ; Sarana dan Prasarana, Fasilitas ; Pelayanan Khusus ; Pengelolaan Pengaduan ; Penilaian Kinerja ; Visi, Misi, dan Moto Pelayanan ; dan Atribut. Nilai maksimal atau total dari kepatuhan terhadap standar pelayanan publik adalah 100 yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 0-50 tingkat kepatuhan rendah (zona merah) ; 51-80 tingkat kepatuhan sedang (zona kuning) ; dan 81-100 tingkat kepatuhan tinggi (zona hijau).

Selama 2016-2021, DIY memperoleh nilai atau tingkat kepatuhan yang variatif. Pada Tahun 2016, Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik DIY adalah sebesar 43,57 pada tingkat kepatuhan rendah kemudian meningkat menjadi 71,15 pada tingkat kepatuhan sedang pada Tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018, 2021, dan 2022, DIY mencapai tingkat kepatuhan tinggi atau berturut-turut sebesar 95,65; 97,05; dan 91,15.

Tabel 2-145 Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik DIY

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	43,57 (Rendah)	71,15 (Sedang)	95,65 (Tinggi)	n/a	n/a	97,05 (Tinggi)	91,15 (Tinggi)

Sumber : ORI, 2016-2022

3. Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diselenggarakan untuk mendapat gambaran tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemda DIY. Pelaksanaan survei ini merupakan implementasi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Kedua peraturan perundangan tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam SKM terdapat 4 kategori nilai, yaitu 1) Nilai interval 25,00-64,99 termasuk kinerja pelayanan tidak baik, mutu pelayanan D ; 2) Nilai interval 65,00-76,60 termasuk kinerja pelayanan kurang baik, mutu pelayanan C ; 3) Nilai interval 76,61-88,30 termasuk kinerja pelayanan baik, mutu pelayanan B ; dan 4) Nilai Interval 88,31-100,00 termasuk kinerja pelayanan sangat baik, mutu pelayanan A.

Perkembangan selama 2016-2021 menunjukkan bahwa nilai SKM Pemda DIY cenderung meningkat dari sebesar 78,26 pada Tahun 2016 naik menjadi 84,73 pada Tahun 2021. Pada tahun 2021, terdapat total 95 Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) telah melakukan SKM yang mana 17 UPP (18%) memperoleh mutu pelayanan Sangat Baik (A) dan 78 UPP (82%) memperoleh mutu pelayanan Baik (B).

Tabel 2-146 Survei Kepuasan Masyarakat 2016-2022

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Survei Kepuasan Masyarakat(SKM)	78,26	77,97	79,61	82,69	83,64	84,73	85,36

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2023

2.1.3.4.2 Urusan Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang

dipilih melalui pemilihan umum. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), anggaran, dan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD DIY mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Salah satu dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, Sekretariat DPRD menyediakan kebutuhan sarana di antaranya berupa ruang kerja, ruang rapat, ruang aspirasi, dan penunjang lainnya.

Sekretariat DPRD memfasilitasi berbagai agenda DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam memfasilitasi fungsi DPRD DIY yang dilakukan pada periode 2019-2023 setidaknya sudah dapat mengakomodir pembentukan Peraturan Daerah (termasuk Peraturan Daerah Istimewa) sebagai berikut:

Tabel 2-147 Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan pada Tahun 2019-2023

No	Uraian	Jumlah Produk Hukum				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Program pembentukan perda (Propemperda)	14 prioritas; 3 kumulatif terbuka	9 prioritas; 3 kumulatif terbuka	8 prioritas; 3 kumulatif terbuka	10 prioritas; 3 kumulatif terbuka	9 prioritas; 3 kumulatif terbuka
2	Rancangan Perda yang disetujui DPRD	13	14	5	14	12
3	Rancangan Perda yang diusulkan DPRD	5	5	5	4	5

Sumber : DPRD DIY Tahun 2024

Kemudian dalam memfasilitasi fungsi anggaran DPRD DIY pada periode 2019-2023 telah dilakukan beberapa fasilitasi diantaranya adalah rangkaian pembahasan APBD (termasuk perubahan APBD) bersama antara DPRD DIY dengan

Pemerintah Daerah DIY dan pemangku kepentingan terkait secara rutin tiap tahun yang meliputi Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD DIY, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY.

Terakhir Sekretariat DPRD juga memfasilitasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan daerah istimewa, dan Peraturan Gubernur; pelaksanaan peraturan perundangundangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah DIY; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.1.3.5 Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.5.1 Urusan Perencanaan Pembangunan

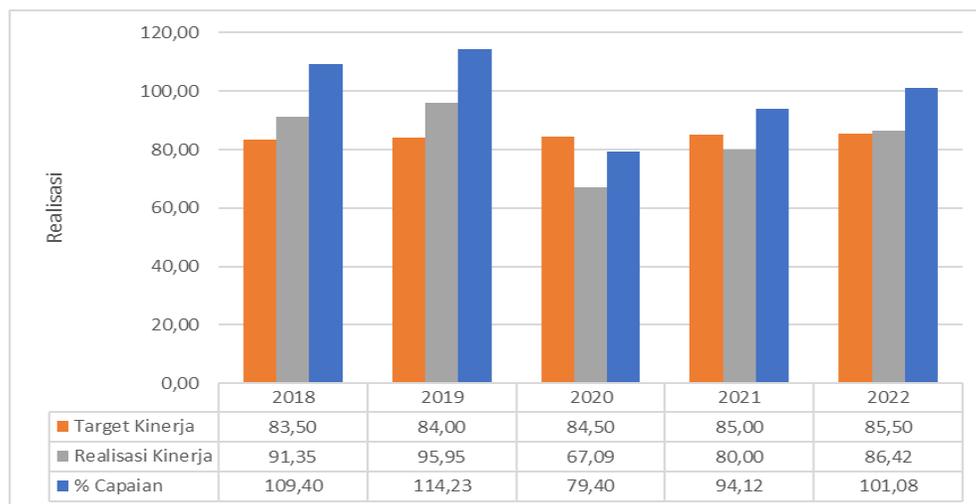
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan kewenangannya, daerah menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah DIY memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas untuk mewujudkan perencanaan pembangunan DIY yang visioner dan implementatif dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Hal ini berarti perencanaan daerah tidak hanya memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan, melainkan juga memperhatikan aspek kepemilikan rencana (*sense of ownership*). Keterlibatan *stakeholder* dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Rencana Pembangunan Daerah merupakan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan. Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD),

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Sesuai amanat pemerintah, dalam menyusun dokumen perencanaan, Pemerintah DIY telah menggunakan pendekatan *money follow program* yakni pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pendekatan penganggaran ini mendukung pendekatan perencanaan yang: a.) holistik tematik, yaitu penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas; b.) terintegrasi, yaitu keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional; dan c.) spasial yaitu kegiatan prioritas yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan di lapangan.

Berdasarkan data capaian kinerja sasaran perangkat daerah periode tahun 2018-2022, Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah adalah sebagaimana grafik berikut.



Sumber:

Gambar 2-72 Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah

Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran perangkat daerah berkisar antara 79,40% - 114,23% dengan rata rata capaian tahunan sebesar 97,81%. Berdasarkan persentase capaian tersebut, perlunya mendorong

2-280

peningkatan terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan efektifitas perencanaan pembangunan daerah.

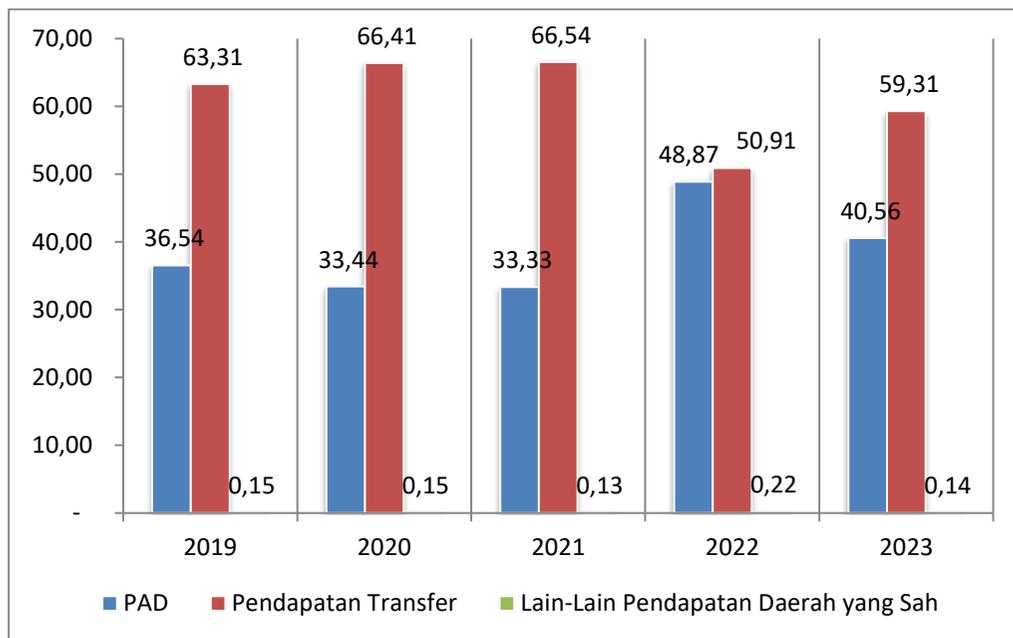
2.1.3.5.2 Urusan Keuangan

Penyusunan APBD DIY didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBD telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Selanjutnya, pengelolaan Barang Milik Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sementara itu, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan barang milik daerah Pemda DIY dan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) mengacu Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi. Sampai dengan Tahun 2023, Pemda DIY tercatat telah menerima opini WTP sebanyak tiga belas kali berturut-turut.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden tentang transformasi digital, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ Tanggal 13 Desember 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemda DIY menyusun peraturan peta jalan ETPD. Penerapan ETPD diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efisien,

transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selama lima tahun terakhir pendapatan daerah DIY masih didominasi oleh pendapatan transfer. Pada Tahun 2023 kontribusi pendapatan transfer terhadap pembentukan pendapatan daerah sebesar 59,31% naik dibandingkan tahun sebelumnya 50,91%. Sumber pendapatan transfer diantaranya berasal dari dana keistimewaan. Sementara itu, kontribusi terbesar kedua pembentuk pendapatan daerah berasal dari PAD. Selama 2019-2023, perkembangan PAD cenderung fluktuatif. Kontribusi terbesar terjadi pada Tahun 2022 (48,87%) kemudian menurun di Tahun 2023 (40,56%). Peningkatan PAD masih menjadi perhatian serta upaya terus dilakukan ditengah tantangan implentasi UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022.



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2-73 Distribusi Pendapatan Daerah menurut Komponen di DIY 2019-2023 (%)

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, diterapkanlah suatu sistem yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Sistem tersebut dikenal sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan diterapkan oleh unit

2-282

pelaksana teknis dinas/badan daerah. Pembentukan BLUD diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Pengelolaan keuangan BLUD merupakan pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan BLUD di lingkungan Pemda DIY diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pada Tahun 2021, Pemda DIY memiliki 8 (delapan) BLUD, yakni SMKN 6 Yogyakarta, SMKN 1 Sewon, SMKN 3 Wonosari, Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT), RSJ Grhasia, Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) DIY, Balai Laboratorium dan Kalibrasi Kesehatan (BLKK) DIY, dan RS Khusus Paru Respira. Jumlah BLUD tersebut diperkirakan akan bertambah khususnya BLUD yang berasal dari SMK Negeri karena terdapat beberapa SMK yang sedang berproses melengkapi persyaratan untuk menerapkan BLUD, baik persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

2.1.3.5.3 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Pergeseran Paradigma dari Administrasi ke Manajemen ASN

Paradigma manajemen kepegawaian telah mengalami pergeseran dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Administrasi ASN merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan ASN. Sementara manajemen ASN adalah rangkaian aktivitas menilai ASN sebagai sumber daya, aset, faktor determinan dalam sukses/gagalnya program-program pembangunan pemerintah, sehingga dalam manajemen ASN, program, dan kegiatan terstruktur serta transparan dalam pengelolaan sumber daya manusia ASN. Pemda DIY yang memiliki banyak predikat keunggulan perlu bergegas menjadi pionir dalam mendesain dan mengimplementasikan paradigma baru manajemen ASN di lingkup Pemda.

Paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis.

Tabel 2-148 Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai Tahun 2023

No.	Jenis Jabatan	Bezetting	ABK	Selisih
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi	38	47	9
2.	Jabatan Administrator	198	225	27
3.	Jabatan Pengawas	382	676	294
4.	Jabatan Pelaksana	2.856	7.165	4.309
5.	Jabatan Fungsional	5.726	8.091	2.305
6.	CPNS	9	0	9
	Jumlah	9.209	16.204	6.995

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2024

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai ASN perlu dibangun sistem manajemen ASN yang profesional dan terintegrasi (*unified sytem*). Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas “merit” yang menekankan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh calon pegawai dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi yang sejalan dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Manajemen ASN meliputi tahapan berikut ini:

(1) Rekrutmen

Proses awal dari manajemen ini adalah rekrutmen yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing instansi atau lembaga terkait. Termasuk dengan memperhatikan Analisis Jabatan yang direncanakan oleh pemerintah seperti kebutuhan pegawai, kewenangan, tanggung jawab, hak, syarat-syarat, dan lainnya sebagai penunjang jabatan yang akan ditempati oleh calon ASN. Secara umum, dalam merekrut pegawai ASN menurut kepada anjab (analisis jabatan) adalah menentukan hal yang bersifat kualitatif. Sedangkan Analisis Beban Kerja meliputi beban kerja yang akan ditempuh oleh pegawai seperti jam kerja dan untuk mengetahui informasi jabatan yang telah dilakukan melalui proses penelitian untuk mendapatkan kinerja sesuai dengan jabatan tersebut. Untuk rekrutmen digunakan sistem CAT (*computer assessment test*) baik untuk CPNS maupun Pegawai Non PNS.

(2) Pengembalian Pegawai

Untuk mencapai Reformasi Birokrasi, Pemda menerapkan sistem ini sebagai salah satu penunjang tercapainya Reformasi Birokrasi dalam lingkup ASN. Mengembangkan kompetensi pegawai menjadi suatu kegiatan yang perlu dan khusus untuk tercapainya reformasi ini. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan program ini adalah dengan memberikan atau mengadakan tugas belajar, izin belajar, seminar, pelatihan, kursus serta diklat teknis lainnya untuk menunjang kinerja pegawai dalam menduduki jabatannya. Dengan adanya kegiatan seperti ini bisa memaksimalkan kinerja pegawai aparatur sipil negara menjadi lebih baik.

(3) Promosi

Promosi yang dilakukan di sini adalah adanya kenaikan pangkat jika terdapat kinerja yang baik yang ditunjukkan oleh pegawai dilingkungan aparatur sipil negara. Setiap pegawai memiliki hak yang sama untuk bisa menuju kepada jabatan ini jika kinerja yang dilakukan telah maksimal dan telah mendapatkan nilai yang objektif dari pemerintah atau kepala instansi yang berkaitan sehingga bisa dilaksanakan promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi serta kompetensinya merupakan dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan promosi, sehingga profil jabatan masing-masing pegawai merupakan acuan yang sangat diperlukan.

(4) Kesejahteraan

Kesejahteraan setiap ASN perlu diperhatikan sehingga pada setiap tahunnya terdapat perubahan kebijakan mengenai pemenuhan kesejahteraan aparatur sipil negara seperti dalam pemberian tunjangan untuk PNS yang telah ditentukan dan dianggarkan pada tiap tahunnya. Namun, tunjangan tidak semata-mata diberikan begitu saja, yang bersangkutan harus mengikuti tahap yang telah menjadi syarat untuk proses Reformasi Birokrasi. Besarnya tunjangan yang didapat oleh pegawai tergantung kepada kinerja, tanggung jawab, beban dan resiko yang telah dilakukan.

(5) Disiplin

Manajemen kinerja merupakan pembinaan dan penilaian pegawai yang dilakukan oleh pemerintah terkait dalam memberikan sanksi atas tidak tercapainya kinerja dari pegawai yang bersangkutan baik PNS ataupun PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja). Pembinaan ini dilakukan menurut kepada prestasi dan sistem karir. Setelah pembinaan oleh pemerintah atau pihak terkait, maka diterapkan disiplin etika yang harus diterapkan oleh pegawai. Kode etik yang tidak sesuai dengan peraturan, maka

diperlukan sanksi yang tegas untuk tetap berjalannya rencana untuk mencapai Reformasi Birokrasi.

(6) Pensiun

Hingga tahap akhir dari manajemen ASN ini yaitu pensiun maka berakhir tugas sebagai ASN di instansi terkait. Pada tahap akhir ini, masih merupakan bagian dari pemenuhan kesejahteraan pegawai. Di sini, diberikan tunjangan sebagai penghormatan dan penghargaan atas dedikasi yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut untuk melayani masyarakat dan mengabdikan kepada negara.

Tabel 2-149 Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2017-2023

Tahun	Jumlah PNSD	Kebutuhan	Kurang/Lebih	Rasio Riil Terhadap Kebutuhan
2017	12.712	24.330	-11.618	52,25
2018	11.387	16.204	-4.817	70,27
2019	11.347	16.204	-4.857	70,02
2020	10.558	16.204	-5.646	65,16
2021	10.504	16.204	-5.700	64,48
2022	10.219	16.204	-5.985	63,06
2023	9.209	16.204	-6.995	56,83

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2023

Para pejabat ASN, khususnya Pejabat Pimpinan Tinggi sebagai penentu arah dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan menjadi garda terdepan yang menjadi panutan, dan penentu arah dalam memberikan service kepada publik. Oleh karena itu menempatkan pegawai ASN pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus selektif sehingga bisa mendapatkan pejabat yang kompeten di bidangnya. Sistem manajemen ASN diarahkan untuk mendapatkan pejabat ASN yang profesional. Sistem rekrutmen JPT (sebelumnya dikenal dengan istilah Eselon/Struktural) polanya diubah dengan *merit system* melalui pelamaran, seleksi, dan kontrak kinerja jabatan yang jelas, objektif, dan transparan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU ASN.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah, sistem merit di DIY pada tahun 2018 mendapatkan skor 324,5 termasuk dalam kategori "III" dengan predikat "baik". Pada tahun 2019 skor sedikit turun menjadi 313,5 dikarenakan perubahan bobot skor, skor ini masih termasuk dalam kategori

III dengan predikat “baik”. Adapun pada tahun 2020 capaian skor sistem merit meningkat menjadi “342”, capaian ini termasuk dalam kategori “IV” dengan predikat “sangat baik”. Setelah mendapatkan predikat sangat baik di tahun 2020, penilaian merit dilakukan setiap dua (2) tahun sekali. Penilaian selanjutnya dilakukan di tahun 2022 dengan capaian skor 349 dengan predikat “sangat baik”. Meskipun terdapat peningkatan, capaian sistem merit di DIY masih terdapat catatan pada beberapa aspek masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Tabel 2-150 Capaian Sistem Merit DIY Tahun 2018-2023

Tahun	Skor	Kategori	Predikat
2018	324.5	III	Baik
2019	313.5	III	Baik
2020	342	IV	Sangat Baik
2021	Tidak Dilakukan Penilaian		
2022	349	IV	Sangat Baik
2023	Tidak Dilakukan Penilaian		

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2024

(7) Arus Besar Purna Tugas Pejabat Struktural Pemda DIY 2021-2024

Pos jabatan struktural di lingkup Pemda DIY dalam 3 tahun ke depan akan ditandai dengan arus besar purna-tugas Pejabat Struktural Pemda DIY (hingga tahun 2024). Berdasar Data dari BKD DIY (Januari 2022), arus purna tugas pejabat struktural itu tersaji sebagai berikut:

Tabel 2-151 Data Pejabat Pensiun 2021 s.d 2024

Eselon	Pensiun s/d 2021	Pensiun s/d 2022	Pensiun s/d 2023	Pensiun s/d 2024	Total Pensiun s/d 2024
I	0	0	1	0	1
II	3	2	3	5	13
III	31	34	28	19	112
IV	79	55	47	32	213
Jumlah	113	91	79	56	339

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2024

Arus purna-tugas yang sedemikian besar itu perlu direspon dan diantisipasi dengan penyiapan kader-kader pengganti yang perlu mulai diidentifikasi, ditemukenali, termasuk dibekali agar siap menggantikan pos-pos jabatan itu dengan lebih mumpuni. Perlu segera dilakukan proses penelusuran melalui

assessment atau *talent-pool* atau *talent-scout* dan dilanjutkan dengan pembekalan melalui diklat, pemagangan, kursus, dan lain sebagainya untuk meng-upgrade kompetensi dan kapasitas para calon penerus pos struktural Pemda DIY di masa depan tersebut.

2.1.3.5.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah berkaitan erat dengan proses perencanaan serta kualitas kebijakan pembangunan yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Adapun ciri dari kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang bersifat aplikatif dan disusun berdasarkan bukti-bukti (*evidence*) yang bersifat terkini, relevan, representatif dan valid. Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah sebagai kebijakan publik harus menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. DIY melalui unit pelaksana teknis yang menangani urusan penelitian dan pengembangan berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut melalui berbagai kegiatan kelitbangannya.

Perhitungan indikator persentase hasil kelitbangannya yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah, berdasarkan jumlah rekomendasi hasil kegiatan kelitbangannya terpilih yang dijadikan sebagai bahan rumusan perencanaan dibagi jumlah total rekomendasi hasil kegiatan kelitbangannya di DIY dikalikan 100%. Proses pemilihan rekomendasi yang akan digunakan sebagai referensi untuk perencanaan adalah melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. pemilihan hasil penelitian yang relevan dengan isu maupun permasalahan pembangunan di DIY;
- b. pemilihan rekomendasi dari penelitian terpilih berdasarkan urusan; dan
- c. penapisan rekomendasi dari penelitian terpilih dengan mendasarkan pada arah kebijakan yang terdapat pada RPJMD 2017-2022.

Adapun capaian hasil kelitbangannya yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2-152 Capaian Indikator Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih Untuk Mendukung Pembangunan Daerah, 2020-2023

Tahun	Rekomendasi Terpilih	Total Rekomendasi	Persentase
2020	121	168	72,02%
2021	63	67	94,03%
2022	73	73	100%
2023	197	241	81,74%

Sumber: BPPSD DIY, 2024

Perubahan paradigma dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti membuka peluang besar bagi entitas kelitbangan di DIY untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan melalui kerja sama dengan para pengambil kebijakan. Dalam hal ini, diperlukan sinergisitas entitas kelitbangan di DIY yang terdiri ASN Jabatan Fungsional Peneliti baik dari Pemda DIY maupun instansi vertikal, Dunia Akademisi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), juga LSM yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk kelitbangan yang tepat karakter, tepat kebutuhan, dan tepat guna. Upaya mewujudkan sinergisitas tersebut telah diinisiasi oleh Pemda DIY melalui berbagai kegiatan, diantaranya rakor kelitbangan dan pertemuan ilmiah yang menjadi wadah sekaligus wahana bagi para insan kelitbangan dalam berbagi gagasan dan informasi guna mendukung perencanaan pembangunan DIY.

2.1.3.5.5 Urusan (Unsur) Pengelolaan Perbatasan Daerah

Pemda DIY dalam rangka meningkatkan pengelolaan Perbatasan Daerah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY. Pengelolaan Wilayah Perbatasan dipahami sebagai upaya tata kelola administrasi perbatasan secara terpadu yang berkaitan dengan penataan administrasi batas daerah, pengembangan sistem informasi manajemen perbatasan, dan pembangunan serta pemeliharaan penanda perbatasan.

Batas daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah, dilampiri dengan Peta Batas Wilayah Skala 1:100.000 yang memuat kapanewon dan kalurahan di sepanjang garis batas daerah. Kapanewon dan kalurahan tersebut selanjutnya masuk kategori wilayah perbatasan DIY-

Provinsi Jawa Tengah. Secara akumulatif terdapat sebanyak 18 kapanewon dan 48 kalurahan di DIY, serta 19 kecamatan dan 79 desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada dalam wilayah perbatasan. Kondisi tersebut menyebabkan penataan administrasi batas daerah menjadi penting untuk dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa tertib batas merupakan awal dari tertibnya administrasi daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

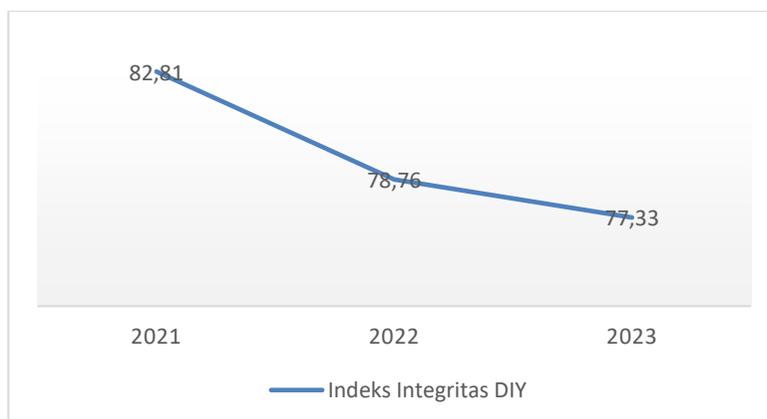
Salah satu persoalan di wilayah perbatasan adalah pelayanan publik yang dinilai masih belum optimal. Masyarakat wilayah perbatasan belum dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan memadai. Hal ini antara lain tercermin dalam angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Terdapat 14 kapanewon di wilayah perbatasan DIY yang masuk dalam kuadran III dengan capaian IPM dan akselerasi pembangunan manusia yang relatif rendah. Paradigma desentralisasi telah menumbuhkan kepekaan masyarakat untuk menuntut kualitas pelayanan publik yang sederhana, cepat, dan murah pada pemerintah. Oleh karena itu, fungsi penyediaan layanan publik oleh Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan, salah satunya melalui perjanjian kerja sama daerah.

2.1.3.5.6 Urusan (Unsur) Penghubung

Unsur Penghubung merupakan salah satu bagian dari Urusan Penunjang yang berfungsi untuk melaksanakan penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Pelaksanaan fungsi penghubung tersebut diwujudkan antara lain melalui pemberian pelayanan penunjang terhadap kegiatan perangkat daerah dan terhadap masyarakat DIY di Jakarta, pengelolaan anjungan DIY di Taman Mini Indonesia Indah, penyelenggaraan dan fasilitasi promosi potensi dan seni budaya DIY oleh perangkat daerah di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, penyelenggaraan keprotokolan, serta penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi diaspora DIY se-Indonesia. Pelaksanaan tugas fungsi Unsur Penghubung tersebut untuk menciptakan kinerja yang mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat, peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung.

2.1.3.6 Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan fungsi pengawasan internal menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi akan terwujud jika tata kelola pemerintahan tidak lagi memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Korupsi merupakan salah satu faktor negatif yang mempengaruhi pencapaian pembangunan daerah dan atas hal tersebut maka diperlukan upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan integritas Pemerintah Daerah. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas yang dilakukan oleh KPK, Indeks Integritas Pemerintah Daerah DIY mengalami kecenderungan menurun dimana hal ini juga terjadi di level nasional. Sehingga, perlu ada peningkatan tata kelola yang lebih berintegritas.



Sumber: KPK RI, 2024

Gambar 2-52 Grafik Status Indeks Integritas di Pemerintah Daerah DIY Tahun 2021-2023

Pengawasan pemerintahan daerah dilakukan melalui rangkaian pengawasan yang umumnya terdapat temuan dan kemudian diberi rekomendasi atas upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan di wilayah DIY pada waktu berkenaan. Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan daerah di DIY dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan regulasi yang berlaku terkait dengan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah. Disamping itu, Pemerintah Daerah DIY juga menerapkan sinergi kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap objek pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Daerah DIY dapat dicapai secara optimal. Data temuan, rekomendasi, dan tindaklanjut hasil pemeriksaan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2019-2023 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2-153 Temuan, Rekomendasi, dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2019-2023

No	Sub Elemen	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan						
1.1	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	Temuan	22	22	24	16	37
1.2	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Rekomendasi	43	53	60	49	74
1.3	Temuan Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)	Temuan	518	725	499	490	321
1.4	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	Rekomendasi	1.284	1.942	940	1221	757
2	Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan						
2.1	Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	%	99,60	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2	Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)	%	100,00	100,00	99,00	100,00	100,00

Sumber : Data diolah, 2024

2.1.3.7 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan

2.1.3.7.1 Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan wakil Gubernur

Keistimewaan DIY ditetapkan sejak UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan oleh DPR RI pada tanggal 31 Agustus tahun 2012 silam. Ditetapkannya DIY sebagai Daerah Istimewa tak lepas dari adanya Amanat 5 September 1945 yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII sebagai tanggapan atas diterimanya Piagam 19 Agustus 2-292

1945 dari Presiden Soekarno. Secara umum Amanat 5 September 1945 tersebut mencakup tiga hal, yaitu :

- 1.) Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.
- 2.) Semua urusan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dipegang oleh Sultan.
- 3.) Sultan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Sebagaimana telah diketahui, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan bergabungnya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga Kadipaten Pakualaman ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi momentum yang sangat strategis terhadap kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini karena pada masa itu belum ada kerajaan di nusantara maupun negara-negara bentukan Belanda yang menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan keistimewaan yang ditetapkan tersendiri oleh Pemerintah Pusat dengan operasional pemerintahan yang dipegang langsung Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Gubernur dan KGPAA Paku Alam VIII sebagai Wakil Gubernur.

Pemda DIY selain melaksanakan kewenangan urusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah DIY juga memiliki kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (4) memberikan amanat bahwa kewenangan dalam urusan keistimewaan yang mencakup : (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur , (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan , (d) pertanahan , dan (e) tata ruang, harus diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). Pelaksanaan Urusan Keistimewaan DIY dari tahun 2017-2022 telah mengalami peningkatan kualitas kegiatan yang mengarah kepada ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Pasca ditetapkannya UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, telah dilakukan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY oleh Presiden di Ruang Garuda Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta, pada Rabu 10 Oktober 2012. Dasar Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2012-2017 berdasarkan Keppres Nomor 87/P/Tahun 2012 tertanggal 3 Oktober 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY Masa Jabatan 2012-2017 dan KGPAA Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur Masa Jabatan 2012-2017.

Penyusunan regulasi tindak lanjut Undang-undang Keistimewaan terkait Tata Cara Pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan pada tahun 2014. Penetapannya pada tahun 2015 dengan Perdais Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada tanggal 10 Mei 2016 dilakukan pelantikan KGPAA Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur dikarenakan KGPAA Paku Alam IX wafat pada tanggal 21 November 2015. Pelantikan ini berdasarkan Keppres Nomor 55/P Tahun 2016 tentang Penetapan Wakil Gubernur DIY Sisa Masa Jabatan 2012-2017. Selanjutnya pada hari Selasa 10 Oktober 2017 dilakukan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY oleh Presiden di Istana Presiden Jakarta berdasarkan Keppres 107/P tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017 dan Pengesahan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 tanggal 6 September 2017.

2.1.3.7.2 Urusan Kelembagaan

Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY merupakan Kewenangan keistimewaan dalam melaksanakan pengorganisasian yang diselenggarakan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat yang berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Dalam Urusan kelembagaan DIY dibentuk berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa Kewenangan

DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY.

Ketentuan dalam Undang-Undang Keistimewaan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, bahwa Perangkat Daerah DIY dibentuk berdasarkan beban kerja, karakteristik, tata kerja kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan asas efektif dan efisien. Dalam perspektif keistimewaan ini, kelembagaan di DIY dibentuk didasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat, yaitu dengan cara memperkuat relasi antara provinsi dengan kabupaten/kota yang tidak hanya sekedar struktur di provinsi tetapi juga pola hubungannya dengan kabupaten/kota sehingga koordinasi dan integrasi bisa berjalan optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Bentuk kelembagaan DIY ini bisa menjadi keunggulan komparatif DIY dibanding daerah otonomi lain.

Selanjutnya implementasi bentuk kelembagaan yang mencirikan keistimewaan DIY dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, diantaranya dengan adanya lembaga yang menangani kewenangan keistimewaan sebagai berikut:

- a. Paniradya Kaistimewan;
- b. Parampara Praja,
- c. Kundha Kabudayan,
- d. Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana.

Ciri lain penyelenggaraan urusan keistimewaan dari unsur lembaga Pemerintah Daerah DIY, adalah melaksanakan dan mengisi serta makin memperkuat keistimewaan DIY di bawah koordinator urusan keistimewaan di masing-masing lembaga di atas. Dan agar dapat menyentuh langsung pelayanannya ke masyarakat/rakyat, kemudian diberikan penugasan urusan keistimewaan DIY kepada Kabupaten/Kota sampai Kalurahan/Kelurahan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, kecamatan maupun desa, dengan mendasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan. Penugasan tersebut diantaranya dengan latar belakang sebagai berikut:

- a. Keistimewaan DIY didasarkan pada sejarah dan hak asal-usul DIY;

- b. Keistimewaan DIY sudah dan masih tetap hidup, diterima dan menjadi milik seluruh masyarakat DIY;
- c. Substansi keistimewaan DIY tidak hanya pengisian jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, melainkan mencakup kelembagaan, pertanahan, tata ruang dan kebudayaan;
- d. Ruang lingkup penyelenggaraan dan tujuan keistimewaan DIY meliputi seluruh masyarakat DIY yang ada di Kabupaten/Kota, Kapanewon/Kemantren hingga Kalurahan/Kelurahan;

Dengan latar belakang tersebut, maka keberhasilan pelaksanaan keistimewaan DIY tidak hanya diselenggarakan oleh Pemda DIY, tetapi merupakan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kasultanan, Kadipaten, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai Pemerintah Kalurahan/Kelurahan.

2.1.3.7.3 Urusan Kebudayaan

Sebagaimana tercantum dalam RPJPD DIY tahun 2005-2025, visi DIY yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Percepatan pencapaian visi tersebut semakin jelas setelah ditetapkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY serta Perdais Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Percepatan ini juga didukung oleh komitmen kebijakan dan anggaran oleh pemerintah pusat melalui alokasi Dana Keistimewaan. Untuk mengukur kinerja Urusan Kebudayaan dilakukan dengan melihat 4 indikator capaian sasaran yakni:

- a. Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan;
- b. Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum;
- c. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya;
- b. Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY.

Indikator Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Dikelola dan Dilestarikan Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya benda dan tak benda yang cukup banyak dan lengkap meliputi periode pra sejarah, klasik, Islam dan asing baik eropa maupun asia. Pengelolaan budaya benda dan tak benda merupakan hal yang sangat penting, sehingga Indikator jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi mencerminkan pelestarian

dan pengelolaan di DIY. Pencapaian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Benda dan Tak Benda di DIY didukung melalui kegiatan perlindungan (penyelamatan, perawatan, pemeliharaan dan pemugaran), selain itu didukung pula dengan adanya promosi publikasi. Meskipun demikian, capaian sangat bergantung dengan kebijakan pemerintah pusat maupun lembaga Internasional (UNESCO) dalam melakukan penetapan Budaya Benda maupun Tak Benda.

2.1.3.7.4 Urusan Pertanahan

Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan di DIY dilakukan dengan berbagai cara meliputi pendaftaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan; penerbitan sertifikat Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa; penerbitan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa; serta penerbitan izin pengelolaan tanah kas desa. Hingga tahun 2022, telah dilakukan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sejumlah 13.837 bidang dan telah terbit sertifikat untuk 9.985 bidang tanah. Jumlah Tanah Desa bersertifikat sampai dengan tahun 2020 mencapai 16.068 bidang. Adapun 150 bidang di antaranya sedang dalam proses penyesuaian pencatatan sertifikat tanah desa pada tahun 2020.

Selain itu juga telah terbit 392 Peraturan Desa serta 856 izin pengelolaan tanah kas desa. Program pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan juga diiringi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, ditemukan sejumlah 217 bidang tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Selain itu juga terdapat gap antara jumlah bidang tanah yang digunakan dengan jumlah Izin Gubernur yang diterbitkan. Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa terdapat 623 bidang tanah yang digunakan tetapi hanya 167 izin gubernur yang dikeluarkan. Hasil monitoring dan evaluasi ini tentu menjadi acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan di DIY yang lebih baik.

Penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan di DIY dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pertanahan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, di DIY terjadi permasalahan pertanahan baik dalam bentuk tukar menukar maupun non-tukar menukar. Tindak lanjut penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan disesuaikan dengan jenis permasalahan yang terjadi.

2.1.3.7.5 Urusan Tata Ruang

Aksesibilitas memegang peranan penting dalam upaya menunjang perkembangan suatu daerah. Untuk meningkatkan aksesibilitas, perlu dilakukan pengembangan jaringan jalan. Oleh karena itu, Pemda DIY berencana mengembangkan Jaringan Jalan di DIY, yang memiliki nilai strategis dan istimewa.

Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) dibangun untuk merevitalisasi kawasan selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas antar Satuan Ruang Strategis Keistimewaan. JJLS merupakan salah satu solusi berkelanjutan terhadap upaya untuk menekan ketimpangan pembangunan wilayah selatan. JJLS dibangun membentang dari Kulon Progo, Bantul, hingga Gunungkidul, sepanjang 116,07 km. Keberadaan akses berupa jalan yang memadai untuk 4 lajur ini, dimungkinkan sebagai pengungkit terhadap akses wisata atau sarana pendukung lainnya, seperti bandara atau pelabuhan dengan spot-spot pertumbuhan lainnya di selatan Jawa. Adanya JJLS mengakibatkan kawasan selatan menjadi semakin terbuka terhadap kawasan sekitarnya, termasuk Jawa Tengah bagian selatan, sehingga keberadaan jalan yang memiliki lebar 24-60 meter itu, menjadi penting untuk segera diwujudkan.

Pembiayaan melalui Dana Keistimewaan (urusan tata ruang) pada tahun 2014 hingga saat ini. Alokasi dana keistimewaan untuk pembangunan JJLS, terutama pada alokasi pengadaan tanahnya, menjadi titik ungit dalam melakukan percepatan pembangunan JJLS di DIY. Pembangunan JJLS merupakan kolaborasi, dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Keduanya menyepakati pembagian tanggung jawab dan kewajiban masing-masing dalam rangka terwujudnya pengembangan wilayah Pantai Selatan khususnya pembangunan jalan JJLS.

Sumbu filosofi merupakan garis nyata yang menghubungkan antara Tugu Pal Putih atau Tugu Golong-Gilig, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Panggung Krapyak. Keberadaan sumbu filosofi jelas ada dan nampak berbeda dengan garis imajiner. Sumbu filosofi pada dasarnya adalah aset yang harus dijaga dengan hati-hati untuk eksistensi Keistimewaan Yogyakarta dan masa depan DIY.

Penataan sumbu filosofi memiliki tujuan: 1) Merevitalisasi keberadaan symbol simbol sumbu filosofi (Panggung Krapyak, Kawasan Kraton Yogyakarta, Kawasan Malioboro, hingga Tugu Jogja) sebagai pusat kebudayaan yang terus hidup; 2) Menata Kawasan Malioboro untuk mengurai problematika dinamika perkotaan yang terkesan tidak nyaman, semrawut, macet, kumuh, dan kotor; serta 3) Menata

dan mengelola SDM yang memiliki kepentingan dalam kawasan sumbu filosofi agar memiliki rasa kepemilikan secara berkelanjutan.

Berikut capaian kinerja Urusan Keistimewaan:

Tabel 2-154 Capaian kinerja urusan Keistimewaan DIY Tahun 2018-2022

No	Sasaran / Program	Indikator	Target 2018	Capaian 2018	Target 2019	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022
	IKU KEISTIMEWAAN											
1	Sasaran Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi	11,46	11,46	11,68	13,10	11,72	11,97	11,99	12,22	12,04	15,67*
2	Sasaran Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Capaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	21,11	21,54	30,42	31,53	40,69	40,69	49,03	51,81	54,44	55,28*
3	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	65,22	100	73,91	96,15	82,61	84,62	86,96	92,31	91,30	92,31*
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	7.919	7.919	9.419	10.729	13.419	12.437	17.619	15.335	21.877	22.283*

*angka sementara

Sumber : Paniradya Kaistimewan diolah 2022

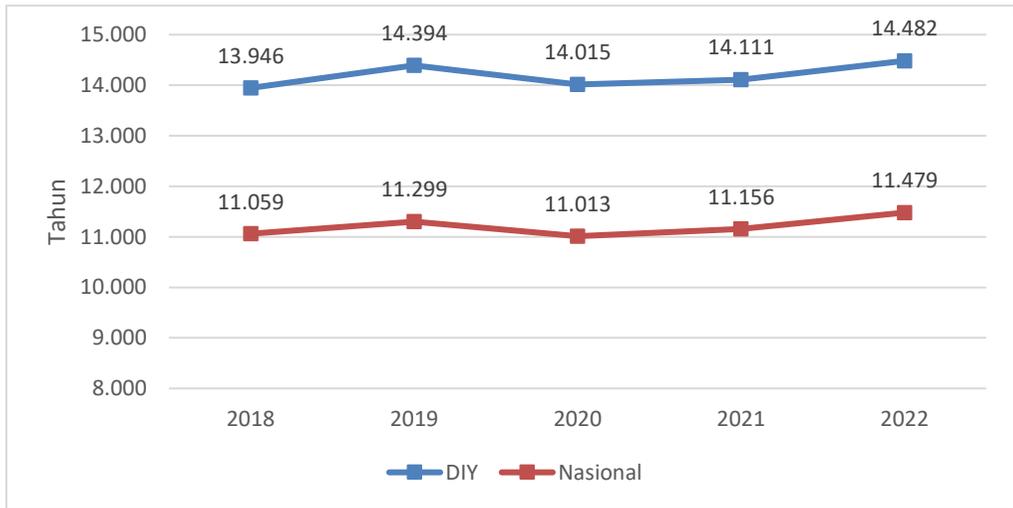
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing adalah kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk melihat aspek daya saing meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, nilai tukar petani, persentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan, rasio ekspor impor, rasio ketergantungan, rasio kewirausahaan dan kriminalitas.

Selama lima tahun terakhir, capaian atas indikator-indikator tersebut menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita masyarakat DIY selalu di atas rata-rata nasional. Nilai tukar petani mengalami kecenderungan menurun dan bahkan pada dua tahun terakhir berada di bawah angka 100, yang berarti bahwa indeks yang diterima oleh petani lebih kecil dibandingkan indeks yang dibayarkan oleh petani. Indikator presentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan menunjukkan bahwa masyarakat DIY memiliki pola konsumsi non makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Indikator presentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan menunjukkan bahwa masyarakat DIY memiliki pola konsumsi non makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Indikator rasio ekspor impor yang selalu di atas nilai satu menunjukkan DIY memiliki daya saing dalam perdagangan Internasional. Indikator kriminalitas menunjukkan peningkatan resiko penduduk terkena kejahatan selama tiga tahun terakhir. Indikator rasio ketergantungan di DIY relatif stabil pada angka 44-46.

2.1.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

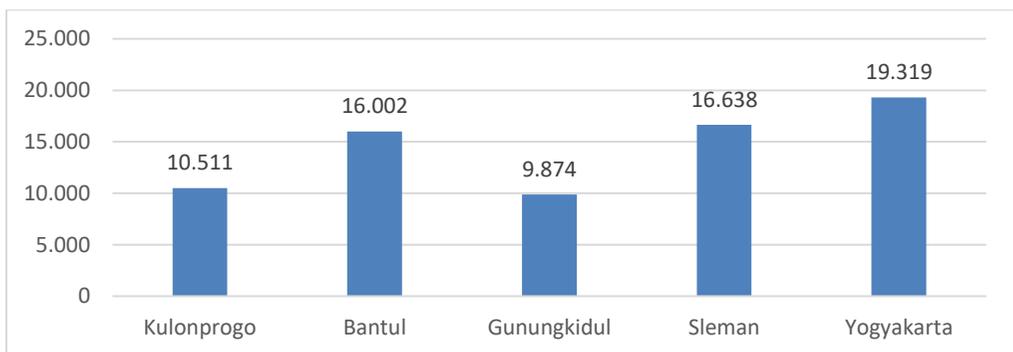
Daya saing daerah dari sisi ekonomi dapat diukur dari daya beli masyarakat, yang menunjukkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan indikator untuk mengukur daya beli masyarakat. Masyarakat dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan semakin tinggi maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang dinikmati sebagai dampak dari ekonomi yang membaik. Nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan DIY cenderung meningkat, yaitu sebesar Rp13.946.000 pada tahun 2018 menjadi Rp14.482.000 pada tahun 2022. Pada nilai tersebut DIY berada di atas nilai rata-rata nilai nasional yang sebesar Rp11.479.000 dan di peringkat kedua setelah DKI Jakarta yang sebesar Rp18.927.000 (Badan Pusat Statistik, 2022). Perkembangan lima tahun terakhir (tahun 2018-2022) pengeluaran perkapita yang disesuaikan DIY dapat dilihat pada gambar di bawah.



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-74 Grafik Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Penduduk DIY Tahun 2018-2022 (dalam ribu)

Dari sisi kewilayahan, nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kota Yogyakarta menempati peringkat tertinggi dengan nilai Rp19.319.000,-, sedangkan Kabupaten Gunungkidul pada posisi terbawah dengan nilai Rp9.874.000,-. Nilai pengeluaran perkapita yang disesuaikan untuk masing-masing kabupaten/kota di DIY pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah.



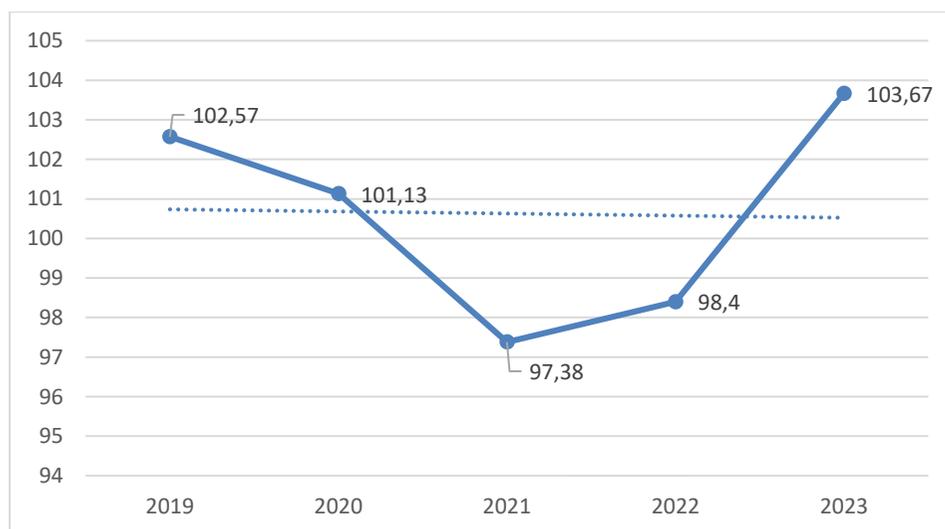
Sumber : BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-75 Nilai Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan Tiap Kabupaten/Kota di DIY (dalam ribuan)

2.1.4.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) dapat menjadi indikator daya saing di sektor pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang lazim digunakan untuk mengukur daya saing di sektor pertanian. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap harga yang dibayar petani (Ib). Nilai NTP lebih dari 100 artinya petani mengalami surplus karena kenaikan harga barang/jasa yang diproduksi lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga barang yang dikonsumsi, sedangkan NTP kurang dari 100 memberikan arti bahwa petani mengalami defisit karena kenaikan harga yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya.

Nilai Tukar Petani DIY cenderung menurun selama lima tahun terakhir, namun pada tahun 2023 NTP DIY mencapai nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Perkembangan NTP DIY selama tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



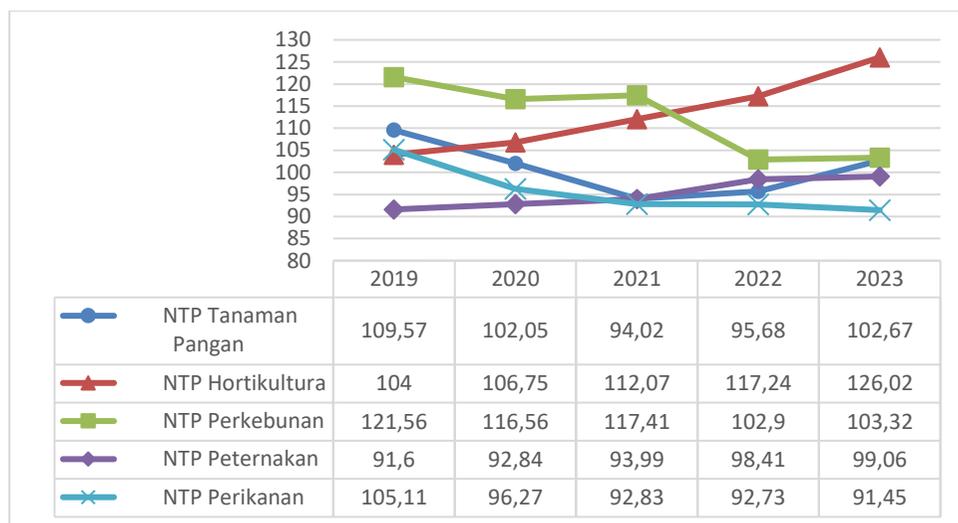
Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2-76 Perkembangan NTP di DIY Tahun 2019-2023

Berdasarkan sub sektor, perkembangan NTP peternakan dan perikanan selama tahun 2019-2023 menunjukkan defisit karena selalu dibawah angka 100. Di sisi lain, NTP subsektor yang konsisten di atas angka 100 adalah perkebunan dan

2-302

hortikultura. NTP hortikultura merupakan subsektor yang konsisten mengalami tren meningkat selama lima tahun terakhir. Sementara itu, NTP Perkebunan memiliki kecenderungan menurun. Data perkembangan NTP per subsektor DIY Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2024

Gambar 2-77 NTP Per Subsektor Tahun 2019-2023

2.1.4.3 Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Per Kapita (Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Konsumsi Bukan Makanan)

Hukum Engel menjelaskan bahwa rumah tangga atau masyarakat dapat dianggap memiliki tingkat kesejahteraan yang baik ketika persentase pengeluaran konsumsi bukan makanan lebih besar dari konsumsi makanan atau lebih dari 50%. Persentase pengeluaran konsumsi bukan makanan tersebut dapat menjadi indikator daya saing sebab masyarakat atau daerah dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok (makanan) apabila memiliki nilai lebih dari 50%. Persentase pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan perkotaan dan pedesaan DIY selama tahun 2018-2022 cenderung menurun yaitu dari tahun 2018 sebesar 59,39% turun menjadi 57,52% pada tahun 2022. Meskipun demikian, pada tahun 2022 persentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan DIY berada diatas rata rata nasional yaitu sebesar 49,86% sekaligus nomor tiga tertinggi nasional setelah Provinsi DKI Jakarta sebesar 62,25% dan Bali sebesar 57,73%.

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten di DIY yang memiliki persentase dibawah 50% selama lima tahun terakhir. Sedangkan kabupaten/kota lainnya cenderung konsisten memiliki nilai lebih dari 50%. Pada tahun 2022, Kota Yogyakarta memiliki persentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan tertinggi sebesar 66,90%, diikuti oleh Kabupaten Sleman dan Bantul masing-masing sebesar 58,45% dan 56,37%.

Tabel 2-155 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/ Kota di DI Yogyakarta Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Gunungkidul	47.75	46.61	48.14	45.96	46.43
Kulon Progo	51.59	53.12	54.78	51.99	53.86
Bantul	60.60	58.65	57.53	57.29	56.37
Yogyakarta	63.47	60.68	62.54	63.73	66.90
Sleman	62.02	63.82	62.61	61.23	58.45
D.I Yogyakarta	59.39	59.21	58.97	58.06	57.52

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Persentase terbesar pengeluaran konsumsi bukan makanan selama tahun 2018-2022 berturut-turut adalah kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan dan air kemudian diikuti aneka barang dan jasa; barang tahan lama; pajak, pungutan, asuransi dan seterusnya. Persentase rincian pengeluaran konsumsi bukan makanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-156 Persentase Rincian Pengeluaran Konsumsi Bukan Makanan DIY Tahun 2018-2022 (dalam persen)

Kelompok Bukan Makanan	2018	2019	2020	2021	2022
Perumahan, bahan bakar, penerangan, air	24,61	25,75	24,88	26.52	27.98
Aneka Barang dan Jasa	16,40	16,70	16,67	16.71	15.28
Barang tahan lama	10,26	7,95	8,76	6.82	5.92
Pajak, pungutan, asuransi	3,52	3,50	3,70	4.72	5.19
Pakaian, alas kaki, tutup kepala	2,58	2,62	2,84	2.10	1.92
Keperluan pesta dan upacara	2,03	2,69	2,12	1.19	1.23

Kelompok Bukan Makanan	2018	2019	2020	2021	2022
Total	59,39	59,21	58,97	58.06	57.52

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

2.1.4.4 Rasio Ekspor-Import

Daya saing di sektor perdagangan luar negeri suatu daerah dapat ditelusuri melalui indikator rasio ekspor impor. Daerah dianggap memiliki daya saing yang baik apabila persentase rasio ekspor impornya lebih dari satu atau nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Rasio ekspor-impor DIY selama tahun 2018-2022 selalu di atas satu, hal ini menunjukkan DIY memiliki daya saing di perdagangan internasional. Berdasarkan data BPS Provinsi DIY, sepuluh komoditi ekspor terbesar DIY selama periode Januari-Desember 2022 adalah pakaian jadi bukan rajutan, perabot penerang rumah, barang-barang rajutan, barang-barang dari kulit, jerami atau bahan anyaman, kayu, barang dari kayu, minyak atsiri, kosmetik, wewangian, plastik dan barang dari plastik, bulu unggas, dan kertas/karton. Sepuluh komoditas tersebut berkontribusi 91,21 persen dari keseluruhan ekspor DIY. Adapun 10 negara tujuan utama ekspor antara lain Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Australia, Belanda, Inggris, Korea Selatan, , Tiongkok, Singapura, dan Thailand.

Tabel 2-157 Nilai Ekspor Impor D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022 (dalam juta dolar AS)

Parameter	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor (nilai FOB)	424.71	403.70	398.80	557.00	583.30
Impor (nilai CIF)	101.97	95.40	124.50	153.80	145.60
Rasio E/I	4.17	4.23	3.20	3.62	4.01

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

2.1.4.5 Angka Kriminalitas

Indikator kriminalitas dapat digunakan untuk melihat daya saing daerah. Daerah yang memiliki angka kriminal tinggi akan berpotensi menghambat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Jumlah kejahatan di DIY cukup berfluktuasi selama tahun 2018 sampai dengan 2023. Pada tahun 2018 jumlah kejahatan yang dilaporkan sebesar 5.317 turun sampai 4.599 kasus pada tahun 2019 kemudian naik kembali menjadi 5.331 kasus pada tahun 2021 sebelum akhirnya turun kembali menjadi 5.166 kasus pada tahun 2022 dan 5.193 di tahun 2023. Pada rentang tahun tersebut, tercatat pelaku kejahatan kategori anak menunjukkan

peningkatan dari 17 pelaku di tahun 2018 menjadi 257 di tahun 2022. Perkembangan jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut kabupaten/kota di DIY selama tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-158 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Tiap 100.000 Penduduk di DIY Tahun 2018-2023

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gunungkidul	287	271	224	281	296	286
Yogyakarta	1,178	744	633	633	736	818
Kulon Progo	441	443	546	485	395	406
Bantul	796	937	953	1,322	1,330	1.016
Sleman	2,615	2,204	2,345	2,610	2,409	2.667
DIY	5,317	4,599	4,701	5,331	5,166	5.193

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Resiko penduduk terkena kejahatan di DIY juga tercatat cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, dari setiap 100.000 penduduk terdapat sebanyak 146 penduduk memiliki resiko terkena kejahatan. Angka ini sempat turun pada tahun 2019 menjadi 120 penduduk, akan tetapi meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar 139 penduduk serta 138 di tahun 2023. Perkembangan resiko penduduk terkena kejahatan selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-159 Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk di DIY Tahun 2018-2023

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gunungkidul	38	36	30	38	39	37
Yogyakarta	285	172	145	145	196	216
Kulon Progo	98	103	126	112	89	90
Bantul	85	92	93	128	133	100
Sleman	246	181	190	212	212	232
DIY	146	120	121	137	139	138

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Kasus kejahatan yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan masyarakat DIY adalah kejahatan jalanan yang dikenal dengan sebutan klitih. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY mencatat dalam rentang tahun 2018-2023 kasus klitih cenderung meningkat, dari 32 kasus di tahun 2018 menjadi 70 kasus di tahun 2023. Tercatat jumlah kasus kejahatan jalanan selama tahun 2018 sampai dengan 2-306

2023 sebanyak 304 kasus. Data kasus kejahatan jalanan di DIY pada tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-160 Data Kasus Kejahatan Jalanan di DIY Tahun 2018-2023

No	Kesatuan	Tahun						Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	MAPOLDA DIY	-	-	-	1	0	0	1
2	POLRESTA Yogyakarta	9	13	12	10	30	13	87
3	POLRES Sleman	10	6	21	16	32	31	116
4	POLRES Bantul	11	-	15	21	4	21	72
5	POLRES Kulon Progo	2	-	6	2	6	2	18
6	POLRES Gunungkidul	-	-	2	1	4	3	10
Jumlah		32	19	56	51	76	70	340

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, 2024

2.1.4.6 Tingkat Ketergantungan /Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dapat menjadi pendekatan untuk indikator daya saing daerah karena dapat menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Daya saing daerah dapat dianggap baik bila nilai rasio ini semakin kecil. Perkembangan rasio ketergantungan di DIY selama tahun 2018-2022 relatif stabil di angka 44-46. Hal ini berarti setiap 100 orang yang berusia kerja di DIY mempunyai tanggungan sebanyak 44-46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio beban tanggungan penduduk DIY tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-161 Rasio Beban Tanggungan Penduduk DIY Tahun 2018-2022

Tahun	Umur			Jumlah	Rasio ketergantungan
	0-14	15-64	65+		
2018	21,72	68,93	9,34	100	45
2019	21,40	69,02	9,57	100	45
2020	20,41	68,78	10,81	100	45
2021	20,21	68,72	11,07	100	46
2022	20,20	69,24	10,55	100	44

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 diolah

2.1.4.7 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan menunjukkan besarnya jumlah wirausaha dibandingkan dengan total seluruh penduduk usia kerja. Salah satu cara untuk melihat besarnya wirausaha di daerah adalah dengan melihat proporsi kelompok penduduk yang melakukan kegiatan berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar dalam data SAKERNAS. Data bulan Februari 2022 berikut menunjukkan bahwa jumlah orang yang berusaha dengan dibantu buruh tetap di DIY hanya 3,63%. Mayoritas penduduk tentu masih mencari penghidupan dengan menjadi buruh atau karyawan. Dalam RPJMN RI, ditargetkan tahun 2024 rasio kewirausahaan secara nasional mencapai angka 4 persen. Jika dilihat pada data berikut, rasio kewirausahaan di DIY tahun 2018 dan 2019 telah mencapai angka di atas 4 persen. Namun demikian, tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Dampak Covid-19 terhadap kondisi bisnis dan keuangan diduga berpengaruh terhadap penurunan ini. Meskipun demikian, capaian pada tahun 2022 sudah mulai meningkat kembali pada angka 3,63 persen. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pelanggaran aktivitas ekonomi selama tahun 2022.

Tabel 2-162 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2022

Status Pekerjaan	Persentase (%)
Berusaha sendiri	18.03
Berusaha dibantu buruh tak tetap/pekerja keluarga	18.28
Berusaha dibantu buruh tetap	3.63
Buruh/karyawan	39.06
Pekerja bebas di pertanian	1.90
Pekerja bebas di non pertanian	4.03
Pekerja tak dibayar	15.06

Sumber: Sakernas BPS, 2022

Tabel 2-163 Persentase Penduduk Berusaha Dengan Dibantu Buruh Tetap 2018-2022

Status Pekerjaan	2018	2019	2020	2021	2022
Berusaha dibantu buruh tetap	4,24	4,08	3,81	3,53	3,63

Sumber: Sakernas BPS, 2022

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD DIY SAMPAI DENGAN TAHUN BERKENAAN

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022 – 2027. Sementara itu, tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 menjadi pelaksanaan pertama dari Rencana Pembangunan Daerah DIY 2023-2026. Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa lingkup pengendalian dan evaluasi pembangunan meliputi; 1) pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, 2) pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan 3) evaluasi terhadap hasil pembangunan daerah. Bagian ini merupakan evaluasi pelaksanaan hasil pembangunan di DIY sampai dengan triwulan I Tahun 2024.

2.2.1 Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur s.d. Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan dokumen RPJMD DIY 2022-2027 dan RKPD DIY Tahun 2024, tolok ukur dalam keberhasilan pembangunan Pemda DIY pada tahun 2024, diukur menggunakan 3 Tujuan dengan 5 indikator. Kinerja pada TW I Tahun 2024, capaiannya dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-164 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemda DIY Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target RKPD Tahun 2024	Realisasi s.d. TW I 2024	% capaian	Keterangan
1.1. Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat.	IGI (Inclusive Growth Index)	Indeks	6.42	6.24	97,1%	Capaian 2022, LKPJ DIY 2022; sumber data BPS
	Indeks Kebahagiaan	Indeks	73.41	71.7	97,6%	Indeks Kebahagiaan tahun 2021 sebesar 71,70. Angka ini dihasilkan 3 tahun sekali. Tahun 2014 sebesar 70,77 dan tahun 2017 sebesar 72,93. sumber data BPS

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target RKPD Tahun 2024	Realisasi s.d. TW I 2024	% capaian	Keterangan
2.1. Mengecilnya Ketimpangan Wilayah.	Indeks Williamson	Indeks	0.441	0.4916	88,5%	IW 2022 : 0,4916 (Data IW hanya bisa tahunan.) sumber data BPS
3.1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A	88,15 (A)	100	Capaian 2023, Kemenpan RB 2024.
4.1. Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	Sedang	66,29 (Sedang)	100	Dataku <i>Update</i> 4 April 2024. Data realisasi s.d TW I 2024 menggunakan capaian tahun 2023.

Sumber: BPS; Kemenpan RB; <https://sungguh.jogjaprovo.go.id/>, 2024 (diolah)

Capaian dari indikator-indikator tujuan di atas dapat dijelaskan sbb:

1.1. Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat.

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat – Angka Inclusive Growth Index (IGI)

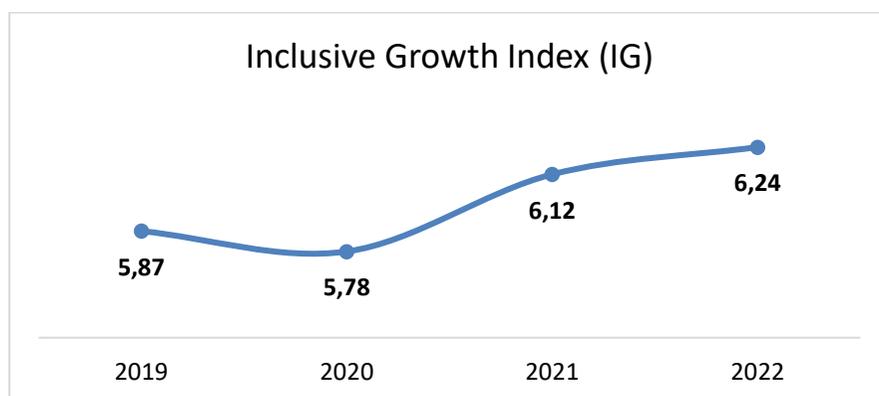
Peningkatan kinerja perekonomian berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin bahwa semua orang akan memperoleh manfaat yang sama. Ukuran keberhasilan pembangunan maupun dinamika perekonomian suatu daerah bukan hanya ditentukan oleh faktor pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan tersebut juga ditentukan dari kemampuan daerah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat serta mengurangi permasalahan sosial ekonomi termasuk tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif atau yang selanjutnya dikenal sebagai Inclusive Growth Index (IGI) telah dikembangkan sebagai sebuah ukuran yang mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan masalah sosial. Indikator tersebut dikembangkan oleh beberapa lembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB), World Economic Forum (WEF), dan

United Nation Development Programme (UNDP). Indikator yang diciptakan adalah sebuah set variabel dan formula untuk melakukan pengukuran pertumbuhan ekonomi alternatif yang menekankan pada kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat.

Pengukuran ini disebut dengan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang mencerminkan suatu pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan kesempatan-kesempatan ekonomi yang sama bagi semua orang. Pertumbuhan ekonomi inklusif berfokus pada penciptaan kesempatan ekonomi dan akses yang sama bagi semua anggota masyarakat dari semua golongan. Menurut Asian Development Bank (ADB) dan Bappenas, setidaknya ada 3 pilar dalam kerangka kerja pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu: 1) pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi, efisien, dan berkelanjutan; 2) pilar inklusif sosial (pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan); serta 3) pilar jaring pengaman sosial (perluasan akses dan kesempatan). Ketiga pilar tersebut harus didasari oleh tata kelola dan kelembagaan yang baik.

Nilai IGI berkisar dari 0 s/d 10, jika nilainya < 4 berarti kurang memuaskan, nilai antara 4 s/d 7 berarti memuaskan sedangkan nilai 8 s/d 10 artinya sangat memuaskan. Capaian angka IGI DIY selama periode 2019 – 2022 dapat dilihat sebagaimana grafik di bawah ini.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023 (diolah)

Gambar 2-78 Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IGI) Tahun 2019-2022

Nilai IGI sempat menurun di tahun 2020 sebagai dampak pandemi. Meskipun demikian selama tahun 2020 sampai 2022, nilai IGI menunjukkan tren kenaikan pertumbuhan ekonomi inklusif di DIY. Selama periode 2020 sampai 2022, IGI meningkat sebesar 0,46 poin. Nilai IGI sebesar 6,24 mengindikasikan bahwa pembangunan inklusif DIY dikategorikan sebagai memuaskan. Tren peningkatan nilai IGI menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi DIY disertai dengan menurunnya tingkat kemiskinan serta perluasan akses dan tingkat pengangguran terbuka. Sebagai catatan, BPS Prov. DIY terakhir menghitung Angka Inclusive Growth Index (IGI) pada tahun 2022, disebabkan BAPPENAS telah menghitung IGI yang sifatnya nasional sehingga dapat dibandingkan dengan provinsi lain.

2. Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat-Indeks Kebahagiaan (*Index of Happiness*)

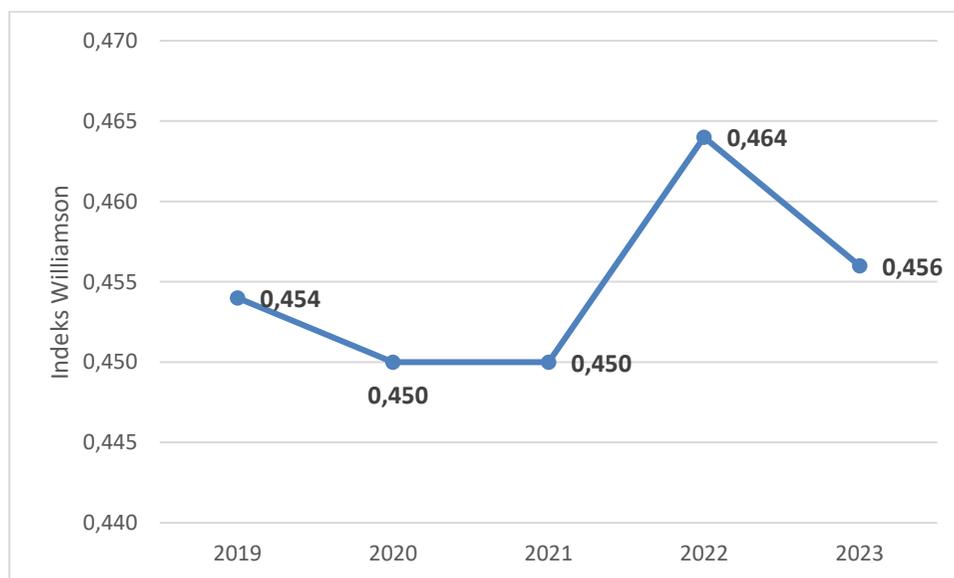
Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka semakin merasa tidak bahagia. Pengukuran indeks kebahagiaan tidak bersifat tahunan. metode pengukuran yang tercatat adalah tahun 2014, 2017 dan 2021. Berdasarkan rilis terakhir BPS tahun 2021, disebutkan bahwa Metode pengukuran Indeks Kebahagiaan tahun 2021 diukur dengan metode baru, dimana kontribusi 2017 menjadi tahun dasar ukuran kebahagiaan. Hal ini disebabkan perkembangan *framework* Indeks Kebahagiaan dari satu Dimensi Kepuasan Hidup pada 2014 menjadi tiga dimensi pada 2017 dan 2021, di mana, terdapat penambahan Dimensi Perasaan dan Dimensi Makna Hidup pada ukuran Indeks Kebahagiaan. Penghitungan capaian indeks kebahagiaan dilakukan satu kali setiap tiga tahun. Data capaian indeks kebahagiaan DIY terakhir yang dirilis oleh BPS adalah capaian pada tahun 2021 sebesar 71,70. Adapun dari target 2024 sebesar 73,41, capaiannya belum ada rilis.

2.1. Mengecilnya Ketimpangan Wilayah - Indeks Williamson

Kepemilikan sumber daya yang berbeda maupun kondisi geografis yang bervariasi antar wilayah menyebabkan kesenjangan secara umum. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di DIY, yaitu Indeks Williamson (dihitung

2-312

dengan menggunakan PDRB per kapita yang berkaitan dengan jumlah penduduk per daerah). Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Pada gambar berikut ini menunjukkan perkembangan nilai Indeks Williamson di DIY dari tahun ke tahun.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (diolah)

Gambar 2-79 Indeks Williamson DIY Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar di atas, nampak bahwa kesenjangan ekonomi antar wilayah di DIY berada di antara 0,35 dan 0,5. Artinya, kesenjangan ekonomi antar wilayah di DIY dapat dikategorikan dalam ketimpangan sedang. Ketimpangan meningkat pada periode 2019 sampai 2022 yaitu dari Indeks Williamson 0,4544 (2019) menjadi 0,464 (2021). Setelah itu, ketimpangan mengalami penurunan menjadi 0,456 di tahun 2023.

3.1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik - Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Reformasi Birokrasi merupakan indikator indeks yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB RI atas Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Indeks reformasi Birokrasi mencerminkan kualitas perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja bersih, bebas dari KKN, akuntabel, dan profesional melayani serta memberikan dampak nyata pada pencapaian program pembangunan.

Target dan capaian indikator tujuan berupa Indikator Reformasi Birokrasi (RB) Pemda DIY tahun 2023 yang diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB RI adalah A sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2024 yaitu Predikat A.

Tingginya angka ketercapaian Indeks RB tahun 2023 dipengaruhi oleh Pelaksana Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui double track berdasarkan Peraturan menteri PAN dan RB RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Kedua track tersebut yaitu : Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Terdapat 5 (lima) Tematik Pembangunan yang dirumuskan dalam Reformasi Birokrasi Tematik yaitu : Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan, Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian Inflasi, Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi, Reformasi Birokrasi Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi Tematik Administrasi Pemerintahan (*Stunting*).

4.1. Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik – Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin menyadari bahwa keberlanjutan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup adalah dua sisi dari koin yang tidak bisa dipisahkan. Masyarakat dan pelaku ekonomi telah bersatu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan fokus pada kelestarian lingkungan. Dengan adanya kesadaran yang meningkat tentang dampak ekonomi terhadap lingkungan, berbagai sektor mulai bergerak menuju praktek-praktek yang ramah lingkungan. Industri-industri mengadopsi teknologi hijau, pengarusutamaan penggunaan energi terbarukan, dan praktek-praktek produksi yang ramah lingkungan harus

menjadi norma. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, seperti yang tercermin dalam IKLH, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penanaman pohon, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan limbah yang lebih efektif telah menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi.

Penggunaan IKLH dalam kebijakan pembangunan sangatlah penting, salah satunya dapat menjadi panduan bagi pengambil keputusan dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan pembangunan. Dengan mempertimbangkan nilai IKLH, kebijakan dapat diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pelestarian lingkungan, menghindari dampak negatif jangka panjang.

Terdapat kenaikan realisasi IKLH jika dibandingkan dengan tahun 2022 (59,92), dimana pada tahun 2023 realisasinya mencapai 66,29 dari target sebesar 62,96. Perhitungan IKLH tahun 2023 menggunakan dasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut terdapat indeks baru berupa Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang secara signifikan mengungkit nilai IKLH di DIY. Secara umum, capaian realisasi IKLH DIY ditunjang dari capaian IKA, IKU, dan IKAL yang juga melebihi target. Sedangkan capaian IKL masih belum dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Hasil Evaluasi AKIP Pemda DIY dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, masuk dalam predikat AA, yang berarti sepanjang periode RPJMD 2017-2022 dari tahun pertama (tahun 2018) sampai tahun kelima (tahun 2022) telah melebihi target (A) serta periode RPD 2023-2026 (tahun 2023), telah mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan target predikat AA. Dari Hasil Nilai terakhir Evaluasi AKIP yang dikeluarkan KemenPAN dan RB RI pada tahun 2023, Pemda DIY memperoleh nilai 92,10 (AA). Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi AKIP pada Tahun 2022, dari total semua komponen yang dinilai, terdapat kenaikan sebesar 1,01 poin. Kenaikan tersebut pada semua komponen, yaitu: Perencanaan Kinerja dengan kenaikan sebesar 0,22 poin; Pengukuran Kinerja dengan kenaikan sebesar 0,06 poin; Pelaporan Kinerja sebesar 0,1 poin; serta komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 0,63 poin.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemda DIY tahun 2023 tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Pada komponen Perencanaan Kinerja, perumusan dokumen perencanaan kinerja DIY yang baru telah berorientasi hasil

dan telah dilengkapi dengan berbagai indikator kinerja yang relevan. Pada komponen Pengukuran Kinerja, Pergantian rencana jangka menengah yang menyebabkan perubahan dokumen perencanaan kinerja dilakukan dengan baik mulai dari peningkatan kualitas indikator yang digunakan, penetapan target yang mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, hingga penyusunan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menjelaskan indikator kinerja yang telah dipilih. Kemudian, dari komponen Pelaporan Kinerja Laporan kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah telah disusun dengan mekanisme yang baik sehingga kualitasnya semakin meningkat, pemanfaatannya juga dilakukan dengan baik, hal ini terlihat dari berbagai indikator tahun berjalan yang targetnya telah sesuai dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, dari komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilakukan Pemda DIY telah cukup baik untuk menjaga keberhasilan implementasi SAKIP secara umum.

2.2.2 Capaian Kinerja Sasaran Pemda DIY s.d. TW I Tahun 2024

Berikut ini adalah gambaran umum kinerja capaian sasaran Pemda DIY sd Tahun 2024. Secara umum karena untuk capaian makro bersifat tahunan, maka data yang tersedia mayoritas adalah data capaian tahun sebelumnya.

Tabel 2-165 Capaian Kinerja Sasaran Pemda TW I Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2024	Realisasi s.d. TW I 2024	Keterangan
1.1.1. Semakin kecilnya tingkat kemiskinan.	Angka Kemiskinan	%	10.16	11.04	BRS BPS DIY Profil Kemiskinan DIY Maret 2023, rilis pada tanggal 17 Juli 2023. Data Realisasi TW I 2023 merupakan data Tingkat Kemiskinan pada Maret 2023 yaitu sebesar 11,04 persen (BRS BPS DIY Profil Kemiskinan DIY Maret 2023). Data Realisasi TW IV 2023 dan TW I 2024 disamakan dengan data Realisasi TW I 2023 karena Tingkat Kemiskinan kondisi

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2024	Realisasi s.d. TW I 2024	Keterangan
					September 2023 belum rilis. sumber data BPS
1.1.2. Penghidupan ekonomi yang layak.	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	%	5,1 - 5,6	5.07	Ekonomi DIY Triwulan I-2023 tumbuh 5,31 persen, Triwulan II-2023 sebesar 5,16 persen, Triwulan III-2023 sebesar 4,96 persen, dan Triwulan IV-2023 sebesar 5,07 persen (Y-on-Y). Data Realisasi TW I-2024, disamakan dengan data Realisasi TW IV-2024 yaitu sebesar 5,07 persen (BRS BPS DIY Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan IV-2023, dirilis pada 5 Februari 2024), karena data Pertumbuhan Ekonomi TW I-2024 belum rilis. sumber data BPS
	Pendapatan per Kapita	Juta Rupiah	30.23	31.75	Merupakan data pendapatan per kapita tahun 2023 karena pendapatan per kapita dihitung secara tahunan.
	Tingkat Penangguran Terbuka	%	3,51 - 3,81	3.69	Data Keadaan Ketenagakerjaan DIY tersedia pada Februari dan Agustus 2023. Data Realisasi TW I dan TW II 2023 merupakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2023 yaitu sebesar 3,58 persen (BRS BPS DIY Keadaan Ketenagakerjaan DIY Februari 2023, dirilis pada 5 Mei 2023).

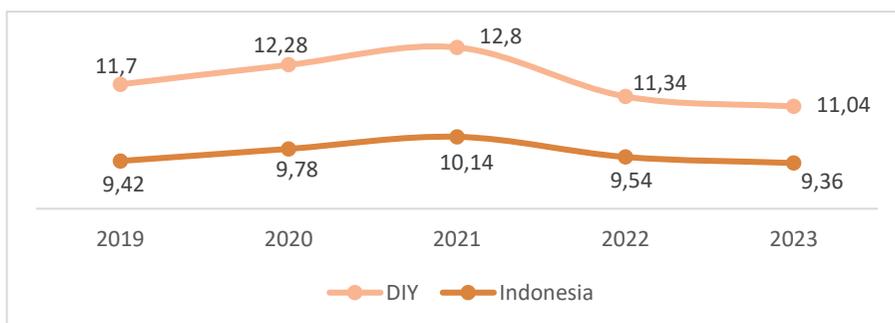
Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2024	Realisasi s.d. TW I 2024	Keterangan
					Data Realisasi TW III dan TW IV 2023, merupakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2023 yaitu sebesar 3,69 persen (BRS BPS DIY Keadaan Ketenagakerjaan DIY Agustus 2023, dirilis pada 6 November 2023). sumber data BPS
	Inflasi	%	2,00 - 4,00	2.95	Data Inflasi Tahunan/Indeks Harga Konsumen y-o-y (Maret 2024 dibanding Maret 2023) yang dirilis pada tanggal 1 April 2024. sumber data BPS
1.1.3. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81.36	81.09	Data Realisasi TW I 2024, merupakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY tahun 2023 yaitu sebesar 81,09 (BRS BPS DIY, Indeks Pembangunan Manusia DIY Tahun 2023, dirilis tanggal 1 Desember 2023). sumber data BPS
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	74.78	66.52	Capaian 2022, Kemendikbud (2023), tertinggi secara Nasional dan di atas rata-rata nasional 55,13. sumber data BPS
2.1.1. Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju.	Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruh-an PDRB DIY	%	40.09	42.2	Kondisi tahun 2023. sumber data BPS
3.1.1. Meningkatnya Good Governan ce.	Opini BPK	Indeks	WTP	WTP	Capaian 2022, BPK. Capaian 2023, diperkirakan rilis bulan April 2024.

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2024	Realisasi s.d. TW I 2024	Keterangan
	SAKIP	Indeks	AA	AA	
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	Tinggi	Tinggi	Merupakan capaian IDI tahun 2022 yaitu sebesar 85,62 yang apabila di kategorikan merupakan kategori "Tinggi". Untuk realisasi 2024 (IDI 2023) akan rilis pada triwulan II tahun 2024.
4.1.1. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	82.62	84.87	Dataku <i>Update</i> 5 Januari 2024.
4.1.2. Menurunnya risiko bencana.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	Indeks	113.11	108.15	Dataku <i>Update</i> 25 Maret 2024. Sumber: BPBD

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS; <https://sengguh.jogjaprovo.go.id/>, Dataku ; (TW I 2024) diolah.

1.1.1. Semakin kecilnya tingkat kemiskinan - Angka Kemiskinan

Kemiskinan di DIY merupakan salah satu masalah kesejahteraan masyarakat yang kompleks dan bersifat multidimensional. Hal ini menjadikan percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu isu strategis pembangunan. Secara umum, tingkat kemiskinan di DIY lebih tinggi dibandingkan nasional. Selama periode 2019 sampai dengan 2021, persentase penduduk miskin di DIY meningkat dari 11,7% menjadi 12,80% akibat dampak pandemi Covid-19. Namun pada tahun selanjutnya tingkat kemiskinan menunjukkan tren menurun. Pada Maret 2021 tercatat 12,80% kemudian pada Maret 2023 menurun menjadi 11,04% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD DIY 2022-2027 yang sebesar 10,16%.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2-80 Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2019-2023 per Maret (dalam persen)

Persentase penduduk miskin di tingkat Kabupaten/Kota bervariasi dan cenderung menurun selama periode 2018-2019, namun meningkat pada periode 2020 - 2021. Peningkatan di semua wilayah di tahun 2020 dan 2021 diakibatkan dampak pandemi. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin di semua kabupaten dan kota kembali mengalami penurunan karena perekonomian telah menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Kulon Progo yang diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 adalah 16,39% dan Gunungkidul 15,86%. Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah selama periode 2018 - 2022. Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta adalah 6,62% di tahun 2022.

Tabel 2-166 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2023 (%)

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023*
Kulon Progo	17,39	18,01	18,38	16,39	15,64
Bantul	12,92	13,5	14,04	12,27	11,95
Gunungkidul	16,61	17,07	17,69	15,86	15,60
Sleman	7,41	8,12	8,64	7,74	7,52
Kota Yogyakarta	6,84	7,27	7,69	6,62	6,40

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Ket.: *) akan rilis pada bulan Maret 2024

1.1.2. Penghidupan ekonomi yang layak.

2-320

1. Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB

Selama lima tahun terakhir perekonomian DIY menunjukkan tren penurunan pertumbuhan. Pada tahun 2020 perekonomian DIY mengalami kontraksi karena dampak pandemi Covid-19 dengan tumbuh -2,69% (BRS Nomor 14/02/34/Th.XXIII, 5 Februari 2021). Pada tahun 2021, ekonomi DIY dapat *rebound* dengan tumbuh sebesar 5,58% dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sampai tahun 2023 dengan tumbuh sebesar 5,07%. Pertumbuhan Ekonomi DIY tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan nasional dengan selisih 0,02 poin.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2-81 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2019-2023 (%)

Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2024 adalah 5,07% dari target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2022-2027 sebesar 5,1% – 5,6%. Capaian triwulan I tahun 2024 tersebut masih menggunakan capaian tahun 2023.

Berdasar data terakhir tahun 2023, selama tiga tahun terakhir, semua kabupaten/kota se-DY tumbuh positif setelah mengalami kontraksi di tahun 2020. Pada tahun 2023, Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang tumbuh tertinggi yaitu 5,65%. Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah yang tumbuh terendah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,03%.

Tabel 2-167 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
----------------	------	------	------	------	------

Kulon Progo	13,49	-3,45	4,37	6,57	5,65
Bantul	5,53	-1,65	4,99	5,20	5,06
Gunungkidul	5,33	-0,68	5,29	5,37	5,03
Sleman	6,48	-4,05	5,61	5,15	5,09
Yogyakarta	5,96	-2,42	5,16	5,12	5,08

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

2. Pendapatan per Kapita

Secara umum, pendapatan per kapita masyarakat DIY yang dicerminkan dengan nilai PDRB ADHB per kapita menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu selama periode 2010 sampai 2023. Pendapatan per kapita tahun 2010 adalah Rp18,65 juta per kapita per tahun dan tahun 2023 adalah Rp48,36 juta per kapita per tahun. Selama periode tersebut, kenaikan pendapatan per kapita rata-rata per tahun adalah sekitar Rp2,29 juta per kapita. Kenaikan terbesar terjadi di tahun 2022 dengan kenaikan mencapai Rp3,82 juta per kapita.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan demikian, semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja atau menganggur. Tingginya jumlah pengangguran disebabkan oleh faktor utama terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia atau tidak siapnya angkatan kerja untuk masuk ke pasar kerja disebabkan tidak sesuainya kualifikasi kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan standar yang diharapkan oleh dunia kerja.

Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kerja akan berdampak pada besaran capaian TPT, dimana komponen angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Data Sakernas Agustus 2023 BPS menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di DIY sebesar 2.221.694 orang dan jumlah kesempatan Kerja sebesar 2.139.710 orang. Berdasarkan data juga diperoleh informasi jumlah pengangguran sebanyak 81.984 orang, turun 12.691 orang jika

dibandingkan pada tahun 2022 yang sebesar 94.945 orang. Meskipun jumlah pengangguran mengalami penurunan namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi Covid-19, sehingga tetap diperlukan kebijakan peningkatan perluasan kesempatan kerja untuk mengimbangi laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja.

Terkait situasi ketenagakerjaan nasional di atas, data TPT DIY menunjukkan angka penurunan yang signifikan pasca pandemi Covid-19, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan ekonomi yang berdampak pada tumbuhnya kesempatan kerja dan juga peningkatan kualitas pencari kerja. Dalam kurun 2019 - 2023 capaian TPT tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 4,57% naik 1,39% poin dari pra pandemi Covid-19 tahun 2019. Kemudian turun menjadi 3,69% pada tahun 2023 atau turun sebesar 0,37% point dibanding tahun 2022 yang mencapai angka 4,06%. Hal yang perlu dicatat bahwa capaian TPT DIY selama lima tahun terakhir masih berada dibawah rata-rata nasional. Pada periode yang sama tahun 2020 TPT nasional tertinggi 7,07% dan TPT DIY 4,57%. Pada tahun 2023 capaian TPT DIY sebesar 3,69% dan lebih rendah dibanding TPT Nasional 5,32%, perkembangan TPT Nasional dan DIY Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar di bawah.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

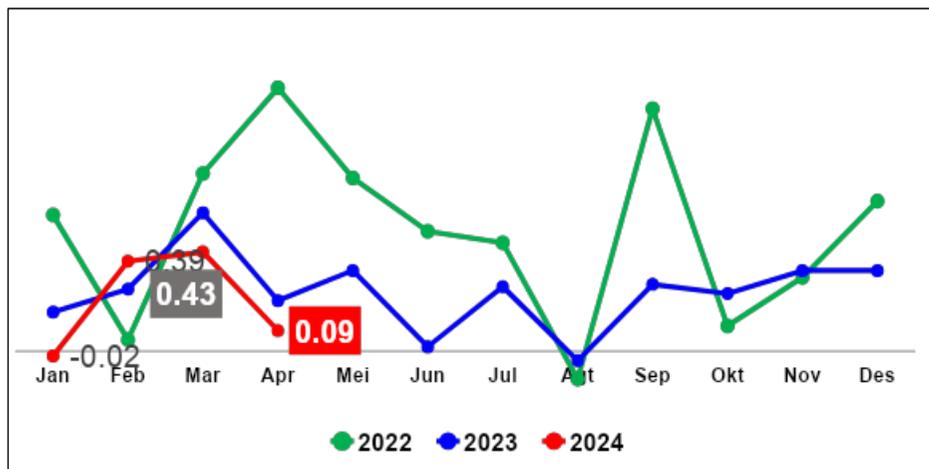
Gambar 2-82 Perkembangan TPT DIY dan Nasional tahun 2019 - 2023

Target TPT yang ditetapkan dalam RPJMD DIY 2022-2027 pada triwulan I tahun 2024 dengan range 3,51 – 3,81, dan terealisasi sebesar 3,69%. Tidak tercapainya target TPT ini disebabkan karena kegiatan ekonomi belum sepenuhnya pulih, sementara musim kemarau panjang akibat pengaruh

cuaca (El Nino) mempengaruhi kesempatan kerja di pedesaan khususnya sektor pertanian yang merupakan tiga sektor tertinggi sebagai penyerap tenaga kerja di DIY. Di samping itu juga disebabkan oleh penambahan penduduk usia kerja yang bermigrasi ke DIY. Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui berbagai macam pelatihan vokasi diharapkan mampu mengisi kesempatan kerja yang mulai tumbuh. Adanya upaya penciptaan kesempatan kerja melalui perluasan kerja diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan lapangan pekerjaan di sektor utama antara lain sektor pariwisata, industri, pertanian dan jasa. Selain itu keterpaduan antar sektor dan terjaganya kondusifitas iklim ketenagakerjaan di DIY diharapkan akan meningkatkan terciptanya perluasan kesempatan kerja yang lebih optimal.

4. Inflasi

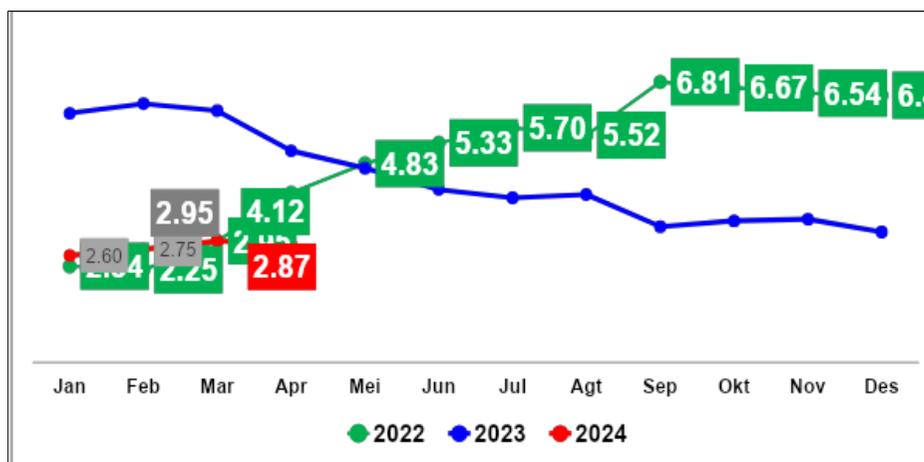
Berdasarkan rilis BPS, tekanan inflasi DIY pada bulan April 2024 relatif terkendali mencapai 0,09% (mtm), lebih rendah dari inflasi bulan Maret 2024 sebesar 0,43% (mtm) dan terendah se-Jawa sehingga secara kumulatif, inflasi DIY mencapai 0,89% (ytd). Sejalan dengan hal tersebut, inflasi DIY secara tahunan pada periode laporan tercatat mencapai 2,87% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi periode bulan Maret 2024 sebesar 2,95% (yoy) dan masih berada dalam rentang target sasaran inflasi nasional 2024 yaitu $2,5\% \pm 1$ (yoy).



Sumber: BPS, 2024, diolah

Gambar 2-83 Perkembangan Inflasi DIY (%mtm)

2-324



Sumber: BPS, 2024, diolah

Gambar 2-84 Perkembangan Inflasi DIY (%yoy)

Berdasarkan komoditasnya, melandainya tekanan inflasi sejalan dengan penurunan harga sejumlah komoditas dalam kelompok makanan dan minuman antara lain beras, cabai merah, telur ayam, cabai rawit dan buncis. Turunnya inflasi lebih dalam tertahan oleh kenaikan tariff angkutan antar kota dan tariff kereta api. Lebih lanjut, kelompok makanan dan minuman seperti bawang merah, tomat serta emas perhiasan juga menjadi pemicu inflasi di bulan April 2024.

1.1.3. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) salah satunya dapat diukur menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dasar pengukuran IPM menggunakan sejumlah komponen dasar kualitas hidup sebagai basis. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yang mencakup umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan kehidupan yang layak (decent standard of living).

Pengukuran dimensi kesehatan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir sedangkan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan. Pada dimensi hidup layak diukur dengan indikator kemampuan daya beli masyarakat

terhadap sejumlah kebutuhan pokok. Dalam komponen IPM dapat diketahui bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM juga dapat berfungsi untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. Kesimpulannya bahwa IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

Dari tahun 2019 hingga tahun 2023 angka IPM DIY cenderung semakin meningkat. Walaupun capaian IPM DIY dari tahun 2019 ke tahun 2020 agak sedikit menurun dari 79,99 menjadi 79,95 (karena adanya pandemi Covid-19). Namun angka IPM DIY mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 yang mencapai angka 80,22 (pandemi Covid-19 mulai mereda). Mulai tahun 2021, status pembangunan manusia DIY sudah berada pada level “sangat tinggi”. Dalam rentang waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, persentase IPM DIY secara rata-rata meningkat sebesar 0,47% per tahun (capaian angka IPM DIY dari 79,95 pada tahun 2020 menjadi 81,09 pada tahun 2023). Pada tahun 2023 ini terjadi peningkatan IPM DIY pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

*Jumlah penduduk 2019 menggunakan Proyeksi Supas2015

Tahun 2020-2023 menggunakan data penduduk SP2020

Gambar 2-85 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2019-2023

Kualitas pembangunan manusia yang semakin baik, tercermin pada perkembangan IPM DIY yang semakin meningkat. Pada kurun waktu 2017-2020 menunjukkan bahwa level IPM DIY selalu berada dalam kategori IPM tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$), dan tahun 2021 meningkat menjadi kategori sangat tinggi ($\text{IPM} > 80$).

Secara umum perkembangan IPM DIY dari tahun 2019 - 2023 selalu berada di atas IPM nasional. Capaian IPM Nasional pada tahun 2023 menunjukkan angka 74,39, sedangkan capaian IPM DIY sudah mencapai angka 81,09.

Capaian IPM DIY yang tinggi didukung pula oleh capaian yang cukup tinggi dari semua indikator penyusun yang dimiliki. Pada tahun 2023, pengeluaran Riil per Kapita tumbuh sebesar 3,05% meningkat dibanding tahun 2022 (tumbuh sebesar 2,63%). Sedangkan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) tumbuh sebesar 0,09% dan Harapan Lama Sekolah (HLS) tumbuh sebesar 0,06%, mengalami pertumbuhan yang cenderung stabil dibanding tahun 2022. Sementara pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tumbuh sebesar 0,82%, melambat dibanding tahun 2022 yang tumbuh 1,14%.

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kemajuan peradaban sangat terkait dengan aset kebudayaan yang dimiliki masyarakat dan bagaimana upaya untuk memelihara dan mengembangkannya. DIY telah menunjukkan upaya tersebut dengan komitmen untuk menjadikan kebudayaan sebagai payung dan arus utama dalam pembangunan di segala bidang. Untuk menghitung tingkat keberhasilan Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan di DIY indikator sasaran yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

IPK merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data sehingga IPK merupakan alat ukur komprehensif yang bersifat multisektoral. Ada tujuh dimensi dalam IPK yang terdiri dari Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi

Budaya, Budaya Literasi dan Gender. Karena bersifat lintas sektor maka faktor-faktor yang mempengaruhi angka IPK juga bersifat lintas sektor.

Jika dilihat capaian kinerja IPK pada tahun 2023 masih menggunakan tahun 2022 adalah 66,52 atau sebesar 88,95% dari target tahun 2024 yaitu 74,78, dengan demikian indikator kinerja sasaran ini tidak tercapai. Namun demikian, capaian IPK DIY ini merupakan capaian tertinggi di tingkat nasional. Penurunan IPK ini secara umum terjadi di seluruh wilayah Indonesia terutama sejak adanya pandemi Covid-19.

Guna melihat pengaruh pandemi Covid-19 dalam capaian IPK, dapat diamati dari analisis komparasi perkembangan nilai IPK baik DIY maupun Nasional dalam 3 periode yaitu, Pra Pandemi Covid (2018-2019), Pandemi Covid (2019 – 2020), dan Pasca Pandemi Covid (2022) pada 7 dimensi penyusun nilai IPK.

Tabel 2-168 Perkembangan Nilai IPK Tahun 2019-2022

No	Nama Dimensi	2019	2020	2021	2022	2022 Terhadap Pra Pandemi (2019)	2022 terhadap Pasca Pandemi (2021)
1	Ekonomi Budaya	71,51	64,79	56,79	67,32	-4,19	10,53
2	Pendidikan	78,17	79,99	80,68	80,88	2,71	0,2
3	Ketahanan Sosial Budaya	85,2	85,04	76,5	77,9	-7,3	1,4
4	Warisan Budaya	68,61	61,11	56,57	58,2	-10,41	1,63
5	Ekspresi Budaya	68,61	57,15	41,11	45,06	-23,55	3,95
6	Budaya Literasi	78,04	80,34	56,2	57,72	-20,32	1,52
7	Gender	59,39	64,53	64,61	64,05	4,66	-0,56
8	IPK DIY	73,98	71,74	64,22	66,52	-7,46	2,3

No	Nama Dimensi	2019	2020	2021	2022	2022 Terhadap Pra Pandemi (2019)	2022 terhadap Pasca Pandemi (2021)
	NASIONAL	55,91	54,65	51,90	55,13	-0,78	3,23

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) DIY Tahun 2022 adalah sebesar 64,52. Angka tersebut di atas rata-rata nasional dan merupakan angka IPK tertinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia. Namun demikian, capaian tersebut belum dapat memenuhi target RPD Tahun 2023 yaitu sebesar 74,58. Hal ini dikarenakan beberapa dimensi penting IPK yaitu Ekspresi Budaya, Warisan Budaya dan Budaya Literasi mengalami penurunan yang signifikan selama pandemi tahun 2020 sampai dengan 2021.

Terdapat beberapa keterbatasan yang terkait dengan penentuan prioritas perencanaan dan pemenuhan kebutuhan nasional dalam mengantisipasi pandemi. Hal ini berdampak terhadap target capaian IPK yang telah ditetapkan sebelum terjadinya pandemi, atas dasar kecenderungan angka indeks pada situasi normal.

Berbagai upaya untuk memulihkan ekosistem kebudayaan pasca pandemi telah dilaksanakan, diantaranya adalah dengan pelaksanaan *event* kebudayaan secara hibrid pada tahun 2021 dan mulai dilaksanakan secara normal pada tahun 2022. Pada tahun 2023 semua aktivitas kebudayaan baik oleh pemerintah maupun masyarakat telah dilaksanakan secara normal. Namun demikian, intervensi kegiatan melalui *event* yang dilaksanakan oleh pemerintah belum cukup kuat untuk mengembalikan ekosistem kebudayaan sebagaimana sebelum adanya Pandemi Covid 2019. Ekosistem budaya yang terkait dengan dimensi ekspresi budaya, warisan budaya dan budaya literasi belum dapat pulih secara signifikan pasca pandemi, terlihat dari kenaikannya yang masih relatif kecil dibandingkan dengan penurunan saat pandemi. Namun demikian kenaikan secara signifikan justru ditunjukkan oleh dimensi ekonomi budaya pada masa pasca pandemi. Hal ini dapat dimaknai bahwa aktivitas ekosistem kebudayaan merupakan salah satu alternatif pemicu aktivitas ekonomi di DIY pasca pandemi.

1.1.4. Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju – Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY

Ketimpangan kesejahteraan di DIY masih terjadi baik ketimpangan pendapatan antar individu maupun antara wilayah (kabupaten/kota). Ketimpangan antar wilayah yang berbentuk ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten dan kota menjadi salah satu tantangan karena penurunan ketimpangan wilayah menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Ketimpangan wilayah menjadi salah satu pokok permasalahan dan terkait dengan isu strategis Pengembangan Wilayah Selatan di DIY. Terkonsentrasi aktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman selama ini menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah di DIY. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh struktur ekonomi tiap kabupaten/kota yang mencerminkan kesenjangan kemampuan daya saing ekonomi dan kapasitas pertumbuhan ekonomi lokal antar kabupaten dan kota. Sumbangan PDRB ADHK Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta lebih 50% dari total PDRB DIY. Sementara itu, dua kabupaten yaitu Kulon Progo dan Gunungkidul yang luas wilayahnya 65% dari luas wilayah DIY hanya menyumbang sekitar 21,4% dari keseluruhan output DIY selama periode 2018-2023.

Ekonomi DIY sempat mengalami pertumbuhan ekonomi negatif di tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19, namun dapat rebound dengan pertumbuhan positif bahkan di atas lima persen selama tiga tahun terakhir. Ekonomi DIY tumbuh 5,58% (2021), 5,15% (2022) dan 5,07% (2023). Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi positif di tingkat kabupaten dan kota. Kabupaten Sleman di tahun 2023 tumbuh paling cepat dibandingkan wilayah lainnya. Perkembangan kinerja ekonomi tersebut menunjukkan bahwa gabungan kontribusi Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masih di atas gabungan kontribusi PDRB ADHK dari Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul. Pangsa dua wilayah yang lebih maju adalah 59,81%, sementara itu pangsa PDRB ADHK tiga wilayah yang belum maju hanya berkisar 40,19%, sedangkan nilai Perkembangan PDRB ADHK menurut wilayah pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2-169 PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
DIY 2023**

Kab/Kota	PDRB ADHK (JutaRp)	Pangsa PDRB terhadap DIY (%)
Kulon Progo	9.907.951	8,35
Bantul	21.880.489	18,44
Gunungkidul	15.740.736	13,27
Sleman	39.551.388	33,34
Yogyakarta	31.401.154	26,47

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

1.1.5. Meningkatnya *Good Governance*.

1. Opini BPK

Tujuan Pembangunan DIY tahun 2023-2026 yaitu Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good government*) didukung salah satunya dengan kontribusi atas kinerja Sasaran “Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan”. Pada tahun 2023, atas Sasaran tersebut terdapat indikator berupa Opini BPK dengan target “**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**”.

Opini BPK tersebut termuat dalam Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun Pemeriksaan tersebut dilakukan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada tahun 2023, pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap Laporan keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2022. Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2022 tersebut meliputi tujuh laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2022 memberikan opini “**WTP**”. Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemda DIY untuk menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Atas capaian “**WTP**” tersebut telah

sesuai dengan target Sasaran yang ditetapkan di Tahun 2023 dan merupakan pencapaian “WTP” untuk **ketiga-belas kalinya**.

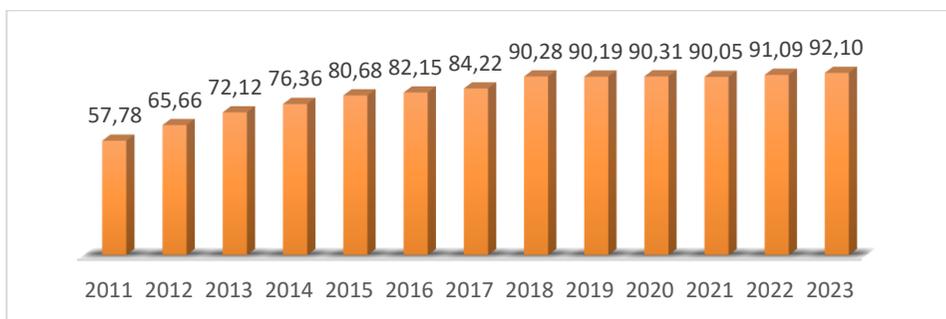
Keberhasilan Pemda DIY dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut: a. Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling mendukung untuk mencapai kinerja keuangan Pemerintah terbaik. b. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan review pada setiap proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. c. Peningkatan infrastruktur yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan regulasi maupun berupa fisik sarana prasarana.

2. SAKIP

Akuntabilitas sebagai salah satu pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pemerintah untuk mencapai *good governance*, karena melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai alat maupun cara untuk mempercepat reformasi birokrasi karena di dalam sistem akuntabilitas, definisi kinerja harus jelas termasuk ukuran kinerjanya. Kinerja yang jelas dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun bisnis proses yang kemudian dapat disusun struktur organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Pada area penguatan akuntabilitas, kondisi yang diharapkan adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat ditandai antara lain dengan perencanaan pembangunan yang semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, partisipatif, tepat waktu dan akuntabel; penggunaan anggaran semakin akuntabel dan transparan; serta perumusan kebijakan publik semakin responsif sesuai kebutuhan, transparan, dan partisipatif.

Hasil Evaluasi AKIP Pemda DIY pada tahun 2023 telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN dan RB RI Nomor B/355/AA.05/2023), dengan nilai sebesar 92,10 atau **Predikat AA**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Memuaskan”, yaitu

telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (*reform*). Sampai dengan Penilaian terakhir yang dikeluarkan KemenPAN dan RB, Pemda DIY merupakan satu-satunya institusi yang memperoleh Predikat AA yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian AKIP.



Sumber: Bappeda DIY, 2024

Gambar 2-86 Perkembangan Nilai AKIP Pemda DIY Tahun 2011-2023

Hasil Evaluasi AKIP Pemda DIY dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, masuk dalam predikat AA, yang berarti sepanjang periode RPJMD 2017-2022 dari tahun pertama (tahun 2018) sampai tahun kelima (tahun 2022) telah melebihi target (A) serta periode RPD 2023-2026 (tahun 2023), telah mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan target predikat AA. Dari Hasil Nilai terakhir Evaluasi AKIP yang dikeluarkan KemenPAN dan RB RI pada tahun 2023, Pemda DIY memperoleh nilai 92,10 (AA). Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi AKIP pada Tahun 2022, dari total semua komponen yang dinilai, terdapat kenaikan sebesar 1,01 poin. Kenaikan tersebut pada semua komponen, yaitu: Perencanaan Kinerja dengan kenaikan sebesar 0,22 poin; Pengukuran Kinerja dengan kenaikan sebesar 0,06 poin; Pelaporan Kinerja sebesar 0,1 poin; serta komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 0,63 poin.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemda DIY tahun 2023 tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Pada komponen Perencanaan Kinerja, perumusan dokumen perencanaan kinerja DIY yang baru telah berorientasi hasil dan telah dilengkapi dengan berbagai indikator kinerja yang relevan. Pada komponen Pengukuran Kinerja,

Pergantian rencana jangka menengah yang menyebabkan perubahan dokumen perencanaan kinerja dilakukan dengan baik mulai dari peningkatan kualitas indikator yang digunakan, penetapan target yang mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, hingga penyusunan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menjelaskan indikator kinerja yang telah dipilih. Kemudian, dari komponen Pelaporan Kinerja Laporan kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah telah disusun dengan mekanisme yang baik sehingga kualitasnya semakin meningkat, pemanfaatannya juga dilakukan dengan baik, hal ini terlihat dari berbagai indikator tahun berjalan yang targetnya telah sesuai dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, dari komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilakukan Pemda DIY telah cukup baik untuk menjaga keberhasilan implementasi SAKIP secara umum.

3. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS RI pada 5 Juli 2023, capaian nilai IDI DIY tahun 2022 tercatat sebesar 85,62 (berada pada kategori tinggi dan menempatkan DIY pada tingkat demokrasi “Baik”) serta berhasil menempati peringkat pertama nilai IDI secara nasional.

Skor IDI DIY pada tahun 2023 juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja sasaran Badan Kesbangpol DIY, yakni “Meningkatnya Kualitas Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta” yang juga mendukung kinerja sasaran Pemerintah Daerah “Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan”.

Pada triwulan I tahun 2024 capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia DIY dengan indikator Skor Indeks Demokrasi Indonesia DIY terealisasi sebesar 85,62 atau dengan kategori “Tinggi”.

1.1.6. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang – Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang dilakukan melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan tujuan untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk penilaian terkait dengan perwujudan

2-334

rencana tata ruang dilakukan dengan upaya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemanfaatan ruang. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengukur capaian indikator program pemerintah daerah berupa kesesuaian pemanfaatan ruang.

Pada triwulan I tahun 2024 capaian terhadap program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang telah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 82,62% telah tercapai sebesar 84,87% dengan persentase 102,72%. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW DIY Tahun 2023-2043 disebutkan bahwa luas keseluruhan meliputi wilayah darat termasuk pulau pulau kecil, wilayah laut, dan wilayah udara yang ada di DIY sejumlah 550.008 ha. Dalam proses perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang didapatkan dari perhitungan perbandingan dua aspek, yaitu:

- a. **Total Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung** di Tahun 2023 sebesar 11.841,63 ha dari luas keseluruhan Kawasan lindung sebesar 12.123,58 ha sehingga presentase kesesuaian Kawasan lindung sebesar (97,67%);
- b. **Total Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya** di Tahun 2023 sebesar 454.960,29 ha dari luas keseluruhan Kawasan budidaya sebesar 537.884,86 ha sehingga persentase kesesuaian Kawasan budidaya sebesar (84,58%).

Kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan tingkat perwujudan rencana pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang tersebut, dilakukan dengan melakukan *overlay* penggunaan lahan eksisting tahun penilaian dengan rencana pola ruang RTRW DIY. Data menunjukkan realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang DIY berdasarkan tingkat perwujudan rencana pola ruang dari kurun waktu 2018-2023 mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar 77,05% pada tahun 2018 menjadi sebesar 84,87% pada tahun 2023 sebagaimana grafik di bawah ini:



Sumber: Dinas PTR DIY, 2024

Gambar 2-87 Grafik Perwujudan Pola Ruang DIY Tahun 2018-2023

Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang pada tahun 2023 mendasar pada Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043, dimana terdapat integrasi antara ruang darat dan ruang laut, sehingga luas ruang wilayah DIY lebih kurang 550.008 ha. Berdasarkan hasil penilaian perwujudan pola ruang keseluruhan yang sesuai mencapai 84,87% atau kurang lebih 466.801,92 ha, yang belum terwujud sebesar 10,734% atau kurang lebih 59.039,37 ha, dan yang tidak sesuai mencapai 4,394% atau kurang lebih 24.167,16 ha. Perwujudan pola ruang dengan peruntukan belum terwujud terbesar pada Kawasan Peruntukan Industri sebesar 99,41% dengan luasan 5.211,66 ha. Peruntukan yang tidak sesuai terbesar pada kawasan lindung terdapat pada kawasan lindung geologi sebesar 47,19% dengan luasan 214,20 ha dan untuk kawasan budidaya terbesar pada kawasan pertanian sebesar 12,99% dengan luasan 23.752,36 ha.

1.1.7. Menurunnya risiko bencana – Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah bagian dari pemenuhan hak warga. Oleh karena itu, Penanggulangan Bencana bagian dari Sub Urusan Trantib Linmas yang merupakan 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan menghadirkan ketangguhan daerah, mengelola, dan meminimalisir risiko bencana. Ukuran atau indikator yang disepakati untuk menilai kemajuan dari pencapaian tujuan itu adalah Indeks Risiko Bencana. Indeks Risiko Bencana

(atau dikenal dengan IRBI = Indeks Risiko Bencana Indonesia) dihitung berdasar rumus dasar Risiko = (ancaman x kerentanan) / kapasitas.

Pada perhitungan IRBI selama ini yang dikoordinasi oleh BNPB, faktor/variabel ancaman dan kerentanan dianggap konstan, yang dinilai dinamis adalah faktor/variabel kapasitas.

Penilaian IKD untuk Kabupaten/Kota se-DIY ini merupakan upaya kita bersama untuk menilai kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh DIY, yang secara agregat nantinya akan kita nilai seberapa laju kinerja pengurangan risiko bencana di DIY dari tahun ke tahun. Hal ini sekaligus sebagai wujud dari akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Indeks risiko bencana (IRBI) dihitung berdasar rumus dasar risiko = (ancaman x kerentanan) / kapasitas. Faktor/variabel kapasitas dalam IRBI didapat dari nilai IKD yang terdiri dari 7 prioritas dan 71 indikator. Indeks Risiko Bencana DIY tahun 2024 (triwulan I) adalah 108,15, angka tersebut merupakan rata-rata nilai IRBI Kabupaten/Kota se-DIY. Mengacu pada cascade RPJMD 2022-2027, target IRBI DIY adalah dengan kategori sedang dan target penurunan Indeks Risiko Bencana 1,5% - 2% per tahun. Tercatat ada 9 ancaman bencana prioritas dari total 14 ancaman bencana yang ada di DIY yaitu: 1) Gempa Bumi, 2) Cuaca ekstrim, 3) Erupsi Merapi, 4) Tanah Longsor, 5) Banjir, 6) Kebakaran Hutan dan Lahan, 7) Kekeringan, 8) Tsunami, 9) Gelombang ekstrim dan abrasi. Kerentanan Bencana di DIY meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan. Kapasitas dalam menghadapi bencana di DIY belum merata dan belum semua aspek kapasitas terpenuhi. Efektifitas dan pencegahan mitigasi bencana dan kolaborasi multi-aktor (*Penta Helix*) masih belum optimal. Jika melihat lebih detail, nilai IRBI untuk Kabupaten/Kota se-DIY adalah sebagai berikut: 1) Kabupaten Kulon Progo 140,98; 2) Kabupaten Bantul 149,27; 3) Kabupaten Gunungkidul 106,55; 4) Kabupaten Sleman 77,33; dan 5) Kota Yogyakarta 66,62.

2.2.3 Capaian Indikator Program Pemda s.d. TW II Tahun 2024

Program Pemda merupakan kekhususan yang menjadi pembeda antara cascading kinerja Pemda DIY jika dibandingkan dengan cascading Pemda lain secara umum. Program Pemda merupakan program antara yang menjadi indikator kinerja yang menghubungkan antara indikator kinerja daerah (Gubernur) dengan Indikator Eselon II. Program Pemda ini secara pertanggungjawaban kinerja menjadi tanggung jawab Sekretaris Daerah beserta para Asisten. Secara umum tingkat ketercapaian target Program Pemda ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2-170 Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Triwulan I Tahun 2024

No	Program Pemda	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi s.d. TW I	Keterangan
1	Program Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Gini	Indeks	0.419	0.449	BRS BPS DIY Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk DI Yogyakarta, Maret 2023, rilis pada tanggal 17 Juli 2023. Data Realisasi TW I 2023 merupakan data Indeks Gini pada Maret 2023 yaitu sebesar 0,449 (BRS BPS DIY Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk DIY Maret 2023). Data Realisasi TW III 2023 dan TW I 2024, disamakan dengan data Realisasi TW I 2023 karena Indeks Gini kondisi September 2023 belum rilis.
		Persentase Desa Mandiri	%	62.24	65.31	Jumlah Desa Mandiri tahun 2024 s.d TW 1 sebanyak 256, dari jumlah desa di DIY 392. Jadi persentasenya $256/392*100\% = 65,31\%$. Data <i>update</i> TW 1 tahun 2024 sama dengan data tahun 2023, karena data <i>update</i> status desa diterbitkan setiap Bulan Juli dari Kemendesda.
2	Program Pengembangan Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan,	%	3.1	5.38	Data realisasi TW I 2024, disamakan dengan data realisasi TW IV 2023 yaitu sebesar 5,38 persen, karena data Pertumbuhan Ekonomi TW I

No	Program Pemda	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi s.d. TW I	Keterangan
		dan Akomodasi Makan Minum				2024 masih dalam proses penghitungan dan akan dirilis pada 6 Mei 2024.
3	Program Pengembangan Kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan	%	3.7	3.23	Data Agustus 2023.
4	Program Stabilitas Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat	<i>Crime Rate</i> (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)	Indeks	190.67	133.76	Dataku Tahun 2023.
5	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Indeks	15.74	15.66	Data Realisasi TW IV 2023 dan TW I 2024 merupakan data Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2023 yaitu sebesar 15,66 (BRS BPS DIY, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY tahun 2023, dirilis pada 1 Desember 2023).
		Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum	%	76.39	55.29	Data bersumber dari Rapot mutu Pendidikan tahun 2024, dengan perhitungan rata-rata Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum pada jenjang SMA dan SMK Umum.
		Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum	%	59.52	63.4	Data bersumber dari Rapot mutu Pendidikan tahun 2024, dengan perhitungan rata-rata Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum pada jenjang SMA dan SMK Umum.
6	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Indeks	75.18	78.18	Data Realisasi TW IV 2023 dan TW I 2024 merupakan data Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) pada tahun 2023 yaitu sebesar 78,18 (BRS BPS DIY, Indeks Pembangunan Manusia

No	Program Pemda	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi s.d. TW I	Keterangan
						(IPM) DIY tahun 2023, dirilis pada 1 Desember 2023).
		Prevalensi <i>Stunting</i>	%	14	12.6	Dataku <i>Update</i> 17 April 2024.
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak	%	98.23	96.28	(Meta Indikator : Rerata persentase penduduk yang menempati rumah layak huni, sanitasi layak, dan air minum layak.)
7	Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	77.37	76.87	Dataku <i>Update</i> 3 April 2024. Sumber : Tabel Website BPS RI Kondisi 16 April 2024 pukul 10.40 (Data pada Tabel tersebut diakses melalui website BPS Pusat, di mana Tabel diupdate pada 11 April 2023). https://www.bps.go.id/id/statis-tics-table/2/NDY4Izl=/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html
		<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	Indeks	1,8 - 2,2	1.81	Dataku <i>Update</i> 25 Maret 2024.
8	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi oleh Pihak Luar Pemda DIY (Regional, Nasional, Internasional)	Jumlah	332	363	Sampai dengan TW I 2024, bertambah 1 dengan diterimanya KSF sebagai warisan budaya dunia dan bertambah 25 WBTB yang telah disetujui pada sidang penetapan.
9	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi	%	67.03	64.05	Capaian TW I 2024 menggunakan angka capaian TW IV 2023 (LKPJ 2023). Komponen Perhitungan dari Dinas PUPESDM (<i>update</i> TW I 2024) : 1.Persentase Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air : 84,03% 2. Peningkatan Aksesibilitas Jalan : 99,17%
		Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang Belum	%	5.57	5.28	Kondisi tahun 2023.

2-340

No	Program Pemda	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi s.d. TW I	Keterangan
		Maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)				
10	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87.76	86.67	Dataku Tahun 2023.
		Indeks Kematangan SPBE	Indeks	3.64	4.94	Dataku Tahun 2023.
11	Program Peningkatan Kualitas Demokrasi	Indeks Kebebasan	Indeks	74.76	87.35	Data Realisasi TW I 2024, disamakan dengan data realisasi TW IV 2023 yaitu sebesar 5,38 persen, karena data Pertumbuhan Ekonomi TW I 2024 masih dalam proses penghitungan dan akan dirilis pada 6 Mei 2024.
		Indeks Kesetaraan	Indeks	87.74	88.76	Tahun 2023 sebesar 88,76. Indeks ini merupakan aspek dari Indek Demokrasi Indonesia. Nilai tersebut berkategori tinggi.
12	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi GRK	Ribu CO2eq	3	212.08519	Capaian TW I 2024 menggunakan angka capaian TW IV 2023 (Aksara dan LKPJ 2023). *Realisasi tidak dapat diperbandingkan dengan target karena terdapat perubahan/perbedaan metode perhitungan antara target dengan realisasi.
13	Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang	Perwujudan Pola Ruang	%	93.22	84.61	Dataku <i>Update</i> 23 April 2024
		Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	%	24.23	21.05	Dataku <i>Update</i> 5 Januari 2024. Capaian sampai Triwulan IV tahun 2023.
14	Program Peningkatan Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0.7	0.66	Nilai IKD 2023 Rata-Rata Kabupaten/Kota di DIY.

2.2.4 Capaian Kinerja Perangkat Daerah s.d. TW I Tahun 2024: Realisasi Capaian Program/Sub Kegiatan APBD

Kinerja pelaksanaan Program/Kegiatan Pemerintah Daerah DIY yang didukung dengan APBD sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilaporkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun pada Laporan Rekapitulasi Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 s/d Bulan Maret, Pemerintah Daerah DIY memiliki 331 program dan 2.358 sub kegiatan dengan kinerja fisik sebesar 24,02% dari target sebesar 24,16% sehingga didapatkan deviasi fisik sebesar 0,14%. Adapun realisasi keuangan dari pagu Rp5.994.726.874.752,00 (Sungguh) terealisasi Rp842.163.322.992,00 atau sebesar 14,05% dari target sebesar 22,12% sehingga terdapat deviasi keuangan pada triwulan I 2024, yaitu sebesar Rp483.576.002.825,00 atau sebesar 8,07%.

Tabel 2-171 Rekapitulasi Capaian Kinerja s.d. TW I Tahun 2024

No	SKPD	Jumlah		Pagu	Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
		Program	DPA		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
1	Badan Kepegawaian Daerah	3	43	83.259.735.139	17.446.298.638	20,95	25,22	3.889.092.287	4,67	25,22
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7	39	31.047.434.788	11.492.812.881	37,02	37,06	10.373.560.138	33,41	37,06
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	28	16.707.938.554	4.548.879.975	27,23	27,17	2.879.651.154	17,24	27,05
4	Badan Pendidikan Dan Pelatihan	3	28	19.233.298.376	4.490.986.878	23,35	23,52	3.001.316.245	15,6	23,52
5	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset	4	60	1.532.456.817.131	312.993.173.983	20,42	23	127.249.866.177	8,3	22,99
6	Badan Penghubung Daerah	3	24	11.885.210.031	2.748.290.902	23,12	23,13	1.194.172.446	10,05	23,04
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	37	23.758.669.668	6.247.366.929	26,3	29,75	2.668.947.685	11,23	29,75
8	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta	2	19	4.896.739.010	826.159.200	16,87	21,79	816.079.454	16,67	21,79
9	Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	3	19	1.623.319.600	456.271.124	28,11	30,69	316.164.777	19,48	30,69
10	Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi	2	10	9.046.687.072	1.857.571.719	20,53	27,68	1.552.532.794	17,16	27,68
11	Balai Latihan Kerja Dan Pengembangan Produktivitas	4	21	27.742.459.050	5.320.245.860	19,18	22,73	5.172.703.199	18,65	22,66
12	Balai Latihan Pendidikan Teknik	2	16	4.864.084.150	992.820.524	20,41	20,49	690.686.979	14,2	20,49
13	Balai Layanan Perpustakaan	3	19	2.187.923.714	411.937.700	18,83	18,83	330.903.868	15,12	18,83
14	Balai Pelatihan Kesehatan	2	12	5.766.247.700	1.264.708.714	21,93	21,95	1.172.270.942	20,33	21,95

No	SKPD	Jumlah		Pagu	Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
		Program	DPA		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)		(%)	(RP)	
15	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	2	25	4.031.310.000	990.836.000	24,58	26,82	970.784.480	24,08	26,82
16	Balai Pemuda Dan Olah Raga	4	24	57.857.250.000	43.764.351.400	75,64	75,05	43.863.849.559	75,81	75,05
17	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	2	21	41.524.458.426	1.510.308.449	3,64	22,29	1.453.395.409	3,5	22,29
18	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	2	22	24.446.441.600	2.792.587.577	11,42	12,03	2.593.407.997	10,61	12,03
19	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	2	23	17.640.378.580	1.774.846.814	10,06	10,44	1.635.527.155	9,27	10,44
20	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	2	23	27.295.924.100	3.124.636.353	11,45	11,86	2.980.084.900	10,92	11,86
21	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	2	22	27.071.315.348	2.619.032.455	9,67	9,67	2.372.728.765	8,76	9,67
22	Balai Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Daerah	3	22	723.194.650	112.079.430	15,5	17,46	88.694.862	12,26	17,46
23	Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah Dan Air Minum Perkotaan	2	16	12.713.380.035	965.606.250	7,6	7,67	818.021.937	6,43	7,67
24	Balai Pengelolaan Terminal Dan Perparkiran	2	18	4.825.000.400	666.196.228	13,81	41,22	606.528.041	12,57	41,22
25	Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	2	19	2.567.474.980	478.742.500	18,65	20,65	459.466.359	17,9	20,65
26	Balai Pengembangan Perbenihan Dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian	3	20	8.185.014.062	1.094.415.840	13,37	13,56	921.471.573	11,26	13,56
27	Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Dan Diagnostik Kehewan	3	15	4.744.871.900	733.064.049	15,45	16,86	443.892.081	9,36	16,86
28	Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	2	23	7.792.650.200	1.095.191.800	14,05	30,66	1.043.338.885	13,39	30,66

No	SKPD	Jumlah		Pagu	Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
		Program	DPA		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
29	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	2	16	1.882.487.308	493.341.602	26,21	32,83	444.758.316	23,63	32,83
30	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial	2	14	55.238.767.976	5.659.169.986	10,24	21,21	2.872.653.826	5,2	21,21
31	Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja	2	20	1.754.290.000	462.552.819	26,37	26,39	450.968.757	25,71	26,39
32	Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita	2	26	1.609.359.600	502.428.750	31,22	31,22	495.882.044	30,81	31,22
33	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Laras	2	34	5.111.341.650	1.246.368.345	24,38	26,3	1.221.326.408	23,89	26,3
34	Balai Rehabilitasi Sosial Dan Pengasuhan Anak	2	27	2.418.567.250	659.567.350	27,27	29,52	629.595.943	26,03	29,52
35	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	2	26	3.308.707.850	886.716.950	26,8	27,84	852.595.269	25,77	27,84
36	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	2	15	7.497.955.000	1.264.359.600	16,86	17,58	1.256.309.377	16,76	17,58
37	Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	3	26	1.562.580.100	336.995.500	21,57	22,16	318.714.589	20,4	22,16
38	Biro Bina Mental Spiritual	3	26	25.976.004.800	3.069.116.200	11,82	11,85	2.758.970.068	10,62	11,85
39	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	3	20	4.539.446.950	1.851.251.750	40,78	40,78	1.795.742.451	39,56	40,78
40	Biro Hukum	4	32	4.900.003.230	1.224.407.170	24,99	34,05	706.409.316	14,42	48,7
41	Biro Organisasi	3	24	2.406.856.000	669.114.000	27,8	28,45	324.863.650	13,5	28,45
42	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dan Pembiayaan Pembangunan	5	26	2.223.918.750	282.252.000	12,69	19,91	231.229.938	10,4	19,91
43	Biro Tata Pemerintahan	10	36	4.383.389.250	1.631.532.550	37,22	37,42	1.081.869.851	24,68	37,42

2-375

No	SKPD	Jumlah		Pagu	Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
		Program	DPA		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)		(%)	(RP)	
44	Biro Umum, Hubungan Masyarakat Dan Protokol	3	33	21.163.972.038	4.090.053.262	19,33	19,89	3.291.559.441	15,55	20,21
45	Dinas Kebudayaan	2	36	385.360.516.592	103.620.937.686	26,89	26,93	96.735.824.207	25,1	26,91
46	Dinas Kelautan Dan Perikanan	8	44	43.217.290.636	8.349.763.357	19,32	20,82	5.855.430.878	13,55	20,82
47	Dinas Kesehatan	6	54	42.363.420.065	10.786.468.922	25,46	25,76	7.256.410.357	17,13	25,76
48	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	27	33.576.524.572	7.942.983.614	23,66	26,2	6.469.888.384	19,27	26,2
49	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	10	39	225.878.145.057	16.222.049.101	7,18	8,54	5.814.159.635	2,57	7,34
50	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	13	56	76.663.787.321	17.577.709.439	22,93	24,49	11.622.677.587	15,16	24,47
51	Dinas Pariwisata	7	50	55.896.451.345	5.490.626.849	9,82	16,08	3.675.756.871	6,58	13,2
52	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral	16	73	394.217.541.328	40.208.191.127	10,2	13,59	21.798.958.708	5,53	12,68
53	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	11	66	18.322.893.107	4.888.723.090	26,68	26,86	3.490.083.601	19,05	26,86
54	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	37	13.313.939.031	3.233.994.215	24,29	28,84	1.999.606.946	15,02	28,84
55	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	6	100	1.484.838.496.048	398.850.722.146	26,86	27,45	258.094.691.737	17,38	27,42
56	Dinas Perhubungan	3	48	141.525.278.691	23.954.650.680	16,93	22,64	19.023.888.617	13,44	22,64
57	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	12	44	58.603.033.739	8.104.380.104	13,83	19,02	5.656.119.623	9,65	19,02
58	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	5	45	32.488.532.279	7.892.227.370	24,29	25,2	5.711.988.577	17,58	24,99
59	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang	6	36	23.783.976.575	8.860.107.727	37,25	39,81	7.441.736.320	31,29	39,78

2-376

No	SKPD	Jumlah		Pagu	Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
		Program	DPA		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
60	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	12	51	91.154.505.728	18.769.075.854	20,59	20,61	11.188.653.262	12,27	20,62
61	Dinas Sosial	9	73	86.622.608.025	23.132.027.826	26,7	26,78	17.665.073.476	20,39	26,78
62	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	8	50	48.555.761.594	10.948.557.860	22,55	23,06	8.756.038.543	18,03	23,06
63	Inspektorat	3	39	25.018.884.945	6.462.322.369	25,83	33,83	4.832.852.546	19,32	33,81
64	Kantor Pelayanan Pajak Daerah Diy Di Kabupaten Bantul	2	19	4.269.617.850	941.449.366	22,05	23,02	842.728.325	19,74	23,02
65	Kantor Pelayanan Pajak Daerah Diy Di Kabupaten Gunungkidul	2	20	2.302.645.670	451.546.300	19,61	19,97	426.990.240	18,54	19,97
66	Kantor Pelayanan Pajak Daerah Diy Di Kabupaten Kulon Progo	2	20	2.447.406.550	764.755.433	31,25	32,06	688.444.153	28,13	32,06
67	Kantor Pelayanan Pajak Daerah Diy Di Kabupaten Sleman	2	20	4.288.132.700	1.068.693.970	24,92	25,17	1.018.607.984	23,75	25,17
68	Kantor Pelayanan Pajak Daerah Diy Di Kota Yogyakarta	2	20	2.249.370.800	515.236.150	22,91	24,9	454.454.762	20,2	24,9
69	Museum Negeri Sonobudoyo	3	10	12.124.951.400	1.514.537.404	12,49	12,49	1.398.281.697	11,53	12,49
70	Paniradya Kaistimewan	2	32	29.833.923.760	5.099.481.747	17,09	19,55	3.093.505.085	10,37	19,48
71	Pelabuhan Perikanan Pantai	2	20	3.806.194.700	841.138.000	22,1	23,26	791.463.000	20,79	23,26
72	Rumah Sakit Jiwa Grhasia	3	27	89.531.433.776	20.901.473.371	23,35	30,85	12.117.459.446	13,53	30,85
73	Rumah Sakit Paru Respira	2	7	67.939.644.585	36.360.536.495	53,52	54,89	30.634.786.444	45,09	54,89
74	Satuan Polisi Pamong Praja	4	26	31.038.350.679	8.311.541.547	26,78	28,23	6.139.209.637	19,78	27,36
75	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan	2	2	2.236.607.000	201.154.200	8,99	8,99	9.438.632	0,42	0,43
76	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan	2	2	2.456.750.000	314.962.400	12,82	12,83	258.725.319	10,53	12,83

2-377

No	SKPD	Jumlah		Pagu	Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
		Program	DPA		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)		(%)	(RP)	
77	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari	2	2	2.342.962.000	163.742.564	6,99	7,01	169.112.649	7,22	7,01
78	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok	2	2	5.221.300.000	307.948.682	5,9	6,38	200.914.606	3,85	6,38
79	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih	2	2	4.010.317.300	358.580.344	8,94	8,95	303.729.129	7,57	8,95
80	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari	2	2	3.603.254.000	289.157.894	8,02	8,04	281.545.243	7,81	8,04
81	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta	2	2	4.927.824.000	275.407.113	5,59	5,59	244.146.724	4,95	5,46
82	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon	2	2	5.126.300.000	336.333.467	6,56	6,62	334.327.000	6,52	6,62
83	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari	2	2	2.513.585.115	264.084.264	10,51	10,5	96.461.811	3,84	10,5
84	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta	2	2	2.823.150.000	266.691.924	9,45	9,71	139.752.931	4,95	9,71
85	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta	2	2	3.789.275.000	451.291.057	11,91	11,92	391.562.076	10,33	11,52
86	Sekretariat Daerah	1	10	72.023.920.254	22.181.312.850	30,8	33,63	13.532.859.561	18,79	33,55
87	Sekretariat DPRD	2	59	175.399.073.119	39.311.719.281	22,41	23,21	24.235.133.235	13,82	23,15
88	Taman Budaya Yogyakarta	3	9	15.146.421.800	1.802.382.652	11,9	11,86	977.254.036	6,45	11,86
Jumlah		331	2358	5.994.726.874.752	1.325.739.325.817	22,12	24,16	842.163.322.992	14,05	24,02

Sumber: Sengguh, 2024

2.2.5 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan s.d. TW I Tahun 2024

Sesuai dengan amanat dalam Permendagri 18 Tahun 2017, kinerja urusan pemerintahan secara detail dilaporkan sesuai dengan format formulir E.19 tentang Evaluasi Hasil Perubahan RKPD Tahun Berkenaan, kami sampaikan sebagai berikut.

**Evaluasi Terhadap Hasil RKP2
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2024**

5/2024

No	Kategori	Kode	Program/Regulasi/Sub-regulasi	Indikator Hasil Program/Regulasi/Sub-regulasi	Target Kinerja pada Tahun 2023 (Tahun Anggaran)		Capaian Kinerja pada Tahun 2023 (Tahun Anggaran)						Target Kinerja pada Tahun 2024 (Tahun Anggaran)						Mendeskripsikan Sasaran/Keluaran
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35																			
36																			
37																			
38																			
39																			
40																			
41																			
42																			
43																			
44																			
45																			
46																			
47																			
48																			
49																			
50																			
51																			
52																			
53																			
54																			
55																			
56																			
57																			
58																			
59																			
60																			
61																			
62																			
63																			
64																			
65																			
66																			
67																			
68																			
69																			
70																			
71																			
72																			
73																			
74																			
75																			
76																			
77																			
78																			
79																			
80																			
81																			
82																			
83																			
84																			
85																			
86																			
87																			
88																			
89																			
90																			
91																			
92																			
93																			
94																			
95																			
96																			
97																			
98																			
99																			
100																			

No	Materi	Kode	Program/Regulasi/Isi Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Regulasi/Isi Kegiatan	Target RPK pada Tahun 2017 (dalam Persen RPK)		Realisasi Capaian Kinerja pada Realisasi Anggaran RPK Tahun 2017										Target Capaian Kinerja pada Realisasi Anggaran RPK Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja pada Realisasi Anggaran RPK Tahun 2018		Target Capaian Kinerja pada Realisasi Anggaran RPK Tahun 2019		Pencapaian dan Penjelasan Kinerja
					A	B	2017					2018					A	B	2018		2019		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14	
1.001.11.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Sistem Perencanaan	0	1.001.11.01.01	1.001.11.01.01.01	1.001.11.01.01.01.01	1.001.11.01.01.01.01.01	1.001.11.01.01.01.01.01.01	1.001.11.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.01		
1.001.11.02	Perencanaan dan Pelaksanaan Sistem Perencanaan	0	1.001.11.02.01	1.001.11.02.01.01	1.001.11.02.01.01.01	1.001.11.02.01.01.01.01	1.001.11.02.01.01.01.01.01	1.001.11.02.01.01.01.01.01.01	1.001.11.02.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.02.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	1.001.11.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01			

No	Skema	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target KPI pada Tahun 2017 (sisa Periode 50%)				Target Capaian Kinerja pada Periode Anggaran BPPF Tahun 2018 (sisa)				Target Capaian Kinerja pada Periode Anggaran BPPF Tahun 2019 (sisa)				Revisi Target dan Anggaran BPPF Tahun 2017 (sisa dan Pelaksanaan BPPF 2017)				Target Capaian Kinerja pada Periode Anggaran BPPF Tahun 2018 (sisa)				Pencapaian Kinerja Periode Pelaksanaan											
					KPI 1		KPI 2		KPI 1		KPI 2		KPI 1		KPI 2		KPI 1		KPI 2		KPI 1		KPI 2													
					E	Rp	E	Rp	E	Rp	E	Rp	E	Rp	E	Rp	E	Rp	E	Rp	E	Rp	E	Rp												
1.20.01.1			Pengembangan Kapasitas dan Inovasi Guru/ Tenaga Keleolaan	Berkas Pelaporan Tindak Lanjut dan Pengembangan Kapasitas Tenaga Keleolaan dan Inovasi Pembelajaran			8	10.250.000,00			8	10.250.000,00																								
1.20.01.2			Pengembangan Prestasi dan Inovasi Sekolah/ Masyarakat	Berkas Pelaporan Prestasi dan Inovasi Sekolah/ Masyarakat			200	14.000.000,00			200	14.000.000,00																								
1.20.01.3			Pengembangan Kemitraan dan Jejaring	Berkas Pelaporan Kemitraan dan Jejaring			1.500	2.250.000,00			1.500	2.250.000,00																								
1.20.01.4			Pengembangan Sistem Inovasi	Berkas Pelaporan Sistem Inovasi			200	3.000.000,00			200	3.000.000,00																								
1.20.01.5			Pengembangan Kelembagaan dan Manajemen	Berkas Pelaporan Kelembagaan dan Manajemen			2	10.000.000,00			2	10.000.000,00																								
1.20.01.6			Pengembangan Inovasi dan Kreativitas	Berkas Pelaporan Inovasi dan Kreativitas			200	3.000.000,00			200	3.000.000,00																								
1.20.01.7			Pengembangan Pembelajaran dan Inovasi	Berkas Pelaporan Pembelajaran dan Inovasi			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.01.8			Pengembangan Riset dan Inovasi	Berkas Pelaporan Riset dan Inovasi			200	3.000.000,00			200	3.000.000,00																								
1.20.01.9			Pengembangan Kemitraan dan Jejaring	Berkas Pelaporan Kemitraan dan Jejaring			1.500	2.250.000,00			1.500	2.250.000,00																								
1.20.02.1			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.2			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.3			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.4			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.5			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.6			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.7			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.8			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.9			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.10			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.11			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.12			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.13			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.14			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.15			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.16			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.17			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.18			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.19			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.20			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.21			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.22			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.23			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.24			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.25			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.26			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.27			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.28			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.29			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								
1.20.02.30			Pengembangan Kualitas Pendidikan	Berkas Pelaporan Kualitas Pendidikan			1.000	1.000.000,00			1.000	1.000.000,00																								

No	Mekans	Isi	Program/ Regulasi/ Sub Regulasi	Indikator Kinerja Program/ Regulasi/ Sub Regulasi	Tingkat MDC pada Tahun 2017 (data Perkiraan MDC)	Target Capaian Kinerja pada Program/ Regulasi MDC Tahun 2017 (data Perkiraan)	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017												Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKA Tahun 2017 (data Perkiraan)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKA Tahun 2017 (data Perkiraan)	Revisi RKA dan Anggaran RKA 01 Tahun 2017 (data Perkiraan MDC)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKA Tahun 2017 (data Perkiraan)	Pencapaian Kinerja Program/ Regulasi																			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
1.08.01.1.1	Pelayanan	Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	Pelayanan Publik	100	100	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

No	Mekans	Kode	Program/Regulasi/Ind. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Regulasi/Ind. Kegiatan	Target Kinerja pada Tahun 2017 (dalam Persen/RpC)	Relevansi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Program/Regulasi/Ind. Kegiatan			Relevansi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Program/Regulasi/Ind. Kegiatan			Relevansi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Program/Regulasi/Ind. Kegiatan			Pencapaian Kinerja Program/Regulasi/Ind. Kegiatan	
						RpC	Rp	Rp	RpC	Rp	Rp	RpC	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2.2.2.2.1	Kelemb. Teknis, Mutu dan Efisiensi	Kelemb. Teknis, Mutu dan Efisiensi	8,24	1.246.400.000										
		2.2.2.2.2	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.3	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	8,24	25.270.000.000			8,24	2.770.000.000						
		2.2.2.2.4	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.5	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.6	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.7	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.8	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.9	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.10	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.11	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.12	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.13	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.14	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.15	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.16	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.17	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.18	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.19	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.20	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.21	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.22	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.23	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.24	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.25	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.26	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.27	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.28	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.29	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.30	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.31	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.32	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.33	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.34	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.35	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.36	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.37	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.38	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.39	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.40	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.41	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.42	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.43	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.44	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.45	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.46	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.47	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.48	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.49	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										
		2.2.2.2.50	Kelemb. dan Peningkatan	Kelemb. dan Peningkatan	2	1.168.800.000										

No	Kategori	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Tahun 2017 (dalam Persen/ Rp)		Realisasi Kinerja pada Anggaran 2016 (dalam Persen/ Rp)				Realisasi Kinerja pada Anggaran 2017 (dalam Persen/ Rp)				Realisasi Kinerja pada Anggaran 2018 (dalam Persen/ Rp)				Realisasi Kinerja pada Anggaran 2019 (dalam Persen/ Rp)				Pencapaian Kinerja/ Keterangan																																																																												
					Target	Realisasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

No	Kategori		Kode	Program/Regulasi/Isi Regulasi	Isi/Deskripsi Regulasi/Program/Isi Regulasi	Tipe Regulasi	Tingkat Regulasi	Target RENCANA TAHUN 2017 (dalam Persen SPK)		Perencanaan Anggaran											Revisi Anggaran Anggaran DIPA Tahun 2017 (dalam Persen Anggaran SPK)	Revisi Anggaran Anggaran DIPA Tahun 2017 (dalam Persen Anggaran SPK)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKP di Tahun 2016	Pencapaian dan Penjelasan Kinerja																		
	1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16	17	18															
			2.000.1.1.1	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Studi Kelayakan dan Studi Kelayakan Feasibilitas	Penelitian	Nasional		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
			2.000.1.1.2	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Analisis Kelembagaan dan Analisis Kebijakan	Penelitian	Nasional		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100							
			2.000.1.1.3	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Analisis Kebijakan dan Analisis Kebijakan	Penelitian	Nasional		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
			2.000.1.1.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Analisis Kebijakan dan Analisis Kebijakan	Penelitian	Nasional		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
			2.000.1.1.5	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Analisis Kebijakan dan Analisis Kebijakan	Penelitian	Nasional		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
			2.000.1.1.6	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Analisis Kebijakan dan Analisis Kebijakan	Penelitian	Nasional		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
			2.000.1.1.7	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Analisis Kebijakan dan Analisis Kebijakan	Penelitian	Nasional		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
			2.000.1.1.8	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Analisis Kebijakan dan Analisis Kebijakan	Penelitian	Nasional		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			2.000.1.1.9	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Analisis Kebijakan dan Analisis Kebijakan	Penelitian	Nasional		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			2.000.1.1.10	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Analisis Kebijakan dan Analisis Kebijakan	Penelitian	Nasional		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			2.000.1.1.11	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Analisis Kebijakan dan Analisis Kebijakan	Penelitian	Nasional		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			2.000.1.1.12	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Analisis Kebijakan dan Analisis Kebijakan	Penelitian	Nasional		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			2.000.1.1.13	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Analisis Kebijakan dan Analisis Kebijakan	Penelitian	Nasional		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			2.000.1.1.14	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Analisis Kebijakan dan Analisis Kebijakan	Penelitian	Nasional		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			2.000.1.1.15	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Analisis Kebijakan dan Analisis Kebijakan	Penelitian	Nasional		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			2.000.1.1.16	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Analisis Kebijakan dan Analisis Kebijakan	Penelitian	Nasional		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			2.000.1.1.17	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Analisis Kebijakan dan Analisis Kebijakan	Penelitian	Nasional		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			2.000.1.1.18	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Analisis Kebijakan dan Analisis Kebijakan	Penelitian	Nasional		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			2.000.1.1.19	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Analisis Kebijakan dan Analisis Kebijakan	Penelitian	Nasional		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			2.000.1.1.20	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Analisis Kebijakan dan Analisis Kebijakan	Penelitian	Nasional		0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Kategori	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2017 (dalam Persen)		Revisi Capaian Kinerja per Semester Anggaran RPJMD Tahun 2017										Revisi Capaian Kinerja per Semester Anggaran RPJMD Tahun 2017		Revisi Capaian Kinerja per Semester Anggaran RPJMD Tahun 2017		Prevalensi Dana Pembiayaan (Rp)
						E	M	Semester I					Semester II					E	M	E	M	
								E	M	E	M	E	M	E	M							
2.1	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	2.1.01	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.1.01.01	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	2.1.01.01.01	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.1.01.01.01	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	2.1.01.01.01.01	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.1.01.01.01.01	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	2.1.01.01.01.01.01	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Kategori	Kode	Program/Regulasi/Sub-Regulasi	Indikator Kinerja Program/Regulasi/Sub-Regulasi	Target RPJL pada Tahun 2017 (dalam Persen SMC)	Realisasi Capaian Kinerja pada Anggaran RPJPD Tahun 2016										Realisasi Capaian Kinerja pada Anggaran RPJPD Tahun 2016	Target Capaian Kinerja pada Anggaran RPJPD Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja pada Anggaran RPJPD Tahun 2016	Target Capaian Kinerja pada Anggaran RPJPD Tahun 2017	Pencapaian Kinerja Program/Regulasi/Sub-Regulasi
						2016		2017		2018		2019		2020						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
1	A	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	
																				1.1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1				
																	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1

No	Kategori	Kode	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Kegiatan Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Tahun 2017 (Pencapaian MTR)		Realisasi Capaian Kinerja pada Program RPJMN Tahun 2017 (MTR)					Realisasi Capaian Kinerja pada Program RPJMN Tahun 2018 (MTR)					Realisasi Kinerja dan Anggaran 01 Bulan 2019 (Pencapaian MTR)					Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMN Tahun 2019 (MTR)					Pencapaian Kinerja Periode Laporan		
					MTR (Miliar Rupiah)		MTR (Miliar Rupiah)					MTR (Miliar Rupiah)					MTR (Miliar Rupiah)					Rasio							
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W		
		3.0.0.1	Pengembangan Infrastruktur Prasarana	Untuk Mula-mula Prasarana Tersebut	104	2.260.000																							
		3.0.0.1.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Raya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Raya	241	1.100.000																							
		3.0.0.1.02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Desa	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Desa	8	82.000.000																							
		3.0.0.1.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Lintas Desa	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Lintas Desa	6	11.000.000																							
		3.0.0.1.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	80	108.000.000																							
		3.0.0.1.05	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Desa	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Desa	1.002	11.250.000																							
		3.0.0.1.06	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	8	8.750.000																							
		3.0.0.1.07	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	15	120.000.000																							
		3.0.0.1.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.12	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.13	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.14	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.15	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.16	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.17	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.18	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.19	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.20	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.21	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.22	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.23	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.24	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.25	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.26	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.27	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.29	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.30	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.31	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.32	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.33	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.34	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.35	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.36	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.37	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.38	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.39	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.40	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.41	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.42	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.43	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.44	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							
		3.0.0.1.45	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	10	100.000.000																							

No	Kategori	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Tahun 2017 (dalam Persen/ Rp)	Realisasi Capaian Kinerja pada Realisasi Anggaran RPFR Tahun 2017					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPFR Tahun 2017					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPFR Tahun 2017					Pencapaian Kinerja/ Penyelesaian																																																																														
						2017 (dalam Persen/ Rp)					2017 (dalam Persen/ Rp)					2017 (dalam Persen/ Rp)																																																																																			
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

No	Misi	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2017 (Jalan Persegi M2)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2017 (Rp)		Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2017 (Rp)		Target Capaian Kinerja dan Program RPJMD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017 (Rp)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2017 (Rp)		Pencapaian dan Penanggung Jawab	
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
																		M
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

No	Kategori	Kode	Program/Regulasi/Isi Regulasi	Indikator Kinerja Program/Regulasi/Isi Regulasi	Target RPJRD pada Tahun 2017 (dalam Persen dari 2016) yang diwujudkan	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJRD Tahun 2017												Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJRD Tahun 2017 (dalam Persen dari 2016) yang diwujudkan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJRD Tahun 2018	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJRD Tahun 2018 (dalam Persen dari 2017) yang diwujudkan	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJRD Tahun 2019	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJRD Tahun 2019 (dalam Persen dari 2018) yang diwujudkan	Pencapaian Kinerja dan Anggaran RPJRD Tahun 2017
						K1			K2			K3			K4								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1.001.1.1.1			1.001.1.1.1.1	1.001.1.1.1.1.1	1.001.1.1.1.1.1.1	1.001.1.1.1.1.1.1.1	1.001.1.1.1.1.1.1.1	1.001.1.1.1.1.1.1.1	1.001.1.1.1.1.1.1.1	1.001.1.1.1.1.1.1.1	1.001.1.1.1.1.1.1.1	1.001.1.1.1.1.1.1.1	1.001.1.1.1.1.1.1.1	1.001.1.1.1.1.1.1.1	1.001.1.1.1.1.1.1.1	1.001.1.1.1.1.1.1.1	1.001.1.1.1.1.1.1.1	1.001.1.1.1.1.1.1.1	1.001.1.1.1.1.1.1.1	1.001.1.1.1.1.1.1.1	1.001.1.1.1.1.1.1.1		
1.001.1.1.1			1.001.1.1.1	1.001.1.1.1	1.001.1.1.1	1.001.1.1.1	1.001.1.1.1	1.001.1.1.1	1.001.1.1.1	1.001.1.1.1	1.001.1.1.1	1.001.1.1.1	1.001.1.1.1	1.001.1.1.1	1.001.1.1.1	1.001.1.1.1	1.001.1.1.1	1.001.1.1.1	1.001.1.1.1	1.001.1.1.1	1.001.1.1.1		
1.001.1.1			1.001.1.1	1.001.1.1	1.001.1.1	1.001.1.1	1.001.1.1	1.001.1.1	1.001.1.1	1.001.1.1	1.001.1.1	1.001.1.1	1.001.1.1	1.001.1.1	1.001.1.1	1.001.1.1	1.001.1.1	1.001.1.1	1.001.1.1	1.001.1.1	1.001.1.1		
1.001.1			1.001.1	1.001.1	1.001.1	1.001.1	1.001.1	1.001.1	1.001.1	1.001.1	1.001.1	1.001.1	1.001.1	1.001.1	1.001.1	1.001.1	1.001.1	1.001.1	1.001.1	1.001.1	1.001.1		
1.001			1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001		
1.00			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
1.0			1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

No	Mekanisme	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2017 (dalam Persen RPJMD)	Target Capaian Kinerja pada Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2017 (Rp)			Realisasi Capaian Kinerja pada Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (Rp)			Realisasi Capaian Kinerja pada Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2015 (Rp)			Target Capaian Kinerja pada Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2016 (Rp)			Realisasi Capaian Kinerja pada Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2015 (Rp)			Pemerintah Daerah Penyelenggara
						A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
				Realisasi pencapaian indikator pencapaian yang terdapat dan diharapkan di lingkungan Kabupaten Pangajene Arung Muna, sehingga yang menjadi indikator keberhasilan (KIP)	1																
		2.2.2.1.2	Penelitian Pemasaran Pesisir	Penelitian Pengambilan dan Pengolahan Hasil Perikanan	1	232.200.000,000			2.260.200.000												
		2.2.2.1.2.1	Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan	Studi Pengolahan dan Perikanan Perikanan, Kerangka dan Pengolahan	1	870.000,000			1.000.000,000												
		2.2.2.1.2.1.1	Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan	Penelitian Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan	1	711.000,000			2.200.000,000												
		2.2.2.1.2.1.1.1	Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan	Penelitian Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan	1	650.000,000			1.000.000,000												
		2.2.2.1.2.1.1.1.1	Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan	Penelitian Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan	1	650.000,000			1.000.000,000												
		2.2.2.1.2.1.1.1.1.1	Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan	Penelitian Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan	1	650.000,000			1.000.000,000												
		2.2.2.1.2.1.1.1.1.1.1	Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan	Penelitian Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan	1	650.000,000			1.000.000,000												
		2.2.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1	Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan	Penelitian Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan	1	650.000,000			1.000.000,000												
		2.2.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1	Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan	Penelitian Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan	1	650.000,000			1.000.000,000												
		2.2.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan	Penelitian Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan	1	650.000,000			1.000.000,000												
		2.2.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan	Penelitian Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan	1	650.000,000			1.000.000,000												

No	Kategori	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tingkat RPJMD pada Tahun 2017 (dalam Persen PPK)	Revisi Capaian Kinerja pada Revisi Anggaran RPJMD Tahun 2016					Revisi Capaian Kinerja pada Revisi Anggaran RPJMD Tahun 2016										Pencapaian Kinerja			
						RPJMD 2016					RPJMD 2016					RPJMD 2016								
						A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E		A	B	C
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
						5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

No	Kategori	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target KPI pada Tahun 2017 (dalam Persen SKP)	Revisi Capaian Kinerja pada Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (2016)					Revisi Capaian Kinerja pada Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (2017)					Revisi Target dan Indikator KPI di Tahun 2017 (dalam Persen/Target SKP)	Target Capaian Kinerja pada Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (2018)					Prevalensi Ganda Pemrograman/Isi																																																																													
						A	B	C	D	E	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

No	Mekans	Kode	Program/Regulator/Sub-Regulasi	Indikator Utama Program/Regulator/Sub-Regulasi	Target RPJMD tahun 2017 (dalam Persen dari 2016 yang dijabarkan)	Rendahnya Capaian Kinerja Program/RPMD Tahun 2017 (Rp)						Rendahnya Capaian Kinerja Program/RPMD Tahun 2016 (Rp)						Rendahnya Capaian Kinerja Program/RPMD Tahun 2015 (Rp)						Prengkat Dasar/Prinsip/Perundang-undangan		
						M1		M2		M3		M4		M5		M6		M7		M8		M9			M10	
						a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r		s	t
0.001.1.1		0.001	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	10,000,000,000																					
0.001.1.1.1		0.001.1	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	1,000,000,000	200	1,000,000,000																			
0.001.1.1.1.1		0.001.1.1	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	400,000,000																					
0.001.1.1.1.1.1		0.001.1.1.1	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	1,000,000,000	200	1,000,000,000																			
0.001.1.1.1.1.1.1		0.001.1.1.1.1	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	1,000,000,000																					
0.001.1.1.1.1.1.1.1		0.001.1.1.1.1.1	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	1,000,000,000																					
0.001.1.1.1.1.1.1.1.1		0.001.1.1.1.1.1.1	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	1,000,000,000																					
0.001.1.1.1.1.1.1.1.1.1		0.001.1.1.1.1.1.1.1	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	1,000,000,000																					
0.001.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		0.001.1.1.1.1.1.1.1.1	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	1,000,000,000																					
0.001.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		0.001.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	1,000,000,000																					
0.001.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		0.001.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana	1,000,000,000																					

No	Misi		Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Target Kinerja dan Indikator Kunci yang Harus tercapai 2017 (dalam Persen/RKMD)	Revisi Capaian Kinerja dan Indikator Kunci yang Harus tercapai 2017 (dalam Persen/RKMD)			Revisi Capaian Kinerja dan Indikator Kunci yang Harus tercapai 2017 (dalam Persen/RKMD)			Revisi Capaian Kinerja dan Indikator Kunci yang Harus tercapai 2017 (dalam Persen/RKMD)	Revisi Capaian Kinerja dan Indikator Kunci yang Harus tercapai 2017 (dalam Persen/RKMD)			Pencapaian Kinerja/ Indikator Kunci yang Harus tercapai 2017 (dalam Persen/RKMD)		
	1	2			3	4	5	6		7	8	9	10	11	12		13	14	15		16	17
4.002.02.1.001	4.002.02.1.001	1	1	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.002	4.002.02.1.002	2	2	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.003	4.002.02.1.003	3	3	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.004	4.002.02.1.004	4	4	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.005	4.002.02.1.005	5	5	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.006	4.002.02.1.006	6	6	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.007	4.002.02.1.007	7	7	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	7	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.008	4.002.02.1.008	8	8	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	8	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.009	4.002.02.1.009	9	9	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	9	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.010	4.002.02.1.010	10	10	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.011	4.002.02.1.011	11	11	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	11	11	11	11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.012	4.002.02.1.012	12	12	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.013	4.002.02.1.013	13	13	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	13	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.014	4.002.02.1.014	14	14	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	14	14	14	14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.015	4.002.02.1.015	15	15	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	15	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.016	4.002.02.1.016	16	16	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	16	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.017	4.002.02.1.017	17	17	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	17	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.018	4.002.02.1.018	18	18	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.019	4.002.02.1.019	19	19	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	19	19	19	19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.020	4.002.02.1.020	20	20	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	20	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.021	4.002.02.1.021	21	21	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	21	21	21	21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.022	4.002.02.1.022	22	22	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	22	22	22	22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.023	4.002.02.1.023	23	23	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	23	23	23	23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.024	4.002.02.1.024	24	24	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	24	24	24	24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.025	4.002.02.1.025	25	25	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.026	4.002.02.1.026	26	26	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	26	26	26	26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.027	4.002.02.1.027	27	27	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	27	27	27	27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.028	4.002.02.1.028	28	28	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	28	28	28	28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.029	4.002.02.1.029	29	29	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	29	29	29	29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.002.02.1.030	4.002.02.1.030	30	30	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	30	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Kategori	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RPJMD Tahun 2017 (Pencapaian %)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017 (Rp)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017 (Pencapaian %)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017 (Rp)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017 (Pencapaian %)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017 (Rp)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017 (Pencapaian %)	Prevalensi Kinerja Program/Kategori								
						2017		2018			2017		2018			2017		2018											
						E	Rp	E	Rp		E	Rp	E	Rp		E	Rp	E	Rp										
1.02.01.1	Pendidikan dan Pembelajaran	Pendidikan dan Pembelajaran	Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi Keahlian Siswa dan Staf	Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi Keahlian Siswa dan Staf	100	100	2.450.000,00	100	2.450.000,00	100	2.450.000,00	100	2.450.000,00	100	2.450.000,00	100	2.450.000,00	100	2.450.000,00	100	2.450.000,00	100	2.450.000,00						
1.02.01.1.01						100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00				
1.02.01.1.01.01						100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00		
1.02.01.1.01.01.01						100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00		
1.02.01.1.01.01.01.01						100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00		
1.02.01.1.01.01.01.01.01						100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00		
1.02.01.1.01.01.01.01.01.01						100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00		
1.02.01.1.01.01.01.01.01.01.01						100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00
1.02.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01						100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00
1.02.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01						100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00
1.02.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01						100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00
1.02.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01						100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No	Materi	Kode	Program/Regulator/Instansi	Indikator Utama Program/Regulator/Instansi	Target MPO pada Tahun 2017 (Juta Persepsi Rp)	Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (Rp)				Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (Rp)				Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (Rp)				Pencapaian dan Pemeringkatan Nilai																																																																																																																																																																																					
						2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200

No	Kategori	Kode	Program/Regulasi/Sub-Regulasi	Indikator Kinerja Program/Regulasi/Sub-Regulasi	Target RPJSD Tahun 2017 (Jumlah Personel)					Pembangunan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJSD Tahun 2017					Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJSD Tahun 2018					Pencapaian Kinerja dan Anggaran RPJSD Tahun 2017 (Jumlah dan Persentase Personel)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJSD Tahun 2018 (Jumlah dan Persentase Personel)																						
					Jumlah Personel					Sibip					Rencana					Realisasi																												
					a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t			u	v	w																			
			Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sistem Informasi Manajemen (SIM)	1.001.10.1.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sistem Informasi Manajemen (SIM)	1.001.10.1.1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sistem Informasi Manajemen (SIM)	1.001.10.1.1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sistem Informasi Manajemen (SIM)	1.001.10.1.1.1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sistem Informasi Manajemen (SIM)	1.001.10.1.1.1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sistem Informasi Manajemen (SIM)	1.001.10.1.1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sistem Informasi Manajemen (SIM)	1.001.10.1.1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sistem Informasi Manajemen (SIM)	1.001.10.1.1.1.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sistem Informasi Manajemen (SIM)	1.001.10.1.1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sistem Informasi Manajemen (SIM)	1.001.10.1.1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Tahun		Kode	Program/Regulator/Sub-Regulator	Indikator Program/Regulator/Sub-Regulator	Target HKP pada Tahun 2007 (dalam Persen HKP)	Realisasi Capaian Kinerja pada Program HKP Tahun 2007						Realisasi Capaian Kinerja pada Program HKP Tahun 2008						Prevalensi Gangguan Penyakit Akibat Kerja						
	1	2					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M	N				
2	Program Kerja Khusus	Keperawatan	K.2.1.1	Perencanaan Perencanaan	Perencanaan kegiatan yang strategis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				4.2.1.1.1	Perencanaan Perencanaan	Perencanaan kegiatan yang strategis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4.2.1.1.2	Perencanaan Perencanaan	Perencanaan kegiatan yang strategis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Kategori	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja pada Tahun 2017 (dalam Persen/ Rp)	Realisasi Capaian Kinerja pada Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rp)					Realisasi Capaian Kinerja pada Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rp)					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2017 (dalam Persen/ Rp)	Target Capaian Kinerja pada Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rp)					Pencapaian Kinerja/ Penyelesaian
						2016					2017						2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0.00.01.01.01	Kelembagaan	01	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.02	Kelembagaan	02	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.03	Kelembagaan	03	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.04	Kelembagaan	04	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.05	Kelembagaan	05	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.06	Kelembagaan	06	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.07	Kelembagaan	07	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.08	Kelembagaan	08	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.09	Kelembagaan	09	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.10	Kelembagaan	10	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.11	Kelembagaan	11	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.12	Kelembagaan	12	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.13	Kelembagaan	13	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.14	Kelembagaan	14	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.15	Kelembagaan	15	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.16	Kelembagaan	16	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.17	Kelembagaan	17	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.18	Kelembagaan	18	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.19	Kelembagaan	19	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.20	Kelembagaan	20	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.21	Kelembagaan	21	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.22	Kelembagaan	22	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.23	Kelembagaan	23	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.24	Kelembagaan	24	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.25	Kelembagaan	25	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.26	Kelembagaan	26	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.27	Kelembagaan	27	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.28	Kelembagaan	28	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.29	Kelembagaan	29	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.30	Kelembagaan	30	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.31	Kelembagaan	31	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.32	Kelembagaan	32	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.33	Kelembagaan	33	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.34	Kelembagaan	34	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.35	Kelembagaan	35	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.36	Kelembagaan	36	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.37	Kelembagaan	37	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.38	Kelembagaan	38	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.39	Kelembagaan	39	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.40	Kelembagaan	40	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.41	Kelembagaan	41	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.42	Kelembagaan	42	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.43	Kelembagaan	43	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.44	Kelembagaan	44	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.45	Kelembagaan	45	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.46	Kelembagaan	46	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.47	Kelembagaan	47	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.48	Kelembagaan	48	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.49	Kelembagaan	49	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.01.50	Kelembagaan	50	Kelembagaan	Kelembagaan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Kategori	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Program/ Sub Kegiatan	Tingkat RPK pada Tahun 2017 (Jumlah Personel RPK)	Revisi Anggaran (Rp) pada 2017 (Jumlah Personel RPK)	Revisi Anggaran (Rp) pada 2017 (Jumlah Personel RPK)								Revisi Kinerja dan Kegiatan RPK 2017 (Jumlah dan Persentase RPK)	Tingkat Capaian Kinerja dan Program RPK 2017 (Jumlah RPK)	Prevalensi Candi Persegi Panjang Lokal
							A	B	C	D	E	F	G	H			
001																	
0.001																	
0.001.10																	
0.001.10.10																	
0.001.10.10.10																	
0.001.10.10.10.10																	
0.001.10.10.10.10.10																	
0.001.10.10.10.10.10.10																	
0.001.10.10.10.10.10.10.10																	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1 Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

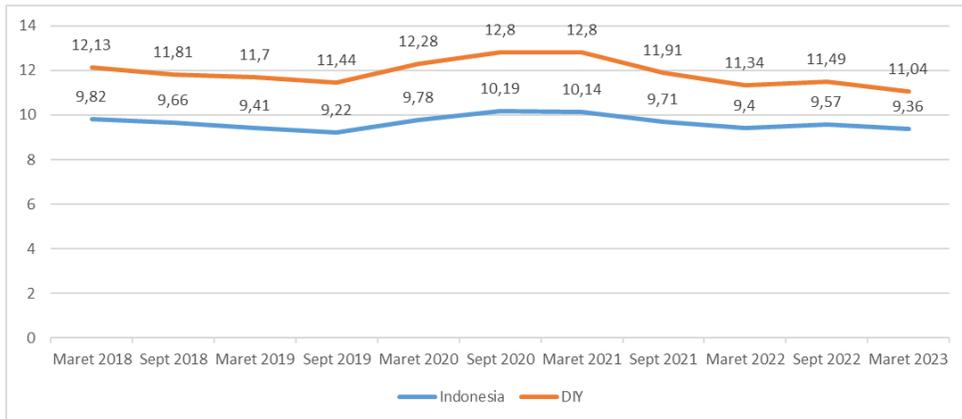
2.3.1.1 Kemiskinan

Terkait Permasalahan kemiskinan telah menjadi permasalahan serius yang perlu diperhatikan, dan banyak negara lain masalah ini menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Oleh karena itu kemiskinan kemudian menjadi sebagai isu penting dalam prioritas pembangunan. Menurut UNDP, penghapusan kemiskinan dalam berbagai bentuk merupakan tantangan kemanusiaan terbesar yang harus dihadapi.

Penghapusan kemiskinan juga menjadi isu penting dalam program pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebagai contoh adalah salah satu hal yang tercantum dalam Nawa Cita yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah, program rumah kampung deret atau rumah susun murah bersubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat.

Jumlah kemiskinan di DIY sempat mengalami peningkatan dengan adanya pandemi Covid-19. Pembatasan mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi masyarakat sebagai upaya menghambat penyebaran Covid-19 berdampak pada melemahnya kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut juga berakibat pada bertambahnya kemiskinan di DIY.

Persentase penduduk miskin DIY pada Maret 2022 sebesar 11,34% dan turun 0,57 poin dibandingkan September 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 454,76 ribu orang dan turun 19,7 ribu orang terhadap September 2021. Apabila dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 turun 51,7 ribu orang.



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-88 Tingkat Kemiskinan DIY dan Indonesia (Maret 2018 - Maret 2023)

Penurunan kemiskinan di DIY pada September 2021 dikatakan menurun karena kegiatan ekonomi di berbagai sektor telah berkontribusi seiring dengan pulihnya kegiatan perekonomian, ditingkat kemiskinan di DIY juga kembali menurun lagi dibulan Maret 2023. Karena dari kegiatan ekonomi yang semakin membaik dari era transisi covid 19 pada tahun 2021 ke 2023 yang menghasilkan aktivitas ekonomi semakin membaik.

Pada tingkat kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul lebih tinggi daripada rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota ini juga mencerminkan adanya ketimpangan antara wilayah di DIY.

Tingkat kemiskinan tertinggi pada Maret 2023 adalah Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat kemiskinan 15,64%, diikuti Kabupaten Gunungkidul sebesar 15,60% dan Kabupaten Bantul 11,95%. Sementara itu, dua wilayah lain yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata tingkat kemiskinan DIY (11,04%) yaitu 7,52% untuk Kabupaten Sleman dan 6,49% untuk Kota Yogyakarta.

Tabel 2-172 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2017 - 2023 (%)

Nama Wilayah	2017 (Maret)	2018 (Maret)	2019 (Maret)	2020 (Maret)	2021 (Maret)
DIY	13,02	12,13	11,70	12,28	12,8
Kulon Progo	20,03	18,30	17,39	18,01	18,38
Bantul	14,07	13,43	12,92	13,5	14,04
Gunungkidul	18,65	17,12	16,61	17,07	17,69
Sleman	8,13	7,65	7,41	8,12	8,64
Kota Yogyakarta	7,64	6,98	6,84	7,27	7,69

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022

Pemberantasan kemiskinan tentu memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Tersedianya data kemiskinan dan informasi mengenai potensi sosial dan ekonomi di wilayah DIY sangat diperlukan sebagai instrumen penting bagi perumusan strategi, prioritas dan kebijakan pembangunan di kawasan ini. Fokus pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*) atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem. Penduduk miskin di Indonesia tahun 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta jiwa, sementara di antara mereka yang merupakan penduduk miskin ekstrem sebesar 2,14% atau sebanyak 5,8 juta jiwa (BPS, 2021). Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) memerlukan upaya terpadu dan sinergi di tingkat pusat dan daerah, melalui tiga strategi utama PPKE: (i) pengurangan beban pengeluaran

masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 sudah cukup besar, yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya. Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem agar arahan Presiden untuk kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0% pada tahun 2024 dapat terwujud. Hal-hal yang masih menjadi permasalahan penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem menurut Bappenas diantaranya:

1. Ketepatan sasaran program dan data eksisting masih rendah
2. Keterbatasan kemampuan SDM penyelenggara
3. Belum semua daerah memiliki kelembagaan TKPKD
4. Standar layanan dan prosedur pelaksanaan yang belum optimal
5. Pelaksanaan program belum sesuai dengan perencanaan yang dilakukan
6. Fragmentasi pelaksanaan program lintas OPD masih tinggi

Jaminan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dengan adanya jaminan kesehatan, maka upaya intervensi untuk membantu pengobatan bagi masyarakat dapat terlaksana. Tanpa jaminan kesehatan maka masyarakat, khususnya yang berada pada ekonomi bawah bisa mengalami kondisi yang lebih parah akibat penyakit yang dideritanya. Misalnya, ketika ada masyarakat miskin yang akan berobat, tanpa jaminan kesehatan, akan ada dua kemungkinan yang terjadi : pertama, dia akan menghindari berobat karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar fasilitas kesehatan dan yang Kedua, dia akan berobat dengan melakukan berbagai cara (seperti berhutang, menjual aset produktif, dan sebagainya). Dua kondisi ini bisa dihindari jika masyarakat diberikan jaminan kesehatan, baik oleh pemerintah maupun kepemilikan jaminan kesehatan secara mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pendanaan Layanan Kesehatan Perorangan akan bertumpu dari iuran wajib yang akan dikelola oleh BPJS Kesehatan, sementara pendanaan bersumber dari kantong perorangan/keluarga, pemberi kerja baik langsung atau melalui asuransi kesehatan swasta akan menjadi sumber dana tambahan (top up) layanan kesehatan perorangan, sedangkan sumber dana dari Pemerintah / Pemda tetap diperlukan untuk mendanai bantuan iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu serta pendanaan program kesehatan masyarakat yang tidak ditujukan untuk layanan orang per orang.

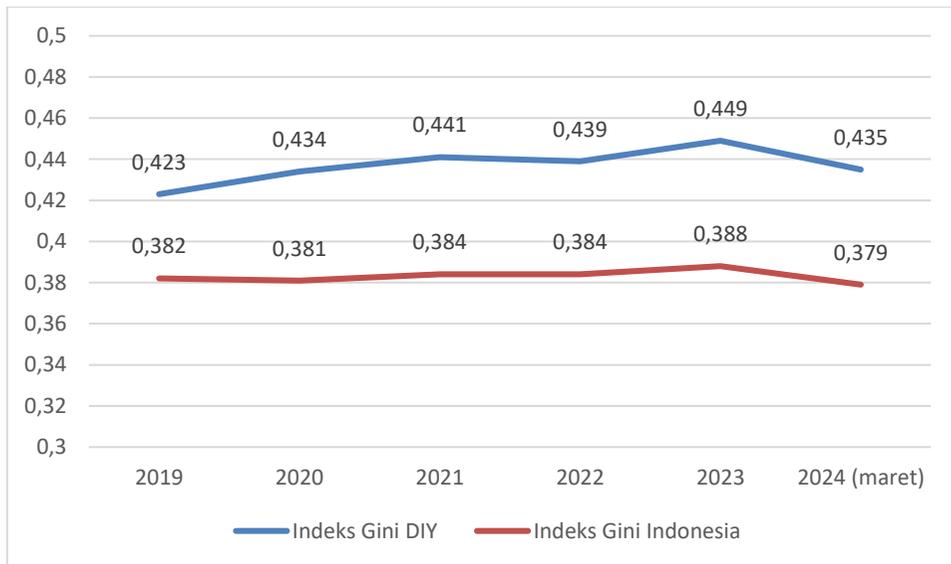
Aspek yang terkait erat dengan layanan kesehatan adalah *universal health coverage* (UHC) atau dikenal juga dengan cakupan layanan kesehatan yang universal. UHC berarti semua individu dan masyarakat menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan yang terkait dengan pendanaan. Secara teknis daerah dikatakan telah mencapai UHC manakala kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 95%. Terhitung sejak 1 Juli 2022, sebanyak 3.575.872 jiwa penduduk DIY telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 3.677.446 jiwa atau sebesar 97,24%. Pencapaian ini bahkan melebihi angka cakupan nasional. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di DIY telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Permasalahan utama yang akan dirasakan oleh masyarakat miskin yang mendapatkan JKN melalui kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau PBI JKN, ialah di mana seseorang tidak masuk dalam database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penentuan penerima JKN KIS, padahal *updating* data kepesertaan JKN harus melalui proses yang prosedural.

Agar program pemberantasan kemiskinan dapat kembali berjalan pada jalurnya, tentu memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Tersedianya data kemiskinan dan informasi mengenai potensi sosial dan ekonomi di wilayah DIY sangat diperlukan sebagai instrumen penting bagi perumusan strategi, prioritas dan kebijakan pembangunan di kawasan ini.

2.3.1.2 Ketimpangan Pendapatan

Indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu daerah adalah Indeks Gini (*Gini Ratio*). Nilai koefisien Gini berada antara 0 sampai dengan 1. Koefisien bernilai 0 artinya ada pemerataan pendapatan

secara sempurna, atau dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Apabila koefisien bernilai 1 maka akan menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Perkembangan Indeks Gini DIY dibandingkan dengan nasional sejak tahun 2019 hingga 2024 Maret digambarkan sebagai berikut:



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

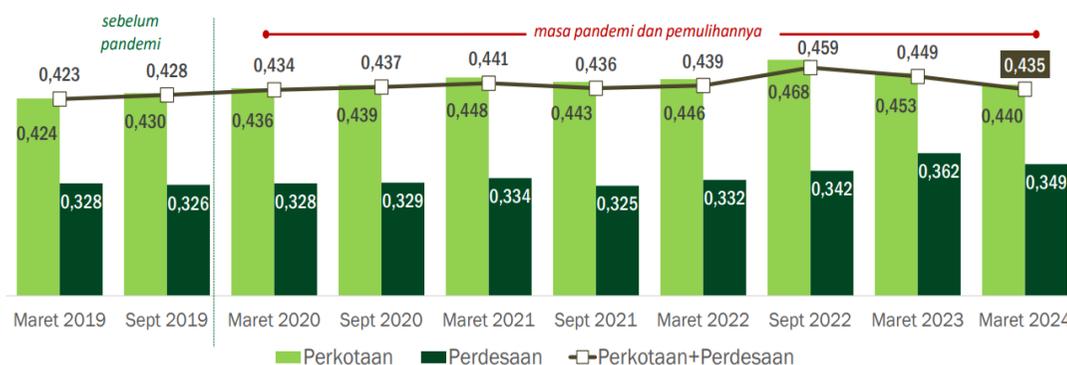
Gambar 2-89 Indeks Gini DIY dan Nasional Tahun 2019-2024 Maret

Gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk DIY cenderung meningkat dalam enam tahun terakhir. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk nasional yang memiliki kecenderungan menurun. Angka Indeks Gini DIY pada tahun 2019 berada di angka 0,423. Periode berikutnya mengalami tren menaik karena terdampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas perekonomian seiring dengan peningkatan jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan DIY meningkat dari 11,44% pada tahun 2019 menjadi 12,8% pada tahun 2021. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka DIY meningkat dari 3,14% pada tahun 2019 menjadi 4,56% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, rasio gini DIY sebesar 0,439. Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2021 yang besarnya 0,441. Rasio gini di daerah perkotaan pada 2022 tercatat sebesar 0,446 dan nilainya lebih rendah dibandingkan rasio gini 2021 yang

sebesar 0,448. Rasio gini di daerah perdesaan pada 2022 mencapai 0,332. Rasio gini tersebut lebih rendah bila dibanding rasio gini 2021 sebesar 0,334.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini sesuai dengan pendapat Todaro (2000) bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan pada jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan menurunkan ketimpangan. Sementara itu, kenaikan produktivitas tenaga kerja yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan adanya daerah yang relatif lebih maju akibat dari kegiatan produktivitas tenaga kerja dan adanya daerah yang relatif tidak maju akibat minimnya tenaga kerja yang produktif.

IMF menyatakan bahwa tingginya tingkat ketimpangan mempunyai implikasi terhadap pertumbuhan dan stabilitas makro ekonomi. Ketimpangan menyebabkan porsi hasil pembangunan yang diperoleh masyarakat bawah lebih sedikit sehingga mengurangi kemampuan kelompok ini untuk menjaga kesehatannya dan melakukan investasi fisik dan sumber daya manusia. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan dan rendahnya kemampuan untuk mencapai jenjang pendidikan tinggi bagi kelompok bawah. Pada akhirnya, tingkat pendidikan dan akses pelayanan kesehatan yang rendah mengakibatkan produktivitas tenaga kerja juga menjadi rendah. Secara kewilayahan, tingkat ketimpangan pendapatan di daerah perdesaan mengalami kecenderungan menurun, sedangkan kondisi sebaliknya terjadi di daerah perkotaan yang cenderung meningkat. Hal ini terkait dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan di perdesaan DIY juga disebabkan oleh tingkat pendapatan yang relatif merata, namun merupakan pendapatan yang rendah.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 2-90 Indeks Gini Perdesaan dan Perkotaan DIY Tahun 2019-2024

2.3.1.3 Ketimpangan Antar Wilayah

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan antara wilayah adalah Indeks Williamson. Nilai Indeks Williamson kurang dari 0,35 menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki ketimpangan yang rendah. Sedangkan, wilayah dengan nilai Indeks Williamson yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi.

Nilai Indeks Williamson DIY Tahun 2022 adalah 0,464 dan pada tahun 2023 turun menjadi 0,456. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota selain disebabkan oleh perbedaan distribusi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, juga disebabkan oleh ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya. Salah satu sarana prasarana yang dapat meningkatkan aksesibilitas adalah jaringan jalan. Nilai aksesibilitas jalan tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta, diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki derajat aksesibilitas paling tinggi. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah terluas namun memiliki derajat aksesibilitas yang paling rendah, sehingga lebih sulit dijangkau dibandingkan dengan wilayah lainnya di DIY. Namun demikian secara keseluruhan, kinerja infrastruktur DIY, terutama dilihat dari aksesibilitas, sudah tercapai dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa DIY memiliki derajat aksesibilitas darat jauh di atas rata-rata Nasional.

Penyebab ketimpangan antar wilayah yang lain adalah persebaran investasi yang tidak merata di Kabupaten/Kota DIY. Proporsi realisasi investasi rata-rata terbesar pada tahun 2018 - 2022 berada di Kota Yogyakarta (36%). Kabupaten Gunungkidul merupakan kontributor investasi terkecil dengan sumbangan 7%. Pergeseran Kulon Progo menjadi salah satu penyumbang realisasi investasi terbesar dimulai sejak tahun 2017 seiring dengan dimulainya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, sedangkan kondisi distribusi investasi pada tahun-tahun sebelumnya masih terpusat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, terutama pada sektor sekunder dan tersier.

Permasalahan ketimpangan antar wilayah juga tercermin dari kesenjangan distribusi IPM yang cukup lebar antar kabupaten/kota di DIY. Capaian IPM Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebesar 88,61 merupakan nilai tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kota Yogyakarta bersama Kabupaten Sleman (84,86) dan Bantul (81,74) masuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Di sisi lain, capaian IPM Kulon Progo yang tercatat sebesar 75,82 dan Gunungkidul sebesar 71,46 termasuk dalam kategori “Tinggi”. Indikator penyusun IPM di kabupaten/kota DIY juga cukup bervariasi. Data IPM pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pada dimensi kesehatan, indikator usia harapan hidup saat lahir tertinggi di Kulon Progo (75,29 tahun) dan terendah di Bantul (73,94 tahun). Pada dimensi pengetahuan, capaian Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih relatif tertinggal dibanding Sleman dan Kota Yogyakarta. Sementara itu, capaian komponen pengeluaran perkapita Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul juga cukup jauh tertinggal dibandingkan Sleman dan Kota Yogyakarta. Pengeluaran perkapita Kota Yogyakarta yang tertinggi di DIY pada tahun 2023 hampir dua kali lipat dibandingkan pengeluaran perkapita Kabupaten Gunungkidul.

2.3.1.4 Peningkatan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Potensi Bencana

Keterkaitan antara pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan kualitas lingkungan hidup menjadi isu yang krusial. Gagasan mengenai konsep pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan tersebut kemudian dituangkan dalam kesepakatan internasional yang dikenal sebagai SDGs. Dalam pembangunan berkelanjutan, segala aktivitas didorong untuk memberikan dampak positif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Berbagai permasalahan lingkungan yang muncul saat ini merupakan akibat dari aktivitas manusia yang melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya alam tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kualitas lingkungan hidup DIY tercermin dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup DIY, capaiannya berkisar antara 59,43 sampai dengan 66,29 angka indeks. Sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, tren nilai IKLH mengalami penurunan sebesar 2,26 poin dari semula 61,69 di tahun 2018 menjadi 59,43 di tahun 2022 dan naik menjadi 66,29 di tahun 2023.

Berdasarkan indeks yang menyusun IKLH, indeks tutupan lahan menjadi indeks yang mengalami tren selalu menurun dibandingkan dengan IKA dan IKU.

2-468

Berdasarkan indeks tutupan lahan DIY 2018-2023, nilai IKTL DIY memiliki kecenderungan mengalami penurunan dari sebesar 60,86 pada tahun 2018 menjadi 40,28 di tahun 2023. Meskipun pada tahun 2023 menjadi capaian yang terendah yaitu sebesar 40,28 akan tetapi capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 37,20 didalam RPJMD DIY 2022-2027. Perubahan perhitungan metode pengukuran IKTL menjadi faktor utama target di tahun 2023 menjadi lebih rendah dari pada target ditahun-tahun sebelumnya.

Pembangunan di DIY juga harus memperhatikan pengelolaan risiko bencana. Hal ini mengingat DIY diidentifikasi mempunyai beberapa kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana gunung berapi di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman serta sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di semua kabupaten di DIY, sedangkan gerakan tanah/batuan dan erosi berpotensi terjadi pada kawasan lereng pegunungan di Kulon Progo. Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan zona subduksi (kawasan tumbukan antar lempeng) di dasar samudera Indonesia yang berada di sisi selatan DIY. Wilayah DIY juga mempunyai beberapa sesar yang diduga aktif. Kawasan rawan bencana tsunami terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul khususnya pada pantai dengan elevasi kurang dari 30 m dari permukaan air laut.

Hasil pendataan Pusat Data *Emergency Operation* (PAMOR) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 sampai dengan bulan September terjadi 3.158 kali kejadian kebencanaan di DIY dengan tiga jenis bencana terbanyak yaitu 1.762 kali gempabumi (skala kecil), 338 kali tanah longsor dan 308 kali kebakaran bangunan

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.2.1.1 Urusan Pendidikan

1.) Belum meratanya layanan pendidikan yang berkualitas.

Berbagai infrastruktur pendidikan yang mendukung proses pembelajaran dan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan wawasan keilmuan seperti halnya sekolah, perpustakaan, laboratorium, jaringan jalan di pedesaan, dan lainnya telah tersedia dengan kualitas

yang cukup baik namun belum merata persebarannya, masih terdapat ketimpangan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di wilayah DIY. Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Karena HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk di mulai pada usia tujuh tahun. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Menurut BPS tahun 2023 HLS DIY 15,66. Namun demikian, HLS di Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul berada di bawah rata-rata DIY, bahkan HLS Gunungkidul sebesar 13,39 tahun merupakan yang terendah di DIY. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan pendidikan di DIY.

2.) Mutu pendidikan yang belum optimal

Mutu pendidikan dapat diukur melalui Akreditasi Sekolah. Data Dapodik per Juni 2024 persentase sekolah SMA/SMK baik negeri dan swasta dengan Akreditasi A di DIY mencapai 63,78%. Masih ada sekolah yang belum terakreditasi atau capaian akreditasinya belum mencapai A sebanyak 36,22%. Jika dilihat lebih jauh persentase sekolah SMA/SMK negeri yang telah terakreditasi sebanyak 94,96%, sedangkan pada sekolah SMA/SMK swasta baru terdapat 49,61% dengan akreditasi A. Pada sisi lain, keberhasilan pendidikan yang bermutu juga diukur dari raport pendidikan dua hal yang utama adalah asesmen terhadap kemampuan literasi dan numerasi dan keterserapan Lulusan SMK. Pada tahun 2023 secara umum Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi Mencapai 64,68 artinya masih perlu upaya untuk meningkatkan. Pada indikator Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca mencapai 81,35. Angka ini cukup baik namun masih harus terus ditingkatkan. Pada aspek penyerapan SMK di dunia kerja pada kategori tinggi dengan score 92,1 namun, Persentase lulusan SMK yang memperoleh pekerjaan pada bidang yang selaras dengan latar belakang bidang keahlian rendah.

Berdasarkan data perkembangan rata-rata lama sekolah di DIY sejak tahun 2023, kabupaten/kota yang capaiannya rata-rata lama sekolah di

atas DIY yaitu Kota Yogyakarta dengan tingkat pendidikan penduduk yang paling tinggi disusul Sleman. sedangkan untuk daerah Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul berada di bawah rata-rata DIY. Rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta yang paling tinggi di DIY pada angka 12,11 di tahun 2023, cukup jauh capaiannya dibandingkan Gunungkidul memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang paling rendah di DIY dengan nilai sebesar 7,32 tahun pada 2023. Perbedaan yang signifikan antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul, merupakan indikasi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan.

3.) Tingkat pendidikan tenaga kerja masih cukup rendah

Rendahnya minat penduduk untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi tercermin pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Masih banyak tenaga kerja yang pendidikan yang tidak bersekolah/belum pernah sekolah dan menamatkan pendidikan dasar dengan persentase 11,85% di tahun 2023. Tenaga kerja dengan jenjang Pendidikan menengah sebesar 33,82% dan jenjang diploma/universitas sebanyak 12,74%. Masih tingginya penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah, belum tamat SD, dan jenjang pendidikan dasar tersebut berpotensi menyebabkan daya saing dan kualitas ketenagakerjaan rendah

2.3.2.1.2 Urusan Kesehatan

1.) Tingginya Prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM)

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 menunjukkan bahwa beberapa PTM berada di atas rata-rata nasional seperti penyakit jantung, hipertensi, Diabetes Melitus, Stroke, Kanker, Asma, Penyakit Ginjal Kronis, dan termasuk gangguan jiwa.

PTM seringkali dikaitkan dengan perilaku dan gaya hidup seseorang. Tingginya prevalensi PTM di DIY berbanding lurus dengan tingkat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat DIY. Hasil evaluasi penerapan PHBS di tingkat rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga yang ber-PHBS di tahun 2023 mencapai 46,73%, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 46,02%. indikator yang sulit untuk tercapai adalah tidak merokok di dalam rumah.

Faktor lain yang menjadi tantangan dalam pencegahan dan penanganan PTM adalah perubahan struktur penduduk DIY dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk pada usia lanjut (lansia) dan seiring

dengan tingkat Usia Harapan Hidup (UHH) yang tinggi di DIY. Kondisi tersebut merupakan tantangan terhadap meningkatnya potensi penyakit degeneratif dimana pada lansia akan terjadi penurunan fungsi jaringan tubuh dan organ seiring bertambahnya usia.

Upaya pencegahan dan penanggulangan PTM dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Khusus untuk kasus gangguan jiwa, selain pemberian layanan kesehatan diperlukan upaya dalam menghilangkan stigma penderita gangguan jiwa di masyarakat.

Strategi yang perlu diupayakan dalam penanganan permasalahan PTM di DIY yaitu: a) pelaksanaan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif secara komprehensif, b) Peningkatan kapasitas SDM, c) Mengembangkan dan memperkuat sistem surveilans, dan d) Penguatan jejaring dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat.

2.) Tingginya kasus beberapa Penyakit Menular

Beberapa penyakit menular yang menjadi permasalahan utama secara nasional menurut Kementerian Kesehatan RI adalah HIV AIDS, Tuberkulosis (TBC), malaria sedangkan untuk DIY selain ketiga penyakit menular di atas, Demam Berdarah Dengue (DBD) juga menjadi permasalahan karena kasusnya masih tinggi dan masih terdapat kasus kematian akibat DBD.

Pada tahun 2022, jumlah akumulasi kasus HIV di DIY sebanyak 6.784 kasus dengan penemuan kasus baru HIV sebanyak 916 kasus. Penemuan tertinggi di Kabupaten Sleman sebanyak 340 kasus dan terendah di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 28 kasus. Jumlah kasus seluruhnya sebanyak 6784 kasus didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 69,1%. Kelompok usia dengan kasus tertinggi adalah pada rentang usia 20-29 tahun sebanyak 32,3%

Untuk penyakit TB, success rate penyakit TB pada tahun 2022 sebesar 84,30% menurun dari tahun 2021 yang sebesar 88,05. Permasalahan penanganan TB di DIY adalah masih rendahnya cakupan penemuan TB (case detection rate) yaitu 5.374 kasus dari target penemuan sebesar 10.530 (51,04%). Capaian tersebut naik signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 33,50%. Selain faktor penemuan, perlu juga diwaspadai adanya kenaikan jumlah penderita TBC kebal obat (Multi Drug Resistance/MDR). Pelibatan peran lintas sektor dan masyarakat

merupakan salah satu strategi dalam upaya peningkatan cakupan penemuan kasus TB di DIY.

Penyakit menular lain yang menjadi perhatian di DIY adalah malaria. Meskipun seluruh kabupaten/kota di DIY telah mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria, tetapi masih ada kasus malaria di yang terjadi. Daerah perbukitan menoreh merupakan daerah endemis malaria yang penanganannya diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di daerah perbukitan menoreh.

Penyakit menular lain yang menjadi perhatian di DIY adalah malaria. Meskipun seluruh kabupaten/kota di DIY telah mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria, tetapi masih ada kasus malaria di yang terjadi. Daerah perbukitan menoreh merupakan daerah endemis malaria yang penanganannya diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di daerah perbukitan menoreh.

Demam Berdarah *Dengue* (DBD) juga merupakan penyakit menular yang memerlukan perhatian di DIY karena tingginya kasus dan angka kematiannya seperti Demam Berdarah *Dengue* (DBD) dan HIV-AIDS. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, pada tahun 2022 kasus DBD di DIY sebanyak 2.253 naik dari tahun sebelumnya yang sebanyak 1.187 kasus dengan *Case Fatality Rate* (CFR) sebesar 0,8 turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,01.

Secara umum untuk mengendalikan penyakit menular strategi yang perlu dilakukan yaitu perluasan cakupan akses kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam surveillans berbasis masyarakat, dan penyediaan obat dan vaksin.

3.) Prevalensi Balita *Stunting* di DIY masih Cukup Tinggi

Prevalensi balita *stunting* berdasarkan data dari hasil survei menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu tahun 2018-2022, tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2023. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan capaian prevalensi *stunting* DIY sebesar 21,4% dan menurun di tahun 2019 mencapai 21% berdasarkan data dari Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI). Pada tahun 2020 tidak dilakukan pengukuran sehubungan terjadinya pandemi covid 19, tetapi di tingkat pusat menerbitkan buku prediksi *stunting* sebagai dasar pemantauan dan evaluasi kinerja program *stunting*. Pada tahun 2020,

2-473

prevalensi *stunting* DIY sebesar 20% dan berturut-turut menurun di tahun 2021 sebesar 17,3% dan tahun 2022 sebesar 16,4% berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Sedangkan pada tahun 2023 berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi *stunting* DIY kembali meningkat menjadi 18%. Peningkatan angka prevalensi *stunting* juga diikuti oleh kabupaten/kota di DIY kecuali Kabupaten Sleman.

Stunting terjadi akibat kegagalan pada saat proses tumbuh kembang seorang anak karena kondisi kesehatan dan asupan gizi yang tidak optimal sehingga diperlukan peran multi sektor multi stakeholder dalam pencegahan dan penanganannya. Pencegahan dan penanganan permasalahan *stunting* dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik untuk mengintervensi pada penyebab langsung *stunting* seperti layanan kesehatan dan gizi. Sedangkan intervensi gizi sensitif lebih pada intervensi penyebab tidak langsung seperti penyediaan akses air bersih dan aman, penyediaan rumah dan sanitasi sehat, penyediaan pangan aman, bergizi dan sehat, pola asuh, dan lingkungan sosial yang sehat.

4.) Angka Kematian Ibu masih belum bisa ditekan

Pada tahun 2021 terjadi kenaikan kasus yang cukup signifikan dari yang sebelumnya sebanyak 40 kasus di tahun 2020 menjadi 131 kasus di tahun 2021 karena dalam masa pandemi covid-19. Dari 131 kasus kematian ibu di tahun 2021, 80 diantaranya karena terpapar covid-19, selain itu pandemi covid-19 menyebabkan kendala terhambatnya layanan Kesehatan Ibu dan Anak. Seiring dengan menurunnya kasus covid di tahun 2022, terjadi pula penurunan kasus kematian ibu menjadi 43 kasus di tahun 2022 dan menurun kembali di tahun 2023 menjadi sebanyak 22 kasus. Meskipun terjadi penurunan kasus kematian ibu melahirkan di tahun 2022, masih menjadi perhatian di DIY dalam pencegahan dan penanganannya.

Upaya menekan angka kematian ibu melahirkan lebih diperkuat dalam pelayanan promotif-preventif untuk menyiapkan persalinan yang aman melalui kunjungan ibu hamil, deteksi potensi komplikasi kehamilan dan persalinan di fasilitas kesehatan. Dalam memberikan layanan kesehatan ibu dan anak di masa pandemi covid-19 perlu dilakukan inovasi dan adaptasi untuk meminimalisir resiko covid-19.

2.3.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.) Sub. Urusan Sumber Daya Air dan Drainase

- a.) Penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dan/atau irigasi pertanian rakyat belum mencukupi pada waktu dan wilayah tertentu.

Wilayah DIY masuk dalam DAS Progo Opak-Oyo Serang. Berdasarkan Neraca Sumber Daya Alam tahun 2022 diperoleh hasil bahwa ketersediaan air pada DAS Serang, DAS Progo, DAS Opak, dan DAS OYO serta DTA Karst pada tahun 2021 sebesar 7.807 juta m³. Kebutuhan air digunakan untuk domestik, perhotelan, pertanian, peternakan, dan perikanan pada tahun 2021 sebesar 1.605 juta m³.

Potensi ketersediaan air di WS POS secara total sebenarnya melebihi kebutuhan yang ada, Namun pada kenyataannya, saat waktu-waktu tertentu suplai air yang terjadi belum bisa mencukupi berdasarkan pengambilan air pada lokasi-lokasi tertentu di WS POS. Selain itu pada beberapa wilayah potensi yang tersedia tidak dapat mencukupi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan setempat atau diambilkan dari wilayah yang mungkin bisa mensuplai.

Pemenuhan kebutuhan air baku dapat dilakukan melalui pembangunan bendung/waduk, embung, sumur air tanah dalam, dan seterusnya. Sampai dengan saat ini pemenuhan air baku pada daerah sulit air melalui sumur air tanah dalam telah terlayani sebanyak 55 titik dari 151 titik di seluruh kabupaten di DIY, dan terlayani sumber air lain (PDAM, SPAMDES, dan lainnya) sebanyak 21 titik sehingga masih ada 75 titik yang belum terlayani. Untuk pembangunan embung masih perlu dilakukan penambahan embung baru hingga saat ini baru ada 25 embung. Sementara air untuk irigasi, dari 41 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY, baru 10.259,24 ha luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi dari luasan 13.987 ha atau setara dengan 73,34%.

- b.) Sebagian besar daerah irigasi kewenangan pemda DIY belum mencapai indeks kinerja daerah irigasi kategori optimum.

Kinerja layanan irigasi dipengaruhi oleh faktor fisik atau prasarana yang meliputi kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi,

manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia (SDM). Dalam rangka peningkatan kinerja layanan sistem irigasi keseluruhan faktor tersebut perlu dilakukan peningkatan.

Indeks kinerja daerah irigasi diukur dari parameter kondisi jaringan irigasi, produktivitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi, dan P3A. Indeks kinerja daerah irigasi masuk dalam kategori optimum apabila nilainya di atas 77,5%. Berdasarkan data tahun 2023 dari 41 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan pemda DIY, baru 10.259,24 ha luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi dari luasan 13,987 ha atau setara dengan 73,34%. Adapun daerah irigasi kewenangan Pemda DIY saat ini yang masuk dalam kategori indeks kinerja optimum saat ini adalah DI Mojo dan DI Sembuh, dengan nilai persentase total yaitu 0,58%. Masih banyak daerah irigasi yang belum masuk dalam kategori optimum.

c.) Masih terdapat daerah yang mengalami genangan.

Kewenangan pengelolaan wilayah sungai di DIY merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga memerlukan sinkronisasi dan kesepakatan dalam penanganan pengelolaan wilayah sungai, termasuk kesepakatan dalam penanganan drainase, dimana perlu adanya pemetaan yang dilakukan oleh Pusat hal-hal terkait drainase yang perlu ditangani oleh DIY. Total genangan yang ada adalah sebanyak 51 titik dengan luas 6,86 ha, yang sudah ditangani seluas 5,44 ha, setara 34 titik sehingga masih perlu penanganan seluas 1,42 ha setara dengan 17 titik.

d.) Wilayah DIY rawan terhadap daya rusak air.

Wilayah DIY memiliki sumber bencana alam yang tersebar mulai dari gunung berapi, sesar/patahan, erosi dan tanah longsor, hingga potensi banjir dan tsunami. Erupsi gunung api Merapi berpotensi menimbulkan awan panas hingga banjir lahar dingin. Permasalahan banjir juga terjadi di beberapa WS POS. Hal ini disebabkan karena antara lain curah hujan yang tinggi, kapasitas alur sungai yang tidak mencukupi, adanya endapan atau sedimen di muara sungai (delta), atau karena daerah banjir yang memang merupakan dataran rendah. Pada saat ini penambangan bahan galian mineral yang banyak dilakukan di sepanjang sungai-sungai khususnya di sungai wilayah sungai Progo-Opak-Serang (WS POS) berdampak pada lingkungan diantaranya

terhadap stabilitas bangunan sarana prasarana sungai, terhadap morfologi sungai yaitu terjadinya penurunan dasar sungai yang cukup signifikan dan berakibat kurang berfungsinya bangunan pengairan serta mengancam stabilitas bangunan pengairan dan prasarana lain. Pada saat kemarau, kekeringan dan kelangkaan air merupakan masalah yang sering dihadapi oleh sebagian penduduk di sebagian wilayah di WSPOS terutama di daerah dengan dengan formasi geologi spesifik seperti di Gunungkidul dan Kulon Progo. Pada sisi selatan wilayah DIY mempunyai potensi abrasi dan banjir rob. Hal ini akan menimbulkan dampak terhadap sarana prasarana khususnya pada kawasan selatan apabila tidak dilakukan mitigasi bencana. Berdasarkan data Pusdalop BPBD DIY sampai dengan bulan September tahun 2023 terjadi 3.158 kali kejadian kebencanaan di DIY dengan tiga jenis bencana terbanyak yaitu 1.762 kali gempa bumi (skala kecil), 338 kali tanah longsor dan 308 kali kebakaran bangunan.

2.) Sub. Urusan Jalan

- a.) Kondisi kemandapan jaringan jalan di DIY masih rendah. Ketersediaan jaringan jalan yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Kondisi jaringan jalan kewenangan DIY belum seluruhnya dalam kondisi mantap, belum memenuhi standar teknis jalan dan standar keselamatan jalan.
- b.) Total panjang ruas jalan Provinsi sesuai Keputusan Gubernur Nomor 41/KEP/2023 sepanjang 674,585 KM. Kondisi kemandapan jaringan jalan provinsi di DIY pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan yaitu 71,56% kondisi mantap di tahun 2020, 70,52% kondisi mantap pada tahun 2021, dan di tahun 2022 kondisi jalan mantap 70,18%, sedangkan pada tahun 2023 kondisi kemandapan jalan sebesar 70,58% di mana masih ada 29,42% jalan tidak mantap atau setara dengan 198,45 kilometer jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kondisi kemandapan jalan akan menurun apabila penanganan jalan tidak dilakukan dengan optimal.
- c.) Aksesibilitas jalan di DIY untuk mendukung konektivitas antar wilayah sebagian belum terwujud.

Perwujudan aksesibilitas jalan sesuai dengan RTRW DIY dilakukan melalui pengembangan sistem jaringan jalan berupa:

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)
- (2) Pengembangan Jaringan Jalan Ruas Jalan Legundi–Gesing penghubung Panggang–Legundi–Gesing
- (3) Pembangunan dan peningkatan jalan konektivitas Bandara YIA dengan KSPN Borobudur (Ruas jalan Sentolo–Nanggulan–Dekso–Klangon dan Ruas Jalan Temon–Tegalsari–Samigaluh–Suroloyo–Klangon)
- (4) Pembangunan jalan bebas hambatan Ruas Yogyakarta–Bawen dan Solo–Yogyakarta–Kulon Progo
- (5) Pengembangan *Jogja Outer Ringroad* (JORR) pada ruas Sentolo–Minggir; Minggir–Tempel; Tempel–Prambanan; Sentolo–Imogiri; Imogiri–Piyungan; dan Piyungan–Prambanan.

Sampai dengan tahun 2023 pengembangan jaringan jalan JJLS untuk pengembangan kawasan Selatan masih berproses pada pelaksanaan konstruksi pembangunan Jembatan Srandakan 3 (Jembatan Pandansimo) dan ruas Kretek–Girijati. Pembangunan jalan tol di wilayah DIY telah dimulai proses konstruksinya dan direncanakan dapat diselesaikan pada tahun 2026. Aksesibilitas dari bandara YIA ke KSPN Borobudur telah terlayani melalui peningkatan ruas jalan Sentolo–Nanggulan–Dekso–Klangon. Adapun untuk ruas Temon–Borobudur direncanakan tindak lanjut akan dimulai seiring penetapan IPL tol Yogyakarta–Kulon Progo.

Dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah masih diperlukan pembangunan ruas jalan. Pengembangan konektivitas melalui pembangunan ruas jalan Prambanan–Gading sebagai alternatif aksesibilitas untuk mendukung potensi Kabupaten Gunungkidul, sampai dengan tahun 2023 telah terbangun 19,775 kilometer atau 71,7% dari total 27,68 kilometer, sehingga masih terdapat segmen yang belum terbangun yaitu Prambanan–Gayamharjo sepanjang 7,805 kilometer. Konektivitas antar wilayah juga dilakukan untuk mendukung struktur ruang khususnya di kawasan Pansela yaitu melalui jalan strategis provinsi ruas Panggang–Legundi–Gesing. Pembangunan ruas jalan tersebut masih diperlukan yaitu pada segmen Legundi–Gesing sepanjang 11 kilometer.

3.) Sub. Urusan Cipta Karya

- a.) Capaian akses air minum layak di DIY belum memenuhi target Nasional dan perlu meningkatkan akses air minum aman.

Capaian penduduk berakses air minum tahun 2023 di DIY adalah 95,49% dengan kondisi akses air minum aman yaitu 17,88% yang diperoleh dari data penduduk DIY yang telah memiliki akses perpipaan bersumber dari PDAM/Perumda Air Minum Kabupaten/Kota. Peningkatan akses air minum aman dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah penduduk yang memiliki akses perpipaan bersumber dari PDAM/Perumda Air Minum Kabupaten/Kota. Berdasarkan rencana induk SPAM Regional DIY terdapat 4 SPAM Regional yang akan dikembangkan. Sampai dengan tahun 2023 hanya SPAM Regional Kartamantul yang telah terselesaikan pembangunannya dengan kapasitas air curah 700 liter/detik atau setara dengan 104.704 sambungan rumah dan diharapkan dapat mensuplai kebutuhan air minum pada PDAM/Perumda Air Minum Kabupaten/Kota di Kartamantul, namun penyerapan sampai dengan tahun 2023 diperkirakan hanya sebesar 36,82%.

- b.) Capaian akses sanitasi layak di DIY belum memenuhi target Nasional dan perlu meningkatkan akses sanitasi aman.

Akses sanitasi layak di DIY pada tahun 2023 adalah 97,69% dimana 21% berakses aman. Rendahnya akses aman disebabkan karena belum optimalnya penyediaan pengolahan dan jaringan sistem air limbah domestik terpusat regional, serta pengolahan persampahan regional belum sesuai standar dan ramah lingkungan. Salah satu upaya untuk meningkatkan akses sanitasi aman adalah melalui penyediaan pengolahan limbah domestik/rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengolahan limbah terpusat. Sistem IPAL Terpusat Sewon saat ini telah memiliki kapasitas pengolahan sebesar 75.000 SR dengan kondisi jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga yang tersambung yaitu 27.205 SR atau 36,72%. Peningkatan jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga diharapkan dapat meningkatkan sanitasi aman di DIY. Pengelolaan sampah di DIY sekitar 78,8% sampah dikelola sesuai dengan ketentuan yaitu 54,44% penanganan (sampah diangkut ke TPA) dan pengurangan sebesar 24,36%. Masih ada sekitar 21,2% sampah yang belum dikelola sesuai ketentuan. Sedangkan terkait dengan pengelolaan sampah dengan penutupan TPA Regional Piyungan, ditahun 2024, Pemda DIY mengeluarkan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah dimana

pengelolaan sampah dikembalikan ke pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

- c.) Pengelolaan bangunan gedung Negara baru dilakukan sebatas pelayanan rekomendasi pembangunan/rehabilitasi, belum tersedia peta jalan menuju bangunan gedung Negara yang andal di wilayah DIY. Keandalan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan gedung, kesehatan bangunan gedung, kenyamanan bangunan gedung, dan kemudahan bangunan gedung sehingga terwujud penyelenggaraan bangunan gedung negara yang tertib, fungsional, andal, dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi pengguna dan masyarakat di sekitarnya, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Keandalan bangunan gedung secara legal diperoleh dari dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sampai dengan saat ini belum tersedia data terkait capaian keandalan gedung di DIY sehingga diperlukan data dasar dan peta jalan untuk mencapai keandalan bangunan gedung. Layanan yang dilakukan sampai dengan tahun 2023 adalah dalam hal rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung Negara. Rasio pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara masih rendah, tercermin dari kemampuan dalam pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung pada tahun 2023 hanya mampu 12 bangunan gedung negara.
- d.) Penataan bangunan gedung dan lingkungan sebagai upaya perwujudan pola dan struktur ruang belum dilakukan pada semua satuan ruang strategis.

Berdasarkan Perdas DIY Nomor Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten, perwujudan pola dan struktur ruang pada satuan ruang strategis salah satunya diwujudkan melalui penataan kawasan yang meliputi bangunan gedung dan lingkungannya. Dari 18 satuan ruang strategis yang ada fokus pelaksanaan penataan kawasan dengan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan berada pada kawasan sumbu filosofis. Penyediaan infrastruktur pedestrian yang telah dilakukan akan dilanjutkan dengan pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG) sebagai ikon baru di kawasan sumbu filosofi yang akan menjadi pusat kebudayaan. Pembangunan JPG sekaligus menjadi visi dan strategi yang dilakukan

dalam pengejawantahan masa lalu dan perencanaan pengembangan DIY di masa mendatang.

Pengembangan bangunan gedung dan lingkungan pada kawasan satuan ruang strategis akan dilakukan mengikuti dokumen perencanaan pada masing-masing SRS, baik berupa rencana induk atau RTBL.

4.) Sub. Urusan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

a.) Perwujudan layanan jasa konstruksi belum maksimal.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi kewenangan pemerintah daerah provinsi pada sub urusan jasa konstruksi meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi. Pembangunan infrastruktur saat ini membutuhkan banyak tenaga konstruksi yang ahli dan terampil. Tenaga konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian melalui uji kompetensi yang dilaksanakan lembaga/badan seperti lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional dan badan nasional sertifikasi profesi. Pada tahun 2023 terdapat permintaan tenaga ahli mencapai 12.008 orang, sedangkan yang tersedia sebanyak 4.467 orang dengan asumsi satu tenaga ahli menangani 3 sampai dengan 4 proyek. Capaian tenaga ahli konstruksi bersertifikat di tahun 2023 adalah 81,12% yaitu 1.933 orang dari target 2.383 orang, di mana dalam pemenuhan syarat sertifikasi, diperlukan pelatihan tenaga ahli. Berdasarkan data tersebut maka penyediaan tenaga konstruksi (tenaga ahli dan terampil) yang bersertifikasi masih belum mencukupi kebutuhan.

Pada tahun 2023 Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi capaiannya sebesar 95,01%, yang terdiri dari realisasi jumlah capaian tenaga ahli konstruksi terlatih sebesar 40,56% dan jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi sebesar 54,45%. Penyediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada sistem informasi pembina jasa konstruksi harus dilaksanakan dengan optimal dengan ketersediaan informasi yang selalu terkini.

Layanan jasa pengujian yang dilakukan oleh pemda DIY telah mendapatkan kepercayaan dari beberapa penyedia jasa konstruksi baik di DIY maupun di luar DIY. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan

pengujian di laboratorium konstruksi telah terakreditasi. Dalam rangka mempertahankan akreditasi laboratorium harus selalu dilakukan upaya untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI. Persyaratan sumber daya yang meliputi SDM berkualitas dan sarana prasarana pendukung untuk operasional pengujian jasa konstruksi harus dilakukan peningkatan untuk mempertahankan akreditasi laboratorium jasa konstruksi.

5.) Sub Urusan Penataan Ruang

a.) Dokumen Rencana Tata Ruang belum sesuai dengan PP No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Integrasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DIY dan Strategi Pengembangan Wilayah (SPW) pada 18 Satuan Ruang Startegis (SRS) DIY wajib dilakukan untuk menindaklanjuti terbitnya PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sampai tahun 2023, dari total 1 RTRW DIY dan 5 RTRW Kab/Kota, terdapat 3 (tiga) yang telah ditetapkan sesuai dengan PP No. 21 Tahun 2021 yaitu RTRW Kota Yogyakarta melalui Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2021, RTRW Kabupaten Sleman melalui Perda Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 2021 dan RTRW DIY dengan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023. Sedangkan RTRW Kabupaten Gunungkidul, RTRW Kabupaten Bantul dan RTRW Kabupaten Kulon Progo masih dalam tahap revisi penyesuaian dengan PP 21 Tahun 2021 dan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2023.

Untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kota Yogyakarta telah menyelesaikan untuk seluruh kecamatan, namun pada 4 kabupaten yang lain belum semua RDTR telah tersusun dan diterbitkan. Dari total 22 RDTR yang direncanakan di wilayah DIY, baru terdapat 6 (enam) RDTR yang ditetapkan yaitu RDTR Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta, RDTR Kawasan Sleman Barat, RDTR Kawasan Sleman Timur, RDTR Kawasan Sleman Tengah, RDTR Kota Yogyakarta dan RDTR Siung Wediombo. Dari RDTR yang telah ditetapkan baru tersedia 4 (empat) RDTR yang telah terintegrasi OSS yaitu RDTR Kawasan Sleman Timur, RDTR Kawasan Sleman Barat,

RDTR Bagian Wilayah Perencanaan Siung-Wediombo dan RDTR Kota Yogyakarta.

b.) Kesesuaian pemanfaatan ruang belum maksimal

Hasil penilaian pemanfaatan ruang di DIY pada tahun 2023 mencapai 84,87% dengan pemanfaatan ruang yang belum terwujud sebesar 11,21% (kawasan lindung 0% dan kawasan budidaya 11,21%) dan yang tidak sesuai sebesar 4,39% (kawasan lindung 2,47%) dan kawasan budidaya 4,43%).

Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung paling besar pada kawasan lindung geologi (54,15%) dan di kawasan budidaya paling besar pada kawasan Perkebunan Rakyat (14,56%).

Persentase pola ruang yang belum terwujud terbesar pada kawasan budidaya peruntukan Kawasan Industri (99,54%), Kawasan hutan produksi (75,57%), kawasan permukiman (38,59%) dan kawasan pariwisata (24,16%). Peruntukan Kawasan Industri masih belum terwujud karena jumlah investor yang masuk dan infrastruktur belum optimal.

c.) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan hasil Audit Tata Ruang Tahun 2021 terdapat 12 objek prioritas penanganan untuk ditindaklanjuti dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang pada tahun 2022. Dari 12 objek tersebut 5 objek ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah DIY, 4 objek ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat (Kementerian ATR/BPN) dan 3 objek ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten.

Pada tahun 2022 telah dilakukan kegiatan identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY. Berdasarkan kegiatan tersebut masih terdapat 182 indikasi pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang ditapis berdasarkan kriteria pola ruang yang terdiri dari Kabupaten Bantul sebanyak 25 indikasi, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 32 indikasi, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 58 indikasi, Kabupaten Sleman sebanyak 64 indikasi dan Kota Yogyakarta sebanyak 3 indikasi pelanggaran. Indikasi pelanggaran tersebut akan digunakan sebagai dasar objek melakukan audit tata ruang.

Sampai dengan tahun 2023 pemerintah Daerah DIY sudah melakukan tindak lanjut berupa penerapan sanksi administrasi dengan melakukan pemasangan papan peringatan. Pemerintah Daerah DIY juga

melakukan koordinasi terhadap upaya tindak lanjut penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten. Kendala yang ada dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang adalah belum adanya Peraturan Gubernur tentang Sanksi Administrasi sehingga yang dijadikan dasar dalam pengenaan sanksi administrasi masih menggunakan Peraturan Menteri serta belum tersedianya PPNS Penataan Ruang atau inspektur pembangunan. Pada tahun 2023 telah terbit Peraturan Gubernur DIY Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Penataan Ruang yang diharapkan dapat dijadikan dasar dalam pengenaan sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang ke depannya.

Upaya tindak lanjut ke depan adalah mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dengan dasar aturan yang telah diterbitkan serta mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar ASN Pemda DIY dapat diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan Inspektur Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang

d.) Dokumen Rencana Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis (SRS) Belum Lengkap

Dalam Perdas 2 Tahun 2017 terdapat 3 (tiga) dokumen rencana yang diamankan untuk disusun yakni Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), Rencana Induk (RI) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja RRTR tidak perlu disusun, namun dari hasil konsultasi dengan Pemerintah Pusat karena dasar Perdas tersebut tetap diperbolehkan dengan berganti menjadi Strategi Pengembangan Wilayah (SPW).

Sampai tahun 2022, terhadap RRTR SRS telah ditetapkan SK Gubernur No. 10/Kep/2022 tentang Delineasi SRS Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan telah tersusun 18 dokumen materi teknis RRTR SRS yang ditindaklanjuti dengan ditetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043. Untuk RI SRS, telah dilakukan penyusunan mulai tahun 2019 sampai 2022 sebanyak 7 RI dari total kebutuhan 18 RI. Mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 rencana penyusunan RI diklasterisasi menjadi 9 klaster antara lain tahun 2023 terdapat 4

klaster, tahun 2024 terdapat 2 klaster, tahun 2025 terdapat 2 klaster dan tahun 2026 terdapat 1 klaster. Sedangkan untuk RTBL SRS sampai dengan saat ini sudah tersusun sebanyak 16 RTBL yang tersebar pada 18 SRS.

e.) Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang pada SRS

Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang dilakukan pada 18 Satuan Ruang Strategis (SRS) di DIY. Persentase kesesuaian untuk keseluruhan 18 SRS pada tahun 2022 sebesar 82,71%, sedangkan hasil persentase ketidaksesuaiannya sebesar 3,24%. Tipologi wilayah tiap SRS yang berbeda menghasilkan perbedaan hasil analisis untuk setiap wilayahnya, sesuai keistimewaannya masing-masing. Nilai ketidaksesuaian masih tergolong kecil untuk wilayah SRS DIY secara keseluruhan. Upaya tindak lanjut yang dilakukan yaitu penyusunan arahan / insentif dan disinsentif dalam pelanggaran / pencegahan pelanggaran bangunan dan Sinkronisasi terkait dengan peraturan dalam RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten. Pada tahun 2023 telah dilakukan penilaian keterpaduan program pada 18 SRS di DIY dimana nilai keterpaduan program adalah sebesar 31,45% dimana dari 2.292 arahan program dalam rencana tata ruang SRS baru terdapat 764 program yang dilaksanakan.

2.3.2.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

1.) Penanganan rumah tidak layak huni di DIY belum dapat dituntaskan.

Penanganan rumah tidak layak huni di DIY dilakukan melalui program yang bersumber dari berbagai pendanaan baik dari anggaran DAK, BSPS, CSR, APBD Kab/Kota, APBD Provinsi, Kemensos, dana desa, BAZNAS, dan sumber-sumber pembiayaan lain. Penanganan RTLH pada tahun 2023 sejumlah 5.658 unit dari total target 56.991 unit. Hal ini menjadi salah satu faktor cukup tingginya capaian rumah layak huni di DIY. Berdasarkan data Susenas tahun 2023, jumlah rumah tangga yang mendiami rumah layak huni di DIY telah mencapai 85,79%. Namun, penanganan belum dapat dituntaskan pada lokasi-lokasi yang menjadi prioritas karena beberapa keterbatasan anggaran, SDM, maupun sinkronisasi antar pelaku. Penanganan rumah tidak layak huni oleh pemda DIY akan diprioritaskan pada kawasan yang ditetapkan sebagai

kawasan miskin ekstrem dan kawasan kumuh dengan luasan 10-15 ha atau kewenangan provinsi serta kapanewon miskin di DIY.

2.) Perubahan penetapan kawasan kumuh di wilayah DIY belum ditindaklanjuti untuk dilakukan penanganan.

Terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, sampai dengan tahun 2019 Pemda DIY telah melakukan penanganan kawasan kumuh 10 -15 ha secara tuntas. Pada tahun 2020 dan 2021 dilakukan penyesuaian penetapan kawasan kumuh di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerbitan SK Kawasan Kumuh dari Kabupaten/Kota tebraru, dimana dalam SK tersebut terdapat luasan kawasan yang menjadi Kewenangan DIY dalam penanganannya seluas 160,05 Ha.

3.) Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan warga miskin.

Harga perumahan yang relatif semakin tinggi, dan kemudahan untuk menjangkau kepemilikan rumah pun semakin sulit, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Begitu pula dengan syarat untuk mengakses kepemilikan perumahan pun semakin ketat, sehingga bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk memiliki perumahan dan permukiman yang layak dan aman semakin sulit. *Backlog* kepemilikan perumahan di DIY tahun 2023 adalah 166.356 unit, dengan rincian Kulon Progo 8.061 unit, Bantul 40.051 unit, Gunungkidul 8.061 unit, Sleman 47.621 unit dan kota Yogyakarta 68.233 unit. *Backlog* penghunian perumahan di DIY tahun 2023 adalah 91.821 unit.

Tingginya harga lahan juga menyebabkan terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap lahan untuk perumahan, sementara anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutamabagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat terbatas. Keterbatasan tersebut juga terkait dengan faktor alokasi pembangunan perumahan untuk pembangunan perumahan MBR yang belum optimal, penyusunan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin yang tidak *bankable*, pengaturan skema rumah sewa bagi masyarakat miskin yang benar-benar tidak bisa menyicil rumah tetapi perlu tempat tinggal dengan menyewa (rusunawa atau melalui skema pasar).

4.) Kawasan permukiman yang ditetapkan berdasarkan RTRW belum secara keseluruhan terlayani dengan prasarana sarana utilitas umum yang memadai.

Pada saat *ini* telah dilakukan penyediaan prasarana sarana utilitas (PSU) sebanyak 1.881 lokasi yang dilakukan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan kajian tahun 2021 kebutuhan PSU di Kabupaten Bantul dan Sleman saja adalah sebanyak 160 lokasi kawasan permukiman, di mana masing-masing lokasi memerlukan 3 sampai dengan 4 titik PSU. Sementara PSU yang telah dilakukan belum semua pada kawasan permukiman, sehingga masih banyak kawasan permukiman yang belum memiliki PSU yang memadai.

5.) Pelestarian budaya rumah tradisional Jawa belum maksimal.

Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui pembangunan baru rumah layak huni (PB RLH) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY, merupakan bagian dari bantuan stimulan untuk masyarakat miskin yang memiliki rumah rusak berat atau tinggal dalam rumah yang memiliki luasan bangunan yang tidak sesuai standar yaitu, 7,2 m² per jiwa, atau terdapat lebih dari 1 (satu) KK yang tinggal dalam 1 (satu) rumah. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang selama ini selalu mengutamakan pada struktur dan konstruksi ketahanan bangunan, menyebabkan rumah lebih banyak dibangun dengan gaya modern. Pada lokasi- lokasi RTLH yang berada di pedesaan, seringkali rumah-rumah tradisional berganti menjadi rumah modern dan hal ini menyebabkan semakin berkurangnya rumah-rumah dengan gaya arsitektur tradisional Jawa.

2.3.2.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1.) Angka Kriminalitas, khususnya kejahatan jalanan, cenderung meningkat.

Stabilitas dan kondusivitas wilayah merupakan salah satu prasyarat utama dalam kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Banyak aspek yang dapat menjadi tolok ukur dalam tercapainya stabilitas dan kondusivitas wilayah, salah satunya terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Namun faktanya kasus kejahatan, khususnya kejahatan jalanan yang dilakukan oleh

remaja cenderung mengalami peningkatan, sehingga sedikit banyak menyebabkan terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Berdasarkan data dari POLDA DIY angka kejahatan jalanan di DIY relatif fluktuatif. Namun, secara spesifik kasus kejahatan jalanan di DIY tahun 2023 meningkat secara signifikan hingga mencapai 70 kasus. Berdasarkan data tersebut secara umum kasus kejahatan jalanan di DIY relatif tinggi. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang perlu perhatian lebih lanjut dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat karena jika tidak dilakukan langkah pencegahan segera akan menjadi potensi konflik antar kelompok masyarakat yang dapat berujung pada perpecahan. Terlebih bahwa DIY menjadi pusat dari lembaga pendidikan serta pariwisata yang menjadi magnet kedatangan dari banyak masyarakat daerah lain bahkan manca negara. Untuk perlu dilakukan berbagai langkah dalam rangka cegah dini dan deteksi dini potensi konflik

2.) Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di DIY cenderung meningkat

DIY dikenal sebagai daerah dengan beragam predikat, antara lain sebagai Kota Budaya, Kota Wisata, Kota Pendidikan, Kota Perjuangan, dan Kota Pelajar. Beragam predikat tersebut tak pelak menjadikan DIY bak magnet bagi banyak pendatang, baik yang hendak menetap maupun tinggal sementara di DIY. Banyaknya entitas masyarakat yang ada di DIY membuat DIY menjadi wadah bagi berbagai kelompok kepentingan. Kultur toleran membuka ruang bagi berbagai kelompok untuk mengartikulasikan, tidak semata ekspresi dalam beragama, kesukuan, etnisitas, bahasa dan ragam budaya lainnya, namun juga beragam kepentingan yang melandasinya. Salah satu ancaman nyata yang mengancam sebagai dampak negatif dari pesatnya dinamika kehidupan di DIY adalah peredaran gelap narkoba.

Besarnya angka pengguna narkoba di kalangan generasi muda tentu berpotensi membahayakan keberlangsungan hidup bangsa di kemudian hari. Pemuda sebagai generasi yang diharapkan dapat menjadi penerus dan pemimpin bangsa semakin hari semakin rapuh digerogoti oleh dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif terlarang. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait penanganan narkoba serta seluruh elemen masyarakat yang ada sehingga fokus Pencegahan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dapat terlaksana secara optimal.

3.) Degradasi terhadap pemahaman nilai-nilai dari Empat Pilar Kebangsaan

Ancaman berupa infiltrasi ideologi lain yang ditawarkan secara menyesatkan seakan ideologi kesepakatan bangsa ini adalah salah dan perlu diganti. Berbagai paham dan ajaran yang berkembang di masyarakat perlu dilakukan kontril baik berupa deteksi dini maupun upaya pencegahannya yang dapat dilakukan dengan penanaman nilai-nilai ke-Pancasilaan yang di dalamnya juga terkandung ajaran kebangsaan dengan pendalaman Undang-undang Dasar NKRI tahun 1945 serta berbagai haluan negara yang harus menjadi pedoman hidup warga negara dalam berkehidupan bernegara, berkebangsaan serta bermasyarakat. Upaya pemelintiran paham bernegara biasanya menumpang pada isu-isu terkini yang menjadi bahasan dalam masyarakat, semisal isu kemiskinan, kenaikan harga ataupun kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Jika hal ini dibiarkan, maka akan berpotensi menimbulkan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4.) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dari Tahun ke Tahun yang belum Optimal

Stabilitas kondisi politik harus terjamin sebagai salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu secara umum. Kesuksesan pemilihan umum diukur dari beberapa hal, diantaranya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, inklusif dan kondusif serta angka partisipasi masyarakat yang optimal. Namun demikian, beragam tantangan masih melingkupi dalam beragam lini, antara lain adalah masih adanya peluang terjadinya partisipasi yang kurang optimal, potensi munculnya konflik sosial dan polarisasi politik, politik uang, netralitas ASN, *black campaign* dan praktik menyimpang lainnya. Berikut matriks partisipasi pemilu di DIY;

Berdasarkan data KPU atas partisipasi masyarakat dalam Pemilu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 (baik Pilpres, Pileg, dan Pilkada), dapat dilihat bahwa angka partisipasi pemilih di DIY relatif fluktuatif. Dalam rangka memberikan upaya penguatan kapasitas bagi para pemilih, kegiatan pendidikan politik diselenggarakan untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan partisipasi guna terpilihnya wakil rakyat yang

kompeten dan memiliki kapabilitas yang baik. Penguatan koordinasi dengan beragam pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga mitra juga dilakukan dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah baik sebelum, saat maupun setelah pesta demokrasi diselenggarakan.

5.) Makin maraknya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Hingga tahun 2023, atas penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di DIY ditemukan masih terdapat pelanggaran yang diantaranya meliputi jenis pelanggaran terkait anak jalanan, gelandangan dan pengemis, minuman beralkohol, papan reklame, tambang, irigasi, sampah, air tanah, bangunan liar, KIR dan muatan, dan beberapa pelanggaran lainnya. Hal ini menuntut semakin giatnya usaha yang dilakukan untuk meminimalisirnya. Mulai dari yang sifatnya preventif, seperti internalisasi substansi dari Perda/Perkada tersebut, operasi penegakan maupun sampai dengan penanganan pasca pelanggaran.

6.) Pemberdayaan Kelompok Jaga Warga dalam mendukung penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Kelompok Jaga warga diharapkan dapat ikut berperan serta dalam menjaga ketertiban di masyarakat melalui penghidupan kembali fungsi pranata sosial sehingga dapat menyelesaikan masalah di tingkat dasar secara kekeluargaan. Pranata sosial yang hidup di masyarakat mengandung nilai luhur kearifan budaya di DIY dan sistem sosial yang hidup di dalamnya, merupakan basis ketahanan masyarakat dalam menguatkan pembangunan daerah yang berbasis keistimewaan dan menguatkan rasa persatuan dan kesatuan, mewujudkan keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Jaga Warga diberdayakan dalam bentuk kelompok dimaksudkan sebagai upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat.

7.) Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Satlinmas Rescue Istimewa (SRI)

SRI mempunyai tugas dan fungsi melindungi masyarakat dari berbagai bencana atau musibah, melakukan pencarian, pertolongan dan

penyelamatan korban serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya perlu sarana prasarana operasional di wilayah kerjanya sesuai dengan jenis tugas dan medan yang dikerjakan. Selain sarana prasarana, kapasitas dari SRI sendiri perlu ditingkatkan khususnya pengetahuan dan ketrampilan dalam bertugas. Disamping pada keterlaksanaan tugas, koordinasi dan publikasi dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan eksternal perlu diperjelas, mengingat ketugasan SRI seringkali berjalan bersama banyak stakeholder yang berkaitan.

8.) Meningkatnya intensitas bencana kategori hidrometeorologi dan belum optimalnya potensi pengurangan risiko bencana berbasis komunitas

Jenis bencana yang masuk kategori bencana hidrometeorologi antara lain adalah siklon tropis, curah hujan ekstrim, banjir, longsor, angin kencang, gelombang tinggi, kekeringan, serta kebakaran permukiman, hutan dan lahan. Hampir semua wilayah DIY memiliki ancaman bencana jenis hidrometeorologi ini. Upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas telah diinisiasi sejak awal, bahkan telah menjadi percontohan di tingkat nasional maupun internasional. Namun demikian, seiring meningkatnya ancaman bencana, khususnya jenis bencana hidrometeorologi akibat krisis iklim, dibutuhkan upaya mitigasi dan adaptasi berupa literasi, peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan, aksi cepat dan tepat, perlindungan sosial adaptif, maupun pemanfaatan teknologi serta pengetahuan lokal untuk peringatan dini dan pengurangan risiko bencana dengan pelibatan parapihak multiheliks secara partisipatif, inklusif, dan kolaboratif.

2.3.2.1.6 Urusan Sosial

1.) Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan di DIY.

Tingkat kemiskinan di DIY pada Maret 2023 sebesar (11,04%) angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional (9,36%). Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, DIY menempati urutan ke 14 dan tertinggi di Pulau Jawa. Tingginya tingkat kemiskinan itu juga diikuti dengan tingginya Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Pada Maret 2023 Gini Rasio DIY sebesar 0,449 menurun sebesar 0,010 dibandingkan Maret 2022.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret tahun 2023 mencapai 25,90 juta Jiwa atau 9,36% dari total penduduk Indonesia. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36% menurun 0,21% poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18% poin terhadap Maret 2022. Garis kemiskinan DIY (BPS, Maret 2023) sebesar Rp 573.022 per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 414.480 (72,33%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp158.542 (27,67%). Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,32 orang anggota rumah tangga. Apabila ditinjau secara rumah tangga, maka Garis Kemiskinan rumah tangga mencapai Rp2.475.455,00/rumah tangga/bulan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 448,47 ribu orang dan turun 15,2 ribu orang terhadap September 2022. Apabila dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 turun 6,3 ribu orang.

Berbagai program pada bantuan sosial diharapkan mampu menyisir masyarakat terdampak sehingga pemulihan ekonomi segera diwujudkan. Pergub dan sistem informasi Manunggal Raharja menjadi sarana keterlibatan Pemda DIY dalam peningkatan kualitas verifikasi validasi Data Terpadu Kemiskinan. Integrasi data sasaran penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu upaya DIY dalam meningkatkan kualitas agar seluruh masyarakat miskin di DIY terlayani dan terjangkau program peningkatan kesejahteraan. Selain itu juga didukung dengan program lintas sektor yang diupayakan terintegrasi satu sama lain. DIY juga memiliki program-program inovasi dengan memanfaatkan integrasi data seperti data P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dari Kemenko PMK , DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kementerian Sosial, Satu Data REGSOSEK (Registrasi Sosial Ekonomi) dari Bappenas dan data sektoral lainnya.

2.) Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih harus menjadi perhatian.

Terdapat 8 (delapan) jenis Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilihat berdasarkan jumlah terbesar yaitu : Penyandang disabilitas, Lanjut usia terlantar, Korban Bencana Alam, Perempuan rawan sosial ekonomi, Orang dengan HIV/AIDS, Anak terlantar, Keluarga bermasalah sosial psikologis, dan Anak dengan kedisabilitas. Dari

Delapan jenis PPKS tersebut beberapa diantaranya masuk dalam katagori kelompok rentan.

Tabel 2-173 Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) DIY Tahun 2019 - 2023.

No	Jenis PMKS	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Anak Berhadapan Dengan Hukum	55	N/A	72	122	175
2	Anak Balita Terlantar	620	N/A	441	431	255
3	Anak Dengan Kedisabilitasan	2.075	N/A	1.971	2012	2553
4	Anak Jalanan	72	N/A	47	132	66
5	Anak Korban Tindak Kekerasan	13	N/A	10	165	77
6	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	10	N/A	29	25	98
7	Anak Terlantar	9.607	N/A	7.902	5200	5128
8	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan	225	N/A	170	157	258
9	Fakir Miskin	322.459	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Gelandangan	197	N/A	123	72	58
11	Korban Bencana Alam	8	N/A	7.687	21.908	16.178
12	Korban Bencana Sosial	117	N/A	80	59	77
13	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	4.979	N/A	4.515	4.165	3.815
14	Kelompok Minoritas	1021	N/A	124	138	130
15	Korban Penyalahgunaan Napza	439	N/A	323	242	224
16	Korban Trafficking	1	N/A	1	6	8
17	Korban Tindak Kekerasan	697	N/A	560	470	332
18	Lanjut Usia Terlantar	37.442	N/A	33.129	26.525	25.780
19	Orang dengan HIV/AIDS	4.193	N/A	5.127	5.617	6.393
20	Penyandang Disabilitas	27.129	N/A	26.866	28.137	26.512
21	Pemulung	465	N/A	412	327	300
22	Pengemis	147	N/A	111	64	61
23	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	327	N/A	278	208	177

No	Jenis PMKS	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12.365	N/A	12.407	11.526	11.819
25	Tuna Susila	259	N/A	361	90	100

Sumber: Dinsos DIY, 2024

Tingginya kasus Lanjut Usia Terlantar jumlahnya pada tahun 2023 sebesar 25.780 orang akan memiliki dampak sosial yang lebih luas, bertambahnya jumlah pengemis, kemiskinan absolut dan Lansia di jalanan. Kasus lanjut usia terlantar memang menjadi perhatian serius dalam masyarakat kita. Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang lanjut usia yang tidak mendapatkan perawatan atau dukungan yang memadai dari keluarga atau lingkungan sekitarnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kasus lanjut usia terlantar yaitu dari Perubahan Struktur Keluarga dikarenakan banyak keluarga modern yang mengalami perubahan struktur, seperti orang tua yang tinggal terpisah dengan anak-anak mereka karena faktor pekerjaan atau migrasi. Kondisi Kesehatan pada orang tua yang mengalami masalah kesehatan serius, seperti demensia atau gangguan lainnya, mungkin sulit untuk diurus di rumah sendiri oleh keluarga mereka. Keterbatasan Sosial dan Ekonomi pada Orang tua yang tidak memiliki jaringan sosial yang kuat atau yang menghadapi masalah ekonomi sering kali berisiko tinggi terlantar.

Kurangnya Kesadaran dan Sumber Daya pada Beberapa keluarga mungkin tidak disadari akan pentingnya perawatan yang diperlukan untuk orang tua mereka, atau mereka mungkin tidak memiliki sumber daya baik finansial maupun waktu untuk merawat mereka dengan baik. Perubahan nilai-nilai dalam masyarakat modern dapat mempengaruhi cara kita merawat orang tua. Beberapa masyarakat tradisional memiliki sistem perawatan yang lebih terstruktur untuk orang tua mereka.

Sementara itu sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi Lanjut Usia Terlantar yang membutuhkan perlindungan khusus belum memadai.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang holistik dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial. Langkah-langkah seperti meningkatkan kesadaran akan isu ini, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan sosial, serta memperkuat jaringan dukungan sosial bagi keluarga yang merawat orang tua mereka dapat membantu mengurangi tingkat lanjut usia terlantar. Saat ini Pemerintah Daerah DIY sudah memiliki program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi Lanjut Usia Terlantar yang masuk kedalam DTKS sebanyak 8.000 Penerima Manfaat (PM).

PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) merujuk pada segala potensi dan sumber daya yang tersedia dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial individu dan kelompok. PSKS mencakup berbagai aspek, termasuk program-program kesejahteraan sosial, layanan pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, dan berbagai bentuk dukungan sosial dan ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan mutu hidup masyarakat. Berikut Data Perkembangan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial DIY tahun 2019-2023.

Tabel 2-174 Perkembangan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial DIY Tahun 2019 - 2023

No	Jenis PSKS	Tahun					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pekerja Sosial Profesional	3	N/A	3	3	8	Orang
	Pekerja Sosial Fungsional	36	N/A	36	41	45	Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat	5130	N/A	5057	3073	3122	Orang
3	Taruna Siaga Bencana	1068	N/A	1091	662	581	Orang
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	381	N/A	316	283	316	Lembaga
5	Karang Taruna	438	N/A	438	438	438	Lembaga
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	12	N/A	12	12	7	Lembaga
7	Keluarga Pioner	30	N/A	30	N/A	N/A	Keluarga
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	263	N/A	229	304	310	Lembaga

No	Jenis PSKS	Tahun					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
9	Penyuluh Sosial Masyarakat	43	N/A	120	120	120	Orang
10	Penyuluh Sosial Fungsional	7	N/A	6	10	7	Orang
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	78	N/A	78	78	78	Orang
12	Dunia Usaha	57	N/A	238	237	238	Lembaga

Sumber: Dinsos DIY, 2024

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) merupakan relawan sosial sebagai salah satu sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pada tabel di atas Perkembangan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial DIY Tahun 2019 - 2023 menunjukkan data yang fluktuatif dari tahun 2019-2023.

Tahun 2022 PSM di DIY berjumlah 3.073 orang yang terdiri dari 1.656 orang berjenis kelamin Laki-laki dan 1.417 orang berjenis kelamin Perempuan, hal ini menunjukkan kesetaraan gender sudah dilakukan pada PSM di DIY yang tersebar di masyarakat. Pada tahun 2023 jumlah PSM di DIY meningkat dan berjumlah 3.122 orang. PSM bekerja secara langsung menangani permasalahan sosial yang ada di tingkat desa dan masyarakat.

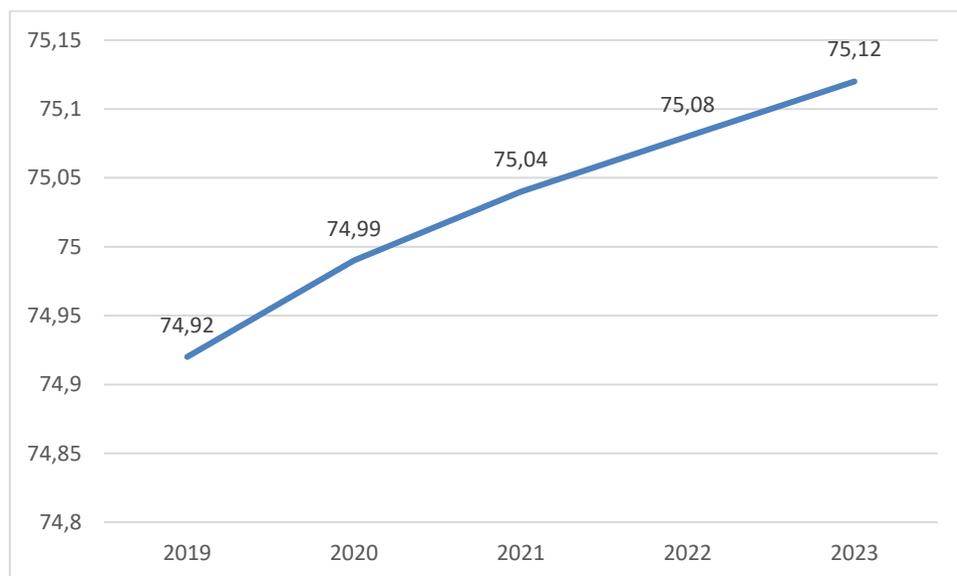
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pada tabel di atas Perkembangan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial DIY Tahun 2019 - 2023 menunjukkan penurunan data dari tahun 2019 berjumlah 381 lembaga, tahun 2021 berjumlah 316 lembaga hingga di tahun 2022 menjadi 283 lembaga. Hal tersebut perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar lembaga sosial tersebut dapat bergerak dalam penanganan berbagai masalah sosial baik menangani permasalahan anak terlantar, gelandangan, pengemis, lansia dan permasalahan sosial lainnya.

Penyuluh sosial masyarakat adalah relawan sosial yang bekerja atas inisiatif sendiri atau karena ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan

kesejahteraan sosial. Pelaksanaan kegiatannya selalu berkoordinasi dengan pemerintah kalurahan/kelurahan. Pada pelaksanaan dilapangan, Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas) dari tahun 2021 hingga tahun 2023 menunjukkan data jumlah Pensosmas di DIY terbilang stabil, Pensosmas berkedudukan di kalurahan/kelurahan. Data tahun 2021 hingga tahun 2023 berjumlah 120 orang, dimana keadaan tersebut masih mengalami kekurangan yang seharusnya berjumlah 438 orang, idealnya satu kalurahan/kelurahan memiliki satu Pensosmas.

3.) **Perlu diperhatikan Penanganan Lanjut Usia dan Rasio Ketergantungan Lansia Mengingat Tingginya Usia Harapan Hidup di DIY.**

Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk DIY pada tahun 2023 adalah 75,12 tahun merupakan angka tertinggi di Indonesia. Perkembangan UHH di DIY dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan yang disajikan pada grafik berikut.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar 2-91 Perkembangan Usia Harapan Hidup DIY Tahun 2019-2023

IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian. Capaian IPM dari tahun 2019 hingga 2023 cenderung semakin meningkat. Walaupun tahun 2020 sedikit menurun karena adanya pandemi Covid-19 tetapi kemudian meningkat kembali di tahun berikutnya hingga mencapai angka 81,09 pada tahun 2023. Perkembangan ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik. Level IPM selama periode 2017-2023 selalu berada dalam kategori IPM tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Dibandingkan dengan level IPM nasional, capaian IPM DIY tercatat selalu lebih tinggi dan selalu menempati peringkat kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian posisi kualitas pembangunan manusia di DIY sampai tahun 2023 masih relatif lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata pencapaian pembangunan manusia secara nasional. Perbedaan level ini terjadi karena titik awal proses pembangunan di DIY khususnya dan Pulau Jawa pada umumnya terjadi lebih awal dibandingkan dengan wilayah lain di luar Pulau Jawa, terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

UHH yang tinggi membawa konsekuensi kepada pemenuhan layanan lansia terutama layanan dasar seperti kesehatan, jaminan sosial, dan kebutuhan lansia untuk mengaktualisasikan dirinya. Berdasarkan Strategi Nasional Kelanjutusiaan, strategi yang perlu dilakukan yaitu :

- Peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu,
- Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup lanjut usia,
- Pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lanjut usia
- Penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan,
- Penhormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak Lanjut Usia.

UHH yang tinggi juga diikuti dengan cukup banyaknya jumlah lanjut usia terlantar dimana tahun 2023 mencapai 25.780 orang (Dataku Bappeda DIY, 2024). Sebagian besar lanjut usia terlantar ini belum memiliki jaminan atau asuransi Kesehatan. Namun, jumlah dan kapasitas panti

atau balai rehabilitasi sosial untuk melayani lanjut usia terlantar belum mencukupi. Di samping itu dengan tingginya Prevalensi Penyakit Tidak Menular di DIY, resiko lansia menjadi pengidap Penyakit Tidak Menular seperti kardiovaskuler, kanker dan lain-lain menjadi meningkat (meningkatkan Rasio Ketergantungan pada Lansia).

Dari permasalahan tersebut terdapat solusi yang dapat dilakukan yaitu melalui jaminan sosial kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksudkan adalah lanjut usia, perempuan pada rumah tangga miskin dan kaum *difabel*. Pemda DIY telah menerbitkan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai payung kebijakan dalam memberikan intervensi kepada lansia di DIY baik yang potensial maupun non potensial. Dalam Peraturan Daerah tersebut disampaikan bahwa upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan bagi lanjut usia meliputi :

- Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- Pelayanan kesehatan;
- Pelayanan kesempatan kerja;
- Pelayanan keterampilan/pelatihan;
- Pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum;
- Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- Bantuan sosial dan;
- Perlindungan sosial

Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia, sistem, prosedur, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga perlu dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- a.) Memberikan fasilitas kepada PSKS untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
- b.) Meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperkuat budaya semangat dan jiwa K2KS secara sinergis, terarah, terencana dan berkelanjutan.

4.) Peningkatan Perhatian Terhadap *Difabel* Kurang Terpenuhi

Penyandang disabilitas PPKS di DIY pada tahun 2021 adalah 26.866 orang, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 28.137 orang, jumlah tersebut cukup besar, dan dari survei yang dilakukan oleh SMERU pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penyandang disabilitas

mengalami dampak lebih berat karena tidak dapat melakukan akses kesehatan untuk melakukan terapi ataupun berobat, juga mengalami kehilangan sumber pendapatan sebagai dampak pandemi. Sehingga kedepannya, pembangunan Inklusif yang mencakup kepentingan kelompok rentan harus dikedepankan. Dari permasalahan berikut maka perlu dilakukan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah mengenai *Difabel* dan Lanjut Usia. Hal ini dikarenakan banyaknya sektor yang harus mewujudkan DIY yang inklusif, dari sektor sosial, kesehatan, fisik sarana prasarana, regulasi dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan pendidikan, dan lain-lain.

5.) Wilayah DIY Rentan Terhadap Bencana Alam.

Wilayah DIY terletak di wilayah sungai dan gunung berapi. Oleh karena itu DIY menjadi rentan terhadap bencana alam, baik itu bencana letusan Gunung Merapi, Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, angin ribut maupun bencana kekeringan. Menurut data PPKS yang sebelumnya disebut PMKS, Korban Bencana Alam pada tahun 2022 tercatat 21.908 jiwa, dan korban bencana sosial sebanyak 59 jiwa. Kerugian material yang ditimbulkan juga berpengaruh pada kesejahteraan sosial masyarakat baik fisik maupun psikologis.

Dikarekanakan wilayah fisik DIY merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Sehingga, memerlukan strategi khusus untuk meminimalisir kerugian berupa harta,benda, bahkan nyawa. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat (KBBM) atau *Community Based Disaster Preparedness* (CBDP) adalah program pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk mengambil tindakan inisiatif dalam mengurangi dampak bencana yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya, di DIY program tersebut sudah terlaksana dengan baik, namun perlu terus ditingkatkan berkaitan dengan manajemen kebencanaan. Hal ini akan mendukung pelaksanaan dukungan Pemerintah Daerah DIY terhadap kebencanaan yang juga merupakan bagian dari SPM Sosial dan selama ini telah didukung dengan menggerakkan Tagana untuk turut menangani kegiatan lapangan saat terjadi bencana.

2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.2.1 Urusan Ketenagakerjaan

1.) Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka pada Jenjang SMU, SMK, dan Diploma I/II/III

Meskipun TPT DIY pada Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 0,34% poin dari semula 3,58% menjadi 3,24% dibandingkan periode Februari 2023. Namun apabila di-*breakdown* berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, terjadi peningkatan TPT pada jenjang tamatan SMA, diikuti oleh peningkatan TPT pada jenjang SMK, dan Diploma I/II/III. Berdasarkan data Sakernas, apabila dibandingkan dengan periode Februari 2023, TPT yang mengalami peningkatan terbesar adalah tamatan SMA yang naik sebesar 1,59% poin dari semula 4,54% menjadi 6,13%, diikuti oleh TPT pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III naik sebesar 0,83% poin dari semula 3,04% menjadi 3,87%, dan SMK naik 0,28% poin semula 3,93% menjadi 4,21%. Kondisi tersebut disebabkan oleh semakin ketatnya persaingan dalam pasar kerja sehingga pencari kerja dituntut untuk memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai, serta mampu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi. Selain itu, hal yang masih menjadi tantangan bersama adalah belum terciptanya *link and match* antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas (lebih selektif) terutama pada tingkat pendidikan SMA, SMK, maupun Diploma I/II/III. Kondisi ini perlu dijawab untuk menghubungkan dunia industri/usaha dengan dunia pendidikan. *Link and match* berbasis *market driven* dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan perlu segera dilakukan.

2.) Masih rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat produktivitas adalah jam kerja. Semakin tinggi jam kerja, maka pendapatan atau upah/ gaji seseorang cenderung semakin tinggi. Berdasarkan data Sakernas Februari 2024, pekerja penuh di DIY (jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar 64,25%. Sementara itu, pekerja tidak penuh di DIY pada mencapai 35,75% yang terdiri dari pekerja paruh waktu sebesar 30,74% dan pekerja setengah penganggur sebesar 5,01%. Persentase pekerja

penuh ini relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yakni periode Februari 2023 sebesar 67,68% dan bahkan sebelum pandemi Covid-19. Pada tahun 2017, pekerja penuh di DIY mencapai 74,01%, tahun 2018 mencapai 71,46% dan 2019 mencapai 69,37%. Selain itu, terlihat juga kecenderungan penurunan persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja penuh.

Indikasi kualitas dan produktivitas tenaga kerja dapat dilihat juga dari tingkat pendidikan. Penyerapan tenaga kerja di DIY pada Februari 2024 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebesar 26,86% diikuti oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 24,08%. Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi (Diploma ke atas) sebesar 16,41% yang mencakup (13,64%) berpendidikan Universitas dan (2,77%) berpendidikan Diploma.

3.) Masih rendahnya daya saing tenaga kerja

Daya saing tenaga kerja masih menjadi permasalahan ketenagakerjaan secara nasional. Berdasarkan world talent ranking (IMD), misalnya, peringkat Indonesia masih berada di nomor 47 untuk tahun 2023 dengan skor daya saing SDM 51,13 dari 100 poin. IMD menilai daya saing SDM melalui tiga indikator besar, yaitu investasi dan pengembangan SDM dalam negeri (*investment and development*), kemampuan negara menarik SDM terampil dari luar negeri (*appeal*), dan tingkat kesiapan SDM secara umum (*readiness*). Berdasarkan capaian tersebut, Indonesia hanya berada pada peringkat ke-4 dari 5 negara Asia Tenggara, masih tertinggal apabila dibandingkan dengan Negara Singapura (8), Malaysia (33), dan Thailand (45).

2.3.2.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Perkawinan anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan usia minimal untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Penyetaraan usia minimal menikah antara laki-laki dan perempuan mengandung visi supaya dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur. Sebab, jika dipandang dari berbagai aspek: fisik, psikis, dan finansial, anak-anak masih sangat rentan dan penuh dengan risiko.

2-502

Namun pada faktanya, praktik perkawinan anak masih terjadi di DI Yogyakarta. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa telah terjadi 1.536 perkawinan anak di DI Yogyakarta pada tahun tersebut. 1.093 anak diantaranya adalah perempuan, dan 443 anak lainnya merupakan laki-laki. Berdasarkan data mengenai alasan permohonan dispensasi nikah, 74,37% alasan permohonan adalah karena telah terjadi kehamilan pada anak. Kondisi bahwa kehamilan tidak diinginkan ini menjadi alasan mayoritas perkawinan anak erat kaitannya dengan pergaulan negatif di kalangan remaja dan kecepatan akses informasi global tidak diiringi dengan kebijaksanaan anak untuk memilah informasi.

Lebih lanjut, diketahui juga bahwa Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan jumlah dispensasi kawin terbanyak di DIY, yaitu sebanyak 160 permohonan dengan alasan kehamilan, menghindari zina, dan pergaulan bebas. Disusul dengan Kabupaten Gunungkidul dengan 149 dispensasi kawin, Bantul dengan 111 dispensasi kawin, Kulon Progo dengan 59 dispensasi kawin, dan Kota Yogyakarta dengan 40 dispensasi kawin.

Tabel 2-175 Data Jumlah dan Alasan Dispensasi Kawin Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2023

List Data Alasan Dispensasi Kawin 2023										
No	Satuan Kerja		Total Perkara DK	Total Alasan DK	Selisih Alasan DK	Alasan Dispensasi				
	Tkt. Banding	Tkt. Pertama				Hamil	Pergaulan Bebas/ Hubungan Intim	Ekonomi	Budaya/Adat/ Perjudohan	Menghindari Zina/Hubungan Cinta
1	PTA Yogyakarta	PA YOGYAKARTA	40	40	0	38	0	0	1	1
2	PTA Yogyakarta	PA SLEMAN	160	160	0	124	4	0	0	32
3	PTA Yogyakarta	PA BANTUL	111	111	0	90	5	0	0	16
4	PTA Yogyakarta	PA WONOSARI	149	149	0	92	19	0	0	38
5	PTA Yogyakarta	PA WATES	59	59	0	42	3	0	0	14
TOTAL			519	519	0	386	31	0	1	101

Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, 2024

Kecenderungan fluktuatifnya kasus perkawinan anak di DIY disebabkan beragam faktor. Diantaranya yaitu kesadaran untuk memastikan kesiapan anak di keluarga masih rendah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penting bagi Pemda DIY untuk segera menggalakan berbagai upaya sosialisasi dan bimbingan kepada remaja mengenai pendewasaan usia nikah. Sosialisasi dan bimbingan ini diperlukan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada remaja mengenai kondisi kesehatan reproduksinya dan berbagai dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh praktik perkawinan anak.

2. Tingginya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Tren selama 10 tahun menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih fluktuatif dan jumlahnya berada di atas angka 1.000 korban per tahun. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni 1.615 kasus dan terus melandai, hingga tahun 2022 tercatat sebesar 1.282 korban telah ditangani oleh Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY.

Meskipun angka terus melandai, namun hingga tahun 2022 DIY belum berhasil memenuhi target penekanan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 0,46 sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2017-2022. Pada tahun tersebut, dengan segala upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatifnya DIY baru mampu menekan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak pada angka 0,49. Namun, walaupun angka kekerasan terhadap perempuan dan anak jumlahnya naik turun dan prevalensinya belum memenuhi target yang di harapkan, namun secara nasional Indeks Perlindungan Khusus Anak Tahun 2020 yang diterbitkan oleh BPS, menunjukan DIY pada rangking 12 nasional dengan indeks 74,14, dengan kata lain, kondisi perlindungan khusus anak di DIY lebih baik dari 25 provinsi lainnya di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka diperlukan beberapa strategi yaitu dengan memaksimalkan upaya pencegahan untuk mengurangi jumlah kasus, penanganan terpadu bagi korban kekerasan dan pemberdayaan pasca kasus. Hal tersebut dilakukan dengan Pembinaan kelembagaan melalui pembentukan UPT Balai Pelindungan Perempuan dan Anak yang akan efektif pada tahun 2023, Menerbitkan Rencana Aksi Daerah Pelindungan Anak 2023-2027 sebagai review dan menjamin ketindaklanjutan program dan kegiatan yang terbaik dalam pelindungan anak.

Selain itu, DIY telah memiliki layanan P2TP2A Rekso Dyah Utami untuk korban kekerasan yang akan dikombinasikan dengan UPT P2TP2A, serta Kerja sama lintas sektor dan *pentahelix* yang sudah berjalan dalam perlindungan korban kekerasan. Sehingga, diharapkan akan mampu mengatasi beberapa poin masalah tentang kekerasan pada perempuan dan anak.

3. Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Ranah Politik dan Pengambilan Keputusan

Upaya mendorong partisipasi perempuan di ranah politik dan pengambilan keputusan secara nasional salah satunya dilakukan dengan menerapkan kebijakan afirmasi melalui mekanisme kuota 30% dalam pengajuan bakal calon

dan calon legislatif, anggota KPU, serta pendirian dan kepengurusan partai politik. Upaya ini penting karena partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan memiliki korelasi erat dengan upaya mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan. Dalam faktanya di DI Yogyakarta, elemen keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2022 masih pada angka yang sama dengan tahun 2021 yaitu 20%. Angka ini menunjukkan bahwa DIY belum dapat memenuhi regulasi afirmasi kuota 30% perempuan di parlemen. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya mencapai target tersebut, antara lain: keraguan masyarakat kepada calon legislatif (caleg) perempuan dan adanya sindrom *queen bee* yaitu persaingan tidak sehat antara caleg perempuan, serta masih adanya maskulinitas dalam internal partai politik.

Partisipasi aktif perempuan di lembaga-lembaga trias politica memungkinkan hadirnya kebijakan-kebijakan yang responsif gender dan kelompok marginal lainnya. Kebijakan afirmasi kuota 30% mulai tercapai di DI Yogyakarta pada tahun 2021. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY, persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di DIY hingga tahun 2021 mencapai 30,16%, menurun menjadi 30% pada tahun 2022, dan berdasarkan perhitungan sementara pada Juli 2023 kembali menguat pada angka 32,39%.

2.3.2.2.3 Urusan Pangan

1.) **Kurangnya penerapan konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)**

Kualitas konsumsi pangan dapat tercermin dari indikator Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH DIY pada tahun 2023 sudah mencapai 96,3, merupakan yang tertinggi di level nasional. Namun hal yang perlu menjadi perhatian bahwa skor beberapa kelompok pangan belum mencapai ideal, yaitu umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan. Selain itu, dari aspek keamanan pangan, masih ditemui pangan beredar yang belum memenuhi kaidah keamanan pangan. Data dari BPOM Yogyakarta menyebutkan bahwa pengujian terhadap sampel pangan tertarget menunjukkan sebesar 19,12% pangan tidak memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2023. Sebagian besar sampel Tidak Memenuhi Syarat tersebut (49%) merupakan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dengan parameter uji mikrobiologi. Selain itu, data dari Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan (2023) menyatakan bahwa meskipun hasil pengujian menunjukkan bahwa 100% Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) yang menjadi sampel aman untuk dikonsumsi, namun masih ada produk PSAT yang belum mempunyai izin edar.

2.) **Kurangnya pengelolaan pangan tercecer (*food loss*) dan kelebihan pangan (*food waste*)**

Isu *food loss* di tahap produksi dan sepanjang rantai pasok, termasuk kehilangan hasil di tahapan pascapanen menjadi bagian dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Data dalam Neraca Bahan Makanan Tahun 2022 Tetap (DPKP DIY, 2023) menunjukkan beberapa contoh pangan strategis yang mengalami *food loss* cukup besar antara lain: gabah, jagung, bawang merah, telur ayam buras, dan daging sapi masing-masing sebesar 4,92%, 7,16%, 3,24%, 3,86%, dan 5% dibandingkan total pemakaian pada tahun 2022. Data ini belum termasuk pangan yang berkurang pada saat proses distribusi maupun konsumsi yang sering disebut *food waste*. Kehilangan hasil pada tahap produksi pada umumnya terjadi pada saat panen akibat penggunaan mesin pemanen di tingkat petani masih rendah sehingga banyak hasil yang tercecer. Sementara itu, kehilangan hasil pada tahap pasca panen dan pengolahan terjadi karena masih terbatasnya infrastruktur yang ada seperti alat pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan hasil-hasil pertanian.

Sementara itu, *food waste* terjadi pada tingkat ritel dan konsumen akibat perencanaan pembelian dan penyediaan makanan yang kurang bijak dan perilaku menyisakan makanan. Berdasarkan data dari DPKP DIY (2022), kejadian kelebihan pangan didominasi oleh konsumsi Rumah Tangga. Selain itu, nasi merupakan kontributor utama *food waste* di DIY.

3.) **Masih terdapat wilayah atau populasi penduduk DIY dalam kondisi rentan pangan**

Berdasarkan data Food Safety and Vulnerability Atlas (DPKP DIY, 2023), dapat diketahui bahwa terdapat 3 kecamatan (kemantren) yang berada dalam kondisi rentan. Penyebab status desa waspada pangan maupun kecamatan rentan pangan sebagian besar terkait dengan aspek kemiskinan, kesehatan, dan sanitasi lingkungan.

Sementara itu, data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) DIY menunjukkan kecenderungan meningkat dalam periode 2019-2023. Prevalensi

ketidacukupan konsumsi pangan menunjukkan kondisi di mana konsumsi makanan harian suatu individu tidak mencukupi kebutuhan energi ideal. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan DIY sejak tahun 2020 selalu berada di atas rata-rata nasional, sehingga masih perlu upaya perbaikan.

Berdasarkan wilayah, Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah dengan PoU terbesar, yaitu 14,67% pada tahun 2023. Sedangkan Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan PoU terkecil, yaitu 6,64%. Namun bila dikonversi menjadi jumlah penduduk, Kota Yogyakarta mempunyai jumlah penduduk *undernourished* terbanyak, yaitu sebesar 39.712 jiwa.

4.) Kurang Stabilitasnya Pasokan dan Harga Bahan Pangan

Berdasarkan data dari BPS Provinsi DIY, inflasi pangan DIY pada tahun 2023 mencapai 7,58%. Hal ini disebabkan ketersediaan pangan yang terganggu dan terjadinya fluktuasi harga pangan. Beberapa komoditas pangan yang perlu mendapat perhatian karena andilnya terhadap inflasi yang besar antara lain: beras, cabai merah, dan bawang putih.

2.3.2.2.4 Urusan Pertanahan

1.) Kegiatan Strategis Nasional dan Daerah Memerlukan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Tepat Waktu

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di DIY sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terdiri dari Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Penambahan Lingkup Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, Bandar Udara Baru Yogyakarta-Kulon Progo, Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta-Kulon Progo, Double Track Jawa Selatan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro (Bantul Kulon Progo).

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No. 353/KEP/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY No.163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan, program prioritas pembangunan DIY tahun terkait dengan pembangunan infrastruktur prioritas yaitu pembangunan Jalan Temon-Borobudur, pembangunan Jalan Prambanan-Gading, pembangunan dan pengembangan TPA Regional

Piyungan, Pembangunan SPAM Regional Kamijoro, pembangunan SPAM Regional Kartamantul, pembangunan SPAM Regional dari Bendungan Bener, dan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto.

Jumlah SK penetapan lokasi yang telah terbit pada periode tahun 2015 – 2023 terdapat 26 SK. Untuk pelaksanaan PSN dan program prioritas DIY, masih terdapat proses pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang belum terselesaikan seperti jalan tol Solo- Yogyakarta – Kulon Progo seksi 3, dan beberapa rencana program strategis lain belum mulai proses pengadaan tanahnya.

2.) Belum Dapat Dilakukan Legalisasi Alas Hak pada Status Tanah Tertentu

Masih terdapat tanah dengan status tertentu yang belum dapat dilegalisasi atau diberikan alas hak. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan tanah tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (aset dan akses) pada jenis tanah tertentu diantaranya tanah tutupan, tanah enklave, dan tanah hasil tukar menukar.

Tanah tutupan di DIY terdapat di Kabupaten Bantul. Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pada tahun 2021 telah dilakukan penandatanganan kesepakatan antara Kasultanan, Gubernur DIY, dan Kanwil BPN DIY terkait penyelesaian tanah Tutupan dengan dilakukan redistribusi tanah (penataan kembali) dengan memberikan status hukum kepemilikan kepada para penghuni/pengelola yang rencananya akan dilakukan di 2024, karena di tahun 2023 baru disusun masterplan di tanah tutupan, sosialisasi cipta kondisi dan pemasangan patok.

Tanah enklave adalah tanah yang asal usulnya dari Kasunanan dan Mangkunegaran bukan tanah Kasultanan. Untuk Tanah enklave sebelumnya sudah dilakukan pensertifikatan hak milik atas nama Kasultanan, namun dalam perjalanan waktu dihentikan pensertifikatannya sehingga sekarang statusnya menjadi terkatung katung (tidak ada kepastian). Pada tahun 2022 dilakukan pengkajian status terkait dengan tanah enklave untuk kemudian dapat diambil kebijakan.

Tanah yang diperoleh dari hasil tukar menukar adalah proses tukar menukar tanah kalurahan dengan masyarakat. Berdasarkan Pergub DIY No. 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, bahwa setiap tukar

menukar tanah kalurahan dengan tanah milik warga harus mendapat ijin dari Kasultanan dan Kadipaten. Kendala yang ada adalah beberapa tukar menukar belum diajukan dikarenakan tidak ada bukti pendukung atau catatan sama sekali di Pemerintah Kalurahan walaupun keduanya sudah saling menguasai dan pemerintah kalurahan tidak berani mengeluarkan keputusan lurah sebagai salah satu syarat.

3.) Tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa belum seluruhnya tersertifikasi

Jumlah bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berdasarkan data inventarisasi tahun 2015 sebanyak 14.044 bidang. Sampai dengan 2022 jumlah bidang tanah yang telah terdaftar untuk disertipikatkan sebanyak 13.873 bidang dan telah diterbitkan sertipikat sebanyak 9.985 bidang. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah pendaftaran bidang tanah kasultanan dan kadipaten menjadi 13.958. Sedangkan terkait dengan tanah desa terbagi sebagai berikut:

- a.) Jumlah bidang Tanah Desa belum bersertipikat berdasarkan data inventarisasi tahun 2015 sebanyak 34.211. Sampai dengan tahun 2022 jumlah bidang telah terdaftar untuk disertipikatkan sebanyak 1.141 bidang dan belum ada yang terbit karena kegiatan baru dimulai di tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlah bidang terdapat bertambah menjadi 1.195 bidang sehingga sampai dengan tahun 2023 telah terdaftar sebanyak 2.336 bidang.
- b.) Jumlah bidang Tanah Desa yang telah bersertipikat berdasarkan data inventarisasi tahun 2015 sebanyak 16.068 bidang. Sampai tahun 2022 telah didaftarkan untuk dilakukan perubahan pencatatan sertipikat menjadi Hak Pakai Pemerintah Desa di atas Tanah Milik Kasultanan / Kadipaten sebanyak 7.266 bidang dan pada tahun 2023 bertambah sebanyak 2.016 bidang sehingga total menjadi 9.699 bidang sedangkan yang belum sebanyak 6.369 bidang.
- c.) Bidang Tanah Desa yang telah bersertipikat sebanyak 16.068 bidang masih harus dilakukan penetapan Hak Milik Kasultanan / Kadipaten dan dilanjutkan dengan pendaftaran kembali sertipikat hak pakai Pemerintah Desa di atasnya.

Secara total jumlah pendaftaran tanah SG/PAG dan tanah kalurahan sampai dengan tahun 2023 sebanyak 25.993 dan sudah terbit sertifikat sejumlah 11.448 bidang tanah SG/PAG. Sementara untuk sertifikat tanah kalurahan yang sudah terbit sertifikat sejumlah 16.068 bidang dari

jumlah 50.279 bidang. Dari keseluruhan sertifikat tanah kalurahan yang telah terbit, saat ini sedang proses dilakukan pendaftaran penyesuaian sertifikat tanah kalurahan di atas tanah SG/PAG sebanyak 9.699 bidang dan sudah terbit sertifikat sejumlah 9721 bidang. Berdasarkan hal tersebut total tanah SG/PAG/Tanah kalurahan yang sudah terbit sertifikat sampai dengan tahun 2023 sebanyak 21.169 bidang.

4.) Masih terdapat Pemanfaatan Tanah kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang Belum sesuai Ketentuan/Perencanaan

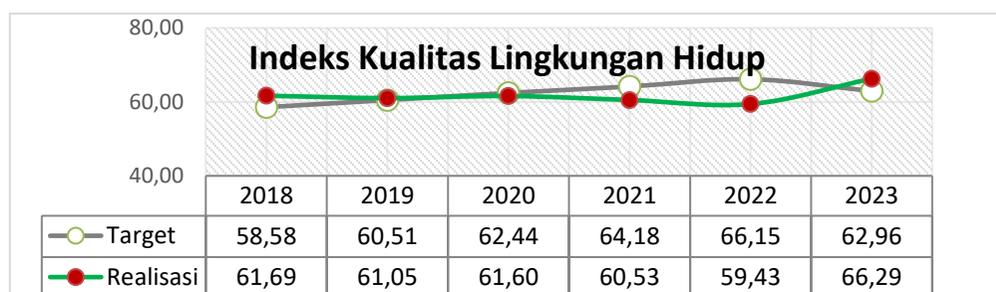
Pemanfaatan SG dan PAG secara umum sudah sesuai dengan permohonan kekancingan yang diajukan, terhadap pemanfaatan yang belum memiliki kekancingan dilakukan sosialisasi dan dihimbau untuk dapat melakukan permohonan pengajuan izin kekancingan dan harus memperhatikan Tata Ruang, apabila tidak sesuai dengan Tata Ruang tentunya tidak diproses kekancingannya dan diberikan peringatan apabila melakukan aktivitas pembangunan serta dilakukan pemasangan papan peringatan.

Terkait pemanfaatan tanah desa secara umum pelaksanaannya sudah sesuai dengan izin yang diberikan walaupun masih ada sebagian kecil pelanggaran seperti pengalihan ijin kepada pihak lain dan pemanfaatan tidak sesuai dengan ijin yang diterbitkan. Selain itu masih banyak pemerintah desa yang tidak jujur terkait pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga yang belum berizin. Terhadap pelanggaran ini dilakukan pengawasan berupa teguran sampai dengan pemerintah kalurahan untuk melakukan pembatalan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani dan melakukan usulan pencabutan izin terhadap Keputusan Gubernur.

2.3.2.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

1.) Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu parameter keberhasilan pembangunan dibidang lingkungan hidup. Semakin tinggi nilai IKLH menunjukan bahwa kondisi kualitas lingkungan hidup secara umum semakin baik. Capaian IKLH DIY tahun 2018-2023, sebagaimana grafik berikut.

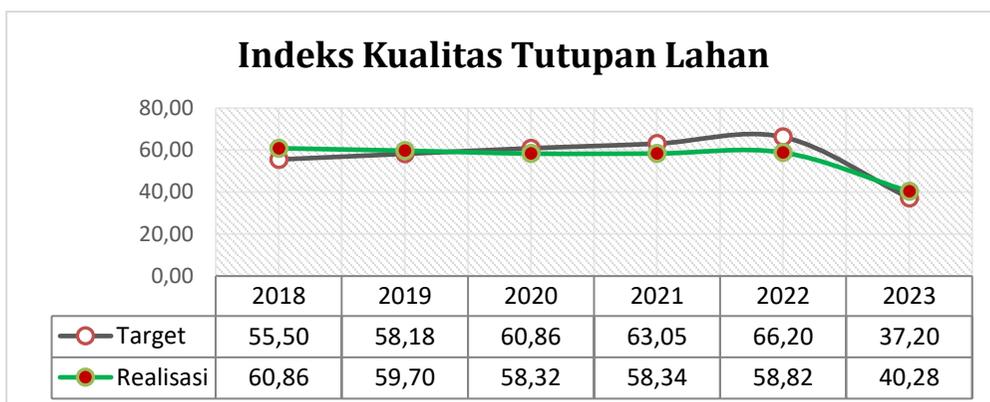


Sumber: DLHK DIY, 2023

Gambar 2-92 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DIY 2018-2023.

Berdasarkan grafik indeks kualitas lingkungan hidup DIY berkisar antara 59,43 sampai dengan 66,29. Sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, tren nilai IKLH mengalami penurunan sebesar 2,26 poin dari semula 61,69 di tahun 2018 menjadi 59,43 di tahun 2022 dan naik menjadi 66,29 di tahun 2023. Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 realisasinya tidak mencapai target akan tetapi di tahun 2023 realisasinya sudah mencapai target dengan realisasi sebesar 66,29 atau sebesar 105,29% dari target sebesar 62,96 yang tercantum didalam RPJMD DIY 2022-2027.

Berdasarkan indeks pembentuk IKLH, indeks tutupan lahan menjadi indeks yang mengalami tren selalu menurun dibandingkan dengan IKA dan IKU. Berdasarkan indeks tutupan lahan DIY 2018-2023, nilai IKTL DIY memiliki kecenderungan mengalami penurunan dari sebesar 60,86 pada tahun 2018 menjadi 40,28 di tahun 2023. Meskipun pada tahun 2023 menjadi capaian yang terendah yaitu sebesar 40,28 akan tetapi capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 37,20. Pada tahun 2023 juga dilakukan perubahan metode perhitungan indeks sehingga terdapat penyesuaian target didalam RPJMD DIY 2022-2027. Berdasarkan data capaian IKTL DIY dan faktor yang mempengaruhi nilai IKTL, upaya membangun ruang terbuka hijau (RTH) dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap IKTL DIY. Data capaian IKTL DIY 2018-2023 sebagaimana grafik berikut ini.



Sumber: DLHK DIY, 2023

Gambar 2-93 Data capaian IKTL DIY 2018-2023

2.) Kapasitas kelembagaan dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup masih kurang.

Berdasarkan kajian joga hijau terdapat 213 kelurahan/kalurahan yang mengisi kuesioner dari total 392 kelurahan/kalurahan di DIY, sebanyak 179 kelurahan/kalurahan tidak mengisi kuesioner. Dari kajian tersebut didapatkan bahwa dalam pilar pengelolaan lahan terbuka (RTH), pemanenan air hujan (konservasi air), pengelolaan sampah mandiri dan konservasi energi, kelurahan/kalurahan yang sudah mendapatkan nilai baik (≥ 90) yaitu sebanyak 11 kalurahan/kelurahan yang terdiri dari 3 kalurahan di Kab Sleman (dari total 86 kalurahan), 1 kalurahan di kab Bantul (dari total 75 kalurahan), 4 Kalurahan di Kab Kulon progo (dari total 87 kalurahan), 2 kalurahan di Kab Gunungkidul (dari total 144 kalurahan) dan 1 kalurahan kota Yogyakarta (dari total 45 kalurahan).

3.) Tingkat ketaatan usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemda DIY masih rendah

Tingkat ketaatan usaha/kegiatan rendah yaitu sebesar 45%, sebanyak 36 unit taat dan 44 unit tidak taat dari total 80 unit usaha/kegiatan yang diawasi. Ketaatan usaha/kegiatan terdiri dari 4 (empat) kriteria yaitu persetujuan lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3. Untuk menentukan tingkat ketaatan ijin usaha/kegiatan harus terpenuhi keempat kriteria tersebut sehingga sulit untuk dicapai oleh usaha/kegiatan. dengan rincian ketidaktaatan yaitu 23 unit usaha tidak memiliki Izin

Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan 18 unit usaha tidak memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3.

Dengan terbitnya PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkonsekuensi terhadap: semakin rendahnya tingkat ketaatan usaha/kegiatan. Hal ini disebabkan karena bertambahnya ruang lingkup kewenangan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan, pengawasan usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemda DIY bertambah menjadi 185 unit yang terdiri dari 98 unit usaha sektor industri, rumah sakit dan hotel, 78 unit usaha sektor tambang pasir dan batu serta 9 unit usaha sektor tambang kapur.

Selain itu berdasarkan regulasi yang berwenang melakukan pengawasan adalah PPLH. Saat ini di Pemda DIY hanya ada 4 orang PPLH, sehingga memerlukan penambahan SDM PPLH untuk mencapai rasio PPLH yang ideal.

4.) Desentralisasi pengelolaan sampah belum berjalan optimal

Pengurangan sampah di DIY pada tahun 2022 sampai bulan september mencapai 20,79% dan penanganan sampah mencapai 47,94% hal ini masih di bawah target jakstrada yaitu pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%.

Kebijakan dan strategi daerah tentang pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga sudah ada namun penegakannya belum kuat dan belum optimal. Pemilahan dan pengangkutan sampah belum sepenuhnya memenuhi peraturan serta TPA Piyungan sudah habis umur teknisnya. Dari data sistem pengelolaan sampah nasional diketahui bahwa terdapat 16 unit TPS3R aktif dan 91 unit bank sampah di kab Bantul; 22 unit TPS3R aktif dan 263 unit bank sampah di Sleman serta; 2 unit TPS3R aktif dan 370 unit bank sampah di Yogyakarta. Jumlah ini yang masih sangat kurang untuk dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA Piyungan.

Pelayanan sampah di TPA Piyungan masih menggunakan metode *controlled landfill*. Selain itu sampah yang masuk ke TPA Piyungan tidak hanya residu, serta sampah belum terpilah dengan lebih dari 50% berupa sampah organik. Berdasarkan perhitungan teknis, kapasitas pelayanan sampah di TPA Piyungan sudah habis meskipun telah dilakukan penataan di zona A dan B (sel eksisting 10 ha). Pemda DIY

telah menyiapkan lahan di zona transisi tahap 1 pada tahun 2022 dan zona transisi tahap 2 pada tahun 2023.

2.3.2.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.) Belum adanya *database* yang terintegrasi terkait dengan jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan

Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi seluruh warga negara merupakan hal penting yang harus diwujudkan Pemerintah dalam rangka pemenuhan hak dasar bagi seluruh warga negara. Jika warga negara tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan, maka tidak akan terdata oleh pemerintah sehingga akan menyulitkan untuk mendapatkan pelayanan publik maupun bantuan dari pemerintah yang bertujuan untuk menangani kemiskinan ekstrem. Namun demikian, sampai saat ini di DIY belum ada *database* terkait jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan seperti penghuni panti, transpuan, gelandangan, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) serta penduduk rentan lain yang terintegrasi.

Permasalahan lain yang dialami dalam pelayanan kependudukan adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan. Selain itu, belum semua masyarakat memahami adanya pelayanan online pendaftaran penduduk di Dinas Dukcapil. Kondisi ini berimplikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan yang cenderung parsial atau hanya berdasarkan pengaduan dan laporan masyarakat.

2.) Cakupan dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum optimal.

Permasalahan lain terkait dengan Urusan Pemerintah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah cakupan dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum optimal. Berdasarkan data Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sampai dengan Desember 2023 terdapat 697.070 anak atau 85,14% yang telah memiliki KIA dari total 818.731 wajib KIA di DIY. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut. Jika anak-anak tidak memiliki KIA, maka akan berpotensi

menyulitkan anak-anak dalam pendaftaran pada sekolah formal maupun dalam menerima pelayanan publik dari pemerintah, meskipun hingga saat ini masih dapat diakses menggunakan Akta Kelahiran.

2.3.2.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan Kalurahan

Aspek kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan Kalurahan merupakan salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Secara spesifik masih terdapat permasalahan di Kalurahan, diantaranya belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan, rendahnya rasio kemandirian Kalurahan, dan rendahnya rata-rata tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Kalurahan.

Permasalahan ini perlu ditindaklanjuti, salah satunya melalui skema intervensi berupa pembinaan yang kolaboratif dari Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah DIY kepada Pemerintah Kalurahan di DIY. Aktor utama dan pertama yang harus diintervensi adalah aparat pemerintah kalurahan yang diharapkan dapat menjadi agen pemberdayaan masyarakat. Mulai dari tingkat kedisiplinan, mekanisme kerja, hingga pada capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kalurahan sehingga mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Jika dilihat dari penilaian Kementerian Desa melalui instrumen IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2023, seluruh Desa/Kalurahan di DIY tidak ada yang masuk dalam kriteria berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Rinciannya terdapat 136 Desa/Kalurahan dengan status Maju dan 256 Desa/Kalurahan dengan status Mandiri dari total 392 Desa/Kalurahan di DIY. Namun demikian menurut Surat yang ditandatangani Wakil Gubernur bernomor 401/0161 tahun 2022 disebutkan bahwa ada 15 Kapanewon yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan. Tentu saja hal tersebut merupakan sumbangan dari Kalurahan yang ada di tingkat bawahnya.

Belum optimalnya tata Kelola kalurahan dapat juga dilihat dari masih rendahnya rasio kemandirian Kalurahan, hal ini terlihat masih banyaknya Pemerintah Kalurahan yang mengandalkan sumber pembiayaan dari lembaga supra-desa dalam bentuk Dana Desa, bagian

dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi serta APBD Kabupaten/Kota. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan asli kalurahan masih di bawah jumlah dana transfer dari lembaga supra-desa.

Masih rendahnya rata-rata tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Kalurahan. Aparatur Pemerintah Kalurahan merupakan ujung tombak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan, namun saat ini kapasitas SDM aparatur Pemerintah Kalurahan di DIY masih tergolong rendah. Data rata-rata pendidikan SDM aparatur Pemerintah Kalurahan di DIY tahun 2023 masih didominasi lulusan SMA dengan rentang usia 20-60 tahun. Sehingga peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kalurahan harus terus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan dan responsivitas aparatur dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

Optimalisasi TIK juga masih menjadi permasalahan yang menghambat tata Kelola di Kalurahan, meskipun konektivitas sudah tidak lagi menjadi kendala. Saat ini seluruh kantor kalurahan di DIY yaitu sebanyak 392 Kalurahan sudah terkoneksi dengan internet, namun kualitas jaringan serta perluasan pemanfaatannya masih terbatas. Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya penerapan teknologi informasi di Kalurahan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.

2.) Perlu Reformasi Kalurahan untuk percepatan pembangunan desa/kalurahan

Reformasi Kalurahan dimaknai sebagai perubahan model pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kemakmuran masyarakat desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Reformasi Kalurahan menyangkut reformasi pemerintahan Kalurahan dan reformasi perekonomian Kalurahan. Reformasi Pemerintahan

Kalurahan dilaksanakan dengan memberdayakan potensi sumberdaya manusia dan kelembagaannya. Reformasi perekonomian Kalurahan/Kelurahan dilaksanakan dengan meningkatkan nilai lebih aset dan sumberdaya aiam lainnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

3.) Ketimpangan Perdesaan dan Perkotaan

Ketimpangan perdesaan dan perkotaan di DIY ditandai oleh gambaran makro yang nyata dan kontras. Kawasan perkotaan DIY didominasi oleh Kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Sleman yang masuk ke dalam kawasan aglomerasi Yogyakarta. Sementara itu, kawasaan perdesaan mendominasi hampir semua wilayah Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan sebagian Kabupaten Bantul. Hal ini kemudian berbanding lurus dengan data-data ekonomi, terutama persentase kemiskinan dan indeks ketimpangan di lima daerah ini. Secara umum, persentase kemiskinan tertinggi berada di Gunungkidul, Kulon Progo, dan disusul Bantul. Sementara Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki persentase kemiskinan yang jauh lebih rendah dibandingkan tiga daerah lainnya. Dari sudut pandang regional, hal ini menunjukkan fenomena ketimpangan yang cukup parah. Bagian ini akan melihat secara lebih mikro kondisi ketimpangan desa-desa di kawasan rural dan urban serta ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan baik dari sisi ketimpangan ekonomi maupun ketimpangan non-ekonomi (dimensi kualitas hidup).

Secara umum, tingkat kemiskinan D.I. Yogyakarta pada periode Maret 2017 – Maret 2024 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Tetapi, Maret 2020, September 2020, dan Maret 2021 terjadi peningkatan kemiskinan yang diantaranya disebabkan wabah Covid-19. Pada bulan September 2021 dan Maret 2022, tren tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan kemiskinan. Namun, pada September 2022 kemiskinan kembali mengalami kenaikan. Sedangkan pada Maret 2023 dan Maret 2024 kemiskinan kembali mengalami penurunan.

Periode Maret 2017, jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta mencapai 488,53 ribu orang. Pada September 2019, jumlah penduduk miskin telah berkurang sebanyak 47,64 ribu orang. Namun, terjadinya wabah Covid-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat kembali menjadi 475,72 ribu orang pada Maret 2020. Pada Maret 2021,

jumlah penduduk miskin kembali meningkat. Penduduk miskin pada periode ini tercatat sebanyak 506,45 ribu orang. Periode Maret 2024 mengalami penurunan dibandingkan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebanyak 445,55ribu orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2023, terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 2,9ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 10,83 persen turun 0,21 poin persen dibandingkan Maret 2023, dan turun 0,66 poin persen dibandingkan September 2022.

Jumlah penduduk miskin di DIY yang mengalami keniakan yaitu di wilayah perkotaan naik sebanyak 6,6 ribu orang dibandingkan Maret 2023 dengan jumlah total sebanyak 319,40 ribu orang. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan yang banyaknya 126,15 ribu orang. Sementara itu, secara persentase, penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di perdesaan sebanyak 12,49 persen. Angka ini menunjukkan secara rata-rata terdapat sekitar 12 hingga 13 penduduk miskin diantara 100 orang penduduk yang ada di perdesaan. Sementara itu, pada waktu yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 10,29 persen.

Pada periode September 2022 – Maret 2024, tingkat kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perkotaan D.I. Yogyakarta turun sebanyak 1,6 ribu orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 16,4 ribu orang. Pada kurun waktu 18 bulan terakhir, jumlah penduduk miskin D.I. Yogyakarta berkurang sebanyak 18,1 ribu orang. Pada periode yang sama, persentase penduduk miskin perkotaan turun sebanyak 0,35 poin persen. Sementara itu persentase penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 1,51 persen poin. Dalam 18 bulan terakhir persentase kemiskinan D.I. Yogyakarta turun sebanyak 0,66 poin persen.

Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp602.437,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp437.891,00 (72,69 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp164.546,00 (27,31 persen). Pada Maret 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di D.I. Yogyakarta memiliki 4,50

orang anggota rumah tangga. Apabila ditinjau secara rumah tangga, maka Garis Kemiskinan rumah tangga mencapai Rp2.710.967,00/rumah tangga/bulan.

Namun permasalahan kemiskinan bukan hanya pada berapa jumlah dan persentase penduduk miskin tetapi ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada kurun waktu 18 bulan terakhir nilai indeks P1 D.I. Yogyakarta mengalami kenaikan. Pada September 2022, indeks P1 tercatat sebesar 1,526. Kemudian, pada Maret 2023, indeks P1 mengalami kenaikan menjadi 1,717. Pada Maret 2024, indeks P1 naik kembali menjadi sebesar 1,867. Kenaikan indeks P1 selama 18 bulan terakhir ini memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Apabila dibandingkan antara daerah perdesaan dan perkotaan, indeks kedalaman kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan menunjukkan kecenderungan meningkat. Namun demikian, nilai indeks P1 di perdesaan lebih besar daripada perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan.

Sejalan dengan indeks P1 yang mengalami peningkatan, indeks P2 juga menunjukkan adanya kecenderungan meningkat pada rentang waktu yang sama. Pada September 2022 indeks P2 tercatat sebesar 0,282. Pada Maret 2023, indeks P2 mengalami kenaikan menjadi 0,382. Selanjutnya pada Maret 2024, nilai indeks P2 mengalami kenaikan kembali menjadi 0,450. Kenaikan indeks P2 selama 18 bulan terakhir memberikan gambaran bahwa kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin bertambah. Pada daerah perkotaan D.I. Yogyakarta. Nilai indeks P2 perkotaan selama 18 bulan terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada September 2022 indeks P2 perkotaan sebesar 0,249. Satu semester berikutnya, nilai indeks P2 mengalami peningkatan menjadi 0,373. Selanjutnya pada Maret 2024, indeks P2 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,421.

Secara umum, peningkatan P2 ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antara penduduk miskin di perkotaan semakin bertambah.

Di perdesaan D.I. Yogyakarta, indeks P2 menunjukkan juga kecenderungan yang meningkat. Pada September 2022, indeks P2 perdesaan sebesar 0,382. Satu semester berikutnya nilai indeks P2 naik menjadi 0,411. Selanjutnya pada Maret 2024, indeks P2 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,450. Secara umum, peningkatan P2 di perdesaan ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antara penduduk miskin di perdesaan cenderung semakin bertambah.

4.) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kurang Mendapatkan Perhatian.

Terdapat tiga kabupaten di DIY yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Ketiga kabupaten tersebut, memiliki luas wilayahnya sebesar 80% dari luas DIY dengan jumlah penduduk hampir 60% total penduduk DIY. Kontribusi perekonomian ketiga kabupaten tersebut terhadap perekonomian DIY belum optimal apabila dibandingkan dengan total PDRB DIY, di bawah 50 persen dari total PDRB DIY. Daerah tersebut memiliki potensi ikan dari wilayah laut selatan DIY mencapai kurang lebih 320.600 ton per tahun, sedangkan produksi perikanan tangkap DIY belum dapat mengoptimalkan potensi tersebut, sehingga potensi ekonomi wilayah pesisir selatan DIY masih belum sepenuhnya dimanfaatkan. Selain itu, faktor yang kurang menguntungkan adalah tingginya tingkat kemiskinan di wilayah selatan DIY jika dibandingkan dengan wilayah utara DIY.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa (IDM) tahun 2023 menyatakan bahwa wilayah pesisir di Kabupaten Gunungkidul masih memerlukan perhatian khusus terkait akses sarana pasarana yang mendukung kegiatan sosial budaya, ekonomi, pariwisata, dan kelestarian lingkungan. Dukungan berbagai elemen pembangunan diharapkan semakin memantapkan desa/kalurahan dalam mencapai kemandirian.

Tabel 2-176 Status IDM Tahun 2023 Menurut Kalurahan di DIY

No	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Nama Kalurahan	Status IDM 2023
1	Kulon Progo	Temon	Jangkar	Mandiri
2	Kulon Progo	Temon	Sindutan	Maju
3	Kulon Progo	Temon	Palihan	Maju

No	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Nama Kalurahan	Status IDM 2023
4	Kulon Progo	Temon	Glagah	Maju
5	Kulon Progo	Wates	Karangwuni	Mandiri
6	Kulon Progo	Panjatan	Garongan	Mandiri
7	Kulon Progo	Panjatan	Pleret	Mandiri
8	Kulon Progo	Panjatan	Bugel	Mandiri
9	Kulon Progo	Galur	Banaran	Mandiri
10	Kulon Progo	Galur	Karangsewu	Mandiri
11	Bantul	Srandakan	Poncosari	Mandiri
12	Bantul	Sanden	Gadingsari	Mandiri
13	Bantul	Sanden	Srigading	Mandiri
14	Bantul	Kretek	Parangtritis	Mandiri
15	Bantul	Kretek	Tirtohargo	Mandiri
16	Gunungkidul	Panggung	Girikarto	Maju
17	Gunungkidul	Panggung	Giriwungu	Maju
18	Gunungkidul	Tepus	Sidoharjo	Mandiri
19	Gunungkidul	Tepus	Tepus	Mandiri
20	Gunungkidul	Tepus	Purwodadi	Mandiri
21	Gunungkidul	Saptosari	Krambilsawit	Maju
22	Gunungkidul	Saptosari	Kanigoro	Maju
23	Gunungkidul	Girisubo	Balong	Maju
24	Gunungkidul	Girisubo	Jepitu	Maju
25	Gunungkidul	Girisubo	Tileng	Mandiri
26	Gunungkidul	Girisubo	Pucung	Mandiri
27	Gunungkidul	Girisubo	Songbanyu	Mandiri
28	Gunungkidul	Tanjungsari	Kemadang	Mandiri
29	Gunungkidul	Tanjungsari	Ngestirejo	Mandiri
30	Gunungkidul	Purwosari	Giripurwo	Mandiri
31	Gunungkidul	Purwosari	Giricahyo	Maju

Sumber: Kementerian Desa, PDT Dan Transmigrasi, 2023

Masyarakat di wilayah pesisir DIY memiliki banyak potensi ekonomi. Potensi tersebut berupa potensi wilayah, jumlah penduduk, kekayaan alam, potensi pariwisata dan pertanian. Potensi ekonomi masyarakat pesisir tersebut didukung dengan sudah merebaknya UMKM yang bergerak pada sektor makanan, oleh-oleh, dan permainan pendukung

wisata. Ekonomi masyarakat pesisir dapat diberdayakan dengan cara memasarkan produknya dengan teknik pemasaran yang efisien dan efektif untuk menarik pembeli adalah dengan melakukan digital branding dan marketing.

Terwujudnya akses Jalan Lintas Selatan DIY sepanjang 125,125 km dari Karangnongko di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Jerukwudel di Kabupaten Kabupaten Gunungkidul dan hingga tembus perbatasan dengan Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah, akan sangat strategis untuk mewujudkan program Pemerintah DIY yaitu Misi dan Visi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, bahwa Pantai Selatan menjadi Halaman Depan DIY dan Konsep Among Tani, Dagang Layar (ATDL).

Upaya lain dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di wilayah pesisir antara lain :

- a.) Pemberian bantuan dan jaminan sosial.
- b.) Penyediaan akses sarana prasarana dasar.
- c.) Pemberdayaan kelompok nelayan.
- d.) Akses transportasi menuju tempat wisata dan penumbuhan, pengembangan wisata yang bersertifikat CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability*).

5.) Pemberdayaan Masyarakat Melalui *Digital Economy* Masih Kurang Berkembang.

DIY memiliki keunggulan pada kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat dari tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Pemuda dan telah tingginya penggunaan sistem informasi. Di sisi lain sektor usaha kecil menengah menjadi sendi ekonomi utama penduduk DIY. Kemajuan sektor UKM sudah mulai memasuki digital ekonomi diantaranya dengan metode penjualan online, jasa antar online dan layanan lainnya. Namun DIY juga ketimpangan wilayah yang tinggi sehingga pemberdayaan masyarakat melalui UKM ataupun usaha kecil pribadi masih lebih banyak tersentral di kabupaten kota yang sudah rendah angka kemiskinannya dan lebih banyak dilakukan oleh kalangan menengah ke atas.

Revolusi industri 4.0 mengharuskan masyarakat berubah mengikuti perubahan termasuk cara melakukan interaksi pada semua aspek

kehidupan, terjadinya pandemic COVID-19 memperkuat terjadinya perubahan tersebut. Usaha kecil mikro yang dapat bertahan adalah usaha yang melakukan perubahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yaitu dengan melakukan pemasaran secara online. Teknik pemasaran yang digunakan sangat sederhana menggunakan media sosial dan sarana sederhana. Kondisi ini mendukung perlunya dilakukan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi digital. Masyarakat sasarannya meliputi: rumah tangga miskin, perempuan pemilik usaha kecil dan mikro, dan penguatan ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Penguatan ekonomi masyarakat diharapkan mampu mendorong peningkatan kemampuan masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan.

6.) BUMKal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan Stagnan.

Sejak tahun 2017 perkembangan jumlah Badan Usaha Milik Desa/Kalurahan (BUMKal) di DIY cukup pesat, setiap tahun terjadi pembentukan baru dan peningkatan strata kategori. Namun perlu senantiasa diupayakan peningkatan kapasitas bagi pengelola maupun aparat Desa/Kalurahan agar mampu berperan dan memberdayakan lembaga ekonomi desa ini agar berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2-177 Jumlah BUMDes/BUMKal DIY Tahun 2017-2023

Tahun	Jumlah BUMDes/BUMKal DIY
2017	183
2018	279
2019	306
2020	343
2021	349
2022	392
2023	392

Sumber: Dataku, 2023

Terdapat 4 kategori berdasarkan hasil pemeringkatan terhadap aspek kelembagaan, manajemen, Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, kerja sama atau kemitraan, asset dan permodalan, administrasi pelaporan dan akuntabilitas, dan keuntungan

dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa. Data Bumkal berdasarkan kategorinya sebagai berikut:

Tabel 2-178 Data BUMKal di DIY Menurut Kategori Tahun 2023

Kabupaten	Jumlah Desa	Kategori BUMKal				Jumlah BUMkal sudah upload	BUMKal Belum Upload	Jumlah Desa belum terbentuk BUMkal
		Perintis	Pemula	Berkembang	Maju			
Bantul	75	10	4	27	12	53	22	0
Gunungkidul	144	0	11	34	5	50	94	0
Sleman	86	44	5	15	8	72	0	14
Kulon Progo	87	3	4	38	42	87	0	0
Total	392	57	24	114	67	262	116	14

Sumber : Biro Bermas, 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes telah memberikan peta jalan kepada pemerintah desa dan supra desa serta pengelola BUMDes untuk lebih berkembang dan profesional dalam mengelola usahanya. Dengan adanya peraturan ini keberadaan BUMKal merupakan entitas badan hukum yang bisa memperluas usahanya baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ke tiga. Masih banyak permasalahan pada BUMKal itu sendiri, baik SDM, tata kelola dengan pemerintah desa sebagai pemilik modal, manajemen maupun pemasarannya.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas bagi pengelola dan pemilik (dalam hal ini Pemerintah Kalurahan) BUMKal. Pelatihan ini tentunya harus disesuaikan dengan kondisi (status) dan jenis usaha BUMKal tersebut. Jika statusnya dasar tentunya akan berbeda materi pelatihan dengan BUMKal yang sudah tumbuh, berkembang atau mandiri. Dan yang kalah penting juga adalah perlunya reorganisasi dan digitalisasi pengelolaan BUMKal.

7.) Peran LPMD/K Sebagai Mitra Pemerintah Kalurahan Dalam Proses Pembangunan di Kalurahan.

Dalam pembangunan kalurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan (LPMD/K) merupakan mitra kerja dari pemerintah kalurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan (LPMD/K) sangat berpengaruh terhadap pembangunan, oleh karena itu

Lurah sebagai kepala tertinggi dalam Pemerintahan Kalurahan maka seharusnya bisa bekerja sama dan menjalin hubungan yang baik dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan (LPMD/K) begitu juga dengan masyarakat. Dasar hukum keberadaan LPMD adalah Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.

Selain itu, di dalam Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan tentang keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiri antara lain RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 94 juga disebutkan bahwa dalam manajemen Pemerintahan Desa dan manajemen pembangunan desa, peran lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek, serta sebagai mitra pemerintah desa.

Untuk memenuhi tujuan pembangunan Kalurahan, diperlukan peran optimal dari LPMD/K, dan masih banyak ditemui masalah baik dari sisi Sumber Daya Manusia, pelaksanaan ataupun pengelolaan LPMD/K. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kualitas LPMD/K. Dari berbagai permasalahan sektor pemberdayaan masyarakat yang ada maka dibutuhkan strategi untuk penanggulannya.

Peran LPMD/K yang optimal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kalurahan dalam perencanaan pembangunan dilakukan melalui muskal dan musrenbangkal serta mengawal usulan perencanaan pembangunan kalurahan agar sesuai dengan usulan masyarakat dan perundang undangan. Saat ini sumber pendapatan / keuangan kalurahan yang berasal dari perolehan pajak dan restribusi daerah, dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi terlampau cukup baik. Oleh karena itu, keberadaan LPMD/K sangatlah penting untuk bisa mengontrol proses pembangunan desa.

LPMD/K harus bisa memerankan semua elemen di kalurahan terutama para pemuda dan perempuan. Peran pemuda sebagai kader pembangunan kalurahan harus terus digalakkan agar proses regenerasi peran pembangunan bisa berlanjut. Selain itu, peran perempuan dalam pembangunan juga harus di optimalkan, mengingat selama ini gerak

peran perempuan lebih banyak di sektor dasar kebutuhan manusia, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain lain. Untuk itu kualitas pengelolaan LPMD/K harus ditingkatkan baik dari sisi sumber daya manusia, dukungan prasarana, kemajuan teknologi dan unsur pendukung agar peran LPMD/K dapat lebih optimal dalam pemberdayaan masyarakat kalurahan.

2.3.2.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

1.) Belum adanya Peraturan Daerah mengenai Grand Desain Pembangunan Kependudukan

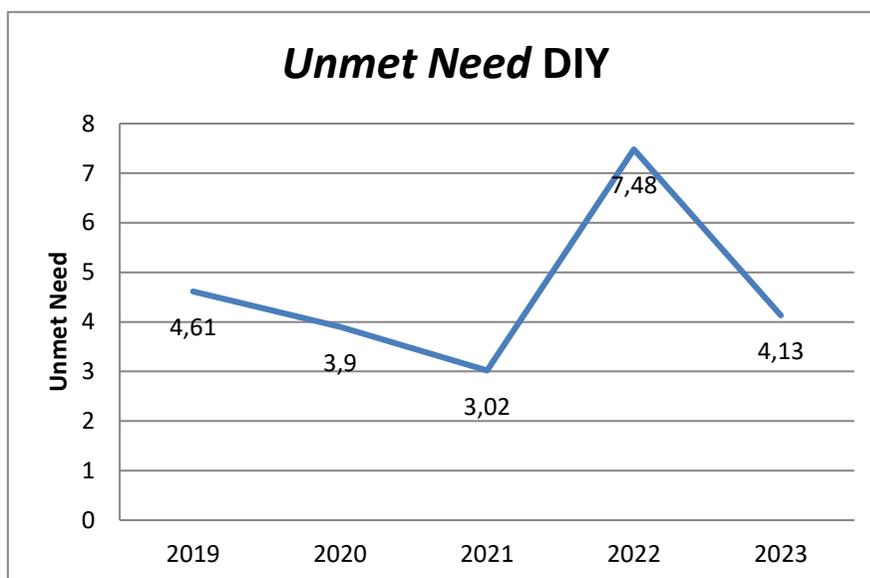
Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) mengamanatkan setiap tingkatan wilayah untuk menyusun suatu GDPK. Dokumen strategis ini merupakan suatu rumusan perencanaan pembangunan kependudukan untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan setiap 5 (lima) tahunan. GDPK berisi 5 pilar pembangunan dibidang kependudukan yaitu; Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas, Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan.

DIY telah menyusun GDPK pada tahun 2018, dan melakukan review terhadap dokumen ini pada semester kedua tahun 2022. Namun, hingga saat ini GDPK DIY hanya berfungsi sebagai sebuah pedoman rekayasa dinamika kependudukan. Dokumen ini belum menjadi sebuah regulasi baik Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah yang sah dan mengikat. Sementara, pengesahan dokumen ini sebagai peraturan daerah diperlukan karena GDPK semestinya menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penyusunan RPJMD.

2.) Tingginya *unmet need* kebutuhan ber-KB

Unmet need Keluarga Berencana (KB) adalah suatu kondisi ketika perempuan usia subur (PUS) membutuhkan program KB, namun tidak dapat melaksanakan KB karena beberapa alasan. Angka *Unmet Need* memberikan gambaran seberapa baik sistem kesehatan dan kondisi sosial suatu daerah mendukung kemampuan perempuan untuk mewujudkan pilihan mereka untuk menunda atau membatasi kelahiran. *Unmet Need* ini merupakan ukuran yang bersifat *inverse*, dimana semakin

rendah angka *Unmet Need* maka semakin baik kondisinya. Pada tahun 2024 ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan kembali berupaya menekan angka *Unmet Need* mengingat secara nasional masih banyak akseptor yang selayaknya mendapatkan layanan KB selama pandemi Covid-19 belum terlayani hingga akhir 2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2-94 Angka Kebutuhan *Unmeet Need* di DIY

Berdasarkan data di atas, kebutuhan ber-KB masyarakat DIY selama awal dan pertengahan pandemi Covid 19 cenderung masih dapat terpenuhi dengan baik. Namun pada akhir masa pandemi yaitu tahun 2022, *Unmet Need* DIY mengalami peningkatan yang signifikan sehingga mencapai angka 7,48. Meskipun demikian, angka ini masih berada di bawah angka *Unmet Need* Indonesia yang berada pada poin 14,7.

Unmet need menjadi tantangan bagi program keluarga berencana (KB) karena ketika kondisi ini terjadi, perempuan usia subur kemudian cenderung menggunakan cara-cara pencegahan kehamilan yang sifatnya alami dan harus dilakukan berulang kali. Karena banyaknya factor yang mempengaruhi pelaksanaan kontrasepsi alami, terdapat potensi perempuan tersebut berhenti berKB. Dengan demikian, kejadian *Unmet Need* menyebabkan munculnya kehamilan yang tidak diinginkan yang pada

gilirannya berimplikasi pada kondisi kesehatan bayi, serta meningkatkan *Total Fertility Rate* yang pada gilirannya akan berefek pada *Dependency Rate* (beban ketergantungan).

3.) **Belum maksimalnya penggunaan kontrasepsi modern**

Masih terjadi fluktuasi pada kepesertaan kontrasepsi modern oleh masyarakat DIY. Angka terendah ada pada tahun 2019 yakni pada poin 53,79, dan kondisi terbaik ada pada tahun 2020 dan 2023 yaitu pada angka 57,1. Salah satu faktor yang menghambat peningkatan MCPR di DIY adalah karena sebagian masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi saat ini lebih memilih untuk ber-KB dengan cara tradisional dengan pertimbangan untuk menghindari efek negatif dari obat atau alat KB terhadap tubuh. Sementara, penggunaan kontrasepsi modern memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencegah kehamilan jika dibandingkan kontrasepsi sederhana. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DIY juga perlu menggalakan upaya-upaya persuasifa dan mendekatkan pelayanan KB modern kepada masyarakat guna peningkatan penggunaan kontrasepsi modern di masyarakat sebagai upaya efektif mewujudkan penduduk tumbuh seimbang.

4.) **Meningkatnya Rasio Ketergantungan**

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun yaitu angkatan kerja. *Dependency Ratio* Hasil Proyeksi Penduduk 2010-2020 berdasar data BPS di DIY adalah sebagai berikut :

Tabel 2-179 *Dependency Ratio* Hasil Proyeksi Penduduk 2010-2020

Uraian	<i>Dependency Ratio</i> Hasil Proyeksi Penduduk		
	2010	2015	2020
DIY	45,8	44,9	45,6

Sumber : BPS (2020)

Sementara menurut Proyeksi Penduduk 2015-2045 yang dirilis Bappenas, DIY mengalami penurunan pada piramida penduduk di usia produktif, dan mengalami kenaikan pada piramida penduduk di usia lanjut usia, khususnya perempuan. Hal ini selaras dengan tingginya Usia Harapan Hidup di DIY dan banyaknya migrasi masuk ke DIY dari warga

luar DIY yang berusia lanjut. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY terus mengalami penurunan sejak tahun 2019 (Data Agustus 2020: 71,12%) serta Migrasi masuk DIY banyak diwarnai penduduk usia lansia sementara migrasi keluar DIY banyak dari penduduk usia produktif. Apabila dielaborasi dengan data Prevalensi Penyakit Tidak Menular yang cukup tinggi di DIY, maka Rasio Dependensi yang tinggi akan juga disertai dengan resiko penyakit tidak menular yang semuanya memerlukan antisipasi dan penanganan yang memadai. Di sisi kebijakan, juga telah disusun regulasi mengenai kelompok rentan seperti Disabilitas, Kelanjutusiaan, Pemenuhan Hak Anak, Kesetaraan Gender dan lain-lain, yang menjadi modal untuk menindaklanjuti Dependency Ratio dan masalah terkait kelompok rentan di DIY.

Tabel 2-180 *Dependency Ratio* Hasil Proyeksi Penduduk 2025-2035

Uraian	<i>Dependency Ratio</i> Hasil Proyeksi Penduduk		
	2025	2030	2035
DIY	46,8	47,7	48,4

Sumber : BPS (2020)

Untuk mengatasi masalah *Dependency Ratio* dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu: mengupayakan kualitas kesehatan lansia sehingga tidak ada beban tambahan, memberdayakan lansia produktif melalui usaha ekonomi produktif, dan meningkatkan lowongan pekerjaan di DIY sehingga meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Selain itu, juga dapat dilakukan dengan pemaksimalan potensi yang dimiliki baik internal maupun eksternal yaitu Angka harapan hidup DIY tinggi (2021: 75,04) dan adanya Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan lansia di DIY, serta kondisi mayoritas lansia DIY tinggal di rumah bersama keluarga sehingga tidak dalam kondisi terlantar (2021 : 94.42%). Berbagai kondisi tersebut diharapkan akan mampu mengatasi beberapa poin masalah tingginya jumlah penduduk usia non-produktif, khususnya usia diatas 65 tahun.

2.3.2.2.9 Urusan Perhubungan

- 1) Tingkat kepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan Propinsi dikategorikan mendekati arus tidak stabil pada jam-jam puncak.**

Tingkat kepadatan lalu lintas diukur dengan nilai derajat kejenuhan (DS) atau nilai perbandingan antara volume dan kapasitas dari ruas jalan (V/C ratio). Nilai derajat kejenuhan tersebut menjadi parameter atau indicator yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam menentukan peringkat prioritas penanganan. Berdasarkan data V/C Ratio sesuai Studi Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang pada ruas Jalan Provinsi pada tahun 2022 dapat diperoleh hasil bahwa pada wilayah dengan ciri perkotaan (kota Yogyakarta, Kab. Sleman) mempunyai DS tertinggi yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Rincian gambaran DS per kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Bantul

Perangkingan berdasarkan hasil analisis 130 ruas yang dikaji pada studi evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang di Wilayah DIY. Berdasarkan hasil ranking diatas dapat disimpulkan untuk ruas jalan yang memiliki angka derajat kejenuhan tertinggi di Kabupaten Bantul yaitu pada ruas jalan Gedongkuning- Wonocatur dengan volume yang melintas pada ruas jalan tersebut pada jam puncak pagi 1737 smp/jam, jam puncak siang 1697 smp/jam, jam puncak sore 1735 smp/jam, kecepatan arus bebas 48,76 km/jam, kapasitas pada pagi hari 2402 smp/jam, siang hari 2438 smp/jam, sore hari 2438 smp/ jam dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,72 pagi hari, 0,7 pada siang hari, dan 0,73 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,73 dan berada pada peringkat 12 dari 130 ruas yang dikaji.

b. Kabupaten Kulon Progo

Perangkingan berdasarkan hasil analisis 130 ruas yang dikaji pada studi evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang di Wilayah DIY. Berdasarkan hasil ranking diatas dapat disimpulkan untuk ruas jalan yang memiliki angka derajat kejenuhan tertinggi di Kabupaten Kulon Progo yaitu pada ruas jalan Dayakan-Pengasih dengan volume yang melintas pada ruas jalan tersebut pada jam puncak pagi 1090 smp/jam, jam puncak siang 709 smp/jam, jam puncak sore 1367 smp/jam, kecepatan arus bebas 31,44 km/jam, kapasitas pada pagi hari 2185 smp/jam, siang hari 2185 smp/jam, sore hari 2120 smp/ jam dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,5 pagi hari, 0,32 pada siang hari, dan 0,64 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,64 dan berada pada peringkat 24 dari 130 ruas yang dikaji.

c. Kabupaten Sleman

Perangkingan berdasarkan hasil analisis 130 ruas yang dikaji pada studi evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang di Wilayah DIY. Berdasarkan hasil ranking diatas dapat disimpulkan untuk ruas jalan yang memiliki angka derajat kejenuhan

tertinggi di Kabupaten Sleman yaitu pada ruas jalan Yogyakarta-Kaliurang dengan volume yang melintas pada ruas jalan tersebut pada jam puncak pagi 1524 smp/jam, jam puncak siang 1287 smp/jam, jam puncak sore 1954 smp/jam, kecepatan arus bebas 49,01 km/jam, kapasitas pada pagi hari 2043 smp/jam, siang hari 2177 smp/jam, sore hari 2177 smp/ jam dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,76 pagi hari, 0,59 pada siang hari, dan 0,9 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,9 dan berada pada peringkat 1 dari 130 ruas yang dikaji.

Ruas jalan yang memiliki angka derajat kejenuhan tertinggi selanjutnya yaitu Yogyakarta-Kebonagung 1 (Depan Giant Swalayan) dengan volume yang melintas pada ruas jalan tersebut pada jam puncak pagi 1018 smp/jam, jam puncak siang 1005 smp/jam, jam puncak sore 1806 smp/jam, kecepatan arus bebas 55,35 km/jam, kapasitas pada pagi hari 2089 smp/jam, siang hari 2021 smp/jam, sore hari 2021 smp/ jam dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,49 pagi hari, 0,5 pada siang hari, dan 0,9 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,9 dan berada pada peringkat 1 dari 130 ruas yang dikaji.

d. Kabupaten Gunungkidul

Perangkingan berdasarkan hasil analisis 130 ruas yang dikaji pada studi evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang di Wilayah DIY. Berdasarkan hasil ranking diatas dapat disimpulkan untuk ruas jalan yang memiliki angka derajat kejenuhan tertinggi di Kabupaten Gunungkidul yaitu pada ruas jalan Bibal-Panggung dengan volume yang melintas pada ruas jalan tersebut pada jam puncak pagi 1535 smp/jam, jam puncak siang 428 smp/jam, jam puncak sore 1396 smp/jam, kecepatan arus bebas 50,22 km/jam, kapasitas pada pagi hari 2185 smp/jam, siang hari 2075 smp/jam, sore hari 1826 smp/ jam dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,62 pagi hari, 0,19 pada siang hari, dan 0,54 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,62 dan berada pada peringkat 28 dari 130 ruas yang dikaji. Sedangkan ruas jalan yang memiliki angka derajat kejenuhan terendah yaitu pada ruas jalan Bantul-Girijati dengan volume yang melintas pada ruas jalan tersebut pada jam puncak pagi 71 smp/jam, jam puncak siang 72 smp/jam, jam puncak sore 109 smp/jam, kecepatan arus bebas 58,03 km/jam, kapasitas pada pagi hari 2794 smp/jam, siang hari 2736 smp/jam, sore hari 2794 smp/ jam dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,03 pagi hari, 0,03 pada siang hari, dan 0,04 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,04 dan berada pada peringkat 128 dari 130 ruas yang dikaji.

e. Kota Yogyakarta

Perangkingan berdasarkan hasil analisis 130 ruas yang dikaji pada studi evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang di Wilayah DIY. Berdasarkan hasil ranking diatas dapat disimpulkan untuk ruas jalan yang memiliki angka derajat kejenuhan tertinggi di Kabupaten Gunungkidul yaitu pada ruas jalan KH Ahmad Dahlan dengan volume yang melintas pada ruas jalan tersebut pada jam puncak pagi 2513 smp/jam, jam puncak siang 2131 smp/jam, jam puncak sore 2668 smp/jam, kecepatan arus bebas 51,44 km/jam, kapasitas pada pagi hari 3054 smp/jam, siang hari 3110 smp/jam, sore hari 3008 smp/ jam dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,82 pagi hari, 0,69 pada siang hari, dan 0,89 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,89 dan berada pada peringkat 3 dari 130 ruas yang dikaji. Sedangkan ruas jalan yang memiliki angka derajat kejenuhan terendah yaitu ruas jalan Pasar Kembang dengan volume yang melintas pada ruas jalan tersebut pada jam puncak pagi 415 smp/jam, jam puncak siang 533 smp/jam, jam puncak sore 709 smp/jam, kapasitas pada pagi hari 3143 smp/jam, siang hari 3143 smp/jam, sore hari 3143 smp/ jam dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,13 pagi hari, 0,17 pada siang hari, dan 0,23 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,23 dan berada pada peringkat 97 dari 130 ruas yang dikaji.

Dari hasil analisis didapatkan bahwa DS tertinggi secara umum terjadi pada jam puncak pagi sekitar pukul 06.45-07.45 dan jam puncak sore rata-rata pada pukul 16.15-17.15. Data pada jam puncak tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar ruas jalan propinsi di DIY berada pada tingkat pelayanan C dan D dimana pada tingkat pelayanan tersebut arus dari stabil menuju tidak stabil dan kecepatan cenderung mulai melambat.

Kondisi tersebut mengakibatkan waktu tempuh menjadi lebih lama, peningkatan emisi gas buang, inefisiensi ekonomi, dan peningkatan kondisi stress pengguna jalan. DS pada jam puncak pagi dan diakibatkan oleh banyaknya kendaraan yang melakukan mobilitas di ruas jalan untuk melakukan aktivitas bepergian seperti ke sekolah ataupun bekerja dan sebaliknya. Pada wilayah Kota Yogyakarta juga memiliki hambatan samping tinggi hingga sangat tinggi dimana hambatan samping ini merupakan dampak terhadap kinerja lalu lintas dari aktivitas samping segmen jalan. Aktivitas yang terjadi di samping jalan sangat berpengaruh terhadap kinerja lalu lintas, dan paling berpengaruh pada kapasitas dan kinerja jalan.

Tabel 2-181 Prioritas Penanganan Ruas Jalan Berdasarkan Peringkat Kinerja terburuk

No	Ruas Jalan	Wilayah	Derajat Kejenuhan			Ranking
			Pagi	Siang	Sore	
1	Jalan Gedongkuning-Wonocatur	Bantul	0,72	0,70	0,73	12
2	Jalan Dayakan-Pengasih	Kulon Progo	0,50	0,32	0,64	24
3	Jalan Yogyakarta-Kaliurang	Sleman	0,76	0,59	0,90	1
4	Jalan Yogyakarta-Kebonagung 1 (Depan Giant Swalayan)	Sleman	0,49	0,50	0,90	1
5	Jalan Bibal-Panggang	Gunungkidul	0,62	0,19	0,54	28
6	Jalan KH Ahmad Dahlan	Kota Yogyakarta	0,82	0,69	0,89	3

Sumber: data diolah (2022)

DS yang tinggi dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya peningkatan kapasitas jalan yang sangat rendah, dan peningkatan volume kendaraan yang dipicu oleh tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan berakibat pada masih rendahnya animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

Manajemen lalu lintas dilakukan untuk mengatasi permasalahan DS yang tinggi. Namun penyelenggaraan ATCS yang sudah tersedia di DIY belum bersinergi dengan baik dalam hal pengelolaan karena masih berbasis kewilayahan. ATCS (*Area Traffic Control System*) adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimisasi dan koordinasi lampu lalu lintas disetiap persimpangan jalan. Pada saat ini ATCS yang terhubung dengan control room di Dinas Perhubungan masih sebatas pemantauan dan belum pada fungsi pengaturan dan pengendalian. Fungsi pengaturan dan pengendalian dilakukan dengan meningkatkan ATCS menjadi ATMS (*Advanced Traffic Management Systems*) sebagai bagian dari ITS (*Intelligent transportation system*).

Akibat manajemen lalu lintas yang belum optimal diperlukan suatu rekayasa lalu lintas sebagai upaya untuk menurunkan DS. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas

pada beberapa kawasan/jalan telah memberikan signifikan namun masih terdapat beberapa ruas yang belum dapat dilaksanakan secara tuntas dan memberikan hasil optimum.

2) Penggunaan Angkutan umum lebih rendah dari penggunaan kendaraan pribadi.

Secara sistem, layanan angkutan umum sudah tersedia mulai dari Angkutan Perdesaan dalam propinsi, AKDP dan angkutan perkotaan. Kinerja sistem layanan ini belum memberikan hasil yang menggembirakan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kondisi saat ini tidak terdapat layanan angkutan perdesaan dalam provinsi yang melayani wilayah DIY di 5 kabupaten kota. Berdasarkan hasil studi evaluasi Kinerja Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi pada tahun 2021 terdapat potensi penanganan angkutan perdesaan provinsi yang terdiri dari trayek:
 - Imogiri – Panggang – Parangtritis
 - Jogja – Imogiri
 - Jogja – Parangtritis
 - Gamping – Sentolo – Wates – YIA
 - Godean – Terminal Kenteng – Dekso – Kalibawang - Samigaluh
- b. Kondisi di lapangan AKDP hanya beroperasi secara terbatas dari trayek yang telah ditetapkan karena pertimbangan keekonomisan. Operator harus mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi dan tidak sepadan dengan pendapatan.

Berdasarkan hasil studi evaluasi Kinerja Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi pada tahun 2021, dari 45 Trayek yang terdaftar dalam SK Gubernur hanya terdapat 5 trayek yang beroperasi secara rutin dan trayek tersebut dilayani oleh Damri melalui intervensi Pemerintah Pusat.

Tabel 2-182 Trayek AKDP yang terlayani di DIY Tahun 2020 - 2023

NO	TRAYEK		Terlayani				Status
			2020	2021	2022	2023	
1	51	Jogja – Wonosari	1	1	1	1	Terlayani
2	51	Jogja – Imogiri – Panggang	1	1	1	1	Terlayani
3	52,A	Jogja – Paris – Panggang	1	1	1	1	Terlayani
4	61	Jogja – Imogiri	1	1	1	1	Terlayani
5	62	Jogja – Parangtritis	1	1	1	1	Terlayani

2-534

NO	TRAYEK		Terlayani				Status
			2020	2021	2022	2023	
6	62,A	Jogja - Imogiri - Paris	1	1	1	1	Terlayani
7	63	Jogja - Bantul - Samas	1	1	1	1	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 15)
8	64,A	Jogja - Bantul - Pandansimo	1	1	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 15)
9	64,B	Jogja - Bantul - Sorobayan	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 15)
10	71	Jogja - Wates	1	0	0	0	Tidak Operasi
11	71,A	Jogja - Wates - Kutogiri	0	0	0	0	Tidak Operasi
12	71,B	Jogja - Wates - Kalibiru	0	0	0	0	Tidak Operasi
13	72	Jogja - Srandakan - Bantul - Wates	1	1	1	1	Terlayani
14	72,A	Jogja - Srandakan - Palbapang - Wates	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 15)
15	72,B	Jogja - Srandakan - Glagah - Wates	0	0	0	0	Tidak Operasi
16	73,A	Jogja - sentolo - Brosot	0	0	0	0	Tidak Operasi
17	73,B	Jogja - Bantul - Brosot	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 15)
18	74,A	Jogja - Wates - Toyan - Congot	0	0	0	0	Tidak Operasi
19	74,B	Jogja - Wates - Glagah - Congot	0	0	0	0	Tidak Operasi
20	75	Jogja - Wates - Kokap	0	0	0	0	Tidak Operasi
21	75,A	Jogja - Wates - Sangon	0	0	0	0	Tidak Operasi
22	75,B	Jogja - Wates - Tangkisan	0	0	0	0	Tidak Operasi
23	76	Jogja - Godean - Girimulyo	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 12)

NO	TRAYEK		Terlayani				Status
			2020	2021	2022	2023	
24	76,A	Jogja - Godean - Keji - Girimulyo	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 12)
25	76,B	Jogja - UGM - Godean - Girimulyo	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 12)
26	77	Jogja - Godean - Dekso	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 12)
27	77,B	Jogja - Godean Nanggulan - Dekso	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 12)
28	78	Jogja - sentolo - Samigaluh	0	0	0	0	Tidak Operasi
29	78,A	Jogja - sentolo - Dekso - Samigaluh	0	0	0	0	Tidak Operasi
30	79 A	Jogja - Sentolo - Kalibawang	0	0	0	0	Tidak Operasi
31	79,B	Jogja - Gamping - Sentolo - Kalibawang	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 7,8,10
32	81	Jogja - Jombor - Tempel	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 2A,2B,5A,5B,8)
33,	82	Jogja - Kaliurang	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 14)
34	82,A	Kaliurang - UGM - Condongcatur	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 1B,2A,3B,5A)
35	83	Jombor - UGM - Condat - Jogja	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja

2-536

NO	TRAYEK		Terlayani				Status
			2020	2021	2022	2023	
							Trayek 1B,2A,3B,5A)
36	84	Jombor - UGM - Prambanan	1	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 1A,3A)
37	91,A	Lingkar 1 - Jogja - Gamping - Tempel - Prambanan - Jogja	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja Trayek 12)
38	91,B	Lingkar 1 - Jogja - Prambanan - Tempel - Gamping - Jogja	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja
39	92,A	Lingkar 2 - Jogja - Godean - Tempel - Janti - Jogja	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja
40	92,B	Lingkar 2 - Jogja - Janti - Tempel - Godean - Jogja	0	0	0	0	terlayani oleh Trans Jogja
41	93	Jogja - Bandara YIA	1	1	1	1	Terlayani oleh DAMRI
42	94	Pakem - Tempel - Bandara YIA	0	0	0	0	Sleman - Bandara YIA terlayani oleh DAMRI
43	95	Palbapang - Bandara YIA	1	1	1	1	Terlayani oleh DAMRI
44	96	Terminal Jombor - Bandara YIA	1	1	1	1	Terlayani oleh DAMRI
45	97	Stasiun Tugu - Bandara YIA	1	1	1	1	Terlayani oleh DAMRI
Yang terlayani Angkutan			15	13	12	12	
Jumlah Trayek			45	45	45	45	
Rasio			0,333	0,289	0,267	0,267	

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2023

- c. Layanan angkutan perkotaan di wilayah perkotaan Yogyakarta saat ini didukung oleh Bus Trans Jogja dan layanan Teman Bus (*Buy The Service*).

Secara total angkutan perkotaan melayani berapa trayek yaitu 18 jalur yang diselenggarakan oleh Pemda DIY dan, 3 jalur (Teman Bus trayek 12, 13, 14). Pada tahun 2022 jumlah armada Trans Jogja yang siap operasi adalah 116 sedangkan yang siap guna operasi sebanyak 128 Armada. Layanan operasional Trans Jogja dimulai pada pukul 06.00 WIB – 21.30 WIB dan selama pandemic mengalami pengurangan waktu operasional dari pukul 06.00 WIB – 19.00 WIB. Kemudian untuk layanan *Buy The Service* (Teman bus) dengan Koridor Ngaglik 16 Bus, Godean 10 Bus dan Ngemplak 14 Bus dengan cadangan sebanyak 4 Bus. Berdasarkan data Kinerja Angkutan Perkotaan Transjogja, dari layanan tersebut di atas didapatkan hasil load faktor sebesar 10,13% untuk hari libur dan 9,72% untuk hari kerja.

Capaian SPM Trans Jogja berdasarkan variabel- variabel yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Capaian Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja sebesar 94.20% (Hasil Studi Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan Tahun 2022).

Capaian tersebut diukur dari 6 indikator SPM yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. Realisasi indikator SPM meliputi:

- a. Indikator Keamanan telah tercapai 100%
- b. Indikator Keselamatan telah tercapai 95,7%.
Indikator Keselamatan belum tercapai pada aspek ketersediaan sarana bus seperti peralatan keselamatan dan faasilitas kesehatan (dari bobot 33% tercapai 29,7%)
- c. Indikator Kenyamanan telah tercapai 100%
- d. Indikator Keterjangkauan telah tercapai 100%
- e. Indikator Kesetaraan telah tercapai 100%
- f. Indikator Keteraturan telah tercapai 69,5%.
Indikator Keteraturan belum tercapai pada aspek waktu berhenti di halte(max 60 detik), Headway (paling lama 15 menit saat peak 30 menit) serta usia kendaraan (max 20 tahun atau sesuai kondisi daerah)

Simpul transportasi dan fasilitas pendukung masih memerlukan pengembangan dalam rangka mendukung pelayanan angkutan umum secara menyeluruh. Pengembangan *park and ride* sebagai bagian dari

penyelenggaraan multimoda di DIY merupakan bagian dari *push strategy* untuk menumbuhkan minat orang menggunakan angkutan umum.

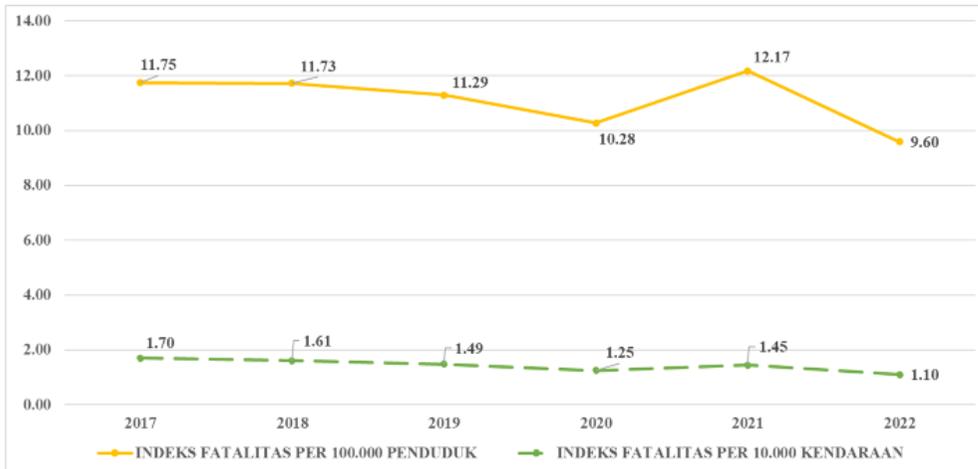
3) **Indek Fatalitas Kecelakaan di DIY masih lebih tinggi dari target nasional.**

Berdasarkan target RUNK 2021 – 2024, diharapkan setelah implementasi dari Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan angka fatalitas korban kecelakaan akan menurun 80% pada tahun 2040 jika dibandingkan dengan jumlah fatalitas korban tanpa penanganan. Berdasarkan data kecelakaan DIY tahun 2017 – 2021, tidak dapat dibuat grafik trend maupun target penurunan jumlah fatalitas korban kecelakaan yang sesuai dengan RUNK 2021 – 2040. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang berimbas pada penurunan jumlah kecelakaan dan angka fatalitas korban akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam pencapaian Target Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu indeks fatalitas per 10.000 kendaraan dan indeks fatalitas per 100.000 penduduk. Kedua indeks fatalitas tersebut dari tahun 2017 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-183 Indeks Fatalitas Kecelakaan di DIY tahun 2017 - 2022

No	Tahun	Meninggal Dunia	Jumlah Penduduk	Indeks Fatalitas Per 100.000 Penduduk	Jumlah Kendaraan	Indeks Fatalitas Per 10.000 Kendaraan
1	2017	442	3,762,200	11.75	2,603,181	1.7
2	2018	446	3,802,872	11.73	2,766,289	1.61
3	2019	434	3,842,932	11.29	2,919,609	1.49
4	2020	377	3,668,719	10.28	3,020,847	1.25
5	2021	452	3,712,896	12.17	3,126,443	1.45
6	2022	361	3,761,870	9.6	3,274,030	1.1

Sumber: Dokumen Rencana Aksi Keselamatan DIY, 2023



Sumber: Dokumen Rencana Aksi Keselamatan DIY, 2023

Gambar 2-95 Grafik Indeks Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas di DIY Tahun 2017 - 2022

Tabel 2-184 Data Kecelakaan Lalu Lintas di DIY Tahun 2016 – 2022

Tahun	Kasus Kecelakaan	Tingkat Fatalitas			Kerugian Material
		Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	
2016	3.808	544	12	4.883	2.221.838.000
2017	4.313	398	49	5.963	2.879.731.000
2018	4.729	526	16	6.698	2.786.635.000
2019	6.113	498	7	7.706	2.722.255.008
2020	5.016	437	1	6.341	2.344.035.500
2021	5.350	452	3	6.390	2.393.687.000
2022	5.420	97	28	3.274	23.867.402.885

Sumber: Dokumen Rencana Aksi Keselamatan DIY diolah, 2023

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan di DIY adalah:

a. Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas.

b. Faktor Kendaraan

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai akibat kondisi teknis yang tidak laik jalan ataupun penggunaannya tidak sesuai ketentuan. Sebagai contoh masih ditemukan pelanggaran terkait *Over Dimension Over Loading* (ODOL)

c. Faktor kondisi lingkungan fisik

Faktor lingkungan fisik merupakan elemen ekstristik yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Kondisi jalan dan cuaca tertentu dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu-lintas, seperti jalan basah/licin, jalan rusak, tanah longsor, dan lain sebagainya.

Menurut data yang diperoleh dari BPTD Wilayah X Provinsi Jateng dan DIY, pada wilayah DIY terdapat 3 (tiga) satuan pelaksana unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) yaitu Kulwaru (Kulon Progo), Kalitirto (Sleman), dan Taman Martani (Sleman). Dapat dilihat pada tabel dibawah ini, tentang hasil giat penegakan hukum angkutan orang dan angkutan barang tahun 2020-2022.



Sumber: Dokumen Rencana Aksi Keselamatan DIY, 2023

Gambar 2-96 Hasil Giat Penegakan Hukum Angkutan Orang dan Angkutan Barang 2020 - 2022

4) Tingkat emisi dari sektor transportasi yang masih tinggi pada kawasan tertentu

Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor dan transportasi darat di DIY terbukti menjadi penyebab meningkatnya polusi udara. Sebab, penyumbang terbesar emisi di Yogyakarta berasal dari transportasi darat kendaraan bermotor. Adapun beberapa permasalahan dalam menyumbang tingginya emisi di DIY adalah:

- Pertumbuhan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil tidak dapat dikendalikan serta tingkat emisi yang berada di atas ambang batas.
- Penyelenggaraan angkutan *non motorized* dan pedestrianisasi masih terbatas. Penyediaan fasilitas pejalan kaki belum memenuhi standar serta banyak ruang jalan pejalan kaki yang diambil haknya. Layanan angkutan tradisional terdiri dari dua jenis moda angkutan yaitu Becak dan Andong dengan fungsi layanan sebagai angkutan pariwisata. Pada kondisi saat ini angkutan tradisional yang berada di wilayah DIY untuk andong sebesar 462 Andong dan 336 becak di kawasan sumbu Filosofi.
- Layanan angkutan umum yang melayani kawasan belum menjadi prioritas dan masih berbahan bakar fosil.
- Penyediaan TKP dalam kawasan yang mendukung pedestrianisasi masih sangat terbatas.

5) Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B

Terdapat 2 (dua) Terminal Penumpang Tipe B yang berada dibawah kewenangan Pemerintah daerah DIY yakni Terminal Jombor dan Wates. Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B pada kedua terminal tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-185 Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B Wates Tahun 2022 - 2023

TERMINAL WATES							
FASILITAS TERMINAL PENUMPANG (sesuai PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan)				2022		2023	
				KETERSEDIAAN	NILAI	KETERSEDIAAN	NILAI
		FASILITAS UTAMA					
1		Jalur Berangkat		v	1	v	1
2		Jalur Kedatangan		v	1	v	1
3		Ruang Tunggu Penumpang, Pengantar, dan /atau Penjemput		v	1	v	1
4		Tempat naik turun penumpang		v	1	v	1
5		Tempat parkir kendaraan		v	1	v	1
6		Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup		v	1	v	1
7		Perlengkapan jalan		v	1	v	1
8		Media informasi		v	1	v	1
9		Kantor penyelenggara Terminal		v	1	v	1
10		Loket penjualan tiket		v	1	v	1
11		Pelayanan pengguna Terminal dari pengusaha bus		v	1	v	1
12		Outlet pembelian tiket secara online		v	1	v	1
13		Jalur pejalan kaki yang ramah terhadap orang dengan kebutuhan khusus		v	1	v	1
14		Tempat berkumpul darurat		v	1	v	1
		FASILITAS PENUNJANG					
15		Fasilitas penyanggah disabilitas dan ibu hamil atau menyusui		v	1	v	1

TERMINAL WATES							
FASILITAS TERMINAL PENUMPANG (sesuai PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan)				2022		2023	
				KETERSEDIAAN	NILAI	KETERSEDIAAN	NILAI
16	Pos Kesehatan			v	1	v	1
17	Fasilitas Kesehatan			v	1	v	1
18	Fasilitas peribadatan			v	1	v	1
19	Pos polisi			v	1	v	1
20	Alat pemadam kebakaran			v	1	v	1
21	Fasilitas Umum	-	Toilet	v	1	v	1
22		-	Rumah makan	v	1	v	1
23		-	Fasilitas telekomunikasi	v	1	v	1
24		-	Tempat istirahat awak kendaraan	-	-	-	-
25		-	Fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan	v	1	v	1
26		-	Fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang	-	-	-	-
27		-	Fasilitas kebersihan	v	1	v	1
28		-	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	-	-	-	-
29		-	Fasilitas perdagangan, pertokoan;	v	1	v	1

2-544

TERMINAL WATES								
FASILITAS TERMINAL PENUMPANG (sesuai PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan)					2022		2023	
					KETERSEDIAAN	NILAI	KETERSEDIAAN	NILAI
	30		-	Fasilitas penginapan	-	-	-	-
	31		-	Area merokok	v	1	v	1
	32		-	Fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM)	-	-	-	-
	33		-	Fasilitas pengantar barang (Trolley dan tenaga angkut)	-	-	-	-
	34		-	Fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet	v	1	v	1
	35		-	Ruang anak-anak	-	-	-	-
	36		-	Media pengaduan layanan	v	1	v	1
	37		-	lain-lain (Charger Station)	v	1	v	1
		JUMLAH				30		30
		Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B Terminal Wates			30/37	81,08 %	30/37	81,08 %

Tabel 2-186 Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B Jombor Tahun 2022 - 2023

TERMINAL JOMBOR							
FASILITAS TERMINAL PENUMPANG (sesuai PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan)				2022		2023	
				KETERSEDIAAN	NILAI	KETERSEDIAAN	NILAI
		FASILITAS UTAMA					
1		Jalur Berangkat		v	1	v	1
2		Jalur Kedatangan		v	1	v	1
3		Ruang Tunggu Penumpang, Pengantar, dan /atau Penjemput		v	1	v	1
4		Tempat naik turun penumpang		v	1	v	1
5		Tempat parkir kendaraan		v	1	v	1
6		Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup		v	1	v	1
7		Perlengkapan jalan		v	1	v	1
8		Media informasi		v	1	v	1
9		Kantor penyelenggara Terminal		v	1	v	1
10		Loket penjualan tiket		v	1	v	1
11		Pelayanan pengguna Terminal dari pengusaha bus		v	1	v	1
12		Outlet pembelian tiket secara online		v	1	v	1
13		Jalur pejalan kaki yang ramah terhadap orang dengan kebutuhan khusus		v	1	v	1

2-546

TERMINAL JOMBOR							
FASILITAS TERMINAL PENUMPANG (sesuai PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan)				2022		2023	
				KETERSEDIAAN	NILAI	KETERSEDIAAN	NILAI
14	Tempat berkumpul darurat			v	1	v	1
	FASILITAS PENUNJANG			-	-	-	-
15	Fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui			v	1	v	1
16	Pos Kesehatan			v	1	v	1
17	Fasilitas Kesehatan			-	-	-	-
18	Fasilitas peribadatan			v	1	v	1
19	Pos polisi			v	1	v	1
20	Alat pemadam kebakaran			v	1	v	1
21	Fasilitas Umum	-	Toilet	v	1	v	1
22		-	Rumah makan	v	1	v	1
23		-	Fasilitas telekomunikasi	v	1	v	1
24		-	Tempat istirahat awak kendaraan	-	-	-	-
25		-	Fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan	v	1	v	1
26		-	Fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang	-	-	-	-
27		-	Fasilitas kebersihan	v	1	v	1

TERMINAL JOMBOR							
FASILITAS TERMINAL PENUMPANG (sesuai PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan)				2022		2023	
				KETERSEDIAAN	NILAI	KETERSEDIAAN	NILAI
28	-	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	-	-	-	-	
29	-	Fasilitas perdagangan, pertokoan;	v	1	v	1	
30	-	Fasilitas penginapan	-	-	-	-	
31	-	Area merokok	v	1	v	1	
32	-	Fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM)	-	-	-	-	
33	-	Fasilitas pengantar barang (Trolley dan tenaga angkut)	-	-	-	-	
34	-	Fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet	v	1	v	1	
35	-	Ruang anak-anak	-	-	-	-	
36	-	Media pengaduan layanan	v	1	v	1	
37	-	lain-lain (Charger Station)	v	1	v	1	

2-548

TERMINAL JOMBOR						
FASILITAS TERMINAL PENUMPANG (sesuai PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan)			2022		2023	
			KETERSEDIAAN	NILAI	KETERSEDIAAN	NILAI
		JUMLAH		29		29
		Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B Terminal Jombor	29/37	78,38 %	29/37	78,38 %

Sumber: Dishub DIY 2023

2.3.2.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

1.) Ketimpangan tingkat literasi digital masyarakat masih tinggi

Masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi digital yang berbeda berdasarkan karakter wilayah. Secara umum, skor Indeks Literasi Digital per provinsi ada di rentang 3,71 hingga 3,18. Skor tertinggi dimiliki oleh DIY dengan skor 3,71. Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 mengacu kepada kerangka kerja yang tercantum dalam *Roadmap Literasi Digital 2020-2024*. Kerangka kerja ini digunakan sebagai basis dalam merancang program dan kurikulum Program Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia 2020-2024. Literasi digital tersebut diukur merujuk kepada pilar digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture.

Berdasarkan survei Status Literasi Digital Indonesia 2021 yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, di daerah perkotaan memiliki indeks literasi digital tinggi sebesar 52,5% dan indeks literasi digital 47,5%. Sedangkan di daerah perdesaan indeks literasi digital tinggi sebesar 49,8% dan indeks literasi digital 50,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa, terdapat selisih persentase indeks literasi digital tinggi di perkotaan sebesar 2,7 persen dibandingkan dengan perdesaan alias kawasan rural. Sebagai daerah dengan roda perekonomian yang relatif lebih maju, literasi digital masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Demikian juga yang terjadi di DIY, literasi masyarakat di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan.

Untuk memperkecil ketimpangan tersebut, perlu dilakukan program kegiatan yang mendukung peningkatan literasi digital masyarakat terutama di perdesaan, sehingga seluruh masyarakat dapat teredukasi dan memperoleh akses atas informasi publik, layanan dasar dan program strategis Pemerintah.

2.) Belum optimalnya integrasi dan kolaborasi rata kelola SPBE antar OPD

Dalam domain Tata kelola SPBE masih diperlukan peningkatan dalam hal integrasi dan kolaborasi antar OPD. Data jumlah aplikasi tahun 2022 tercatat lebih dari 400, diperlukan penataan aplikasi berdasarkan *clustering*. Terdapat beberapa aplikasi yang melakukan penggandaan dalam proses bisnis. Adanya penataan aplikasi diharapkan peningkatan dalam hal integrasi data dan kolaborasi antar Perangkat Daerah. Penataan aplikasi Pemda DIY dilakukan dengan rekomendasi TIK yang dapat memberikan arah standarisasi dalam pengembangan dan pemeliharaan. Domain Tata kelola SPBE diperlukan dalam memwadahi integrasi seluruh layanan dari Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pola yang sudah berjalan saat ini yang sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk itu dibutuhkan peta rencana arsitektur terstandar yang dapat mengintegrasikan seluruh service/layanan dari OPD dengan mempertimbangkan pola yang sudah berjalan saat ini, akan tetapi peta rencana arsitektur terkait dengan kebijakan pusat sebagai acuan sampai saat ini belum.

3.) Tantangan dalam transformasi digital penyelenggaraan Pemerintahan

Proses mempersiapkan perubahan birokrasi dengan mempergunakan berbagai perkembangan teknologi mutakhir seperti teknologi informasi dan komunikasi, mahadata (*big data*), dan kecerdasan artifisial (*artificial intelligent*). Ego sektoral masih terjadi, fragmentasi pemerintahan masih berlangsung. Variasi dan gradasi kapasitas dan aksesibilitas internal birokrasi dan masyarakat atas teknologi informasi masih beragam. Pemerintah dalam setiap proses pengambilan keputusan diperlukan langkah birokrasi yang cukup panjang. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan keputusan menjadi lambat. Untuk itu diperlukan agile organization yang mendorong pemerintah lebih adaptif pada lingkungan

strategis, dan tantangan demokratisasi pemerintahan, termasuk pada aspek keterbukaan informasi publik.

4.) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang belum handal

Pemda DIY tercatat memiliki 279 unit kerja. Unit kerja yang terhubung ke jaringan intra pemerintah daerah menggunakan media fiber optik sebanyak 194 unit kerja, media *wireless* sebanyak 74 unit kerja, 1 unit kerja menggunakan media *Virtual Private Network (VPN)* dan 10 unit kerja masih belum terkoneksi dengan jaringan intra Pemda DIY. Dengan adanya unit kerja yang masih menggunakan media *wireless* atau bahkan belum ada jaringan sama sekali, menjadikan komunikasi antar unit kerja terganggu. Apalagi di dalamnya masih terdapat 29 SMAN/SMKN yang masih menggunakan media jaringan *wireless*, tentu saja menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi tidak optimal. Unit kerja yang masih menggunakan jaringan *wireless* memiliki isu kapasitas, dikarenakan media itu hanya dapat dilewati bandwidth dengan kapasitas terbatas, untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas jaringan dengan mengganti yang masih menggunakan media *wireless* menjadi media fiber optik. Selain itu sistem kabel fiber optik Pemda DIY yang belum menggunakan topologi ring membuat jaringan kabel memiliki kerentanan. Karena saat terjadi insiden kabel putus, maka unit kerja di sepanjang jalur akan mengalami gangguan. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan kehandalan jaringan dengan melakukan rekonfigurasi jaringan fiber optik Pemda DIY agar mempunyai *backup link* yang handal dengan tetap memperhatikan peta arsitektur SPBE Nasional.

5.) Akselerasi dan pematapan integrasi layanan publik prioritas dalam portal layanan terpadu digital

Pada tahun 2024 dilakukan proses integrasi 9 jenis layanan publik unggulan atau prioritas pada portal layanan terpadu digital. Hal tersebut perlu dilanjutkan, dipercepat, dan dimantapkan pada jenis layanan publik lainnya, serta penyelarasan dan pengintegrasian layanan sejenis di kabupaten/kota guna mewujudkan kualitas pelayanan publik yang lebih prima.

2.3.2.2.11 Urusan Koperasi. Usaha Kecil. dan Menengah

1.) Masih rendahnya kontribusi volume usaha koperasi

Sejak tahun 2021, setelah pandemi Covid-19 tahun 2020, volume usaha koperasi memang menunjukkan kecenderungan peningkatan. Volume usaha koperasi yang pada tahun 2023 mencapai Rp 4,8 triliun. Namun demikian, jika dibandingkan dengan nilai tambah keseluruhan perekonomian yang tercermin dari nilai PDRB ADHB, proporsi volume usaha koperasi tersebut masih relatif rendah. Kontribusi volume usaha koperasi terhadap PDRB DIY (ADHB) maka peran koperasi masih sebatas 2,69% pada tahun 2023. Bahkan capaian tahun 2023 tersebut relatif lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 3,07%. Pertumbuhan volume usaha koperasi relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian DIY.

2.) Partisipasi anggota dalam pengembangan koperasi masih rendah

Keberlangsungan koperasi sangat tergantung pada partisipasi anggotanya, tingkat partisipasi anggota dapat dilihat dari rutin atau tidaknya penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Berdasarkan data dari Dataku, jumlah koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2023 sekitar 1.061 unit sementara jumlah koperasi aktif sebanyak 1.734 unit. Artinya ada sebanyak 38,81% koperasi yang tidak melaksanakan RAT. Sementara itu, apabila dilihat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jumlah koperasi yang melaksanakan RAT terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 sebanyak 1.323 unit, pada tahun 2020 berkurang mejadi 1.106 unit, pada tahun 2021 berkurang menjadi 1.062 unit, pada tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan menjadi 1.109 unit dan pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 1.061 unit.

3.) Masih rendahnya skala usaha UMKM

Tantangan pengembangan UMKM adalah masih rendahnya skala usaha UMKM terutama untuk usaha mikro dan kecil. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan UMKM dalam aspek keuangan, produksi, pemasaran, teknologi dan informasi, perizinan dan administrasi, kelembagaan, serta SDM. Kondisi tersebut selaras dengan data Survei Industri Kecil dan Menengah yang dirilis oleh BPS tahun 2022, yang menyatakan bahwa jumlah usaha mikro di DIY sebesar 97,29% dari total unit industri. Di sisi lain, sebenarnya peluang untuk peningkatan omset usaha cukup terbuka lebar terutama di tengah kemudahan pelaku usaha untuk mengakses pasar baik lokal, domestik bahkan luar negeri. Walaupun demikian, peluang tersebut juga dibarengi dengan semakin meningkatnya iklim persaingan yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, perlunya mendorong kenaikan skala usaha untuk meningkatkan produktivitas UKM/Industri melalui penguatan sektor industri mikro agar UMKM dapat naik kelas.

2.3.2.2.12 Urusan Penanaman Modal

1.) Masih rendahnya kegiatan investasi di DIY

Nilai investasi di DIY baik PMDN maupun PMA, masih relatif rendah jika dibandingkan dengan capaian di wilayah lain. Menurut data dari BKPM RI, realisasi investasi di DIY pada tahun 2023 dengan rincian PMDN mencapai Rp 5.015,5 miliar dan PMA mencapai 46 Juta US\$. Berdasarkan realisasi tersebut, DIY menempati peringkat 32 untuk PMA dan peringkat 26 untuk PMDN.

Pertumbuhan investasi menjadi aspek penting dalam pembangunan wilayah. Dalam RPJMN 2020-2024, pertumbuhan ekonomi nasional 2020-2024 ditargetkan rata-rata tumbuh 5,7-6,0% dengan investasi diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan tersebut dengan tumbuh 6,6-7,0%. Dengan kondisi tersebut, DIY diharapkan dapat meningkatkan besaran realisasi investasinya terlebih saat ini DIY sudah didukung dengan ketersediaan layanan bandara internasional baru yang potensial untuk mendongkrak aliran barang dan manusia

2.) Penanaman modal yang belum berkualitas

Kualitas investasi masih menjadi sorotan dalam RPJMN 2020-2024. Kegiatan investasi masih belum mampu menyukseskan transformasi struktural perekonomian Indonesia terutama karena kualitas investasi rendah dimana investasi belum sepenuhnya berorientasi ekspor, khususnya untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Transfer teknologi dan pengetahuan dari masuknya PMA yang dapat mendorong inovasi dan diversifikasi produk ekspor belum sepenuhnya terwujud. Sebagian besar investasi masih menasar pasar dalam negeri yang besar dan belum banyak yang berorientasi ekspor. Investasi juga bergeser dari sektor sekunder ke sektor tersier.

Kondisi serupa juga terlihat di DIY. Investasi pada sektor sekunder seperti industri pengolahan cenderung mengalami pelambatan. Kegiatan investasi di DIY beberapa tahun terakhir ditopang oleh sektor tersier terutama kegiatan konstruksi. Investasi pada sektor konstruksi seperti Bandara atau Jaringan Kereta Api memang penting sebagai prasyarat konektivitas antar wilayah dan layanan logistik. Namun demikian, untuk memperkuat struktur perekonomian, investasi pada sektor industri pengolahan perlu menjadi perhatian. Melalui sektor industri manufaktur, komoditas yang dihasilkan sektor primer menjadi bernilai

tambah dan bahkan memberikan peluang untuk kegiatan ekspor. Di sisi lain, saat ini sektor industri pengolahan memiliki serapan tenaga kerja yang cukup signifikan besarnya.

Lebih lanjut, arahan RPJMN 2020-2024 penanaman modal juga mestinya bergeser dari sektor yang berbasis sumber daya alam (*resource base*) ke sektor prioritas nasional seperti energi, industri pengolahan terutama yang berorientasi ekspor, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, serta pendidikan dan pelatihan vokasi.

3.) Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi investor

Untuk mencapai target pertumbuhan investasi baik PMA maupun PMDN, perlu didorong deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan.

Dalam laporan tahunan *Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Center* pada tahun 2024, peringkat daya saing Indonesia di antara negara-negara di dunia meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu dari posisi ke-34 menjadi posisi ke-27. Namun untuk kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia masih berada di bawah Singapura dan Thailand. *IMD World Competitiveness Center (WCC)* menggunakan empat indikator untuk menentukan peringkat, yaitu performa ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Indonesia masih memiliki kelemahan pada ketersediaan infrastruktur, terutama terkait infrastruktur kesehatan dan lingkungan, pendidikan, sains, dan teknologi.

Dalam konteks nasional, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan DIY peringkat ke 4 Indeks Daya Saingnya dengan nilai 3,84. Aspek yang masih kurang di DIY menurut kajian tersebut adalah Pilar Infrastruktur dan Pilar Sistem Keuangan.

2.3.2.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1.) Masih tingginya pemuda yang mengalami masalah kesehatan.

Berdasarkan indikator Indeks Pemberdayaan Pemuda (IPP) 2022, proporsi pemuda korban kejahatan mencapai 2,37% yang merupakan terbesar se-Indonesia. Selain itu, proporsi pemuda yang memiliki

2-554

keluhan kesehatan 12,04% dan 22,46% pemuda adalah perokok. Sedangkan data Susenas 2023 menunjukkan bahwa 86,06 orang yang memiliki jaminan kesehatan.

2.) Masih perlu ditingkatkannya wirausaha muda dan kompetensi tenaga kerja pemuda

Kontribusi pemuda dalam wirausaha sangat diharapkan dalam menyongsong agenda Indonesia maju pada tahun 2045. Persentase wirausaha pemuda di DIY menurut data Kemenpora 2023 sebanyak 64,59% sehingga masih perlu didorong. Sementara itu, kompetensi kerja pemuda dapat dilihat dari kategori pekerjaan *white collar* atau pekerja profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha. Tahun 2023 proporsi pemuda dengan kategori *white collar* di DIY baru sebesar 25,46%. Sedangkan dalam kategori pekerjaan *blue collar* berkaitan dengan teknis dan melibatkan fisik mencapai 74,54%. Artinya, kompetensi tenaga kerja profesional pemuda masih perlu ditingkatkan.

3.) Pengangguran di Usia Muda

Permasalahan yang dialami pemuda dalam sektor ketenagakerjaan adalah pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda di DIY menurut data Sakernas 2023 sebesar 8,52%. TPT pemuda DIY lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan, dan secara gender lebih didominasi laki-laki.

4.) Minimnya Sarana Olahraga

Sarana olahraga merupakan salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan bakat dan prestasi masyarakat di bidang olahraga. Dilihat dari rasio ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan salah satunya untuk olahraga, menurut Laporan Nasional *Sport Development Index* (SDI) Kemenpora Tahun 2022 DIY memiliki indeks ruang terbuka sebesar 0,247 urutan terbawah nomor sepuluh secara nasional.

5.) Budaya berolahraga masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

Budaya olahraga masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Perkembangan era Industri 4.0 membawa dampak dalam cara belajar, cara bekerja dan gaya hidup *Sedentary* atau kurang gerak. Hal ini berdampak pada peningkatan risiko obesitas, dan gangguan penyakit. Tingkat partisipasi olahraga di DIY masih cukup rendah. Hasil SDI Kemenpora (2022) menyebutkan angka partisipasi olah raga di DIY

sebesar 25,33% masih di bawah rata-rata masih di bawah rerata nasional 32,83%.

2.3.2.2.14 Urusan Statistik

1.) Belum terpenuhinya 4 prinsip menuju satu data Indonesia

Berdasarkan pelaksanaan empat prinsip menuju satu data Indonesia, dalam pelaksanaan penyelenggaraan satu data Indonesia di DIY (data pembangunan daerah) pada proses pengumpulan data-data sektoral terutama untuk usulan data-data baru, ada beberapa data yang masih belum memenuhi 4 prinsip satu data Indonesia (kode referensi, metadata, standar data dan interoperabilitas) sehingga diperlukan upaya untuk memenuhi 4 prinsip satu data Indonesia tersebut dengan cara verifikasi dan validasi data setiap 3 bulan sekali yang dilakukan dengan OPD statistik sektoral dan didampingi BPS selaku Pembina data.

2.) Pemanfaatan informasi geospasial dalam mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah masih belum maksimal

Dasar pembentukan Simpul Jaringan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533). Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial di DIY masih banyak kendala yaitu minimnya sarana prasarana baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk mendukung pengelolaan geospasial, selain itu keterbatasan SDM yang berkompeten (berlatar belakang pendidikan ilmu kebumihan seperti Geografi, Geodesi, Penataan Ruang, dan lain-lain) dalam pengelolaan geospasial baik di level OPD dan Bappeda DIY sebagai pembina data geospasial.

2.3.2.2.15 Urusan Kebudayaan

1.) Proses Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya menghadapi ancaman perkembangan wilayah

Lokasi sebagian besar kawasan cagar budaya yang berada di wilayah urban Kota Yogyakarta dapat mengancam eksistensi cagar budaya karena dampak pengembangan kota. Beberapa permasalahan yang dapat berpengaruh dalam menjaga citra visual asli kawasan antara lain terkait transportasi, jaringan jalan, pemukiman, dan pendirian

bangunan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan keseimbangan antara daya dukung lingkungan dengan beban kawasan. Sarana prasarana dapat berpengaruh positif saat berfungsi sebagai fasilitas pelengkap yang penting bagi perekonomian dan pariwisata. Akan tetapi, sarana prasarana ini dapat mengancam kelestarian cagar budaya jika kemunculannya tidak terkendali. Permasalahan lain juga terkait dengan keberadaan beberapa kawasan cagar budaya seperti Sokoliman, Ambarketawang, Ambarbinangun, justru terletak jauh dari berbagai dampak pembangunan kota tetapi cenderung kurang diperhatikan karena keletakannya yang relatif terisolasi.

2.) Perlindungan nilai-nilai budaya khas DIY sebagai panutan dan jatidiri masyarakat Yogyakarta

Dialektika antara globalisme dan lokalisme sesungguhnya telah menjadi sejarah panjang bagi semua negara di dunia, baik di dunia Timur maupun di dunia Barat. Globalisme yang diletakkan sebagai tesa dan lokalisme yang diletakkan sebagai antitesa, telah melahirkan baik berupa ketegangan-ketegangan hubungan antara keduanya maupun kompromi-kompromi atau sintesa yang lahir di antara keduanya; sintesa yang terjadi dapat berupa perpaduan harmoni antara keduanya maupun kebaruan dan pembaruan yang dilahirkan oleh keduanya. Memang sulit menandai yang lebih dulu antara globalisme dan globalisasi, namun keduanya jelas sekali merupakan ujung sejarah dari suatu perjalanan dan perjumpaan yang panjang. Kebudayaan khas DIY juga tidak dapat mengelak dari ayunan gelombang globalisasi, DIY kaya akan nilai-nilai adi luhung yang merupakan kearifan lokal yang bersumber dari Kraton Yogyakarta dan Puro Pakulaman. Namun, kehidupan masyarakat yang dinamis seiring dengan meningkatnya intensitas hubungan dengan masyarakat lain, informasi yang semakin terbuka, dan tuntutan kebutuhan telah mengakibatkan terjadi pergeseran nilai budaya dalam masyarakat DIY. Sebagian anggota masyarakat mampu beradaptasi dan mengadopsi berbagai nilai budaya luar yang dipandang baik sebagai salah satu acuan dalam menjalankan kehidupan. Namun, terdapat pula anggota masyarakat yang hanya mampu mengadopsi kulitnya saja tanpa bisa mengolah esensi nilai yang ada didalamnya. Terakhir, terdapat kelompok yang sama sekali tidak mau menerima perubahan. Adanya kelompok-kelompok yang berbeda ini mengakibatkan terjadinya keragaman perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.

2.3.2.2.16 Urusan Perpustakaan

1.) Masih Belum idealnya ketersediaan koleksi

Menurut data dari DPAD DIY, pada tahun 2023 terdapat total 411.201 koleksi perpustakaan di DIY (Koleksi yang dimiliki oleh Grhatama Pustaka, *Jogja Library Center*, Rumah Belajar Modern, dan Koleksi Digital). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk DIY, rasio ketersediaan koleksi dengan tingkat penduduk per kapita di DIY pada tahun 2023 adalah sebesar 0,12. Jumlah ini belum ideal jika dibandingkan dengan standar IFLA/UNESCO yakni sebesar 1:2 (0,5).

2.) Kualitas penyelenggaraan Perpustakaan masih belum optimal

Persentase perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan di DIY menurut data DPAD DIY pada tahun 2023 baru mencapai 22,9%. Artinya, dari total jumlah perpustakaan di DIY sebanyak 3.813 perpustakaan, baru terdapat 875 perpustakaan yang menerapkan penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan

2.3.2.2.17 Urusan Kearsipan

1.) Jumlah Lembaga yang Menyelenggarakan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar Masih Belum Optimal

Pada capaian kinerja pemerintah daerah Program pembinaan dan pengembangan sistem kearsipan (RPJMD DIY 2022-2027) pada tahun 2023 dari target 110 institusi baru tercapai 86 institusi.

2.) Pengelolaan Arsip Statis yang Belum Optimal

Saat ini terdapat 58% arsip statis yang belum diolah. Berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DI Yogyakarta, Jumlah arsip statis yang sudah diolah saat ini sebanyak 2.468 boks atau sekitar 42% dari jumlah khasanah arsip statis yang ada di DPAD DIY, yakni sejumlah 5.895 boks. Masih terdapat 3.427 boks (58%) arsip statis yang belum diolah. Berikut ini adalah data arsip yang tersimpan di Depo Arsip DPAD DIY baik yang sudah maupun yang belum diolah:

Tabel 2-187 Data Arsip di Depo Arsip Berdasarkan Jenis

No	Jenis arsip	Jumlah	Satuan
1	Arsip tekstual terolah	36.577	berkas
2	Arsip tekstual belum terolah	50.524	berkas

2-558

No	Jenis arsip	Jumlah	Satuan
3	Arsip foto diolah	3.740	ekspose
4	Arsip foto belum diolah	33.909	ekspose
5	Arsip klise foto (Negatif foto)	156.750	klise
6	Arsip rekaman suara	962	kaset
7	Arsip betamax/ VHS	300	kaset
8	Arsip kartografi	254.700	lembar
9	Arsip mikrofilm	20	buah
10	Arsip film (can)	13	buah

Sumber: DPAD DIY, 2024

3.) Pemanfaatan arsip melalui media penelusuran online belum optimal.

Jumlah pemanfaatan arsip melalui media penelusuran online, yakni Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) <https://arsip.jogjaprov.go.id/> dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) <http://dpad.jogjaprov.go.id/siks/> dalam tahun 2023 baru sekitar 36% arsip yang dimanfaatkan atau 17.822 nomor berkas arsip yang dimanfaatkan dari total 49.044 nomor berkas arsip yang tersedia

2.3.2.2.18 Urusan Persandian

1.) Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang.

Penerapan sistem manajemen keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang. Hal ini turut berdampak pada adanya insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi di Pemerintah Daerah DIY. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, pada tahun 2023 terdapat 190 insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi pada sistem informasi Pemda DIY. Saat ini dan di masa mendatang, pola menguasai ruang/wilayah tidak lagi dilakukan secara frontal dengan perang terbuka atau kekuatan militer, tetapi dilakukan secara tidak langsung dan bersifat *proxy war*. Hal ini menjadi salah satu permasalahan pada urusan bidang persandian yang perlu perhatian lebih lanjut untuk menjamin terjaganya informasi terutama yang bersifat rahasia.

2.) **Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi dan persandian.**

Dalam menjalankan fungsi pengamanan informasi, perlu adanya dukungan infrastruktur, perangkat keras maupun perangkat lunak yang difungsikan khusus untuk pengamanan informasi seperti *firewall*, *Intrusion Detection System*, *Intrusion Prevention System*, *Vulnerability Assessment Tool*, *Log Analysis*, *SIEM*, perangkat kontra penginderaan, jammer, kendaraan operasional, dan lain-lain. Saat ini dan di masa mendatang, pola menguasai ruang/wilayah tidak lagi dilakukan secara frontal dengan perang terbuka atau kekuatan militer, tetapi dilakukan secara tidak langsung dan bersifat *proxy war* sehingga terjadi insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, sampai dengan Bulan Desember tahun 2023, terdapat 190 insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi pada sistem informasi Pemda DIY. Insiden akan lebih mudah ditangani dengan ketersediaan perangkat yang dibutuhkan.

2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.2.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

1.) **Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan laut**

DIY memiliki panjang pantai 135,24 Km dan luas perairan 251.130 Ha. Berdasarkan data dari Kajian Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada perairan Samudra Hindia Selatan DIY, tingkat pemanfaatannya baru mencapai 30,93% dari potensi yang boleh ditangkap. Dengan potensi kelautan tersebut seharusnya DIY memiliki jumlah nelayan yang memadai, namun profesi nelayan di DIY sebagian besar belum menjadi sumber matapencaharian utama. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan tambahan yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah nelayan penuh. Menurut data dari BPPSD DIY, pada tahun 2023 jumlah nelayan penuh di DIY 453 orang sementara jumlah nelayan sambilan utama sebanyak 1.135 orang dan nelayan sambilan tambahan sebanyak 539 orang.

Selain itu, sebagian besar kepemilikan kapal oleh nelayan di DIY adalah perahu motor tempel (PMT), sehingga hasil yang diperoleh sangat

terbatas dikarenakan jangkauan PMT hanya berada di bawah 12 mil laut. Sementara kepemilikan kapal di atas 5 GT untuk dapat menjangkau potensi ikan dengan nilai ekonomis tinggi tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun. Data jumlah kepemilikan kapal dengan kapasitas di atas 5 GT di DIY antara tahun 2019-2023 menunjukkan hanya ada 58 kapal yang beroperasi. Sementara jumlah PMT sebanyak 495 kapal sejak tahun 2018.

Di sisi lain, prasarana perikanan tangkap laut yang ada di DIY belum dimanfaatkan secara optimal. Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta belum dapat beroperasi dikarenakan masalah sedimentasi sehingga tidak ada kapal penangkap ikan yang dapat mendarat di PP Tanjung Adikarta. Selain itu, Pelabuhan Perikanan Gesing baru akan resmi beroperasi pada triwulan IV tahun 2024.

2.) Pembangunan perikanan tangkap dan perikanan budidaya belum menerapkan prinsip minabisnis dan minaindustri

Pengelolaan perikanan budidaya di DIY sebagian besar masih dilakukan secara tradisonal baik dalam teknis budidaya maupun pemasarannya, di mana para pembudidaya tersebar di berbagai tempat dan belum berbasis kawasan dengan kelembagaan pengelola yang terpadu. Hal ini menyebabkan proses produksi perikanan tidak efisien, sehingga pada akhirnya berpengaruh pada pendapatan yang diterima oleh pembudidaya. Kondisi ini juga tercermin dalam Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) yang terus menurun dalam periode 2019-2023 dengan nilai NTPI terendah sebesar 90,06 pada tahun 2023, sehingga dapat dianggap belum sejahtera.

3.) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di DIY

Tingkat konsumsi ikan di DIY masih sangat rendah bila dibandingkan dengan nasional. Hal ini disebabkan preferensi masyarakat DIY untuk pemenuhan kebutuhan protein lebih banyak dipenuhi dari konsumsi daging ayam maupun sapi atau kambing. Angka konsumsi ikan nasional mencapai 56,48 Kg/kapita/tahun pada tahun 2022. Sementara itu, walaupun tingkat konsumsi ikan di DIY dari tahun 2017-2022 menunjukkan trend peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,74% per tahun, tingkat konsumsi ikan DIY hanya sebesar 34,92 Kg/Kapita/tahun pada tahun 2022.

2.3.2.3.2 Urusan Pariwisata

1.) **Belum pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara**

Sampai dengan awal tahun 2024, kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa menyamai kondisi sebelum terjadinya Pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sebesar 433.027 orang, sedangkan tahun 2023 kunjungan wisatawan mancanegara masih pada angka 149.414 orang. Namun, sejak tahun 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke DIY tetap memperlihatkan kenaikan secara bertahap. Demikian untuk triwulan pertama di tahun 2024, tercatat untuk jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY sebanyak 32.074 orang. Menurut laporan *Tourism Outlook 2023* dari *The Economist Intelligence Unit* (EIU) menyebutkan bahwa pariwisata global secara umum baru akan pulih kembali seperti sebelum pandemi pada tahun 2024, maka tantangan bagi DIY pada sektor pariwisata ini adalah kemampuan untuk menangkap momentum dan mengambil langkah yang tepat untuk meraih kembali masa gemilang pariwisata di Yogyakarta.

2.) **Masih rendahnya lama tinggal wisatawan di DIY**

Lama tinggal wisatawan yang berwisata di Yogyakarta masih relatif rendah. Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara berdasarkan dari lama menginap di jasa akomodasi pada tahun 2022 hanya mencapai 2,40 hari. Sementara itu, untuk wisatawan nusantara hanya mencapai 1,44 hari. Pemerintah telah bergerak menarik wisatawan mancanegara dan domestik untuk tinggal lebih lama di Yogyakarta dengan pengoptimalan sektor pariwisata hingga menyelenggarakan *event* khusus untuk mengupayakan agar wisatawan dapat tinggal lebih lama untuk berwisata di DIY. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel bintang di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 1,56 hari selama Desember 2023 sedangkan pada hotel non bintang mencapai 1,16 hari selama Desember 2023. Jika dicermati lebih lanjut, capaian lama tinggal wisatawan di DIY masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan destinasi prioritas lain seperti Bali, rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik pada hotel berbintang di Bali pada bulan Desember 2023 tercatat 2,49 hari dan untuk hotel non bintang mencapai 2,14 hari.

3.) **Belum Optimalnya Perkembangan Ekonomi Kreatif di DIY**

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan dua sektor penunjang perekonomian di DIY yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) terbesar dalam perekonomian yang disebabkan oleh pertumbuhan kunjungan wisatawan, spending wisatawan, nilai ekspor produk ekonomi kreatif, perlindungan Hak Kekayaan Intelktual produk ekonomi kreatif, serta pergerakan peningkatan daya saing destinasi wisata, industri pariwisata serta SDM pariwisata dan SDM Ekonomi Kreatif. Dalam buku “Infografis sebaran pelaku Ekonomi Kreatif” yang diterbitkan oleh Kemenparekraf pada tahun 2019, data-data terkait 17 sub sektor Ekonomi Kreatif yang ada di Indonesia menerangkan bahwa DIY memiliki 3 Sub Sektor Unggulan diantaranya Kuliner, Fesyen dan Kriya. Sedangkan subsektor dengan potensi pertumbuhan besar diantaranya adalah Film, Animasi, Video, Aplikasi, Game dan DKV. Namun berdasarkan data-data yang disusun oleh Kemenparekraf RI, dapat dilihat jika DIY masih belum dapat memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki. Potensi sub sektor yang sudah menjadi unggulan maupun yang menjadi penunjang perlu dioptimalkan dan didukung penuh oleh pemerintah bersama stakeholder dan para ahli untuk mengembangkan sektor Ekonomi Kreatif agar lebih maju dan berdaya saing, dengan bergitu sektor ekonomi kreatif dapat merangkul dan menumbuhkan para pelaku usaha Ekonomi Kreatif.

Selain itu, ketersediaan data terkait ekonomi kreatif masih belum optimal dan *up to date* sehingga diperlukan identifikasi secara menyeluruh terkait pendataan seperti jenis usaha ekraf, jumlah usaha sampai tenaga kerja ekraf dan elemen lainnya agar dapat dilakukan perencanaan pembangunan yang tepat karena ekonomi kreatif melibatkan multi sektor, lintas wilayah, dan lintas kepentingan. Diperlukannya pelatihan atau bimbingan teknis untuk Sumber Daya Manusia pelaku Ekonomi Kreatif di DIY guna meningkatkan kapasitas sektor ekonomi kreatif, mengenali dan mendorong serta meningkatkan potensi ekonomi kreatif di DIY.

2.3.2.3.3 Urusan Pertanian

1.) Alih fungsi lahan pertanian produktif yang cukup tinggi terutama lahan sawah beririgasi

Berdasarkan data BPS Provinsi DIY tahun 2010-2022, luas lahan sawah mengalami penurunan dengan rata-rata 439,46 ha/tahun. Alih fungsi

lahan pertanian banyak terjadi di wilayah aglomerasi perkotaan serta sebagai akibat dari beberapa proyek pembangunan, diantaranya Bandara Internasional Yogyakarta dan JILS. Selain itu, upaya pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan pada tataran kabupaten masih belum optimal dikarenakan hingga tahun 2023 baru Kabupaten Sleman yang menetapkan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2.) Tingkat kesejahteraan petani belum optimal

Tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP). Berdasarkan data dari BPS Provinsi DIY, NTP untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, dan peternakan pada kurun waktu 2019–2023 rata-rata sebesar 101,22. Angka ini telah melampaui angka minimal kesejahteraan petani, yaitu 100. Namun kondisi tersebut tidak merata di semua subsektor, karena NTP subsektor tanaman pangan dan peternakan masih di bawah 100, sehingga dapat dianggap belum sejahtera. Hal ini dapat disebabkan oleh usaha tani yang kurang efisien serta kurangnya penerapan prinsip agribisnis. Data dari Survei Pertanian Antar Sensus Tahun 2018 BPS Provinsi DIY menunjukkan bahwa sebanyak 437.288 rumah tangga usaha pertanian atau sebesar 88,71% merupakan rumah tangga petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 0,5 ha.

3.) Keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian

Data dari Sensus Pertanian 2023 (BPS Provinsi DIY, 2023) menunjukkan bahwa jumlah petani milenial yang berumur 19–39 tahun sebanyak 37.141 orang, atau sekitar 8,87% dari petani di DIY. Dari aspek pendidikan, sebesar 54,92% petani merupakan lulusan SD dan tidak/belum tamat SD. Selain itu, sebesar 44,56% rumah tangga petani tidak menggunakan mekanisasi dan teknologi selain mekanisasi serta baru 20,45% petani yang dapat menggunakan internet. Di sisi lain, terkait aspek kelembagaan, berdasarkan hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023, jumlah usaha pertanian di DIY tahun 2023 sebanyak 431.705 unit, yang berarti mengalami penurunan 26,18% dari tahun 2013 yang sebanyak 584.802 unit. Jenis usaha pertanian paling banyak berupa Usaha Tani Perorangan (UTP) sebanyak 431.133 unit (99,87%), sedangkan Usaha Pertanian Berbadanhukum (UPB) sebanyak 35 unit (0,01%), dan Usaha Tani Lainnya (UTL) sebanyak 537 unit

(0,12%). Selain itu, berdasarkan data Statistik Sumber Daya Manusia Pertanian (Kementerian Pertanian, 2024) dapat diketahui bahwa kelompok tani di DIY masih didominasi oleh kelompok tani kelas pemula sebesar 34,62%.

4.) Perubahan iklim yang berdampak pada penurunan produksi pertanian

Produksi padi sawah pada tahun 2023 mengalami penurunan karena terdampak el nino sehingga menyebabkan pergeseran musim tanam. Beberapa komoditas buah, seperti pisang juga produksinya menurun akibat musim kering yang panjang.

2.3.2.3.4 Urusan Kehutanan

1.) Kontribusi PDRB sub sektor Kehutanan terhadap Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih rendah

Nilai produksi kehutanan yang menjadi variabel dalam penghitungan PDRB suatu daerah terdiri dari produksi Kayu bulat, produksi kayu olahan, dan produksi hasil hutan non kayu. Berdasarkan data sementara BPS, nilai produksi sub sektor kehutanan tahun 2023 menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan (ADHK) dalam PDRB DIY sebesar 473.378,99 juta rupiah atau 5,16% terhadap PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sementara Nilai produksi subsektor kehutanan atas dasar harga berlaku (ADHB) dalam PDRB DIY pada tahun 2023 adalah sebesar 919.795.01 juta rupiah atau sebesar 4,97% dari PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Potensi produksi hasil kehutanan yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan nilai PDRB subsektor kehutanan terutama dari produksi hasil hutan kayu baik dari dalam kawasan hutan maupun hutan rakyat serta dari hasil hutan bukan kayu.

2.) Pemberian akses legal pemanfaatan kawasan hutan kepada masyarakat disekitar hutan melalui skema perhutanan sosial

Keberadaan kawasan hutan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya yang berada disekitar kawasan hutan. Luas total kawasan hutan DIY seluas 19.133,95 ha dan yang menjadi kewenangan Pemda DIY seluas 16.358,6 ha yang meliputi hutan konservasi TAHURA Bunder seluas 777,6 ha dan 15.581 ha merupakan hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor 8/MENLHK-PKTL/Ren/PLA.0/1/2023 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VIII) luas indikatif perhutanan sosial di DIY seluas 3.412,84 ha. Sampai dengan tahun 2023, SK persetujuan perhutanan sosial yang sudah diberikan kepada masyarakat seluas 1.565,88 ha atau sebesar 45,88% yang terbagi kedalam 45 surat keputusan menteri. Masih terdapat luas areal indikatif seluas 1.846,96 ha atau 54,12% yang dapat diberikan kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial dengan rincian 222,041 ha dikawasan hutan lindung dan 1.624,919 ha yang berada di kawasan hutan produksi. Untuk itu, diperlukan adanya percepatan perhutanan sosial di DIY melalui percepatan pemberian akses legal, percepatan pengembangan usaha perhutanan sosial maupun melalui percepatan pendampingan kelompok perhutanan sosial.

3.) Nilai efektifitas pengelolaan kawasan hutan konservasi yang perlu ditingkatkan

Kementerian LHK telah memiliki instrumen untuk melakukan penilaian efektifitas sebuah kawasan konservasi yaitu *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Kementerian LHK Nomor. SK. 4/KSDAE/KK/KSA.1/1/2022 tentang Penetapan Nilai Efektifitas Penilaian Kawasan Konservasi Sampai dengan Tahun 2021, nilai efektifitas pengelolaan TAHURA Gunung Bunder sebesar 70% atau masuk kategori efektif. Berdasarkan SK Nomor Sk.1/KSDAE/PKK/KSA.1/1/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Nilai Efektifitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru tahun 2023 nilai efektifitas pengelolaan TAHURA Bunder sebesar 66. Terdapat penurunan sebesar 4 poin dibandingkan penilaian tahun 2022, untuk itu pengelolaan kawasan Tahura Bunder masih perlu ditingkatkan efektifitasnya.

4.) Penanganan lahan kritis masih belum optimal

Penanggulangan lahan kritis merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas hutan dan lahan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup di DIY. Berdasarkan realisasi kumulatif penanganan lahan kritis DIY dalam kurun waktu 2018-2023 yang baru mencapai 5.163,18 ha atau sebesar 6,53% dari total lahan kritis seluas 79.123 ha maka penanganan lahan kritis secara lintas sektor menjadi strategis untuk diselesaikan.

2.3.2.3.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1.) Masih terdapat penduduk yang belum terlayani akses listrik sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan.

Rasio elektrifikasi di DIY sudah mencapai 99,99% dan rasio desa berlistrik sudah 100%, namun masih ada 6.798 KK yang masih menyalur meliputi kategori rumah tangga bersubsidi maupun non subsidi. Rumah tangga berlistrik menyalur ini belum menikmati listrik sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, sehingga diperlukan penanganan khususnya untuk rumah tangga yang masuk dalam kategori subsidi atau rumah tangga miskin.

2.) Masih terdapat pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan yang belum sesuai dengan ketentuan.

Data pemegang izin usaha ketenagalistrikan pada tahun 2023 adalah 233 pengguna dengan jumlah pelaksanaan izin ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan adalah 125 izin atau setara dengan 46.88% dari keseluruhan yang berizin. Masa berlaku IO/IUPTLS maksimal 5 tahun. Penentuan izin usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan sangat dipengaruhi oleh beberapa parameter. Apabila terdapat parameter penilaian turun dan mengakibatkan turunnya penilaian, maka dapat mengakibatkan pelaksanaan izin perusahaan air tanah dan izin usaha ketenagalistrikan yang semula sesuai ketentuan menjadi tidak sesuai ketentuan. Pemegang izin usaha ketenagalistrikan masih banyak yang belum sesuai dengan ketentuan.

3.) Masih tingginya pemanfaatan air tanah dalam

Pengguna air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan perusahaan air tanah. Pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha. Pemakaian air tanah dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Perusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, dan bahan pembantu atau proses produksi. Perusahaan air tanah dapat dilakukan sepanjang penyediaan air, tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat setempat terpenuhi. Perusahaan air

tanah wajib memperhatikan rencana pengelolaan air tanah, kelayakan teknis dan ekonomi, fungsi sosial air tanah, dan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah. Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah kecuali untuk keperluan sehari-hari dan/atau pertanian rakyat, wajib memperoleh izin dari Gubernur. Dari pengguna air tanah dalam di DIY, sampai dengan tahun 2022 telah dikeluarkan izin pengusahaan air tanah sebanyak 315 izin dan pada akhir tahun 2023 menjadi 233 izin. Pengguna air tanah yang memiliki izin harus dipastikan mengambil sesuai ketentuan, sementara itu pengguna air tanah yang diluar berizin diindikasikan masih terjadi. Apabila pengguna air tanah yang telah mendapatkan izin memanfaatkan air tanah dalam melebihi ketentuan maka langkah yang dilakukan adalah menyampaikan data tersebut ke Badan Geologi, Kementerian ESDM untuk pemberian sanksi sesuai kewenangan perizinan air tanah berdasarkan KepMen ESDM No 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah.

4.) Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah.

Bauran energi yang telah dicapai 93,56% minyak bumi dan 6,44% energi baru terbarukan. Potensi energi baru terbarukan di DIY terbatas pada tenaga surya, biogas, air dan angin, namun dapat dieksploitasi dengan teknologi tepat guna agar dapat menghasilkan energi yang optimal dan menekan konsumsi energi fosil.

5.) Pendelegasian pengelolaan pertambangan ke daerah perlu ditindaklanjuti untuk memastikan tidak terjadinya kerusakan lingkungan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lingkup kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan ke pemerintah daerah provinsi yaitu:

- a.) pemberian sertifikat standar dan pemberian izin;
- b.) pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; serta
- c.) pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

Selain itu pemerintah pusat juga mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

- a.) pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- b.) penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu dan penetapan harga patokan batuan;
- c.) pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

2.3.2.3.6 Urusan Perdagangan

1.) Masih rendahnya pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha perdagangan di DIY

Jika dilihat dalam Buku Profil Perdagangan Indonesia 2022 (BPS), rata-rata balas jasa dan upah pekerja di sektor perdagangan di DIY masih relatif rendah yaitu sebesar 35,86 juta rupiah. Sementara itu, nilai rata-rata untuk tingkat nasional mencapai Rp42,48 juta rupiah per tahun. Produktivitas sektor perdagangan ini mestinya masih dapat ditingkatkan lagi mengingat posisi DIY sebagai pusat kegiatan ekonomi di wilayah Jawa bagian selatan. Selain itu, pergerakan wisatawan maupun aktivitas pendidikan, juga dapat menjadi potensi penggerak kegiatan perdagangan lokal dan regional.

2.) Masih adanya permasalahan terkait stabilitas pasokan dan harga bahan pokok.

Sampai dengan Desember 2023, inflasi kota Yogyakarta tahun berjalan (*year to date*) mencapai 3,17%. Permasalahan kenaikan harga-harga ini bahkan menjadi perhatian besar presiden dan pemerintah Ppusat. Meskipun inisiatif pengendalian inflasi telah segera dilakukan, namun potensi ketidakstabilan harga masih menjadi ancaman terutama dengan belum kondusifnya situasi perekonomian dan politik global. Gangguan rantai pasok antar negara berdampak pada kenaikan harga-harga komoditas tertentu.

Lebih jauh lagi, secara struktural masih terdapat permasalahan dalam rantai perdagangan di DIY. Sebagai contoh, jika dilihat dari besaran Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP), terdapat peningkatan untuk beberapa bahan pokok. MPP daging ayam ras dari 22,06% pada tahun 2018 menjadi 33,49% pada tahun 2021. Bahkan komoditas lain memiliki MPP yang jauh lebih tinggi seperti bawang merah yang mencapai 43,22% pada tahun 2021. Semakin tingginya MPP menunjukkan rantai distribusi dari produsen ke konsumen belum efisien atau masih cukup panjang. Panjangnya distribusi tersebut, tentu membawa risiko sulitnya pengendalian harga dan stok barang.

3.) Masih rendahnya nilai ekspor DIY

Peranan DIY dalam realisasi ekspor nasional masing sangat rendah. Tahun 2023, proporsi nilai ekspor DIY hanya 0,21% dari total ekspor Indonesia. Nilai ekspor pada tahun tersebut mencapai 583,3 Juta US\$ (BPS). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ekspor DIY tahun 2023 turun 19,03 persen. Kondisi tersebut disebabkan pengaruh kondisi global yang berdampak pada ketidakpastian kondisi politik dan perekonomian global sehingga berpengaruh pada rute yang dilalui untuk ekspor, mengakibatkan biaya transportasi menjadi mahal.

4.) Masih belum sepenuhnya pelaku perdagangan mengadopsi perubahan perilaku konsumen saat ini seperti dalam hal penjualan secara daring

Mengacu pada Buku Profil Perdagangan Indonesia 2022, sekitar 52,25% pelaku usaha perdagangan di DIY yang memanfaatkan internet. Angka ini memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang hanya mencapai 37%. Namun demikian, saat ini kecenderungan konsumen untuk melakukan transaksi secara daring semakin meningkat. Berdasarkan data BPS, disebutkan bahwa sekitar 6 persen dari total nilai penjualan diperoleh melalui penjualan secara online dan 17 persen dari total nilai pembelian adalah melalui pembelian secara *online*. Dengan adanya perubahan perilaku ini, diperlukan upaya agar pelaku usaha perdagangan di DIY mampu beradaptasi pada proses bisnis yang berlaku saat ini.

2.3.2.3.7 Urusan Perindustrian

1.) Pelambatan produktivitas sektor industri pengolahan

2-570

Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan yang diukur dari PDRB sektor industri pengolahan dibagi dengan tenaga kerja sektor industri pengolahan menunjukkan kecenderungan pelambatan. Pada masa sebelum pandemi, yaitu kurun waktu 2015-2019, rata-rata pertumbuhan produktivitas sektor industri pengolahan hanya 0.76% atau jauh di bawah rata-rata seluruh lapangan usaha yang mencapai 5,41%. Dari sisi mikro, salah satu penyebab rendahnya angka tersebut adalah pelambatan di sisi output produksi sektor ini. Ketidakpastian kondisi politik dan perekonomian global juga memperparah pelambatan tersebut. Indeks Produksi yang menunjukkan seberapa besar output sektor industri pengolahan, mengalami kecenderungan *trend* menurun dalam kurun waktu 2018-2022. Indeks produksi pada tahun 2018 sebesar 160,44 kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan hingga mencapai angka 162,63, namun turun menjadi 136,75 pada tahun 2020. Meskipun pada tahun 2021 dan 2022 indeks produksi mengalami sedikit kenaikan sebesar 143,44 dan 154,66, namun indeks tersebut masih dibawah indeks tahun 2018. Hal tersebut tentu menunjukkan kemunduran bagi sektor industri pengolahan jika dilihat dari sisi output yang dihasilkan.

2.) Industri mikro dan kecil masih menghadapi kesulitan pemasaran, penyediaan bahan baku dan pemodal.

Profil Industri Mikro dan Kecil BPS Provinsi DIY tahun 2022 menunjukkan dari total 123.572 usaha/perusahaan IMK di DIY ada sebanyak 48,03% mengalami kesulitan. Jenis kesulitan terbanyak yang dialami secara berurutan adalah kesulitan pemasaran (47,49%), kesulitan pemodal (39,13), dan kesulitan bahan baku (37,05%). Pemasalahan produk masih didominasi oleh pemasaran dalam satu kabupaten/kota yang mencapai 94,23%. Sementara itu, penyebab kesulitan bahan didominasi oleh harga bahan baku yang mahal.

3.) Masih belum berkembangnya industri-industri berbasis inovasi dan teknologi

Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat

dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Lebih lanjut, Kemenperin melalui *Making Indonesia 4.0*, mencoba fokus pada 5 sektor industri, yaitu industri makanan dan minuman; industri tekstil dan busana; industri otomotif; industri kimia; dan industri elektronika. Industri di DIY baik yang berskala mikro, kecil, sedang dan besar masih didominasi oleh industri makanan, tekstil dan busana. Di sisi lain, meskipun perkembangan teknologi sudah cukup maju, namun mayoritas pelaku usaha industri belum memanfaatkannya secara optimal. Sebagai contoh, berdasarkan data survei industri mikro dan kecil, baru sekitar 22% yang menggunakan internet untuk kegiatan usahanya.

4.) Masih perlunya penguatan struktur industri lokal melalui pemanfaatan komponen dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor

Penguatan struktur industri lokal diperlukan terutama dalam hal penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Dengan demikian, diharapkan ada penurunan ketergantungan atas barang impor dan juga dapat terjadi hilirisasi atas komoditas dan bahan baku yang diproduksi dari sektor primer di dalam negeri. Menurut data dari Kementerian Perindustrian, per Juli 2024 tercatat 171 perusahaan di DIY yang telah memiliki sertifikasi TKDN seperti PT Mega Andalan Kalasan (peralatan kesehatan) dan CV Karya Hidup Sentosa (Mesin & Peralatan Pertanian). Selain itu terdapat juga produk-produk lain seperti batik, aksesoris rajutan, permesinan, furniture dan lainnya yang telah memiliki sertifikasi TKDN. Namun demikian, TKDN antar program tersebut masih cukup bervariasi mulai dari 12% hingga 99%. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya penguatan struktur industri di dalam negeri untuk dapat memastikan lebih banyak produk dari sektor primer dapat dimanfaatkan dalam industri lokal.

2.3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.2.4.1 Urusan Sekretariat Daerah

1.) Dinamika kebijakan terkait birokrasi

Sebagai upaya menuju birokrasi berkelas dunia sebagaimana tertuang dalam *Roadmap* RB Nasional, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa

2-572

kebijakan diantaranya terkait dengan penyederhanaan birokrasi yang tahapannya meliputi penyederhanaan struktur birokrasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Terhadap beberapa kebijakan tersebut tentunya memerlukan beberapa langkah kritikal yang harus dilakukan daerah antara lain terkait penataan organisasi, penataan jabatan fungsional, transformasi jabatan serta pengawasan dan pengendalian, agar pengelolaan sumberdaya aparatur serta mekanisme kerja tidak mengganggu tata kelola internal maupun dalam rangka pelayanan publik.

2.) Belum sinkronnya kelembagaan dengan Perencanaan daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan beban kerja, karakteristik, dan tata kerja keistimewaan yang disinkronkan dengan visi, misi, dan program kerja pembangunan daerah. Sehingga perlu dilakukan sinkronisasi kelembagaan perangkat daerah mengikuti program yang diarahkan sebagai motor penggerak perwujudan dari visi misi Kepala Daerah dan penyesuaian terhadap regulasi atau kebijakan dari pusat terkait dengan urusan program dan kegiatan.

3.) Belum disusunnya peta proses bisnis organisasi

Peraturan Menteri PANRB nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun peta proses bisnis guna mewujudkan organisasi

2-573

instansi pemerintah yang tepat fungsi tepat ukuran dan tepat proses. Peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Selain itu, agar proses bisnis dapat selaras dan sinergi diantara OPD, diperlukan suatu kejelasan ruang lingkup tugas dan fungsi sebagai “Cor Bisnis OPD”, yang sesuai dengan ciri atau karakter kelompok ketugasannya, sehingga jelas dapat dibedakan antara ruang lingkup atau cakupan ‘cor bisnis’ Biro Setda, Dinas Teknis dan Badan penunjang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

4.) **Belum optimalnya budaya inovasi pelayanan publik**

Kualitas pelayanan publik masih terus memerlukan peningkatan, khususnya terkait dengan penumbuhan inovasi, pengembangan sistem pelayanan dan kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pelayanan publik. Implementasi budaya inovasi di dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang cepat dan tanggap terhadap kebutuhan mereka. Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis perlu menyusun strategi inovasi dalam memberikan pelayanan publik, baik pelayanan langsung maupun tidak langsung.

Sejak tahun 2014, Pemda DIY sudah mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia dan minimal 1 (satu) inovasi berhasil masuk dalam Top 99 dan/atau Top 45. Adapun data capaian dan keikutsertaan dalam KIPP dalam 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2-188 Keikutsertaan dan Capaian dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

2019	2020	2021	2022
33 inovasi (28 dari OPD/UPT dan 5 dari SMA/SMK) seluruhnya	38 inovasi kategori umum diikutsertakan dalam KIPP tahun	50 Inovasi yang diusulkan kepada Biro Organisasi Setda	33 inovasi yang diusulkan kepada Biro Organisasi Setda

2019	2020	2021	2022
diikutsertakan dalam KIPP tahun 2019 Menggapai Mimp Sahabat RImba - Balai KPH DIY masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik dan ikutserta dalam UNPSA (United Nation Public Service Award) yang diselenggarakan oleh PBB. Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu <i>Jogja Library for All</i>) - Balai Layanan Perpustakaan DIY berhasil lolos TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik dan ikutserta dalam UNPSA (United Nation Public Service Award) yang diselenggarakan oleh PBB.	2022 (33 dari OPD/UPT dan 5 dari SMA/SMK) serta 1 kategori khusus. Melintas Batas Ruang Kelas bersama JOGJABELAJARCL ASS - Balai Tekkomdik DIY berhasil lolos ke TOP 45 Inovasi Pelayanan publik 2020. JOGJAPLAN : Perencanaan Pembangunan DIY yang ORDINATE (Konsisten, Respondif, Dinamis dan Akuntabel) dengan <i>e planning</i> - BAPPEDA DIY berhasil lolos 5 <i>Outstanding Achievement Of Public Service Innovation</i> 2020	DIY pada tahun 2021; 10 inovasi kategori umum dan 1 inovasi kategori khusus dalam KIPP tahun 2021. Rajutan Sibakul Jogja" cara Jitu Usaha Tangguh dengan Sistem Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha - Dinas Koperasi dan UKM DIY Berhasil lolos TOP Inovasi terpuji (TOP 45) KIPP 2021	DIY pada tahun 2022. 15 inovasi kategori umum dan 2 inovasi kategori khusus DIFAGANA, <i>Difabel</i> Siaga Bencana berhasil lolos dalam TOP 99 KIPP 2022 dan dalam tahap selanjutnya yaitu Presentasi dan Wawancara

Sumber : Biro Organisasi Setda DIY

5.) Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini baru berfokus pada tata kelola pemerintah yang bersifat umum dan instansional, belum mampu menjawab isu strategis tata kelola pemerintahan yang bersifat lintas sektor atau antar instansi pemerintah untuk menjawab isu Pembangunan Daerah

Pemerintah berkelas dunia yang memberikan dampak nyata bagi kinerja pembangunan yang menjadi cita-cita periode akhir *grand design* dikhawatirkan tidak dapat tercapai apabila strategi pelaksanaan

reformasi birokrasi dalam *Roadmap* reformasi birokrasi tidak segera disesuaikan. Semangat kolaboratif yang efektif perlu dikedepankan untuk mencapai tujuan bersama. Untuk itu, strategi pendekatan RB Tematik memiliki urgensi yang cukup tinggi agar dapat segera diaplikasikan pada perubahan *Roadmap* Reformasi Birokrasi

Perlu dilakukan *refocusing* dan penajaman Tujuan Reformasi Birokrasi melalui 2 (dua) cara/jalan yaitu :

- a.) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dengan sasaran: 1) terciptanya tatakelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien dan lincah; dan 2) Budaya Birokrasi SATRIYA BerAKHLAK dengan ASN yang profesional; dan
- b.) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dengan sasaran penyelesaian isu tematik yang dapat mendukung ketercapaian target Pembangunan Daerah (Kemiskinan, Penanganan *Stunting*, Penanganan Inflasi, Reformasi Kalurahan, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan lain sebagainya)

6.) Dukungan layanan pimpinan dalam penyusunan kebijakan yang belum optimal.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tinggi memerlukan respon cepat dalam kebijakan. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah DIY yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengoordinasian terhadap pelayanan administrative. Sekretariat Daerah diharapkan dapat lebih responsif dalam mendesain kebijakan yang komprehensif, berkualitas dan memenuhi aspek *timely manner* (tersedia pada saat dibutuhkan). Oleh karena itu, perlu dukungan pelayanan pimpinan diantaranya dalam hal koordinasi dengan berbagai stakeholders terkait dan urusan administrasi pimpinan. Namun pada saat ini, dukungan terhadap tugas tersebut masih belum optimal dikarenakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka perumusan arah kebijakan yang masih kurang efektif, dukungan sarana prasana (termasuk penggunaan sistem informasi digital) dan kapasitas SDM yang masing kurang memenuhi kebutuhan ideal baik secara kuantitas atau kualitas.

7.) Belum Optimalnya Kerja sama Antar Daerah/dengan Pihak Ketiga

Kerja sama antar daerah merupakan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mengadakan relasi dengan daerah lain termasuk pihak ketiga baik swasta maupun luar negeri untuk melaksanakan secara bersama sebuah urusan yang dilandasi persamaan kepentingan dengan maksud untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Kerja sama antar daerah juga dapat diartikan sebagai suatu kerangka hubungan kerja yang dilakukan oleh dua daerah atau lebih, dalam posisi yang setingkat dan seimbang untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan memahami pengertian tersebut maka kerja sama daerah merupakan langkah strategis yang perlu ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga daerah harus terus melakukannya secara sistematis dan berkesinambungan. Tantangan dalam kerja sama adalah identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan, sehingga kerja sama daerah yang dilakukan merupakan kebutuhan prioritas daerah serta optimalisasi pemanfaatan Kerja sama yang sudah dilakukan.

8.) Pengelolaan Perbatasan Daerah

Pemda DIY dalam rangka meningkatkan pengelolaan Perbatasan Daerah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY. Pengelolaan Wilayah Perbatasan dipahami sebagai upaya tata kelola administrasi perbatasan secara terpadu yang berkaitan dengan penataan administrasi batas daerah, pengembangan sistem informasi manajemen perbatasan, dan pembangunan serta pemeliharaan penanda perbatasan.

Batas daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah, dilampiri dengan Peta Batas Wilayah Skala 1:100.000 yang memuat Kapanewon dan kalurahan di sepanjang garis batas daerah. Kapanewon dan kalurahan tersebut selanjutnya masuk kategori wilayah perbatasan DIY-Provinsi Jawa Tengah. Secara akumulatif terdapat sebanyak 18 Kapanewon dan 48 kalurahan di DIY, serta 19 kecamatan dan 79 desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada dalam wilayah perbatasan. Kondisi tersebut menyebabkan penataan administrasi batas daerah menjadi penting untuk dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa tertib batas merupakan awal

dari tertibnya administrasi daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu persoalan di wilayah perbatasan adalah pelayanan publik yang dinilai masih belum optimal. Masyarakat wilayah perbatasan belum dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan memadai. Hal ini antara lain tercermin dalam angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Terdapat 14 Kapanewon di wilayah perbatasan DIY yang masuk dalam kuadran III dengan capaian IPM dan akselerasi pembangunan manusia yang relatif rendah. Paradigma desentralisasi telah menumbuhkan kepekaan masyarakat untuk menuntut kualitas pelayanan publik yang sederhana, cepat, dan murah pada pemerintah. Oleh karena itu, fungsi penyediaan layanan publik oleh Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan, salah satunya melalui perjanjian kerja sama daerah.

9.) Proses penyusunan produk hukum daerah yang masih belum optimal.

Pada sektor hukum terdapat program prioritas nasional berupa penataan dan penyederhanaan regulasi (termasuk produk hukum daerah) yang diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang secara substansi cukup signifikan mempengaruhi perubahan pada proses teknis penyusunan produk hukum daerah. Disamping itu, masih ada kendala sistemis yang menyebabkan proses penyusunan menjadi belum komprehensif dan efektif. Diantaranya adalah rancangan produk hukum daerah yang dari segi substansi belum terstruktur dengan baik dan besarnya peran faktor eksternal yang kemudian berpengaruh pada proses penyusunan produk hukum daerah. Sehingga, diperlukan peningkatan atas proses penyusunan produk hukum baik yang termasuk mulai dari proses perencanaan, penyiapan (penyusunan kajian, naskah akademik), proses penyusunan, hingga proses harmonisasi serta sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan secara komprehensif dan efektif.

10.) Kualitas Pengadaan Barang/Jasa di DIY masih perlu ditingkatkan.

Hal ini didasarkan pada capaian sebagai berikut:

2-578

- a.) Realisasi belanja pada Bela pengadaan dan Katalog Lokal DIY dibandingkan dengan Pagu Anggaran e-Purchasing belum memenuhi target nasional sebesar 75%.
- b.) Persentase jumlah paket pengadaan yang dilakukan pencatatan, transaksional dan tender/seleksi melalui SPSE baru mencapai 54,94% sehingga masih perlu ditingkatkan.
- c.) Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) belum memenuhi 24 unsur kematangan level 4 (level strategis).
- d.) Persentase peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemda DIY baru mencapai 52,65%.

11.) Sistem tata niaga pangan yang belum efisien

Pada sisi produsen permasalahan disebabkan produksi bersifat musiman menciptakan struktur harga pasar yang tidak menguntungkan bagi produk hasil pertanian. Saat panen produk tersedia di pasar dalam jumlah melimpah sebaliknya sebelum dan sesudah saat panen terjadi kelangkaan pasokan di pasar. Selain itu, inefisiensi juga disebabkan produk melalui rantai pemasaran yang relatif panjang untuk sampai pada konsumen. Di sisi lain, pasar daging sapi dan daging ayam ras, struktur pasar bersifat oligopoli. Pada komoditas beras penelitian tersebut menyimpulkan pedagang besar dan grosir menguasai pasar oleh karena mereka mempunyai jaringan yang luas. Sementara pada komoditas cabai, distributor utama, pedagang besar, dan pedagang grosir yang menguasai pasar, dari hulu hingga hilirnya. Dari sini dapat terlihat bahwa kuasa untuk menentukan harga sangat jarang berada di tangan petani serta pihak yang mendapatkan margin tertinggi biasanya adalah pedagang pengepul dan pedagang eceran.

12.) Masih kurangnya tingkat inklusi keuangan

Inklusi keuangan merupakan sebuah kondisi di mana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 (OJK, 2022), Indeks Inklusi Keuangan DIY sebesar 82,08%, masih sedikit di bawah rerata nasional yang sebesar 85,10%. Kondisi ini merupakan paling rendah di regional Jawa-Bali. Kondisi ini juga didukung oleh belum meratanya akses keuangan antar kabupaten/kota di DIY.

13.) Belum tersedianya kebijakan yang memadai untuk mengatasi permasalahan pembangunan infrastruktur wilayah.

Pada periode RPJMD 2017-2022 sampai dengan tahun 2021 telah diterbitkan 22 kebijakan di bidang pembangunan wilayah dalam rangka pencapaian 4 program pemda, yaitu Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur; Program Tata Kelola Lingkungan Hidup; Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang serta Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah. Dari 22 kebijakan tersebut, terdapat 1 surat keputusan menteri ESDM, tidak ada kebijakan berupa peraturan daerah, terdapat 1 peraturan gubernur, 15 surat edaran gubernur, 3 surat keputusan gubernur dan 2 instruksi gubernur. Berdasarkan implementasi, kebijakan tersebut belum memberikan hasil/dampak yang signifikan terhadap pencapaian target program pemda dan/atau IKU Gubernur sampai dengan akhir RPJMD 2017-2022 yaitu IKLH dengan target sebesar 66,15 baru tercapai sebesar 59,43 dan indeks Williamson dengan target 0,4489 baru tercapai sebesar 0,4504.

14.) Masih diperlukan upaya sinergis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitasi bina mental spiritual secara memadai dan efektif menuju harmoni kehidupan dalam keragaman agama, etnis dan budaya di DIY

Dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan dalam pluralitas religi, etnis dan budaya masyarakat DIY sebagai provinsi toleransi, pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama perlu dilakukan secara memadai, berkeadilan, efektif dan sinergis, berupa dukungan sarana spiritual maupun kelembagaan bina spiritual dalam bentuk pembinaan mental spiritual, festival keagamaan, penguatan peran dan penghargaan bagi Kaum Rohis sebagai panutan agama berbasis budaya, pencegahan konflik keagamaan, optimasi peran lembaga amil zakat dan lembaga pengelola wakaf, serta dukungan penyelenggaraan pondok pesantren. Sesuai dengan Perda DIY Nomor 10 tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, pesantren sebagai salah satu warisan dan kekuatan budaya di DY perlu mendapatkan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi berdasarkan tradisi, karakteristik, kearifan lokal, kebudayaan dan potensi daerah, sehingga bisa berperan optimal dalam pendidikan karakter generasi penerus (santri), agar bermoralitas unggul, toleran, moderat, serta berwawasan kebangsaan.

2.3.2.4.2 Urusan Sekretariat DPRD

1.) Sarana dan Prasarana serta Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pada tahun 2025 pembangunan gedung DPRD memasuki tahapan tahun kedua dari tahun jamak yang dimulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Selain gedung DPRD tersebut pada tahun 2024 telah ditetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pakaian dinas dan atributnya. Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud, Pimpinan DPRD memperoleh tunjangan kesejahteraan berupa: rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan perorangan dinas, dan belanja rumah tangga. Sedangkan untuk Anggota DPRD dapat memperoleh tunjangan kesejahteraan berupa: rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi. Pemberian tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut perlu dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2.3.2.5 Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta Fungsi Penunjang

2.3.2.5.1 Perencanaan

1.) Target indikator makro pembangunan daerah belum semuanya tercapai.

Sampai dengan tahun 2023, target indikator makro pembangunan daerah masih terdapat yang belum tercapai. Target indikator yang belum tercapai diantaranya *inclusive growth index*, pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan wilayah, IPM, dan IPK. Hal ini disebabkan karena koordinasi dan sinkronisasi perencanaan lintas-sektor perencanaan belum optimal. Dinamika kebijakan nasional yang berkonsekuensi pada adaptasi perencanaan pembangunan. Pola hubungan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan regular dan urusan keistimewaan belum padu.

2.) Sumber pendanaan alternatif pembangunan daerah untuk mengatasi rendahnya kapasitas fiskal belum dapat terealisasi.

Sampai dengan tahun 2023, sumber alternatif pendanaan sebagai salah satu solusi mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal DIY untuk melaksanakan pembangunan daerah masih belum dapat terealisasi. Hal ini ditunjukkan skema pembiayaan pembangunan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang diinisiasi oleh DIY belum dapat direalisasikan.

2.3.2.5.2 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1.) Belum terpenuhinya standar kompetensi pegawai

Sektor Aparatur menjadi satu hal yang butuh perhatian, karena kebijakan nasional yang dinamis sehingga menuntut respon cepat dalam bentuk regulasi daerah maupun kegiatan ikutannya. Kualitas dan kinerja pegawai salah satunya ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, sehingga dibutuhkan pendidikan serta pelatihan yang sesuai dengan jabatan dan tugas fungsi yang dimiliki. Pemetaan terhadap kebutuhan kompetensi tersebut sangat diperlukan mulai dari penentuan standar kompetensi hingga Rencana Pengembangan Kompetensi yang menyajikan data gap kompetensi apa saja yang masih ada. Dari hal tersebut maka dapat dijadikan bahan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya yakni upaya pemenuhan kompetensi melalui berbagai skema dan model pembelajaran atau kediklatan.

Kurang optimalnya pengelolaan sistem manajemen SDM yang memanfaatkan seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi dan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kejelasan karir setiap ASN di waktu yang akan datang. Talenta/potensi yang dimiliki oleh setiap ASN diukur sehingga mendapatkan nilai yang dimanfaatkan untuk membuat peta karir.

2.) Belum optimalnya pelaksanaan manajemen talenta

Pelaksanaan manajemen talenta yang optimal membutuhkan beberapa infrastruktur yang harus dipenuhi meliputi peta jabatan, profil talenta, standar metode dan penentuan tingkatan potensial, standar kompetensi jabatan, penilaian kinerja, pola karier, program pengembangan talenta, tim seleksi, basis sumber daya manusia, sistem informasi manajemen

talenta PNS dan anggaran. Salah satu infrastruktur yang belum terpenuhi secara optimal adalah profil talenta. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah, hingga saat ini baru 49,56% pegawai yang telah dipetakan potensinya. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk memastikan kejelasan karir setiap ASN di waktu yang akan datang. Selain itu, pelaksanaan manajemen talenta membutuhkan akuisisi, pengembangan, penghimpunan, dan penghargaan terhadap talenta. Proses pengembangan talenta membutuhkan pengembangan kompetensi diantaranya melalui *corporate university*.

3.) Belum optimalnya penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi

Pada tahun 2023 jumlah PNS Pemda DIY sebanyak 9.209 orang. Dari aspek kualitas, permasalahan yang dihadapi terkait dengan belum optimalnya penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan manajemen sumber daya aparatur sipil negara di lingkungan Pemda DIY. Selain itu, pemenuhan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan. Pemenuhan kebutuhan pegawai menjadi pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu lembaga.

4.) Belum optimalnya integritas Pegawai Negeri Sipil

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah DIY mendapatkan predikat “sangat baik” dalam penerapan Sistem Merit setelah dilakukan penilaian oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun demikian, Pemda DIY masih terdapat catatan penerapan sistem merit, salah satunya terkait dengan kedisiplinan pegawai, dari data Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemerintah Daerah DIY tahun 2021 hingga 2022, jenis hukuman disiplin (hukdis) sedang jumlahnya mengalami kenaikan. Di tahun 2021 ditemukan 3 pelanggaran yang mengakibatkan penjatuhan hukdis sedang, sedangkan di tahun 2022 naik menjadi 4 pelanggaran.

5.) Belum optimalnya mutu layanan kepegawaian

Layanan yang dilakukan oleh BKD ditujukan untuk (data jumlah seluruh pegawai). Dengan jumlah pegawai lebih dari 13.000, maka diperlukan sarana prasarana pelayanan secara fisik maupun manajemen kepegawaian yang baik. Data Kepegawaian memerlukan *Big Data* serta keamanan yang diprioritaskan untuk menjamin ketepatan pelayanan dan otomatisasi seluruh peristiwa kepegawaian. Selain itu, perbaikan infrastruktur melalui pemenuhan gedung negara yang memadai sesuai

standar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai bangunan gedung negara menjadi kebutuhan guna peningkatan layanan kepegawaian, karena bangunan yang ada sekarang sudah tidak memadai.

6.) Pengembangan Kompetensi Pegawai yang belum optimal

Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DIY belum dapat berjalan secara optimal. Sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), seharusnya setiap PNS berhak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JPL). Namun demikian, berdasarkan data dari Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY pada tahun 2021, Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan/pengembangan kompetensi sejumlah 640 (6,09%) dari total 10.504 ASN di Pemda DIY. Selain itu kewajiban pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi yang ideal sesuai dengan standar kompetensi masing-masing jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan umum menjadi tugas yang harus diselesaikan. Pasang surutnya pandemi menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan penyesuaian model pembelajaran di samping karena alokasi anggaran yang harus diprioritaskan untuk belanja lain yang bersifat wajib/mengikat. Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam memberikan peningkatan kompetensi telah menginisiasi *Corporate University* melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 Tentang *Corporate University* Pemerintah DIY. Dengan demikian, pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Pemda DIY, meskipun sudah ada OPD yang menjadi *leading sector* (Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dan Badan Kepegawaian Daerah DIY), namun untuk mendorong keberhasilan pengembangan kompetensi ASN diperlukan sinergitas seluruh OPD dalam upaya mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah melalui optimalisasi keberadaan *corporate university*. Melalui *corporate university*, seluruh OPD di Pemda DIY diharapkan dapat berperan dalam pengembangan kompetensi pegawai.

7.) Dinamika kebijakan terkait kepegawaian

Sebagai upaya menuju birokrasi berkelas dunia sebagaimana tertuang dalam *roadmap* RB Nasional, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya terkait dengan penyederhanaan birokrasi yang

tahapannya meliputi penyederhanaan struktur birokrasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Terhadap beberapa kebijakan tersebut tentunya memerlukan beberapa langkah kritikal yang harus dilakukan daerah antara lain terkait penataan organisasi, penataan jabatan fungsional, transformasi jabatan serta pengawasan dan pengendalian, agar pengelolaan sumberdaya aparatur serta mekanisme kerja tidak mengganggu tata kelola internal maupun dalam rangka pelayanan publik.

8.) Sarana prasarana pendukung sesuai standar dan persyaratan akreditasi LAN

Sebagai pusat pengembangan kompetensi, dari sisi infrastruktur unit kerja Pendidikan dan Pelatihan memerlukan sarana prasarana yang ramah *difabel*, Pengembangan kamar asrama sesuai standar hotel berbintang, mobil *shuttle* untuk peserta PKN, sarana prasarana olahraga, smoking area, pengembangan sarana prasarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengembangan perpustakaan, *pengembangan sarana prasarana smart learning (learning management system, campus management system, content management system, knowledge management system)*.

2.3.2.5.3 Urusan Keuangan

1.) Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan penyusunan anggaran belanja, yaitu kesepakatan bersama KUA PPAS dan perubahan KUA PPAS serta evaluasi RAPBD dan perubahan RAPBD tergantung pihak eksternal

Pelaksanaan pengajuan evaluasi RAPBD dan Perubahan RAPBD telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Namun dalam prakteknya, terdapat Standar Operasional Prosedur yang harus dipenuhi di Kementerian Dalam Negeri RI sehingga masih perlu penyesuaian terutama dalam hal tata kala waktu.

2.) Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum digali secara optimal.

2-585

Untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerah yang terus meningkat, Pemda DIY masih mengandalkan pendapatan transfer. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah yang masih dominan dibandingkan PAD. Sesuai data rincian anggaran dan realisasi pendapatan daerah TA. 2023 Unaudited (LKPJ Gub DIY, 2023), ercatat 59,30% sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer diikuti 40,55% PAD dan 0,14% Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ketergantungan fiskal terhadap pusat harus ditekan sehingga kemandirian fiskal daerah akan meningkat. Selain itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan menurunkan hasil dari retribusi dan pajak yang diterima Pemda DIY. Perlu upaya optimalisasi PAD mulai dari inventarisasi potensi maupun intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

3.) Pemanfaatan layanan digital untuk transaksi pendapatan belum optimal.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ Tanggal 13 Desember 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota baru dilaksanakan setelah keluar Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemda DIY menindaklanjuti hal tersebut dengan memproses penyusunan peraturan peta jalan ETPD. Selain itu dalam rangka meningkatkan penggunaan transaksi digital, Pemda DIY masih perlu memperhatikan beberapa hal sesuai arahan Presiden tentang transformasi digital, antara lain: a). Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital; b). *Roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis; c). Mempersiapkan SDM yang memiliki talenta digital; d). Mempersiapkan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital. Implementasi KKPD (kartu kredit pemerintah daerah) pada Pemerintah Daerah DIY memerlukan peraturan baru dan harmonisasi dengan peraturan-peraturan turunan terkait.

4.) Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) belum berjalan secara efektif sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Inventarisasi Barang Milik Daerah belum dilaksanakan secara tertib dan baik, sehingga berpotensi untuk dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa ijin BMD tersebut hanya akan membebani APBD dalam hal biaya pemeliharaan dan pengamanan, sedangkan potensi PAD dari pendayagunaan BMD tersebut akan berkurang.

5.) Pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum optimal.

Penerapan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan amanat-amanat terkait penerapan PPK-BLUD Pemda DIY belum dapat sepenuhnya dilakukan. Terdapat beberapa kebijakan yang pengaturannya perlu dituangkan dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan amanat-amanat yang belum dilaksanakan oleh BLUD. Pencatatan dan penatausahaan keuangan di BLUD selama ini dilakukan secara manual sehingga dalam pelaksanaan tidak terdapat keseragaman dan pegawai di bidang keuangan sering mengalami kesulitan, terutama untuk BLUD baru. Sementara itu terkait penetapan BLUD yang belum optimal disebabkan oleh pengajuan usulan seringkali tidak disertai kesiapan kualitas dan kuantitas SDM yang cukup, di Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan/Daerah dan Sekolah Menengah Kejuruan yang akan menerapkan BLUD.

6.) Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) belum optimal

Pembinaan BUMD belum didukung dengan regulasi (Permendagri) yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara evaluasi BUMD. Pembinaan BUMD membutuhkan dukungan dari lintas OPD Pemda DIY, antara lain dalam pembinaan PT AMI terkait transportasi perlu dilakukan bersama BAPPEDA DIY dan Dinas Perhubungan DIY, dalam pembinaan PT Taru Martani terkait penugasan cadangan pangan perlu dilakukan bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Selain itu dalam penelaahan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran BUMD perlu dukungan dari tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam hal bisnis dan keuangan.

Pembinaan BUKP oleh Pemda DIY maupun Pembina Tingkat II dan Pembina Teknis bersifat pembinaan dan pengawasan eksternal, sedangkan dalam pengawasan BUKP diperlukan Sistem Pengendalian

Internal yang melekat pada struktur dan sistem operasional BUKP sebagaimana pada BUMD lainnya.

2.3.2.5.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan

1.) Pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan ketercapaian target pembangunan daerah masih rendah

Perhitungan indikator persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah, berdasarkan jumlah rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan terpilih yang dijadikan sebagai bahan rumusan perencanaan dibagi jumlah total rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di DIY dikalikan 100%.

Proses pemilihan rekomendasi yang digunakan sebagai referensi untuk perencanaan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a.) pemilihan hasil penelitian yang relevan dengan isu maupun permasalahan pembangunan di DIY;
- b.) pemilihan rekomendasi dari penelitian terpilih berdasarkan urusan; dan
- c.) penapisan rekomendasi dari penelitian terpilih dengan mendasarkan pada arah kebijakan yang terdapat pada RPJMD 2017-2022

Pada tahun 2023 terdapat 197 (81,74%) rekomendasi terpilih dari keseluruhan sejumlah 241 rekomendasi yang relevan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD DIY 2017-2022. Sebanyak 197 rekomendasi terpilih tersebut terdiri dari urusan pendidikan 3 rekomendasi, kesehatan 8 rekomendasi, pekerjaan umum dan penataan ruang 13 rekomendasi, energi dan sumber daya 6 rekomendasi, perumahan dan kawasan permukiman 13 rekomendasi, pangan 7 rekomendasi, lingkungan hidup 8 rekomendasi, komunikasi dan informatika 20 rekomendasi, koperasi dan usaha kecil menengah 1 rekomendasi, kebudayaan 6 rekomendasi, pariwisata 39 rekomendasi, pertanian 25 rekomendasi, kehutanan 8 rekomendasi, perencanaan 22 rekomendasi, keuangan 5 rekomendasi, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan 5 rekomendasi, perdagangan 2 rekomendasi, keistimewaan urusan kelembagaan 2 rekomendasi, dan keistimewaan urusan tata ruang 4 rekomendasi.

Hasil rekomendasi sebagian bersifat sangat teknis sehingga perlu diterjemahkan kembali untuk menjadi bahan penyusunan perencanaan. Setiap tahun dilaksanakan minimal 1 penelitian mandiri oleh peneliti Bappeda DIY. Jumlah penelitian tersebut masih sangat kurang mengingat beragamnya perencanaan pembangunan yang harus didukung dengan bukti/data.

2.3.2.5.5 Urusan Penghubung

1.) Fasilitasi terhadap masyarakat DIY di Jakarta belum optimal.

Pemberian pelayanan penunjang terhadap masyarakat DIY di Jakarta merupakan salah satu fungsi penyelenggaraan tugas dalam urusan penghubung. Dinamika serta cakupan masyarakat DIY di Jakarta yang luas mengakibatkan meningkatnya tuntutan atas fasilitasi yang diberikan.

2.) Dukungan dalam penyelenggaraan dan fasilitasi untuk mendukung promosi potensi seni budaya dan industri kreatif DIY masih perlu ditingkatkan.

Perlu penguatan dukungan terhadap penyelenggara unsur penghubung dan teknologi informasi dalam mendukung promosi potensi seni budaya dan industri kreatif DIY.

3.) Tindaklanjut kebijakan terkait Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Badan Penghubung mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Selanjutnya mengingat Pemerintah telah menetapkan lokasi IKN sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka antisipasi terhadap kebijakan selanjutnya terkait lokasi kedudukan Badan Penghubung perlu dipersiapkan.

2.3.2.6 Unsur Pengawasan Pemerintahan

1.) Metode pengawasan masih kurang optimal dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah

Penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini sangat dinamis yang diantaranya dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah, sistem informasi, dan dinamika teknis di

lapangan. Guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, maka diperlukan tindak lanjut berupa pembaharuan metode sistem pengawasan yang lebih inovatif, komprehensif, dan adaptif dengan memanfaatkan sistem informasi dan kerja sama lintas sektor.

2.3.2.7 Urusan Keistimewaan

Urusan Keistimewaan yang didanai menggunakan dana keistimewaan telah disalurkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2013 dengan dinamika yang berbeda beda baik terkait waktu dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Regulasi tersebut selalu ditindaklanjuti dengan regulasi di tingkat DIY. Terakhir penyusunan *Grand Desain* Keistimewaan yang merupakan haluan dan pedoman kerja bagi Pemda DIY dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan dalam periode 20 tahun. Diharapkan dengan disusunnya grand desain ini permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keistimewaan di DIY bisa terpecahkan. Secara umum, dinamika permasalahan pelaksanaan dana keistimewaan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan tingkat pemahaman para pemangku program dan kegiatan terhadap kaidah-kaidah pembangunan urusan keistimewaan.
2. Panjangnya rentang kendali para pemangku keistimewaan sebagai akibat semakin banyaknya jumlah pemangku keistimewaan
3. Belum semua kalangan mengetahui informasi mengenai keistimewaan dan hasil-hasil pembangunan keistimewaan yang dilaksanakan pemerintah, sedangkan harapan masyarakat terhadap capaian tujuan keistimewaan untuk kesejahteraan masyarakat sangat besar
4. Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang berbenturan dengan regulasi keistimewaan, sehingga tidak seluruhnya dapat mengakomodir kebutuhan dalam pengelolaan keistimewaan
5. Sulitnya mencari benang merah yang langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran
6. Situasi pandemik yang penuh dengan ketidakpastian dan pembatasan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan

Secara khusus terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keistimewaan di DIY di setiap urusan yakni :

1.) Urusan Kelembagaan

- a. Pelaksana kegiatan diuruskan kelembagaan semakin banyak terutama di Kabupaten/Kota terkait penugasan urusan keistimewaan
- b. Kurang meratanya pemahaman terkait perencanaan keistimewaan
- c. Masih perlunya sosialisasi yang masif terkait kebijakan dalam pelaksanaan urusan
- d. Nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan terkait urusan kelembagaan masih terbatas
- e. Perlunya kejelasan pembagian kewenangan antar pelaksana kegiatan keistimewaan

2.) Urusan kebudayaan

- a.) Belum tergalinya dengan optimal keterkaitan nilai-nilai kebudayaan dengan isu-isu nasional dan global utamanya terkait penanggulangan kemiskinan.
- b.) Kurang optimalnya pengelolaan Data dan Informasi Aset asset Budaya baik benda maupun tak benda
- c.) Belum meratanya kualitas dan kuantitas ruang ekspresi masyarakat
- d.) Berkurangnya jumlah maestro maestro seni budaya di Yogyakarta
- e.) Lunturnya sikap mental dan perilaku masyarakat yang adiluhung dalam masyarakat ditunjukkan dengan kenakalan remaja di jalanan. vandalisme
- f.) Tekanan pembangunan dan alih fungsi lahan bangunan terhadap cagar budaya dan warisan budaya, tantangan untuk melestarikan warisan budaya tak benda dan pemeliharaan fisik warisan budaya cagar budaya
- g.) Keterlibatan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah dalam rangka melestarikan nilai-nilai kearifan budaya
- h.) Perkembangan zaman, globalisasi, dan modernisasi menjadi tantangan untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal budaya

- i.) Ketersediaan ruang dan kesempatan untuk seluruh masyarakat, sarana dan prasarana perlu ditingkatkan untuk mendukung pemeliharaan kegiatan kebudayaan, mengekspresikan seni dan budaya.
- j.) Upaya untuk menjadikan sumbu filosofi sebagai nominasi warisan dunia ke UNESCO

3.) Urusan Pertanahan

- a.) Pensertifikatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang cukup lama karena proses dari tahap pendaftaran hingga penerbitan yang sangat kompleks.
- b.) Penanganan permasalahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang terkendala karena informasi yang diberikan oleh pihak terkait kurang lengkap.
- c.) Kegiatan penegasan batas wilayah yang terkendala akibat hilang/rusaknya patok batas, serta data narasumber yang kurang lengkap.
- d.) Terbatasnya kapasitas pemeliharaan naskah-naskah pertanahan
- e.) Beberapa lahan status lahannya tidak jelas

4.) Urusan tata ruang

- a.) Tekanan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai objek penataan ruang semakin tinggi;
- b.) Densifikasi dan intensitas pemanfaatan ruang yang terus meningkat mengakibatkan Bangunan dan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten akan semakin “tenggelam” di antara gedung-gedung tinggi sehingga secara langsung akan menegaskan bahkan mendegradasikan ciri-ciri keistimewaan;
- c.) Komersialisasi ruang yang terus menguat dalam pembangunan di Yogyakarta secara langsung telah melunturkan filosofi pembangunan tata ruang Yogyakarta berbasis keistimewaan
- d.) Konsentrasi Kekuasaan atas ruang oleh pihak-pihak tertentu (pemilik kapital) telah menyebabkan lemahnya kontrol pemerintah atas ruang keistimewaan Yogyakarta dan

berdampak langsung atas hilangnya akses masyarakat terhadap ruang beserta isinya. baik yang bersifat publik maupun private.

- e.) Tata ruang dan tata bangunan khususnya di perkotaan dan fenomena kota yang tertutup oleh media iklan luar ruang merupakan bukti penataan kota yang “acak-acakan” sekaligus mengindikasikan tidak digunakannya filosofi keistimewaan Yogyakarta (misalnya poros sumbu imajiner dan Golong-Gilig) dalam proses penataan ruang dan pembangunan kota;
- f.) Menurunnya harmoni lingkungan dan sosial ekonomi yang ditunjukkan oleh meningkatnya kemacetan. pencemaran lingkungan. intensitas bencana. dan bentuk-bentuk kerusakan lingkungan lain.
- g.) Belum optimalnya Koordinasi. integrasi. sinkronisasi serta sinergi antara substansi RTRW dan RDTR dengan rencana tata ruang keistimewaan Yogyakarta khususnya pada area SRS Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- h.) Regulasi yang mengatur tentang Tata Ruang dinilai masih sangat normatif menyulitkan memasukkannya nilai-nilai filosofis keistimewaan Yogyakarta dalam dokumen perencanaan ruang;
- i.) Sistem kelembagaan penataan ruang keistimewaan masih lemah. khususnya terkait dengan duplikasi kewenangan antar instansi. lintas kabupaten maupun antar kabupaten dengan DIY.
- j.) Masih terbatasnya keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam proses penataan ruang keistimewaan Yogyakarta. mengakibatkan tata ruang hanya menata wadah kegiatan manusia. tanpa memperhatikan sistem budaya yang berkembang dalam masyarakat.

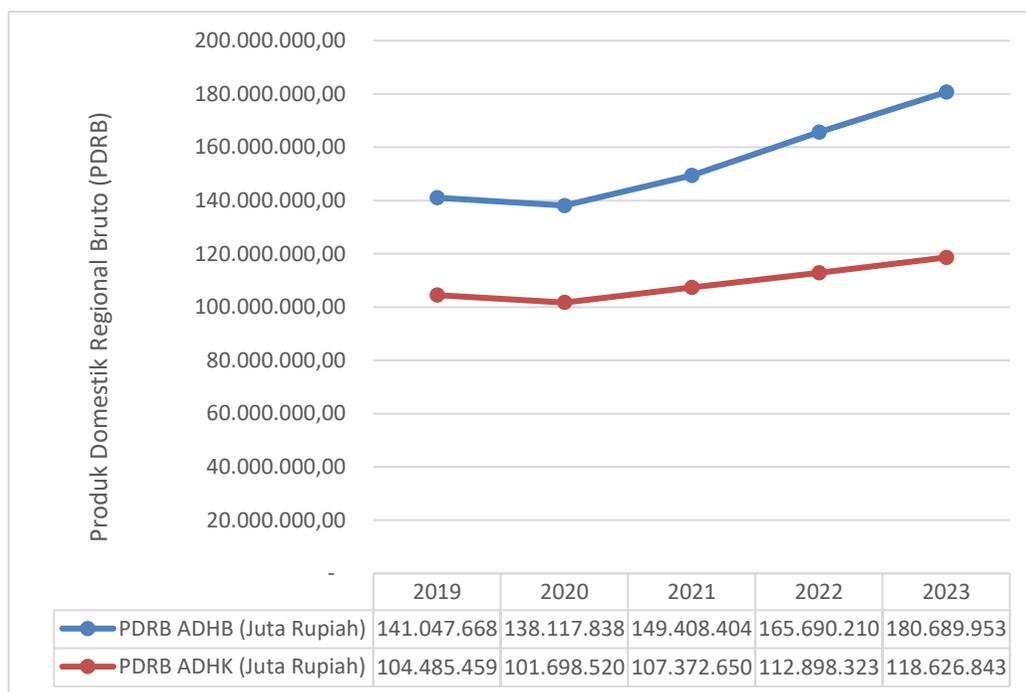
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 Kondisi Indikator Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya

3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Periode 2019-2023

Selama periode 2019 sampai 2023, perekonomian DIY menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2019, PDRB Atas Dasar harga Konstan (ADHK) adalah Rp104,49 triliun dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp141,047 triliun. Tren PDRB ADHK dan ADHB meningkat sampai tahun 2023 namun sempat menurun di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada akhir periode PDRB ADHK adalah Rp118,63 triliun dan PDRB ADHB adalah Rp180,69 triliun.



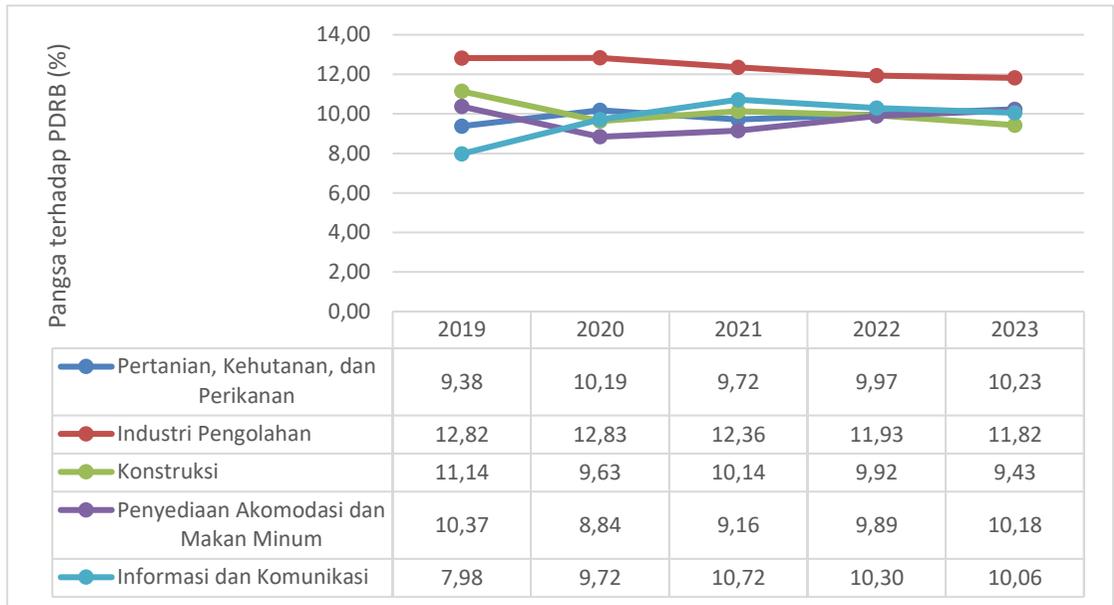
sumber : BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 3-1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2019 - 2023

Selama tahun 2023, lima lapangan usaha penyumbang terbesar pembentuk PDRB DIY adalah sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum. Perkembangan pangsa ke lima lapangan usaha tersebut menunjukkan dinamika. Pada tahun 2020, kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum tidak termasuk lima sektor kontribusi terbesar sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya karena dampak pandemi yang menurunkan dinamika sektor tersebut terutama terkait menurunnya aktivitas pariwisata dan di bawah sumbangan sektor Jasa Pendidikan. Pada tahun 2021, kontribusi lapangan usaha tersebut kembali meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas pariwisata di tahun tersebut sampai tahun 2023. Pangsa lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mengalami penurunan sejak tahun 2021. Pola yang sama terjadi pada lapangan usaha konstruksi. Perkembangan lima sektor dominan yang konsisten menyumbang kontribusi PDRB DIY disajikan pada gambar berikut ini. Pada tahun 2023, lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki kontribusi tertinggi yaitu sebesar 11,82%. Sementara itu,

3-2

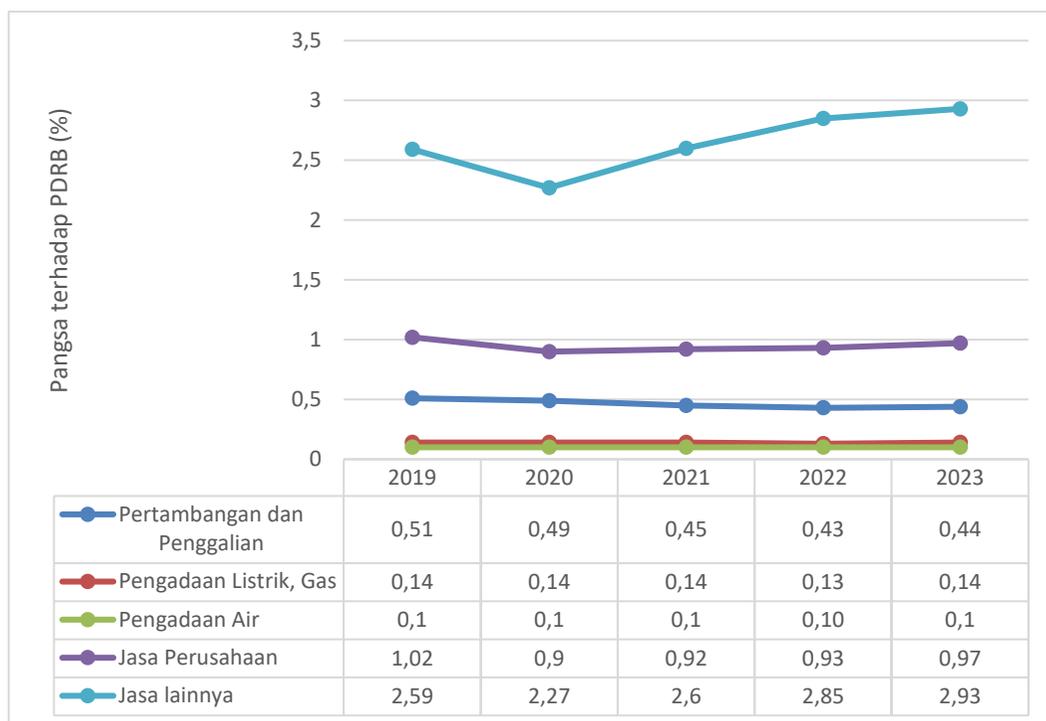
pangsa konstruksi adalah 9,43%, Informasi dan Komunikasi adalah 10,06% dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 10,23% serta Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum 10,18%.



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 3-2 Pangsa Lima Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Lapangan Usaha (%), 2019 - 2023

Lima lapangan usaha yang memiliki kontribusi terendah secara konsisten dalam pembentukan PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air dan Jasa Lainnya serta Jasa Perusahaan. Secara rata-rata, kontribusi keempat sektor tersebut tercatat kurang dari 1%. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian cenderung menurun sementara ketiga sektor lainnya relatif dinamis dari waktu ke waktu. Sementara itu pangsa Jasa Lainnya menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2020.

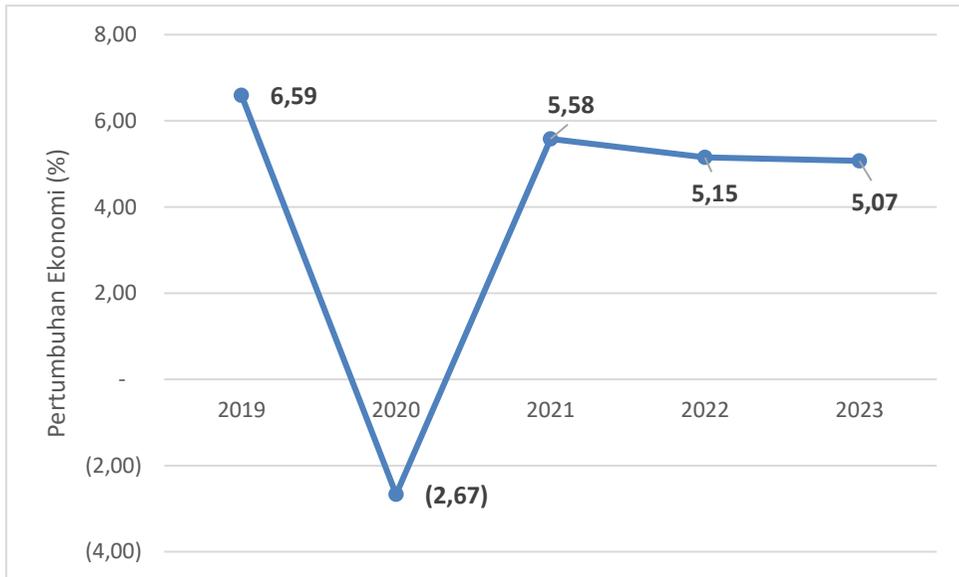


Sumber : BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 3-3 Pangsa Lima Lapangan Usaha Terendah terhadap PDRB ADHK DIY Tahun 2019 - 2023 (%)

3.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

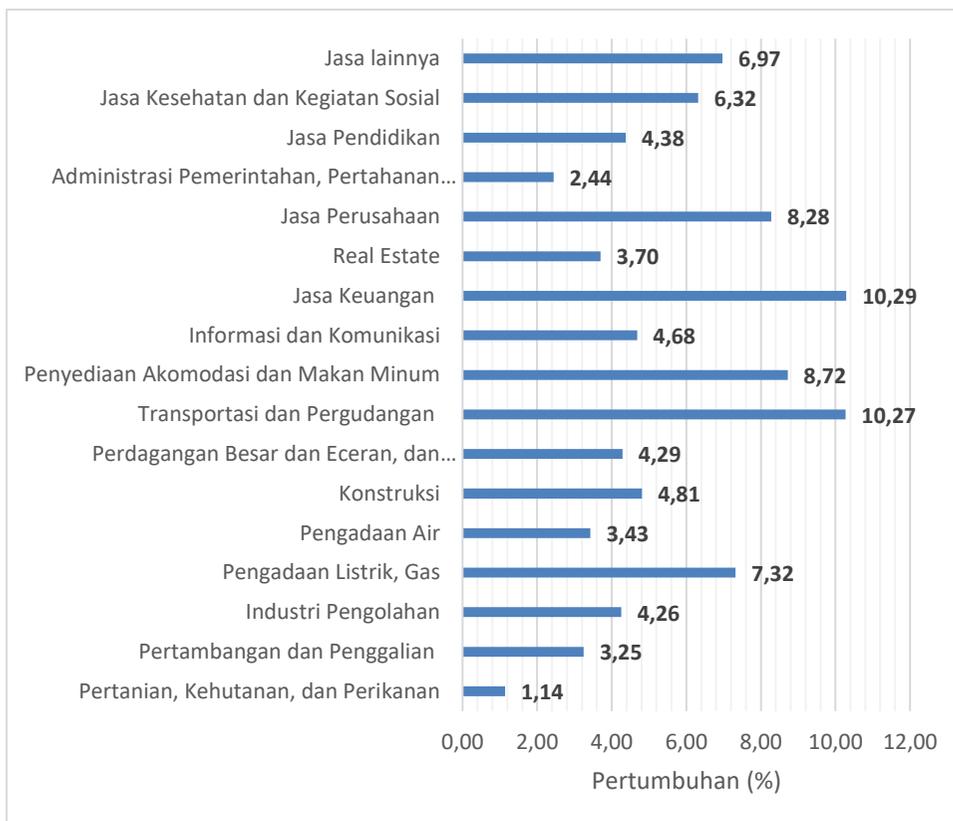
Pertumbuhan ekonomi DIY selama periode 2019-2023 menunjukkan tren meningkat, tetapi pada tahun 2020 tingkat pertumbuhannya menurun. Setelah itu, pertumbuhan kembali menunjukkan perkembangan ekspansif. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 6,59%, sedangkan pertumbuhan tahun 2020 sebesar -2,67%. Di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 5,07%



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 3-4 Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2019 - 2023

Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif di tahun 2023 di dukung pertumbuhan semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Keuangan dengan pertumbuhan sebesar 10,29%. Sementara itu pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 1,14%.



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 3-5 Pertumbuhan Lapangan Usaha dalam PDRB (%), 2023

3.1.1.3 Struktur Pengeluaran Dalam PDRB

Pembentukan PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Selama periode 2019-2023, semua jenis pengeluaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, setelah menurun pada tahun 2020 akibat dampak pandemi. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga selalu konsisten menjadi penyumbang terbesar PDRB dengan pangsa di atas 65% selama tahun 2019 – 2020 tapi kemudian menurun menjadi kurang dari 62% pada tiga tahun terakhir. Pangsa Konsumsi Rumah Tangga, Pemerintah dan Perubahan Inventori mengalami dinamika

Tabel 3-1 PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2019 - 2023

Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	92.436.090	92.753.542	96.073.981	102.110.288	111.847.122
Konsumsi LNPRT	4.613.732	4.378.319	4.470.000	4.819.205	5.465.488
Konsumsi Pemerintah	22.434.454	22.889.807	23.707.981	24.184.623	25.582.648
Pembentukan Modal Tetap Bruto	49.576.128	44.319.423	49.030.849	53.972.182	59.938.746
Perubahan Inventori	1.503.200	1.631.021	1.793.056	17.984.439	1.734.039
Net Ekspor Barang dan Jasa	(29.515.920)	(29.515.920)	(25.025.220)	(21.168.300)	(23.878.090)
P D R B	141.047.590	138.117.840	149.413.650	165.718.440	180.689.953

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2024

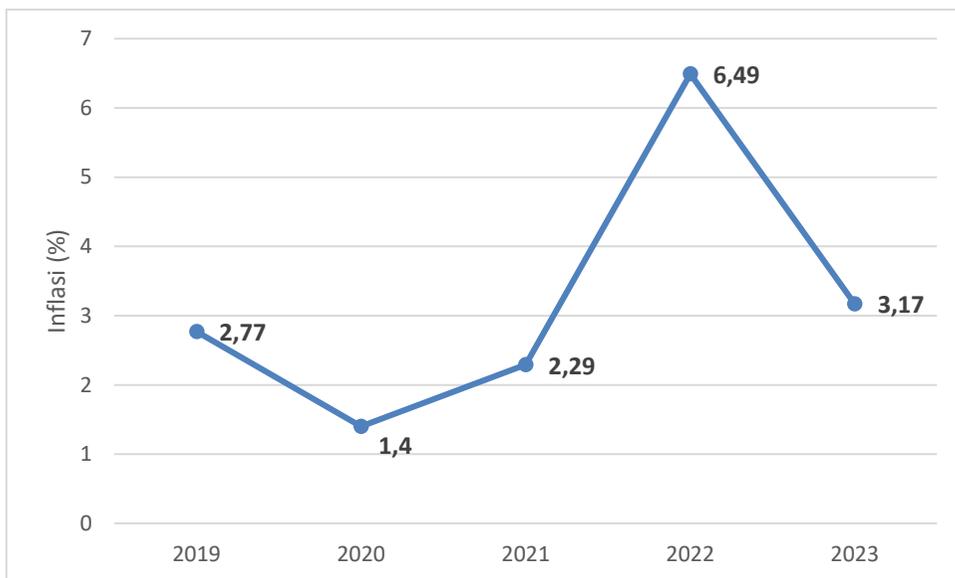
Tabel 3-2 Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran (%), 2019 - 2023

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi RT	65,54	67,16	64,30	61,62	61,90
Konsumsi LNPRT	3,27	3,17	2,99	2,91	3,02
Konsumsi pemerintah	15,19	16,57	15,44	14,59	14,16
PMTB	35,15	33,09	32,82	32,57	33,17
Perubahan Inventori	1,07	1,18	1,20	1,09	0,96
Net Ekspor Antar daerah	-20,93	-20,17	-16,75	-21,7	-13,21
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi DIY 2024

3.1.1.4 Inflasi

Laju inflasi DIY yang ditunjukkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Yogyakarta menunjukkan dinamika selama kurun waktu lima tahun, 2019-2023. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 6,49% yang kemudian menurun di tahun 2023 mencapai 3,17%. Sementara itu inflasi terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 1,4%.

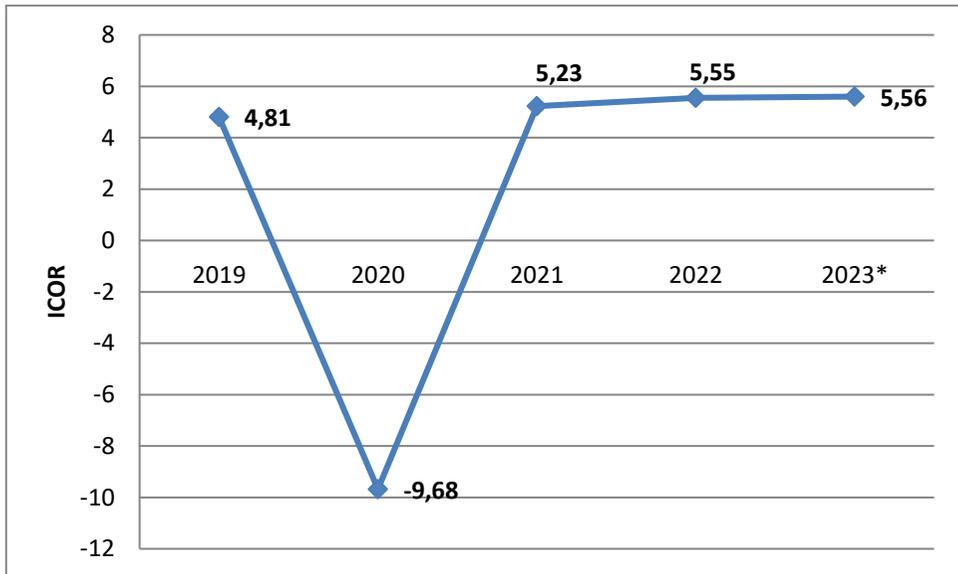


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 3-6 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2019 - 2023

3.1.1.5 ICOR

Nilai ICOR DIY relatif tinggi namun menunjukkan perkembangan dengan tren yang meningkat pada periode 2020-2023. ICOR di tahun 2020 menunjukkan nilai negatif karena pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Nilai ICOR naik dari 5,23 di tahun 2021 menjadi 5,56 di tahun 2023 yang menunjukkan terdapat penurunan efisiensi proses produksi selama periode.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023 dan olahan
Keterangan: *Olahan

Gambar 3-7 Perkembangan ICOR DIY (PMTB+Perubahan Inventori), 2019- 2023

3.1.1.6 Ketenagakerjaan

Perkembangan jumlah angkatan kerja tahun 2019-2023 menunjukkan dinamika jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja menurun di tahun 2020 dan kemudian meningkat kembali di tahun 2021. Namun di tahun 2023, jumlah angkatan kerja menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran terbuka menunjukkan tren menurun selama 2020-2023. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 adalah 3,69% dengan jumlah penganggur terbuka sebanyak 81.980 orang. Indikator ketenagakerjaan DIY tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3-3 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2019 - 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	2.246.190	2.228.160	2.334.960	2.336.080	2,291,690

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penganggur Terbuka (Jiwa)	71.480	101.850	106.430	94.950	81,980
TPT (%)	3,18	4,57	4,56	4,06	3,69

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

3.1.1.7 Kemiskinan

Dalam periode 2019-2023 jumlah penduduk miskin menunjukkan kenaikan pada sub periode 2019 – 2021 dan kemudian menurun pada sub periode berikutnya. Selama sub periode pertama (2019-2021) jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 57.930 orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di tahun 2023 menurun kembali sebanyak 57.930 orang dari tahun 2021.

Tabel 3-4 Kemiskinan di DIY Tahun 2019 - 2023 (Maret)

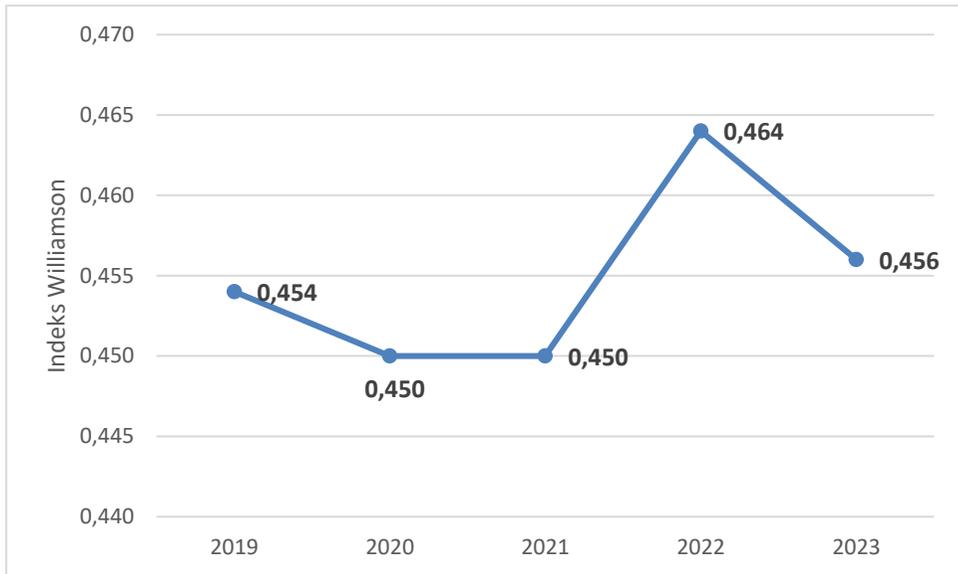
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Orang Miskin (ribu orang)	448,47	475,72	506,4	454,76	448,47
Tingkat Kemiskinan (%)	11,7	12,28	12,8	11,34	11,04

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Persentase penduduk miskin mengalami kenaikan sampai dengan 2021. Pada 2019, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 11,7% yang meningkat 12,8% di tahun 2021. Tingkat kemiskinan kemudian menurun menjadi 11,34% di tahun 2022 dan kemudian menurun kembali menjadi 11,04% di tahun 2023.

3.1.1.8 Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah yang diukur menggunakan *Indeks Williamson (IW)* menunjukkan fluktuasi. Nilai IW DIY tahun 2019-2023 mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi antara wilayah di DIY semakin tidak merata. Pada tahun 2019 sampai 2021, ketimpangan regional menunjukkan penurunan. Sementara itu kenaikan ketimpangan terjadi dari tahun 2021 ke tahun 2022. Ketimpangan juga menurun di tahun 2023, Indeks Williamson turun dari 0,464 (2022) menjadi 0,456 (2023).

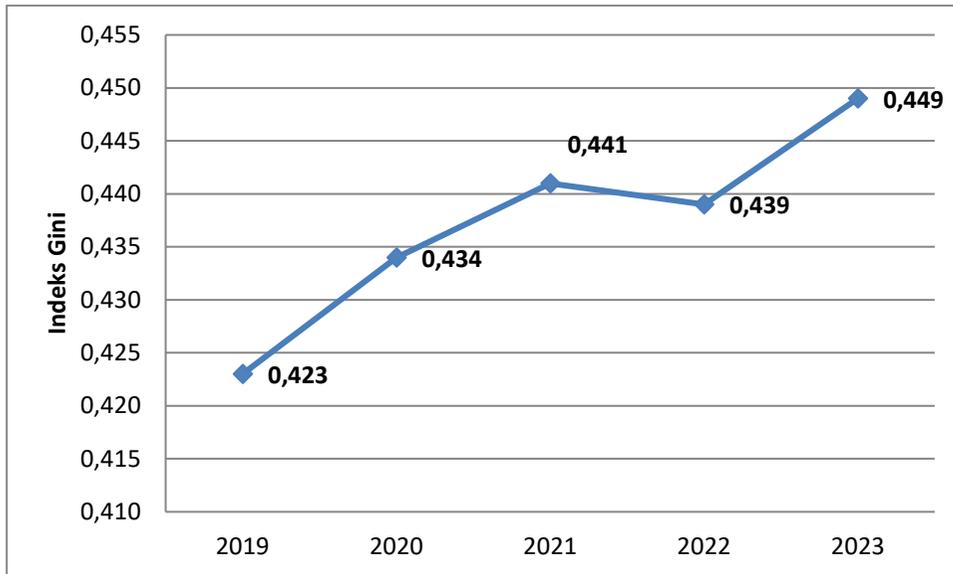


Sumber: Bappeda DIY, 2024

Gambar 3-8 Indeks Williamson DIY, Tahun 2019-2023

3.1.1.9 Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini DIY cenderung tren peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2023. Ketimpangan meningkat dari 0,42 (2019) menjadi 0,449 (2023) Pada tahun 2022, Rasio Gini sempat menurun menjadi 0,439.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gambar 3-9 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2019 - 2023 (Maret)

3.1.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024 dan 2025

Kondisi perekonomian DIY diperkirakan mengalami ekspansi namun dipengaruhi oleh perkiraan kondisi dunia yang diprediksi berkontraksi karena dampak perang dan kondisi politik dunia. Peningkatan kinerja ekonomi terkait dengan semakin kondusifnya aktivitas perekonomian Indonesia yang konservatif. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, proyeksi kinerja perekonomian DIY tahun 2024 dan 2025 menggunakan asumsi :

1. Kriteria skenario kinerja ekonomi tahun 2022 dan 2023 didasarkan pada perkembangan proses kondisi perekonomian dan perkembangan perekonomian global yang relatif berkontraksi. Permintaan ekspor dan aliran impor menghadapi kendala akibat perang di beberapa negara dan jalur logistik internasional serta menurunnya permintaan global. Sementara itu kondisi politik karena penyelenggaraan pemilihan umum mendorong dinamika perekonomian yang dipengaruhi unsur kehati-hatian;
2. Dari sisi penawaran, kontribusi sektor-sektor yang selama ini mendominasi PDRB tersebut tetap diharapkan akan memberikan kontribusinya yang besar pada total produk daerah;

3-12

3. Dari sisi permintaan, dominasi konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap memberikan kontribusi permintaan total. Peningkatan pengeluaran dunia usaha diperkirakan masih konservatif.

Proyeksi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3-5 Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024 dan Tahun 2025

No.	Indikator Ekonomi Makro	2024		2025	
		Pesimis	Optimis	Pesimis	Optimis
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,07	5,60	5,3	5,8
2.	Inflasi	4	2	3,8	3,1
3.	ICOR	5,9	5,2	5,7	5,39
4.	TPT	4	3,45	3,51	3,12
5.	Kemiskinan	10,44	10,11	10,50	10,00
6.	Indeks Gini	0,448	0,446	0,447	0,443
7.	Indeks Williamson	0,455	0,452	0,452	0,438

Sumber: BPPSD Bappeda DIY diolah, 2024

3.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha dominan tumbuh kurang dari 5,5%. untuk skenario optimis dan 4,5% untuk skenario pesimis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan 1,5% untuk skenario pesimis dan 2,6% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor diperkirakan 2% untuk skenario pesimis dan 3,9% untuk skenario optimis. Kunjungan wisatawan ke DIY diperkirakan akan meningkat cukup signifikan yang mempengaruhi kinerja sektor akomodasi dan makan minum dan ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ini diperkirakan 3% untuk skenario pesimis dan 5,7% skenario optimis. Bangkitnya aktivitas pariwisata dan perdagangan namun terkendala kondisi permintaan global yang relatif menurun menyebabkan perbaikan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 2,9% untuk skenario pesimis dan 5,1% untuk optimis. Asumsi-asumsi tersebut mendorong prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 adalah 5,07% sampai 5,60%.

Seiring dengan kondisi politik Indonesia yang diperkirakan stabil setelah pemilihan umum tahun 2024. Kondisi politik internasional pun diperkirakan membaik. Hal tersebut mendorong kondisi perekonomian 2025 bergerak lebih baik dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha dominan tumbuh 6% untuk skenario optimis dan 4,9% untuk skenario pesimis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan 2,3% untuk skenario pesimis dan 4,5% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor diperkirakan 3,3% untuk skenario pesimis dan 5,1% untuk skenario optimis. Kunjungan wisatawan ke DIY diperkirakan akan meningkat kembali yang mempengaruhi kinerja sektor akomodasi dan makan minum dan ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ini diperkirakan 5,1% untuk skenario pesimis dan 7,4% skenario optimis. Bangkitnya aktivitas pariwisata dan perdagangan namun terkendala kondisi permintaan global yang sedikit demi sedikit meningkat menyebabkan perbaikan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 3,6% untuk skenario pesimis dan 6,5% untuk optimis. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor diperkirakan 4,6% untuk skenario pesimis dan 5,95% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan 5,1% untuk skenario pesimis dan 7,3% untuk skenario optimis. Membaiknya kondisi sektor pariwisata dan perdagangan menyebabkan peningkatan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 8,1% untuk skenario pesimis dan 8,85% untuk skenario optimis. Asumsi-asumsi tersebut mendorong prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 adalah 5,3% sampai 5,8%

3.1.2.2 Inflasi

Tingkat inflasi di DIY menunjukkan dinamika selama empat tahun terakhir ini. Meskipun demikian kinerja pengendalian inflasi telah menunjukkan capaian yang bagus di tahun 2023 dengan menurunkan inflasi dari 6,49% (2022) menjadi 3,17% (2023). Hal ini menunjukkan efektifitas kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam melakukan monitoring dan pengendalian harga barang-barang terutama barang kebutuhan masyarakat. Kinerja tersebut diperkirakan akan tetap di tahun 2024 dan 2025. Daya beli masyarakat maupun kemampuan fiskal pemerintah yang meningkat namun moderat mendorong kenaikan permintaan barang dan jasa. Sedangkan di sisi lain, penawaran pada beberapa komoditas berpotensi meningkat terutama disebabkan oleh sudah

lancarnya mobilitas bahan baku dan meningkatnya kinerja sektor transportasi. Akumulasi dampak sisi permintaan dan penawaran dan efektifitas TPID masih mendorong tingkat inflasi DIY masih berkisar antara 2% sampai 4% di tahun 2024 dan antara 3,1% sampai 3,8% di tahun 2025.

3.1.2.3 ICOR

Selama dua tahun terakhir pasca pandemi, terjadi peningkatan efisiensi proses produksi di DIY dipengaruhi antara lain oleh membaiknya kinerja sektor transportasi dengan lebih tersedianya suplai bahan baku yang mendorong peningkatan efisiensi kinerja perekonomian secara umum. Prediksi tingkat ICOR tahun 2024 berkisar antara 5,2 – 5,9 dan tahun 2025 adalah 5,39 – 5,7.

3.1.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka mulai tahun 2024 dan 2025 diperkirakan mengalami penurunan secara gradual dari tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh dinamika ekspansif kinerja sektor yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja. Sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor selama ini menyerap sekitar 19% dari total angkatan kerja, industri pengolahan 17,05% serta penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 9,53%. Perkiraan TPT selama tahun 2024 adalah berkisar 3,45% - 4% dan 2025 adalah 3,12% - 3,51%.

3.1.2.5 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di tahun 2024 dan 2025 akan menurun seiring dengan kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta menurunnya tingkat pengangguran. Penurunan tingkat kemiskinan juga dipengaruhi dengan relatif rendahnya tingkat inflasi. Prediksi tingkat kemiskinan di tahun 2024 akan berkisar 10,11% sampai 10,44 dan pada tahun 2025 berkisar antara 10,00 - 10,50%.

3.1.2.6 Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan masyarakat di DIY tahun 2024 dan 2025 diperkirakan menurun. Perbaikan pemerataan pendapatan didukung oleh pertumbuhan industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum maupun perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan dampak pengganda bagi usaha kecil.

Proyeksi tingkat ketimpangan yang ditunjukkan dengan Indeks Gini Tahun 2024 yaitu antara 0,446 sampai 0,448 dan 2025 adalah 0,443 sampai 0,447.

3.1.2.7 Indeks Williamson

Berbagai pembangunan fisik di tahun 2024 dan 2025 seiring dengan alokasi anggaran infrastruktur yang meningkat diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi kabupaten di kawasan selatan DIY. Di sisi lain, keberadaan IKM didominasi di tiga wilayah tertinggal di DIY yang meliputi sekitar 68% dari total IKM. Membaiknya kinerja sektor industri pengolahan akan berdampak pada sebagian besar IKM yang notabene berdomisili di daerah yang selama ini masih tertinggal dan akan berkontribusi pada penurunan ketimpangan antar wilayah. Aktivitas kepariwisataan juga diarahkan pada pengembangan destinasi-destinasi baru di tiga kabupaten yang termasuk kawasan selatan DIY. Dinamika perkembangan pembangunan dan aktivitas perekonomian tersebut mendorong ketimpangan pembangunan wilayah juga menurun. Proyeksi ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson di tahun 2024 yaitu berkisar di antara 0,452 sampai 0,455 dan di tahun 2025 berkisar 0,438 sampai 0,452.

3.1.3 Arah Kebijakan Nasional Bidang Ekonomi

3.1.3.1 Arah Kebijakan Bidang Ekonomi RKP Tahun 2025

Rancangan RKP 2025 memuat target sasaran pembangunan daerah taip provinsi sebagai salah satu upaya mendukung dari capaian target nasional. Berikut target indikator makroekonomi DIY tahun 2025 dalam Rancangan RKP 2025:

Tabel 3-6 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro DIY tahun 2025 dan Target Indikator Ekonomi Makro DIY dalam RKP 2025

No.	Indikator Ekonomi Makro	Proyeksi DIY 2025		Target DIY dalam RKP 2025
		Pesimis	Optimis	
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,3	5,8	5,3-5,8
2.	Inflasi	3,8	3,1	-
3.	ICOR	5,7	5,39	-
4.	TPT	3,5	2,8	3,12-3,51

No.	Indikator Ekonomi Makro	Proyeksi DIY 2025		Target DIY dalam RKP 2025
		Pesimis	Optimis	
5.	Kemiskinan	10,50	10,00	10,00-10,50
6.	Indeks Gini	0,447	0,443	0,443-0,447
7.	Indeks Williamson	0,452	0,438	-

Sumber: BPPSD Bappeda DIY (diolah) dan Rancangan RKP 2025, 2024

3.1.3.2 Arah Kebijakan Bidang Ekonomi RPJMD DIY Tahun 2022-2027

RPJMD DIY 2022 – 2027 mengamanatkan target pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 adalah 5,3 – 5,8%. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar target tersebut, pembangunan ekonomi diharapkan dapat menunjukkan dinamika yang positif dengan mendorong potensi pertumbuhan untuk mencapai tingkat yang optimal. Pembangunan ekonomi dilihat dari peningkatan produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap sektor dengan memacu kinerja perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; serta
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan (*agrofishery industry*), kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi perlu didorong mulai dari satuan unit wilayah terkecil agar tercipta pertumbuhan wilayah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang. Dengan demikian, optimalisasi sumber daya ekonomi harus diikuti pula dengan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Perkembangan teknologi informasi dan faktor lain seperti pandemi memungkinkan terjadinya perubahan struktur ekonomi DIY

Terkait dengan pembangunan ekonomi kewilayahan pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan

ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- d. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
- e. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata;
- f. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- g. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; serta
- h. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan Keuangan Daerah sangat berpengaruh dalam menentukan arah pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan keuangan daerah pada tahun 2025 diarahkan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat tercermin pada terlaksananya transaksi pemerintah daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Transaksi Pemerintah Daerah menjadi kunci penting dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Transaksi Pemerintah Daerah ada 2 jenis, yaitu transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. Pelaksanaan transaksi di tahun 2025 akan mengoptimalkan transaksi secara non tunai. Transaksi penerimaan diarahkan pada pembayaran melalui kanal-kanal digital. Transaksi pengeluaran diarahkan pada penggunaan kartu kredit pemerintah dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Transaksi digital diharapkan dapat meningkatkan transparansi keuangan pemerintah daerah karena masyarakat dapat mengakses layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Selain itu, digitalisasi pemerintahan juga dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah karena semua dapat dipertanggungjawabkan secara digital.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang besar bagi keberhasilan pembangunan.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah mengacu pada kebijakan keuangan daerah yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Transparansi pengelolaan pendapatan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah yang benar-benar efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat dihasilkan.

Pendapatan daerah tahun anggaran 2025 telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan pendapatan tahun 2025 akan menerapkan opsen pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai pengganti belanja bagi hasil bagi pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang ada DIY, serta Opsen Pajak MBLB.

Penerapan opsen tersebut akan berpengaruh signifikan pada penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga diperlukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait.

Kebijakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah DIY adalah sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan

a. Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

1) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka

persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Terdapat alokasi DBH yang ditentukan penggunaannya yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pendanaan DBHCHT meliputi program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.

2) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Alokasi DAU terdiri dari DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.

Sedangkan DAU yang ditentukan penggunaannya dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu DAU Dukungan Penggajian Formasi PPPK, DAU Dukungan Bidang Pendidikan, DAU Dukungan Bidang Kesehatan, dan DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum.

b. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik, yang merupakan urusan daerah. DTK dibagi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonFisik.

Fokus Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 adalah untuk:

- a) mencapai prioritas nasional;
- b) mempercepat pembangunan Daerah;
- c) mengurangi kesenjangan layanan publik;
- d) mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau

e) mendukung operasionalisasi layanan publik.

1) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan DTK yang bertujuan membantu daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas nasional, dan percepatan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik merupakan bagian dari Dana Transfer Khusus yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat operasional, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, serta selaras dengan prioritas nasional. Dasar kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Prinsip Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yaitu:

- a) Membantu dan melengkapi kekurangan pendanaan bagi kegiatan khusus operasional dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) yang selaras dengan program prioritas nasional dan menjadi kewenangan urusan pemerintah daerah.
- b) Dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah, sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

2. Dana Keistimewaan

Dalam rangka mendukung implementasi urusan keistimewaan, Pemerintah Daerah DIY mendapatkan alokasi dana keistimewaan dari Pemerintah pusat.

Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai kewenangan dalam urusan keistimewaan, yang meliputi:

- a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;

- c. kebudayaan;
- d. pertanahan; dan
- e. tata ruang.

Penggunaan Dana Keistimewaan diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan dan/atau pemajuan kebudayaan.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan, maupun subkegiatan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif yaitu:

1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2) Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

3) Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi.

4) Optimalisasi belanja

Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

5) Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Selain itu, belanja daerah diutamakan untuk memenuhi *mandatory spending* yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk

mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan.

3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik sampai dengan TA 2027. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2025 terdiri dari:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi belanja pegawai tahun 2025 diproyeksikan dengan asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD, dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan

3-24

dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

- c. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal bangunan dan gedung;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja aset lainnya.

Belanja Modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana.

3. Belanja Tidak Terduga (BTT)

BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:

- a. pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja tranfer tahun 2025 terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;

Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergi dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan kalurahan.

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Pembiayaan daerah terdiri atas:

1) Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Sumber Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber penerimaan pembiayaan DIY pada tahun 2025 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Besaran penerimaan dari SILPA tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024, serta perkiraan realisasi pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, hasil dari penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana

akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2025 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal yang diberikan kepada BUMD dengan prioritas untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, bertumbuh dan berkembang.

Penyertaan modal daerah diberikan kepada PT. Bank BPD DIY dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan. Penambahan setoran modal pada PT. Bank BPD DIY didasarkan atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 14 Tahun 2018.

3.2.4 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebuah tuntutan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam periode 2022-2027. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksudkan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan. Untuk menghasikan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif terutama terkait dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah, belanja pemerintah dan defisit anggaran yang tidak melampaui ambang batas sesuai dengan peraturan yang ada, penetapan asumsi-asumsi yang akurat sebagai dasar rencana pengelolaan keuangan daerah menjadi prasyarat yang harus dipenuhi.

Ada dua asumsi yang digunakan terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) perkembangan ekonomi makro daerah,

seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan tingkat inflasi; dan (ii) pokok-pokok kebijakan fiskal daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah, seperti perkiraan Pendapatan Asli Daerah, Penda[atan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan strategi peningkatan pendapatan daerah dan proyeksi variabel-variabel keuangan daerah di atas maka proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah DIY tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3-7 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2025**

Uraian	APBD Tahun 2023	APBD Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
PENDAPATAN DAERAH	5.817.530.582.592,00	5.839.779.293.114,00	5.217.321.924.896,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.343.114.981.005,00	2.289.884.435.884,00	1.680.465.474.265,00
Pajak Daerah	2.063.347.893.170,00	2.018.352.703.526,00	1.436.331.635.370,00
Retribusi Daerah	33.564.359.756,00	64.804.109.600,00	68.533.111.040,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	109.070.217.574,00	116.050.620.958,00	123.993.797.426,00
Lain-lain PAD yang Sah	137.132.510.505,00	90.677.001.800,00	51.606.930.429,00
PENDAPATAN TRANSFER	3.466.810.101.587,00	3.542.289.357.230,00	3.529.250.950.631,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.465.974.195.167,00	3.541.305.552.000,00	3.528.270.024.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	835.906.420,00	983.805.230,00	980.926.631,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.605.500.000,00	7.605.500.000,00	7.605.500.000,00
Pendapatan Hibah	7.605.500.000,00	7.605.500.000,00	7.605.500.000,00
Jumlah Pendapatan	5.817.530.582.592,00	5.839.779.293.114,00	5.217.321.924.896,00
BELANJA	5.978.802.145.547,00	5.994.788.028.081,00	5.407.279.924.896,00
BELANJA OPERASI	3.704.864.759.098,00	3.825.024.526.164,00	3.789.019.617.839,00
Belanja Pegawai	1.631.406.827.202,00	1.793.350.372.623,00	1.825.447.742.531,00
Belanja Barang dan Jasa	1.364.714.902.680,00	1.220.376.247.664,00	1.362.944.322.655,00
Belanja Subsidi	85.553.295.477,00	91.653.295.477,00	96.029.746.301,00
Belanja Hibah	597.349.558.739,00	663.646.245.400,00	466.695.206.352,00

Uraian	APBD Tahun 2023	APBD Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
Belanja Bantuan Sosial	25.840.175.000,00	55.998.365.000,00	37.902.600.000,00
BELANJA MODAL	774.386.010.873,00	733.205.022.556,00	589.050.081.951,00
Belanja Modal Tanah	177.122.857.182,00	33.241.355.000,00	1.500.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.376.551.065,00	177.697.731.744,00	147.163.859.530,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	169.137.109.019,00	347.957.496.677,00	245.303.935.377,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	227.551.168.720,00	158.933.789.100,00	185.436.596.286,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.023.689.487,00	10.430.081.035,00	9.645.690.758,00
Belanja Modal Aset Lainnya	174.635.400,00	4.944.569.000,00	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	15.171.106.344,00	15.607.995.743,00	15.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	15.171.106.344,00	15.607.995.743,00	15.000.000.000,00
BELANJA TRANSFER	1.484.380.269.232,00	1.420.950.483.618,00	1.014.210.225.106,00
Belanja Bagi Hasil	886.115.307.492,00	848.882.026.968,00	420.396.130.660,00
Belanja Bantuan Keuangan	598.264.961.740,00	572.068.456.650,00	593.814.094.446,00
Jumlah Belanja	5.978.802.145.547,00	5.994.788.028.081,00	5.407.279.924.896,00
Total Surplus/(Defisit)	(161.271.562.955,00)	(155.008.734.967,00)	(189.958.000.000,00)
PEMBIAYAAN	161.271.562.955,00	155.008.734.967,00	189.958.000.000,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	466.271.562.955,00	457.508.734.967,00	298.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	462.271.562.955,00	457.508.734.967,00	293.000.000.000,00
Penerimaan Kembali	4.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00

Uraian	APBD Tahun 2023	APBD Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
Pemberian Pinjaman Daerah			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	466.271.562.955,00	457.508.734.967,00	298.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	305.000.000.000,00	302.500.000.000,00	108.042.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	105.542.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	305.000.000.000,00	302.500.000.000,00	108.042.000.000,00
Pembiayaan Netto	161.271.562.955,00	155.008.734.967,00	189.958.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Gubernur DIY) dalam pidato visi dan misi pada tanggal 7 Agustus 2022 sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2022-2027 menyampaikan visi ***“Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi,”*** dan misi yakni:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Pancamulia sebelumnya telah diletakkan sebagai konsep utama dalam Visi RPJMD 2017-2022, sehingga atas dasar keberlanjutan dan kesinambungannya, maka Pancamulia diangkat kembali dan diletakkan posisinya sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027. Pancamulia sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027 memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Terwujudnya ‘Pancamulia’, menyanggah misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi DIY, melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa

ukuran seperti: 1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan, 2) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, 3) Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram, 4) Kehidupan ekonomi yang layak, 5) Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), serta 6) Good-governance pada berbagai tingkatan.

Kawasan Selatan dipilih sebagai prioritas pembangunan Yogyakarta dalam lima tahun ke depan menyandang maksud: pertama, kawasan ini yang mencakup wilayah bagian selatan Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul merupakan wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi dibanding dengan wilayah tengah dan utara, yakni Kota Yogyakarta dan Sleman. Kawasan Selatan juga dipahami sebagai kawasan yang memiliki kekhususan teritorial (*territorial speciality*), yang tercermin dari segi bentang alam, budaya, mata pencaharian warga, keunikan, kearifan serta kecerdasan lokal. Kekhususan teritorial ini nanti juga akan dikembangkan sebagai modal sekaligus model pembangunan kawasan-kawasan lain Yogyakarta, termasuk wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dengan perkataan lain, bahwa melalui modal dan model kekhususan teritorial ini, pembangunan Yogyakarta tidak hanya difokuskan di Kawasan Selatan saja, melainkan juga menyeluruh ke Kawasan Tengah dan ke Kawasan Utara. Ibarat kepala, badan, dan kaki, maka Yogyakarta harus dibangun secara utuh dan menyeluruh.

Reformasi Kalurahan diletakkan sebagai konsep sekaligus strategi bagi pembangunan dan perubahan-perubahan yang akan dituju oleh Yogyakarta dalam lima tahun ke depan. Alasan dipilihnya konsep dan strategi ini adalah bahwa perubahan zaman telah membawa kita pada situasi, kondisi, tantangan, permasalahan, sekaligus peluang-peluang yang sangat kompleks, luas, saling mengkait, dan memiliki kedalaman permasalahan sampai pada tingkat komunitas bahkan individu. Kita telah menyaksikan saat ini bahwa kondisi yang telah digambarkan di atas, secara empiris telah membawa perubahan-perubahan besar pada tata sosial, tata budaya, tata ekonomi, dan bahkan tata ruang kehidupan dan penghidupan masyarakat Yogyakarta. Kedalaman dan kompleksitas perubahan inilah yang telah menyadarkan kepada kita bahwa solusi-solusi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan telah sangat mendesak dibutuhkan oleh Yogyakarta untuk menjawab permasalahan dan tantangan tersebut. Lembaga Kalurahan sebagai ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan di Yogyakarta yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan modal sekaligus model bagi upaya Yogyakarta untuk menjawab kompleksitas dan kedalaman

permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Yogyakarta. Lembaga Kalurahan akan menjadi ujung depan bagi upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan warga. Oleh sebab itu, reformasi kalurahan dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan sekaligus upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Peran Teknologi Informasi dan Budaya Inovasi adalah sebagai alat untuk mempercepat transformasi spasial (Kawasan Selatan) serta transformasi kelembagaan (Reformasi Kalurahan). Transformasi spasial akan mengarah pada Penguatan Kekhususan Wilayah dalam rangka Penguatan Kehidupan dan Penghidupan Warga. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi akan mencakup penyediaan infrastruktur informasi, sistem informasi desa (menuju Smart Kalurahan atau Kalurahan Cerdas), sistem tata kelola dan pengolahan lahan berbasis teknologi informasi, serta sistem deteksi dini permasalahan-permasalahan alam dan sosial yang dihadapi warga.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan akan mempresentasikan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran akan menjabarkan tujuan dalam bentuk hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional (*specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continuously improve* (SMART-C)),

Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2022-2027 yang telah dirancang beserta target sebagai berikut.

Tabel 4-1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.”

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1) Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan	1.1) Terwujudnya kualitas	IGI (<i>Inclusive Growth Index</i>)	
		Indeks Kebahagiaan	

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan	hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat		1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan
			1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak
			1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan
2) Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan sumber daya setempat	2.1) Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Indeks Williamson	2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju
3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi/TI	3.1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	3.1.1) Meningkatnya <i>Good Governance</i>
4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik	4.1) Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang
			4.1.2) Menurunnya risiko bencana

Sumber: RPJMD DIY tahun 2022-2027

4.2 PERUMUSAN TEMA PEMBANGUNAN

Dalam konteks perencanaan pembangunan, tema pembangunan tahunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini tema pembangunan daerah di DIY disusun dengan mempertimbangkan 2 (dua) hal tersebut serta dengan mempedomani kebijakan nasional yang dituangkan dalam RKP 2025. Selain itu juga melakukan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah di DIY seperti

Paradigma Abad Samudra Hindia, Keistimewaan DIY, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals – SDG's*).

4.2.1 Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Tema RKPD Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 merupakan tahapan awal dari Lima Tahun pertama (2025-2029) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2025-2045. Posisi RKPD 2025 dalam RPJPD tersebut menjadi strategis karena menjadi tahun awal dari pencapaian visi jangka panjang daerah. Visi DIY sebagaimana tercantum dalam RPJPD DIY Tahun 2025-2045 adalah: **“Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut, terdapat delapan misi yang ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat melalui **Transformasi Sosial** untuk mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Kesehatan Untuk Semua, termasuk didalamnya Lingkungan Hidup dan Permukiman yang Berkualitas dan Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi yang Menitikberatkan pada Peningkatan Inovasi dan Kreativitas, Pemanfaatan IPTEK, Pengembangan Ekonomi Budaya dan Peningkatan Kualitas Produk melalui **Transformasi Ekonomi** dengan Menempatkan Kawasan Selatan sebagai Kawasan Prioritas Pertumbuhan
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui **Transformasi Tata Kelola** yang Demokratis dan Transparan
4. Menciptakan Kondisi **Stabilitas Keamanan, Demokrasi Substansial, dan Ekonomi Makro** yang Tangguh melalui Penguatan Penegakan Hukum dan Kehidupan yang Dilandasi Moral serta Etika Luhur
5. Meningkatkan **Kualitas Tata Ruang dan Pemukiman, Ketahanan Ekologi dan Pembangunan Kebudayaan** yang Merespon Dinamika Perubahan dan Tekanan

6. Menciptakan **Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan** yang berorientasi pada Pengembangan Kawasan Selatan sebagai Pintu Gerbang Wilayah
7. Melaksanakan **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**
8. Menciptakan kondisi **Pembangunan yang Berkesinambungan** untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan transformasi pembangunan

Kata kunci dari visi jangka panjang tersebut adalah **Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, (dijiwai) Kebudayaan yang Adiluhung/Luhur, dan (harmoni/rajutan) Keistimewaan**. Dalam melaksanakan visi misi pembangunan di atas, dirumuskan arah kebijakan yang kemudian dibagi ke dalam tahapan 5 (lima) tahunan. Setiap tahapan tersebut memiliki tema atau fokus prioritas spesifik yang tertuang dalam target pencapaian sasaran pokok. Tema atau penekannya pada tahapan pertama 5 (lima) tahunan yaitu periode 2025-2029 adalah **Penguatan Fondasi Pembangunan**.

Selanjutnya Visi Misi Arah Kebijakan tersebut diturunkan ke dalam sasaran pokok pembangunan dari RPJPD DIY Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kesehatan untuk Masyarakat DIY;
2. Meningkatnya Pendidikan di DIY yang Berkualitas dan Merata;
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif;
4. Meningkatnya penggunaan Iptek, Penerapan Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
5. Penerapan Ekonomi Hijau di DIY;
6. Meningkatnya Peran Transformasi Digital;
7. Menurunnya Ketimpangan melalui Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
8. Meningkatnya Peran Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
9. Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif;
10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial;
11. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro DIY;
12. Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan;

13. Terciptanya Keragaman Agama yang ber-Maslahat dan Berkebudayaan Maju;
14. Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
15. Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas;
16. Terwujudnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
17. Terciptanya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

4.2.2 Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2025

Dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah, RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2022-2027. Dengan mendasarkan pada visi, misi, serta isu strategis aktual, maka sasaran pembangunan DIY Tahun 2022-2027 akan difokuskan pada pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural pada wilayah-wilayah yang belum maju dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta dukungan tata kelola pemerintah yang baik. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara integral diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kondisi sosioekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY.

Pembangunan ekonomi dilihat dari peningkatan produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap sektor. Pertumbuhan ekonomi perlu didorong mulai dari satuan unit wilayah terkecil agar tercipta pertumbuhan wilayah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang. Dengan demikian, optimalisasi sumberdaya ekonomi harus diikuti pula dengan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Perkembangan teknologi informasi dan faktor lain seperti pandemi memungkinkan terjadinya perubahan struktur ekonomi DIY. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada seluruh sektor, tidak terkecuali pada dua sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian DIY yaitu pariwisata dan pendidikan. Merespon terhadap perkembangan pandemi hingga saat ini, pemulihan dan penanganan dampak pandemi masih akan menjadi bagian dalam pembangunan ke depan. Distribusi kemakmuran diupayakan melalui pemerataan termasuk

pemerataan akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, serta partisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Fungsi distribusi sebagai salah satu fungsi pemerintah diupayakan melalui perwujudan tata kelola pemerintah yang baik yang akan bermuara pada kualitas pelayanan publik. Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2022-2027 yaitu:

1. Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat
2. Mengecilnya Ketimpangan Wilayah
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik

Selanjutnya agar tujuan tersebut dapat dicapai, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4-2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kualitas Hidup-kehidupan-penghidupan Masyarakat	1. Semakin kecilnya tingkat kemiskinan 2. Penghidupan ekonomi yang layak 3. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	1. Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi 2. Peningkatan pemasaran produk-produk unggulan lokal 3. Penumbuhan semangat kewirausahaan dan pengembangan start up business 4. Pemanfaatan tanah kas desa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat
		Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan	1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui promosi, edukasi, kompetisi dan pengembangan sarana prasarana pendukung 2. Meningkatkan ketercukupan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat 3. Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			4. Menyediakan Rumah Layak Huni dan Aman dengan prioritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah
		Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan
		Meningkatkan tata kelola kalurahan	1. Pengembangan Kapasitas Aparatur Kalurahan 2. Peningkatan tata kelola keuangan 3. Optimalisasi penggunaan TIK
		Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan
		Pengembangan sumber-sumber PAD	1. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aset untuk menangkap peluang di sektor-sektor unggulan 2. Meningkatkan pendapatan melalui potensi non pajak
Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor 2. Mengembangkan transportasi dan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah selatan 3. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>4. Meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia</p> <p>5. Meningkatkan produktivitas penggunaan sumber daya alam lokal</p>
		Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam rangka pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) yang mendukung pembangunan wilayah selatan	<p>1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) terutama bagi kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan dan kelompok marjinal lainnya</p> <p>2. Mengembangkan manajemen data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat</p> <p>3. Memperkuat ketahanan keluarga</p>
		Meningkatkan penawaran <i>Investment Project Ready to Offer</i> di wilayah selatan	Meningkatkan kerja sama pendanaan (investasi, CSR, atau bentuk kerja sama lainnya) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan berdasarkan pemetaan potensi kerja sama
		Meningkatkan kapasitas ketangguhan (<i>resiliency</i>) dalam menghadapi bencana	<p>1. Meningkatkan ketangguhan (<i>resiliency</i>) dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana</p> <p>2. Menyediakan layanan perlindungan sosial dalam menghadapi bencana terutama bagi kelompok rentan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Memanfaatkan teknologi untuk penanganan bencana
		Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan 2. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi lahan kritis 3. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya <i>Good Governance</i>	Memperkuat tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan inovasi, penyederhanaan kebijakan, transformasi digital dan pemenuhan SPM	1. Memperkuat manajemen ASN 2. Melakukan penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi
		Meningkatkan pemanfaatan TIK dan penerapan inovasi untuk peningkatan pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas tata kelola TIK 2. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan 3. Menerapkan inovasi dalam seluruh aktivitas pemerintah
		Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur	1. Meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN serta pengembangan jalur karir 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pemanfaatan dan pengelolaan TIK 3. Revolusi mental ASN dalam tata kelola pemerintahan dan sistem sosial
		Meningkatkan kemandirian fiskal	Meningkatkan kapasitas dan jiwa wirausaha pengelola unit usaha Pemda
		Meningkatkan kesadaran	1. Meningkatkan rasa toleransi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		demokrasi, literasi TIK, hak warga dan solidaritas sosial	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat 3. Meningkatkan literasi TIK masyarakat
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang 2. Menurunnya risiko bencana 	Meningkatkan kemitraan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon
		Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, 2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk memitigasi perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya; 3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kas desa
		Meningkatkan perilaku dan budaya ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Sumber: RPJMD DIY 2022-2027

Berangkat dari perumusan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut yang kemudian dirumuskan dalam strategi dan arah kebijakan untuk mengarahkan pencapaiannya maka Tema RKPD Tahun 2025 sebagai tahun kedua RPJMD Tahun 2022-2027 dapat mengandung tema pembangunan ekonomi inklusif.

4.2.3 Internalisasi Tema RKP Tahun 2025 dengan Tema RKPD Tahun 2025

RKP 2025 merupakan tahapan awal untuk Indonesia Emas 2045. Lima tahun pertama dari Indonesia Emas (2025-2029) menjadi tahapan penting untuk meletakkan dasar-dasar transformasi karena sebagai basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya serta *trigger* untuk *engine of growth* yang baru. Kondisi saat ini, Indonesia memiliki tantangan multidimensi yang membutuhkan penanganan secara holistik, kolaborasi lintas sektor. Di samping itu, Indonesia juga masih memiliki tantangan terkait penyediaan infrastruktur berkualitas dimana saat ini capaian infrastruktur Indonesia masih rendah utamanya pada layanan dasar, kualitas jalan, pemanfaatan air baku dan persampahan. Di tengah tantangan yang ada, kondisi perekonomian saat ini tengah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi potensial akibat rendahnya produktivitas karena adanya deindustrialisasi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mampu mengatasi tantangan sosial untuk sehingga dibutuhkan pembangunan yang menasar pada pertumbuhan inklusif melalui transformasi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, tema RKP 2025 dirumuskan:

“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Tema tersebut diwujudkan dengan penekanan pada beberapa prioritas nasional (PN) yang masing-masing prioritas memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- a. PN 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), dengan arah kebijakan:
 - 1) Penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara;
 - 2) Pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme;
 - 3) Pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan
 - 4) Penguatan internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

- 1) Meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI;
 - 2) Memperkuat komponen cadangan;
 - 3) Meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara;
 - 4) Memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber;
 - 5) Melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep *optimum essential force* dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI;
 - 6) Meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar;
 - 7) Memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme;
 - 8) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit;
 - 9) Pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.
- c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
- 1) Melanjutkan pembangunan infrastruktur;
 - 2) Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya;
 - 3) Penguatan koperasi;
 - 4) Mengembangkan industri kreatif
 - 5) Pendalaman sektor keuangan.
- d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
- 1) Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
 - 2) Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi;
 - 3) Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional;
 - 4) Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
 - 5) Meningkatkan Prestasi Olahraga.
- e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

- 1) Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru;
 - 2) Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta
 - 3) Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- 1) Membangun desa dan membangun dari desa;
 - 2) Pemerataan ekonomi; serta
 - 3) Memberantas kemiskinan.
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
- 1) Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi;
 - 2) Membangun *Single Identity Number* dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu;
 - 3) Menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada;
 - 4) Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki; dan
 - 5) Penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik.
- h. Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
- 1) Masyarakat adil, makmur, dan harmonis;
 - 2) Melestarikan budaya;
 - 3) Penanganan bencana;

4.2.4 Tema RKPD DIY Tahun 2025

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 disusun dengan mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan Rancangan RKP 2025, serta isu-isu strategis yang aktual.

Tema pembangunan tahun 2025 yaitu:

“Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Sektor Unggulan

Sektor unggulan dimaksudkan bahwa pengembangan aktivitas ekonomi pada sektor pariwisata, pertanian, dan koperasi UMKM didorong untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi utamanya pada kawasan selatan.

2. Kreatif dan inovatif

Kemampuan berpikir didorong untuk mencetuskan ide, gagasan, cara, atau produk sebagai solusi atas permasalahan yang ada serta mampu memberikan nilai tambah dengan cara yang baru ataupun berbeda.

3. Ekonomi Inklusif

Peningkatan kesejahteraan dari pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran.

4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

4.3.1 Prioritas dan Sasaran Daerah

Berdasarkan tema RKPD DIY Tahun 2025 *“Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”* dapat dirumuskan Prioritas Daerah DIY sebagai berikut.

1. Penurunan tingkat kemiskinan
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan

4-16

6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram

Keenam (6) rumusan Prioritas Pembangunan DIY tahun 2025 tersebut juga telah selaras dengan Sasaran Pembangunan DIY tahun 2025 yang tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 sebagai berikut

Tabel 4-3 Penyelarasan Prioritas Daerah Tahun 2025 dengan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Base-line	Target Tahun		
					2022	2025		
1.	<i>“Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif, Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”</i>	Penurunan tingkat kemiskinan	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,49	9,66		
2.		Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	5,15	5,3-5,8		
				Pendapatan Perkapita (Rp juta)	28,00	31,51		
				TPT	4,06	3,26-3,56		
				Inflasi	6,49	2-4		
3.		Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	IPM	80,64	81,68		
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,98		
4.		Penguatan <i>Good-governance</i> pada berbagai tingkatan	2.1.1) Menurunnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,13	
5.					3.1.1) Meningkatkan <i>Good Governance</i>	Opini BPK	WTP	WTP
						SAKIP	AA	AA
	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	4.1.1) Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,38	83,74		
6.				4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	108,7	

Sumber: RPJMD DIY 2022-2027

4.3.2 Penyelarasan Prioritas dan Sasaran Daerah dengan Nasional

Prioritas pembangunan daerah DIY Tahun 2025 selanjutnya diselaraskan dengan Prioritas Nasional yang tercantum dalam Rancangan RKPD 2025 sebagaimana berikut

Tabel 4-4 Penyeragaman Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Pembangunan	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1	Indeks Demokrasi Indonesia	PD 5 Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru	1	Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
		2	Asia Power Index Diplomatic Influence)		
		3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Tempat Tinggalnya		
		4	Prevelensi Ketidacukupan Pangan (PoU)		
		5	Indeks Ketahanan Energi		
		6	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)		
		7	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan(%)		
		8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)		
		9	Indeks Daya Saing Global		
		10	Indeks Ekonomi Hijau		
		11	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer		
		12	Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)		
		13	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		
		14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Pembangunan	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
		15	Presentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)		
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pendapatan Perkapita (Rp juta)
		2	Rasio Kewirausahaan (%)		
		3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)		
		4	Rasio PDB Pariwisata (%)		
		5	Devisa Pariwisata (miliar USD)		
		6	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		
		7	Aset Perbankan/PDB (%)		
		8	Aset Dana Pensiun/PDB (%)		
		9	Aset Asuransi/PDB (%)		
		10	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)		
		11	Total Kredit/PDB (%)		
		12	Inklusi Keuangan (%)		
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1	Hasil Pembelajaran	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	IPM
			a. Rata-rata nilai PISA i Membaca ii Matematika iii Sains		
			b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)		
			c. Harapan lama sekolah (tahun)		
		2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)		

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Pembangunan	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
		3	Presentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	TPT
		4	Tingkat Penguasaan Iptek:		
			a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)		
			b. Peringkat Indeks Inovasi Global		
		5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
		6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		
		7	Usia Harapan Hidup (tahun)		
		8	Kesehatan Ibu dan Anak		
			a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		
			b. Prevelensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		
		9	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
		10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)		
11	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)				
12	Indek Ketimpangan Gender (IKG)				
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri	1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB
		2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)		
		3	Ekspor Barang dan Jasa (%PDB)		
		4	Biaya Logistik (%PDB)		
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan	1	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	PD 1 Penurunan tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan
		2	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)		

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Pembangunan	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
	Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3	Persentase panyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	PD 4 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY
		4	Proporsi kontribusi PDRB wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)		
		5	Persentase desa mandiri (%)		
		6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)		
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	1	<i>Return on Asset (ROA)</i> BUMN (%)	PD 5 Penguatan <i>good-governance</i> pada berbagai tingkatan	Opini BPK
		2	Indeks Integritas Nasional		
		3	Indeks Materi Hukum		
		4	Indeks Pelayanan Publik		
		5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		SAKIP
		6	Indeks Persepsi Korupsi		
		7	Indeks Pembangunan Hukum		
		8	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)		
9	Tingkat Inflasi (%)	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Inflasi		
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	Indeks Pembangunan Kebudayaan
		2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
		3	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenang	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY

Sumber: Diolah dari Rancangan RKP 2025; RPJMD DIY Tahun 2022-2027, 2024

Penyelarasan juga dilakukan terhadap target pembangunan daerah. Berikut adalah hasil penyelarasan target indikator pembangunan daerah dengan hasil pembahasan Rakortekrenbang Tahun 2024, Pemutakhiran Indikator Makro, dan Rancangan RKP 2025.

Tabel 4-5 Penyelarasan Target Indikator Daerah Hasil Rakortekrenbang dan Pemutakhiran Indikator Makro

No	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Target RKP 2025	Kesepatan Target DIY 2025
1.	Kontribusi PDRB Provinsi	%	-	0,86
2.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.425	0,23-0,22
3.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	30,1-30,2	33,4 - 34,7
4.	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	N/A	5,65
5.	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	21,0-21,6	7
6.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6,1	7,4
7.	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	1,356	1,025
8.	<i>Indonesia Blue Economy Index (IBEI)</i>	Indeks	-	11,47
9.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	19,9-20,0	11,89 - 12,00
10.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	-	10,37
11.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	-	237,59
12.	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	%	7,92	0,07

No	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Target RKP 2025	Keseepatan Target DIY 2025
13.	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks	-	96,64
14.	Indeks Integritas Nasional	Indeks	74.52	81,37
15.	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	81,69-85,23	87,31 - 90,57
16.	PDRB per kapita	Rp Juta	81.96 - 82.08	52,58 - 53,79
17.	Tingkat Kemiskinan	%	6,0 - 7,0	10,00 - 10,50
18.	Rasio Gini	Indeks	0,379-0,382	0,443 - 0,447
19.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	22	26
20.	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,56	0,70
21.	Penurunan intensitas emisi GRK	%	38,6	62,14
22.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,30-5,60	5,3 - 5,8
23.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,50-5,00	3,12 - 3,51
24.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	56,30	67
25.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,68	4,64
26.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,00	4,3
27.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,5	2,8
28.	Tingkat Inflasi	%	1,5 - 3,5	3,1-3,8
29.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	7,21	9,06
30.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	70,29	76,17

4-24

No	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Target RKP 2025	Kesepatan Target DIY 2025
31.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	43,19	37,5

Sumber: Rancangan RKP 2025, BA Rakortekbang Tahun 2024, BA Pemutakhiran Indikator 2024

4.3.3 Penyelesaian Hasil Rakortekrenbang

Tabel 4-6 Penyelesaian Target Indikator Urusan Hasil Rakortekrenbang

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang	Target DIY 2025
1.01	URUSAN PENDIDIKAN			
1	Iklim Kebinekaan Jenjang SMPLB	Nilai	77,65	77,65
2	Iklim Kebinekaan Jenjang SMA	Nilai	81,68	81,68
3	Iklim Kebinekaan Jenjang SMK	Nilai	78,13	78,13
4	Iklim Kebinekaan Jenjang SDLB	Nilai	73,94	73,94
5	Iklim Kebinekaan Jenjang SMALB	Nilai	73,15	73,15
6	Iklim Keamanan Jenjang SMPLB	Nilai	78,8	78,8
7	Iklim Keamanan Jenjang SDLB	Nilai	82,13	82,13
8	Iklim Keamanan Jenjang SMK	Nilai	83,7	77,65
9	Iklim Keamanan Jenjang SMA	Nilai	88,08	81,68
10	Iklim Keamanan Jenjang SMALB	Nilai	87,36	87,36
11	Iklim Inklusivitas Jenjang SMA	Nilai	67,77	67,77
12	Iklim Inklusivitas Jenjang SMALB	Nilai	72,89	72,89
13	Iklim Inklusivitas Jenjang SMPLB	Nilai	68,21	68,21
14	Iklim Inklusivitas Jenjang SDLB	Nilai	68,38	68,38
15	Iklim Inklusivitas Jenjang SMK	Nilai	62,27	62,27
16	Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun Penyandang Disabilitas dalam pendidikan khusus	Persen	51,38	51,38
17	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 16-18 dalam pendidikan menengah	Persen	90	90
18	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Jenjang SMK	Persen	79,37	79,37
19	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Jenjang SMK	Persen	94,62	94,62
20	Rata-rata Kompetensi Numerasi Jenjang SMPLB	Nilai	66,59	66,59

4-25

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang	Target DIY 2025
21	Rata-rata Kompetensi Numerasi Jenjang SMALB	Nilai	61,91	61,91
22	Rata-rata Kompetensi Numerasi Jenjang SDLB	Nilai	62,2	62,2
23	Rata-rata Kompetensi Numerasi Jenjang SMK	Nilai	62,32	62,32
24	Rata-rata Kompetensi Numerasi Jenjang SMA	Nilai	72,42	72,42
25	Rata-rata Kompetensi Literasi Jenjang SMALB	Nilai	60,74	60,74
26	Rata-rata Kompetensi Literasi Jenjang SMPLB	Nilai	67	67
27	Rata-rata Kompetensi Literasi Jenjang SDLB	Nilai	73,74	73,74
28	Rata-rata Kompetensi Literasi Jenjang SMK	Nilai	75,92	75,92
29	Rata-rata Kompetensi Literasi Jenjang SMA	Nilai	83,09	83,09
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)	%	13.5	13.5
2	Penemuan Kasus TBC	%	90	90
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	38	38
4	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	%	96	96
5	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	88.75	88.75
6	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar.	%	100	100
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	%	21.36	21.36
2	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	37	37
3	Persentase angka BABS di tempat terbuka	%	0	0

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang	Target DIY 2025
4	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	20	20
5	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	28.79	28.79
6	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	Orang	2349	2349
7	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	375	375
8	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	%	100	100
9	Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi	%	60	60
10	Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	100	100
11	Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	50	50
12	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	4	4
13	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	6	6
14	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Provinsi	1	1
15	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	3	3
16	Penetapan RTRW	Perda/ Perkada	0	0
17	Penetapan RDTR	Perda/ Perkada	6	6
18	Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	Km	0	0
19	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi	Ha	30	30
20	Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi	Ha	40	40
21	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun	m ³ /detik	0.025	0.025
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang	Target DIY 2025
1	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase	90.10	90.10
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100
2	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100
3	Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi	Dokumen	1	1
4	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum	daerah	6	6
5	Tercapainya indeks Penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik"	daerah	6	6
6	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*	daerah	6	6
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
2	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
3	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
4	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
5	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
6	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	100	100

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang	Target DIY 2025
7	Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase	100	100
8	Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase	100	100
9	Jumlah PM yang Meningkatkan Pendapatannya	Orang	100	100
10	Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	100	100
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
1	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%	75	75
2	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	63000	63000
3	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	96000	96000
4	Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja	Orang	73000	73000
5	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	9950	9950
6	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	%	75	75
7	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	70	70
8	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD	%	60	60
9	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	Laporan	2	2
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia	Orang	2000	2000
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang	Target DIY 2025
1	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	88	88
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95.02	95.02
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	73.08	73.08
4	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	95	95,5
5	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.21	0.21
6	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya	Nilai	901	901
7	Persentase ARG	%	66.70	66.70
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
1	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%	100	100
2	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90	80,24
3	Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan	%	5	5
4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	2.5	2.5
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
1	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang Tanah	0	0
2	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	1700	1700
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	70.49	64,19
2	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	0.616	0.616
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	%	60	60
4	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	12.49	12.49
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang	Target DIY 2025
1	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	99.5	99.5
2	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100
3	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100
4	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianannya dilaporkan	%	100	100
5	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	%	85.3	85.3
6	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	30	30
7	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Dokumen	2	2
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	Lemba ga	392	392
2	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	Desa	392	392
3	Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	Desa	392	392
4	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	Desa	8	8
5	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes	Orang	392	392
6	Persentase Desa Mandiri	Persen tase	69.9	69.9
7	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	Persen tase	0	0
8	Persentase BUM Desa Maju	Persen tase	14.55	14.55
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang	Target DIY 2025
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	69.95	69.95
2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	9	9
3	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	1.81	1.81
4	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>modern Contraceptive (mCPR)</i>	%	59.2	59.2
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12	12
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
1	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Perusahaan	3	3
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	82.50	82.50
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	20	20
2	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	78	78
3	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	%	100	100
4	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	%	100	100
5	Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	%	100	100

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang	Target DIY 2025
6	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	100	100
7	Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	80	80
8	Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	80	80
9	Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	%	30	30
10	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dan lain-lain) sesuai strategi komunikasi	%	87	87
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen tase	3.35	3.35
2	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen tase	10	10
3	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persen tase	12	12
4	Pertumbuhan Wirausaha	Persen tase	4	4
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
1	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	3.22	3,22
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Nilai	2.50	2.50
2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	%	81.00	81.00
3	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	82.29	82.29
4	Peningkatan Prestasi Olahraga	Indeks	49.65	49.65

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang	Target DIY 2025
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3.0	3.0
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
1	Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Orang	2	2
2	Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi	Orang	4	4
3	Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi	Orang	2	2
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	58.04	58.04
2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	4.9	4.9
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	2.6	2.6
4	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	22.61	22.61
5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	47	47
6	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	18.25	18.25
7	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0.713	0.713
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Index	83,78	83,78
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	73.5	73.5
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	96	96
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang	Target DIY 2025
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	5711.06	7341
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	100000	97813
3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KA P/TH	32.35	34,87
4	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	76	76
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
1	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp	0	0
2	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perj alan	22343000	22343000
3	Rasio PDB Pariwisata	%	10.37	10.37
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
1	Jumlah Produksi Jagung	Ton	323199	323199
2	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	92.3	92.3
3	Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	96	96
4	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	80	80
5	Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	45.4	45.4
6	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura	%	50.20	50.20
7	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	%	71	71
8	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan	%	40.20	40.20
9	Jumlah Produksi Padi	Ton	591194	591194
10	Jumlah Produksi Kedelai	Ton	6905	6905
11	Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)	Ton	891250	891250
12	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	63896	63896

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang	Target DIY 2025
13	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Ton	30957	30957
14	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Ton	535	535
15	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	53253	53253
16	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	1826.13	1826.13
17	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	Ton	16.81	16.81
18	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada	Ton	5.42	5.42
19	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala	Ton	3	3
20	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh	Ton	663	663
21	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	77130	77130
22	Jumlah Produksi Susu	Ton	3795	3795
23	Jumlah Produksi Telur	Ton	141276	141276
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
1	Nilai transaksi ekonomi KTH	Rupiah /Kapita	5.770.688.000	5.770.688.000
2	Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Sosial	Rupiah /Kapita	22.044.087.621	22.044.087.621
3	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Ha	1.734.579	1.734.579
4	Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun	Unit	7	7
5	Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya	Ha	0	0
6	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Ha	276	276
7	Luas hutan mangrove yang direhabilitasi	Ha	1	1
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
1	Rasio Elektrifikasi	%	99,99	99,99

No.	Indikator	Satuan	Target 2025 Hasil Rakortekrenbang	Target DIY 2025
2	Porsi EBT dalam Bauran Energi	%	6,6	6,6
3	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	%	100	100
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	6	6
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	4.7	4.7
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	12	12,2
3	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Orang	0.3	0.3
4	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	1	1
5	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai	0.7	0.7
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
1	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Index	57.50	57.50
2	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Index	46.10	46.10
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif	Provinsi	1	1
2	Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Provinsi	1	1

4.4 POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan salah satu masukan pertimbangan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, berisi sejumlah pemikiran-pemikiran DPRD mengenai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 sekaligus penekanan terhadap permasalahan-permasalahan penting untuk segera diselesaikan. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 78 mengatur DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

4.4.1 Maksud dan Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai bahan telaah Pemerintah DIY dalam menyusun rencana kerja pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan utama seperti masalah kemiskinan, ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan, masalah pengangguran serta persoalan pembangunan lainnya yang memerlukan penyelesaian. DPRD melalui dokumen pokok-pokok pikiran ingin memastikan bahwa berbagai masalah tersebut dapat diatasi dengan kemampuan daerah. Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD ikut memberikan masukan, aspirasi dan sumbangsih pemikiran bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pokok-Pokok pikiran ini juga merupakan bentuk komunikatif formal antara legeslatif dan eksekutif. Hal ini penting untuk membangun harmoni pemerintah tanpa mengurangi tugas pokok fungsi legislatif di bidang pengawasan, anggaran serta legislasi daerah. Melalui pokok-pokok pikiran, DPRD telah menyampaikan aspirasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dijadikan bahan telaah dalam mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam penyusunan perundang-undangan.

Dengan demikian diharapkan RKPD tahun 2025 akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, efektif, efisien serta akuntabel. Kemampuan keuangan daerah yang meningkat dan didukung dengan dokumen

perencanaan yang aspiratif serta dijalankan oleh penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan responsif diharapkan akan menghasilkan kualitas program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat DIY.

4.4.2 Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi DPRD

Pembangunan daerah DIY menunjukkan dinamika yang cukup menarik pada kurun waktu tahun 2023. Perkembangan pasca Pandemi ditahun-tahun sebelumnya, perihal kinerja pembangunan di DIY menunjukkan pergerakan yang cukup menggembirakan. Indikator-indikator ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan di DIY sepertinya sudah *“on the track”*. Pertumbuhan ekonomi mencatatkan angka positif, dan bahkan dalam Triwulan pertama dan kedua melampaui dari capaian nasional. Demikian pula dengan ekspor DIY ke mancanegara pada kurun waktu 2021 juga menunjukkan pergerakan angka yang signifikan tidak kalah dengan tahun 2019 saat sebelum pandemi. Hal ini tentu patut untuk diapresiasi bersama sebagai sebuah capaian yang positif.

Namun sisi lain pembangunan di DIY juga menunjukkan data yang paradoksal, dimana ada beberapa capaian pembangunan yang belum mampu menembus target dalam target RPJMD 2017-2022 yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesenjangan pendapatan (Indeks Gini) dan persentase angka kemiskinan. Permasalahan serius ini masih ditambah pula dengan dengan ketimpangan antar wilayah yang semakin melebar. Semenjak RPJMD ditetapkan, maka ketiga hal tersebut belum pernah mencapai target sebagaimana seharusnya. Capaian ini sangat *“njomplang”* bila dibandingkan dengan kinerja pada Tata Kelola Pemerintahan yang mendapatkan hasil sangat memuaskan sebagaimana target. Problematika inilah yang harus terus diselesaikan dalam proses pembangunan daerah selanjutnya.

Memasuki Tahap IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2020-2025, maka pembangunan daerah diarahkan pada penguatan upaya pencapaian unggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi. Tahap IV inilah sebagai bagian akhir dari agenda besar target dalam RPJPD 2005-2025 yaitu *“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”*. Momentum ini harus mampu dimaksimalkan untuk menopang ketercapaian target lima tahun terakhir RPJPD DIY. Dengan adanya wabah

pandemi Covid-19, maka dituntut kerja keras semua pemangku kepentingan untuk bisa bangkit dan melesat cepat menyesuaikan dengan pola kehidupan baru pasca pandemi. Seluruh sektor kehidupan harus bergerak cepat melakukan penyesuaian dan akselerasi langkah dalam mencapai tujuan pembangunan DIY, pembangunan yang melahirkan masyarakat yang sejahtera, bermartabat dan berkeadaban. Pondasi terhadap langkah cepat tersebut telah kita miliki dengan capaian kinerja pembangunan pada kurun waktu 2022, dimana kebijakan pemulihan sosial-ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19 telah menunjukkan capaian yang menggembirakan.

4.4.2.1 Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi Bidang Pemerintahan

- Rekomendasi
 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM;
 2. Peningkatan produktivitas, daya saing dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan;
 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berbasis ekonomi dan industri kreatif;
 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur dasar permukiman (hunian layak, sanitasi, air bersih, dan pengelolaan limbah) serta aksesibilitas/konektivitas Kawasan;
 5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan pengendalian konversi lahan;
 6. Mitigasi bencana dalam setiap perencanaan dan pembangunan.

4.4.2.1.1 Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Permasalahan
 1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Berita HOAX melalui Media Sosial.
- Rekomendasi
 1. Sosialisasi dan Penegakan PERDA yang terukur dan berkesinambungan
 2. Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman
 3. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Linmas di tingkat Kalurahan/Kelurahan melalui Pendidikan dan Pelatihan agar mampu mendukung program kegiatan Desa Wisata, Desa Budaya, Desa Maritim, Desa Mandiri, dan lain-lain predikat di Kal/Kel bertugas

4.4.2.1.2 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Permasalahan
 1. Belum adanya data tunggal yang terintegrasi dalam satu sistem informasi kependudukan
- Rekomendasi
 1. Membuat data base tunggal yang terintegrasi.
 2. Bersama Kabupaten dan Kota meningkatkan Kapasitas perangkat Kalurahan/Kelurahan dalam penggunaan teknologi informasi layanan kependudukan melalui pelatihan.
 3. Untuk payung hukum seyogyanya membuat Perda tentang data tunggal yang terintegrasi.
 4. Meningkatkan layanan pembuatan E-KTP.
 5. Penyediaan database E-KTP untuk semua urusan layanan pemerintah dan kebijakan publik berbasis TIK.
 6. Pengendalian keamanan dan ketertiban melalui pendataan E-KTP berbasis TIK.

4.4.2.1.3 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Permasalahan
 1. Menurunnya nilai-nilai kegotongroyongan, pengelolaan lembaga masyarakat masih kurang optimal, dan angka kemiskinan DIY masih tinggi.
 2. Pengelolaan lembaga masyarakat masih kurang optimal;
 3. Angka kemiskinan DIY masih tinggi;
 4. Belum adanya kesamaan pandang dalam sistem Birokrasi Kalurahan sesuai RPJMD 2022-2027.
- Rekomendasi
 1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Masyarakat di tingkat kalurahan/kelurahan melalui pelatihan perangkat maupun pengurus organisasi di tingkat kalurahan/kelurahan.
 2. Mendesain Rencana Induk pengembangan kalurahan/kelurahan dan BUMDES yang terintegrasi dengan RPJMD dan RPJP Daerah.
 3. Pengembangan Profil kalurahan/kelurahan berbasis teknologi informasi sebagai basis data pembangunan.
 4. Sinergitas program kegiatan lintas instansi di kalurahan/kelurahan agar memudahkan dalam mengukur, menilai, dan keberlanjutan.

5. SOP dan Pemimpin yang mengatur ritme Reformasi Kalurahan di tingkat OPD DIY, Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan.

4.4.2.1.4 Urusan Komunikasi dan Informatika

- Permasalahan
 1. Berita HOAKS.
 2. Belum adanya integrasi informasi dari Kab/Kota dengan Provinsi dalam *Smart Province*
 3. *Zona Blank*
 4. IT sebagai bagian Reformasi Birokrasi Kalurahan
 5. Pembaruan program-program sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah DI. Yogyakarta ke dalam sistem informasi yang lebih baru dan ter *update* untuk memenuhi perbaikan layanan publik.
 6. Peningkatan layanan pemerintah daerah melalui *E-Governance*, *Jogja Smart Province*
 7. Perluasan layanan informasi hingga ke desa/ kalurahan agar tidak ada *blankspot* area
 8. Pemasangan wifi di kawasan selatan
- Rekomendasi
 1. Membangun ekosistem digital tingkat Provinsi (DIY).
 2. Mengintegrasikan layanan digital dengan kabupaten/kota.
 3. Peningkatan kapasitas sumber daya dan SDM Jogja Smart Province/JSP melalui pendidikan dan pelatihan.
 4. Kerja sama dengan PT Telkom antisipasi zona Blank
 5. Membuat payung hukum terkait layanan terintegrasi dengan kabupaten/kota.

4.4.2.1.5 Urusan Penanganan Bencana

- Permasalahan
 1. Belum seluruh desa siap menghadapi bencana;
 2. SDM dalam kebencanaan belum semua memadai;
 3. Sinergitas antar lembaga dalam mengedukasi masyarakat tentang bencana belum optimal;
 4. Belum adanya peta rawan berbencana berbasis dusun/kampung.
- Rekomendasi

1. Melatih masyarakat desa tanggap dan tangguh dalam mitigasi bencana, SOP (tata cara pelaporan, tata kelola dalam kebencanaan, dan tindak lanjut).
2. Bersama Pemkot/Pemkab memfasilitasi organisasi relawan kebencanaan baik untuk peningkatan SDM maupun operasional organisasi dan membangun pusat data.
3. Pentingnya pendidikan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat maka program tersebut perlu ditingkatkan kuantitas program dan sasarannya baik di tingkat masyarakat maupun sekolah melalui kerja sama dengan Palang Merah Indonesia DIY/Kab/Kota.
4. Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung di dusun/kampung dalam penanggulangan bencana.
5. Membuat peta rawan bencana berbasis dusun/kampung dalam bentuk *offline* dan *online*.
6. *Roadmap* dan SOP kebencanaan serta gladi lapang perlu ditingkatkan dalam simulasi beragam bencana.
7. Mengkonsolidasikan dan mensinergikan organisasi relawan yang dibentuk kabupaten/kota dalam kalurahan/kelurahan tanggap bencana dan kapanewon/kemantren dalam forum koordinasi dan komunikasi.
8. Membangun jaringan organisasi yang bergerak dalam kebencanaan secara terstruktur dan berjenjang agar memudahkan komunikasi dan informasi.
9. Membuat EWS (*early warning system*) atau deteksi dini bila terjadi bencana dan sistem informasi kebencanaan.
10. Membuat data digital tentang bencana, relawan kebencanaan, sistem pelaporan, dan SOP yang terintegrasi dengan kabupaten/kota agar setiap kejadian bencana bisa tercatat, diketahui kondisinya dan penanganannya.
11. Menambah jumlah desa tangguh bencana.
12. Memperkuat komunitas masyarakat untuk terlibat dalam program kebencanaan.
13. Menambah fasilitas alat-alat pengurangan resiko bencana.
14. Membangun sistem informasi kebencanaan yang aksesible kepada masyarakat luas.

4.4.2.1.6 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Permasalahan
 1. Kenakalan remaja;
 2. Penyalahgunaan Napza;
 3. Belum optimalnya pemahaman tentang Pancasila dan implementasinya di sebagian Masyarakat.
- Rekomendasi
 1. Membangun jaringan gerakan masyarakat Sopo Aruh Bocah untuk mengurangi angka kejahatan anak di jalanan;
 2. Membangun jaringan gerakan masyarakat dalam mengurangi penyalahgunaan napza;
 3. Pembudayaan Pancasila melalui sosialisasi dan kampanye serta Melihat langsung penerapan di masyarakat melalui **Srawung Deso**;
 4. Perubahan perilaku masyarakat akibat kemajuan teknologi informasi juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM pengampu kegiatan di Kesbanpol melalui pelatihan;
 5. Melakukan Riset perubahan perilaku masyarakat dan metode antisipasinya;
 6. Pencegahan dengan tindakan preventif, penanganan kasus, dan pengurangan kasus kejahatan jalanan di Yogyakarta;
 7. Penanganan, pengurangan isu SARA dan konflik horisontal dampak isu SARA;
 8. Pendidikan politik kewargaan dengan penguatan pilar-pilar kebangsaan;
 9. Pendidikan politik dengan tujuan peningkatan pengetahuan politik dan ideologi kebangsaan Penguatan kohesivitas sosial kewargaan dengan kegiatan-kegiatan kesetiakawanan sosial.

4.4.2.1.7 Urusan Ketertiban, Ketentraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Permasalahan
 1. Pelanggaran Perda dan berita hoaks melalui media sosial.
- Rekomendasi
 1. Sosialisasi dan penegakan Perda yang terukur dan berkesinambungan.
 2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

3. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Linmas di tingkat kalurahan/kelurahan melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu mendukung program kegiatan Desa Wisata, Desa Budaya, Desa Maritim, Desa Mandiri, dan lain-lain predikat di kalurahan/kelurahan bertugas.

4.4.2.1.8 Keistimewaan Urusan Kelembagaan

- Permasalahan
 1. Sesuai amanah UU Tentang Keistimewaan maka Kelembagaan yang mengatur tentang keistimewaan hanya ada di Pemda DIY sementara Kabupaten/Kota belum ada sehingga pelaksanaan di bawah mengalami kendala.
- Rekomendasi
 1. Melakukan komunikasi dengan Kabupaten/Kota agar membuat payung hukum berupa Perda di Kab/Kota dalam Sistem Tata Organisasi di Pemkot/Pemkab yang didalamnya memuat tentang lembaga yang mengatur tentang keistimewaan di Kab/Kota.

4.4.2.1.9 Keistimewaan Urusan Kebudayaan

- Permasalahan
 1. Belum optimal dalam penumbuhan budaya maritim, belum optimalnya dalam kreatifitas dan inovasi kegiatan kebudayaan, belum semua sendi kehidupan tersentuh program, misal Pendidikan.
- Rekomendasi
 1. Memasukkan budaya maritim dalam satuan pendidikan guna mewujudkan visi maritim;
 2. Penguatan budaya maritim dimasyarakat melalui sosialisasi;
 3. Memasukkan unsur budaya dalam sendi kehidupan masyarakat diluar seni tradisi, misal tentang budaya bertani, budaya melaut, dan lain-lain;
 4. Membangun tempat edukasi maritime berbasis keluarga, misal memanfaatkan atau menambah fasilitas di Tanjung Adikarto, Tempat edukasi ini bisa berupa museum maritim yang dapat melihat kejayaan maritim di masa lalu, masa kini dan masa depan, seperti melalui *home theatre*, alat simulasi maritim, artefak, foto, dan lain-lain.

4.4.2.1.10 Keistimewaan Urusan Pertanahan

- Permasalahan
 1. Inventarisasi SG dan PAG belum selesai, belum adanya payung hukum bagi pengguna SG/PAG, penertiban admin pertanahan belum optimal.
- Rekomendasi
 1. Sosialisasi SG/PAG;
 2. Pensertifikatan SG/PAG;
 3. Membuat payung hukum tentang pemanfaatan SG/PAG;

4.4.2.1.11 Keistimewaan Urusan Tata Ruang dan Danais

- Permasalahan
 1. Belum optimalnya kebijakan yang terintegrasi dalam tata ruang antara Pemda DIY dengan Kabupaten/Kota, Belum adanya penataan daerah sumbu filosofis Merapi-Tugu-Kraton-Panggung Krapyak-Parangkusumo) baik dari sisi tata ruang, berupa arsitektur maupun budaya.
- Rekomendasi
 1. Membangun komunikasi dengan Kabupaten Kota dalam integrasi tata ruang;
 2. Membuat grand desain arsitektur dan tata ruang di sumbu filosofi;
 3. Membuat grand desain budaya masyarakat di sumbu filosofi;
 4. Merancang dan membuat ruang publik baru.

4.4.2.2 Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi Bidang Perekonomian

4.4.2.2.1 Urusan Pangan

- Permasalahan
 1. Rendahnya perhatian aspek ketahanan pangan.
 2. Belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat, karena masih bertumpu pada beras dan/terigu.
 3. Masih terdapat wilayah yang waspada, rentan rawan pangan di DIY.
 4. Masih rendahnya pengawasan pangan yang beredar di pasaran.
 5. Belum terjadi sinergi lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan di DIY.
 6. Panjangnya rantai distribusi pangan di DIY.

7. Belum optimalnya pemanfaatan dana keistimewaan untuk pengentasan kemiskinan di DIY khususnya dalam urusan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat DIY.
- Rekomendasi
 1. Menjadikan 11 kalurahan dan kelurahan waspada pangan sebagai prioritas program dan mendorong dana keistimewaan dalam pengentasan desa waspada pangan menjadi aman pangan.
 2. Mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan baik di kawasan perkotaan yang berlahan sempit maupun perdesaan untuk pemenuhan gizi keluarga. Dengan pemanfaatan lahan pekarangan tentunya dapat mengurangi pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan sehingga kesejahteraan rumah tangga akan pangan semakin meningkat. Kegiatan ini harus dilakukan dengan target dan sasaran yang jelas, terukur serta berkesinambungan agar memberikan dampak yang jelas sehingga pencapaian persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk pangan dapat sesuai target yang diharapkan.
 3. Menjadikan ketahanan pangan bagi masyarakat DIY sebagai salah satu prioritas program urusan pangan.
 4. Optimalisasi pelaksanaan Pergub DIY No. 71/2020 tentang Pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal.
 5. Meningkatkan cadangan pangan yang tidak hanya pada gabah kering giling maupun beras.
 6. Mengoptimalkan sinergitas dan kolaborasi antar stakeholder baik di tingkat DIY, Kabupaten/kota, kemantren/kapanewon, kelurahan /kalurahan dalam membangun ketahanan pangan di DIY.
 7. Optimalisasi pemanfaatan dana keistimewaan dalam pengentasan kemiskinan khususnya dalam urusan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat DIY.

4.4.2.2.2 Urusan Kelautan dan Perikanan

- Permasalahan
 1. Rendahnya budaya bahari di masyarakat DIY karena sejatinya masyarakat DIY adalah petani bukan nelayan.
 2. Belum selesainya pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto sampai sekarang karena adanya kesalahan desain pembangunan.
 3. Adanya gap produksi perikanan budidaya dan perikanan ikan tangkap.
 4. Keterbatasan SDM kelautan dan perikanan.

5. Tingginya biaya operasional kegiatan kelautan.
 6. Belum adanya pemanfaatan teknologi penangkapan ikan bagi nelayan.
- Rekomendasi
 1. Meningkatkan budaya bahari masyarakat di DIY yang ada untuk mengoptimalkan potensi alam yang ada dengan peningkatan kapasitas SDM nelayan, pemanfaatan teknologi tangkapan ikan, insentif bagi nelayan.
 2. Mengoptimalkan program-program kelautan dan perikanan yang berkesinambungan, tepat sasaran, dan terukur sehingga memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan PDRB sektor perikanan di DIY.
 3. Optimalisasi untuk memberikan fasilitasi secara optimal bagi pembudidaya ikan untuk dapat membuat pakan sendiri dari bahan baku lokal yang murah dan terjangkau, pelatihan, pemasaran dan akses pasar serta bibit ikan yang berkualitas baik, diupayakan agar dapat dilakukan di wilayah DIY.
 4. Melakukan redesign Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto agar bisa segera dimanfaatkan sehingga tidak menjadi proyek mangkrak, mengingat banyak permasalahan terkait dengan konstruksi Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adi Karto. Perlunya dibuat tata kala (tenggat waktu) terkait keberlangsungan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto sehingga jelas target yang akan dicapai dengan proses pembangunan Pelabuhan Adi Karto tersebut.
 5. Optimalisasi pembangunan Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Gesing perlu segera diwujudkan untuk mendorong peningkatan produksi perikanan di DIY.
 6. Melakukan optimalisasi penggunaan Dana Keistimewaan untuk urusan perikanan dan kelautan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan di DIY.

4.4.2.2.3 Urusan Pertanian

- Permasalahan
 1. Alih fungsi lahan pertanian pangan produktif masih terus berlangsung.
 2. Rendahnya minat generasi muda (generasi milineal) untuk terjun pada kegiatan pertanian.

3. Tata kelola dan distribusi subsidi pupuk yang mengalami banyak kendala di lapangan, yang sangat merugikan petani baik dari sisi kualitas maupun kuantitas pupuk.
 4. Belum optimalnya pemanfaatan dana keistimewaan untuk kegiatan pertanian.
- Rekomendasi
 1. Perlunya peningkatan kesejahteraan petani di DIY dengan optimalisasi pelaksanaan Perda DIY No. 11/2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan program-program yang berkesinambungan, terukur, serta jelas target dan sarannya, sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada petani di DIY.
 2. Regenerasi petani muda. Perlunya insentif generasi muda yang masuk dalam sektor pertanian, sehingga anak-anak muda akan tertarik bekerja di sektor pertanian. Program-program pemberdayaan petani milenial perlu dirancang dengan memperhatikan target dan sasaran yang jelas dan dilakukan secara berkesinambungan dengan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder lain.
 3. Perlunya optimalisasi dan sinergi antar pemerintah DIY dengan kabupaten terkait dengan pelaksanaan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan dalam mengurangi laju alih fungsi lahan di DIY.
 4. Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten perlu menyusun peta usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seperti yang dimandatkan oleh Perda DIY Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan aturan-aturan turunannya untuk mendukung implementasi di lapangan, serta mendorong kabupaten untuk menetapkan Perda PLP2B.
 5. Pemda DIY lebih mendorong pelatihan, fasilitasi petani untuk melakukan inovasi pada nilai tambah produk olahan hasil pertanian.
 6. Perlunya diatur tata kelola dan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani baik di tingkat regulator, fasilitator maupun petani agar penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat petani menjadi efektif, efisien, merata baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
 7. Pengembangan pupuk organik sebagai alternatif penyediaan pupuk bagi petani yang lebih efektif dan efisien.
 8. Optimalisasi pemanfaatan Dana Keistimewaan dalam urusan pertanian termasuk pengembangan saluran irigasi.

4.4.2.2.4 Urusan Kehutanan

- Permasalahan
 1. Masih terdapat lahan kritis di kawasan hutan karena peningkatan produk kayu primer yang dihasilkan pada Tahun 2020.
 2. Berkurangnya area hutan konservasi.
 3. Minimnya SDM pengelola hutan rakyat.
 4. Belum optimalnya penggunaan dana keistimewaan untuk sektor kehutanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kehutanan.
- Rekomendasi
 1. Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan hutan yang berperspektif lingkungan.
 2. Perlunya pendampingan kepada kelompok pengelola hutan rakyat dalam terus melakukan pelebagaan hutan rakyat, mendorong kelompok hutan rakyat untuk terus menjalin sinergi sehingga saling mendorong melakukan sertifikasi penatausahaan hasil hutan.
 3. Perlunya pemanfaatan dana keistimewaan dalam pengelolaan hutan lestari.
 4. Perlu adanya pembangunan hutan tematik/hutan perkotaan di kota Yogyakarta untuk mengurangi pencemaraan udara di kota Yogyakarta.
 5. Naiknya PDRB sektor kehutanan yang menghasilkan produk primer kayu yang dihasilkan tentunya perlu disegera dilakukan penanaman pohon kembali (reforestasi).
 6. Membangun dan memperluas area konservasi hutan.
 7. Rehabilitasi lahan krisis perlu menjadi prioritas penanganan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
 8. Perlu adanya pembangunan hutan tematik/hutan perkotaan di kota Yogyakarta untuk mengurangi pencemaraan udara di kota Yogyakarta.
 9. Pemanfaatan dana keistimewaan untuk kesejahteraan masyarakat kehutanan di DIY.

4.4.2.2.5 Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- Permasalahan
 1. Omzet koperasi mengalami penurunan.
 2. Penurunan omzet pada koperasi yang bergerak di sektor riil.
 3. Likuiditas koperasi mengalami penurunan karena sebagian anggota tidak bisa mengangsur dan anggota lain mengambil simpanan.
 4. Menurunnya usaha kecil dan menengah.

4-50

- Rekomendasi
 1. Penumbuhan dan pengembangan koperasi perlu didorong pada sektor riil.
 2. Kebijakan bantuan untuk koperasi ditingkatkan.
 3. Sektor UKM diperlukan pendampingan dan fasilitasi jejaring kemitraan.
 4. Para pengelola koperasi dan UKM perlu ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya.
 5. Pertumbuhan wirausaha baru harus ditingkatkan terutama dari kalangan muda, ditandai adanya 100 pengusaha baru disetiap kabupaten/kota.
 6. Mendorong koperasi dan UMKM untuk bisa terlibat dalam program Industri Kreatif.
 7. Pelatihan UMKM dan tidak lanjut dari pelatihan dengan pemberian bantuan alat untuk mendukung usaha UMKM.
 8. Pembinaan UMKM berbasis daerah yang tepat seperti Kota Yogyakarta adalah UMKM pengolahan, sedangkan kabupaten lain yang masih bisa usaha UMKM berbasis produk pertanian dan peternakan diwilayahnya.

4.4.2.2.6 Urusan Penanaman Modal

- Permasalahan
 1. Belum meratanya penanaman modal di DIY.
 2. Perijinan yang perlu disederhanakan.
 3. Perlu diciptakan usaha Mudah, cepat, dan nyaman investasi di DIY.
 4. Ketergantungan DIY pada Investor yang meningkatkan PDRB DIY.
 5. Bandara NYIA perlu dioptimalkan untuk daya dukung penanaman modal di DIY.
- Rekomendasi
 1. Penyusunan rencana induk penanaman modal yang berbasis pada keunggulan potensi lokal.
 2. Pembangunan infrastruktur penanaman modal yang merata terutama di daerah pesisir selatan.
 3. Peningkatan pelayanan perizinan terpadu sehingga tidak ada tumpang tindih antar instansi.
 4. Peningkatan program kemudahan berusaha di DIY, agar investor merasa nyaman dan mudah investasi di DIY.
 5. Optimalisasi potensi NYIA dalam menarik investor ke DIY.

6. Promosi bagi Kabupaten yang penanam modalnya kurang dibandingkan kabupaten lain
7. Penyempurnaan dan peningkatkan pelayanan perijinan terpadu, OSS
8. Perubahan mindset dan iklim usaha di DIY yang perlu dilakukan dinamisasi dan kemudahan usaha di DIY
9. Perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang mandiri di DIY
10. Semua Investasi di DIY harus menggunakan SDM dan SDA DIY.
11. Promosi untuk penggunaan fasilitas Bandara NYIA dalam mendukung penanaman modal di DIY (dukung fasilitas bandaran yang memadai)

4.4.2.2.7 Urusan Pariwisata

- Permasalahan
 1. Jumlah kunjungan wisatawan ke DIY baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang menurun pada Tahun 2020-2021 akibat pandemi Covid-19.
 2. Perlu obyek wisata yang baru untuk menarik wisatawan.
 3. Perlu memulihkan kunjungan wisatawan mancanegara.
 4. Peningkatan sarana obyek wisata untuk angkutan umum yang terbatas menuju obyek wisata baru.
- Rekomendasi
 1. Perlunya pengembalian citra wisata ke DIY yang aman dan favorit.
 2. Fasilitasi dan penerapan protokol kesehatan (CHSE) di obyek wisata.
 3. Pelatihan dan sertifikasi bagi SDM pelaku pariwisata.
 4. Penataan sistem aksesibilitas dan manajemen transportasi ke lokasi obyek wisata.
 5. Pengembangan wisata berbasis komunitas Desa Wisata dan menjaga kelestarian alam.
 6. Penggunaan Dana Istimewa untuk menunjang pariwisata di DIY melalui Desa Wisata.
 7. Tumbuhnya obyek wisata baru di 50% kalurahan di DIY.
 8. Perlu dukungan jalur bus menuju obyek wisata yang sudah ada dan obyek wisata yang baru, dan memiliki daya Tarik wisatawan.
 9. Mendukung Badan Usaha Milik Kalurahan yang bergerak dibidang pariwisata.

4.4.2.2.8 Urusan Perdagangan

- Permasalahan
 1. Nilai ekspor yang tumbuh di DIY membutuhkan bahan baku produk dari luar DIY.
 2. Tumbuhnya toko jejaring di DIY yang menyebabkan melemahnya pedagang tradisional.
 3. Perlu kebijakan monitoring dari Pemda DIY pada kabupaten/kota terkait penguatan pasar tradisional.
- Rekomendasi
 1. Peningkatan ekspor komoditas DIY harus terus ditingkatkan, pendampingan dari Pemerintah Daerah DIY terus dilakukan.
 2. Diperlukan peningkatan kelembagaan, kapasitas pelaku usaha, dan sarana prasarana penunjang di pasar-pasar tradisional
 3. Persaingan usaha sektor perdagangan ini sangat kompetitif perlu perlindungan bagi pedagang kecil.
 4. Pemantauan toko jejaring untukantisipasi jangan sampai mematikan usaha dan minat berusaha dengan banyaknya toko jejaring di perdesaan.
 5. Fasilitasi peningkatan keterampilan dalam perdagangan bagi pelaku UKM perlu ditingkatkan.
 6. Monitoring pada kabupaten/kota kebijakan penguatan pasar tradisional.
 7. Tumbuhnya nilai ekspor DIY setiap tahun minimal 10%.
 8. Pembangunan Pasar Tradisional dan pasar desa yang representatif.
 9. Pengelola pasar tradisional harus melarang praktik rentenir atau bank plecit di pasar tradisional yang menjerat para pedagang kecil.

4.4.2.2.9 Urusan Perindustrian

- Permasalahan
 1. Kebutuhan bahan baku untuk industri IKM di DIY dari luar DIY.
 2. Belum semua kawasan industri diminati perusahaan untuk membangun industrinya.
 3. Menurunnya permintaan produk industri dari pasar domestik maupun mancanegara akibat pandemi Covid-19 pada produk-produk tertentu.
 4. Antisipasi resesi dunia yang akan menurunkan pasar luar negeri terhadap produk DIY.
- Rekomendasi
 1. Produk-produk DIY harus memiliki nilai tambah yang lebih baik dari pesaingnya.

2. Produk-produk DIY harus memiliki nilai tambah yang lebih dari pesaingnya berbasis warisan budaya.
3. Adanya inovasi produk dan variasi industri pengolahan yang lebih besar dengan memaksimalkan sektor industri kreatif melalui pendampingan pengusaha di setiap kabupaten/kota.
4. Permasalahan bahan baku industri IKM karena keterbatasan sumber daya alam DIY diatasi melalui fasilitasi Pemda DIY dengan jaminan ketersediaan bahan baku.
5. Fasilitasi IKM dalam meningkatkan produktivitasnya.
6. Tumbuhnya IKM baru sebanyak 50 IKM di setiap kabupaten/kota setiap tahunnya.
7. Pembinaan IKM sesuai basis wilayahnya Kota Yogyakarta industry pengolahan , kabupaten lain yang masih bisa menggunakan industry berbasis produksi hasil pertaniannya.
8. Pemanfaatan Kawasan Industri DIY di Kabupaten Bantul (Piyungan, Srandakan, Pajangan) dan Kabupaten Kulon Progo (Sentolo) ditandai dengan adanya perusahaan baru yang menanamkan usahanya dikawasan tersebut.
9. Mengantisipasi resesi dunia para pengusaha ekspor diberikan pembinaan.

4.4.2.3 Rekomendasi Bidang Pembangunan

4.4.2.3.1 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pemda DIY harus Melakukan upaya rehabilitasi jalan atau peningkatan jalan yang mengalami kerusakan sehingga memperkuat kondisi jalan untuk menghindari terjadinya kerusakan berulang.
2. Mempercepat laju penanganan jalan dengan membuat sistem pemeliharaan jalan terpadu yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan prinsip respon cepat (*fast respon*) dan didukung oleh teknologi informasi dan media sosial sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan dan status tindaklanjutnya secara transparan
3. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Jalan seperti Penerangan Jalan Umum, Rambu-rambu dan marka jalan yang tidak hanya berada di jalan Provinsi, tetapi sampai dengan jalan desa yang masih terbatas sarana dan prasarana jalannya

4. Penambahan pembangunan sumur bor yang dapat memberikan kontribusi ketersediaan air di daerah sulit air berbasis pedukuhan.
5. Pembangunan sistem irigasi melalui pendekatan kebudayaan guna mengintegrasikan dengan konsepsi keistimewaan DIY yang memiliki sejarah sebagai wilayah agraris dengan penopang sektor pertanian berbasis tradisi.
6. Percepatan penyelesaian regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah di DIY sehingga dapat segera disinergikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten/Kota berikut dengan dokumen pendukungnya seperti misal Rencana Detil Tata Ruang sehingga langkah pemanfaatan dan penegakan peraturan dapat secara optimal dilaksanakan.

4.4.2.3.2 Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman

1. Peningkatan sinergitas pelaksanaan Program Penanganan rumah tidak layak huni di DIY yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta CSR terutama terkait dengan keterpaduan data.
2. Perlu adanya kepastian hukum terkait pedoman penanganan kawasan kumuh.
3. Penegakan aturan tentang pembangunan perumahan dan gedung yang memiliki ciri khas Keistimewaan Yogyakarta perlu ditingkatkan sehingga sehingga arsitektur bangunan yang ada dapat mencerminkan Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan yang juga dibarengi dengan sosialisasi yang masif terhadap masyarakat luas terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.4.2.3.3 Urusan Perhubungan

1. Perlu dipertimbangkan potensi pembukaan jalan alternatif untuk mengakses objek wisata serta pembangunan transportasi massal menuju objek-objek wisata.
2. Restrukturisasi angkutan massal termasuk angkutan antar wilayah di DIY serta angkutan perdesaan guna mempermudah mobilitas masyarakat juga mempermudah akses masyarakat untuk jalur distribusi barang yang menjadi usaha dari masyarakat.
3. Perlu dibangun konektifitas antarmoda dan intermoda angkutan umum yang dapat menghubungkan antara stasiun, terminal, bandara, kawasan

pelayanan publik, pemerintahan, pariwisata, pendidikan, kawasan kuliner, dan kawasan lain yang menjadi pusat mobilitas masyarakat.

4. Pemerintah DIY harus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan memberikan inovasi pelayanan transportasi umum yang baik, layak, dan nyaman yang dapat mempermudah akses mobilitas masyarakat serta sosialisasi pentingnya transportasi massal.
5. Pemerintah Daerah DIY perlu melakukan optimalisasi pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) pada penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B serta Tempat Khusus Parkir (TKP) mengingat belum optimalnya kedua SPM tersebut menjadi bagian dari permasalahan menurunnya minat masyarakat dalam menggunakan layanan angkutan umum serta perparkiran khususnya di kawasan-kawasan strategis.
6. Pemerintah Daerah DIY perlu mendorong serta meningkatkan penggunaan kendaraan tidak bermotor seperti sepeda, moda angkutan tradisional serta kendaraan bertenaga Listrik, mengingat penggunaan kendaraan tidak bermotor tersebut menjadi bagian dalam upaya mengurangi efek gas rumah kaca dari peningkatan emisi karbon di sektor transportasi.

4.4.2.3.4 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Perlunya inovasi dalam pemanfaatan energi baru terbarukan dalam penyediaan kebutuhan listrik di DIY.
2. Pembangunan infrastruktur penerangan jalan umum di daerah-daerah perdesaan, daerah semi terisolir, serta perbatasan dan perlu dipertimbangkan menggunakan PJU Tenaga Surya yang merupakan salah satu inovasi energi baru terbarukan.
3. Pemerintah DIY perlu melakukan pencegahan sejak dini dengan memperketat perizinan usaha tambang termasuk pada aspek AMDAL dan Program Reklamasi Paska Tambang.

4.4.2.3.5 Urusan Lingkungan Hidup

1. Pemerintah DIY harus meningkatkan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau secara masif untuk menjaga kualitas udara dan lingkungan hidup.
2. Pemda DIY harus memberikan penegasan tentang keberlanjutan Pengelolaan Sampah Regional di TPA Piyungan.

3. Pemda DIY harus memberikan dukungan dan koordinasi Penanganan permasalahan Sampah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mendorong Pengelolaan sampah yang terintegrasi dari sektor hulu ke hilir dengan memperkuat pengelolaan sampah secara partisipatif dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) sejak dari rumah tangga Berbasis Kelurahan/Kalurahan.
4. Memberikan dukungan anggaran pembangunan TPS 3R di Kalurahan.
5. Penguatan kelompok swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah seperti Bank Sampah dan Kelompok Pengelola Sampah lainnya.
6. Pemerintah DIY secara masif melakukan sosialisasi Perda DIY No. 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga kepada masyarakat luas guna mendukung terwujudnya Kebijakan Pengelolaan sampah yang mengurangi timbulan sampah dari sumbernya.

4.4.2.3.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Perlu ditingkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat sinkron dengan kebutuhan riil masyarakat DIY.
2. Perlu adanya program peningkatan Kapasitas perencana pembangunan sampai pada perangkat Kalurahan/Kelurahan termasuk pada tingkat Dukuh, RW dan RT agar perencanaan pembangunan semakin dekat dengan kebutuhan riil masyarakat.
3. Perlu ditingkatkan sosialisasi tahapan perencanaan pembangunan sehingga menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Di era digital ini, perlu digunakan model-model sosialisasi yang adaptif dengan teknologi informasi dan media sosial.
4. Evaluasi pemanfaatan SIPD agar benar-benar berfungsi menjadi alat untuk mempermudah Perencanaan Pembangunan di Daerah.

4.4.2.4 Permasalahan Pembangunan dan Rekomendasi Bidang Kesejahteraan Rakyat

4.4.2.4.1 Urusan Pendidikan

- Permasalahan
 1. Peningkatan kualitas pendidikan;
 2. Tenaga kependidikan;
 3. Sarana dan prasarana pendidikan;
 4. Sekolah ramah anak;
 5. Pendidikan berbasis budaya;
 6. Pemantapan budaya adiluhung;
 7. Antisipasi nilai-nilai budaya asing;
- Rekomendasi
 1. Kebijakan pembebasan penggunaan dana BOS, bagi siswa di SMA dan SMK.
 2. Meningkatkan jumlah beasiswa bagi warga DIY kurang mampu di sekolah dan yang kuliah di Perguruan Tinggi.
 3. Meningkatkan kesejahteraan bagi Guru dan Tenaga Pendidikan lainnya (GTT/PTT) untuk mendukung capaian kualitas peserta didik.
 4. Perbaiki manajemen penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi yang berkeadilan
 5. Fasilitasi dana pendidikan meliputi sarana dan prasarana pendidikan berbasis budaya.
 6. Meningkatkan cakupan akses pendidikan peserta didik dengan sasaran wajib belajar 12 tahun.
 7. Meningkatkan bantuan untuk pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dengan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya.
 8. Meningkatkan kualitas lulusan sekolah terutama sekolah kejuruan untuk peningkatan akses lapangan kerja.

4.4.2.4.2 Urusan Kesehatan

- Permasalahan
 1. Balita Penyakit tidak menular masih cukup tinggi di DIY.
 2. Tingkat kebugaran masyarakat masih kurang bagus.
 3. Angka *stunting* yang masih tinggi di DIY.

4. Angka kematian Ibu dan Anak.
 5. Jumlah ODGJ relatif cukup tinggi.
 6. Kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak masih perlu ditingkatkan dan perlunya pendampingan keluarga sehat.
 7. Tantangan Kedepan kebosanan melaksanakan protokol Kesehatan semakin menurun.
 8. Mengupayakan RSUD/Puskesmas mempunyai elektronik rekam media.
 9. Kondisi RSUD & Puskesmas, yang belum ramah terhadap lansia, anak-anak serta *difabel*/penyandang disabilitas.
- Rekomendasi
 1. Mengusulkan indikator terbaru disesuaikan dengan pusat, baik indikator pembangunan, sarana dan prasarana, dan tenaga medis.
 2. Perlu diperhatikan tumbuh kembang, pendidikan anak di masa pandemik dan imunisasi anak serta pemberian tambahan makanan.
 3. Perlu diperhatikan tumbuh kembang anak dan pendidikan anak mandiri di masa pandemik dan imunisasi anak, pemberian makanan tambahan meningkatkan layanan dasar kesehatan, berupa sarana rumah sakit dengan standar dan pemerataan tenaga medis (dokter spesialis) untuk wilayah selatan DIY dan wilayah tertinggal untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk.
 4. Meningkatkan pola hidup sehat dan sadar kebutuhan gizi (kalori) untuk menunjang standar pola hidup sehat dan kecukupan kalori yang erat kaitannya dengan standar hidup sehat menurut WHO.

4.4.2.4.3 Urusan Sosial

- Permasalahan
 1. Penurunan Pendapatan Warga Miskin selama Pandemi
- Rekomendasi
 1. Mengkondisikan DIY bebas gepeng dan anjal.
 2. Meminimalisasi peredaran dan bebas narkoba (keluarga, masyarakat, dan sekolah).
 3. Melakukan pendataan terhadap warga terdampak pandemi Covid-19 yang selama ini tidak termasuk kategori miskin sehingga belum masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
 4. Melakukan pendataan kepada pelaku usaha/UKM

5. Melakukan verifikasi data penduduk miskin untuk validitas data sehingga tidak terjadi salah sasaran ketika dilakukan pemberian bantuan sosial.
6. Fasilitasi sarana dan prasarana kebutuhan social masyarakat (sarana pemakaman umum)
7. Peningkatan layanan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terutama bagi warga miskin, gepeng, dan PMKS lainnya serta melakukan pengawasan PMKS terutama gepeng.
8. Perbaiki data jumlah penduduk miskin untuk menghilangkan adanya data penduduk miskin yang tidak tepat sasaran (inklusi/eksklusi).
9. Meningkatkan layanan pada program peningkatan PKH untuk hasil yang baik, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

4.4.2.4.4 Urusan Tenaga Kerja

- Permasalahan
 1. Tingkat pengangguran di DIY masih lumayan tinggi.
 2. Jumlah lebih besar berada di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan.
 3. Jumlah perempuan menganggur lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki- laki.
- Rekomendasi
 1. Peningkatan Penguatan sektor perdagangan sebagai penyerap tenaga kerja tertinggi.
 2. Penguatan program dan akses perempuan bekerja.
 3. Pengembangan pendidikan yang menunjang serapan tenaga kerja di sektor riil.

4.4.2.4.5 Urusan Transmigrasi

- Permasalahan
 1. Program transmigrasi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sehingga DIY sebagai daerah asal hanya menerima jumlah alokasi yang diberikan pemerintah dan memberangkatkan transmigran melalui Surat Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP).
 2. Sebenarnya masih banyak yang berminat untuk mengikuti program transmigrasi dalam rangka merubah nasib dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga.

3. Namun karena jumlah alokasi dari pemerintah terbatas tergantung kemampuan pemerintah dalam menyiapkan lahan lokasi transmigran akan ditempatkan.
 4. Selain menyediakan lahan, perlu dikembangkan produk/komoditas unggulan beserta pasarnya untuk menjamin keberlangsungan usaha para transmigran.
- Rekomendasi
 1. Mendesak melakukan penataan ulang dan re-konseptualisasi, tentang pengelolaan dan pelaksanaan transmigrasi;
 2. Perlu melakukan penyiapan dan pengelolaan calon peserta transmigrasi secara terpadu, agar percepatan akulturasi budaya antara pendatang dan penduduk setempat dapat terbentuk secara harmonis;
 3. Perlu melakukan sosialisasi secara terbuka dan akuntabel dalam pengelolaan program transmigrasi, baik dari daerah asal maupun sampai di daerah tujuan;
 4. Perlu melakukan *public hearing* dan *lobbying* yang terpetakan secara baik, dengan masyarakat daerah tujuan, agar konsep KSAD dapat terlaksana, dalam rangka untuk kelancaran, dan kesuksesan program transmigrasi;
 5. Perlu terus menerus sosialisasi dan motivasi masyarakat, untuk melakukan perluasan lapangan kerja melalui program transmigrasi yang di inisiasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan umum transmigrasi.
 6. Melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk mendapatkan alokasi/kuota calon transmigran yang lebih banyak.
 7. Perlu melakukan penyiapan dan pengelolaan calon peserta transmigrasi secara terpadu.

4.4.2.4.6 Urusan Kebudayaan

- Permasalahan
 1. Belum optimalnya upaya pelestarian yang meliputi penggalian, reaktualisasi, dan revitalisasi nilai-nilai budaya (budaya, adat, dan tradisi) yang menjadi *spirit* Renaisans Yogyakarta;
 2. Peninggalan warisan budaya benda semakin terancam kelestariannya karena dinamika perkotaan;
 3. Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap aset budaya fisik maupun non-fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa;

4. Pengelolaan kekayaan budaya sebagai aset, untuk menarik kunjungan wisata belum optimal; dan
 5. Kelembagaan pengelolaan kawasan budaya dan organisasi penggerak dan penggiatseni budaya, juga belum dinamika yang lebih dan optimal.
- Rekomendasi
 1. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, khususnya di bidang Kebudayaan, perlu pengawalan khusus, mengingat arti penting nilai-nilai budaya, sebagai ruh dan basis Undang-Undang Keistimewaan dan sekaligus *icon* Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Nasional.
 2. Peningkatan fasilitasi, dalam rangka perekayasaan budaya asli dalam menghadapi terpaan budaya luar yang masif-global ke dalam budaya Adihulung Yogyakarta.
 3. Peningkatan fasilitasi pemeliharaan dan Riset budaya, dalam konteks pelestarian dan pengembangan budaya, sebagai artepak budaya Adihulung harus terus didukung dan galakan.
 4. Perumusan, pemantapan, dan sosialisasi Simbol-simbol Budaya, sebagai Inti Budaya dan Identitas Keistimewaan DIY, menjadi keniscayaan untuk segera diwujudkan.
 5. Perlu sosialisasi definisi kebudayaan yang sangat luas pada masyarakat
 6. Implementasi nilai-nilai budaya Yogyakarta perlu di giatkan baik melalui jalur Pendidikan dalam bentuk sekolah berbasis nilai budaya maupun melalui sarana kebudayaan lainnya.
 7. Fasilitasi *event* seni dan budaya.

4.4.2.4.7 Urusan Keistimewaan

- Permasalahan
 1. Belum banyak informasi yang diterima masyarakat tentang peruntukan Dana Keistimewaan.
- Rekomendasi
 1. Percepatan pembentukan regulasi untuk mempercepat program-program Keistimewaan Yogyakarta.
 2. Penguatan regulasi pendukung urusan-urusan keistimewaan DIY.
 3. Pengelolaan lingkungan berbasis budaya.
 4. Fasilitasi desa menuju Desa Budaya.
 5. Menjaga dan melestarikan adat istiadat budaya yang berkembang di DIY.
 6. Fasilitasi sosialisasi tentang keistimewaan di seluruh desa.

7. Pembuatan basis data kebudayaan dan keistimewaan berbasis teknologi.

4.4.2.4.8 Urusan Perempuan dan Anak

- Permasalahan
 1. Angka kekerasan pada perempuan dan anak di DIY masih banyak terjadi.
 2. Anak berkonflik atau berperkara dengan hukum.
 3. Pernikahan anak sebagai akibat kehamilan yang tidak direncanakan/tidak diinginkan masih cukup banyak.
 4. Angka perceraian sebagai akibat gugat cerai maupun cerai talak di DIY cukup tinggi.
- Rekomendasi
 1. Pengembangan Program penguatan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018.
 2. Penguatan pendidikan budi pekerti (karakter) di sekolah-sekolah melalui pola didik yang pas. Dikaitkan pula dengan pendidikan yang berbudaya (Perda Pendidikan Berbasis Budaya).
 3. Pembangunan lingkungan sosial yang mendukung pada pendewasaan anak.
 4. Kemandirian ekonomi perempuan sebagai upaya meminimalisir relasi kuasa dalam keluarga.

4.4.2.4.9 Urusan Pengendalian Penduduk

- Permasalahan
 1. Distribusi penduduk DIY belum tersebar secara merata di seluruh kabupaten/kota, namun relatif terkonsentrasi di Sleman yang mencapai 30,69 persen atau sebanyak 1,1 juta orang. Selanjutnya Bantul tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk kedua terbesar di DIY mencapai 26,87 persen atau 986 ribu orang, disusul Gunungkidul mencapai 20,37 persen atau sebanyak 747 ribu orang. Kulon Progo dan Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan persentase penduduk yang paling sedikit di DIY. Penduduk DIY yang berada di Kulon Progo tercatat 11,90 persen atau 436 ribu orang dan Kota Yogyakarta sebanyak 10,18 persen atau 373 ribu orang dari total penduduk DIY.
 2. Kepadatan penduduk kota perlu dikendalikan untuk menciptakan lingkungan hunian dan tumbuh kembang anak yang sehat.

3. Menurut hasil SP 2020, rasio jenis kelamin mencapai 98,27 dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1,85 juta orang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1,82 juta. Dari 3,67 juta penduduk DIY, sebanyak 89,64 persen atau sekitar 3,29 juta penduduk berdomisili sesuai KK/KTP dan 10,36 persen atau sekitar 379,93 ribu penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK/KTP.
- Rekomendasi
 1. Distribusi penduduk yang tersebar secara merata di seluruh DIY. Transmigrasi lokal bisa menjadi pilihan kebijakan. Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penduduk harus didudukkan sebagai landasan hukum dalam perencanaan kebijakan pengendalian penduduk.
 2. Seiring dengan peningkatan angka TFR (*total fertility rate*) di DIY maka diperlukan pengendalian kelahiran dengan pendekatan insentif dan disinsentif. Bagi yang setuju dengan jumlah tertentu (pembatasan) maka diberikan insentif, sementara bagi yang tidak mengikuti kesepakatan diberlakukan disinsentif (pembatasan jaminan sosial dari Pemerintah Daerah). Pengendalian penduduk bersifat lebih lokalistik antar satu kabupaten dengan kabupaten yang lain.
 3. Pengendalian dan pengaturan tingkat kepadatan hunian untuk menciptakan lingkungan yang sehat secara fisik maupun non-fisik.
 4. Penegakan aturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak.

4.4.2.4.10 Urusan Pemuda dan Olah Raga

- Permasalahan
 1. Secara umum angka indeks pembangunan pemuda di DIY cukup bagus (nomor 1 nasional).
 2. Kesehatan fisik dan mental pemuda yang masih menyisakan problem (merokok aktif, kekerasan, angka bunuh diri).
 3. Pemberdayaan ekonomi dan kepemimpinan pemuda.
 4. Secara umum angka partisipasi olahraga di DIY berada pada urutan tengah secara nasional, namun indeks kebugaran masyarakat DIY urutan 3 dari bawah.

5. Prestasi olahraga DIY mengalami stagnasi dalam *event* nasional.
 6. Pembudayaan olahraga masyarakat perlu untuk terus digalakkan.
- Rekomendasi
 1. Pemda Pemberdayaan ekonomi pemuda sebagai pelaku ekonomi aktif dan mandiri.
 2. Kampanye GERMAS perlu menysasar kaum muda secara intensif dan masif.
 3. Penguatan pendidikan kewirausahaan muda.
 4. Pengembangan olahraga dalam 3 kluster (olahraga pendidikan, prestasi dan masyarakat) secara berkesinambungan.
 5. Peningkatan prestasi olahraga dengan pembinaan atlet sejak dini.
 6. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan olahraga di DIY.
 7. KONI dimohon memperhatikan kesejahteraan atlit dan pemain dengan menaikan bonus bagi atlet yang berprestasi.
 8. KONI Fasilitasi pendampingan seluruh Cabor di DiY dalam persiapan Pekan Olahraga Nasional mendatang dengan kembali menggiatkan antara lain Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) , Pra PON dan Pekan Olahraga Daerah (PORDA).
 9. Pelatihan dan *Workshop* Kewirausahaan Pemuda
 10. Petukaran pemuda antar negara.
 11. Kami memberikan semangat bahwa di tahun 2025 menjadi awal kebangkitan Olahraga dan Pemuda di DIY dapat sinergi agar beberapa kendala diatas dapat segera teratasi dengan baik meski dengan segala keterbatasan dan melakukan prokes yang ketat.
 12. Pengaruh media elektronik (*game online* dan lain-lain) memunculkan kekhawatiran anak- anak terbiasa dengan gadget/game-game on line. Sinergi Bidang Kebudayaan, Pendidikan, Kepemudaan & OR, bisa kembali melesatrikan DOLANAN ANAK (gobag sodor, egrang, mainan tradisional, dan lain-lain) yang terkikis oleh *game online*. Bentuk kegiatan bisa besifat Edukasi, Film melalui Sanggar-sanggar, Perkumpulan

4.4.2.5 Rekomendasi Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.4.2.5.1 Pengelolaan Belanja Daerah

1. Perlu dilakukan evaluasi perencanaan yang baik dari aspek sasaran, program, serta kegiatan yang lebih baik.
2. Perlu dilakukan koordinasi dalam antar OPD dalam mengatasi; angka kemiskinan, indeks gini/ratio, ipm, dan gap pembangunan antar wilayah.
3. Meningkatkan perencanaan yang lebih cermat, manajemen pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pengawasan internal yang lebih baik, untuk meningkatkan opini BPK RI yang sudah 12 kali WTP.

4.4.2.5.2 Pembiayaan Daerah

Kebijakan yang Tepat Terkait Sumber Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan
- f. Penerimaan Piutang Daerah.

4.4.2.5.3 Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

PT Bank BPD DIY

1. Pemenuhan modal Pemda DIY yang harus dipenuhi sampai Tahun 2025 sebesar Rp958.832.000.000,00 harus diberikan kajian kemampuan keuangan daerah dan analisis keuntungan untuk Pemda DIY berdasarkan kajian dalam situasi pandemi Covid-19 dan pemulihannya.
2. Kinerja PT Bank BPD DIY dalam periode 2022-2027 mohon disampaikan target kinerja untuk DPRD DIY.
3. Tugas Bank BPD DIY dalam ikut mengatasi problem DIY: angka kemiskinan, rasio gini, dan ketimpangan wilayah perlu diterjemahkan dalam program dan target yang jelas.
4. BPD harus ikut mengatasi masih banyaknya rentenir di pasar-pasar tradisional yang beroperasi pagi hari jam 05.00-07.30 WIB.

PT AMI

1. Laporan dari unit usaha yang menghasilkan laba harus dijelaskan sehingga bisa dilihat unit penghasil laba yang efisien.
2. Kekurangan penyertaan modal Pemda DIY perlu disampaikan analisis keuntungan dan analisis dampak pandemi Covid-19 pada kemampuan keuangan DIY.
3. Kinerja PT AMI dalam menghasilkan laba harus ditingkatkan.
4. Perbaiki manajemen perusahaan.
5. Biaya belanja subsidi Pemda yang diterima PT AMI perlu dijelaskan laporan PT AMI dalam laporan LKPJ AMJ dan setiap tahun laporan LKPJ
6. Perlu melakukan inovasi dengan melakukan pendataan pelanggan PT Trans Jogja melalui aplikasi *online* untuk memudahkan dan meningkatkan layanan kepada pelanggan seperti *KAI Access*

Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

1. Status badan hukum diperjelas.
2. Peningkatan laba BUKP harus ditingkatkan pada Tahun 2024.
3. Peran strategis BUKP dalam membantu mengatasi masalah rentenir di pasar tradisional.
4. Beroperasi pagi hari mulai jam 05.00-07.30 WIB.

Perumda Air Bersih Tirtatama DIY

1. Mohon ditinjau ulang kajian dalam naskah akademik terkait tujuan perusahaan.
2. Mohon ditinjau ulang rencana laba perusahaan dalam naskah akademik dan rencana bisnis perusahaan dan visi misi direksi.
3. Tahun 2024 ditargetkan mendapatkan laba.

4.4.2.5.4 Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Penyusunan perencanaan yang lebih efektif dan efisien.
2. Pemanfaatan lokasi tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah agar bisa optimal bisa bekerja sama dengan masyarakat.
3. Peningkatan jumlah sumber daya manusia yang menangani Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 TARGET INDIKATOR MAKRO KABUPATEN/KOTA SE-DIY

5.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta adalah wilayah perkotaan dengan dominasi aktivitas sektor jasa terutama pariwisata dan perdagangan. Kondisi pasca pandemi diharapkan dapat menjadi faktor pendorong peningkatan dinamika perekonomian dan mendukung pencapaian indikator makro yang lebih baik dibandingkan kondisi saat pandemi. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kota Yogyakarta berdasarkan hasil Rakortekrenbang Provinsi dengan Kab/Kota adalah sebagai berikut.

Tabel 5-1 Target Indikator Pembangunan Makro Kota Yogyakarta

Indikator	RPJMD DIY 2022-2027	BA Rakortekrenbang Kab/Kota
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,35-5,85	5,09-5,86
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,05-6,35	6,05 - 6,35
Tingkat Kemiskinan (%)	5,84	5,84-6,35
Indeks Gini	0,385	0,385-0,450
Indeks Pembangunan Manusia	88,18	88,62

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat menjadi kisaran 5,09 - 5,86% di tahun 2025. TPT ditargetkan mengalami penurunan hingga 6 6,05 - 6,35% di tahun 2025. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun menjadi 5,84-6,35% di tahun 2025. Penurunan tingkat

kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan menjadi 0,385-0,450 di tahun 2025. Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat menjadi 88,62 di tahun 2025.

5.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul adalah wilayah yang memiliki kawasan perkotaan yang cukup besar dan sebagian daerah tersebut termasuk Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Di samping itu, kabupaten ini juga termasuk daerah di sepanjang pantai selatan Jawa yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Aglomerasi kawasan perkotaan yang terkait dengan pembangunan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman serta prioritas kewilayahan di sepanjang pantai selatan tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bantul. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut.

Tabel 5-2 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Bantul, Tahun 2025

Indikator	RPJMD DIY 2022-2027	BA Rakortekrenbang Kab/Kota
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,32-5,82	5,20 - 5,32
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,08-3,58	3,08 - 3,58
Tingkat Kemiskinan (%)	10,75	10,75-11,02
Indeks Gini	0,320	0,390-0,410
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,71	81,99-82,53

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat dari kisaran 5,16 - 5,66% di tahun 2024 menjadi sebesar 5,20 - 5,32% di tahun 2025. TPT ditargetkan menurun kisaran 3,35 - 3,65% di tahun 2024 menjadi 3,08 - 3,58% di tahun 2025. Tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun seiring dengan penurunan TPT dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yaitu dari 11,26% di tahun 2024 menjadi 10,75-11,02% di tahun 2025. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut didukung oleh semakin menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan yang turun menjadi 0,390-0,410 di tahun 2025. Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat dari 81,43 di tahun 2024 menjadi 81,99-82,53 di tahun 2025.

5.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu wilayah yang memiliki daerah di sepanjang pantai selatan Jawa yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Prioritas kewilayahan di sepanjang pantai selatan tersebut diharapkan dapat mempercepat capaian pembangunan yang dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut.

Tabel 5-3 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2025

Indikator	RPJMD DIY 2022-2027	BA Rakortekrenbang Kab/Kota
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,57-6,07	5,52 - 5,90
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%)	2,07-2,37	2,08 - 2,6
Tingkat Kemiskinan (%)	14,29	14,12-15,12
Indeks Gini (%)	0,394	0,357-0,394
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,23	76,00-76,23

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat menjadi 5,52-5,90% dari sebelumnya target pertumbuhan tahun 2024 sebesar 5,31-5,81%. TPT ditargetkan mengalami penurunan menjadi 2,08-2,6% di tahun 2025. Penurunan tersebut didukung oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun menjadi 14,12-15,12% ditahun 2025. Target ketimpangan pendapatan juga turun dari 0,399 di tahun 2024 menjadi 0,357-0,394 di tahun 2025. Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat dari 75,90 di tahun 2024 menjadi 76,00-76,23 di tahun 2025.

5.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten di sepanjang pantai selatan Jawa yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Percepatan capaian pembangunan di Kabupaten Gunungkidul sebagai dampak prioritas pembangunan di kawasan pantai selatan Jawa diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah di DIY. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut.

Tabel 5-4 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2025

Indikator	RPJMD DIY 2022-2027	BA Rakortekrenbang Kab/Kota
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07-5,57	4,95 - 5,57
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,45-1,75	1,96 - 2,05
Tingkat Kemiskinan (%)	13,71	14,78-15,20
Indeks Gini	0,301	0,320-0,330
Indeks Pembangunan Manusia	72,27	72,23-73,00

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan dapat meningkat menjadi kisaran 4,95-5,57% di tahun 2025 dibandingkan target pertumbuhan tahun 2024 sebesar 4,85 - 5,35%. TPT ditargetkan mengalami penurunan menjadi 1,96-2,05% di tahun 2025. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun menjadi 14,78-15,20% di tahun 2025. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan menjadi 0,320-0,330 di tahun 2025. Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat dari 71,90 di tahun 2024 menjadi 72,23-73,00 di tahun 2025.

5.1.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman adalah salah satu wilayah yang memiliki kawasan perkotaan yang signifikan dengan dinamika bisnis cukup besar. Perkembangan sektor pariwisata dan pendidikan yang mendekati kondisi sebelum pandemi menjadi salah satu faktor pendorong pencapaian indikator makro yang masih tetap tinggi dibandingkan tiga kabupaten sebelumnya. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut.

Tabel 5-5 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sleman, Tahun 2025

Indikator	RPJMD DIY 2022-2027	BA Rakortekrenbang Kab/Kota
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,22-5,72	5,10-5,96

Indikator	RPJMD DIY 2022-2027	BA Rakortekrenbang Kab/Kota
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,14-4,44	4,14 - 4,44
Tingkat Kemiskinan (%)	6,93	6,79-6,98
Indeks Gini	0,426	0,425-0,430
Indeks Pembangunan Manusia	85,34	85,00-85,34

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat dari kisaran 4,97 - 5,47% di tahun 2024 menjadi 5,10 - 5,96% di tahun 2025. TPT ditargetkan mengalami penurunan dari 4,22 - 4,52% di tahun 2024 menjadi 4,14 - 4,44% di tahun 2025. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun yaitu dari 7,21% di tahun 2024 menjadi 6,79-6,98% di tahun 2025. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan menjadi 0,425-0,430 di tahun 2025. Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat menjadi 85,00-85,34 di tahun 2025.

5.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEISTIMEWAAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY merupakan daerah Provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Istimewa disini meliputi wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Berikut kebijakan pembangunan keistimewaan berdasarkan urusan keistimewaan di DIY.

5.2.1 Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang Tata cara Pengisian Jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DY pada prinsipnya mengacu pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis keistimewaan DIY, karena simbol utama keistimewaan DIY berada pada posisi Gubernur dan Wakil Gubernur yang dijabat oleh Sultan dan Paku Alam yang bertahta.

Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui mekanisme penetapan, adalah sebuah proses yang demokratis, tercermin dari dilibatkannya peran

DPRD dalam proses pengusulan, verifikasi, penetapan, dan usulan pengangkatan/ pelantikan Sultan sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur.

5.2.2 Kelembagaan

Secara lebih singkat, kelembagaan pemda pada masa mendatang adalah kelembagaan pemda yang berkarakter:

1. Kelembagaan Pemda DIY yang adaptif sesuai dinamika kemajuan multi aspek dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam mengembangkan kelembagaan yang efektif.
2. Budaya birokrasi yang inovatif yang berorientasi iptek dan berkarakter luhur yang merupakan bagian dari Budaya SATRIYA yang terus tumbuh dan kembang dalam praktik pelayanan publik dan pemajuan keistimewaan Yogyakarta. Pengembangan budaya birokrasi yang berkemajuan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan berbagai upaya meningkatkan profesionalisme, serta melakukan transformasi sarana prasarana layanan publik yang berbasis teknologi informasi yang mendukung perwujudan *smart government*.
3. Peranan pemda tingkat DIY hingga kalurahan yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Arah pengaturan urusan kelembagaan :

1. Mendesain bentuk kelembagaan dan tata kelola kelembagaan Pemerintah DIY yang menunjukkan keistimewaan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Mendesain bentuk kelembagaan dan tatakelola kelembagaan dengan tidak melupakan realitas empiris yang ada di DIY.

5.2.3 Kebudayaan

Dengan diletakkannya budaya sebagai ruh atau *spirit* bagi segala gerak kehidupan di wilayah DIY dalam kerangka besar keistimewaan DIY, maka perlu

adanya langkah-langkah untuk menguatkan nilai budaya ke dalam praktek keseharian baik di ranah pemerintah maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Upaya penguatan atas tatanan kehidupan dengan ruh budaya diharapkan dapat menjadi pengungkit bagi kesejahteraan rakyat sekaligus meneguhkan posisi DIY sebagai pusat kebudayaan yang dapat tercermin pada kehidupan masyarakat.

Langkah kedepan yang harus dilakukan adalah: (1) "mengembalikan" nilai-nilai yang memang harus dikembalikan karena nilai-nilai tersebut telah menjadi nilai-nilai keistimewaan budaya DIY, (2) "merehabilitasi", nilai-nilai keistimewaan budaya yang sudah menunjukkan tanda keredupan, (3) "menguatkan", nilai-nilai keistimewaan budaya yang mengalami pelemahan oleh nilai-nilai budaya baru dan oleh generasi baru Yogyakarta, dan (4) "mengembangkan", nilai-nilai keistimewaan budaya untuk menjawab perubahan zaman, perubahan generasi, dan perubahan pandangan kedepan tentang Yogyakarta tanpa kehilangan hakekat dan inti nilai keistimewaan budaya DIY.

Berikut ini arah kebijakan strategis urusan kebudayaan DIY berdasarkan isu pokok, dimana kebudayaan menjadi ruh atas isu pokok yang lain:

1. Arah kebijakan Bidang Kebudayaan
 - a. Mewujudkan Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan yang berbasis pada pelestarian aset sejarah, asal usul, dan destinasi budaya demi peningkatan kualitas hidup-penghidupan warga;
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan tata kelola infrastruktur publik sebagai arena apresiasi pelaku budaya dalam rangka perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya *tangible* dan *intangible*
 - c. Mewujudkan wilayah konservasi budaya dan lumbung budaya yang dapat menginspirasi pengembangan kebudayaan di tingkat nasional maupun global;
2. Arah kebijakan Bidang Pariwisata
 - a. Mewujudkan Yogyakarta sebagai destinasi wisata utama dengan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan untuk mendorong tumbuhnya lapangan-lapangan kerja disektor industri kreatif di berbagai kawasan cagar budaya, saujana (lanskap) budaya, desa/kalurahan sebagai kantong/lumbung budaya

- b. Mewujudkan Yogyakarta sebagai destinasi wisata utama dunia berbasis nilai-nilai keistimewaan dengan pendekatan komprehensif dan terintegrasi sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
 - c. Meningkatkan kualitas pemanfaatan berbagai destinasi wisata demi redistribusi kesejahteraan warga
3. Arah kebijakan Bidang Pendidikan
- a. Mewujudkan pendidikan karakter manusia sosial yang penuh keutamaan berbasis nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta;
 - b. Memperkuat pengembangan sarana prasarana infrastruktur dan pengkondisian lingkungan pendidikan berkarakter nilai-nilai keistimewaan yang didasarkan pada konteks hidup dan kultur penghidupan masyarakat di sekitarnya (pertanian, maritim dan perdagangan).
4. Arah kebijakan Bidang Ekonomi, Kewirausahaan, dan Ketahanan Pangan
- a. Memperkuat sistem ekonomi berbasis keberagaman potensi kewilayahan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di bidang industri kreatif dan industri pariwisata berbasis aset/potensi budaya lokal.
 - b. Mengembangkan sistem produksi dan lumbung pangan yang berbasis pada pengalokasian Sultan *ground*, Pakualaman *ground*, lahan masyarakat, sumber daya kelautan, serta pendayagunaan potensi wilayah.
5. Arah kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan dan Keterlindungan Warga
- a. Memperkuat nilai-nilai keberagaman dan kebhinekaan dalam kemanunggalan cipta, rasa, karsa melalui asah asih asuh di antara *multistakeholder* keistimewaan Yogyakarta
 - b. Memperkuat keterlibatan desa/kelurahan sebagai mitra pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang terintegrasi dengan memberdayakan lembaga-lembaga lokal organik dan komunitas seni budaya,
 - c. Memperkuat potensi lembaga lokal untuk meningkatkan kepedulian sosial, kerukunan, kesehatan dan perlindungan warga.

5.2.4 Pertanahan

Kebijakan strategis ini dijabarkan dalam agenda penyelenggaraan program dan kegiatan sektor pertanahan berdasarkan pada 3 (tiga) Sasaran Sektor Pertanahan yang meliputi:

1. Terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan;
Sasaran ini merupakan sasaran berdasarkan kondisi eksisting dan permasalahan pertanahan di DIY dalam perspektif kewenangan pemerintahan dalam urusan pertanahan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, atau yang sering disebut dengan penyelenggaraan urusan pertanahan reguler. Terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan ini merupakan sasaran yang hendak dicapai, sesuai dengan kewenangan Pemda DIY di bidang pertanahan. Sasaran ini merupakan salah satu bagian dari Catur Tertib Pertanahan yang otoritasnya ada di Kementerian/Lembaga Pertanahan. Dalam hal ini Catur Tertib Pertanahan terdiri dari 4 aspek, yakni:
 - a. Tertib Hukum Pertanahan, yang diarahkan pada:
 1. Meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat;
 2. Melengkapi peraturan perundangan di bidang pertanahan;
 - a) Menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi;
 - b) Meningkatkan pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan hukum agraria.
 - b. Tertib Administrasi Pertanahan, yang diarahkan pada program:
 1. Mempercepat proses pelayanan yang menyangkut urusan pertanahan;
 2. Menyediakan peta dan data penggunaan tanah, keadaan sosial ekonomi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan penggunaan tanah bagi kegiatan-kegiatan pembangunan. Penyusunan data dan daftar pemilik tanah, tanah-tanah kelebihan batas maksimum, tanah-tanah *absentee* dan tanah-tanah negara;
 3. Menyempurnakan daftar-daftar kegiatan baik di Kantor Agraria maupun di kantor PPAT;
 4. Mengusahakan pengukuran tanah dalam rangka pensertifikatan hak atas tanah.
 - c. Tertib Penggunaan Tanah, diarahkan pada usaha untuk:
 1. Menumbuhkan pengertian mengenai arti pentingnya penggunaan tanah secara berencana dan sesuai dengan kemampuan tanah;

2. Menyusun rencana penggunaan tanah baik tingkat nasional maupun tingkat daerah; Menyusun petunjuk-petunjuk teknis tentang peruntukan dan penggunaan tanah;
 3. Melakukan survei sebagai bahan pembuatan peta penggunaan tanah, peta kemampuan dan peta daerah-daerah kritis.
- d. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup, yang diarahkan pada usaha:
1. Menyadarkan masyarakat bahwa pemeliharaan tanah merupakan kewajiban setiap pemegang hak atas tanah;
 2. Kewajiban memelihara tanah tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai suatu hubungan dengan tanah;
 3. Memberikan fatwa tata guna tanah dalam setiap permohonan hak atas tanah dan perubahan penggunaan tanah.

5.2.5 Tata Ruang

Dalam bidang tata ruang, terdapat 4 (empat) nilai dasar yang sangat perlu diletakkan sebagai “rujukan” sekaligus “panduan” dalam penataan ruang DIY di masa datang yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Ke 4 (empat) nilai dasar tersebut adalah: (a) *Hamemayu Hayuning Bawana*, (b) sumbu Tugu Pal Putih-Panggung Krapyak, (c) catur gatra tunggal, dan (d) *Pathok Nagoro*.

Penyelenggaraan Penataan Ruang yang lebih komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien harus memuat:

1. Perencanaan Tata Ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Tahap perencanaan tata ruang menghasilkan dokumen rencana tata ruang. Dalam konteks tata ruang keistimewaan, rencana tata ruang yang dimaksud (meliputi Perdais 2 Tahun 2017 Pasal 44):
 - a. penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten (sampai dengan akhir tahun 2021, telah selesai disusun materi teknis RRTR SRS di 18 SRS);
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten

- (sampai dengan akhir tahun 2021, telah selesai disusun RTBL di beberapa SRS yang dilakukan oleh kabupaten/kota) ;
- c. penyusunan rencana induk pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten (sampai dengan akhir tahun 2021, telah selesai disusun materi teknis rencana induk di empat SRS);
 - d. berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimaksud RRTR adalah Rencana Detail Tata Ruang yang akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Pemanfaatan Ruang yang mengatur ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang;
 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang mengatur penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penilaian perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang; Strategi yang digunakan pada aspek ini adalah:
 - a. Melanjutkan Penyusunan RTR skala rinci pada ruang-ruang keistimewaan yang belum ada RTR-nya;
 - b. Mendorong Penerapan Rencana Tata Ruang sesuai dengan Rencana RTR skala rinci (RDTR/PZ) baik RTR skala rinci yang telah menjadi perda maupun yang masih berbentuk dokumen kajian dengan terobosan hukum (Pergub/Perbup/Perwal);
 - c. Memperkuat pengendalian dengan mempertajam rekomendasi dalam pemberian izin pemanfaatan ruang agar sesuai dengan RTR, instrumentasi insentif disinsentif dan mekanisme pemberian sanksi pelanggaran RTR.
 4. Pengawasan Penataan Ruang, yang meliputi pemantauan evaluasi, dan pelaporan, yang merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat; Strategi yang digunakan dalam mendukung arah kebijakan ini adalah:
 - a. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang agar perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen RTR yang telah ada, baik yang berada di ruang-ruang keistimewaan maupun kawasan lainnya;
 - b. Mendorong antisipasi dan penyelesaian konflik dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang di ruang-ruang keistimewaan.

5. Pembinaan Penataan Ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara Pembinaan Penataan Ruang yang diselenggarakan secara sinergis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pembinaan Penataan Ruang mencakup juga pengaturan mengenai pengembangan profesi perencana tata ruang untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang; Strategi yang digunakan dalam mendukung arah kebijakan ini adalah:
 - a. Mendorong optimalisasi Peran Pemkab/Pemkot dalam mendukung Kinerja Tata ruang sesuai dengan Perdas 2/2017;
 - b. Peningkatan koordinasi antar OPD dan antar level pemerintahan Pemda DIY dengan kab/kota dalam tata ruang khususnya pada ruang-ruang keistimewaan;
 - c. Mendorong penyelenggaraan pelatihan penataan ruang keistimewaan.
6. Kelembagaan Penataan Ruang yang mengatur mengenai bentuk, tugas, keanggotaan, dan tata kerja Forum Penataan Ruang.

BAB 6 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN DALAM RKPD TAHUN 2025

Usaha perwujudan tema pembangunan RKPD DIY 2025 yaitu “Pengembangan sektor unggulan yang kreatif dan inovatif menuju pertumbuhan ekonomi inklusif” dilaksanakan melalui Prioritas Pemerintah Daerah DIY sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram

Prioritas pembangunan di atas memiliki keterkaitan dengan Sasaran Pembangunan Daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 beserta indikasi kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 6-1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta
Pagu Indikatifnya Tahun 2025**

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						1.406.468.305.244,00							1.582.210.840.217,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.366.465.837.544,00								1.538.228.125.747,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.366.465.837.544,00								1.538.228.125.747,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	86,71 Nilai			86,71 Nilai	1.024.928.692.294,00						86,71 Nilai	1.153.042.004.016,00		
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya proses, penyusunan dan penerapan perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100 %			100 %	141.125.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	100 %	155.237.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	20 Dokumen			5 Dokumen	31.909.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	4 Dokumen	35.099.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	24 Dokumen			2 Dokumen	79.216.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	4 Dokumen	87.137.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	132 Laporan			14 Laporan	30.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	22 Laporan	33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran</i>	100 %			100 %	1.021.268.249.634,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	100 %	1.149.051.081.410,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	240 Orang/Bulan			13630 Orang/ Bulan	1.021.108.419.634,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSI L GURU PNSD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	240 Orang/Bulan	1.148.819.300.410,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	360 Dokumen			1 Dokumen	76.530.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	72 Dokumen	140.151.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	5 Laporan			3 Laporan	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	1 Laporan	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	10 Laporan			14 Laporan	33.300.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	2 Laporan	36.630.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran</i>	100 %			100 %	93.630.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	100 %	102.993.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	93.630.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		102.993.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	100 %			100 %	73.652.850,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	100 %	141.083.855,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	58.522.850,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		64.375.135,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				2 Dokumen	15.130.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		76.708.720,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %			100 %	261.827.450,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	100 %	246.083.695,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	10.001.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		11.001.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	6.306.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		6.941.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	4.519.450,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		4.971.395,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	2.116.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		2.356.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	238.885.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		220.814.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>	50 %			50 %	45.420.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	50 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	681 Unit			3 Unit	45.420.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	149 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran</i>	100 %			100 %	2.737.880.160,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	100 %	3.007.739.636,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		550.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	1.295.436.160,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		1.424.664.736,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	1.441.944.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		1.582.524.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>	100 %			100 %	306.907.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	100 %	337.784.920,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				23 Unit	221.887.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		244.075.920,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	74.928.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		82.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				25 Unit	10.092.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY		11.209.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p><i>Angka Putus Sekolah SMA/SMK</i></p> <p><i>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat</i></p> <p><i>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik</i></p> <p><i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul</i></p> <p><i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman</i></p> <p><i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo</i></p> <p><i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul</i></p> <p><i>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar</i></p> <p><i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta</i></p> <p><i>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat</i></p> <p><i>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK</i></p> <p><i>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB</i></p>	<p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p>			<p>0,19 %</p> <p>100 %</p> <p>40 Orang</p> <p>41.47 %</p> <p>46.83 %</p> <p>46.98 %</p> <p>49.46 %</p> <p>55 %</p> <p>58.62 %</p> <p>77.52 %</p> <p>80.5 %</p> <p>86.15 %</p>	341.442.011.350,00						<p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p>	384.983.106.941,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	<i>Iklm Inklusivitas SMA Iklm keamanan SMA Iklm kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SMA yang melaksanakan UKS</i>	74,76 % 61,79 % 83,58 Angka 36,10 % 500 siswa 44 medali 85,03 Indeks 88,02 % 97,31 Indeks			83,28 Angka 84,73 Indeks 97,01 Indeks 40 medali 400 siswa 74,46 % 61,49 % 32,10 %	115.421.942.850,00			Memperkuat Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	74,76 % 61,79 % 83,58 Angka 36,10 % 500 siswa 44 medali 85,03 Indeks n/a % 97,31 Indeks	132.308.885.995,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>	200394 Peserta didik			28743 Peserta didik	10.015.066.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	33855 Peserta didik	11.872.064.820,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	47040 Peserta Didik			995 Peserta Didik	2.391.128.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	9508 Peserta Didik	6.713.395.260,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</i>	1480 Orang			326 Orang	1.392.212.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	336 Orang	1.734.837.390,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	25510 Orang			69 Orang	45.762.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	5142 Orang	53.502.955,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	169 Satuan Pendidikan			69 Satuan Pendidikan	480.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	169 Satuan Pendidikan	528.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	170 Satuan Pendidikan			170 Satuan Pendidikan	98.526.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	170 Satuan Pendidikan	108.378.710.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	44 Dokumen			5 Dokumen	1.585.808.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	11 Dokumen	1.833.991.390,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	28 Dokumen			1 Dokumen	1.100.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	7 Dokumen	1.210.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				45 Komunitas	10.752.550,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		64.127.305,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				140 Orang	335.814.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		495.586.575,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				118 Satuan Pendidikan	638.198.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		633.460.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36.10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka			22 medali 32.10 %	173.055.929.750,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36.10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka	192.112.522.415,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>	37416 Peserta didik			37845 Peserta didik	17.626.876.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	37416 Peserta didik	20.637.408.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	2300 Peserta Didik			1050 Peserta Didik	3.540.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	550 Peserta Didik	3.894.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</i>	1130 Orang			518 Orang	2.513.401.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	236 Orang	2.982.731.840,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	645 Orang			49 Orang	25.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	169 Orang	42.208.045,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	219 Satuan Pendidikan			49 Satuan Pendidikan	312.812.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	219 Satuan Pendidikan	503.181.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS</i>	210 Satuan Pendidikan			204 Satuan Pendidikan	148.571.360.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	210 Satuan Pendidikan	163.428.496.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	20 Dokumen			2 Dokumen	359.385.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	5 Dokumen	395.323.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	28 Dokumen			1 Dokumen	1.100.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	7 Dokumen	1.210.550,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				55 Komunitas	10.752.550,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		64.127.305,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	400 Orang			103 Orang	94.642.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	100 Orang	163.835.375,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	<i>Iklm inklusivitas SMALB Iklm keamanan SMALB Iklm kebinekaan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS</i>	83,35 Angka 30,10 % 5000 siswa 85,08 Angka 59,52 Angka 81,02 Angka 16 medali 59,61 Angka			84,78 Angka 83,05 Angka 80,72 Angka 14 medali 4500 siswa 59,22 Angka 59,31 Angka 26,10 %	52.964.138.750,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	83,35 Angka 30,10 % 5000 siswa 85,08 Angka 59,52 Angka 81,02 Angka 16 medali 59,61 Angka	60.561.698.531,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>	52180 Peserta Didik			10223 Peserta Didik	11.295.077.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	10476 Peserta Didik	12.465.205.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	2300 Peserta Didik			466 Peserta Didik	2.215.838.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	550 Peserta Didik	2.472.060.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus</i>	9257 Orang			586 Orang	2.665.528.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	1611 Orang	4.454.355.290,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	1235 Orang			47 Orang	5.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	287 Orang	16.825.490,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	79 Satuan Pendidikan			225 Satuan Pendidikan	2.070.109.450,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	79 Satuan Pendidikan	2.277.132.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS</i>	79 Satuan Pendidikan			81 Satuan Pendidikan	23.260.540.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	79 Satuan Pendidikan	25.586.594.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				1 Dokumen	127.855.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB		291.341.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	16 Dokumen			3 Dokumen	120.557.550,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	16 Dokumen	502.428.850,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	15.285.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB		16.813.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	9 Satuan Pendidikan			9 Satuan Pendidikan	10.631.841.950,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	9 Satuan Pendidikan	11.801.879.071,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	400 Orang			246 Orang	555.905.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	100 Orang	677.062.430,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	<i>Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten</i>	96.21 %			96.21 %	45.133.900,00						96.21 %	148.014.790,00	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	<i>Terlaksananya pendataan PTK satdikmen dan sakdikus</i>	1 tahun			1 tahun	45.133.900,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 tahun	148.014.790,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus</i>	5 Dokumen			1 Dokumen	44.008.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Dokumen	146.777.290,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus</i>				2 Laporan	1.125.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.237.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	<i>Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan</i>	10 dokumen Jumlah			10 dokumen Jumlah	50.000.000,00						10 dokumen Jumlah	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	<i>jumlah perizinan yg dikeluarkan dinas pendidikan DIY terhadap satuan pendidikan menengah di DIY</i>	10 dokumen			10 dokumen	50.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	calon SMA dan SMK	10 dokumen	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	calon SMA dan SMK		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						39.802.467.700,00							43.782.714.470,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						39.802.467.700,00							43.782.714.470,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya</i>	-			56,33 %	39.802.467.700,00						-	43.782.714.470,00	
	2.22.08.5.10	Pendidikan Berbasis Budaya	<i>Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori minimal Kembang Budaya</i>	-			51,92 %	39.802.467.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB; AKSENIBUDYO	-	43.782.714.470,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.22.08.5.10.0001	Pembinaan Muatan Lokal														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal</i>				16 Laporan	34.240.592.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB; AKSENIBUDYO		37.664.651.970,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.22.08.5.10.0002	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan</i>				7 Unit	1.878.875.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB; AKSENIBUDYO		2.066.762.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.22.08.5.10.0004	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta														
			<i>Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta</i>				100 Orang	3.683.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB; AKSENIBUDYO		4.051.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						200.000.000,00							200.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						200.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	<i>Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik</i>	-			50 %	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	<i>Tercapainya implementasi budaya pemerintahan</i>	-			100 %	200.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa SLBN Pembina dan Masyarakat	-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa SLBN Pembina dan Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
								6.467.282.490,00							6.668.762.201,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.467.282.490,00							6.668.762.201,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						6.467.282.490,00							6.668.762.201,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,71 Nilai			86,71 Nilai	6.072.461.350,00						86,71 Nilai	5.604.171.201,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %			100 %	8.970.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik	100 %	9.867.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 Dokumen			1 Dokumen	8.970.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik	72 Dokumen	9.867.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %			100 %	15.900.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik	100 %	17.490.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	15.900.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik		17.490.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %			100 %	158.712.650,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik	100 %	174.967.540,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	7.842.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik		8.626.750,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	11.545.300,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik		12.700.490,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				3 Paket	6.859.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik		7.549.300,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	5.011.850,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik		5.500.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik		1.650.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	125.954.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik		138.941.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>	50 %			50 %	45.442.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik	50 %	49.988.400,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	681 Unit			7 Unit	45.442.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik	149 Unit	49.988.400,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran</i>	100 %			100 %	1.621.630.300,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik	100 %	1.846.400.261,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	287.546.600,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik		316.963.011,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	1.334.083.700,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik		1.529.437.250,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>	100 %			100 %	1.869.876.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik	100 %	918.335.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				9 Unit	29.233.400,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik		26.191.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1.820.643.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik		881.144.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				50 Unit	20.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik		11.000.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian</i>	5.925 siswa			5.775 siswa	2.351.930.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik	5.925 siswa	2.587.123.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.351.930.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN DARI BLUD, PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Latihan Pendidikan Teknik		2.587.123.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 46.86 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 81,5 %</p> <p>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 50 Orang</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 49.49 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul</p> <p>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat</p> <p>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB</p>	<p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p>			<p>0,19 %</p> <p>100 %</p> <p>40 Orang</p> <p>41.47 %</p> <p>46.83 %</p> <p>46.98 %</p> <p>49.46 %</p> <p>55 %</p> <p>58.62 %</p> <p>77.52 %</p> <p>80.5 %</p> <p>86.15 %</p>	394.821.140,00						<p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p>	1.064.591.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklm Inklusivitas SMK Iklm keamanan SMK Iklm kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka			77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32,10 %	394.821.140,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka	1.064.591.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	400 Orang			120 Orang	394.821.140,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	100 Orang	1.064.591.000,00	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
		BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA						65.828.995.500,00							78.879.703.980,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						65.828.995.500,00							78.879.703.980,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						65.828.995.500,00							78.879.703.980,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,71 Nilai			86,71 Nilai	9.946.775.200,00						86,71 Nilai	10.539.465.420,00	
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %			100 %	13.680.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga	100 %	15.048.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 Dokumen			1 Dokumen	13.680.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga	72 Dokumen	15.048.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %			100 %	18.750.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga	100 %	20.625.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	18.750.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga		20.625.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %			100 %	164.354.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga	100 %	180.437.620,00	BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	44.519.200,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga		48.971.120,00	BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	10.155.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga		11.000.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	33.020.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga		36.322.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	4.825.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga		5.307.500,00	BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	2.760.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga		3.036.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLARAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	69.075.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga		75.801.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLARAGA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>	50 %			50 %	45.278.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga	50 %	0,00	BALAI PEMUDA DAN OLARAGA
	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	681 Unit			7 Unit	45.278.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga	149 Unit	0,00	BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran</i>	100 %			100 %	8.257.182.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga	100 %	9.083.071.470,00	BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	715.066.700,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga		786.573.370,00	BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	7.542.116.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga		8.296.498.100,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>	100 %			100 %	1.447.530.300,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga	100 %	1.240.283.330,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				9 Unit	121.600.300,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga		133.760.330,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				8 Unit	1.291.330.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga		1.068.463.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				9 Unit	34.600.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pemuda dan Olahraga		38.060.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	<i>persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha</i>	9.09% %			9.09% %	2.671.029.300,00						9.09% %	7.397.828.460,00	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	<i>jumlah kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan</i>	30 kelompok			13 kelompok	2.421.029.300,00			-	Peningkatan kualitas SDM	pemuda	30 kelompok	7.122.828.460,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi														
			<i>Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya</i>	10500 Orang			150 Orang	1.548.562.600,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	pemuda	2700 Orang	2.254.730.060,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi</i>				1 Dokumen	261.573.200,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	pemuda		0,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda</i>				25 Orang	300.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	pemuda		351.883.400,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda</i>				39 Orang	310.893.500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	pemuda		4.516.215.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan organisasi kepemudaan</i>	1 lembaga			1 lembaga	250.000.000,00			Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	lembaga kepemudaan	1 lembaga	275.000.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi</i>				1 Organisasi	250.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	lembaga kepemudaan		275.000.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	<i>Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS</i>	365 Atlet			365 Atlet	51.711.191.000,00						365 Atlet	59.442.410.100,00	
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	<i>Jumlah Kejuaraan /event olahraga prestasi di tingkat nasional yang diikuti</i>	2 Event			2 Event	10.816.191.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	pelajar	2 Event	11.897.810.100,00	BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga</i>				347 Orang	8.349.253.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	pelajar		9.184.178.300,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi</i>				1 Kegiatan	264.162.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	pelajar		290.578.200,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara</i>				1 Kegiatan	2.202.776.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	pelajar		2.423.053.600,00	BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	<i>Jumlah bibit olahragawan siswa yang difasilitasi dalam pemanduan bakat cabang olahraga</i>	400 Atlet			400 Atlet	20.100.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Atlet	400 Atlet	22.000.000.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah penerima Penghargaan olahraga</i>				250 Orang	20.100.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Atlet		22.000.000.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	<i>Jumlah Lembaga yang terfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional</i>	3 Lembaga			3 Lembaga	20.795.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	lembaga olahraga	3 Lembaga	25.544.600.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi</i>				3 Dokumen	20.795.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	lembaga olahraga		25.544.600.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	<i>Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan</i>	100% Persentase			100% Persentase	1.500.000.000,00						100% Persentase	1.500.000.000,00	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	<i>Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Kepramukaan</i>	1 lembaga			1 lembaga	1.500.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Organisasi Pramuka	1 lembaga	1.500.000.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				1 Organisasi	1.500.000.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Organisasi Pramuka		1.500.000.000,00	BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN								7.599.243.100,00							8.588.493.320,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.599.243.100,00							8.588.493.320,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						7.599.243.100,00							8.588.493.320,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	86,71 Nilai			86,71 Nilai	6.998.896.000,00						86,71 Nilai	7.810.646.800,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran</i>	100 %			100 %	5.190.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	100 %	0,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	360 Dokumen			1 Dokumen	5.190.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	72 Dokumen	0,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran</i>	100 %			100 %	10.650.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	100 %	0,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	10.650.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		0,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %			100 %	94.280.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	100 %	103.512.860,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	7.908.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		8.698.800,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		11.000.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		6.600.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	8.562.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		9.223.060,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1.956.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		2.151.600,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	59.854.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		65.839.400,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>	50 %			50 %	45.266.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	50 %	49.792.600,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	681 Unit			8 Unit	45.266.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	149 Unit	49.792.600,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran</i>	100 %			100 %	6.539.769.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	100 %	7.433.182.900,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	5.943.801.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		6.780.181.100,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	595.968.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		653.001.800,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>	100 %			100 %	303.740.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	100 %	224.158.440,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	57.960.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		63.756.440,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				2 Unit	45.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		49.940.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	152.960.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		58.300.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				20 Unit	47.420.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan		52.162.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo</i>	46,98 %			46,98 %	600.347.100,00						46,98 %	777.846.520,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	<i>Iklim keamanan SMA Persentase SMA yang melaksanakan UKS</i>	74,76 % 61,79 % 83,58 Angka 36,10 % 500 siswa 44 medali 85,03 Indeks 88,02 % 97,31 Indeks			84,73 Indeks 32,10 %	535.319.100,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	74,76 % 61,79 % 83,58 Angka 36,10 % 500 siswa 44 medali 85,03 Indeks n/a % 97,31 Indeks	706.315.720,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	47040 Peserta Didik			45 Peserta Didik	675.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9508 Peserta Didik	742.500,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i>	400 Orang			418 Orang	324.193.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100 Orang	439.999.230,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				13 Konten Digital	102.220.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		143.462.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				180 Orang	108.230.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		122.111.990,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha</i>	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36.10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka			58 %	53.300.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36.10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka	58.630.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			<i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>				10 Konten Digital	53.300.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		58.630.000,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	<i>Iklm inklusivitas SMALB Iklm keamanan SMALB Iklm kebinekaan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS</i>	83,35 Angka 30,10 % 5000 siswa 85,08 Angka 59,52 Angka 81,02 Angka 16 medali 59,61 Angka			84,78 Angka 83,05 Angka 80,72 Angka 14 medali 4500 siswa 59,22 Angka 59,31 Angka 26,10 %	11.728.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	83,35 Angka 30,10 % 5000 siswa 85,08 Angka 59,52 Angka 81,02 Angka 16 medali 59,61 Angka	12.900.800,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>				20 Orang	11.728.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		12.900.800,00	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA							19.166.036.809,00						30.216.968.375,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						19.166.036.809,00							30.216.968.375,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						19.166.036.809,00							30.216.968.375,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,71 Nilai			86,71 Nilai	1.238.617.550,00						86,71 Nilai	1.360.315.605,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %			100 %	7.230.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	100 %	7.953.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 Dokumen			1 Dokumen	7.230.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	72 Dokumen	7.953.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %			100 %	115.950.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	100 %	127.545.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	115.950.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		127.545.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %			100 %	125.262.150,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	100 %	137.255.965,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	8.932.600,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		9.825.860,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	48.723.200,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		53.063.120,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				3 Paket	11.662.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		12.828.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	3.848.350,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		4.233.185,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	2.596.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		2.855.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	49.500.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		54.450.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>	50 %			50 %	44.960.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	50 %	49.456.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	681 Unit			3 Unit	44.960.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	149 Unit	49.456.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran</i>	100 %			100 %	837.678.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	100 %	919.731.340,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	194.346.400,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		213.781.040,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	643.332.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		705.950.300,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>	100 %			100 %	107.537.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	100 %	118.374.300,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	28.301.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		31.131.100,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	67.120.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		73.832.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				11 Unit	12.116.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta		13.411.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 77.62 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 46.86 %</p> <p>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 41.50 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 58.65 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman 47.01 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo 81,5 %</p> <p>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar 50 Orang</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta 49.49 %</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 %</p> <p>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK 65 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB 77.52 %</p>	<p>0,19 %</p> <p>100 %</p> <p>40 Orang</p> <p>41.47 %</p> <p>46.83 %</p> <p>46.98 %</p> <p>49.46 %</p> <p>55 %</p> <p>58.62 %</p> <p>77.52 %</p> <p>80.5 %</p> <p>86.15 %</p>	17.927.419.259,00									<p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p>	28.856.652.770,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	<i>Iklm Inklusivitas SMA Iklm keamanan SMA Iklm kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SMA yang melaksanakan UKS</i>	74,76 % 61,79 % 83,58 Angka 36,10 % 500 siswa 44 medali 85,03 Indeks 88,02 % 97,31 Indeks			83,28 Angka 84,73 Indeks 97,01 Indeks 40 medali 400 siswa 74,46 % 61,49 % 32,10 %	14.378.415.159,00			Memperkuat Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	74,76 % 61,79 % 83,58 Angka 36,10 % 500 siswa 44 medali 85,03 Indeks n/a % 97,31 Indeks	16.159.325.160,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	47040 Peserta Didik			400 Peserta Didik	233.892.800,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	9508 Peserta Didik	258.516.060,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	169 Satuan Pendidikan			42 Satuan Pendidikan	4.110.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	169 Satuan Pendidikan	7.821.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	44 Dokumen			1 Dokumen	42.098.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	11 Dokumen	85.014.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	28 Dokumen			2 Dokumen	14.220.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	7 Dokumen	15.642.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				1 Komunitas	12.515.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA		13.766.500,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	9.150.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA		10.065.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				11 Satuan Pendidikan	14.062.428.859,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA		15.768.500.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklm Inklusivitas SMK Iklm keamanan SMK Iklm kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka			77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32,10 %	3.549.004.100,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka	12.697.327.610,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	2300 Peserta Didik			100 Peserta Didik	135.067.100,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	550 Peserta Didik	148.573.810,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	219 Satuan Pendidikan			28 Satuan Pendidikan	3.090.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	219 Satuan Pendidikan	6.979.500,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	20 Dokumen			1 Dokumen	12.900.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	5 Dokumen	52.432.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	28 Dokumen			2 Dokumen	12.690.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	7 Dokumen	13.959.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				1 Komunitas	10.935.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK		12.028.500,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	7.722.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK		8.494.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik															
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			2 Satuan Pendidikan	3.366.600.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	219 Satuan Pendidikan	12.454.860.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA	
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL							37.532.891.920,00							46.983.779.150,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						37.532.891.920,00							46.983.779.150,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						37.532.891.920,00							46.983.779.150,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,71 Nilai			86,71 Nilai	1.342.411.000,00						86,71 Nilai	1.425.747.950,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %			100 %	7.230.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	100 %	7.953.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 Dokumen			1 Dokumen	7.230.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	72 Dokumen	7.953.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %			100 %	146.850.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	100 %	161.535.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	146.850.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		161.535.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %			100 %	98.419.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	100 %	108.271.900,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	9.100.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		10.010.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	16.650.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		18.315.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				3 Paket	6.900.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		7.601.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	9.005.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		9.905.500,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1.764.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		1.940.400,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	55.000.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		60.500.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>	50 %			50 %	45.440.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	50 %	0,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	681 Unit			5 Unit	45.440.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	149 Unit	0,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran</i>	100 %			100 %	981.721.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	100 %	1.078.961.950,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	122.185.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		134.468.950,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	859.536.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		944.493.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>	100 %			100 %	62.751.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	100 %	69.026.100,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	21.277.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		23.404.700,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	29.904.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		32.894.400,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				15 Unit	11.570.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan kualitas SDM	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul		12.727.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 77.62 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 46.86 %</p> <p>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 41.50 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 58.65 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman 47.01 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo 81,5 %</p> <p>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar 50 Orang</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta 49.49 %</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 %</p> <p>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK 65 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB 77.52 %</p> <p>100 %</p> <p>86.15 %</p>	<p>0,19 %</p> <p>100 %</p> <p>40 Orang</p> <p>41.47 %</p> <p>46.83 %</p> <p>46.98 %</p> <p>49.46 %</p> <p>55 %</p> <p>58.62 %</p> <p>77.52 %</p> <p>80.5 %</p> <p>86.15 %</p>	36.190.480.920,00									77.62 %	45.558.031.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	<i>Iklm Inklusivitas SMA Iklm keamanan SMA Iklm kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SMA yang melaksanakan UKS</i>	74,76 % 61,79 % 83,58 Angka 36,10 % 500 siswa 44 medali 85,03 Indeks 88,02 % 97,31 Indeks			83,28 Angka 84,73 Indeks 97,01 Indeks 40 medali 400 siswa 74,46 % 61,49 % 32,10 %	20.028.787.920,00			Memperkuat Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	74,76 % 61,79 % 83,58 Angka 36,10 % 500 siswa 44 medali 85,03 Indeks n/a % 97,31 Indeks	22.662.287.450,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	47040 Peserta Didik			450 Peserta Didik	190.200.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	9508 Peserta Didik	186.010.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	169 Satuan Pendidikan			37 Satuan Pendidikan	2.585.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	169 Satuan Pendidikan	4.671.150,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	44 Dokumen			1 Dokumen	41.370.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	11 Dokumen	119.972.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	28 Dokumen			2 Dokumen	11.554.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	7 Dokumen	29.847.400,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				130 Komunitas	6.031.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA		10.853.700,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	7.857.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA		19.322.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				19 Satuan Pendidikan	19.769.190.920,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA		22.291.610.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklm Inklusivitas SMK Iklm keamanan SMK Iklm kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka			77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32,10 %	16.161.693.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka	22.895.743.750,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	2300 Peserta Didik			300 Peserta Didik	85.326.500,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	550 Peserta Didik	91.990.250,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	219 Satuan Pendidikan			47 Satuan Pendidikan	2.792.500,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo Kab. Bantul, Bantul, Tlirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	219 Satuan Pendidikan	5.880.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	20 Dokumen			1 Dokumen	12.650.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	5 Dokumen	92.391.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	28 Dokumen			2 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	7 Dokumen	32.536.900,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				200 Komunitas	6.102.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK		10.771.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	8.622.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK		16.473.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik															
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			9 Satuan Pendidikan	16.033.600.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	219 Satuan Pendidikan	22.645.700.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL	
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO							16.589.910.100,00							20.753.462.950,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.589.910.100,00							20.753.462.950,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						16.589.910.100,00							20.753.462.950,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,71 Nilai			86,71 Nilai	1.152.644.000,00						86,71 Nilai	1.215.427.400,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %			100 %	7.230.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	100 %	7.953.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 Dokumen			1 Dokumen	7.230.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	72 Dokumen	7.953.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %			100 %	126.210.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	100 %	138.831.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	126.210.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Kabupaten Kulon Progo		138.831.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %			100 %	106.349.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	100 %	116.723.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	35.718.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		39.029.100,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	10.631.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		11.694.100,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	8.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		9.350.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		1.650.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		55.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>	50 %			50 %	45.207.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	50 %	0,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	681 Unit			6 Unit	45.207.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	149 Unit	0,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran</i>	100 %			100 %	798.028.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	100 %	875.338.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	93.660.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		103.026.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	704.368.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		772.312.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>	100 %			100 %	69.620.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	100 %	76.582.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	35.352.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		38.887.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	29.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		32.340.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				10 Unit	4.868.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo		5.354.800,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB											
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)												
											NASIONAL					DAERAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 77.62 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 46.86 %</p> <p>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 41.50 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 58.65 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman 47.01 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo 81,5 %</p> <p>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar 50 Orang</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta 49.49 %</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 %</p> <p>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK 65 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB 77.52 %</p>	<p>0,19 %</p> <p>100 %</p> <p>40 Orang</p> <p>41.47 %</p> <p>46.83 %</p> <p>46.98 %</p> <p>49.46 %</p> <p>55 %</p> <p>58.62 %</p> <p>77.52 %</p> <p>80.5 %</p> <p>86.15 %</p>	15.437.266.100,00									77.62 %	46.86 %	41.50 %	58.65 %	47.01 %	81,5 %	50 Orang	86.25 %	65 %	0,16 %	100 %	49.49 %	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	<i>Iklm Inklusivitas SMA Iklm keamanan SMA Iklm kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SMA yang melaksanakan UKS</i>	74,76 % 61,79 % 83,58 Angka 36,10 % 500 siswa 44 medali 85,03 Indeks 88,02 % 97,31 Indeks			83,28 Angka 84,73 Indeks 97,01 Indeks 40 medali 400 siswa 74,46 % 61,49 % 32,10 %	8.001.275.100,00			Memperkuat Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	74,76 % 61,79 % 83,58 Angka 36,10 % 500 siswa 44 medali 85,03 Indeks n/a % 97,31 Indeks	9.239.809.480,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	47040 Peserta Didik			400 Peserta Didik	201.825.600,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	9508 Peserta Didik	222.008.160,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	169 Satuan Pendidikan			16 Satuan Pendidikan	1.244.800,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	169 Satuan Pendidikan	1.369.280,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	44 Dokumen			1 Dokumen	34.568.700,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	11 Dokumen	68.916.540,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	28 Dokumen			1 Dokumen	14.550.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	7 Dokumen	8.429.300,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				1 Komunitas	10.956.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA		12.051.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	6.530.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA		19.784.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				11 Satuan Pendidikan	7.731.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA		8.907.250.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklm Inklusivitas SMK Iklm keamanan SMK Iklm kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka			77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32,10 %	7.435.991.000,00			Memperkuat Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka	10.298.226.070,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	2300 Peserta Didik			200 Peserta Didik	93.527.800,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	550 Peserta Didik	102.880.580,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	219 Satuan Pendidikan			32 Satuan Pendidikan	1.244.800,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	219 Satuan Pendidikan	1.369.280,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	20 Dokumen			1 Dokumen	5.763.400,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	5 Dokumen	37.230.710,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	28 Dokumen			2 Dokumen	15.326.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	7 Dokumen	8.429.300,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				1 Komunitas	10.956.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK		12.051.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	7.973.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK		19.784.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			6 Satuan Pendidikan	7.301.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	219 Satuan Pendidikan	10.116.480.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL							21.219.562.050,00						28.131.004.770,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						21.219.562.050,00							28.131.004.770,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						21.219.562.050,00							28.131.004.770,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	86,71 Nilai			86,71 Nilai	1.312.098.000,00						86,71 Nilai	1.393.319.400,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran</i>	100 %			100 %	7.230.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	100 %	7.953.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	360 Dokumen			1 Dokumen	7.230.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	72 Dokumen	7.953.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran</i>	100 %			100 %	136.290.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	100 %	149.919.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	136.290.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		149.919.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %			100 %	110.286.300,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	100 %	117.361.530,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	7.955.600,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		8.751.160,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	18.594.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		19.800.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	10.029.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		11.031.900,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	6.707.700,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		7.378.470,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		1.650.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	65.500.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		68.750.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>	50 %			50 %	45.390.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	50 %	0,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	681 Unit			5 Unit	45.390.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	149 Unit	0,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran</i>	100 %			100 %	850.813.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	100 %	939.789.070,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	149.128.700,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		164.041.570,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	701.685.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		775.747.500,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>	100 %			100 %	162.088.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	100 %	178.296.800,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	39.962.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		43.958.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	80.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		88.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				17 Unit	42.126.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul		46.338.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 77.62 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 46.86 %</p> <p>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 41.50 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 58.65 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman 47.01 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo 81,5 %</p> <p>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar 50 Orang</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta 49.49 %</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 %</p> <p>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK 65 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB 100 %</p>	<p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p>			<p>0,19 %</p> <p>100 %</p> <p>40 Orang</p> <p>41.47 %</p> <p>46.83 %</p> <p>46.98 %</p> <p>49.46 %</p> <p>55 %</p> <p>58.62 %</p> <p>77.52 %</p> <p>80.5 %</p> <p>86.15 %</p>	19.907.464.050,00						<p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p>	26.737.685.370,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	<i>Iklm Inklusivitas SMA Iklm keamanan SMA Iklm kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SMA yang melaksanakan UKS</i>	74,76 % 61,79 % 83,58 Angka 36,10 % 500 siswa 44 medali 85,03 Indeks 88,02 % 97,31 Indeks			83,28 Angka 84,73 Indeks 97,01 Indeks 40 medali 400 siswa 74,46 % 61,49 % 32,10 %	9.707.382.150,00			Memperkuat Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	74,76 % 61,79 % 83,58 Angka 36,10 % 500 siswa 44 medali 85,03 Indeks n/a % 97,31 Indeks	11.153.070.170,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	47040 Peserta Didik			200 Peserta Didik	300.641.200,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	9508 Peserta Didik	342.237.500,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	169 Satuan Pendidikan			11 Satuan Pendidikan	11.959.800,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	169 Satuan Pendidikan	21.061.700,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	44 Dokumen			1 Dokumen	70.063.200,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	11 Dokumen	153.799.800,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	28 Dokumen			2 Dokumen	19.172.500,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	7 Dokumen	21.090.190,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				50 Komunitas	19.144.700,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA		39.215.660,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	7.100.750,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA		13.685.320,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				11 Satuan Pendidikan	9.279.300.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA		10.561.980.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklm Inklusivitas SMK Iklm keamanan SMK Iklm kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka			77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32,10 %	10.200.081.900,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka	15.584.615.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	2300 Peserta Didik			200 Peserta Didik	128.256.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	550 Peserta Didik	181.701.300,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	219 Satuan Pendidikan			13 Satuan Pendidikan	18.002.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	219 Satuan Pendidikan	20.404.560,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	20 Dokumen			1 Dokumen	20.450.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	5 Dokumen	95.135.700,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	28 Dokumen			2 Dokumen	14.563.600,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	7 Dokumen	27.522.440,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				70 Komunitas	22.569.950,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK		49.665.880,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	8.040.350,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK		8.845.320,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik															
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			8 Satuan Pendidikan	9.988.200.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	219 Satuan Pendidikan	15.201.340.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	
		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN							20.413.913.600,00							30.943.068.640,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						20.413.913.600,00							30.943.068.640,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						20.413.913.600,00							30.943.068.640,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	86,71 Nilai			86,71 Nilai	1.079.170.900,00						86,71 Nilai	1.187.087.990,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran</i>	100 %			100 %	7.230.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	100 %	7.953.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	360 Dokumen			1 Dokumen	7.230.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	72 Dokumen	7.953.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran</i>	100 %			100 %	136.770.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	100 %	150.447.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	136.770.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		150.447.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %			100 %	129.487.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	100 %	142.436.360,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	2.178.800,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		2.396.680,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	35.253.400,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		38.778.740,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				4 Paket	11.071.400,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		12.178.540,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	16.720.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		18.392.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1.764.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		1.940.400,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	62.500.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		68.750.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>	50 %			50 %	45.416.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	50 %	49.957.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	681 Unit			13 Unit	45.416.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	149 Unit	49.957.600,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran</i>	100 %			100 %	704.327.300,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	100 %	774.760.030,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	145.063.300,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		159.921.630,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	559.264.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		614.838.400,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat</i>	100 %			100 %	55.940.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	100 %	61.534.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	35.884.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		39.472.400,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	14.952.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		16.447.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				8 Unit	5.104.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman		5.614.400,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 77.62 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 46.86 %</p> <p>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 41.50 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 58.65 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman 47.01 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo 81,5 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul 50 Orang</p> <p>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar 86.25 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta 65 %</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 77.52 %</p> <p>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK 80.5 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB 86.15 %</p>	<p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p> <p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p>			0,19 %	19.334.742.700,00							29.755.980.650,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	<i>Iklm Inklusivitas SMA Iklm keamanan SMA Iklm kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS</i>	74,76 % 61,79 % 83,58 Angka 36,10 % 500 siswa 44 medali 85,03 Indeks 88,02 % 97,31 Indeks			83,28 Angka 84,73 Indeks 97,01 Indeks 40 medali 400 siswa 74,46 % 61,49 % n/a % 32,10 %	15.076.404.900,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	74,76 % 61,79 % 83,58 Angka 36,10 % 500 siswa 44 medali 85,03 Indeks n/a % 97,31 Indeks	17.176.744.640,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	47040 Peserta Didik			520 Peserta Didik	192.744.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	9508 Peserta Didik	257.235.550,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	169 Satuan Pendidikan			53 Satuan Pendidikan	18.949.300,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	169 Satuan Pendidikan	20.844.230,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	44 Dokumen			1 Dokumen	94.823.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	11 Dokumen	167.697.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	28 Dokumen			2 Dokumen	17.248.500,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA	7 Dokumen	22.239.690,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				53 Komunitas	18.934.600,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA		24.245.430,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	8.505.500,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA		11.012.540,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				17 Satuan Pendidikan	14.725.200.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, Siswa SMA		16.673.470.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklm Inklusivitas SMK</i> <i>Iklm keamanan SMK</i> <i>Iklm kebinekaan SMK</i> <i>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)</i> <i>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD</i> <i>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory</i> <i>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</i> <i>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</i> <i>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP</i> <i>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha</i> <i>Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka			77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32,10 %	4.258.337.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka	12.579.236.010,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	2300 Peserta Didik			360 Peserta Didik	104.683.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	550 Peserta Didik	136.419.800,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	219 Satuan Pendidikan			57 Satuan Pendidikan	19.451.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	219 Satuan Pendidikan	21.384.550,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	20 Dokumen			1 Dokumen	23.073.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	5 Dokumen	0,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>	28 Dokumen			2 Dokumen	18.269.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	7 Dokumen	23.124.200,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				57 Komunitas	19.431.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK		22.848.100,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i>				1 Kegiatan	9.430.800,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK		11.459.360,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik															
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			2 Satuan Pendidikan	4.064.000.000,00	Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Siswa SMK	219 Satuan Pendidikan	12.364.000.000,00	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN	
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA							3.911.800.000,00							4.332.680.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.911.800.000,00							4.332.680.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						3.911.800.000,00							4.332.680.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,71 Nilai			86,71 Nilai	937.200.000,00						86,71 Nilai	1.030.920.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.925 siswa			5.775 siswa	937.200.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 6 Yogyakarta, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	1.030.920.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	937.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN DARI BLUD, PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 6 Yogyakarta, siswa dan masyarakat		1.030.920.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 77.62 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 46.86 %</p> <p>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 41.50 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 58.65 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman 47.01 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo 81,5 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul 50 Orang</p> <p>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar 86.25 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta 65 %</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 77.52 %</p> <p>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK 100 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB 49.49 %</p>	<p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p>			<p>0,19 %</p> <p>100 %</p> <p>40 Orang</p> <p>41.47 %</p> <p>46.83 %</p> <p>46.98 %</p> <p>49.46 %</p> <p>55 %</p> <p>58.62 %</p> <p>77.52 %</p> <p>80.5 %</p> <p>86.15 %</p>	2.974.600.000,00						<p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p>	3.301.760.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklm Inklusivitas SMK Iklm keamanan SMK Iklm kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka			77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32,10 %	2.974.600.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 6 Yogyakarta	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka	3.301.760.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA		
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	2.974.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 6 Yogyakarta	219 Satuan Pendidikan	3.301.760.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA		
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI						2.614.765.000,00									2.876.241.500,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															2.876.241.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2.614.765.000,00							2.876.241.500,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,71 Nilai			86,71 Nilai	244.765.000,00						86,71 Nilai	269.241.500,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.925 siswa			5.775 siswa	244.765.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 3 Wonosari, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	269.241.500,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	244.765.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	PENDAPATAN DARI BLUD, PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 3 Wonosari, siswa dan masyarakat		269.241.500,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 77.62 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 46.86 %</p> <p>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 41.50 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 58.65 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman 47.01 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo 81,5 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul 50 Orang</p> <p>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar 86.25 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta 65 %</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 77.52 %</p> <p>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK 80.5 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB 86.15 %</p>	<p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p> <p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p>			0,19 %	2.370.000.000,00							2.607.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklm Inklusivitas SMK Iklm keamanan SMK Iklm kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka			77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32,10 %	2.370.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 3 Wonosari	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka	2.607.000.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	2.370.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 3 Wonosari	219 Satuan Pendidikan	2.607.000.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON						5.124.250.000,00							5.695.855.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.124.250.000,00							5.695.855.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						5.124.250.000,00							5.695.855.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,71 Nilai			86,71 Nilai	590.250.000,00						86,71 Nilai	680.955.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.925 siswa			5.775 siswa	590.250.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Sewon, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	680.955.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	590.250.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Sewon, siswa dan masyarakat		680.955.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 46.86 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 41.50 %</p> <p>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 58.65 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 47.01 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman 81,5 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo 50 Orang</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul 86.25 %</p> <p>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar 65 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta 77.52 %</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 80.5 %</p> <p>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK 86.15 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB</p>	<p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p>			<p>0,19 %</p> <p>100 %</p> <p>40 Orang</p> <p>41.47 %</p> <p>46.83 %</p> <p>46.98 %</p> <p>49.46 %</p> <p>55 %</p> <p>58.62 %</p> <p>77.52 %</p> <p>80.5 %</p> <p>86.15 %</p>	4.534.000.000,00						<p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p>	5.014.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklm Inklusivitas SMK Iklm keamanan SMK Iklm kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka			77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32,10 %	4.534.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Sewon	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka	5.014.900.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	4.534.000.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Sewon	219 Satuan Pendidikan	5.014.900.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA							2.845.649.263,00						3.130.214.189,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.845.649.263,00							3.130.214.189,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2.845.649.263,00							3.130.214.189,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,71 Nilai			86,71 Nilai	93.649.263,00						86,71 Nilai	103.014.189,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.925 siswa			5.775 siswa	93.649.263,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 5 Yogyakarta, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	103.014.189,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	93.649.263,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN DARI BLUD, PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 5 Yogyakarta, siswa dan masyarakat		103.014.189,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p><i>Angka Putus Sekolah SMA/SMK</i></p> <p><i>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat</i></p> <p><i>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik</i></p> <p><i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul</i></p> <p><i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman</i></p> <p><i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo</i></p> <p><i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul</i></p> <p><i>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar</i></p> <p><i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta</i></p> <p><i>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat</i></p> <p><i>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK</i></p> <p><i>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB</i></p>	<p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p> <p></p>			<p>0,19 %</p> <p>100 %</p> <p>40 Orang</p> <p>41.47 %</p> <p>46.83 %</p> <p>46.98 %</p> <p>49.46 %</p> <p>55 %</p> <p>58.62 %</p> <p>77.52 %</p> <p>80.5 %</p> <p>86.15 %</p>	2.752.000.000,00						<p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p>	3.027.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklm Inklusivitas SMK Iklm keamanan SMK Iklm kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka			77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32,10 %	2.752.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 5 Yogyakarta	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka	3.027.200.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	2.752.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 5 Yogyakarta	219 Satuan Pendidikan	3.027.200.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH						3.981.775.000,00							4.379.952.500,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.981.775.000,00							4.379.952.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						3.981.775.000,00							4.379.952.500,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,71 Nilai			86,71 Nilai	117.175.000,00						86,71 Nilai	128.892.500,00		
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.925 siswa			5.775 siswa	117.175.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 2 Pengasih, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	128.892.500,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	117.175.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 2 Pengasih, siswa dan masyarakat		128.892.500,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH	
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	77.62 % 46.86 % 41.50 % 58.65 % 47.01 % 81,5 % 50 Orang 86.25 % 65 % 0,16 % 100 % 49.49 %			46.83 % 46.98 % 49.46 %	3.864.600.000,00							77.62 % 46.86 % 41.50 % 58.65 % 47.01 % 81,5 % 50 Orang 86.25 % 65 % 0,16 % 100 % 49.49 %	4.251.060.000,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak,	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36.10 % 93,32 Angka 7 sekolah			77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 23 paket 22 medali 19 paket 300 paket 37316 peserta didik	3.864.600.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi,	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Pengasih	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36.10 % 93,32 Angka 7 sekolah	4.251.060.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<p>perunggu) Jumlah Mebel sekolah yang tersedia Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</p>	77,95 Angka 55,31 Angka			<p>1 Ruang 1 Ruang 5 Ruang 11 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 12 Ruang 2 Ruang 1 Ruang 12 unit 2 unit 219 satuan pendidikan 219 satuan pendidikan 975 peserta didik 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32.10 %</p>						77,95 Angka 55,31 Angka			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	3.864.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Pengasih	219 Satuan Pendidikan	4.251.060.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI						3.315.284.000,00							3.837.262.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.315.284.000,00							3.837.262.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						3.315.284.000,00							3.837.262.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	86,71 Nilai			86,71 Nilai	127.284.000,00						86,71 Nilai	330.462.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian</i>	5.925 siswa			5.775 siswa	127.284.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 2 Wonosari, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	330.462.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	127.284.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 2 Wonosari, siswa dan masyarakat		330.462.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB											
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)												
											NASIONAL					DAERAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 77.62 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 46.86 %</p> <p>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 41.50 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 58.65 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman 47.01 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo 81,5 %</p> <p>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar 50 Orang</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta 49.49 %</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 %</p> <p>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK 65 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB 77.52 %</p>	<p>0,19 %</p> <p>100 %</p> <p>40 Orang</p> <p>41.47 %</p> <p>46.83 %</p> <p>46.98 %</p> <p>49.46 %</p> <p>55 %</p> <p>58.62 %</p> <p>77.52 %</p> <p>80.5 %</p> <p>86.15 %</p>	3.188.000.000,00									77.62 %	46.86 %	41.50 %	58.65 %	47.01 %	81,5 %	50 Orang	86.25 %	65 %	0,16 %	100 %	49.49 %	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklm Inklusivitas SMK Iklm keamanan SMK Iklm kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka			77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32,10 %	3.188.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Wonosari	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka	3.506.800.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	3.188.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Wonosari	219 Satuan Pendidikan	3.506.800.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK						5.318.500.000,00							5.891.946.500,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.318.500.000,00							5.891.946.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						5.318.500.000,00							5.891.946.500,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,71 Nilai			86,71 Nilai	104.500.000,00						86,71 Nilai	156.546.500,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.925 siswa			5.775 siswa	104.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 2 Depok, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	156.546.500,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	104.500.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 2 Depok, siswa dan masyarakat		156.546.500,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 77.62 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 46.86 %</p> <p>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 41.50 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 58.65 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman 47.01 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo 81,5 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul 50 Orang</p> <p>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar 86.25 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta 65 %</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 77.52 %</p> <p>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK 100 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB 49.49 %</p>	<p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p>			<p>0,19 %</p> <p>100 %</p> <p>40 Orang</p> <p>41.47 %</p> <p>46.83 %</p> <p>46.98 %</p> <p>49.46 %</p> <p>55 %</p> <p>58.62 %</p> <p>77.52 %</p> <p>80.5 %</p> <p>86.15 %</p>	5.214.000.000,00						<p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p>	5.735.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklm Inklusivitas SMK Iklm keamanan SMK Iklm kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka			77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32,10 %	5.214.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Depok	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka	5.735.400.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik															
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	5.214.000.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Depok	219 Satuan Pendidikan	5.735.400.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK	
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI						2.362.659.000,00								2.598.924.900,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.362.659.000,00							2.598.924.900,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2.362.659.000,00							2.598.924.900,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,71 Nilai			86,71 Nilai	48.059.000,00						86,71 Nilai	52.864.900,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.925 siswa			5.775 siswa	48.059.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Saptosari, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	52.864.900,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	48.059.000,00	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Kepek	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Saptosari, siswa dan masyarakat		52.864.900,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 77.62 % 46.86 % Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 41.50 % 58.65 % 81,5 % Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 47.01 % 50 Orang 46.83 % keahlian teknik 86.25 % Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 65 % 55 % 81,5 % Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman 0,16 % 65 % 86.25 % Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo 100 % 65 % Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul 86.15 % Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar 100 % 65 % Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta 86.15 % Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 81,5 % Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK 100 % Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB 49.49 %</p>	77.62 % 46.86 % 41.50 % 58.65 % 47.01 % 81,5 % 50 Orang 46.83 % 86.25 % 65 % 0,16 % 65 % 86.25 % 65 % 100 % 65 % 86.15 %			0,19 % 100 % 40 Orang 41.47 % 46.83 % 46.98 % 49.46 % 55 % 58.62 % 77.52 % 80.5 % 86.15 %	2.314.600.000,00						77.62 % 46.86 % 41.50 % 58.65 % 47.01 % 81,5 % 50 Orang 46.83 % 86.25 % 65 % 0,16 % 65 % 100 % 49.49 %	2.546.060.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklm Inklusivitas SMK Iklm keamanan SMK Iklm kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka			77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32,10 %	2.314.600.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Saptosari	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka	2.546.060.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	2.314.600.000,00	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Kepek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Saptosari	219 Satuan Pendidikan	2.546.060.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA						5.031.289.000,00							5.534.417.900,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.031.289.000,00							5.534.417.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						5.031.289.000,00							5.534.417.900,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,71 Nilai			86,71 Nilai	109.289.000,00						86,71 Nilai	120.217.900,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.925 siswa			5.775 siswa	109.289.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 2 Yogyakarta, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	120.217.900,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	109.289.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 2 Yogyakarta, siswa dan masyarakat		120.217.900,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 77.62 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 46.86 %</p> <p>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 41.50 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 58.65 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman 47.01 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo 81,5 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul 50 Orang</p> <p>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar 86.25 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta 65 %</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 77.52 %</p> <p>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK 100 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB 49.49 %</p>	<p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p>			<p>0,19 %</p> <p>100 %</p> <p>40 Orang</p> <p>41.47 %</p> <p>46.83 %</p> <p>46.98 %</p> <p>49.46 %</p> <p>55 %</p> <p>58.62 %</p> <p>77.52 %</p> <p>80.5 %</p> <p>86.15 %</p>	4.922.000.000,00						<p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p>	5.414.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklm Inklusivitas SMK Iklm keamanan SMK Iklm kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka			77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32,10 %	4.922.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Yogyakarta	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka	5.414.200.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA		
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	4.922.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Yogyakarta	219 Satuan Pendidikan	5.414.200.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA		
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN							2.473.799.000,00								2.831.178.900,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.473.799.000,00							2.831.178.900,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2.473.799.000,00							2.831.178.900,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,71 Nilai			86,71 Nilai	59.799.000,00						86,71 Nilai	65.778.900,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.925 siswa			5.775 siswa	59.799.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Kalasan, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	65.778.900,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	59.799.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tamanmartani	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Kalasan, siswa dan masyarakat		65.778.900,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 77.62 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 46.86 %</p> <p>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 41.50 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 58.65 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman 47.01 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo 81,5 %</p> <p>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar 50 Orang</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta 49.49 %</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 86.25 %</p> <p>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK 65 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB 100 %</p>	<p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p>			<p>0,19 %</p> <p>100 %</p> <p>40 Orang</p> <p>41.47 %</p> <p>46.83 %</p> <p>46.98 %</p> <p>49.46 %</p> <p>55 %</p> <p>58.62 %</p> <p>77.52 %</p> <p>80.5 %</p> <p>86.15 %</p>	2.414.000.000,00						<p>77.62 %</p> <p>46.86 %</p> <p>41.50 %</p> <p>58.65 %</p> <p>47.01 %</p> <p>81,5 %</p> <p>50 Orang</p> <p>86.25 %</p> <p>65 %</p> <p>0,16 %</p> <p>100 %</p> <p>49.49 %</p>	2.765.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklm Inklusivitas SMK Iklm keamanan SMK Iklm kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka			77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32,10 %	2.414.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Kalasan	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka	2.765.400.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	2.414.000.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tamanmartani	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Kalasan	219 Satuan Pendidikan	2.765.400.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN							2.222.722.000,00						2.444.994.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.222.722.000,00							2.444.994.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2.222.722.000,00							2.444.994.200,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,71 Nilai			86,71 Nilai	138.722.000,00						86,71 Nilai	152.594.200,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.925 siswa			5.775 siswa	138.722.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Cangkringan, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	152.594.200,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	138.722.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Wukirsari	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Cangkringan, siswa dan masyarakat		152.594.200,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 77.62 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 46.86 %</p> <p>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 41.50 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 58.65 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman 47.01 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo 46.83 %</p> <p>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar 46.98 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta 49.46 %</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 55 %</p> <p>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK 58.62 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB 77.52 %</p>	<p>100 %</p> <p>40 Orang</p> <p>41.47 %</p> <p>46.83 %</p> <p>46.98 %</p> <p>49.46 %</p> <p>55 %</p> <p>58.62 %</p> <p>77.52 %</p> <p>80.5 %</p> <p>86.15 %</p>	2.084.000.000,00									77.62 %	2.292.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklm Inklusivitas SMK Iklm keamanan SMK Iklm kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka			77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32,10 %	2.084.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Cangkringan	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka	2.292.400.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	2.084.000.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Wukirsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Cangkringan	219 Satuan Pendidikan	2.292.400.000,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA							4.055.835.000,00						0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.055.835.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						4.055.835.000,00							0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,71 Nilai			86,71 Nilai	169.835.000,00						86,71 Nilai	0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.925 siswa			5.775 siswa	169.835.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 4 Yogyakarta, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	169.835.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 4 Yogyakarta, siswa dan masyarakat		0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB												
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)													
											NASIONAL					DAERAH											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 77.62 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 46.86 %</p> <p>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 41.50 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 58.65 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman 47.01 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo 46.98 %</p> <p>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar 49.46 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta 55 %</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 58.62 %</p> <p>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK 77.52 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB 80.5 %</p>	<p>100 %</p> <p>40 Orang</p> <p>41.47 %</p> <p>46.83 %</p> <p>46.98 %</p> <p>49.46 %</p> <p>55 %</p> <p>58.62 %</p> <p>77.52 %</p> <p>80.5 %</p> <p>86.15 %</p>	3.886.000.000,00									77.62 %	46.86 %	41.50 %	58.65 %	47.01 %	81,5 %	50 Orang	86.25 %	65 %	0,16 %	100 %	49.49 %		
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<p>Iklim Inklusivitas SMK 62 %</p> <p>Iklim keamanan SMK 46 sekolah</p> <p>Iklim kebinekaan SMK 25,36 %</p> <p>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia 66,35 Angka</p> <p>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) 81,88 Angka</p> <p>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia 24 medali</p> <p>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia 36.10 %</p> <p>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 93,32 Angka</p> <p>Jumlah Ruang Guru/Kepala 7 sekolah</p>	<p>77,65 Angka</p> <p>81,58 Angka</p> <p>93,02 Angka</p> <p>23 paket</p> <p>22 medali</p> <p>19 paket</p> <p>300 paket</p> <p>37316 peserta didik</p> <p>1 Ruang</p> <p>1 Ruang</p> <p>5 Ruang</p> <p>11 Ruang</p> <p>1 Ruang</p> <p>1 Ruang</p> <p>12 Ruang</p> <p>2 Ruang</p> <p>1 Ruang</p> <p>12 unit</p>	3.886.000.000,00					Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 4 Yogyakarta	62 %	46 sekolah	25,36 %	66,35 Angka	81,88 Angka	24 medali	36.10 %	93,32 Angka	7 sekolah	77,95 Angka	55,31 Angka			0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<p>Sekolah/TU yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</p> <p>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</p> <p>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian</p> <p>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</p> <p>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD</p> <p>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory</p> <p>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</p> <p>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</p> <p>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP</p> <p>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha</p> <p>Persentase SMK yang melaksanakan UKS</p>				<p>2 unit</p> <p>219 satuan pendidikan</p> <p>219 satuan pendidikan</p> <p>975 peserta didik</p> <p>6 sekolah</p> <p>41 sekolah</p> <p>66,05 Angka</p> <p>55,01 Angka</p> <p>25,32 %</p> <p>58 %</p> <p>32.10 %</p>				<p>Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</p>					
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	3.886.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 4 Yogyakarta	219 Satuan Pendidikan	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA								4.095.041.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.095.041.000,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						4.095.041.000,00							0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	86,71 Nilai			86,71 Nilai	65.041.000,00						86,71 Nilai	0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian</i>	5.925 siswa			5.775 siswa	65.041.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 3 Yogyakarta, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	65.041.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 3 Yogyakarta, siswa dan masyarakat		0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Angka Putus Sekolah SMA/SMK</i> <i>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat</i> <i>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik</i> <i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul</i> <i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman</i> <i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo</i> <i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul</i> <i>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar</i> <i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta</i> <i>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat</i> <i>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK</i> <i>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB</i>	77.62 % 46.86 % 41.50 % 58.65 % 47.01 % 81,5 % 50 Orang 86.25 % 65 % 0,16 % 100 % 49.49 %			0,19 % 100 % 40 Orang 41.47 % 46.83 % 46.98 % 49.46 % 55 % 58.62 % 77.52 % 80.5 % 86.15 %	4.030.000.000,00						77.62 % 46.86 % 41.50 % 58.65 % 47.01 % 81,5 % 50 Orang 86.25 % 65 % 0,16 % 100 % 49.49 %	0,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklim Inklusivitas SMK</i> <i>Iklim keamanan SMK</i>	62 % 46 sekolah			77,65 Angka 81,58 Angka	4.030.000.000,00			Memperkuat Pambang	Peningkatan kualitas	SMKN 3 Yogyakarta, siswa dan	62 % 46 sekolah	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<p><i>Klim kebinekaan SMK</i></p> <p><i>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia</i></p> <p><i>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)</i></p> <p><i>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia</i></p> <p><i>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia</i></p> <p><i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i></p> <p><i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi</i></p> <p><i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i></p> <p><i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi</i></p> <p><i>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun</i></p> <p><i>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi</i></p> <p><i>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun</i></p> <p><i>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun</i></p> <p><i>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi</i></p> <p><i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun</i></p> <p><i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun</i></p> <p><i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi</i></p> <p><i>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</i></p> <p><i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian</i></p> <p><i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i></p> <p><i>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD</i></p> <p><i>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory</i></p> <p><i>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</i></p> <p><i>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</i></p> <p><i>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat</i></p>	<p>25,36 %</p> <p>66,35 Angka</p> <p>81,88 Angka</p> <p>24 medali</p> <p>36.10 %</p> <p>93,32 Angka</p> <p>7 sekolah</p> <p>77,95 Angka</p> <p>55,31 Angka</p>		<p>93,02 Angka</p> <p>23 paket</p> <p>22 medali</p> <p>19 paket</p> <p>300 paket</p> <p>37316</p> <p>peserta didik</p> <p>1 Ruang</p> <p>1 Ruang</p> <p>5 Ruang</p> <p>11 Ruang</p> <p>1 Ruang</p> <p>1 Ruang</p> <p>12 Ruang</p> <p>2 Ruang</p> <p>1 Ruang</p> <p>12 unit</p> <p>2 unit</p> <p>219 satuan pendidikan</p> <p>219 satuan pendidikan</p> <p>975 peserta didik</p> <p>6 sekolah</p> <p>41 sekolah</p> <p>66,05 Angka</p> <p>55,01 Angka</p> <p>25,32 %</p> <p>58 %</p> <p>32.10 %</p>				<p>unan</p> <p>Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</p>	SDM	masyarakat	<p>25,36 %</p> <p>66,35 Angka</p> <p>81,88 Angka</p> <p>24 medali</p> <p>36.10 %</p> <p>93,32 Angka</p> <p>7 sekolah</p> <p>77,95 Angka</p> <p>55,31 Angka</p>		YOGYAKARTA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>													
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	4.030.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pemerempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	SMKN 3 Yogyakarta, siswa dan masyarakat	219 Satuan Pendidikan	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK						2.438.474.900,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.438.474.900,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2.438.474.900,00							0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	86,71 Nilai			86,71 Nilai	466.475.000,00						86,71 Nilai	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.925 siswa			5.775 siswa	466.475.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Pandak, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	466.475.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Pandak, siswa dan masyarakat		0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB											
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)												
											NASIONAL					DAERAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 77.62 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 46.86 %</p> <p>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 41.50 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 58.65 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman 47.01 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo 46.98 %</p> <p>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar 49.46 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta 55 %</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 58.62 %</p> <p>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Lulusan SMK 77.52 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB 80.5 %</p>	<p>100 %</p> <p>40 Orang</p> <p>41.47 %</p> <p>46.83 %</p> <p>46.98 %</p> <p>49.46 %</p> <p>55 %</p> <p>58.62 %</p> <p>77.52 %</p> <p>80.5 %</p> <p>86.15 %</p>	1.971.999.900,00									77.62 %	46.86 %	41.50 %	58.65 %	47.01 %	81,5 %	50 Orang	86.25 %	65 %	0,16 %	100 %	49.49 %	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<p>Iklim Inklusivitas SMK 62 %</p> <p>Iklim keamanan SMK 46 sekolah</p> <p>Iklim kebinekaan SMK 25,36 %</p> <p>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia 66,35 Angka</p> <p>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) 81,88 Angka</p> <p>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia 24 medali</p> <p>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia 36.10 %</p> <p>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 93,32 Angka</p> <p>Jumlah Ruang Guru/Kepala 7 sekolah</p>	<p>46 sekolah</p> <p>25,36 %</p> <p>66,35 Angka</p> <p>81,88 Angka</p> <p>24 medali</p> <p>36.10 %</p> <p>93,32 Angka</p> <p>7 sekolah</p> <p>77,95 Angka</p> <p>55,31 Angka</p>			77,65 Angka	1.971.999.900,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Pandak	62 %	46 sekolah	25,36 %	66,35 Angka	81,88 Angka	24 medali	36.10 %	93,32 Angka	7 sekolah	77,95 Angka	55,31 Angka	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<p>Sekolah/TU yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</p> <p>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</p> <p>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian</p> <p>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</p> <p>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD</p> <p>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory</p> <p>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</p> <p>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</p> <p>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP</p> <p>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha</p> <p>Persentase SMK yang melaksanakan UKS</p>				<p>2 unit</p> <p>219 satuan pendidikan</p> <p>219 satuan pendidikan</p> <p>975 peserta didik</p> <p>6 sekolah</p> <p>41 sekolah</p> <p>66,05 Angka</p> <p>55,01 Angka</p> <p>25,32 %</p> <p>58 %</p> <p>32.10 %</p>				<p>Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</p>					
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	1.971.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Pandak	219 Satuan Pendidikan	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG								1.753.385.000,00						0,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.753.385.000,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.753.385.000,00							0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	86,71 Nilai			86,71 Nilai	73.385.000,00						86,71 Nilai	0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian</i>	5.925 siswa			5.775 siswa	73.385.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Pundong, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	73.385.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Pundong, siswa dan masyarakat		0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB	77.62 % 46.86 % 41.50 % 58.65 % 47.01 % 81,5 % 50 Orang 86.25 % 65 % 0,16 % 100 % 49.49 %			0,19 % 100 % 40 Orang 41.47 % 46.83 % 46.98 % 49.46 % 55 % 58.62 % 77.52 % 80.5 % 86.15 %	1.680.000.000,00					77.62 % 46.86 % 41.50 % 58.65 % 47.01 % 81,5 % 50 Orang 86.25 % 65 % 0,16 % 100 % 49.49 %	0,00		
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK	62 % 46 sekolah			77,65 Angka 81,58 Angka	1.680.000.000,00			Memperkuat Pambang	Peningkatan kualitas	Siswa, Pendidik dan Tenaga	62 % 46 sekolah	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Iklim kebinekaan SMK Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah Mebel sekolah yang tersedia Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat	25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36.10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka		93,02 Angka 23 paket 22 medali 19 paket 300 paket 37316 peserta didik 1 Ruang 1 Ruang 5 Ruang 11 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 12 Ruang 2 Ruang 1 Ruang 12 unit 2 unit 219 satuan pendidikan 219 satuan pendidikan 975 peserta didik 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32.10 %				unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SDM	Kependidikan SMKN 1 Pundong	25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36.10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka		PUNDONG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>													
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	1.680.000.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Pundong	219 Satuan Pendidikan	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN						983.349.950,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						983.349.950,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						983.349.950,00							0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	86,71 Nilai			86,71 Nilai	75.350.000,00						86,71 Nilai	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.925 siswa			5.775 siswa	75.350.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 2 Kasihan, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	75.350.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 2 Kasihan, siswa dan masyarakat		0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB												
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)													
											NASIONAL					DAERAH											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 77.62 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 46.86 %</p> <p>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 41.50 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 58.65 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman 47.01 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo 46.98 %</p> <p>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar 49.46 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta 55 %</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 58.62 %</p> <p>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Lulusan SMK 77.52 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB 80.5 %</p>	<p>100 %</p> <p>40 Orang</p> <p>41.47 %</p> <p>46.83 %</p> <p>46.98 %</p> <p>49.46 %</p> <p>55 %</p> <p>58.62 %</p> <p>77.52 %</p> <p>80.5 %</p> <p>86.15 %</p>	907.999.950,00									77.62 %	46.86 %	41.50 %	58.65 %	47.01 %	81,5 %	50 Orang	86.25 %	65 %	0,16 %	100 %	49.49 %		
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<p>Iklim Inklusivitas SMK 62 %</p> <p>Iklim keamanan SMK 46 sekolah</p> <p>Iklim kebinekaan SMK 25,36 %</p> <p>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia 66,35 Angka</p> <p>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) 81,88 Angka</p> <p>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia 24 medali</p> <p>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia 36.10 %</p> <p>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya 93,32 Angka</p> <p>Personil Peserta Didik 7 sekolah</p> <p>Jumlah Ruang Guru/Kepala 77,95 Angka</p> <p>55,31 Angka</p>	<p>77,65 Angka</p> <p>81,58 Angka</p> <p>93,02 Angka</p> <p>23 paket</p> <p>22 medali</p> <p>19 paket</p> <p>300 paket</p> <p>37316 peserta didik</p> <p>1 Ruang</p> <p>1 Ruang</p> <p>5 Ruang</p> <p>11 Ruang</p> <p>1 Ruang</p> <p>1 Ruang</p> <p>12 Ruang</p> <p>2 Ruang</p> <p>1 Ruang</p> <p>12 unit</p>	907.999.950,00					Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Kasihan	62 %	46 sekolah	25,36 %	66,35 Angka	81,88 Angka	24 medali	36.10 %	93,32 Angka	7 sekolah	77,95 Angka	55,31 Angka			0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<p>Sekolah/TU yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</p> <p>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</p> <p>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian</p> <p>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</p> <p>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD</p> <p>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory</p> <p>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</p> <p>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</p> <p>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP</p> <p>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha</p> <p>Persentase SMK yang melaksanakan UKS</p>				<p>2 unit</p> <p>219 satuan pendidikan</p> <p>219 satuan pendidikan</p> <p>975 peserta didik</p> <p>6 sekolah</p> <p>41 sekolah</p> <p>66,05 Angka</p> <p>55,01 Angka</p> <p>25,32 %</p> <p>58 %</p> <p>32.10 %</p>				<p>Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</p>					
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	907.999.950,00	Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Kasihan	219 Satuan Pendidikan	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN								3.434.200.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.434.200.000,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						3.434.200.000,00							0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	86,71 Nilai			86,71 Nilai	116.200.000,00						86,71 Nilai	0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian</i>	5.925 siswa			5.775 siswa	116.200.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Seyegan, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	116.200.000,00	Kab. Sleman, Seyegan, Margomulyo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Seyegan, siswa dan masyarakat		0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB</i>	<i>77.62 % 46.86 % 41.50 % 58.65 % 47.01 % 81,5 % 50 Orang 86.25 % 65 % 0,16 % 100 % 49.49 %</i>			<i>0,19 % 100 % 40 Orang 41.47 % 46.83 % 46.98 % 49.46 % 55 % 58.62 % 77.52 % 80.5 % 86.15 %</i>	<i>3.318.000.000,00</i>					<i>77.62 % 46.86 % 41.50 % 58.65 % 47.01 % 81,5 % 50 Orang 86.25 % 65 % 0,16 % 100 % 49.49 %</i>	<i>0,00</i>		
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK</i>	<i>62 % 46 sekolah</i>			<i>77,65 Angka 81,58 Angka</i>	<i>3.318.000.000,00</i>			Memperkuat Pemandangan	Peningkatan kualitas	Siswa, Pendidik dan Tenaga	<i>62 % 46 sekolah</i>	<i>0,00</i>	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Iklim kebinekaan SMK Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah Mebel sekolah yang tersedia Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat	25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36.10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka		93,02 Angka 23 paket 22 medali 19 paket 300 paket 37316 peserta didik 1 Ruang 1 Ruang 5 Ruang 11 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 12 Ruang 2 Ruang 1 Ruang 12 unit 2 unit 219 satuan pendidikan 219 satuan pendidikan 975 peserta didik 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32.10 %				unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SDM	Kependidikan SMKN 1 Seyegan	25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36.10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka		SEYEGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>													
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	3.318.000.000,00	Kab. Sleman, Seyegan, Margomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Seyegan	219 Satuan Pendidikan	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN						1.816.460.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.816.460.000,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.816.460.000,00							0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	86,71 Nilai			86,71 Nilai	95.860.000,00						86,71 Nilai	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.925 siswa			5.775 siswa	95.860.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Nanggulan, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	95.860.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Nanggulan, siswa dan masyarakat		0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 77.62 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 46.86 %</p> <p>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 41.50 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 58.65 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman 47.01 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo 46.98 %</p> <p>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar 49.46 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta 55 %</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 58.62 %</p> <p>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Lulusan SMK 77.52 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB 80.5 %</p>	<p>100 %</p> <p>40 Orang</p> <p>41.47 %</p> <p>46.83 %</p> <p>46.98 %</p> <p>49.46 %</p> <p>55 %</p> <p>58.62 %</p> <p>77.52 %</p> <p>80.5 %</p> <p>86.15 %</p>	1.720.600.000,00									77.62 %	0,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<p>Iklim Inklusivitas SMK 62 %</p> <p>Iklim keamanan SMK 46 sekolah</p> <p>Iklim kebinekaan SMK 25,36 %</p> <p>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia 66,35 Angka</p> <p>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) 81,88 Angka</p> <p>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia 24 medali</p> <p>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia 36.10 %</p> <p>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 93,32 Angka</p> <p>Jumlah Ruang Guru/Kepala 7 sekolah</p> <p>Jumlah Ruang Guru/Kepala 77,95 Angka</p> <p>Jumlah Ruang Guru/Kepala 55,31 Angka</p>	<p>77,65 Angka</p> <p>81,58 Angka</p> <p>93,02 Angka</p> <p>23 paket</p> <p>22 medali</p> <p>19 paket</p> <p>300 paket</p> <p>37316 peserta didik</p> <p>1 Ruang</p> <p>1 Ruang</p> <p>5 Ruang</p> <p>11 Ruang</p> <p>1 Ruang</p> <p>1 Ruang</p> <p>12 Ruang</p> <p>2 Ruang</p> <p>1 Ruang</p> <p>12 unit</p>	1.720.600.000,00					Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Nanggulan	62 %	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<p>Sekolah/TU yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</p> <p>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</p> <p>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian</p> <p>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</p> <p>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD</p> <p>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory</p> <p>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</p> <p>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</p> <p>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP</p> <p>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha</p> <p>Persentase SMK yang melaksanakan UKS</p>				<p>2 unit</p> <p>219 satuan pendidikan</p> <p>219 satuan pendidikan</p> <p>975 peserta didik</p> <p>6 sekolah</p> <p>41 sekolah</p> <p>66,05 Angka</p> <p>55,01 Angka</p> <p>25,32 %</p> <p>58 %</p> <p>32.10 %</p>				<p>Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</p>					
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	1.720.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Nanggulan	219 Satuan Pendidikan	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI								947.190.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						947.190.000,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						947.190.000,00							0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	86,71 Nilai			86,71 Nilai	16.590.000,00						86,71 Nilai	0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian</i>	5.925 siswa			5.775 siswa	16.590.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Gedangsari, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	16.590.000,00	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Gedangsari, siswa dan masyarakat		0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Angka Putus Sekolah SMA/SMK</i> <i>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat</i> <i>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik</i> <i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul</i> <i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman</i> <i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo</i> <i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul</i> <i>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar</i> <i>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta</i> <i>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat</i> <i>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK</i> <i>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB</i>	77.62 % 46.86 % 41.50 % 58.65 % 47.01 % 81,5 % 50 Orang 86.25 % 65 % 0,16 % 100 % 49.49 %			0,19 % 100 % 40 Orang 41.47 % 46.83 % 46.98 % 49.46 % 55 % 58.62 % 77.52 % 80.5 % 86.15 %	930.600.000,00						77.62 % 46.86 % 41.50 % 58.65 % 47.01 % 81,5 % 50 Orang 86.25 % 65 % 0,16 % 100 % 49.49 %	0,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklim Inklusivitas SMK</i> <i>Iklim keamanan SMK</i>	62 % 46 sekolah			77,65 Angka 81,58 Angka	930.600.000,00			Memperkuat Pambang	Peningkatan kualitas	Siswa, Pendidik dan Tenaga	62 % 46 sekolah	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Iklim kebinekaan SMK Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah Mebel sekolah yang tersedia Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat	25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36.10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka		93,02 Angka 23 paket 22 medali 19 paket 300 paket 37316 peserta didik 1 Ruang 1 Ruang 5 Ruang 11 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 12 Ruang 2 Ruang 1 Ruang 12 unit 2 unit 219 satuan pendidikan 219 satuan pendidikan 975 peserta didik 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32.10 %				unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SDM	Kependidikan SMKN 1 Gedangsari	25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36.10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka		GEDANGSARI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>													
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	930.600.000,00	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Gedangsari	219 Satuan Pendidikan	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN						1.895.064.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.895.064.000,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.895.064.000,00							0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	86,71 Nilai			86,71 Nilai	175.064.000,00						86,71 Nilai	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.925 siswa			5.775 siswa	175.064.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 2 Godean, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	175.064.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoagung Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 2 Godean, siswa dan masyarakat		0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 77.62 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 46.86 %</p> <p>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 41.50 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 58.65 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman 47.01 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo 46.98 %</p> <p>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar 49.46 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta 55 %</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 58.62 %</p> <p>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK 77.52 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB 80.5 %</p>	<p>100 %</p> <p>40 Orang</p> <p>41.47 %</p> <p>46.83 %</p> <p>46.98 %</p> <p>49.46 %</p> <p>55 %</p> <p>58.62 %</p> <p>77.52 %</p> <p>80.5 %</p> <p>86.15 %</p>	1.720.000.000,00									77.62 %	0,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<p>Iklim Inklusivitas SMK 62 %</p> <p>Iklim keamanan SMK 46 sekolah</p> <p>Iklim kebinekaan SMK 25,36 %</p> <p>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia 66,35 Angka</p> <p>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) 81,88 Angka</p> <p>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia 24 medali</p> <p>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia 36.10 %</p> <p>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 93,32 Angka</p> <p>Jumlah Ruang Guru/Kepala 7 sekolah</p>	<p>77,65 Angka</p> <p>81,58 Angka</p> <p>93,02 Angka</p> <p>23 paket</p> <p>22 medali</p> <p>19 paket</p> <p>300 paket</p> <p>37316 peserta didik</p> <p>1 Ruang</p> <p>1 Ruang</p> <p>5 Ruang</p> <p>11 Ruang</p> <p>1 Ruang</p> <p>1 Ruang</p> <p>12 Ruang</p> <p>2 Ruang</p> <p>1 Ruang</p> <p>12 unit</p>	1.720.000.000,00					Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Godean	62 %	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<p>Sekolah/TU yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</p> <p>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi</p> <p>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</p> <p>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian</p> <p>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</p> <p>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD</p> <p>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory</p> <p>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</p> <p>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</p> <p>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP</p> <p>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha</p> <p>Persentase SMK yang melaksanakan UKS</p>				<p>2 unit</p> <p>219 satuan pendidikan</p> <p>219 satuan pendidikan</p> <p>975 peserta didik</p> <p>6 sekolah</p> <p>41 sekolah</p> <p>66,05 Angka</p> <p>55,01 Angka</p> <p>25,32 %</p> <p>58 %</p> <p>32.10 %</p>				<p>Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</p>					
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	1.720.000.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoagung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Godean	219 Satuan Pendidikan	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI								2.838.039.250,00						0,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.838.039.250,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2.838.039.250,00							0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	86,71 Nilai			86,71 Nilai	44.039.250,00						86,71 Nilai	0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian</i>	5.925 siswa			5.775 siswa	44.039.250,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Wonosari, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	44.039.250,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyaludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Wonosari, siswa dan masyarakat		0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB	77.62 % 46.86 % 41.50 % 58.65 % 47.01 % 81,5 % 50 Orang 86.25 % 65 % 0,16 % 100 % 49.49 %			0,19 % 100 % 40 Orang 41.47 % 46.83 % 46.98 % 49.46 % 55 % 58.62 % 77.52 % 80.5 % 86.15 %	2.794.000.000,00					77.62 % 46.86 % 41.50 % 58.65 % 47.01 % 81,5 % 50 Orang 86.25 % 65 % 0,16 % 100 % 49.49 %	0,00		
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK	62 % 46 sekolah			77,65 Angka 81,58 Angka	2.794.000.000,00			Memperkuat Pembang	Peningkatan kualitas	Siswa, Pendidik dan Tenaga	62 % 46 sekolah	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Iklim kebinekaan SMK Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah Mebel sekolah yang tersedia Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat	25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36.10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka		93,02 Angka 23 paket 22 medali 19 paket 300 paket 37316 peserta didik 1 Ruang 1 Ruang 5 Ruang 11 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 12 Ruang 2 Ruang 1 Ruang 12 unit 2 unit 219 satuan pendidikan 219 satuan pendidikan 975 peserta didik 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32.10 %				unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	SDM	Kependidikan SMKN 1 Wonosari	25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36.10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka		WONOSARI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>													
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	2.794.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Wonosari	219 Satuan Pendidikan	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN						2.239.710.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.239.710.000,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2.239.710.000,00							0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	86,71 Nilai			86,71 Nilai	101.710.000,00						86,71 Nilai	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.925 siswa			5.775 siswa	101.710.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Godean, siswa dan masyarakat	5.925 siswa	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	101.710.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoagung	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	SMKN 1 Godean, siswa dan masyarakat		0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<p>Angka Putus Sekolah SMA/SMK 77.62 % 46.86 %</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 41.50 % 58.65 % 47.01 % 81,5 %</p> <p>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik 50 Orang 86.25 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul 65 % 0,16 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman 100 % 49.49 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo 65 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul 100 %</p> <p>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar 49.49 %</p> <p>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta 65 %</p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat 77,65 % 81,58 % 93,02 % 23 paket 22 medali 19 paket 300 paket 1 Ruang 37316 peserta didik 1 Ruang 5 Ruang 11 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 12 Ruang 2 Ruang 1 Ruang 12 unit</p> <p>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB 62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka</p>	77.62 % 46.86 % 41.50 % 58.65 % 47.01 % 81,5 % 50 Orang 86.25 % 65 % 0,16 % 100 % 49.49 % 65 % 0,16 % 100 % 49.49 %			0,19 % 100 % 40 Orang 41.47 % 46.83 % 46.98 % 49.46 % 55 % 58.62 % 77.52 % 80.5 % 86.15 %	2.138.000.000,00							77.62 % 46.86 % 41.50 % 58.65 % 47.01 % 81,5 % 50 Orang 86.25 % 65 % 0,16 % 100 % 49.49 %	0,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<p>Iklim Inklusivitas SMK 62 % Iklim keamanan SMK 46 sekolah Iklim kebinekaan SMK 25,36 % Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka Jumlah Mebel sekolah yang tersedia 55,31 Angka Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia 11 Ruang Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 1 Ruang Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya 12 Ruang 2 Ruang 1 Ruang 12 unit</p>	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka			77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 23 paket 22 medali 19 paket 300 paket 1 Ruang 37316 peserta didik 1 Ruang 5 Ruang 11 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 12 Ruang 2 Ruang 1 Ruang 12 unit	2.138.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Godean	62 % 46 sekolah 25,36 % 66,35 Angka 81,88 Angka 24 medali 36,10 % 93,32 Angka 7 sekolah 77,95 Angka 55,31 Angka	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<p>Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun</p> <p>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</p>				<p>2 unit 219 satuan pendidikan 219 satuan pendidikan 975 peserta didik 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32.10 %</p>				<p>Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</p>					
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	219 Satuan Pendidikan			1 Satuan Pendidikan	2.138.000.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoagung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Godean	219 Satuan Pendidikan	0,00	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN
J U M L A H								1.666.985.382.176,00							1.876.929.751.192,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						41.633.572.131,00							38.288.713.623,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						41.169.122.131,00							37.777.818.623,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						41.169.122.131,00							37.777.818.623,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	38.067.429.060,00						-	33.398.323.623,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	19.093.550,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-	100 %	44.103.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	16.093.550,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		40.803.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		1.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		1.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	34.534.505.960,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-	100 %	29.841.724.623,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				224 Orang/ Bulan	34.515.573.360,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		29.771.690.623,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	11.305.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		61.644.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1.887.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		2.076.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					25 Laporan	5.740.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		6.314.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	18.720.000,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-	100 %	20.592.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	14.720.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		16.192.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	30 Orang			-	2.838.000,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-	30 Orang	3.168.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				87 Orang	2.838.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.168.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	430.960.550,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	480.788.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	6.050.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.655.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	40.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		44.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	18.314.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		20.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	150.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	18.749.550,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		20.625.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.556.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	194.991.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		214.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	300.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.168.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	642.830.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	100.364.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	50.070.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		69.564.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	575.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	17.760.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		30.800.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	2.076.982.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	2.327.114.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	10 Laporan			1 Laporan	1.990.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	2 Laporan	3.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	10 Laporan			5 Laporan	828.112.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	2 Laporan	910.924.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	15 Laporan			3 Laporan	1.246.880.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	3 Laporan	1.413.110.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	341.498.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	580.470.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	30.143.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		38.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya</i>				47 Unit	178.327.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		330.330.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				86 Unit	76.693.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		151.140.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	56.335.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		60.500.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)</i> <i>Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi malaria</i> <i>Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara</i> <i>Presentase remaja putri anemia</i> <i>Persentase skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas</i> <i>Persentase fasyankes terakreditasi</i> <i>Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)</i> <i>Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar</i> <i>Persentase penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur</i> <i>Persentase keberhasilan pengobatan TBC</i>	19,3 % 65 % 93.1 % 100 % 80 % 18 Angka 50 Angka 6,1 % 75 % 80 % 88 % 100 % 67,41 %			63 % 100 % 16 % 20.8 % 35 % 57.04 % 6.3 % 73 % 78 % 86 %	2.824.736.971,00						19,3 % 65 % n/a % 100 % 80 % 18 Angka 50 Angka 6,1 % 75 % 80 % 88 % 100 % 67,41 %	4.070.247.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan</i>	100 %			100 %	62.486.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	100 %	118.808.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan</i>				4 Dokumen	61.959.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY		117.158.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>	24 Paket			1 Paket	527.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	5 Paket	1.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan</i>	18 Angka 88.61 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 60 % 100 % 51 % 88 % 100 % 90 % 72 % 80 % 93,5 % 100 % 98 % 100 % 252 Angka 100 % 100 % 100 % 100 % 80 %			100 % 250 Angka 100 % 93 % 97,56 % 80 % 100 % 70 % 60 % 80 % 80 % 100 % 80 % 100 % 100 % 56 % 95 % 70 % 86 % 100 % 49 % 100 % 14 Angka 90 % 86.08 % 78 %	2.688.611.871,00			-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	18 Angka 88.61 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 60 % 100 % 51 % 88 % 100 % 90 % 72 % 80 % 93,5 % 100 % 98 % 100 % 252 Angka 100 % 100 % 100 % 100 % 80 %	3.865.506.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredensialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)</i>													
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			<i>Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar</i>	2280 Orang			876 Orang	513.513.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	438 Orang	675.832.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			<i>Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	28500 Orang			28315 Orang	389.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	28500 Orang	545.468.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak</i>	42 Dokumen			9 Dokumen	175.237.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	9 Dokumen	272.571.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif</i>	5 Dokumen			1 Dokumen	55.708.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	5 Dokumen	63.038.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	3 Dokumen			3 Dokumen	8.655.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	3 Dokumen	13.965.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8 Dokumen			3 Dokumen	22.176.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	8 Dokumen	45.321.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	38 Dokumen			1 Dokumen	28.552.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	9 Dokumen	35.609.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16 Dokumen			4 Dokumen	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	3 Dokumen	368.604.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	27 Dokumen			2 Dokumen	40.712.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	6 Dokumen	46.332.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	1.081.308.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY		1.338.525.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	13.161.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY		14.477.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	7.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY		20.956.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	46.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY		50.699.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				3 Dokumen	17.429.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY		60.465.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				3 Unit	257.142.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY		294.752.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				832000 Keluarga	4.416.771,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY		18.892.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan	100 %			100 %	6.500.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	100 %	7.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				3 Dokumen	6.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY		7.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan	100 %			100 %	67.139.100,00			-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	100 %	78.783.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				32 Unit	20.554.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY		27.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				310 Unit	46.584.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY		51.283.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<i>Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan</i>	100 % 67,18 % 90 %			59,54 % 88 %	211.797.600,00						n/a % 67,18 % 90 %	220.883.000,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	<i>Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>	88,51 %			87,86 %	22.613.100,00			-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	88,51 %	32.070.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				28328 Orang	16.973.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY		25.437.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi</i>				5 Orang	5.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY		6.633.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya</i>	99,74 % 90 %			99,57 % 88 %	189.184.500,00			-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	99,74 % 90 %	188.813.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>				60 Orang	13.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY		16.852.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				2 Dokumen	175.594.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY		171.961.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	<i>Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi</i>	100 % 97 % 90,2 %			86,1 % 92 %	17.192.500,00						n/a % 97 % 90,2 %	32.798.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan	100 %			100 %	13.471.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	100 %	28.677.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan				44 Sarana	13.471.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY		28.677.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan	100 %			100 %	3.721.500,00			-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	100 %	4.121.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional														
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				8 Sarana	3.721.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY		4.121.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %			100 %	47.966.000,00						100 %	55.567.000,00	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	100 %			100 %	47.966.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY	100 %	55.567.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				3 Dokumen	47.966.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Dinas Kesehatan DIY		55.567.000,00	DINAS KESEHATAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						464.450.000,00							510.895.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						464.450.000,00							510.895.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	464.450.000,00						-	510.895.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	-			-	464.450.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	-	510.895.000,00	DINAS KESEHATAN
	2.22.08.5.08.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional														
			<i>Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional</i>				1 Unit	464.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	-		510.895.000,00	DINAS KESEHATAN
		BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI						9.243.310.300,00							17.773.888.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.243.310.300,00							17.773.888.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						9.243.310.300,00							17.773.888.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	8.897.842.300,00						-	8.973.888.000,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	10.145.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	32.824.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				4 Dokumen	10.145.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		32.824.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	14.165.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	15.064.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	14.165.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		15.064.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	1.723.532.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	1.776.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	10 Laporan			3 Laporan	718.760.300,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	2 Laporan	723.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	15 Laporan			2 Laporan	1.004.772.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	3 Laporan	1.053.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	100 %			-	7.150.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	7.150.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	7.150.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		7.150.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	345.468.000,00						-	8.800.000.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	100 %			-	345.468.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	100 %	8.800.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan</i>	1480 Unit			3 Unit	42.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-	516 Unit	3.300.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara</i>				5 Unit	5.050.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		1.000.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>	24 Paket			1 Paket	298.418.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-	5 Paket	4.500.000.000,00	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
		BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL						51.031.414.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						51.031.414.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						51.031.414.000,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	89,21 Nilai			89,21 Nilai	1.045.505.000,00						89,21 Nilai	0,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100 %			100 %	7.470.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY	100 %	0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				4 Dokumen	7.470.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY		0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	11.660.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	11.660.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %			100 %	96.694.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY	100 %	0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.896.400,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY		0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	42.074.600,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY		0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.435.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY		0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.963.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY		0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	29.325.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY		0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %			100 %	61.700.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				8 Unit	61.700.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	710.516.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	10 Laporan			3 Laporan	116.240.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	2 Laporan	0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	15 Laporan			4 Laporan	594.276.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	3 Laporan	0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY</i>	100 %			100 %	157.465.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	61.404.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				47 Unit	43.520.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				4 Unit	12.047.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				22 Unit	40.494.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria</i> <i>Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara</i> <i>Presentase remaja putri anemia</i> <i>Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas</i> <i>Persentase fasyankes terakreditasi</i> <i>Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)</i> <i>Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)</i> <i>Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar</i> <i>Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur</i> <i>Persentase keberhasilan pengobatan TBC</i> <i>Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM</i>	19,3 % 65 % 93,1 % 100 % 80 % 18 Angka 50 Angka 6,1 % 75 % 80 % 88 % 100 % 67,41 %			100 % 16 Angka 20 % 35 Angka 57,04 % 6,3 % 63 % 73 % 78 % 86 % n/a %	49.985.909.000,00						19,3 % 65 % n/a % 100 % 80 % 18 Angka 50 Angka 6,1 % 75 % 80 % 88 % 100 % 67,41 %	0,00	
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM</i> <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan</i> <i>Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella</i> <i>Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)</i> <i>Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan</i>	18 Angka 88,61 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 60 % 100 % 51 % 88 % 100 % 90 % 72 % 80 % 93,5 %			250 Angka 100 % 93 % 97,56 % 80 % 100 % 70 % 60 % 80 % 80 % 100 % 80 % 100 % 100 % 56 % 95 % 70 %	49.985.909.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat D.I. Yogyakarta	18 Angka 88,61 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 60 % 100 % 51 % 88 % 100 % 90 % 72 % 80 % 93,5 %	0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredensialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)	100 % 98 % 100 % 252 Angka 100 % 100 % 100 % 100 % 80 %		86 % 100 % 49 % 100 % 14 Angka 90 % 86.08 % 78 %							100 % 98 % 100 % 252 Angka 100 % 100 % 100 % 80 %			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				6 Dokumen	49.985.909.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat D.I. Yogyakarta		0,00	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
		BALAI PELATIHAN KESEHATAN						5.698.986.300,00							6.616.475.543,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.698.986.300,00							6.616.475.543,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.698.986.300,00							6.616.475.543,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	5.489.786.300,00						-	6.158.898.543,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	10.450.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	24.600.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				4 Dokumen	10.450.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		24.600.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	11.770.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	10.320.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	11.770.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.320.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	1.421.326.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	1.731.678.543,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	10 Laporan			1 Laporan	211.486.500,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	2 Laporan	437.092.414,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	15 Laporan			1 Laporan	1.209.840.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	3 Laporan	1.294.586.129,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	100 %			-	4.046.239.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	4.392.300.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	4.046.239.800,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.392.300.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
2.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	209.200.000,00						-	457.577.000,00	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	99.74 % 90 %			-	209.200.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	99.74 % 90 %	457.577.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat</i>				1414 Orang	209.200.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas SDM	-		457.577.000,00	BALAI PELATIHAN KESEHATAN
		J U M L A H							107.607.282.731,00						62.679.077.166,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA						86.948.318.052,00							94.075.753.831,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						86.948.318.052,00							94.075.753.831,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						67.864.509.052,00							74.382.023.831,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	67.822.929.052,00						-	71.382.023.831,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	47.208.329.052,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-	100 %	50.278.123.831,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				353 Orang/ Bulan	47.208.329.052,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		50.278.123.831,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	100 %			-	20.614.600.000,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-	100 %	21.103.900.000,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	20.614.600.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		21.103.900.000,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	41.580.000,00						-	3.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	18 Angka 88,61 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 60 % 100 % 51 % 88 % 100 % 90 % 72 % 80 % 93,5 % 100 % 98 % 100 % 252 Angka 100 % 100 % 100 % 80 %			-	41.580.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	18 Angka 88,61 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 60 % 100 % 51 % 88 % 100 % 90 % 72 % 80 % 93,5 % 100 % 98 % 100 % 252 Angka 100 % 100 % 100 % 80 %	3.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	41.580.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		3.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						19.083.809.000,00							19.693.730.000,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-	-			-	19.083.809.000,00						-	19.693.730.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-			-	16.339.123.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	-	18.635.830.000,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis				2 Dokumen	16.339.123.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	-		18.635.830.000,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.03.13.5.04	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	-	-			-	2.744.686.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	-	1.057.900.000,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.03.13.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang</i>				1 Dokumen	2.744.686.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkata n kualitas SDM	-		1.057.900.000,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
J U M L A H								86.948.318.052,00							94.075.753.831,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RUMAH SAKIT PARU RESPIRA PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		RUMAH SAKIT PARU RESPIRA						44.367.959.921,00							0,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						44.367.959.921,00							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						44.367.959.921,00							0,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	39.508.615.921,00						-	0,00		
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	23.556.390.921,00						100 %	0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>					178 Orang/ Bulan	23.536.505.921,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>					0 Dokumen	19.885.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	22.825.000,00						100 %	0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA	
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>					0 Laporan	22.825.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	100 %			-	15.929.400.000,00						100 %	0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>					1 Unit Kerja	15.929.400.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	4.859.344.000,00						-	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	100 %			-	4.859.344.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	100 %	0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1480 Unit			1 Unit	3.680.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-	516 Unit	0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				0 Unit	4.855.514.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas SDM	-		0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	24 Paket			1 Paket	150.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-	5 Paket	0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
			J U M L A H					44.367.959.921,00							0,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL						333.408.226.378,00							358.148.387.602,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						303.786.503.378,00								350.868.051.263,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						303.656.503.378,00								350.118.051.263,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	90 Nilai			90 Nilai	52.605.639.437,00						90 Nilai	64.935.064.680,00		
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	348.948.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	610.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	34.560.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		133.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				4 Dokumen	55.679.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		92.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	258.708.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	45.127.857.737,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	44.833.463.790,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				413 Orang/ Bulan	45.005.526.637,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		44.480.289.595,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	22.376.600,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		196.854.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				3 Laporan	21.304.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		56.427.745,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				5 Laporan	78.650.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		99.891.550,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	91.937.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	155.780.240,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		931.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	91.437.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		154.848.540,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	693.103.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	1.551.547.099,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	44.827.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		141.720.754,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	68.426.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		228.514.998,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				3 Paket	18.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-		73.881.680,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		142.196.054,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		30.140.894,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				286 Laporan	509.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-		935.092.719,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %			100 %	10.140.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	279.567.076,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	10.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		279.567.076,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %			100 %	4.447.517.100,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	13.716.263.577,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		13.310.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	973.001.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		7.830.727.936,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				8 Laporan	3.470.516.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	-		5.872.225.641,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %			100 %	1.886.136.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	3.788.442.898,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				87 Unit	1.228.109.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				147 Unit	258.027.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		458.492.898,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.929.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	<i>Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY</i>	576.01 liter/detik 58,05 % 25403,58 liter/detik 12.51 %			25395,58 liter/detik 40,19 %	15.245.360.750,00						n/a liter/detik 58,05 % 25403,58 liter/detik n/a %	28.002.520.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s)</i>	576,01 liter/detik 25403,58 liter/detik			25395,58 liter/detik	4.117.726.500,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY	n/a liter/detik 25403,58 liter/detik	9.580.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	28.541.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan</i>				2 Lembaga	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi</i>				2 Dokumen	1.124.558.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				26 Unit	2.714.626.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		5.540.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77.5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY</i>	12,51 % 58,05 %			40,19 %	11.127.634.250,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY	n/a % 58,05 %	18.422.520.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				511.77 KM	9.330.634.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		15.435.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi														
			<i>Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara</i>				41 Bendung	1.524.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		1.188.920.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun</i>				3 Dokumen	193.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi														
			<i>Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya</i>				41 DI	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	-	Masyarakat DIY		798.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<i>Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional</i>	23.85 % 14.78 %			22.90 % n/a %	9.073.352.000,00						23.85 % n/a %	33.515.049.408,00	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	<i>Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional</i>	100 % 3.83 Ha 23.85 % 23.85 % 100 %			22.90 %	9.073.352.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat DIY	n/a % n/a Ha 23.85 % 23.85 % n/a %	33.515.049.408,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat DIY	n/a Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara				1 Unit	8.852.807.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat DIY		27.515.049.408,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi</i>				1 Unit	20.545.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat DIY		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	<i>Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional</i>	36.71 %			36.71 %	250.000.000,00						36.71 %	68.292.000.000,00	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	<i>Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional</i>	2 unit 100 % 28535 Rumah Tangga			36.71 %	250.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat DIY	2 unit 100 % 28535 Rumah Tangga	68.292.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.05.1.01.0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi</i>				1 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat DIY		68.292.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	<i>Pengurangan luasan genangan</i>	6,29 Ha			6,29 Ha	235.600.000,00						6,29 Ha	500.000.000,00	
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	<i>Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani</i>	6,86 Ha 3,83 Ha			6,29 Ha	235.600.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat DIY	6,86 Ha n/a Ha	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara</i>				2 Sistem Drainase Perkotaan	235.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat DIY		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	<i>Persentase terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara</i>	100 %			100 %	8.600.000.000,00						100 %	32.475.000.000,00	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	216 dokumen 1 dokumen 1 dokumen			-	8.600.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY	4 dokumen n/a dokumen n/a dokumen	32.475.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara</i>				5 Kabupaten/ Kota	100.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		475.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</i>				2 Dokumen	8.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		32.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
7.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	<i>Persentase kemantapan jalan</i>	62.20 %			62.20 %	81.256.551.191,00						62.20 %	122.398.417.175,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	<i>Penambahan, peningkatan dan mempertahankan kondisi jalan</i>	68.01 % 62.40 %			62.20 %	81.256.551.191,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY	n/a % 62.40 %	122.398.417.175,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				264 Jembatan	4.461.813.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		2.857.794.825,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>				3 KM	14.009.702.286,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		53.240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				674.585 KM	26.985.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		32.651.892.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar														
			<i>Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar</i>				4,5 KM	34.880.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		31.762.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				50 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberrantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		593.930.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				674.585 KM	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberrantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		1.292.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
8.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-	-			-	136.390.000.000,00						-	0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-			-	136.390.000.000,00			-	-	Masyarakat DIY	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				2 Dokumen	1.690.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	Masyarakat DIY		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				5 Dokumen	29.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN, DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	Masyarakat DIY		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				1 Dokumen	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	-	Masyarakat DIY		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri</i>				1 Dokumen	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN	-	-	Masyarakat DIY		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo														
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo</i>				1 Dokumen	101.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN, DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	Masyarakat DIY		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0018	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul														
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul</i>				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN, DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	Masyarakat DIY		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						130.000.000,00							750.000.000,00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	"Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana "	100 %			100 %	130.000.000,00						100 %	750.000.000,00	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	<i>Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni</i>	100 % 8 dokumen			100 %	130.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY	100 % n/a dokumen	750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						29.350.000.000,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						29.350.000.000,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional Jawa dan sarana pra sarana pendukung PKP</i>	-			300 unit	29.350.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional Jawa	-			300 unit	16.800.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat DIY	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				403 Unit	16.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat DIY		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase panjang saluran irigasi tersier dalam kondisi baik dibandingkan dengan panjang total saluran irigasi tersier kewenangan DIY	-			88.69 %	12.550.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat DIY	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman				3 Laporan	12.550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-	Masyarakat DIY		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						271.723.000,00							7.280.336.339,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						271.723.000,00							7.280.336.339,00	
1.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	-	-			-	70.000.000,00						-	1.384.808.442,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	1 laporan 3 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 6 dokumen 1 laporan 21 laporan 1 laporan 1 laporan			-	40.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat dan Pelaku Pemakaian Air Tanah	n/a laporan 0 dokumen n/a dokumen n/a dokumen 0 dokumen n/a laporan 4 laporan n/a laporan	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>				3 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat dan Pelaku Pemakaian Air Tanah		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i> <i>Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	7 laporan 1 laporan 40.49 % 18 laporan 6 dokumen			1 Laporan 1 Laporan	30.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pelaku usaha pengguna air tanah di DIY	2 laporan n/a laporan n/a % 4 laporan 1 dokumen	1.324.808.442,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pelaku usaha pengguna air tanah di DIY		225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pelaku usaha pengguna air tanah di DIY		1.099.808.442,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	<i>Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan</i>	3988 Ha			3988 Ha	70.000.000,00						3988 Ha	2.659.891.802,00	
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	<i>Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>	12 laporan			1 laporan	10.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY	3 laporan	1.002.562.440,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY		1.002.562.440,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	100 %			2 Dokumen	25.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Pelaku Usaha Pertambangan dan Aparat Pemerintah DIY	100 %	1.147.504.362,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Pelaku Usaha Pertambangan dan Aparat Pemerintah DIY		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Pelaku Usaha Pertambangan dan Aparat Pemerintah DIY		747.504.362,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-	3 dokumen			-	30.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Pelaku Usaha Pertambangan dan Aparat Pemerintah DIY	3 dokumen	410.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat														
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Pelaku Usaha Pertambangan dan Aparat Pemerintah DIY		410.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	<i>Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan</i>	9 laporan			1 laporan	5.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY	2 laporan	99.825.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY		99.825.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan	56030 TOE			56030 TOE	86.723.000,00						56030 TOE	2.353.450.000,00	
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	<i>Penambahan Capaian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</i>	n/a unit n/a laporan			1 unit 1 laporan	86.723.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY	n/a unit n/a laporan	2.353.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah														
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY		199.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														
			<i>Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT</i>				1 unit	76.723.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat DIY		2.153.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
4.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	<i>Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan</i> <i>Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan</i>	16423 Rumah Tangga 14448 SR 150 izin 46,88 %			120 Izin 15223 Rumah Tangga	45.000.000,00						16423 Rumah Tangga n/a SR 150 izin n/a %	882.186.095,00	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	<i>Dokumen rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan yang diterbitkan Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</i>	37.73 % 150 izin 15 dokumen			2 dokumen 120 izin	45.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY	n/a % 150 izin 1 dokumen	882.186.095,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY		68.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat DIY		813.936.095,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							13.705.283.245,00						22.619.657.624,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.705.283.245,00							22.619.657.624,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						13.705.283.245,00							22.619.657.624,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	6.091.557.800,00						-	6.667.789.000,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	10.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	10.500.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	10.500.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.500.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	18.696.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	18.696.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	18.696.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		18.696.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	211.573.250,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	232.728.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	38.168.400,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		41.985.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	44.996.900,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		49.496.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	14.690.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		16.159.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	34.999.950,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		38.499.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				24 Dokumen	3.528.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.880.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				115 Laporan	75.190.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		82.709.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %			100 %	5.105.808.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	5.616.352.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	4.998.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		5.497.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	3.050.974.200,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.371.875.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	2.049.836.500,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.238.980.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %			100 %	744.979.850,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	789.513.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				16 Unit	370.455.850,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		407.537.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				92 Unit	74.524.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		81.976.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		300.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
2.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	<i>Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional</i>	36.71 %			36.71 %	7.038.733.000,00						36.71 %	9.571.587.624,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	<i>Terlayannya Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/ Terpeliharanya Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang beroperasi</i>	2 unit 100 % 28535 Rumah Tangga			27535 Rumah Tangga 2 unit	7.038.733.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat DIY	2 unit 100 % 28535 Rumah Tangga	9.571.587.624,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			<i>Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara</i>				2 Unit	7.038.733.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat DIY		9.571.587.624,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
3.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	<i>Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi</i>	63,48 % 100 % 67,98 % 100 %			84,59 % 88,34 %	574.992.445,00						n/a % 100 % N/A % 100 %	6.380.281.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	<i>Terpenuhinya layanan pengujian laboratorium konstruksi</i>	1) 225 orang; dan 2) 800 LHU 1) orang; dan 2) LHU 1) 150 orang; dan 2) 800 LHU 1) orang; dan 2) LHU			800 LHU	517.929.945,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat Jasa Konstruksi	1) 225 orang; dan 2) 800 LHU 1) orang; dan 2) LHU n/a 1) orang; dan 2) LHU	5.205.281.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi														
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				800 Lembaga	435.579.945,00	Kab. Sleman, Depok, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat Jasa Konstruksi		4.805.281.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi</i>				50 Orang	82.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat Jasa Konstruksi		400.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	<i>1) Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi; dan 2) Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi.</i>	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang 1) laporan; dan 2) orang			1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang 1) laporan; dan 2) orang	57.062.500,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat Jasa Konstruksi	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang 1) laporan; dan 2) orang	1.175.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan</i>				1 Dokumen	57.062.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat Jasa Konstruksi		1.175.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
J U M L A H								347.113.509.623,00							380.768.045.226,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG						29.729.884.869,00							75.563.008.204,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.804.355.669,00							26.702.047.000,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						14.804.355.669,00							26.702.047.000,00		
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	95,89 Nilai				95,89 Nilai						95,89 Nilai	11.814.341.000,00		
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	9 Dokumen 3 Dokumen				9 Dokumen n/a Dokumen	15.747.600,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	9 Dokumen n/a Dokume n	47.557.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen				3 Dokumen	6.200.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	3 Dokumen	26.554.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	4 Dokumen				4 Dokumen	2.977.600,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	4 Dokumen	1.464.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2 Laporan			2 Laporan	6.570.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	2 Laporan	19.539.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD</i>	21 Dokumen n/a Laporan			21 Dokumen n/a Laporan	9.805.002.219,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	21 Dokumen n/a Laporan	9.943.867.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	71 Orang/ Bulan			71 Orang/ Bulan	9.777.142.419,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	71 Orang/ Bulan	9.865.772.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	17.959.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	1 Dokumen	60.890.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan			1 Laporan	3.042.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	1 Laporan	3.678.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	18 Laporan			18 Laporan	6.858.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	18 Laporan	13.527.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD</i>	3 Laporan			2 Laporan	20.646.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	3 Laporan	27.152.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	3 Laporan			2 Laporan	20.646.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	3 Laporan	27.152.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya administrasi penatausahaan kepegawaian daerah</i>	2 Laporan			1 Laporan	3.791.850,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	2 Laporan	7.345.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	3.791.850,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	2 Dokumen	7.345.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i> <i>Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	5 Laporan 20 Laporan			20 Laporan n/a Laporan	107.689.600,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	n/a Laporan 20 Laporan	247.932.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	9.987.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	1 Paket	20.995.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket			3 Paket	9.765.350,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	3 Paket	57.051.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket			1 Paket	3.081.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	1 Paket	12.024.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket			2 Paket	11.816.450,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	2 Paket	45.747.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	3 Dokumen			3 Dokumen	1.819.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	3 Dokumen	12.520.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan			12 Laporan	71.220.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	12 Laporan	99.595.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	3 Laporan			3 Laporan	718.151.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	3 Laporan	816.921.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan			1 Laporan	2.900.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	1 Laporan	16.238.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan			1 Laporan	233.241.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	1 Laporan	286.600.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan			1 Laporan	482.010.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	1 Laporan	514.083.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	3 Laporan			3 Laporan	294.946.400,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	3 Laporan	723.567.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	15 Unit			14 Unit	205.284.600,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	15 Unit	352.811.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	10 Unit			10 Unit	72.960.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	10 Unit	141.361.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit			1 Unit	16.701.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	1 Unit	229.395.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<i>Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan</i>	80,36 %			80,36 %	30.671.000,00						80,36 %	726.000.000,00	
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	<i>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi</i>	5 Dokumen 4 Dokumen			4 Dokumen n/a Dokumen	30.671.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	n/a Dokumen 4 Dokumen	726.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang</i>				3 Dokumen	30.671.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		726.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
3.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	<i>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten</i>	85,31 % 89,63 %			74,07 % 84,31 %	3.807.710.000,00						85,31 % 89,63 %	14.161.706.000,00	
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	<i>Terlaksananya BKK Keistimewaan Urusan Tata Ruang di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten</i>	-			5 Dokumen 14 Dokumen n/a Dokumen	2.942.710.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	-	8.117.739.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.01.0003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</i>				6 Dokumen	545.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		743.597.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang</i>				7 Dokumen	1.755.320.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		5.135.642.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.01.0006	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang</i>				1 Laporan	642.390.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		2.238.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	<i>Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang</i>	-			13 Dokumen n/a Dokumen	865.000.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	-	6.043.967.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang														
			<i>Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang</i>				18 Dokumen	865.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		6.043.967.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.925.529.200,00							48.860.961.204,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						14.925.529.200,00							48.860.961.204,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	100 % 1 Dokumen			100 % n/a Dokumen	10.312.700,00						100 % n/a Dokumen	100.000.000,00	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan regulasi	1 Dokumen			1 Dokumen	10.312.700,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.03.1.01.0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum														
			Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				1 Dokumen	10.312.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti Jumlah dokumen kinerja reforma agraria	1 Dokumen 2 Angka			2 Angka n/a Dokumen	21.031.500,00						n/a Dokumen 2 Angka	100.000.000,00	
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselenggarakannya fasilitasi redistribusi tanah lintas daerah yang ditindaklanjuti	1 Dokumen			1 Dokumen	21.031.500,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	0 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	0 Dokumen			1 Dokumen	21.031.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
3.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	<i>Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa</i>	-			54,26 %	14.894.185.000,00						-	48.660.961.204,00	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	<i>Terlaksananya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksananya BKK Keistimewaan Urusan Pertanahan di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan</i>	-			4 Kabupaten 5 Kabupaten/ Kota 20 Dokumen n/a Dokumen	13.068.894.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	-	46.062.469.204,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat</i>				11 Dokumen	1.249.180.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.863.400.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.0002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan														
			<i>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan</i>				1 Dokumen	1.001.567.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.089.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa</i>				2 Dokumen	302.240.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		13.411.740.904,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan</i>				4 Dokumen	179.577.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		23.391.808.300,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.0006	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan</i>				3 Laporan	271.110.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		181.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.0007	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan														
			<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan</i>				2 Dokumen	10.065.220.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		6.125.020.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	<i>Terlaksananya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksananya Pemanfaatan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi Terlaksananya Pemanfaatan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi</i>	-			4 Kabupaten 9 Angka n/a Angka	1.825.291.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	-	2.598.492.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten</i>				4 Dokumen	1.461.583.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.618.392.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa															
			<i>Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa</i>				3 Berita Acara	363.708.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		980.100.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
J U M L A H								29.729.884.869,00								75.563.008.204,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						43.601.496.671,00							45.658.939.092,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.412.285.811,00							25.528.939.092,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						17.412.285.811,00							25.528.939.092,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	87,27 Nilai			87,27 Nilai	16.741.820.061,00						87,27 Nilai	16.539.534.092,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Pengganaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Perencanaan, Pengganaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	11.200.000,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY	100 %	199.650.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY		72.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				4 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY		96.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	1.700.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY		30.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	13.143.541.361,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY	100 %	14.164.514.092,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				73 Orang/Bulan	13.114.701.361,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY		14.082.055.092,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	13.340.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY		45.360.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	11.500.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY		16.335.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	4.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY		20.764.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	13.535.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY	100 %	13.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	13.535.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY		13.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %			100 % 100 %	177.498.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY	100 %	359.370.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	12.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY		32.670.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	5.496.200,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY		18.150.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	160.002.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY		308.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %			100 %	4.520.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY	100 %	125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	4.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY		125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	2.743.925.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY	100 %	617.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	167.225.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY		187.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	2.576.700.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY		429.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	647.600.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY	100 %	1.060.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	65.156.800,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY		60.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				57 Unit	376.525.050,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY		726.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				15 Unit	7.212.650,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY		24.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	198.706.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan Pemda DIY		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani</i>	100 %			100 %	670.465.750,00						100 %	8.989.405.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	100 %			-	590.796.750,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY	100 %	8.202.905.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</i>	37 Dokumen			5 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY	9 Dokumen	137.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY		11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan</i>				166 laporan	299.253.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY		6.420.405.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia														
			<i>Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja</i>				450 Orang	266.543.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY		1.634.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	-	100 %			-	79.669.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY	100 %	786.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</i>	208 Laporan			4 Laporan	40.509.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY	26 Laporan	302.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP</i>	532 Laporan			36 Laporan	39.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY	130 Laporan	484.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						26.189.210.860,00							20.130.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						957.552.000,00							130.000.000,00	
1.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	<i>Persentase pelanggaran Perdas dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani</i>	-			100 %	957.552.000,00						-	130.000.000,00	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	<i>Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</i>	-			100 %	957.552.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY	-	130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa</i>				1 Dokumen	957.552.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY		130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						25.231.658.860,00							20.000.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa Persentase Omah Jaga Warga yang aktif</i>	-			100 % 80 %	25.231.658.860,00						-	20.000.000.000,00	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</i>	-			100 %	3.626.128.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY	-	4.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya</i>				10 Unit	3.626.128.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY		4.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	<i>Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</i>	-			100 %	21.605.530.360,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY	-	15.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.09.0016	Pembinaan Jagawarga														
			<i>Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina</i>				17280 Orang	11.882.193.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY		5.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya														
			<i>Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya</i>				12 Dokumen	9.723.336.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Wilayah DIY dan Pemda DIY		10.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			J U M L A H					43.601.496.671,00							45.658.939.092,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						20.174.358.590,00							31.759.953.012,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						18.914.168.590,00							30.499.763.012,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						18.914.168.590,00							30.499.763.012,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,02 Angka			87,02 Angka	16.616.256.340,00						87,02 Angka	19.148.430.341,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100% %			100 %	14.300.000,00			Memperkuat Penyeleraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY	100% %	57.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyeleraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				4 Dokumen	7.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	1.700.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY		12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	14.343.337.290,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD	12 bulan Bulan	15.029.527.471,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				110 Orang/ Bulan	14.318.891.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD		14.968.266.893,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	8.578.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD		34.520.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	4.050.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD		13.740.578,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	11.818.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD		13.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi BMD di BPBD DIY</i>	1 Tahun Tahun			1 Tahun Tahun	17.400.000,00			Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BMD yang dikelola BPBD DIY	1 Tahun Tahun	27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	17.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BMD yang dikelola BPBD DIY		27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi Umum BPBD DIY</i>	1 Tahun Tahun			1 Tahun Tahun	184.294.200,00			Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY	1 Tahun Tahun	484.339.840,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	2.490.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY		123.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	19.872.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY		116.139.840,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	17.871.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				0 Dokumen	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY		19.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	144.061.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY		226.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPBD DIY</i>	1 Tahun Tahun			1 Tahun Tahun	1.746.064.600,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY	1 Tahun Tahun	2.029.058.080,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	699.496.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY		931.194.460,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.046.568.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY		1.097.863.620,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan BMD di BPBD DIY</i>	1 Tahun Tahun			1 Tahun Tahun	310.860.250,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY	1 Tahun Tahun	1.521.504.950,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	27.497.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				14 Unit	184.553.450,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY		450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				8 Unit	77.401.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY		545.493.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				4 Unit	21.408.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BPBD DIY		496.011.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	<i>Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY</i>	0,88 Skor 0,80 Skor 0,88 Skor 0,85 Skor			0,70 Skor 0,75 Skor 0,77 Skor	2.245.669.250,00						0,88 Skor 0,80 Skor 0,88 Skor 0,85 Skor	10.685.832.671,00	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	<i>Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Provinsi</i>	100% %			100 %	247.968.890,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Dearah Rawan Bencana	100% %	2.368.770.828,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan</i>				2 Dokumen	247.968.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Dearah Rawan Bencana		325.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)														
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturn di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota</i>				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Dearah Rawan Bencana		2.043.770.828,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</i>	100% %			100 %	1.315.239.950,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Petugas Responder dan Masyarakat di Dearah Rawan Bencana	100% %	4.659.055.546,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana														
			<i>Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana</i>				00 Kawasan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Petugas Responder dan Masyarakat di Dearah Rawan Bencana		14.999.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>				31 Orang	154.403.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Petugas Responder dan Masyarakat di Dearah Rawan Bencana		1.448.405.646,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			<i>Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana</i>				25 Keluarga	800.135.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Petugas Responder dan Masyarakat di Dearah Rawan Bencana		2.795.650.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana</i>				1 Dokumen	360.701.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Petugas Responder dan Masyarakat di Dearah Rawan Bencana		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	100% %			100 %	578.137.450,00			Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Dearah Rawan Bencana	100% %	2.661.506.297,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>				400 Orang	511.837.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Daerah Rawan Bencana		2.390.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana</i>				12 Laporan	66.300.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di Daerah Rawan Bencana		271.506.297,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	<i>Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	100% %			100 %	104.322.960,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di kawasan rawan bencana	100% %	996.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun</i>				2 Dokumen	104.322.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat di kawasan rawan bencana		996.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	<i>Persentase capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota</i>	97,6 %			97,6 %	52.243.000,00						97,6 %	665.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>	100% %			100 %	52.243.000,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Daerah Istimewa Yogyakarta	100% %	665.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>				1 Laporan	52.243.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Daerah Istimewa Yogyakarta		665.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.260.190.000,00							1.260.190.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1.260.190.000,00							1.260.190.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY</i>	-			0,82 Skor	1.260.190.000,00						-	1.260.190.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	-	-			-	1.260.190.000,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	pemenuhan kebutuhan peralatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY	-	1.260.190.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya</i>				95 Unit	1.260.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	pemenuhan kebutuhan peralatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY		1.260.190.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
J U M L A H								20.174.358.590,00						31.759.953.012,00		

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						92.828.157.833,00							114.638.352.194,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						88.243.156.133,00							110.153.350.494,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						88.243.156.133,00							110.153.350.494,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	50.128.048.933,00						-	51.366.649.210,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terselenggaranya Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	67.781.350,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	204.024.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	27.996.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Aparatur		121.968.150,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	22.835.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Aparatur		48.781.150,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	16.949.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Aparatur		33.275.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	45.523.277.641,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	41.835.665.615,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				414 Orang/ Bulan	45.458.221.291,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Aparatur		41.712.913.445,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	14.551.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Aparatur		52.681.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	3.224.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Aparatur		4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	9.372.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Aparatur		12.870.770,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					1 Laporan	34.598.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Aparatur		49.700.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen	3.309.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Aparatur		3.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	26.390.600,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	35.288.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					6 Laporan	26.390.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Aparatur		35.288.600,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	19.974.200,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	160.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	19.974.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Aparatur		160.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	307.782.792,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	613.628.150,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	28.293.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Aparatur		51.243.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	48.253.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Aparatur		82.129.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	6.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Aparatur		47.788.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	21.301.668,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Aparatur		39.264.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3 Dokumen	7.488.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		10.781.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	162.506.224,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		323.391.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				2 Dokumen	33.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		59.029.850,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	57.170.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	2.696.483.845,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		1.696.787.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				4 Paket	3.416.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		71.240.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		378.358.845,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	53.754.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		550.098.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	3.213.766.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	3.657.840.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		5.457.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	466.800.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		753.479.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	2.746.476.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		2.898.904.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	911.905.850,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	2.163.718.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				53 Unit	462.956.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		768.531.300,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				116 Unit	217.911.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		259.425.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	165.120.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				55 Unit	65.918.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		135.762.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-		-	1.833.503.550,00							-	8.966.688.028,00	
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	-	1943 orang Orang		-	1.833.503.550,00				-	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat	1943 orang Orang	8.966.688.028,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				190 Orang	184.811.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat		1.698.386.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				78 Orang	1.360.411.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat		2.258.281.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				4 Lembaga	288.280.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat		5.010.020.428,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial	1,07% %			1,07% %	8.000.000,00						1,07% %	62.557.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	<i>Tertanganinya warga negara migran Korban Tindak Kekerasan melalui dukungan psikososial</i>	5 orang Orang 10 orang Orang			1 Orang	8.000.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	n/a Orang 10 orang Orang	62.557.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal														
			<i>Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Orang	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		62.557.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial</i>	22,58% Orang			22,58% Orang	34.504.136.650,00						22,58% Orang	40.212.648.949,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	<i>Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB</i>	100 orang Orang 275 orang Orang 185 orang Orang			70 Orang	867.430.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar di SLB dan LKS	100 orang Orang 275 orang Orang 185 orang Orang	1.541.821.059,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				70 Orang	523.397.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar di SLB dan LKS		741.466.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				70 Orang	84.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar di SLB dan LKS		141.100.641,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			<i>Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	19.364.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar di SLB dan LKS		94.113.147,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				70 Orang	29.148.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Telantar di SLB dan LKS		134.505.536,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Telantar di SLB dan LKS		282.122.088,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	24.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Telantar di SLB dan LKS		49.770.749,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				50 Orang	6.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Telantar di SLB dan LKS		39.120.752,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				8 Dokumen	119.551.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Penyandang Disabilitas Telantar di SLB dan LKS		59.621.346,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	343 anak Orang 125 anak Orang			28 Orang	274.551.900,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	-	343 anak Orang 125 anak Orang	1.044.968.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				28 Orang	147.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		279.053.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				28 Orang	38.732.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		133.849.353,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				13 Orang	10.056.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		44.974.889,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				28 Orang	21.977.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		129.537.179,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				13 Orang	31.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		209.423.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				13 Orang	10.985.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		13.453.083,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				13 Orang	1.173.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		83.534.625,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				5 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		2.662.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				6 Orang	600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		51.808.376,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10 Dokumen	11.848.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		96.671.595,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial	2575 orang Orang 228 orang Orang			8000 Orang	31.001.571.650,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia Terlantar	2575 orang Orang 228 orang Orang	33.253.502.790,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				8000 Orang	31.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia Terlantar		31.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				4 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia Terlantar		39.930.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				2 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia Terlantar		505.780.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				10 Orang	571.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Lanjut Usia Terlantar		1.707.792.790,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.	80 orang Orang 70 orang Orang 157 orang Orang			110 Orang	2.360.583.100,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan Pengemis	80 orang Orang 70 orang Orang 157 orang Orang	4.372.357.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				110 Orang	1.253.754.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan Pengemis		1.830.369.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				110 Orang	281.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan Pengemis		280.646.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses					110 Orang	141.034.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan Pengemis		452.353.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti					110 Orang	242.212.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan Pengemis		569.017.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial					110 Orang	232.985.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan Pengemis		566.690.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari					110 Orang	74.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan Pengemis		291.801.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal					110 Orang	107.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan Pengemis		289.246.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA					2 Dokumen	26.808.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan Pengemis		92.235.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	3,67% %			3,67% %	110.157.000,00						3,67% %	2.605.922.700,00	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlindunginya anak balita terlantar dan anak terlantar dengan memperoleh calon orang tua angkat.	31 Orang			21 Orang	43.765.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat	31 Orang	977.654.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				20 Orang	43.387.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat		943.815.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				1 Orang	378.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat		33.839.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlindunginya Fakir Miskin dengan tersedianya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang akurat dan fakir miskin memperoleh bimbingan keterampilan berusaha dan bantuan ekonomis produktif.	1600 KPM KPM			100 KPM	66.392.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang Anggotanya masuk dalam DTKS	1600 KPM KPM	1.628.268.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				0 Keluarga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang Anggotanya masuk dalam DTKS		1.201.586.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				50 Keluarga	66.392.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang Anggotanya masuk dalam DTKS		426.682.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	61,03% %			61,03% %	1.287.524.000,00						61,03% %	6.053.802.607,00	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.	1820 orang Orang			10937 Orang	1.287.524.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	1820 orang Orang	6.053.802.607,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				10250 Orang	132.212.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial		785.290.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	523.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial		159.720.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			<i>Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi</i>				50 Unit	750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial		665.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi</i>				287 Orang	154.712.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial		215.622.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi</i>				300 Orang	476.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial		4.227.670.607,00	DINAS SOSIAL
7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	<i>Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat</i>	34,66% %			34,66% %	371.786.000,00						34,66% %	885.082.000,00	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	<i>Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat</i>	34,84% %			34,66 %	371.786.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat	34,84% %	885.082.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</i>				23 Makam	371.786.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat		885.082.000,00	DINAS SOSIAL
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.485.001.700,00							4.485.001.700,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						4.485.001.700,00							4.485.001.700,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	4.485.001.700,00						-	4.485.001.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	4.485.001.700,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	-	-	4.485.001.700,00	DINAS SOSIAL
	2.22.08.5.09.0023	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial														
			Jumlah Dokumen terkait Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial				9 Dokumen	4.485.001.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		4.485.001.700,00	DINAS SOSIAL
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						100.000.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						100.000.000,00							0,00	
1.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	<i>Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik</i>	-			100% %	100.000.000,00						-	0,00	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	<i>Tercapainya implementasi budaya pemerintahan</i>	-			100 %	100.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Taman Makam Pahlawan	-	0,00	DINAS SOSIAL
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Taman Makam Pahlawan		0,00	DINAS SOSIAL
		BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS							3.574.288.450,00						7.653.086.500,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.574.288.450,00							7.653.086.500,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						3.574.288.450,00							7.653.086.500,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	90,28 Angka			90,28 Angka	1.953.472.850,00						90,28 Angka	4.977.412.000,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	6.860.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	12 bulan Bulan	26.125.400,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	6.860.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		26.125.400,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	12 bulan Bulan			-	10.183.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	12 bulan Bulan	15.985.400,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				4 Laporan	10.183.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		15.985.400,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	33.619.550,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 bulan Bulan	169.072.600,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	14.526.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		37.530.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	8.690.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		52.740.600,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				4 Paket	8.976.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		40.565.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	518.550,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		23.483.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					1 Dokumen	294.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.304.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	615.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		12.450.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	950.000.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0 Unit	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		950.000.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	1.766.556.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	1.707.160.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	600.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		3.300.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					4 Laporan	177.252.900,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		207.860.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	1.588.704.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		1.496.000.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	136.253.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	2.109.068.600,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	71.689.400,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		135.055.600,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				42 Unit	11.892.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		148.772.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	41.472.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		1.772.601.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				9 Unit	11.200.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		52.640.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial</i>	22,58% Orang			22,58% Orang	1.620.815.600,00						22,58% Orang	2.675.674.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)	100 orang Orang 275 orang Orang 185 orang Orang			115 Orang	1.620.815.600,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)	100 orang Orang 275 orang Orang 185 orang Orang	2.675.674.500,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				115 Orang	1.110.259.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)		1.190.384.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				115 Orang	216.528.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)		213.059.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				115 Orang	3.439.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)		98.847.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				4 Orang	150.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)		1.020.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				115 Orang	194.796.600,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)		378.936.500,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				115 Orang	94.843.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)		707.545.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	150.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)		74.633.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas														
			<i>Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi</i>				1 Orang	150.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)		150.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				14 Orang	200.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)		10.800.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				1 Orang	150.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)		150.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				1 Orang	150.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)		150.000,00	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS
		BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA						1.720.862.500,00							6.383.995.100,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.720.862.500,00							6.383.995.100,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						1.720.862.500,00							6.383.995.100,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	90,28 Angka			90,28 Angka	877.936.000,00						90,28 Angka	3.146.132.900,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	4.734.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan Bulan	65.820.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	4.734.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		65.820.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	10.134.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan Bulan	10.860.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	10.134.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		10.860.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	19.478.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan Bulan	113.299.100,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	3.595.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		26.087.400,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	3.718.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		32.843.700,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	3.002.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		20.184.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	2.899.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		8.096.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	1.764.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.548.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	4.500.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		21.540.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12 bulan Bulan			-	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 bulan Bulan	1.975.064.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.975.064.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	751.878.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	821.993.800,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	300.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		500.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	95.250.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.380.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	656.328.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		721.113.800,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	91.712.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Bulan	159.096.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				4 Unit	71.855.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80.805.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				6 Unit	2.126.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.950.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	12.161.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		57.105.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				20 Unit	5.570.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		14.236.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial</i>	22,58% Orang			22,58% Orang	842.926.500,00						22,58% Orang	3.237.862.200,00	
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	<i>Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)</i>	80 orang Orang 70 orang Orang 157 orang Orang			50 Orang	842.926.500,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	80 orang Orang 70 orang Orang 157 orang Orang	3.237.862.200,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	482.290.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)		805.560.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	169.423.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)		352.324.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
			<i>Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	711.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)		120.574.800,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	28.470.600,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)		50.597.400,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	77.813.800,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)		775.465.500,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	70.246.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)		269.035.200,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				50 Orang	13.162.100,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)		838.560.500,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi</i>				2 Orang	200.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)		4.800.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				3 Orang	210.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)		8.944.800,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			<i>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal</i>				2 Orang	200.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)		7.200.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA</i>				2 Dokumen	200.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)		4.800.000,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA
		BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS						5.561.559.650,00							7.534.807.049,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.561.559.650,00							7.534.807.049,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						5.561.559.650,00							7.534.807.049,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.416.991.900,00						-	2.746.495.900,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12 bulan Bulan			-	12.068.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	12 bulan Bulan	34.595.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	12.068.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		34.595.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	12 bulan Bulan			-	14.350.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	12 bulan Bulan	21.082.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	14.350.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		21.082.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan Bulan			12 Bulan	33.310.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	66.389.500,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.349.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		18.029.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.755.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		15.203.500,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.247.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		4.815.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.895.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		10.516.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.764.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		5.976.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	6.300.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		11.850.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan Bulan			12 Bulan	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	131.360.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		83.584.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		47.776.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 bulan Bulan			-	2.165.666.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 bulan Bulan	2.177.574.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	500.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.200.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	170.334.600,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		171.000.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	1.994.832.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.004.374.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 bulan Bulan			-	191.597.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 bulan Bulan	315.495.400,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	133.711.400,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		151.588.600,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	10.332.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		47.706.800,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	-	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		0,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	47.553.900,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		116.200.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	22,58% Orang			22,58% Orang	3.144.567.750,00						22,58% Orang	4.788.311.149,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	<i>Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)</i>	100 orang Orang 275 orang Orang 185 orang Orang			180 Orang	2.591.862.050,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	-	100 orang Orang 275 orang Orang 185 orang Orang	3.149.659.150,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				180 Orang	1.867.776.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		1.867.776.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				180 Orang	173.648.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		173.648.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			<i>Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi</i>				180 Orang	13.749.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		8.878.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi</i>				1 Orang	2.290.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		2.290.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>				180 Orang	14.977.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		29.744.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				180 Orang	57.925.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		57.925.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>				180 Orang	455.520.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		962.977.100,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas														
			<i>Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi</i>				12 Orang	300.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		3.600.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				180 Orang	4.777.050,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		1.121.050,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				25 Orang	300.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		7.200.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				25 Orang	300.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		7.200.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar</i>				6 Dokumen	300.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		27.300.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	<i>Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)</i>	50 orang Orang			30 Orang	552.705.700,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di dalam Balai RSBKL	50 orang Orang	1.638.651.999,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				30 Orang	342.018.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di dalam Balai RSBKL		665.406.830,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				30 Orang	58.983.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di dalam Balai RSBKL		184.170.470,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
			<i>Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi</i>				30 Orang	17.895.600,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di dalam Balai RSBKL		52.919.895,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>				30 Orang	1.881.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di dalam Balai RSBKL		15.972.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				30 Orang	75.667.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di dalam Balai RSBKL		226.405.762,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>				30 Orang	31.200.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di dalam Balai RSBKL		39.930.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				30 Orang	16.441.100,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di dalam Balai RSBKL		390.624.542,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi				3 Orang	600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di dalam Balai RSBKL		2.662.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				30 Orang	4.700.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di dalam Balai RSBKL		13.043.800,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				8 Orang	2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di dalam Balai RSBKL		24.756.600,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlarang di dalam Pantu														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pantu				2 Dokumen	1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gelandangan dan Pengemis di dalam Balai RSBKL		22.760.100,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
		BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA						3.280.243.500,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.280.243.500,00							0,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						3.280.243.500,00							0,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			90,28 Angka							90,28 Angka	0,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan Bulan			12 Bulan	4.776.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	4.776.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	10.385.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	10.385.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	36.837.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	3.306.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	14.416.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	8.595.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	3.920.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	6.600.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12 bulan Bulan			-	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 bulan Bulan	0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	1.079.356.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	100.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	72.000.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.007.256.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	233.731.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	70.314.500,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				8 Unit	3.417.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	160.000.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial</i>	22,58% Orang			22,58% Orang	1.915.158.000,00						22,58% Orang	0,00	
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	<i>Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)</i>	80 orang Orang 70 orang Orang 157 orang Orang			80 Orang	1.915.158.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Berhadapan dengan Hukum & Anak Jalanan (Remaja Bermasalah Sosial)	80 orang Orang 70 orang Orang 157 orang Orang	0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	675.636.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Berhadapan dengan Hukum & Anak Jalanan (Remaja Bermasalah Sosial)		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	194.936.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Berhadapan dengan Hukum & Anak Jalanan (Remaja Bermasalah Sosial)		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	191.536.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Berhadapan dengan Hukum & Anak Jalanan (Remaja Bermasalah Sosial)		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	55.039.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Anak Berhadapan dengan Hukum & Anak Jalanan (Remaja Bermasalah Sosial)		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	633.471.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Berhadapan dengan Hukum & Anak Jalanan (Remaja Bermasalah Sosial)		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	116.920.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Berhadapan dengan Hukum & Anak Jalanan (Remaja Bermasalah Sosial)		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				60 Orang	39.170.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Berhadapan dengan Hukum & Anak Jalanan (Remaja Bermasalah Sosial)		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				80 Orang	8.450.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Berhadapan dengan Hukum & Anak Jalanan (Remaja Bermasalah Sosial)		0,00	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
		BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK						2.858.814.100,00							6.318.848.468,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.858.814.100,00							6.318.848.468,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						2.858.814.100,00							6.318.848.468,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	90,28 Angka			90,28 Angka	1.440.765.100,00						90,28 Angka	3.528.641.468,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 bulan	7.626.800,00			-	-	Aparatur	12 bulan Bulan	30.034.600,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				3 Dokumen	7.626.800,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		30.034.600,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 bulan Bulan	12.546.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	13.193.200,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				3 Laporan	12.546.600,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		13.193.200,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	41.332.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	246.092.700,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	6.260.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		38.085.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	7.048.200,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		74.607.200,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	7.676.800,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		58.994.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	13.619.900,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		46.272.500,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	528.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		4.584.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	6.200.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		23.550.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	842.560.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		420.300.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		396.110.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		26.150.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	970.692.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	1.044.824.500,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	86.520.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		141.818.500,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	884.172.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		903.006.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	408.566.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	1.351.936.468,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				11 Unit	201.253.800,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		250.067.800,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				14 Unit	34.136.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		67.518.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	171.017.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		915.402.668,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2.160.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		118.948.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/dapat berfungsi sosial</i>	22,58% Orang			22,58% Orang	1.418.049.000,00						22,58% Orang	2.790.207.000,00	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	<i>Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)</i>	343 anak Orang 125 anak Orang			70 Orang	1.418.049.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA	343 anak Orang 125 anak Orang	2.790.207.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan														
			<i>Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi</i>				70 Orang	225.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		9.075.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				70 Orang	690.830.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		1.132.703.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				70 Orang	235.918.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		560.748.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			<i>Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi</i>				70 Orang	32.321.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		149.590.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>				70 Orang	71.800.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		85.626.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				65 Orang	87.200.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		135.200.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>				65 Orang	374.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		61.715.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak														
			<i>Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi</i>				4 Orang	815.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		2.000.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi</i>				70 Orang	294.051.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		632.050.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				6 Orang	1.215.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		4.000.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				12 Orang	2.437.500,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		4.800.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi</i>				3 Orang	637.500,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		1.600.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</i>				1 Dokumen	225.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		11.100.000,00	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK
		BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA						4.521.948.000,00							4.663.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.521.948.000,00							4.663.000.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						4.521.948.000,00							4.663.000.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	90,28 Angka			90,28 Angka	1.576.429.000,00						90,28 Angka	1.608.000.000,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	11.415.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 bulan Bulan	30.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	11.415.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		30.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	10.960.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	13.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	10.960.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		13.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan Bulan			12 Bulan	48.784.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	48.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.850.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		20.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.624.400,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		10.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.960.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		5.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.600.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		8.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	750.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		2.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	6.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		3.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	35.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		25.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		5.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		5.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	1.367.931.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	1.352.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	700.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		2.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	133.879.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		150.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	1.233.352.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		1.200.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan Bulan			12 Bulan	137.338.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur	12 bulan Bulan	130.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya</i>				12 Unit	103.381.600,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		100.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	6.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Aparatur		20.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	27.957.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Aparatur		10.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial</i>	22,58% Orang			22,58% Orang	2.945.519.000,00						22,58% Orang	3.055.000.000,00	
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	<i>Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW)</i>	2575 orang Orang 228 orang Orang			200 Orang	2.945.519.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	-	2575 orang Orang 228 orang Orang	3.055.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				200 Orang	2.133.744.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		2.300.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>				200 Orang	324.680.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		250.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			<i>Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi</i>				180 Orang	52.460.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		10.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>				180 Orang	86.280.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		80.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>				180 Orang	82.575.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		30.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>				180 Orang	224.640.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		250.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				180 Orang	7.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		25.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				6 Orang	4.140.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		10.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														
			<i>Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi</i>				12 Orang	30.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		100.000.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA
J U M L A H								114.345.874.033,00							147.192.089.311,00	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

--
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						45.288.509.493,00						93.614.500.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						45.048.509.493,00							93.164.500.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						32.961.195.493,00							36.164.500.000,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	89,00 Angka			89,00 Angka	31.610.169.193,00						89,00 Angka	34.121.000.000,00	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	25 dokumen Dokumen			6 Dokumen	34.140.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	OPD	5 dokumen Dokumen	125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	14.145.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	OPD		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	9.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	OPD		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	10.005.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	5 dokumen Dokumen			-	27.811.901.847,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD	1 dokumen Dokumen	29.145.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				178 Orang/ Bulan	27.746.902.247,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		29.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	14.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	5 dokumen Dokumen			1 Dokumen	30.497.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD	1 dokumen Dokumen	35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	20.497.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai</i>	5 dokumen Dokumen			1 Dokumen	16.499.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD	1 dokumen Dokumen	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				6 Dokumen	16.499.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	5 tahun Tahun			1 Tahun	407.899.050,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD	1 tahun Tahun	1.061.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	29.996.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	42.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				3 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	25.339.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	5.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	199.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		550.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				6 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	60 bulan Bulan			12 Bulan	26.150.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD	12 bulan Bulan	175.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	26.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 bulan Bulan			12 Bulan	2.218.849.750,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD	12 bulan Bulan	2.270.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	492.795.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.721.054.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		1.600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 bulan Bulan			12 Bulan	1.064.232.146,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD	12 bulan Bulan	1.290.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	37.338.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				37 Unit	581.417.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				11 Unit	5.426.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				58 Unit	39.997.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	372.407.746,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				46 Unit	27.646.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK	5 kab/kota Kabupaten/Kota			5 kab/kota Kabupaten/Kota	77.118.500,00						5 kab/kota Kabupaten/Kota	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	<i>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</i>	1 dokumen Dokumen			1 Dokumen	77.118.500,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD	1 dokumen Dokumen	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</i>				1 Dokumen	77.118.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	83.606.000,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang Jumlah peserta seleksi pemagangan ke Jepang	6180 orang Orang 280 Orang Orang 760 Orang Orang 840 Orang Orang			Orang 20 Orang	28.202.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat	1200 orang Orang 80 Orang Orang 220 Orang Orang 210 Orang Orang	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				20 Orang	28.202.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	-	135 lembaga Lembaga			-	55.404.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat	135 lembaga Lembaga	70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja														
			<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi</i>				8 LPK	55.404.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat		70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	<i>Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi</i>	90 %			90 %	487.673.000,00						90 %	951.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD sampai dengan tahun - n</i>	8000 orang Orang			7000 Orang	259.133.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat	8000 orang Orang	441.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD</i>				50 Orang	34.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>				150 Orang	31.468.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL</i>				100 Orang	68.585.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja</i>				20 Orang	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat		256.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>	1 dokumen Dokumen			1 Dokumen	174.990.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat	1 dokumen Dokumen	185.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>				1 Dokumen	37.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)</i>				540 Orang	18.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>				50 Orang	119.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat		125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	<i>Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan</i>	100 Orang Orang			0 Orang	53.550.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OPD	25 Orang Orang	325.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>				125 Orang	53.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OPD		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														
			<i>Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan</i>				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OPD		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<i>Persentase jumlah layanan yang terselesaikan</i>	98 %			98 %	402.628.800,00						98 %	572.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah sampai dengan tahun - n</i>	1130 Perkara Perkara			210 Perkara	163.373.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha	250 Perkara Perkara	272.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>				240 Perkara	74.853.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>				10 Perkara	11.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>				1 Lembaga	57.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi</i>				40 Perusahaan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha		22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-	5 SK Angka			-	239.255.800,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha	1 SK Angka	300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	120.207.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				300 Orang	119.048.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-			-	300.000.000,00						-	400.000.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	975 perusahaan Perusahan 160 perusahaan Perusahan 85 Perusahaan Perusahan			-	300.000.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha	975 perusahaan Perusahan 160 perusahaan Perusahan 85 Perusahaan Perusahan	400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)</i>				450 Perusahaan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha		400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						12.087.314.000,00							57.000.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten</i>	-			100% % 32% % 80% %	12.087.314.000,00						-	57.000.000.000,00	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	<i>Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya</i>	-			8 Dokumen	12.087.314.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat	-	57.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya														
			<i>Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya</i>				8 Dokumen	6.164.563.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat		7.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.22.08.5.09.0022	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa														
			<i>Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa</i>				2 Laporan	5.922.751.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat		50.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						240.000.000,00							450.000.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						240.000.000,00							450.000.000,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan</i>	78% %			78% %	240.000.000,00						78% %	450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan	145 KK KK			20 KK	240.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat	30 KK KK	450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi														
			Jumlah Transmigran yang Ditempatkan				20 Kepala Keluarga	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS							4.588.941.050,00						22.471.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.474.042.950,00							22.321.500.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						3.512.927.950,00							21.121.500.000,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.382.896.350,00						-	4.521.500.000,00	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	5 dokumen Dokumen			-	17.340.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	1 dokumen Dokumen	43.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	17.340.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		43.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	5 dokumen Dokumen			-	19.176.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	1 dokumen Dokumen	17.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				4 Laporan	19.176.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		17.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5 tahun Tahun			-	124.958.550,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	1 tahun Tahun	271.500.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	19.945.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		65.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	12.592.200,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		14.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	19.985.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		36.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	14.999.950,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		28.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	7.512.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		8.500.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	49.924.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		120.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	60 bulan Bulan			-	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 bulan Bulan	350.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				22 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		350.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	60 bulan Bulan			-	1.795.955.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 bulan Bulan	1.840.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		5.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				0 Laporan	202.264.200,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		235.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	1.590.691.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.600.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	60 bulan Bulan			-	425.466.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	12 bulan Bulan	2.000.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	136.438.600,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		165.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				83 Unit	19.680.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		38.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				32 Unit	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		137.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				18 Unit	200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.500.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				16 Unit	19.348.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		160.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	1.130.031.600,00						-	16.600.000.000,00	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	6180 orang Orang 280 Orang Orang 760 Orang Orang 840 Orang Orang			-	1.030.038.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat	1200 orang Orang 80 Orang Orang 220 Orang Orang 210 Orang Orang	16.500.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n</i>				64 Orang	1.000.038.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat		15.000.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja														
			<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja</i>				870 Unit	30.000.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat		1.500.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	-	45 dokumen Dokumen			-	99.993.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	10 dokumen Dokumen	100.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah</i>				5 Dokumen	99.993.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	-		100.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						961.115.000,00							1.200.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	961.115.000,00						-	1.200.000.000,00	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	961.115.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	-	1.200.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	2.22.08.5.09.0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa														
			<i>Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa</i>				1 Laporan	961.115.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		1.200.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						114.898.100,00							150.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						114.898.100,00							150.000.000,00	
1.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	114.898.100,00						-	150.000.000,00	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	114.898.100,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	-	150.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY</i>				1 Dokumen	114.898.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		150.000.000,00	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
		BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA							2.022.253.400,00						3.500.243.341,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.022.253.400,00							3.500.243.341,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						2.022.253.400,00							3.500.243.341,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,00 Angka			89,00 Angka	1.063.761.700,00						89,00 Angka	2.066.516.341,00	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	5 dokumen Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD	1 dokumen Dokumen	33.381.480,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		33.381.480,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	5 dokumen Dokumen			1 Dokumen	11.220.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD	1 dokumen Dokumen	12.777.600,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	11.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		12.777.600,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	5 tahun Tahun			1 Tahun	61.195.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD	1 tahun Tahun	251.329.055,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.072.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		13.310.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	10.845.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		120.000.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	11.324.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		12.708.920,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	10.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		11.979.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		3.231.135,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	16.064.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		90.100.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	60 bulan Bulan			12 Bulan	24.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD	12 bulan Bulan	345.950.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		0,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	3.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		0,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	20.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		345.950.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	60 bulan Bulan			12 Bulan	668.793.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD	12 bulan Bulan	1.064.535.690,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.135.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		2.349.215,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	121.146.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		188.640.527,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	545.512.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		873.545.948,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	60 bulan Bulan			12 Bulan	283.553.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD	12 bulan Bulan	358.542.516,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				15 Unit	201.079.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		231.666.805,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				15 Unit	62.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		73.537.750,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	20.304.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		53.337.961,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	<i>Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi</i>	100 %			100 %	253.985.000,00						100 %	367.727.000,00	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	<i>Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3</i>	6180 orang Orang 280 Orang Orang 760 Orang Orang 840 Orang Orang			150 Orang	253.985.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat	1200 orang Orang 80 Orang Or ang 220 Orang Orang 210 Orang Orang	367.727.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n</i>				150 Orang	253.985.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat		367.727.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
3.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	<i>Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja</i>	89,00 %			89,00 %	704.506.700,00						89,00 %	1.066.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	<i>Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3</i>	975 perusa aan Perusah aan 160 perusah aan Perusah aan 85 Perusaha an Perusaha an			15 Perusahaan	704.506.700,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat	975 perusah aan Perusah aan 160 perusah aan Perusah aan 85 Perusaha an Perusaha an	1.066.000.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3</i>				15 Perusahaan	704.506.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat		1.066.000.000,00	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
J U M L A H								51.899.703.943,00						119.586.243.341,00		

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK						21.224.956.555,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						21.224.956.555,00							0,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						14.101.300.728,00							0,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	87,82-90,01 Nilai				87,82-90,01 Nilai	13.021.571.928,00					87,82-90,01 Nilai	0,00	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersusunnya dokumen perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	40 Dokumen				8 Dokumen	68.441.810,00				Provinsi DI Yogyakarta	8 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					2 Dokumen	28.249.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>					1 Dokumen	15.205.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					5 Laporan	24.987.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun</i>	100 Laporan				20 Laporan	8.536.739.168,00				Provinsi DI Yogyakarta	20 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>					79 Orang/ Bulan	8.485.018.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	16.096.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	3.426.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	32.198.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD</i>	5 Laporan			1 Laporan	13.330.000,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	1 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	13.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah</i>	25 Laporan			5 Laporan	385.198.250,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	5 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	54.353.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	37.573.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	8.865.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				6 Dokumen	11.124.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	257.283.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				2 Dokumen	999.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor</i>	5 Laporan			1 Laporan	545.853.000,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	1 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Paket	147.298.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				23 Unit	228.305.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				14 Unit	170.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional kantor	15 Laporan			3 Laporan	2.077.365.700,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	3 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	6.118.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	481.532.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.589.715.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor	20 Laporan			4 Laporan	1.394.644.000,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	4 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.296.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	313.906.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				79 Unit	95.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Di Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	859.227.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Di Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				104 Unit	87.514.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Di Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<i>Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik</i>	38,9 %			38,9 %	291.000.000,00						38,9 %	0,00	
	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender</i>	37 OPD			37 OPD	40.500.000,00			-	-	Provinsi Di Yogyakarta	37 OPD	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi</i>				5 Laporan	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Di Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG</i>				1 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi Di Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakatan Kewenangan Provinsi	<i>Prosentase perempuan KEP Desa Prima yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Kalurahan/Kabupaten/ Propinsi</i>	17 %			14 %	200.000.000,00			-	-	Provinsi Di Yogyakarta	17 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi</i>				10 Lembaga	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	<i>Fasilitasi Organisasi Perempuan pendukung PPPA</i>	3 Organisasi			3 Organisasi	50.500.000,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	3 Organisasi	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi</i>				3 Lembaga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/L estari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi</i>				60 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik</i>	100 %			100 %	717.500.000,00						100 %	0,00	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>jumlah kebijakan yang tersusun</i>	5 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</i>				5 Perangkat Daerah	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah penerima manfaat</i>	650 Orang			130 Orang	715.500.000,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	132 Orang	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat</i>				1 Orang	715.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi</i>				3 Layanan	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	<i>jumlah jejaring antar lembaga yang terfasilitasi</i>	3 Organisasi			3 Organisasi	1.000.000,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	3 Organisasi	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>				30 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>				4 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	<i>Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	2.500.000,00						2 Dokumen	0,00	
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	<i>Peningkatan legalitas keluarga dan pemenuhan hak sipil anak</i>	97,8 %			97,8 %	1.000.000,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	97,8 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota</i>				52 Perangkat Daerah	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia</i>				2 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	<i>450000000 Fasilitasi lembaga pendukung peningkatan kualitas keluarga</i>	4 Lembaga			3 Lembaga 3 Lembaga	1.000.000,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	4 Lembaga	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan</i>				5 Lembaga	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>				50 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga layanan yang terfasilitasi</i>	1 Lembaga			1 Lembaga	500.000,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	1 Lembaga	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>				2 Layanan	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik	100 %			100 %	1.000.000,00						100 %	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	<i>Update Data Gender dan Anak serta data Perlindungan perempuan dan Anak</i>	10 Dokumen			2 Dokumen	1.000.000,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	2 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia</i>				2 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi</i>				3 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	<i>Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar</i>	100 %			100 %	65.228.800,00						100 %	0,00	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan</i>	5 Kab/Kota			5 Kab/Kota	1.000.000,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	5 Kab/Kota	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi														
			<i>umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi</i>				16 perangkat daerah	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah lembaga layanan yang mendapat pembinaan ramah anak</i>	210 Lembaga			42 Lembaga	64.228.800,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	42 Lembaga	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</i>				120 Orang	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota</i>				1 Kegiatan	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak														
			<i>Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak</i>				6 Kegiatan	59.728.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani	100 %			100 %	2.500.000,00						100 %	0,00	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	5 Dokumen			1 Dokumen	500.000,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi</i>				1 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah penerima manfaat</i>	235 Orang			47 Orang	1.000.000,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	49 Orang	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi</i>				40 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi</i>				3 Layanan	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	5 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.03.0007	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi				1 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan														
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi				56 Orang	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						109.936.326,00							0,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE)	76,5 %			76,5 %	63.436.326,00						76,5 %	0,00	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Forum yang terfasilitasi	1 Forum			1 Forum	63.436.326,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	1 Forum	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK				1 Laporan	62.436.326,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				1 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	56,2 %			56,2 %	4.500.000,00						56,2 %	0,00	
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	jumlah materi kampanye KB/Kespro yang tersusun	4 Paket			3 Paket	4.000.000,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	4 Paket	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				5 Daerah	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	4 Kali			3 Kali	500.000,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	4 Kali	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				5 Organisasi	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif	0,40 %			0,40 %	42.000.000,00						0,40 %	0,00	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	5 Jenis			5 Jenis	42.000.000,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	5 Jenis	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	40.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.04.1.01.0018	Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan</i>				3 Dokumen	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana														
			<i>Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana</i>				15 Kelompok	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)														
			<i>Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)</i>				15 Kelompok	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						7.013.719.501,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	-			"Cak Per = 0,056, Cakupan Anak = 0,047" Angka	7.013.719.501,00							0,00	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	<i>Jumlah fasilitasi kelompok ekonomi perempuan (KEP) desa prima</i>	-			35 kelompok	7.013.719.501,00			-	-	Provinsi DI Yogyakarta	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.22.08.5.09.0019	Pengembangan Ekonomi Perempuan														
			<i>Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya</i>				250 Orang	5.607.791.151,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya														
			<i>Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya</i>				2 Dokumen	1.405.928.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	Provinsi DI Yogyakarta		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		J U M L A H							21.224.956.555,00						0,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN						70.635.374.752,00						87.817.935.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						68.499.742.750,00							84.290.335.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						66.945.770.650,00							79.290.335.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,89 Angk a 94,24 Angk a			95,69 Angka n/a Angka	51.905.533.252,00						95,89 Angk a n/a Angka	52.500.100.000,00	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %			100 %	68.000.000,00			-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai DLHK	100 %	137.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	17.950.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai DLHK		56.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	8.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai DLHK		6.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Laporan	41.095.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai DLHK		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100 %			100 %	47.280.480.238,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai	100 %	47.110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				390 Orang/ Bulan	47.217.971.988,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		47.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	26.508.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	3.999.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	31.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	90.000.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai	100 %	95.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		95.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	416.785.500,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai	100 %	385.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	21.209.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	73.502.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	31.871.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	41.792.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		43.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	7.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		7.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	240.863.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100% %			100% %	19.780.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai	100% %	230.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				19 Unit	19.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				14 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100% %			100% %	2.716.560.214,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai	100% %	3.302.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	821.574.214,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		1.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.893.516.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	1.313.927.300,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai	100 %	1.240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	35.114.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				96 Unit	626.401.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				189 Unit	188.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	464.171.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup	n/a %			n/a %	90.100.000,00						n/a %	130.235.000,00	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	<i>Terlaksananya penyusunan muatan RPPLH Provinsi</i>	3 dokumen Dokumen			0 Dokumen	90.100.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Provinsi dan Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	130.235.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi														
			<i>jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi</i>				1 Dokumen	90.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Provinsi dan Kabupaten/ Kota		130.235.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	91200 parameter uji Parameter 100% % 5,1% %			17800 parameter uji Parameter 2,8% % n/a %	1.287.919.400,00						24370 parameter uji Parameter n/a % 5,1% %	3.895.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<i>Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim</i>	38 dokumen Dokumen			8 dokumen Dokumen	1.180.838.400,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ kota dan Pelaku Usaha	8 dokumen Dokumen	3.685.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>				3 Dokumen	220.869.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ kota dan Pelaku Usaha		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan</i>				2 Dokumen	130.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ kota dan Pelaku Usaha		135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														
			<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>				17800 Dokumen	829.629.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ kota dan Pelaku Usaha		3.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<i>Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dipantau</i>	50 titik titik			50 titik titik	107.081.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota, Pelaku Usaha dan Masyarakat	50 titik titik	210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan</i>				50 Titik	107.081.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota, Pelaku Usaha dan Masyarakat		210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	<i>Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3</i>	100% % 100% %			100% % n/a %	9.190.000,00						100% % n/a %	25.000.000,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Terlaksananya fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3</i>	5 dokumen Dokumen			3 dokumen Dokumen	9.190.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota	5 dokumen Dokumen	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			<i>Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				10 Dokumen	9.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<i>Persentase terawasnya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup</i>	87,5% % 85,41% %			78,92% % n/a %	188.133.000,00						n/a % 85,41% %	340.000.000,00	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	<i>Terlaksananya pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</i>	158 usaha/kegiatan Usaha/Kegiatan			146 usaha/kegiatan Usaha/Kegiatan	188.133.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pelaku Usaha dan Pegawai	158 usaha/kegiatan Usaha/Kegiatan	340.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			<i>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan</i>				20 Dokumen	84.098.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pelaku Usaha dan Pegawai		170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				25 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pelaku Usaha dan Pegawai		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>				146 Badan Usaha	104.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pelaku Usaha dan Pegawai		135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkat Kapasitasnya Persentase capaian kinerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</i>	21,05% % 100% %			54% % n/a %	81.390.000,00						n/a % 100% %	135.000.000,00	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat</i>	250 entitas Entitias			135 entitas Entitias	81.390.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota, Pelaku Usaha dan Masyarakat	250 entitas Entitias	135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			<i>Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH</i>				30 Lembaga	81.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota, Pelaku Usaha dan Masyarakat		135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
7.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional Persentase capaian kinerja penghargaan lingkungan hidup</i>	100% % 100% %			55% % n/a %	110.000.050,00						n/a % 100% %	115.000.000,00	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	<i>Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	119 Entitas			69 Entitas	110.000.050,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota, Sekolah dan Masyarakat	119 Entitas	115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH</i>				34 Entitas	110.000.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota, Sekolah dan Masyarakat		115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
8.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi (%)	100 % 92,86 %			100 % N/A %	13.273.504.948,00						100 % N/A %	22.150.000.000,00	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	<i>Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional</i>	100 %			100 %	13.273.504.948,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	TPA Piyungan dan Masyarakat	100 %	22.150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional														
			<i>Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik</i>				1 Unit	12.956.679.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	TPA Piyungan dan Masyarakat		22.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia</i>				1 Unit	316.825.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	TPA Piyungan dan Masyarakat		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1.553.972.100,00							5.000.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan	-			1,37% % n/a Entitias	1.553.972.100,00						-	5.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	<i>Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</i>	-			100% %	1.363.008.100,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Tahura dan Masyarakat	-	1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22.08.5.08.0006	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram														
			<i>Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan</i>				2 Objek	1.363.008.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Tahura dan Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	<i>Jumlah kalurahan/kuarahan yang menerapkan Jogja Hijau</i>	-			6 Desa/Kelurahan	190.964.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota dan Masyarakat	-	3.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat</i>				1 Laporan	190.964.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota dan Masyarakat		3.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.135.632.002,00							3.527.600.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						2.135.632.002,00							3.527.600.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	<i>Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase kesesuaian pengelolaan hutan</i>	100 % 100 % 82,375 Angka 5 % 69,33 %			45,11 % 5 % 89,47 % 91,175 Angka N/A %	1.380.256.202,00						100 % 100 % 82,375 Angka 5 % N/A %	2.475.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	<i>Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan</i>	1279 Ha			276 Ha	546.857.102,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota dan Kelompok Masyarakat	376 Ha	957.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)</i>				2 Dokumen	33.183.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota dan Kelompok Masyarakat		42.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				200 Ha	271.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota dan Kelompok Masyarakat		375.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara														
			<i>Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>				9 Ha	144.568.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota dan Kelompok Masyarakat		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan														
			<i>Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi</i>				1 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota dan Kelompok Masyarakat		275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug														
			<i>Jumlah Gully Plug yang Terbangun</i>				7 Unit	97.954.852,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten/ Kota dan Kelompok Masyarakat		115.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	<i>Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi</i>	97 %			94,62 %	416.749.800,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BDH dan Masyarakat	97 %	505.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan														
			<i>Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun</i>				1 Laporan	20.549.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BDH dan Masyarakat		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			<i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan</i>				15581 Ha	396.200.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BDH dan Masyarakat		450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	<i>Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun</i>	28 Unit Manajemen			28 Unit Manajemen	134.252.200,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pelaku Usaha	28 Unit Manajemen	213.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			<i>Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi</i>				1 Laporan	92.150.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pelaku Usaha		165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi														
			<i>Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah</i>				18 Unit Manajemen	42.101.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pelaku Usaha		48.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	<i>Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit</i>	100 %			100 %	282.397.100,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pengada dan Pengedar	100 %	800.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih														
			<i>Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan</i>				1 Sertifikat	23.017.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pengada dan Pengedar		80.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih														
			<i>Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan</i>				1 Sertifikat	17.884.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pengada dan Pengedar		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit														
			<i>Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan</i>				1 Sertifikat	14.732.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pengada dan Pengedar		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit														
			<i>Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar</i>				1 Laporan	17.413.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pengada dan Pengedar		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.09.0009	Pengelolaan Sumber Benih														
			<i>Luas sumber benih yang dikelola</i>				5 Ha	209.350.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pengada dan Pengedar		570.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	68,53 Angka 69 Indeks			67 Indeks N/A Angka	613.165.800,00						N/A Angka 69 Indeks	902.000.000,00	
	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas hutan konservasi yang dikelola	634,10 Ha 634,10 Ha			634,10 Ha	189.899.200,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai dan Masyarakat	634,10 Ha 634,10 Ha	242.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi														
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif				5 Desa	20.751.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi														
			Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi				6 Ha	99.447.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai dan Masyarakat		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi														
			Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan				634 Ha	69.699.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai dan Masyarakat		72.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola	3 Kawasan 3 Kawasan			3 Kawasan	423.266.600,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten	3 Kawasan 3 Kawasan	660.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola</i>				5 Ha	345.344.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten		580.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.04.1.03.0009	Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah</i>				3 Dokumen	77.921.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Kabupaten		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	<i>Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%) Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya</i>	22,17 % 22,55 %			20,82 % N/A %	142.210.000,00						N/A % 22,55 %	150.000.000,00		
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	<i>Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat</i>	25 Kelompok			15 Kelompok	142.210.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	KTH, Penyuluh Kehutanan dan Masyarakat	25 Kelompok	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan															
			<i>Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan</i>				5 Kelompok	93.847.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	KTH, Penyuluh Kehutanan dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan															
			<i>Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas</i>				40 Orang	48.363.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	KTH, Penyuluh Kehutanan dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA						6.221.436.725,00								11.492.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.440.970.000,00							1.887.500.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						1.440.970.000,00							1.887.500.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,89 Angka 94,24 Angka			95,69 Angka n/a Angka	1.440.970.000,00						95,89 Angka n/a Angka	1.887.500.000,00	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %			100 %	17.480.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai	100 %	48.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	17.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		48.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %			100 %	15.000.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai	100 %	17.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		17.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %			100 %	117.736.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai	100 %	128.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	8.776.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		10.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	20.115.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		22.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket	32.614.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		35.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	12.977.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		14.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					1 Dokumen	1.617.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		2.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	41.636.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		45.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100% %			100% %	0,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai	100% %	360.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				14 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		250.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				58 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		110.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100% %			100% %	664.453.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai	100% %	681.500.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.299.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		1.500.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	178.015.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		180.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	485.139.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		500.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	626.301.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai	100 %	653.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				78 Unit	482.138.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		500.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				14 Unit	15.909.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		18.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				21 Unit	14.361.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		15.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	113.893.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pegawai		120.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.780.466.725,00							9.605.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						4.780.466.725,00							9.605.000.000,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	<i>Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase kesesuaian pengelolaan hutan</i>	100 % 100 % 82,375 Angka 5 % 69,33 %			45,11 % 5 % 89,47 % 91,175 Angka N/A %	4.780.466.725,00						100 % 100 % 82,375 Angka 5 % N/A %	9.605.000.000,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	<i>Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH</i>	6 Dokumen			4 Dokumen	254.726.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BKPH	6 Dokumen	320.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>				1 Dokumen	254.726.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BKPH		320.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	<i>Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan</i>	15,581 Ha			15,581 Ha	3.757.416.725,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BKPH	15,581 Ha	6.535.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala</i>				1 Dokumen	423.811.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BKPH		425.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan</i>				36 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BKPH		85.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.03.0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan</i>				9 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BKPH		25.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi</i>				1 Dokumen	3.333.605.725,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BKPH		6.000.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	<i>Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi</i>	97 %			94,62 %	768.324.000,00			-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BKPH	97 %	2.750.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan														
			<i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan</i>				15581 Ha	768.324.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptaka n lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	BKPH		2.750.000.000,00	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA
			JUMLAH					76.856.811.477,00							99.310.435.000,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						20.161.950.062,00							25.948.698.800,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.346.925.362,00							18.640.538.000,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						232.331.300,00							447.500.000,00	
1.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	<i>Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY</i>	-			88.8 %	56.535.200,00						-	115.000.000,00	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	<i>Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan</i>	-			100 %	24.800.800,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait	-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi</i>				80 Dokumen	24.800.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	<i>Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pendaftaran kependudukan</i>	-			100 %	31.734.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait	-	85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	11.520.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			<i>Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk</i>				1 Laporan	20.214.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	<i>Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY</i>	-			99.20 %	61.315.700,00						-	80.000.000,00	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	<i>Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	-			100 %	36.455.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota</i>				4 Laporan	36.455.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	<i>Terlaksananya pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil</i>	-			100 %	24.860.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait	-	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil</i>				1 Laporan	24.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	<i>Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan</i>	-			84 %	64.385.900,00						-	182.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	<i>Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</i>	-			100 %	64.385.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait	-	182.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</i>				1 Laporan	60.025.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan</i>				2 Dokumen	4.360.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	<i>Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar</i>	-			100 %	50.094.500,00						-	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	<i>Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan</i>	-			100 %	50.094.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait	-	70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain														
			<i>Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun</i>				1 Dokumen	50.094.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						9.646.382.062,00							11.693.038.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	9.604.604.312,00						-	11.643.038.000,00	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	26.468.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	18.040.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			-				-	8.428.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.238.844.412,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	10.072.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/Bulan	8.220.753.012,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	8.530.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		52.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	9.561.400,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	13.154.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	13.154.600,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	609.816.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	731.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.404.200,00	Kota Yogyakarta, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	58.994.200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		98.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	4.356.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5.424.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	533.638.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		580.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
			-				-	79.170.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	55.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	23.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	325.716.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		208.288.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	307.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	17.916.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		198.288.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	311.434.900,00			-	-	-		341.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	36.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	99.596.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				21 Unit	16.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-				-	151.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
2.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren</i>	-			100 %	41.777.750,00						-	50.000.000,00	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	-			100 %	41.777.750,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Kalurahan/Kelurahan Kapanewon/Kemantren di DIY, OPD terkait Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa</i>				1 Dokumen	41.777.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Kalurahan/Kelurahan Kapanewon/Kemantren di DIY, OPD terkait Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						4.468.212.000,00							6.500.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	4.468.212.000,00						-	6.500.000.000,00	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	4.468.212.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	-	-	6.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.22.08.5.09.0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				00	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.22.08.5.09.0020	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa														
			Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa				2 Laporan	4.068.212.000,00	-	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		6.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						5.815.024.700,00							7.308.160.800,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						5.815.024.700,00							7.308.160.800,00	
1.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	4.086.828.700,00						-	7.308.160.800,00	
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-	-			-	246.003.950,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				4 Dokumen	246.003.950,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	-	-			-	3.840.824.750,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	-	-	7.308.160.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				15 Dokumen	3.840.824.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	-		7.308.160.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	-			7.65 %	1.728.196.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	<i>Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan</i>	-			100 %	1.728.196.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Kalurahan/Kelurahan Kapanewon/Kemantren, Pemerintah Daerah, OPD dan stakeholder terkait di DIY	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	4.01.10.5.01.0010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan														
			<i>Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina</i>				4 Dokumen	1.728.196.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Kalurahan/Kelurahan Kapanewon/Kemantren, Pemerintah Daerah, OPD dan stakeholder terkait di DIY		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
J U M L A H								20.161.950.062,00							25.948.698.800,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PERHUBUNGAN						143.560.676.946,00						239.458.657.457,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						31.812.940.600,00							62.240.755.280,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						31.812.940.600,00							62.240.755.280,00		
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	4. <i>Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis</i> 2. <i>Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis</i> 3. <i>Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis</i> 2. <i>Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan</i>	54,63 % 59,00 % 74,73 % 12,50 % 0,00 % 11,52 % 11,52 % 95,00 % 100 %			100,00 % 28,70 % 68,13 % N/A %	31.812.940.600,00						54,63 % 59,00 % 74,73 % N/A % N/A % N/A % N/A % 95,00 % 100 %	62.240.755.280,00		
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	<i>Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</i>	-			100 %	31.812.940.600,00				-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	62.240.755.280,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis															
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu</i>				14 Dokumen	19.684.805.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		40.495.750.280,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu															
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu</i>				1 Dokumen	1.544.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		5.183.540.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh</i>				1 Dokumen	1.544.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		3.730.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo														
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo</i>				1 Dokumen	1.544.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		2.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru														
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi														
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis</i>				1 Dokumen	1.544.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		3.861.265.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0009	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede														
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		780.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis														
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis</i>				1 Dokumen	929.965.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		1.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret</i>				1 Dokumen	1.544.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		1.720.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0014	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton														
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		280.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0015	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman														
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman</i>				1 Dokumen	929.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		1.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0017	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo														
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo</i>				1 Dokumen	1.544.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0019	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro														
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat di Sekitar Kawasan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						111.747.736.346,00							177.217.902.177,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						111.747.736.346,00							177.217.902.177,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,69 angka 94,62 angka			94,49 angka N/A angka	17.724.377.473,00						94,69 angka N/A angka	27.019.205.002,00	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %			100 %	37.472.100,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY	100 %	144.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	17.848.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		67.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	9.623.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		21.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	9.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		56.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %			100 %	14.950.483.345,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY	100 %	16.088.254.842,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				111 Orang/ Bulan	14.886.283.345,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		15.864.433.992,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				2 Dokumen	37.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		163.052.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	9.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		18.593.825,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				17 Laporan	17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		42.175.025,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %			100 %	2.954.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY	100 %	8.587.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				5 Laporan	2.954.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		8.587.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan administrasi perkantoran</i>	100 %			100 %	284.892.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY	100 %	1.052.947.640,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		46.595.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	42.000.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		266.630.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	6.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		39.162.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	15.999.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		154.382.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1.617.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		9.240.440,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	207.945.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		536.937.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100 %			100 %	22.300.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY	100 %	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	22.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran</i>	100 %			100 %	1.301.024.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY	100 %	6.326.705.307,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		9.791.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	491.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		1.007.345.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	804.624.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		5.309.568.707,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %			100 %	1.125.251.128,00			-	-	Dinas Perhubungan DIY	100 %	3.378.210.213,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				26 Unit	558.968.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	Dinas Perhubungan DIY		927.835.213,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				7 Unit	179.807.828,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		721.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	345.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		792.620.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	40.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Perhubungan DIY		935.805.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan</i> <i>Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi</i> <i>Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS</i> <i>Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan</i> <i>Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY</i> <i>Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B</i> <i>Persentase Ketertiban LLAJ</i> <i>Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)</i> <i>Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja</i>	48,06 % 82,00 % 72,39 % 90,35 % 86,49 % 85,98 % 70,00 % 0,78 % 2,85 % 1,00 % 66,77 % 50,00 % 45,52 % 42,86 % 24,71 % 100,00 % 64,68 %			30,00 % 44,24 % 46,77 % 49,00 % 61,27 % 78,38 % 81,40 % 82,46 % N/A %	94.023.358.873,00						48,06 % N/A % N/A % 90,35 % 86,49 % 85,98 % 70,00 % N/A % N/A % N/A % 66,77 % N/A % N/A % N/A % N/A % 100,00 % 64,68 %	150.198.697.175,00	
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	<i>Persentase Dokumen Acuan Dalam Perencanaan Jaringan Jalan di DIY</i>	100 %			100 %	293.133.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY	100 %	1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</i>				2 Dokumen	293.133.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan Serta Dipertahankannya Fungsi Prasarana dan Perlengkapan Jalan yang Telah Tersedia</i>	100 %			100 %	2.233.132.100,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY	100 %	6.302.337.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara</i>				113 Unit	585.493.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		592.399.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara</i>				561 Unit	1.647.639.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		5.709.938.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	<i>Persentase Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di DIY</i>	100 %			100 %	2.628.589.500,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY	100 %	10.874.191.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>				1 Dokumen	49.712.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		1.428.965.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi</i>				5 Laporan	301.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		1.147.471.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi</i>				12 Laporan	28.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		154.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan</i>				54 Unit	2.248.957.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		8.143.755.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	<i>Persentase Pelaksanaan Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi</i>	100 %			100 %	10.000.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY	100 %	35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat yang Bermobilitas di Wilayah DIY		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Operasional Angkutan Umum Dalam Trayek</i>	100 %			100 %	88.858.504.273,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat Pengguna Layanan Angkutan Umum di Wilayah DIY	100 %	131.787.167.975,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</i>				5 Laporan	1.346.627.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat Pengguna Layanan Angkutan Umum di Wilayah DIY		1.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>				95 Unit	87.511.876.873,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat Pengguna Layanan Angkutan Umum di Wilayah DIY		129.987.167.975,00	DINAS PERHUBUNGAN
		BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN							4.217.810.550,00						4.516.469.900,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.217.810.550,00							4.516.469.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						4.217.810.550,00							4.516.469.900,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,69 angka 94,62 angka			94,49 angka N/A angka	3.708.788.550,00						94,69 angka N/A angka	3.904.499.900,00	
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %			100 %	29.952.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran	100 %	47.292.500,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	24.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		41.708.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		1.100.500,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	4.482.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		4.484.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %			100 %	1.970.750,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran	100 %	1.972.500,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	1.970.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		1.972.500,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan administrasi perkantoran	100 %			100 %	96.617.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran	100 %	109.714.500,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.762.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		11.768.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	42.878.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		42.906.500,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.012.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		15.012.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.895.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		3.925.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	23.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		36.103.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %			100 %	3.117.716.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran	100 %	3.260.930.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		5.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		250.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	51.196.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		149.440.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	2.861.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		2.856.490.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %			100 %	462.532.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran	100 %	484.590.400,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	122.828.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		123.152.400,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				8 Unit	57.084.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		78.818.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				6 Unit	282.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		282.620.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan</i> <i>Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi</i> <i>Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS</i> <i>Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan</i> <i>Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY</i> <i>Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B</i> <i>Persentase Ketertiban LLAJ</i> <i>Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)</i> <i>Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja</i>	48,06 % 82,00 % 72,39 % 90,35 % 86,49 % 85,98 % 70,00 % 0,78 % 2,85 % 1,00 % 66,77 % 50,00 % 45,52 % 42,86 % 24,71 % 100,00 % 64,68 %			30,00 % 44,24 % 46,77 % 49,00 % 61,27 % 78,38 % 81,40 % 82,46 % N/A %	509.022.000,00						48,06 % N/A % N/A % 90,35 % 86,49 % 85,98 % 70,00 % N/A % N/A % N/A % 66,77 % N/A % N/A % N/A % N/A % 100,00 % 64,68 %	611.970.000,00	
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	<i>Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe B</i>	100 %			100 %	509.022.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat Pengguna Layanan Terminal Penumpang Tipe B dan Perparkiran di Wilayah DIY	100 %	611.970.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			<i>Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)</i>				6 Unit	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat Pengguna Layanan Terminal Penumpang Tipe B dan Perparkiran di Wilayah DIY		240.000.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			<i>Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara</i>				6 Unit	369.022.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat Pengguna Layanan Terminal Penumpang Tipe B dan Perparkiran di Wilayah DIY		371.970.000,00	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN
			J U M L A H					147.778.487.496,00							243.975.127.357,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA -
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						48.783.727.743,00							90.714.752.020,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						48.783.727.743,00							90.714.752.020,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						14.329.781.543,00							28.370.884.020,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	83.5 angka			83.5 angka	12.390.415.243,00						83.5 angka	19.579.184.020,00	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksanakannya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100 %			100 %	15.200.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	100 %	85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	5.500.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		28.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				4 Dokumen	8.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		34.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	1.700.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		23.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</i>	100 %			100 %	10.798.227.443,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	100 %	16.689.602.821,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				75 Orang/Bulan	10.764.950.493,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		16.575.655.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				14 Dokumen	24.277.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		66.497.821,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		16.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	3.999.950,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		31.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	100 %			100 %	213.446.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	100 %	529.029.999,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	8.957.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		43.718.999,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	24.963.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		43.718.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	13.701.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		26.583.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	20.199.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		37.138.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	145.626.800,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		377.872.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	100 %			100 %	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	100 %	410.763.503,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		270.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		140.763.503,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	100 %			100 %	996.164.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	100 %	1.322.403.697,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	289.200.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		610.383.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	706.964.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		712.020.297,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya serta pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	100 %			100 %	367.377.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	100 %	542.384.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	23.686.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		27.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				16 Unit	142.679.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		157.035.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	170.796.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		201.314.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	30.216.000,00	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		157.035.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<i>Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu</i>	86 %			86 %	1.605.289.200,00						86 %	4.857.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	<i>Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Provinsi</i>	100 %			100 %	1.605.289.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY	100 %	4.857.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik														
			<i>Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik</i>				70 Persentase	813.208.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY		1.760.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														
			<i>Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika</i>				1 Laporan	710.863.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY		1.520.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah</i>				1 Rekomendasi	43.526.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY		765.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis</i>				1 Media	37.692.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY		812.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Penerapan Audit TIK Indeks Penerapan Manajemen SPBE	1.38 indeks 2 indeks			1.36 indeks 1.92 indeks	334.077.100,00						1.38 indeks 2 indeks	3.934.700.000,00	
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	<i>Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	100 %			100 %	334.077.100,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY	100 %	3.934.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda</i>				1 Laporan	270.883.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY		484.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi</i>				37 perangkat daerah	63.193.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY		3.450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						837.465.500,00							9.343.868.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY</i>	631 skor			631 skor	837.465.500,00						631 skor	9.343.868.000,00	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	<i>Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</i>	100 %			100 %	837.465.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pemda DIY	100 %	9.343.868.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>				1 Laporan	173.574.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pemda DIY		5.769.668.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi															
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>				37 Perangkat Daerah	663.891.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pemda DIY		3.574.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						33.616.480.700,00							53.000.000.000,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	-			2.53 skor	33.616.480.700,00						-	53.000.000.000,00		
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	<i>Terlaksananya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</i>	-			100 %	33.616.480.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY	-	53.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.22.08.5.06.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital															
			<i>Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun</i>				1 Objek	33.616.480.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, OPD Pemda DIY		53.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		J U M L A H							48.783.727.743,00							90.714.752.020,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						103.342.701.356,00						119.646.266.000,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						18.923.630.000,00							19.500.000.000,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						18.923.630.000,00							19.500.000.000,00		
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	<i>Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis</i>	1 sentra				18.923.630.000,00						1 sentra	19.500.000.000,00		
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis</i>	-				6 dokumen				Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM	-	19.500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan</i>				1 Dokumen	4.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM		5.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi														
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis</i>				6 Dokumen	14.173.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM		14.500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						84.419.071.356,00							100.146.266.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						10.390.876.513,00							11.146.266.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	85 angka			85 angka	10.161.992.513,00						85 angka	10.010.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	21.638.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM	100 %	25.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	7.250.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		13.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				4 Dokumen	7.908.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		7.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	6.480.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	8.323.011.963,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM	100 %	7.830.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				56 Orang/ Bulan	8.292.506.063,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		7.750.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	18.540.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		70.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	3.276.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		3.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				13 Laporan	8.689.650,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		7.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	100 %			100 %	13.200.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM	100 %	14.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				4 Laporan	13.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		14.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	182.111.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	219.200.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	3.290.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	20.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		21.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.200.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1.799.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	149.822.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		185.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %			100 %	20.830.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM	100 %	265.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	4.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		155.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	16.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		110.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	1.283.958.450,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM	100 %	1.310.700.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	683.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		700.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	452.159.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		460.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	831.115.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		850.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	317.242.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM	100 %	347.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	42.347.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		45.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				17 Unit	138.161.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		140.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				79 Unit	56.616.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		75.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	59.633.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		65.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				40 Unit	20.484.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Koperasi dan UKM		22.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	<i>Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi Kontribusi koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam yang memiliki ijin simpan pinjam terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi (%)</i>	n/a % 25 unit			19 unit n/a %	8.000.000,00						n/a % 25 unit	9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	24 izin			20 izin	8.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi	24 izin	9.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				1 Unit Usaha	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi		9.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	"Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan) " Presentase koperasi yang meningkat kualitasnya (%)	n/a % 32 koperasi			28 koperasi n/a %	10.000.000,00						n/a % 32 koperasi	11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diperiksa dan Diawasi	13 koperasi			10 koperasi	10.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi	13 koperasi	11.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				3 Unit Usaha	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi		11.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya	37 koperasi			37 koperasi	2.500.000,00						37 koperasi	3.000.000,00	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	95 koperasi			-	2.500.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi	95 koperasi	3.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i>				35 Unit Usaha	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi		3.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitas SDMnya</i>	n/a unit usaha 100 %			96 % n/a unit usaha	33.300.000,00						n/a unit usaha 100 %	55.000.000,00	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah peserta pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yg wilayah lintas daerah oabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi</i>	725 orang			725 orang	33.300.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	Koperasi	725 orang	55.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>				80 Orang	33.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Koperasi		55.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
6.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	<i>Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan untuk bergabung), memiliki off taker, memiliki akses pembiayaan, koperasi multi pihak, digitalisasi dalam pelayanan dan usaha koperasi jumlah koperasi modern</i>	n/a koperasi 94 koperasi			90 koperasi n/a koperasi	22.100.000,00						n/a koperasi 94 koperasi	130.000.000,00	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Koperasi yang diberdayakan melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>	60 koperasi			60 koperasi	22.100.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi	60 koperasi	130.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>				3 Unit Usaha	22.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi		130.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi "Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n) " Jumlah Wirausaha Pemula (kumulatif)	n/a orang 25002 UMK M 2.200 orang			24754 UMKM 550 orang n/a orang	85.985.000,00						n/a orang 25002 UMK M 550 orang	596.366.000,00	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha yang meningkat kapasitas usaha, SDM, dan produk sehingga memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi	835 orang			785 orang	85.985.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM	835 orang	596.366.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				5 Unit Usaha	51.591.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM		560.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				60 Orang	34.394.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM		36.366.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
8.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing Jumlah UMKM dibina yang berkembang usahanya	0,48 % n/a UMKM			0,45 % n/a UMKM	66.999.000,00						0,48 % n/a UMKM	331.000.000,00	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing)	1095 unit usaha			970 unit usaha	66.999.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM	1095 unit usaha	331.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				970 Unit Usaha	44.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM		325.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM														
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				30 Orang	22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM		5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.1.01.0006	Fasilitas Inkubator Usaha Kecil														
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				30 Unit Usaha	999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UMKM		1.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						74.028.194.843,00							89.000.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas. Jumlah desa preneur Indeks Kepuasan Masyarakat	-			2378 KUMKM angka 81 angka 85,26 indeks	74.028.194.843,00						-	89.000.000.000,00	
	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksananya tata kelola, pengembangan dan nominasi cagar budaya dan warisan budaya	-			100 angka	22.163.088.843,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM	-	23.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia														
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				1 Objek	22.163.088.843,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM		23.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya sarana dan prasarana budaya	-			100 angka	11.662.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM	-	12.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				1 Unit	11.662.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM		12.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah industri kreatif yang berkembang usahanya (dari 6 aspek)	-			100 angka	21.040.500.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	KUMKM	-	24.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif														
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				3500 Unit	21.040.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	KUMKM		24.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah desa preneur yang meningkat statusnya	-			30 desa	19.162.606.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	Desa preneur	-	30.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22.08.5.09.0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa														
			Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa				18 Laporan	19.162.606.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	Desa preneur		30.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
J U M L A H								103.342.701.356,00							119.646.266.000,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
- PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						12.792.269.842,00							13.174.391.959,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.792.269.842,00							13.174.391.959,00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						11.592.269.842,00							11.674.391.959,00		
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	88,35 skor				88,35 skor	11.188.137.942,00						88,35 skor	11.070.391.959,00	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi</i>	9 dokumen				8 dokumen	16.819.000,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Internal OPD, Instansi Mitra	9 dokumen	24.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	9.869.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Internal OPD, Instansi Mitra		12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				3 Dokumen	3.270.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Internal OPD, Instansi Mitra		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	3.680.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Internal OPD, Instansi Mitra		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Keuangan</i>	15 dokumen			3 Dokumen	9.562.996.892,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Internal OPD dan Lintas OPD	3 dokumen	9.057.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				50 Orang/Bulan	9.545.142.892,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD dan Lintas OPD		9.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	10.345.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD dan Lintas OPD		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	7.509.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD dan Lintas OPD		17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 laporan			1 Laporan	10.515.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD	1 laporan	12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	10.515.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD		12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah</i>	80 paket/dokumen/laporan			511 paket/dokumen/laporan	422.267.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD dan Lintas OPD	16 paket/dokumen/laporan	494.286.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	20.337.300,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD dan Lintas OPD		21.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	64.248.400,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD dan Lintas OPD		67.210.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	42.143.600,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD dan Lintas OPD		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	7.344.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD dan Lintas OPD		12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	82.760.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD dan Lintas OPD		82.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1.764.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD dan Lintas OPD		12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	142.554.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD dan Lintas OPD		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				500 Dokumen	61.116.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD dan Lintas OPD		55.076.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang	52 unit/paket			4 Unit	23.800.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD	11 unit/paket	102.760.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3.600.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD		20.360.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	20.200.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD		82.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	15 laporan			3 laporan	785.380.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD dan Lintas OPD	3 laporan	769.922.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD dan Lintas OPD		8.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	152.320.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD dan Lintas OPD		152.070.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	628.560.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD dan Lintas OPD		609.252.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	840 unit			193 Unit	366.359.750,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD	163 unit	610.423.159,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.039.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD		37.056.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	157.641.750,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD		157.243.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				23 Unit	8.026.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD		13.816.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				94 Unit	69.625.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD		71.588.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	57.498.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD		294.739.759,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				67 Unit	37.530.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Internal OPD		35.980.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Siap Jual (IPRO)	1 Lokus			1 Lokus	14.425.000,00						1 Lokus	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi</i>	8 dokumen			1 Dokumen	14.425.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha	2 dokumen	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi</i>				1 Dokumen	14.425.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Jumlah Kepeminatan Investasi</i>	14 buah			14 buah	29.310.000,00						14 buah	100.000.000,00	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal</i>	10 dokumen			1 dokumen	29.310.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha	2 dokumen	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi</i>				1 Dokumen	29.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	86,75 Skor			86,75 Skor	245.235.000,00						86,75 Skor	280.000.000,00	
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	<i>Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan usaha yang terlayani</i>	9.244 pelaku usaha/kegiatan usaha			910 Pelaku Usaha	245.235.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha	2131 pelaku usaha/kegiatan usaha	280.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				300 Pelaku Usaha	32.819.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				600 Pelaku Usaha	203.758.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		208.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			<i>Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha</i>				10 Kegiatan Usaha	8.658.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		22.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM	1036 kegiatan usaha			1036 kegiatan usaha	48.550.000,00						1036 kegiatan usaha	54.000.000,00	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	<i>Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal</i>	420 kegiatan 38 kali			35 Pelaku Usaha	48.550.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha	n/a kegiatan 38 kali	54.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal														
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>				50 Kegiatan usaha	36.546.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>				10 Kegiatan usaha	7.804.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>				20 Pelaku Usaha	4.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan</i>	90 Persen			90 Persen	66.611.900,00						90 Persen	70.000.000,00		
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	5 jenis			5 Jenis	66.611.900,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha	5 jenis	70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik															
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>				5 Dokumen	66.611.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1.200.000.000,00							1.500.000.000,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Jumlah Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif</i>	-			3 Mitra KSLN	1.200.000.000,00						-	1.500.000.000,00		
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	<i>Jumlah kerja sama</i>	-			1 Kerja sama	1.200.000.000,00				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Usaha, Mitra Luar Negeri, dan Lintas OPD	-	1.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.22.08.5.09.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya</i>				1 Laporan	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Usaha, Mitra Luar Negeri, dan Lintas OPD		1.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
J U M L A H								12.792.269.842,00							13.174.391.959,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEBUDAYAAN						394.443.910.710,00							913.372.974.718,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						394.443.910.710,00							913.372.974.718,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						394.443.910.710,00							913.372.974.718,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 angka			90 angka	29.857.044.516,00						90 angka	35.905.932.019,00	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen			5 dokumen	2.831.800,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-	6 dokumen	37.146.693,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		5.344.455,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		17.673.550,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	816.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		14.128.688,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %			100 %	27.401.135.716,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-	100 %	31.306.051.979,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2964 Orang/ Bulan	27.272.909.716,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		31.094.667.156,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	79.002.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		153.833.680,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	21.245.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		26.967.362,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	27.978.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		30.583.781,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %			100 %	36.145.800,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-	100 %	58.089.180,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	36.145.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		58.089.180,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %			100 %	116.173.200,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-	100 %	409.496.143,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	10.432.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		76.805.600,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	37.395.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		80.031.260,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	4.958.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.363.300,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	34.343.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		114.995.310,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	29.045.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		127.300.673,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	1.796.156.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	3.227.531.704,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		7.965.870,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	618.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		670.994.434,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.176.156.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.548.571.400,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	504.602.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	867.616.320,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	42.419.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		65.064.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				19 Unit	360.256.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		568.744.480,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				35 Unit	26.255.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		53.691.780,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	39.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		94.251.060,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				55 Unit	36.192.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		85.865.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman</i>	-			18 kegiatan	364.586.866.194,00						-	877.467.042.699,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah laporan pengelolaan sejarah, bahasa, sastra dan museum	-			23 laporan	14.650.200.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n kualitas SDM	kelompok seni budaya, museum, organisasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum	-	21.175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesenjajaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesenjajaran				6 Dokumen	3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n kualitas SDM	kelompok seni budaya, museum, organisasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		6.655.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra</i>				8 Laporan	6.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan kualitas SDM	kelompok seni budaya, museum, organisasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		8.470.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman														
			<i>Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola</i>				40 Unit	5.050.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan kualitas SDM	kelompok seni budaya, museum, organisasi penggiat budaya, pelajar, masyarakat umum		6.050.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	-			266 Objek	25.403.102.444,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n kualitas SDM	penggiat budaya & komunitas, pelajar, akademisi, dan peneliti, masyarakat	-	36.952.221.944,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.04.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya														
			Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				15 Objek	14.430.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n kualitas SDM	penggiat budaya & komunitas, pelajar, akademisi, dan peneliti, masyarakat		19.275.300.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.04.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan</i>				6 Objek	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n kualitas SDM	penggiat budaya & komunitas, pelajar, akademisi, dan peneliti, masyarakat		8.470.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia														
			<i>Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi</i>				10 Objek	5.973.102.444,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkata n kualitas SDM	penggiat budaya & komunitas, pelajar, akademisi, dan peneliti, masyarakat		9.206.921.944,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	<i>Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lembaga budaya</i>	-			202 unit	13.231.642.550,00			-	Peningkata n kualitas SDM	komunitas budaya, pelaku usaha kreatif & pariwisata, pelajar, akademisi, & peneliti, masyarakat	-	15.962.804.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya</i>				12 Unit	958.422.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkata n kualitas SDM	komunitas budaya, pelaku usaha kreatif & pariwisata, pelajar, akademisi, & peneliti, masyarakat		1.454.904.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.06.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				190 Unit	12.273.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	komunitas budaya, pelaku usaha kreatif & pariwisata, pelajar, akademisi, & peneliti, masyarakat		14.507.900.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.07	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kemitraan Jumlah Kab/Kota Penerima BKK keistimewaan Urusan Kebudayaan	-			21 dokumen 5 kab/kota	5.891.442.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	-	486.702.616.955,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.07.0001	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan				3 Dokumen	714.442.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	-		478.353.616.955,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.07.0002	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan *****)				4 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	-		484.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.07.0003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya														
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya				14 Dokumen	4.727.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	-		7.865.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Fasilitasi adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya	-			13 kegiatan	305.410.479.200,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	-	316.674.399.800,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya														
			Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan				100 Desa	19.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	-		41.804.749.800,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni														
			Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				11 Lembaga	5.625.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	-		8.470.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				1 Laporan	1.982.091.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	-		4.840.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.09.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan					38 Orang	2.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	-		3.025.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta					1 Laporan	4.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	-		6.050.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0006	Gelar Budaya Yogyakarta					10 Laporan	7.550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	-		10.890.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah					7 Dokumen	5.823.388.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		7.096.650.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi					340 Orang	2.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	-		3.388.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat					14 Laporan	6.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	-		12.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0010	Selendang Sutera					1 Laporan	2.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	-		2.420.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0011	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Even Pnggiat Seni</i>				2 Laporan	7.530.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	-		9.075.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0014	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya														
			<i>Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya</i>				2 Laporan	237.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	-		203.885.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.09.0015	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi														
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi</i>				7 Laporan	2.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	-		3.630.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
		MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO						25.204.605.400,00							38.944.587.597,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						25.204.605.400,00							38.944.587.597,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						25.204.605.400,00							38.944.587.597,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	90 angka		90 angka	4.310.834.400,00						90 angka	6.537.077.707,00	
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	12.040.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	65.928.720,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12.040.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		65.928.720,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	20.490.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	33.370.380,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	20.490.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		33.370.380,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	201.286.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	710.790.274,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	8.382.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		69.372.800,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	87.442.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		226.175.300,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	22.568.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		46.634.849,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	23.040.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		36.799.488,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	7.090.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		65.389.490,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1.764.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		11.817.000,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				7 Laporan	51.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		254.601.347,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	3.978.458.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	5.474.292.913,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		9.655.600,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.629.661.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.811.684.973,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	2.347.797.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.652.952.340,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	98.558.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	252.695.420,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	33.521.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		67.351.320,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				26 Unit	11.837.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		63.166.800,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	53.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		122.177.300,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
2.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	-			10 % 100 % 17 % 18 kegiatan 40 desa 8 % baik indeks sangat baik indeks	20.893.771.000,00						-	32.407.509.890,00	
	2.22.08.5.03	Penguatan Museum Sonobudoyo	<i>Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan Museum Sonobudoyo</i>	-			2 laporan	20.893.771.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	-	-	32.407.509.890,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan Museum Sonobudoyo														
			<i>Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikelola</i>				1 Unit	5.693.771.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	-		7.407.509.890,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.03.0002	Pengembangan Museum Sonobudoyo														
			<i>Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikembangkan</i>				1 Unit	15.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	-		25.000.000.000,00	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO
		TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA						21.173.419.700,00						31.487.162.327,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						21.173.419.700,00							31.487.162.327,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						21.173.419.700,00							31.487.162.327,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	90 angka			90 angka	1.889.086.700,00						90 angka	3.874.456.184,00	
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	9.865.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	57.687.630,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	9.865.800,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		57.687.630,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	20.465.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	33.370.380,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	20.465.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		33.370.380,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	52.890.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	358.463.081,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	9.862.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		101.581.600,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4 Paket	9.537.900,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		45.235.060,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket	3.424.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		7.124.769,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	5.769.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		45.096.200,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					1 Dokumen	1.764.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		10.908.000,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	22.534.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		148.517.452,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			100 %	1.706.390.000,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-	100 %	3.138.974.833,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.500.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.517.530,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	311.030.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		838.743.043,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.393.860.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.293.714.260,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	99.475.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	285.960.260,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	71.322.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		112.252.200,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				14 Unit	4.598.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		41.058.420,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	23.555.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		132.649.640,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo</i>	-			10 % 100 % 17 % 18 kegiatan 40 desa 8 % baik indeks sangat baik indeks	19.284.333.000,00						-	27.612.706.143,00	
	2.22.08.5.05	Pengelolaan Taman Budaya	<i>Jumlah Event Budaya Tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta selama satu tahun</i>	-			13 event	19.284.333.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	Pelaku seni, budayawan, dan masyarakat	-	27.612.706.143,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
	2.22.08.5.05.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta														
			<i>Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan</i>				1 Objek	19.284.333.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM	Pelaku seni, budayawan, dan masyarakat		27.612.706.143,00	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA
J U M L A H								440.821.935.810,00						983.804.724.642,00		

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH						32.713.185.868,00						45.515.144.879,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						32.713.185.868,00							45.515.144.879,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						13.278.000.400,00							13.278.000.400,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi</i>	-			3000 dokumen	13.278.000.400,00						-	13.278.000.400,00	
	2.22.08.5.02	Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	<i>Jumlah jenis layanan perlindungan dan konservasi</i>	-			2 jenis	13.278.000.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY	-	13.278.000.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.22.08.5.02.0002	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten</i>				60000 Dokumen	7.864.000.400,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		7.864.000.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.22.08.5.02.0003	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya														
			<i>Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya</i>				65350 Unit	5.414.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		5.414.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						19.063.785.968,00							31.617.144.479,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	91 angka			91 angka	18.429.811.568,00						91 angka	22.709.509.679,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja</i>	10 Dokumen 7 Dokumen			N/A Dokumen 10 Dokumen	8.270.000,00			-	-	DPAD DIY	10 Dokumen N/A Dokume n	14.768.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	2.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		4.768.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				4 Dokumen	2.955.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	3.280.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>jumlah laporan administrasi keuangan</i>	14 laporan			14 laporan	15.375.118.968,00			-	-	DPAD DIY	14 laporan	16.130.465.879,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				100 Orang/ Bulan	15.355.702.068,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		16.078.049.879,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12.174.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		41.416.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	2.360.700,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	4.882.200,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku	4 laporan			4 laporan	22.606.000,00			-	-	DPAD DIY	4 laporan	22.775.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	22.606.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		22.775.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	4 Dokumen			4 Dokumen	900.000,00			-	-	DPAD DIY	4 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	900.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah	6 jenis			5 jenis	70.948.600,00			-	-	DPAD DIY	6 jenis	130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.100.400,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	6.747.200,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	922.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.391.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	57.788.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 unit			4 unit	8.260.000,00			-	-	DPAD DIY	4 unit	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	8.260.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis			3 jenis	2.794.895.000,00			-	-	DPAD DIY	3 jenis	6.001.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		1.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	1.277.100.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		1.500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1.517.295.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		4.500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	16 unit			16 unit	148.813.000,00			-	-	DPAD DIY	16 unit	400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	75.718.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	4.465.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	48.630.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPAD DIY		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	<i>persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan</i>	57 perpustakaan 15 perpustakaan 16 %			15 % 51 perpustakaan N/A perpustakaan	603.812.700,00						57 perpustakaan N/A perpustakaan 16 %	8.882.634.800,00	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah perpustakaan ber-SNP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i>	575 perpustakaan 50 perpustakaan			565 perpustakaan N/A perpustakaan	321.248.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY	575 perpustakaan N/A perpustakaan	350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya</i>				1 Perpustakaan	92.273.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			<i>Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i>				8 Perpustakaan	24.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi</i>				50 Orang	43.855.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit														
			<i>Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan</i>				1 Perpustakaan	1.225.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan</i>				400 Eksemplar	156.895.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan</i>				5 Perpustakaan	3.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat jumlah sosialisasi budaya baca	48 kali 48 kali			48 kali N/A kali	282.564.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY	N/A kali 48 kali	8.532.634.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				5 Lokus	180.595.400,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		8.377.634.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca</i>				3 Orang	1.575.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan</i>				8 Perpustakaan	100.394.300,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	<i>Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan</i>	2535 eksemplar			2525 eksemplar N/A eksemplar	30.161.700,00						2535 eksemplar	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	<i>jumlah karya cetak dan karya rekam baru Jumlah KCKR daerah yang dihimpun</i>	2500 eksemplar 2.500 eksemplar			N/A eksemplar 2.500 eksemplar	19.687.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY	N/A eksemplar 2.500 eksemplar	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam														
			<i>Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR</i>				500 Eksemplar	19.687.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	<i>jumlah judul yang tercantum dalam KID</i> <i>jumlah katalog induk daerah dan bibliografi daerah</i>	2500 entri 6 terbitan			2500 entri N/A terbitan	9.144.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY	2500 entri N/A terbitan	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan</i>				500 Entry	6.891.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan</i>				1 Naskah	2.253.700,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	<i>jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan terdaftar</i>	10 eksemplar			10 eksemplar	1.330.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY	10 eksemplar	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi</i>				4 Eksemplar	1.330.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						371.399.500,00							620.000.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	<i>Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip</i>	8000 Arsip nilai : 97,5 angka			n/a Arsip N/A arsip nilai : 97,5 angka	371.399.500,00						n/a Arsip nilai : 97,5 angka	620.000.000,00	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	<i>persentase arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip</i>	43 %			42 %	230.789.950,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY	43 %	295.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan</i>				4000 Arsip	42.030.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis														
			<i>Jumlah Daftar Arsip Dinamis</i>				1000 Arsip	13.000.050,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi														
			<i>Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan</i>				37 Lembaga	175.759.900,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		210.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	<i>persentase arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip</i>	44 %			43 %	65.219.750,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY	44 %	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.02.0006	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis														
			<i>jumlah arsip yang di akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi</i>				20000 Arsip	65.219.750,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	<i>Persentase arsip yang telah dimasukkan SIKN melalui JIKN</i>	21 %			20 %	75.389.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY	21 %	225.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN</i>				750 Pengguna	31.910.800,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi</i>				2 Laporan	43.479.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN						2.285.847.000,00							2.553.190.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.285.847.000,00							2.553.190.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						2.285.847.000,00							2.553.190.000,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	91 angka			91 angka	1.610.577.550,00						91 angka	1.138.190.000,00	
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>jumlah laporan administrasi keuangan</i>	14 laporan			14 laporan	11.391.000,00			-	-	Balai Layanan Perpustakaan	14 laporan	40.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	11.391.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		40.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan pengelolaan barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku</i>	4 laporan			4 laporan	15.018.500,00			-	-	Balai Layanan Perpustakaan	4 laporan	20.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					4 Laporan	15.018.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		20.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah	6 jenis			6 jenis	23.066.500,00			-	-	Balai Layanan Perpustakaan	6 jenis	174.500.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	12.983.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		20.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3 Paket	2.815.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		19.500.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket	2.853.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		20.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	815.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		10.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	3.600.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		105.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis			3 jenis	1.214.900.000,00			-	-	Balai Layanan Perpustakaan	3 jenis	16.450.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	500.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		500.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	1.200.000.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		1.550.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	14.400.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		14.400.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	16 unit			16 unit	346.201.550,00			-	-	Balai Layanan Perpustakaan	16 unit	887.240.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				11 Unit	63.071.550,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		250.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				13 Unit	4.678.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		25.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	85.478.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		250.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	137.840.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		162.240.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				6 Unit	55.134.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Balai Layanan Perpustakaan		200.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	<i>persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan</i>	57 perpustakaan 15 perpustakaan 16 %			15 % 51 perpustakaan N/A perpustakaan	665.341.450,00						57 perpustakaan N/A perpustakaan 16 %	1.115.000.000,00	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah perpustakaan ber-SNP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i>	575 perpustakaan 50 perpustakaan			565 perpustakaan N/A perpustakaan	665.341.450,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Balai Layanan Perpustakaan	575 perpustakaan N/A perpustakaan	1.115.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi</i>				1 Layanan	537.289.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Balai Layanan Perpustakaan		955.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			<i>Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK</i>				1 Perpustakaan	128.051.650,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	Balai Layanan Perpustakaan		160.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	<i>Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan</i>	2535 eksemplar			2525 eksemplar N/A eksemplar	9.928.000,00						2535 eksemplar	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	<i>jumlah Bahan pustaka yang dilestarikan jumlah naskah kuno dan bahan pustaka yang dirawat dan dilestarikan</i>	800 lembar 50 eksemplar			N/A eksemplar 700 lembar	9.928.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Balai Layanan Perpustakaan	800 lembar N/A eksemplar	300.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			<i>Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan</i>				10 Eksemplar	4.520.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Balai Layanan Perpustakaan		10.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno</i>				50 Orang	5.408.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM	Balai Layanan Perpustakaan		290.000.000,00	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
J U M L A H								34.999.032.868,00							48.068.334.879,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						43.402.988.538,00								0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						726.024.000,00								0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						726.024.000,00								0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	<i>Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan (%) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (persen)</i>	100,0 % 46,11 %				726.024.000,00						100,0 % N/A %		0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	<i>Terlaksananya kegiatan pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (100%)</i>	-			100 %	726.024.000,00				-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan															
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan</i>				2 Dokumen	726.024.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	-			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						20.161.047.900,00								0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						20.161.047.900,00								0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik Persentase desa maritim dalam tahap mandiri Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)</i>	-			100 % 35 % 43 % 60 % n/a %	20.161.047.900,00						-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan (%)	-			100 %	10.500.000.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				228 Unit	10.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya (tahun)	-			1 Tahun	9.661.047.900,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.08.0005	Pengembangan Budaya Bahari														
			Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan				4 Objek	9.661.047.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						22.515.916.638,00							0,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						22.515.916.638,00							0,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,00 skor			89,00 skor	22.009.207.238,00						89,00 skor	0,00	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100 %			100 %	39.621.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	19.060.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	4.578.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	4.578.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	3.305.200,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	8.100.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	100 %			100 %	18.613.759.138,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				152 Orang/Bulan	18.575.817.138,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	14.400.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	5.854.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	17.688.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)</i>	100 %			100 %	13.200.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	13.200.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "</i>	100 %			100 %	321.253.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	26.996.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				47 Paket	52.539.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				22 Paket	40.857.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.541.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	34.831.400,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4.320.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	157.169.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"	100 %			100 %	2.123.511.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	793.347.700,00	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				36 Laporan	1.324.164.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>"Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"</i>	100 %			100 %	897.861.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	74.004.300,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				46 Unit	647.265.500,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				61 Unit	41.617.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	80.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				59 Unit	54.975.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	"Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%)" "Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%)"	33 % 100 %			92 % N/A %	19.880.000,00						N/A % 100 %	0,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	<i>Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi (lokasi)</i>	3 lokasi			3 lokasi	19.880.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-	3 lokasi	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			<i>Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola</i>				5822,92 Ha	15.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			<i>Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil</i>				90 Orang	4.880.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	<i>Produksi perikanan tangkap (ton)</i> <i>Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)</i>	7754 ton 83,00 skor			7341 ton 82,00 skor	50.931.000,00						7754 ton 83,00 skor	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	<i>Terfasilitasinya rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT (rekomendasi)</i>	10 angka			10 angka	26.866.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	10 angka	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil														
			<i>Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil</i>				100 Persentase	26.866.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	<i>"Terfasilitasinya kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (kapal) "</i>	2 angka			2 angka	24.065.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	2 angka	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)														
			<i>Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan</i>				1 Rekomendasi	24.065.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	<i>Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)</i> <i>Produksi perikanan budidaya (ton)</i> <i>produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton)</i>	9 ton 35,42 % 98200 ton			35,02 % 97813 ton 9 ton	95.600.000,00						9 ton 35,42 % 98200 ton	0,00	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)</i>	5 angka			5 angka	10.000.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	5 angka	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan</i>				2 Rekomendasi	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	<i>Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)</i>	5 angka			5 angka	85.600.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	5 angka	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Unit	85.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	<i>Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)</i>	76 %			76 %	113.968.000,00						76 %	0,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	<i>Terawasinya sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil</i>	1 tahun			1 tahun	103.803.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	1 tahun	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi														
			<i>Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>				3 Pelaku Usaha	98.288.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														
			<i>Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan</i>				5 Kelompok Masyarakat	5.515.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>"Terawasinya sumberdaya perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya "</i>	1 tahun			1 tahun	10.165.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	1 tahun	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>				3 Pelaku Usaha	4.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi														
			<i>Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>				1 Pelaku Usaha	5.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	"Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "	34,87 Kg/KAP/TH			34,87 Kg/KAP/TH	226.330.400,00						34,87 Kg/KAP/TH	0,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Terlaksananya kegiatan pembinaan standarisasi tata cara usaha, penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pendataan pada Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	1 tahun			1 tahun	15.532.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	1 tahun	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar														
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar</i>				5 Rekomendasi	15.532.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	<i>"Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan (dokumen) "</i>	3 dokumen			3 dokumen	202.945.400,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	3 dokumen	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing														
			<i>Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing</i>				3 Kegiatan	99.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko</i>				2 Kegiatan	103.045.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>"Terfasilitasinya pelaku usaha kelautan dan perikanan"</i>	1 tahun			1 tahun	7.853.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	1 tahun	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi</i>				1 Unit Usaha	7.853.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA						4.727.109.500,00								0,00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.727.109.500,00							0,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						4.727.109.500,00							0,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)</i>	89,00 skor			89,00 skor	1.930.709.500,00						89,00 skor	0,00	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</i>	100 %			100 %	16.820.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	8.820.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	6.000.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)</i>	100 %			100 %	13.530.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	330.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	13.200.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "</i>	100 %			100 %	69.677.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	8.294.600,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				20 Paket	9.771.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				21 Paket	6.383.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	800.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				10 Paket	14.900.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1.029.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	28.500.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>"Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"</i>	100 %			100 %	1.650.524.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	604.960.900,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				36 Laporan	1.044.564.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>"Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"</i>	100 %			100 %	180.157.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				19 Unit	156.738.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	16.979.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				14 Unit	6.440.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%) Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton)	9 ton 35,42 % 98200 ton			35,02 % 97813 ton 9 ton	2.796.400.000,00						9 ton 35,42 % 98200 ton	0,00	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terkelolanya benih perikanan budidaya (kabupaten/kota)	5 angka			5 angka	46.400.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	5 angka	0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia				1 Unit	46.400.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)	5 angka			5 angka	2.750.000.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	5 angka	0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				7 Unit	2.750.000.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI						2.178.563.500,00								0,00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.178.563.500,00							0,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						2.178.563.500,00							0,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	89,00 skor			89,00 skor	2.131.023.500,00						89,00 skor	0,00	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100 %			100 %	13.255.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	7.260.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	1.000.500,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	4.995.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)</i>	100 %			100 %	15.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "</i>	100 %			100 %	74.860.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	11.561.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				22 Paket	12.678.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				14 Paket	8.072.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	400.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				14 Paket	11.993.400,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	2.556.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	27.600.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>"Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"</i>	100 %			100 %	1.847.562.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				13 Laporan	536.050.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu Kab. Kulon Progo, Wates, Karangwuni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				36 Laporan	1.309.512.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu Kab. Kulon Progo, Wates, Karangwuni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>"Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"</i>	100 %			100 %	180.345.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				9 Unit	99.053.600,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				28 Unit	21.436.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				22 Unit	9.856.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	<i>Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)</i>	7754 ton 83,00 skor			7341 ton 82,00 skor	47.540.000,00						7754 ton 83,00 skor	0,00	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	<i>Lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan (lokasi)</i>	3 angka			3 angka	47.540.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	3 angka	0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
			<i>Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana</i>				12 Layanan	47.540.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
J U M L A H								50.308.661.538,00							0,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PARIWISATA PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PARIWISATA						69.321.125.798,00							40.726.087.943,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						30.000.000.000,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						30.000.000.000,00							0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	<i>Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan</i>	9 kawasan			7 kawasan 7 kawasan	30.000.000.000,00						9 kawasan	0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-			-	30.000.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis</i>				1 Dokumen	30.000.000.000,00	Kab. Sleman, Tempel, Lumbungrejo	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						25.098.560.500,00							25.000.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						25.098.560.500,00							25.000.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)</i>	-			9.607.130 orang	25.098.560.500,00						-	25.000.000.000,00	
	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	-	-			-	1.600.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi</i>				1 Objek	1.600.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya</i>	-			1 Unit	762.560.500,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya</i>				1 Unit	762.560.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	-	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	<i>Jumlah pengunjung event/ atraksi wisata dan budaya unggulan DIY dan difasilitasi oleh Pemda DIY Jumlah usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan pelayanan mengenai kekayaan intelektual</i>	-			850.000 Orang 517 Angka	18.184.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	-	20.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.08.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan</i>				147 Objek	18.184.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		20.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	<i>Jumlah Desa /Kampung Wisata yang naik kelas dari klasifikasi berkembang ke maju dan dari klasifikasi maju ke mandiri</i>	-			7 Lokasi	4.552.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	-	5.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.09.0018	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan</i>				255 Lembaga	4.552.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		5.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						14.222.565.298,00							15.726.087.943,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						14.222.565.298,00							15.726.087.943,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	91,04 skor			91,04 skor	13.115.601.948,00						91,04 skor	13.870.544.943,00	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	36.599.850,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata	100 %	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	7.599.850,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	10.749.033.255,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata	100 %	11.038.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				79 Orang/Bulan	10.715.268.405,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		11.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	12.840.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	2.999.850,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		3.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	17.925.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	42.144.943,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata	100 %	48.544.943,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	8.544.943,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		8.544.943,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	33.600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		40.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	200.981.100,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata	100 %	269.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	18.098.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	18.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	17.993.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	10.000.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					2 Dokumen	3.528.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		4.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	125.875.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		180.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	7.487.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %			100 %	13.100.000,00			-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata	100 %	110.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2 Unit	4.140.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	8.960.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	1.511.880.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata	100 %	1.705.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	3.400.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		5.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				5 Laporan	403.700.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	1.104.780.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		1.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	561.862.800,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata	100 %	650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	38.996.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		40.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	231.942.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				42 Unit	18.080.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				22 Unit	16.774.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	158.760.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				58 Unit	97.310.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	<i>Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)</i> <i>Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)</i>	24,632,000 Orang n/a UJP n/a Orang 1660 UJP			22,342,000 Orang 330 UJP	456.468.100,00						24,632,000 Orang n/a UJP n/a Orang 360 UJP	650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	<i>Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan Daya tarik Wisata Provinsi</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	350.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	2 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi</i>				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah UJP yang dipantau dan dibina Jumlah usaha dari UJP yang terfasilitasi sertifikasi standar usaha</i>	25 Usaha 460 Usaha			100 Usaha 5 Usaha	106.468.100,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	5 Usaha 100 Usaha	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)</i>				50 Unit Usaha	84.072.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0013	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata														
			<i>Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha</i>				1 Laporan	22.395.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	<i>Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n</i>	300.000 Orang 10.000.000 Orang n/a Orang			7.700.000 Orang 95.000 Orang	273.999.750,00						300.000 Orang 10.000.000 Orang n/a Orang	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah follower dan subscriber media sosial Dinas Pariwisata DIY dan visitingjogja Jumlah Kemitraan Promosi pariwisata Jumlah pengunjung pameran yang diikuti dispar Jumlah pengunjung TIC Jumlah transaksi B2B	900 Orang 13 Dokumen 9000 Orang 8000 Orang 40 Milyar Rp			7000 Orang 3 Dokumen 600 Orang 7000 Orang 25 Milyar Rp	273.999.750,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	800 Orang 3 Dokumen 9000 Orang 8000 Orang 35 Milyar Rp	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	273.999.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)	80 Orang			80 Orang	226.495.800,00						80 Orang	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	<i>Jumlah Pelaku Usaha Ekraf yang difasilitasi pengembangannya</i>	400 Orang			100 Orang	51.495.950,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	100 Orang	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar</i>				1 Laporan	51.495.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPPKI</i>	90 Nilai			89,89 Nilai	174.999.850,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	90 Nilai	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0016	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah</i>				2 Dokumen	134.999.850,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	<i>Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)</i>	4.856 Orang			4.856 Orang	149.999.700,00						4.856 Orang	505.543.000,00	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	<i>Jumlah SDM Pariwisata yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang pariwisata Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih kompetensi bidang pariwisata</i>	1875 Orang 2750 Orang			350 Orang 500 Orang	50.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	500 Orang 650 Orang	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	<i>Jumlah Pelaku Ekraf yang dilatih Jumlah SDM yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang Ekraf</i>	400 Orang 360 Orang			90 Orang 100 orang	99.999.700,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata	100 Orang 120 Orang	455.543.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>				104 Orang	99.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Dinas Pariwisata		455.543.000,00	DINAS PARIWISATA
J U M L A H								69.321.125.798,00							40.726.087.943,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						63.636.789.578,00							58.179.121.439,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						696.736.000,00							0,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						696.736.000,00							0,00		
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	<i>Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten</i>	329 Ha				696.736.000,00						329 Ha	0,00		
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	<i>Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian</i>	-				4 Satuan Ruang Strategis	696.736.000,00			-	-	Kelompok tani kakao, pelaku usaha kakao/cokelat, pelajar, masyarakat, kelompok tani kopi	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu															
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu</i>					1 Dokumen	522.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	Kelompok tani kakao, pelaku usaha kakao/cokelat, pelajar, masyarakat, kelompok tani kopi		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi															
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis</i>					1 Dokumen	174.736.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	Kelompok tani kakao, pelaku usaha kakao/cokelat, pelajar, masyarakat, kelompok tani kopi		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.313.968.100,00							493.390.000,00		
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						469.904.300,00							493.390.000,00		
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	<i>Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)</i>	2,137 Kkal/ Kapita/Hari 3,734 Kkal/ Kapita/Hari				2,141 Kkal/K apita/Hari 3,734 Kkal/K apita/Hari	358.280.000,00					2,137 Kkal/ Kapita/Hari 3,734 Kkal/ Kapita/Hari	376.190.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<i>Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya</i>	1 Tahun			1 Tahun	272.177.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kios Pangan, LDPM/PUPM, tim penyusun NBM, masyarakat	1 Tahun	285.780.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>				1 Laporan	146.177.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kios Pangan, LDPM/PUPM, tim penyusun NBM, masyarakat		153.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi														
			<i>Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi</i>				2 Laporan	100.972.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kios Pangan, LDPM/PUPM, tim penyusun NBM, masyarakat		106.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			<i>Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)</i>				1 Dokumen	25.028.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kios Pangan, LDPM/PUPM, tim penyusun NBM, masyarakat		26.280.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	-	10,6 kg/kapita/tahun			-	86.103.000,00			-	-	-	10,6 kg/kapita/tahun	90.410.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			<i>Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>				1 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57.750.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun</i>				1 Laporan	31.103.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		32.660.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	<i>Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)</i>	95,45 %			95,45 %	20.000.000,00						95,45 %	21.000.000,00	
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	<i>Penanganan Kerawanan Pangan</i>	5 Kabupaten /Kota			5 Kabupaten/ Kota	20.000.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat, Kapanewon, para pihak terkait pengentasan kerawanan pangan	5 Kabupaten /Kota	21.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi														
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Masyarakat, Kapanewon, para pihak terkait pengentasan kerawanan pangan		21.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	80,24 %			80,24 %	91.624.300,00						80,24 %	96.200.000,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar</i>	5 Kabupaten /Kota			5 Kabupaten/ Kota	91.624.300,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OKKPD DIY, pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan, pedagang, masyarakat	5 Kabupaten /Kota	96.200.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														
			<i>Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>				4 Sertifikat	28.441.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OKKPD DIY, pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan, pedagang, masyarakat		29.860.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan</i>				1 Dokumen	16.958.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OKKPD DIY, pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan, pedagang, masyarakat		17.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			<i>Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>				1 Dokumen	36.624.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OKKPD DIY, pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan, pedagang, masyarakat		38.460.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			<i>Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>				1 Dokumen	9.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OKKPD DIY, pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan, pedagang, masyarakat		10.080.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						79.000.000,00							0,00	
1.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	-	-			-	79.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-	-			-	79.000.000,00			-	-	Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten														
			<i>Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten</i>				1 Dokumen	79.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						7.765.063.800,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	7.765.063.800,00						-	0,00	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	-	-			-	3.500.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya</i>				2 Unit	3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	<i>Jumlah pengetahuan dan teknologi tradisional pertanian yang dilestarikan</i>	-			5 Jenis	4.265.063.800,00			-	-	Kelompok tani, KWT, kelompok lumbung, gapoktan, pelaku usaha pangan lokal, masyarakat	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman</i>				15 Laporan	4.265.063.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	Kelompok tani, KWT, kelompok lumbung, gapoktan, pelaku usaha pangan lokal, masyarakat		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						54.626.085.478,00							57.685.731.439,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						54.626.085.478,00							57.685.731.439,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	90,1 Angka			90,1 Angka	51.053.188.578,00						90,1 Angka	53.607.995.439,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat</i>	100 %			100 %	55.039.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPKP DIY	100 %	57.785.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	17.843.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPKP DIY		18.730.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				4 Dokumen	16.201.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPKP DIY		17.011.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	20.995.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		22.044.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	46.182.124.228,00			-	-	DPKP DIY	100 %	48.493.373.439,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				321 Orang/Bulan	46.151.784.228,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		48.459.373.439,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	14.340.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		17.200.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	16.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		16.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	63.600.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPKP DIY	100 %	66.780.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	63.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPKP DIY		66.780.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	10.316.600,00			-	-	DPKP DIY	100 %	10.832.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	10.316.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		10.832.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	109.136.350,00			-	-	DPKP DIY	100 %	114.590.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	21.885.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		22.980.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	26.141.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		27.448.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	15.229.150,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		15.990.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	8.916.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		9.360.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	36.964.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		38.812.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</i>	100 %			100 %	22.950.000,00			-	-	DPKP DIY	100 %	24.097.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	22.950.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		24.097.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	3.783.555.000,00			-	-	DPKP DIY	100 %	3.972.748.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		630.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	969.207.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		1.017.668.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	2.813.748.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		2.954.450.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	100 %			100 %	826.466.900,00			-	-	DPKP DIY	100 %	867.790.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	72.082.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		75.686.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				136 Unit	594.830.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		624.572.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				28 Unit	68.978.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		72.427.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	5.064.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		5.317.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				119 Unit	85.512.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DPKP DIY		89.788.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	238.088.000,00						-	461.500.000,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	4 Kabupaten 4 Kabupaten			-	138.088.000,00			-	-	Kelompok tani, KWT, gapoktan, pelaku usaha, masyarakat	4 Kabupaten 4 Kabupaten	356.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			<i>Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian</i>				1 Laporan	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok tani, KWT, gapoktan, pelaku usaha, masyarakat		211.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian														
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</i>				5 Dokumen	137.788.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok tani, KWT, gapoktan, pelaku usaha, masyarakat		144.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan peternakan</i>	942 Kelomp ok 355 Ekor 355 Ekor			186 Kelompok	100.000.000,00			-	-	Kelompok ternak, kelompok tani, KWT, gapoktan	187 Kelomp ok 75 Ekor 75 Ekor	105.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>				3 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok ternak, kelompok tani, KWT, gapoktan		105.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan	10 %			10 %	16.708.000,00						10 %	138.389.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian</i>	4 Kabupaten 4 Kabupaten			4 Kabupaten	16.708.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kelompok tani, KWT, gapoktan	4 Kabupaten 4 Kabupaten	138.389.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani</i>				1 Dokumen	16.408.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kelompok tani, KWT, gapoktan		17.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
			<i>Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan</i>				0,01 Ha	300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Kelompok tani, KWT, gapoktan		121.139.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	<i>Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)</i>	6,22 %			6,22 %	694.101.900,00						6,22 %	722.615.000,00	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular</i>	5 Kabupaten /Kota 5 Kabupaten /Kota			5 Kabupaten/ Kota	60.611.400,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	5 Kabupaten /Kota 5 Kabupaten /Kota	63.650.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			<i>Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali</i>				1 Laporan	60.611.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		63.650.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	<i>Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah</i>	5 Kabupaten /Kota 5 Kabupaten /Kota			5 Kabupaten/ Kota	627.600.500,00			-	-	Peternak, pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH), jagal/petugas penyembelih hewan kurban, Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT), masyarakat,	5 Kabupaten /Kota 5 Kabupaten /Kota	658.965.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM														
			<i>Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM</i>				1 Laporan	621.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Peternak, pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH), jagal/petugas penyembelih hewan kurban, Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT), masyarakat,		652.565.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan														
			<i>Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan</i>				1 Laporan	6.110.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Peternak, pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH), jagal/petugas penyembelih hewan kurban, Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT), masyarakat,		6.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	<i>Penjaminan Mutu dan Kesejahteraan Hewan</i>	5 Kabupaten /Kota 5 Kabupaten /Kota			5 Kabupaten/ Kota	5.890.000,00			-	-	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)	5 Kabupaten /Kota 5 Kabupaten /Kota	0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)														
			<i>Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)</i>				2 Sertifikat	5.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%)	58,40% %			58,40% %	100.000.000,00						58,40% %	105.000.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terwujudnya pertanian aman dari serangan OPT dan DPI untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	3 Sub sektor 3 Sub sektor			3 Sub sektor	100.000.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-	3 Sub sektor 3 Sub sektor	105.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				300 Ha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		105.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)	64 % %			64 % %	2.523.999.000,00						64 % %	2.650.232.000,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	5 Kabupaten /Kota 68 %			64 %	36.000.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM	Penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian swadaya	5 Kabupaten /Kota 68 %	37.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				30 Orang	36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian swadaya		37.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	5 Kabupaten /Kota 5 Kabupaten /Kota			5 Kabupaten/ Kota	2.487.999.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Penyuluh ASN, penyuluh swadaya, Jogja Agro Park (JAP)	5 Kabupaten /Kota 5 Kabupaten /Kota	2.612.432.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1 Dokumen	2.472.159.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Penyuluh ASN, penyuluh swadaya, Jogja Agro Park (JAP)		2.595.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan</i>				45 Kelompok	15.840.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Panggunharjo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Penyuluh ASN, penyuluh swadaya, Jogja Agro Park (JAP)		16.632.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN								3.101.819.014,00							3.256.930.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.101.819.014,00							3.256.930.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						3.101.819.014,00							3.256.930.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	90,1 Angka			90,1 Angka	1.385.481.200,00						90,1 Angka	1.454.743.000,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	8.400.000,00			-	-	UPTD BP3MBTP	100 %	8.820.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	8.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		8.820.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya pengadministrasian barang milik daerah</i>	100 %			100 %	10.320.000,00			-	-	UPTD BP3MBTP	100 %	10.836.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	10.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		10.836.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	92.937.600,00			-	-	UPTD BP3MBTP	100 %	97.572.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	8.073.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		8.477.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	22.594.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		23.725.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	6.818.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		7.150.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	20.385.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		21.400.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	2.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		2.520.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	32.667.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		34.300.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang</i>	100 %			100 % 100 %	931.973.500,00			-	-	-	100 %	978.572.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		840.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	235.485.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		247.260.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	695.688.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		730.472.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>	100 %			100 %	341.850.100,00			-	-	UPTD BP3MBTP	100 %	358.943.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				43 Unit	250.105.100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		262.610.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				23 Unit	30.633.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		32.165.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		52.500.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				19 Unit	11.112.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BP3MBTP		11.668.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)	2,36 %			2,36 %	1.716.337.814,00						2,36 %	1.802.187.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5 Kabupaten /Kota 5 Kabupaten /Kota			5 Kabupaten/ Kota	1.716.337.814,00			-	-	Produsen, penangkar, dan penjual benih tanaman	5 Kabupaten /Kota 5 Kabupaten /Kota	1.802.187.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			Jumlah Sertifikat Benih				141 Sertifikat	85.837.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Produsen, penangkar, dan penjual benih tanaman		90.130.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				3 laporan	50.023.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Produsen, penangkar, dan penjual benih tanaman		52.525.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				35000 Batang	451.458.924,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Produsen, penangkar, dan penjual benih tanaman		474.032.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang														
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				10800 Batang	129.007.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Produsen, penangkar, dan penjual benih tanaman		135.500.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				82,9 Ton	1.000.010.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Produsen, penangkar, dan penjual benih tanaman		1.050.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN
		BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN						4.545.109.400,00							4.772.371.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.545.109.400,00							4.772.371.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						4.545.109.400,00							4.772.371.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,1 Angka			90,1 Angka	696.754.800,00						90,1 Angka	731.601.000,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %			100 %	8.400.000,00			-	-	UPTD BPPTDK	100 %	8.820.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	8.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		8.820.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %			100 %	13.200.000,00			-	-	UPTD BPPTDK	100 %	13.860.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	13.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		13.860.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %			100 %	76.339.400,00			-	-	UPTD BPPTDK	100 %	80.155.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.757.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		4.995.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		15.750.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.854.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		2.995.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	26.592.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		27.922.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	2.136.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		2.243.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Kab. Sleman, Pakem, Purwobinangun Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		26.250.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</i>	100 %			100 %	4.470.000,00			-	-	-	100 %	4.700.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	4.470.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.700.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	306.254.900,00			-	-	UPTD BPPTDK	100 %	321.570.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		1.050.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	158.638.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		166.570.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	146.616.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		153.950.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	288.090.500,00			-	-	UPTD BPPTDK	100 %	302.496.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				40 Unit	229.251.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		240.715.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				19 Unit	27.525.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		28.901.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	25.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		26.250.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				25 Unit	6.314.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK		6.630.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	93,50 %			93,50 %	3.300.000.000,00						93,50 %	3.465.000.000,00	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Terlaksananya sertifikasi dan terdistribusinya bibit ternak yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB ke masyarakat</i>	942 Kelomp ok 355 Ekor 355 Ekor			72 Ekor	3.300.000.000,00			-	-	UPTD BPPTDK, peternak, pelaku usaha, masyarakat	187 Kelomp ok 75 Ekor 75 Ekor	3.465.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>				3 laporan	3.300.000.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Kab. Sleman, Pakem, Purwobinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK, peternak, pelaku usaha, masyarakat		3.465.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)	6,22 %			6,22 %	548.354.600,00						6,22 %	575.770.000,00	
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	<i>Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	96220 Samp el 96220 Samp el			19265 Sampel	548.354.600,00			-	-	UPTD BPPTDK, peternak, pelaku usaha, masyarakat	20025 Samp el 20025 Samp el	575.770.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>				3 Dokumen	548.354.600,00	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	UPTD BPPTDK, peternak, pelaku usaha, masyarakat		575.770.000,00	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN
J U M L A H								71.283.717.992,00							66.208.422.439,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								41.090.904.090,00						58.833.500.000,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.538.397.000,00							1.700.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						1.538.397.000,00							1.700.000.000,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina	2 Sentra			2 Sentra	1.538.397.000,00						2 Sentra	1.700.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	-			2 Dokumen	1.538.397.000,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berdasar Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY	-	1.700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				1 Dokumen	327.629.000,00	Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berdasar Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengemba ngan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh</i>				1 Dokumen	1.210.768.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM DIY		1.300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						20.515.998.256,00							31.500.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						20.515.998.256,00							31.500.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Nilai Produksi IKM Industri Kreatif</i>	-			13,78 Triliun Rp N/A Rp	20.515.998.256,00						-	31.500.000.000,00	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	<i>Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</i>	-			100 %	1.000.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Disperindag DIY	-	1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya</i>				1 Unit	1.000.000.000,00	-	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Disperindag DIY		1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	-			6400 IKM	19.515.998.256,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM Produk Khas DIY	-	30.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif														
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				6300 Unit	19.515.998.256,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	IKM Produk Khas DIY		30.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						19.036.508.834,00							25.633.500.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						614.000.500,00							2.551.000.000,00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan Ekspor	575 Perusahaan			575 Perusahaan	30.000.000,00						575 Perusahaan	40.000.000,00	
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	99 %			96 %	30.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Eksportir DIY	99 %	40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				27500 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Eksportir DIY		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Inflasi Pangan Bergejolak	90 % N/A %			90 % N/A %	114.000.000,00						90 % N/A %	1.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah jenis barang yang dipantau	25 jenis			25 jenis	114.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY	25 jenis	1.400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	109.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	20 %			20 %	50.000.000,00						20 %	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	<i>Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang dibina</i>	2015 pelaku			50 pelaku	50.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Eksportir DIY	517 pelaku	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			<i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi</i>				20 Produk	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Eksportir DIY		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard</i> <i>Persentase penanganan sengketa konsumen</i>	97,5 % 99 % N/A %			96,5 % 97 %	210.000.500,00						97,5 % 99 % N/A %	561.000.000,00	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani</i>	125 Pengaduan			25 Pengaduan	200.000.500,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat/Konsumen DIY	15 Pengaduan	550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani</i>				25 Pengaduan	200.000.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat/Konsumen DIY		550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah jenis barang yang dipantau</i>	25 Pengaduan			25 Pengaduan	10.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat/Konsumen DIY	25 Pengaduan	11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat/Konsumen DIY		11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	<i>Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina</i>	2,65 Milyar Rp			2,65 Milyar Rp	210.000.000,00						2,65 Milyar Rp	300.000.000,00	
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaran P3DN</i>	65 IKM			55 IKM	210.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pelaku Usaha Industri dan Perdagangan DIY	65 IKM	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>				400 UMKM	210.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pelaku Usaha Industri dan Perdagangan DIY		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						18.422.508.334,00							23.082.500.000,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	85 Angka			85 Angka	18.291.051.134,00						85 Angka	20.970.500.000,00	
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</i>	100 %			100 %	30.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY	100 %	33.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		16.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	16.134.293.534,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY	100 %	19.072.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				137 Orang/ Bulan	16.062.237.534,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		19.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	32.056.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	20.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		7.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	58.052.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY	100 %	65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	58.052.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	135.252.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY	100 %	253.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			0				10	10.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	13.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	1.764.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	105.988.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %			100 %	88.236.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY	100 %	10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				6 Unit	80.636.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	7.600.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	1.477.703.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY	100 %	1.247.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	345.599.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		356.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.132.104.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		891.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksanannya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	367.013.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY	100 %	290.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	33.096.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				14 Unit	242.395.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		225.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				6 Unit	2.712.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				14 Unit	9.888.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	59.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				8 Unit	19.922.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Disperindag DIY		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG	89,50 % 41500 Orang			414000 Orang 86,50 %	109.999.950,00						89,50 % 41500 Orang	2.100.000.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>	3 Dokumen			3 Dokumen	109.999.950,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Disperindag DIY	3 Dokumen	2.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>				1 Dokumen	39.999.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Disperindag DIY		600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Disperindag DIY		1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	<i>Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin</i>	17,043 Perusahaan			17,043 Perusahaan	10.000.000,00						17,043 Perusahaan	11.000.000,00	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	<i>Persentase jumlah hasil pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait</i>	40 %			38 %	10.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pelaku Usaha Industri	40 %	11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi														
			<i>-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pelaku Usaha Industri		11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	<i>Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SINAS</i>	700 Perusahaan			700 Perusahaan	11.457.250,00						700 Perusahaan	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Perusahaan Industri yang mendapatkan pendampingan pengumpulan data SIINAS	925 Orang			200 Orang	11.457.250,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Disperindag DIY	200 Orang	1.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	11.457.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Disperindag DIY		1.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA						2.080.231.700,00							2.991.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.879.806.700,00							2.441.000.000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.879.806.700,00							2.441.000.000,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 Angka			85 Angka	1.680.131.700,00						85 Angka	1.916.000.000,00	
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %			100 %	9.240.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY	100 %	25.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	9.240.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY		25.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	10.320.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY	100 %	5.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	10.320.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY		5.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	24.730.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY	100 %	24.500.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	3.920.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY		1.500.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	325.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY		5.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	1.281.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY		5.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	4.325.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY		1.500.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	4.115.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY		5.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	1.764.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY		1.500.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	9.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY		5.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	1.584.556.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY	100 %	1.850.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	658.900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY		1.000.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	925.656.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY		850.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksanannya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	51.285.300,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY	100 %	11.500.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	37.327.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY		5.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	7.578.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY		5.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				10 Unit	6.380.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPTTG DIY		1.500.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<i>Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG</i>	89,50 % 41500 Orang			414000 Orang 86,50 %	199.675.000,00						89,50 % 41500 Orang	525.000.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>	3 Dokumen			3 Dokumen	199.675.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Disperindag DIY	3 Dokumen	525.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>				1 Dokumen	199.675.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Disperindag DIY		525.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						200.425.000,00							550.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						200.425.000,00							550.000.000,00	
1.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	<i>Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik</i>	-			75 %	200.425.000,00						-	550.000.000,00	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	<i>Tercapainya implementasi budaya pemerintahan</i>	-			100 %	200.425.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	BPTTG DIY	-	550.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY</i>				1 Dokumen	200.425.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	BPTTG DIY		550.000.000,00	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	J U M L A H								43.171.135.790,00						61.824.500.000,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH						65.130.367.414,00							0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						65.130.367.414,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						65.130.367.414,00							0,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	96,0 angka 89 Nilai 94,71 angka 86 Nilai 90,90 Nilai 88,00 Nilai 91,03 Angk a 89,23 Nilai 88,7 Angka			86 Nilai 87,70 Nilai 87,7 Angka 88,45 Angka 88,45 nilai 88,45 Nilai 88,70 nilai 88,73 nilai 88,73 Nilai 88,7 Angka 90,58 Angka 90,70 nilai 90,70 Nilai 95,8 angka N/A angka	65.130.367.414,00					96,0 angka 89 Nilai N/A angka 86 Nilai 90,90 Nilai 88,00 Nilai 91,03 Angk a 89,23 Nilai 88,7 Angka	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 % 70 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	58.867.687.498,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Setda DIY, Pemda DIY	100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					435 Orang/ Bulan	58.853.271.998,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Setda DIY, Pemda DIY		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	14.415.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Setda DIY, Pemda DIY		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 % 100 Dokumen 100 %			100 % 100 % 20 Dokumen 100 %	1.494.675.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai	Biro UHP, Setda DIY, Pemda DIY	100 % 20 Dokumen 100 % 100 %	0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 % 100 % 100 %					tingkatan		100 % 100 % 100 % 100 %		
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	1.494.675.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Setda DIY, Pemda DIY		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Terlaksananya penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah</i>	100 %			100 %	3.795.153.916,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Setda DIY, Pemda DIY	100 %	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bulan	236.653.916,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Setda DIY, Pemda DIY		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				2 Paket	157.500.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Setda DIY, Pemda DIY		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				40 Orang	60.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Setda DIY, Pemda DIY		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bulan	3.341.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Setda DIY, Pemda DIY		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	972.851.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Setda DIY, Pemda DIY	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				6 Paket	774.967.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Setda DIY, Pemda DIY		0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				4 Paket	134.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Setda DIY, Pemda DIY		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				2 Paket	63.884.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Setda DIY, Pemda DIY		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO TATA PEMERINTAHAN						1.125.982.150,00							1.558.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						295.000.000,00							325.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						295.000.000,00							325.000.000,00	
1.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	<i>Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi</i>	-			71 %	295.000.000,00						-	325.000.000,00	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	<i>Terlaksananya pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten yang meliputi aspek penatausahaan, aspek pemeliharaan dokumen, aspek pengawasan</i>	-			2 Dokumen	295.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Instansi pemerintah di DIY; Masyarakat DIY baik yang bermukim di DIY maupun di luar DIY	-	325.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat</i>				2 Dokumen	295.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Instansi pemerintah di DIY; Masyarakat DIY baik yang bermukim di DIY maupun di luar DIY		325.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						830.982.150,00							1.233.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						830.982.150,00							1.233.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	87,70 Nilai			87,70 Nilai	427.560.550,00						87,70 Nilai	658.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 % 100 % 52 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	12.051.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY	100 % 100 % 100 % 11 Dokumen 100 % 100 % 100 %	28.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	5.396.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		10.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				4 Dokumen	4.960.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		6.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	1.694.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		12.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100 % 100 % 70 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	14.154.850,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY	100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	46.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	6.619.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		34.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	3.538.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		5.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	3.996.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		7.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 25 Dokumen 100 % 12 Bulan 100 %			100 %	10.845.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY	100 % 100 % 100 % 100 % 5 Dokumen 100 % 12 Bulan 100 %	12.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	10.845.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		12.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</i>	100 % 100 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	218.880.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY	100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	386.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	14.918.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		16.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	25.297.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		28.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	4.987.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		7.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	17.952.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		22.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		13.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	148.226.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		300.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 %			100 %	4.500.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY	100 % 100 % 100 % 100 % 3 Dokumen 100 % 100 % 100 %	6.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		6.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 % 100 % 100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	167.129.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY	100 % 100 % 100 % 100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 %	180.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	20.228.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		22.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				11 Unit	115.735.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		125.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				42 Unit	31.166.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		33.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
2.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<i>Persenase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi</i>	100 %			100 %	403.421.600,00						100 %	575.000.000,00	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	<i>Terlaksananya tugas pemerintahan</i>	100 % 100 % 100 %			100 %	120.024.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD Kabupaten/Kota/DIY, Pemerintah Daerah, OPD dan stakeholder terkait di DIY Provinsi DI Yogyakarta	100 % 100 % 100 %	200.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum</i>				3 Dokumen	94.482.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD Kabupaten/Kota/DIY, Pemerintah Daerah, OPD dan stakeholder terkait di DIY Provinsi DI Yogyakarta		125.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah</i>				1 Dokumen	25.542.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD Kabupaten/Kota/DIY, Pemerintah Daerah, OPD dan stakeholder terkait di DIY Provinsi DI Yogyakarta		75.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN		
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	<i>Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>	100 %			100 %	78.820.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan stakeholder terkait di kabupaten/kota DIY	100 %	125.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN		
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan																
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>				2 Laporan	78.820.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan stakeholder terkait di kabupaten/kota DIY		125.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN		
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	<i>Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah</i>	100 %			100 %	204.577.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan stakeholder terkait di kabupaten/kota, DIY, Indonesia	100 %	250.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN		
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah																
			<i>Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi</i>				2 Dokumen	204.577.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan stakeholder terkait di kabupaten/kota, DIY, Indonesia		250.000.000,00	BIRO TATA PEMERINTAHAN		
		BIRO HUKUM							4.013.025.772,00								8.006.042.796,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						321.518.000,00							581.002.796,00			
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						321.518.000,00							581.002.796,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan	-			100 %	321.518.000,00						-	581.002.796,00	
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-			100 %	321.518.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	-	581.002.796,00	BIRO HUKUM
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten														
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				1 Dokumen	53.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		147.730.000,00	BIRO HUKUM
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa														
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				1 Berita Acara	268.078.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		433.272.796,00	BIRO HUKUM
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						3.691.507.772,00							7.425.040.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						3.691.507.772,00							7.425.040.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,70 Nilai			88,70 Nilai	784.652.900,00						88,70 Nilai	1.210.040.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 % 52 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	5.469.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	100 % 100 % 100 % 11 Dokumen 100 % 100 % 100 %	20.040.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	3.169.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		5.040.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		9.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	1.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		6.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	100 % 100 % 70 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	7.765.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Hukum Sekretariat DIY	100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	56.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	5.245.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Hukum Sekretariat DIY		45.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	689.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Hukum Sekretariat DIY		3.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	1.831.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Hukum Sekretariat DIY		8.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 25 Dokumen 100 % 12 Bulan 100 %			100 %	10.737.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di	100 % 100 % 100 % 100 % 5 Dokumen 100 % 12 Bulan 100 %	14.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				4 Laporan	10.737.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di		14.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	100 % 100 % 10 Dokumen 100 %			100 %	42.441.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	100 % 100 % 2 Dokumen 100 %	59.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	2.941.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		9.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				1 Orang	39.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		50.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100 % 100 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	389.446.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	506.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	2.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		7.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	50.232.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		80.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.793.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		9.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	53.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		55.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		5.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	271.290.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		350.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	69.370.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	5 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	148.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	12.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		10.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				19 Unit	49.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		120.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	7.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		18.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 %			100 %	4.819.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	100 % 100 % 100 % 100 % 3 Dokumen 100 % 100 % 100 %	12.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	919.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		6.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	3.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		6.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	100 % 100 % 100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	254.604.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	100 % 100 % 100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	395.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	33.978.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		45.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	139.180.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		100.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				38 Unit	25.326.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		50.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	56.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		200.000.000,00	BIRO HUKUM
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum	100 %			100 %	2.443.780.872,00						100 %	5.115.000.000,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	<i>Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan, fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan, pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum kabupaten/ Kota</i>	100 %			100 %	469.816.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di	100 %	1.515.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														
			<i>Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun</i>				28 Dokumen	185.201.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di		95.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun</i>				50 Dokumen	25.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di		35.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														
			<i>Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya</i>				78 Dokumen	147.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di		1.085.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi</i>				62 Dokumen	111.390.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di		300.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	<i>Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM</i>	100 %			100 %	1.973.964.072,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di	100 %	3.600.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														
			<i>Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan</i>				1 Kasus	554.064.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di		1.800.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														
			<i>Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan</i>				100 Kasus	1.419.900.072,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di		1.800.000.000,00	BIRO HUKUM
3.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	<i>Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan</i>	-			95 %	463.074.000,00						-	1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	<i>Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan</i>	-			100 %	463.074.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	-	1.100.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.10.5.01.0007	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan														
			<i>Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi</i>				20 Dokumen	205.184.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		650.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.10.5.01.0009	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan														
			<i>Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun</i>				15 Dokumen	257.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta		450.000.000,00	BIRO HUKUM
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						3.980.623.950,00							32.900.250.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						50.000.000,00							70.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						50.000.000,00							70.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat</i>	-			1 Laporan	50.000.000,00						-	70.000.000,00	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	<i>Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat</i>	-			1 Laporan	50.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan tingkat kemiskinan	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	-	70.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penurunan tingkat kemiskinan	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat		70.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						3.930.623.950,00							32.830.250.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						3.930.623.950,00							32.830.250.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	90,58 Angka			90,58 Angka	418.967.550,00						90,58 Angka	675.250.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 % 100 % 100 % 52 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	10.666.600,00			-	-	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 % 11 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	42.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	7.459.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		28.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				4 Dokumen	1.385.600,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	1.822.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 % 100 % 70 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	13.778.000,00			-	-	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	66.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	8.663.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	2.713.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					1 Laporan	2.402.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 % 100 % 100 % 100 % 25 Dokumen 100 % 12 Bulan 100 %			100 %	12.425.000,00			-	-	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 5 Dokumen 100 % 12 Bulan 100 %	15.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	12.425.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		15.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 % 100 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	208.003.950,00			-	-	-	100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	352.250.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	2.872.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	12.788.900,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	2.316.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	15.090.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1.764.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.750.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	173.173.050,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 %			100 %	8.900.000,00			-	-	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 3 Dokumen 100 % 100 % 100 %	11.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	3.900.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 % 100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	165.194.000,00			-	-	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 %	188.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	34.592.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		35.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	96.054.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		93.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				6 Unit	2.340.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				32 Unit	19.448.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		35.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				12 Unit	12.760.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		18.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase 4 jenis Fasilitas keagamaan</i>	100 %			100 %	3.511.656.400,00						100 %	32.155.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	<i>Terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan</i>	10 Dokumen			2 Dokumen	3.102.429.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	Peningkatan kualitas SDM	Terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	2 Dokumen	31.500.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola</i>				1 Unit	225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	Peningkatan kualitas SDM	Terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan		20.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														
			<i>Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi</i>				8 Lembaga	3.102.204.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	Peningkatan kualitas SDM	Terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan		11.500.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	<i>Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</i>	72 Dokumen 100 %			100 %	352.584.900,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	Peningkatan kualitas SDM	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	14 Dokumen 100 %	570.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan</i>				2 Dokumen	163.263.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	Peningkatan kualitas SDM	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		320.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan																
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan</i>				7 Dokumen	189.321.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan	Peningkatan kualitas SDM	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	<i>Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</i>	100 % 22 Dokumen			3 Dokumen	56.642.500,00			-	Peningkatan kualitas SDM	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100 % 4 Dokumen	85.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata																
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata</i>				3 Dokumen	56.642.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		85.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
		BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						761.991.750,00									1.333.900.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						262.893.500,00							350.000.000,00			
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						262.893.500,00							350.000.000,00			
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya</i>	-			100 %	262.893.500,00						-	350.000.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	-			100 %	262.893.500,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat dan Pemda DIY	-	350.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	2.22.08.5.09.0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya														
			Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan				35 Desa	262.893.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat dan Pemda DIY		350.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						499.098.250,00							983.900.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						499.098.250,00							983.900.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,70 Nilai			90,70 Nilai	255.747.750,00						90,70 Nilai	343.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	12.430.800,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY	100 % 100 % 100 % 11 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	16.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	5.940.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		7.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				4 Dokumen	2.570.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		3.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	3.920.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		5.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	100 % 100 % 70 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	9.055.000,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY	100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	43.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	3.780.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		35.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1.853.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		3.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				3 Laporan	3.422.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		5.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 25 Dokumen 100 % 12 Bulan 100 %			100 %	7.800.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY	100 % 100 % 100 % 100 % 5 Dokumen 100 % 12 Bulan 100 %	11.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	7.800.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		11.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100 % 100 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	95.814.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY	100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	133.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	4.220.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		5.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					26 Paket	14.329.200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		16.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					23 Paket	6.617.200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		10.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2 Paket	11.720.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		13.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					1 Dokumen	2.868.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		4.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	56.060.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		84.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 %			100 %	4.600.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY	100 % 100 % 100 % 100 % 3 Dokumen 100 % 100 % 100 %	6.400.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	700.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		900.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	3.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		5.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 % 100 % 100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	126.047.550,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY	100 % 100 % 100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	132.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	29.139.200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		30.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	74.386.350,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		76.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				24 Unit	17.418.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		19.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				8 Unit	5.104.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Pemda DIY		6.500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
2.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2</i>	100 %			100 %	243.350.500,00						100 %	640.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	<i>Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro</i>	100 %			100 %	221.585.100,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat dan Pemda DIY	100 %	450.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro</i>				4 Dokumen	155.980.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat dan Pemda DIY		300.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro</i>				2 Dokumen	65.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat dan Pemda DIY		150.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	<i>Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</i>	100 %			100 %	19.507.900,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat dan Pemda DIY	100 %	150.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</i>				2 Dokumen	19.507.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat dan Pemda DIY		150.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	<i>Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah</i>	100 %			100 %	2.257.500,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat dan Pemda DIY	100 %	40.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha</i>				1 Dokumen	2.257.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat dan Pemda DIY		40.000.000,00	BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN							2.975.960.900,00						5.956.043.906,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							100.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-	-			-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	1.03.13.5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	-	-			-	100.000.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	-	100.000.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		100.000.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.000.000.000,00							2.000.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						2.000.000.000,00							2.000.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	2.000.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	-	-			-	2.000.000.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	-	2.000.000.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia														
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				2 Objek	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		2.000.000.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						875.960.900,00							3.856.043.906,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						875.960.900,00							3.856.043.906,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	269.040.900,00						-	752.332.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 100 % 52 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %			-	10.802.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 % 100 % 100 % 11 Dokumen 100 % 100 % 100 %	23.601.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4.221.400,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.889.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	2.878.600,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.044.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3.702.700,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.668.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 70 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %			-	7.941.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	69.453.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	4.799.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		61.313.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	1.542.200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.863.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	1.600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.277.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 100 % 100 % 25 Dokumen 100 % 12 Bulan 100 %			-	10.951.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 % 100 % 100 % 100 % 5 Dokumen 100 % 12 Bulan 100 %	21.862.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	10.951.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		21.862.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			-	131.169.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	409.703.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	2.391.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.408.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.515.400,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		66.283.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.550.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		10.448.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.482.600,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		21.936.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	109.230.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		304.628.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	23 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			-	6.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	5 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	42.757.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		42.757.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 100 % 100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 %			-	500.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 % 100 % 100 % 100 % 3 Dokumen 100 % 100 % 100 %	1.200.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	500.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.200.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 100 % 100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %			-	101.677.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 % 100 % 100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	183.756.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	26.385.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		57.412.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	62.318.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		99.337.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	6.514.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		13.862.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				6 Unit	6.460.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		13.145.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
2.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	<i>Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda sektor Pembangunan</i>	21,50 % 100 %			50 % N/A %	606.920.000,00						N/A % 100 %	3.103.711.906,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>persentase kebijakan pendukung Program Pemda yang dievaluasi</i>	100 %			57,89 %	50.000.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	100 %	1.653.711.906,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah</i>				4 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.653.711.906,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	100 %			-	556.920.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-	100 %	1.450.000.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah</i>				3 Dokumen	556.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.450.000.000,00	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		BIRO ORGANISASI						2.095.738.550,00							2.769.581.800,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.095.738.550,00							2.769.581.800,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.095.738.550,00							2.769.581.800,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,73 nilai		88,73 nilai	394.564.550,00						88,73 nilai	473.249.700,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 % 100 % 100 % 52 Dokumen 100 % 100 % 100 %			100 %	5.332.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY	100 % 100 % 100 % 11 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	11.712.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		5.715.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	2.468.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		2.468.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	1.699.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		3.529.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 % 100 % 70 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	14.493.750,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY	100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	40.805.100,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	7.493.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		34.020.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		3.887.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	2.999.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		2.898.100,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 % 100 % 100 % 25 Dokumen 100 % 12 Bulan 100 %			100 %	11.348.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY	100 % 100 % 100 % 100 % 5 Dokumen 100 % 12 Bulan 100 %	11.348.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	11.348.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		11.348.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 % 100 % 10 Dokumen 100 %			100 %	49.425.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY	100 % 100 % 2 Dokumen 100 %	0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				45 Orang	49.425.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		0,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 % 100 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	162.495.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY	100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	261.765.800,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	4.727.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		666.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	6.487.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		6.479.300,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	8.916.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		3.865.900,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	2.952.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		5.376.600,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				7 Laporan	138.812.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		243.878.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		1.500.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 %			100 %	11.700.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY	100 % 100 % 100 % 100 % 3 Dokumen 100 % 100 % 100 %	13.500.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	11.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		13.500.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 % 100 % 100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	139.769.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY	100 % 100 % 100 % 100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 %	134.118.800,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	29.205.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		31.600.800,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	87.966.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		84.100.400,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				36 Unit	22.598.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		18.417.600,00	BIRO ORGANISASI
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Jumlah Unit Pelayanan Publik minimal Kategori B Nilai rerata Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah	100 % 83,12 Nilai			66,67 % 83,02 Nilai	0,00						100 % 83,12 Nilai	323.658.100,00	
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	<i>Terlaksananya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</i>	100 % 100 %			100 %	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY	100 % 100 %	323.658.100,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		84.405.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		14.378.700,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan</i>				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		82.213.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik</i>				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		142.661.400,00	BIRO ORGANISASI
3.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kematangan Perangkat Daerah	-			42 angka	1.701.174.000,00						-	1.972.674.000,00	
	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	<i>Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan</i>	-			100 %	714.842.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY	-	936.342.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.10.5.01.0001	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan</i>				14 Dokumen	220.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		270.688.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.10.5.01.0004	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	34.404.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		84.404.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.10.5.01.0006	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan</i>				4 Dokumen	281.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		331.250.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.10.5.01.0008	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan</i>				5 Dokumen	178.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		250.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	<i>Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan</i>	-			100 %	986.332.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	1.036.332.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY				7 Dokumen	986.332.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.036.332.000,00	BIRO ORGANISASI
BIRO UMUM DAN PROTOKOL								21.580.846.560,00							29.748.438.979,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.490.992.000,00							348.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						2.490.992.000,00							348.000.000,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-	-			-	2.490.992.000,00						-	348.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-			-	2.490.992.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	348.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				3 Dokumen	2.490.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		348.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.818.865.000,00							1.390.230.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1.818.865.000,00							1.390.230.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	1.818.865.000,00						-	1.390.230.000,00	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	-	-			-	625.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	290.230.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya</i>				325 Unit	625.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		290.230.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	1.193.865.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	-	1.100.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	2.22.08.5.09.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah</i>				4 Dokumen	1.193.865.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.100.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						17.270.989.560,00							28.010.208.979,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						17.270.989.560,00							28.010.208.979,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 % 100 % 100 % 52 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	12.117.000,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY	100 % 100 % 100 % 11 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	19.160.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	4.993.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		7.160.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	5.549.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		8.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1.575.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		4.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya administrasi keuangan daerah</i> <i>Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah</i> <i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> <i>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i> <i>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i> <i>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i> <i>Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 % 100 % 70 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	10.920.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY	100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	49.325.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9.015.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		47.300.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	555.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		600.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				13 Laporan	1.350.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		1.425.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 % 100 % 5 Dokumen 12 Bulan 100 % 100 % 100 % 100 %	70.597.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY	100 % 100 % 100 % 100 % 5 Dokumen 100 % 12 Bulan 100 %	73.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				2 Dokumen	10.500.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		11.500.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				4 Laporan	60.097.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		61.500.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,</i>	100 % 100 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			100 % 100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	1.609.488.420,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY	100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	2.440.378.654,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>													
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	120.222.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		156.608.788,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	189.388.900,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		350.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				5 Paket	181.891.270,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		374.429.866,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	144.591.250,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		275.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	47.004.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		58.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	768.659.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		950.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				2 Dokumen	157.732.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		276.340.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %			100 % 3 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	5.990.193.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY	100 % 100 % 100 % 100 % 3 Dokumen 100 % 100 % 100 %	6.734.318.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.950.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		9.200.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	3.103.828.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		3.277.440.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	128.759.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		266.173.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>													
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				14 Unit	554.866.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		750.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>													
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				59 Unit	1.367.218.590,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		1.450.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>													
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				7 Unit	260.880.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		400.109.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>													
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				4 Unit	1.085.800.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		4.304.513.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>													
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				7 Unit	128.500.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		156.989.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	<i>Terlaksananya Fasilitasi komunikasi pimpinan, dan Pengelolaan dokumentasi pimpinan</i>	100 %			100 %	997.691.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY	100 %	1.873.100.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				1 Laporan	33.086.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		140.000.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan</i>				6 Laporan	964.605.200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		1.733.100.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	<i>Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara, Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan</i>	100 %			100 %	5.034.087.850,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY	100 %	8.902.749.325,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara</i>				17 Laporan	2.836.211.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		3.981.426.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				12 Laporan	1.484.558.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		2.627.273.325,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan</i>				12 Laporan	713.318.550,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro UHP, Pemda DIY		2.294.050.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		BIRO PENGADAAN BARANG/JASA							411.833.700,00						1.789.571.680,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						411.833.700,00							1.789.571.680,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						411.833.700,00							1.789.571.680,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	261.082.700,00						-	287.226.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 100 % 52 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %			-	10.654.000,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-	100 % 100 % 100 % 11 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	11.718.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	5.678.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		6.245.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				4 Dokumen	2.616.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		2.877.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	2.360.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.596.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 70 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			-	8.819.000,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-	100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	9.701.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	4.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		5.016.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	1.970.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		2.167.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	2.289.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		2.518.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 % 100 % 100 % 100 % 25 Dokumen 100 % 12 Bulan 100 %			-	8.924.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 % 100 % 100 % 100 % 5 Dokumen 100 % 12 Bulan 100 %	9.816.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	8.924.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		9.816.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			-	151.110.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	166.220.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	3.434.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.777.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	31.465.400,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		34.611.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	5.040.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.544.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			-				-	12.460.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		13.706.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	98.711.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		108.582.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	23 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			-	15.600.000,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-	5 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	17.160.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	15.600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		17.160.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 100 % 100 % 100 % 14 Dokumen 100 % 100 % 100 %			-	600.000,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-	100 % 100 % 100 % 100 % 3 Dokumen 100 % 100 % 100 %	700.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-		700.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 100 % 100 % 20 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %			-	65.375.300,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	-	100 % 100 % 100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	71.911.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	25.808.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		28.389.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	27.988.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.787.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				8 Unit	6.088.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.696.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				16 Unit	5.490.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		6.039.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Jasa Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78,74 %			68,24 % 88,45 Angka	150.751.000,00						78,74 %	1.502.345.680,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	92 %			-	93.177.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	92 %	1.131.471.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				0 Laporan	93.177.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.131.471.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	<i>Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas</i>	69,94 %			64,94 %	27.587.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	69,94 %	146.410.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik</i>				3 Laporan	27.587.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		146.410.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	62,5 %			-	29.987.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	62,5 %	224.464.680,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</i>				3 Dokumen	29.987.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		224.464.680,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
J U M L A H								102.076.370.746,00							84.061.829.161,00	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

--
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PANIRADYA KAISTIMEWAN						27.491.567.847,00							33.455.666.013,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						27.491.567.847,00							33.455.666.013,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						27.491.567.847,00							33.455.666.013,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	89,59 Angka			89,59 Angka	9.058.990.347,00						89,59 Angka	7.978.077.013,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	12.442.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan	100 %	17.651.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	5.750.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		7.700.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				4 Dokumen	3.499.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		6.351.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				19 Laporan	3.193.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		3.600.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	8.213.865.547,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan	100 %	7.105.266.013,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				50 Orang/ Bulan	8.198.166.097,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		7.063.196.013,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	7.908.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		36.420.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1.015.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		1.450.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	6.776.450,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		4.200.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD</i>	100 %			100 %	11.543.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan	100 %	11.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	11.543.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		11.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	100 %			100 %	125.022.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan	100 %	240.310.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	1.412.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		3.610.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4 Paket	11.065.900,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		14.800.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket	29.950.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		12.200.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	15.462.100,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		19.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					1 Dokumen	2.532.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		12.600.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	64.600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		177.700.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %			100 %	333.720.000,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan	100 %	353.300.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	23.400.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		23.200.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	310.320.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		330.100.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	100 %			100 %	362.397.300,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan	100 %	250.150.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	35.286.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		32.100.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				16 Unit	289.497.300,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		209.100.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				23 Unit	37.614.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		8.950.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
2.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	<i>Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi</i>	-			87,00 %	18.432.577.500,00						-	25.477.589.000,00	
	4.01.10.5.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	<i>Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara</i>	-			100 %	985.702.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pengampu Dana Keistimewaan DIY	-	1.434.818.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.03.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun</i>				6 Dokumen	529.568.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pengampu Dana Keistimewaan DIY		902.418.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.03.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara</i>				5 Laporan	456.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pengampu Dana Keistimewaan DIY		532.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.04	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	<i>Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan</i>	-			100 %	1.632.353.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat	-	1.808.550.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.04.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan</i>				6 Dokumen	1.008.353.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat		998.250.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.04.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</i>				5 Laporan	624.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat		810.300.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	<i>Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang</i>	-			100 %	3.308.620.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	PD Pengampu Dana Keistimewaan DIY	-	2.728.550.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan</i>				9 Dokumen	740.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	PD Pengampu Dana Keistimewaan DIY		798.600.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan</i>				7 Laporan	586.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	PD Pengampu Dana Keistimewaan DIY		532.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05.0003	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang</i>				10 Dokumen	822.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	PD Pengampu Dana Keistimewaan DIY		865.150.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05.0004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang</i>				10 Laporan	1.160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	PD Pengampu Dana Keistimewaan DIY		532.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	<i>Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY</i>	-			100 %	2.373.902.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewaan dan OPD Pengampu Dana Keistimewaan	-	5.985.507.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan														
			<i>Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun</i>				17 Dokumen	1.191.902.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewaan dan OPD Pengampu Dana Keistimewaan		2.857.657.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY</i>				21 Laporan	1.182.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan dan OPD Pengampu Dana Keistimewaan		3.127.850.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	<i>Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan</i>	-			100 %	1.500.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan	-	3.472.445.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.07.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan</i>				4 Unit	1.500.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		3.472.445.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.08	Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	<i>Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan</i>	-			100 %	1.000.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Parampara Praja, OPD dan Masyarakat	-	1.422.839.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.10.5.08.0001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan</i>				3 Rekomendasi	1.000.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Parampara Praja, OPD dan Masyarakat		1.422.839.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.09	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	<i>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan</i>	-			100 %	7.632.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat	-	8.624.880.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.09.0001	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan</i>				4 Dokumen	7.632.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat		8.624.880.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	J U M L A H							27.491.567.847,00							33.455.666.013,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD						328.851.987.629,00							230.302.555.466,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						328.851.987.629,00							230.302.555.466,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						328.851.987.629,00							230.302.555.466,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	89 angka			89 angka	263.929.689.877,00						89 angka	134.526.943.066,00	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	38.131.200,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY	100 %	142.588.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	15.125.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		64.959.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				4 Dokumen	12.619.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		36.199.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				5 Laporan	10.387.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		41.430.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	100 %			100 %	10.515.078.400,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY	100 %	12.183.527.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				80 Orang/Bulan	10.427.403.100,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		12.035.465.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	16.518.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		66.276.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	10.607.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		14.510.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				13 Laporan	60.549.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		67.276.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	100 %			100 %	20.890.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY	100 %	30.579.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				14 Laporan	20.890.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		30.579.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	100 %			100 %	17.869.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY	100 %	416.711.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					16 Dokumen	11.505.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		20.148.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					1 Orang	6.364.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		396.563.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %			100 %	1.221.077.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY	100 %	1.656.267.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	40.668.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		37.874.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4 Paket	185.901.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		235.747.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					5 Paket	221.831.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		11.047.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	109.940.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		159.765.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				24 Laporan	662.737.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		1.211.834.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	100 %			100 %	198.479.253.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY	100 %	57.986.374.066,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				4 Unit	878.913.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				31 Unit	600.340.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY		1.137.736.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	197.000.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY		56.848.638.066,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	100 %			100 % 100 %	4.576.353.264,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY	100 %	3.578.283.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				60 Laporan	1.182.563.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		1.298.092.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				84 Laporan	3.393.789.764,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY		2.280.191.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	100 %			100 %	1.790.273.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD DIY	100 %	2.244.446.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				5 Unit	541.002.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD DIY		455.331.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				29 Unit	813.017.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD DIY		697.682.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				278 Unit	307.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD DIY		284.477.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	128.874.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY, Pemda DIY, DPRD DIY		806.956.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</i>	100 %			100 %	43.584.943.509,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY	100 %	51.357.320.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>				55 Orang/Bulan	42.752.741.509,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY		50.500.353.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>				330 Paket	532.978.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY		547.134.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>				55 Orang	299.224.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY		309.833.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	<i>Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD dan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	100 %			100 %	3.685.820.204,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY, DPRD DIY, Pemda DIY	100 %	4.930.848.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD</i>				266 Laporan	2.769.567.204,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY, DPRD DIY, Pemda DIY		2.913.110.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>				40 Laporan	916.253.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD DIY, DPRD DIY, Pemda DIY		2.017.738.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY</i>	96 %			96 %	64.922.297.752,00						96 %	95.775.612.400,00	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	<i>Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD</i>	97 %			96 %	13.995.301.356,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat	97 %	19.923.502.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>				9 Dokumen	1.617.247.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		3.232.074.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda</i>				7 Dokumen	4.450.715.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		8.425.704.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan</i>				4 Dokumen	964.167.856,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		1.124.856.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi</i>				158 Dokumen	3.413.647.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		3.428.942.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah</i>				22000 Orang	3.549.524.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		3.711.926.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	<i>"Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD"</i>	97 %			96 %	2.272.578.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat	97 %	2.609.358.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>				2 Dokumen	474.728.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		542.589.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>				2 Dokumen	83.351.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		130.137.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	528.227.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		702.321.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	475.557.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		523.866.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	37.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		54.067.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	673.255.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		656.378.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	97 %			96 %	4.605.027.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat	97 %	1.357.936.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				6 Laporan	1.608.252.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		468.148.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>				5 Laporan	998.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		296.596.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>				5 Laporan	998.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		296.596.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>				5 Laporan	998.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		296.596.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	97 %			96 %	10.926.621.196,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat	97 %	27.760.154.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>				6 Dokumen	4.067.636.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		4.016.981.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			<i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>				18 Orang	1.420.617.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		1.797.898.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>				7 Orang	781.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		889.949.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>				36 Dokumen	4.357.693.796,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		6.453.833.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>				2 Dokumen	299.254.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		14.601.493.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pelaksanaan Reses</i>	97 %			96 %	7.471.945.400,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat	97 %	11.733.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>				1 Dokumen	281.192.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		244.253.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>				3 Dokumen	7.190.753.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		11.489.147.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	<i>Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD, Penyusunan Kode Etik DPRD: 100%</i>	07 %			96 %	409.532.400,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY	97 %	473.919.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD</i>				3 Laporan	409.532.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY		473.919.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	<i>Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>	97 %			96 %	25.241.292.400,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat	97 %	31.917.343.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>				48 Dokumen	14.347.067.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		24.252.081.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun</i>				1 Laporan	15.265.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		34.097.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>				14 Dokumen	1.845.593.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		2.106.798.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>				13 Dokumen	9.033.365.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, masyarakat		5.524.367.000,00	SEKRETARIAT DPRD
J U M L A H								328.851.987.629,00							230.302.555.466,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH						22.036.172.946,00								28.331.351.641,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						22.036.172.946,00								28.331.351.641,00	
	5.01	PERENCANAAN						22.036.172.946,00								28.331.351.641,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	95,44 angka			95,44 angka	19.147.884.811,00						95,44 angka	23.160.672.641,00		
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	150 Dokumen			29 Dokumen	38.654.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY	30 Dokumen	102.283.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	10.892.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		34.316.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				4 Dokumen	11.990.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		26.202.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				22 Laporan	15.772.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		41.765.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	715 Dokumen/lap/orang/bulan			131 Dokumen/lap/orang/bulan	16.571.919.586,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY	143 Dokumen/lap/orang/bulan	19.233.947.743,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				115 Orang/Bulan	16.530.196.986,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		19.115.652.358,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	11.914.600,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		74.504.385,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	8.435.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		11.948.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				13 Laporan	21.372.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		31.843.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	60 laporan			6 laporan	12.539.950,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY	12 laporan	16.651.307,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					6 Laporan	12.539.950,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		16.651.307,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	65 dokumen			13 dokumen	65.583.950,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY	13 dokumen	203.192.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				13 Dokumen	65.583.950,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		203.192.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	139 paket/dokumen/laporan			16 paket/dokumen/laporan	761.826.625,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY	29 paket/dokumen/laporan	1.319.642.616,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.863.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		21.326.144,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	46.998.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		74.844.006,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	36.535.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		56.928.260,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	32.684.600,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		59.293.956,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3 Dokumen	7.188.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		12.407.947,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	573.057.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		913.342.303,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	50.499.325,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		181.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	346 unit			62 unit	678.951.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY	75 unit	829.078.358,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	151.820.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		162.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				31 Unit	90.551.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		562.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				30 Unit	436.580.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		105.078.358,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	9 laporan			5 laporan	463.411.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY	9 laporan	601.348.974,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.495.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		13.648.462,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	40.908.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		79.658.309,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	46.380.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		63.542.838,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	368.628.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		444.499.365,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.</i>	1185 unit			147 unit	554.998.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY	240 unit	854.528.643,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	35.568.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		45.808.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				9 Unit	225.950.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		321.265.793,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya</i>				1 Unit	10.150.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		13.510.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				22 Unit	10.530.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		16.175.788,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				72 Unit	50.286.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		73.384.992,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	197.219.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		359.513.551,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				41 Unit	25.294.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		24.870.519,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan	100 %			100 %	2.163.976.535,00						100 %	4.236.648.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	34 dokumen			7 dokumen	938.891.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Seluruh stakeholder Pemda DIY	8 dokumen	1.829.368.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</i>				2 Dokumen	88.239.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Seluruh stakeholder Pemda DIY		111.683.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>				5 Dokumen	850.651.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Seluruh stakeholder Pemda DIY		1.717.685.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>"Terlaksananya, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi"</i>	135 dokumen			28 dokumen	1.225.085.135,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Seluruh stakeholder Pemda DIY	28 dokumen	2.407.280.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>				25 Laporan	1.196.187.135,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Seluruh stakeholder Pemda DIY		2.321.984.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi</i>				3 Dokumen	28.898.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Seluruh stakeholder Pemda DIY		85.296.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan</i>	100 % 94 % 28,97 % 94 %			28,97 % 92 % 93 % 93,75 %	724.311.600,00						100 % 94 % 28,97 % 94 %	934.031.000,00	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)"</i>	34 dokumen			7 dokumen	555.935.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Mitra	7 dokumen	616.116.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				2 Dokumen	83.986.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Mitra		133.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				5 Dokumen	471.949.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Mitra		483.016.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	4 dokumen			4 dokumen	84.545.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Mitra	4 dokumen	133.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				4 Dokumen	84.545.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Mitra		133.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	15 dokumen			3 dokumen	83.831.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Mitra	3 dokumen	184.815.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				3 Dokumen	83.831.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Mitra		184.815.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
		BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH							677.417.850,00							1.235.736.117,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						478.434.950,00							779.700.117,00		
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						478.434.950,00							779.700.117,00		
1.	2.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	95,44 angka			95,44 angka	247.338.700,00						95,44 angka	354.869.117,00		
	2.20.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	715 Dokumen/lap/orang/bulan			1 Dokumen/lap/orang/bulan	3.780.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY	143 Dokumen/lap/orang/bulan	28.901.615,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH	
	2.20.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	3.780.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		28.901.615,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	60 laporan			6 laporan	7.541.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY	12 laporan	10.022.693,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				6 Laporan	7.541.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		10.022.693,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	139 paket/dokumen/laporan			10 paket/dokumen/laporan	129.127.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY	29 paket/dokumen/laporan	179.995.384,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1.594.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		2.619.856,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	17.002.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		28.787.994,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	5.097.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		10.268.740,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	6.125.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		11.187.044,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	4.173.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		7.395.053,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				3 Laporan	95.136.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		119.736.697,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	346 unit			1 unit	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY	75 unit	1.903.642,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		1.903.642,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	9 laporan			4 laporan	63.861.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY	9 laporan	82.423.026,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	930.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		1.693.538,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	5.290.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		10.418.691,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.719.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		7.702.162,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	51.922.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		62.608.635,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.</i>	1185 unit			23 unit	43.029.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY	240 unit	51.622.757,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	22.680.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		32.267.207,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				2 Unit	638.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		1.068.212,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	8.641.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		12.631.008,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	8.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		2.626.449,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				6 Unit	3.070.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		3.029.881,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
2.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah</i>	75 %			75 %	231.096.250,00						75 %	424.831.000,00	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	<i>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral</i>	39 dokumen			8 dokumen	231.096.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, instansi vertikal di DIY	8 dokumen	424.831.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														
			<i>Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata</i>				8 Dokumen	231.096.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, instansi vertikal di DIY		424.831.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						198.982.900,00							456.036.000,00	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						198.982.900,00							456.036.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional Persentase hasil kelibngan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah "Persentase hasil kelibngan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah "</i>	85 % 70 % 70 %			60 % 75 % N/A %	198.982.900,00						85 % N/A % 70 %	456.036.000,00	
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<i>Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>	1 dokumen			1 dokumen	42.909.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, instansi vertikal di DIY	1 dokumen	197.115.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>				1 Dokumen	42.909.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, instansi vertikal di DIY		197.115.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	5 laporan			5 Laporan	156.073.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, instansi vertikal di DIY	5 laporan	258.921.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>				5 Dokumen	156.073.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, instansi vertikal di DIY		258.921.000,00	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
J U M L A H								22.713.590.796,00						29.567.087.758,00		

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET						1.133.499.725.678,00							96.769.306.894,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.133.499.725.678,00							96.769.306.894,00	
	5.02	KEUANGAN						1.133.499.725.678,00							96.769.306.894,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	85,95 angka			85,95 angka	94.780.516.022,00						85,95 angka	86.952.917.194,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	9.593.500,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY	100 %	9.598.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	3.994.400,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		3.998.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	3.998.600,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		3.999.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				7 Laporan	1.600.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		1.601.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>	100 %			100 %	91.930.340.122,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY	100 %	84.192.265.894,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				240 Orang/Bulan	91.903.020.622,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		84.182.746.394,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	19.320.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		1.520.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	4.999.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		4.999.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	2.999.700,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		2.999.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	100 %			100 %	34.100.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY	100 %	1.400.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	34.100.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		1.400.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja SKPD</i>	100 %			100 %	6.233.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY	100 %	6.233.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				12 Dokumen	6.233.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		6.233.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	100 %			100 %	631.515.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY	100 %	639.589.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	9.558.600,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		9.558.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	128.478.600,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		130.338.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	13.769.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		15.769.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	34.365.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		36.215.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3 Dokumen	10.380.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		12.144.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	333.958.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		333.958.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				12000 Dokumen	101.006.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		101.606.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	148.690.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY	100 %	111.470.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				6 Unit	148.690.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		111.470.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	1.644.477.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY	100 %	1.596.793.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	16.250.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		16.250.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	918.880.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		918.880.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	82.760.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		82.760.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	626.587.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		578.903.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	100 %			100 %	375.567.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY	100 %	395.567.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	18.726.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		18.726.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				17 Unit	221.007.200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		221.007.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				85 Unit	55.834.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		55.834.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				4 Unit	80.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %			100 %	1.032.728.487.406,00						100 %	3.518.411.400,00	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni & Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>	100 %			100 %	2.339.205.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	100 %	2.020.045.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>				4 Dokumen	39.231.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		288.631.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>				4 Dokumen	33.626.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		282.526.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>				30 Dokumen	728.866.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		256.566.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>				2 Dokumen	1.432.875.750,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		522.365.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>				6 Dokumen	94.981.750,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		658.981.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>				3 Dokumen	9.625.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		10.975.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya evaluasi APBD, APBD P dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah</i>	100 %			100 %	17.723.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	100 %	238.224.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota</i>				5 Laporan	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		78.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota</i>				5 Laporan	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		78.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				5 Laporan	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		78.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				3 Dokumen	2.723.300,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		2.724.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100 %			100 %	74.766.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	100 %	130.286.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				2 Laporan	15.990.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		69.410.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>				8000 Dokumen	58.776.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		60.876.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tindakan lanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTKR; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD</i>	100 %			100 %	259.144.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	100 %	265.532.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>				12 Laporan	8.422.600,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		8.423.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				3 Laporan	17.326.100,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		19.726.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi</i>				2 Dokumen	51.502.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		54.202.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>				1 Dokumen	3.524.600,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		3.694.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>				1 Dokumen	4.639.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		4.753.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	53.305.300,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		53.306.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi</i>				120 Orang	8.974.900,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		9.426.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi														
			<i>Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina</i>				16 Lembaga	111.450.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		112.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	100 %			-	1.030.037.648.106,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	100 %	864.323.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah</i>				6 Laporan	827.423.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		864.323.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				5 Laporan	593.814.094.446,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	15.000.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	420.396.130.660,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan barang milik daerah yang sesuai prosedur	100 %			100 %	2.805.994.900,00						100 %	2.948.482.900,00	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100 %			100 %	2.805.994.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	100 %	2.948.482.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	331.813.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		552.851.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	82.581.600,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		82.581.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	246.917.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		261.917.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				2 Laporan	1.456.990.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		1.468.390.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>				3 Laporan	207.079.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		210.799.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	480.613.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		371.943.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	51.94 %			51.94 %	3.184.727.350,00						51.94 %	3.349.495.400,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>	100 %			100 %	3.184.727.350,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	100 %	3.349.495.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</i>				2 Dokumen	2.716.454.400,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		2.867.207.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				5 Laporan	37.171.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		51.186.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	336.282.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		336.282.050,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	57.670.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		57.670.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	37.149.950,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		37.149.950,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA						2.226.503.700,00							2.582.481.550,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.226.503.700,00							2.582.481.550,00	
	5.02	KEUANGAN						2.226.503.700,00							2.582.481.550,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,95 Nilai			85,95 Nilai	2.019.832.700,00						85,95 Nilai	2.168.088.450,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %			100 %	9.740.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	100 %	31.595.300,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9.740.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		31.595.300,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	100 %			100 %	10.820.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	100 %	10.607.300,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	10.820.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		10.607.300,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	100 %			100 %	54.511.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	100 %	62.716.500,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	5.643.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		8.957.300,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	12.699.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		13.973.630,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	3.799.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		4.178.900,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	4.788.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		5.266.800,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	25.781.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		28.359.870,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	1.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		1.980.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	100 %			100 %	58.970.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	100 %	64.867.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				8 Unit	58.970.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		64.867.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	100 %			100 %	1.403.684.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	100 %	1.467.786.100,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		550.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	445.501.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		490.051.100,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	32.051.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		38.612.200,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	925.632.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		938.572.800,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya</i>	100 %			100 %	482.107.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	100 %	530.516.250,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	98.994.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		109.091.950,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				21 Unit	164.880.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		181.368.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	45.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		49.500.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				47 Unit	173.233.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		190.556.300,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	206.671.000,00						-	414.393.100,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	100 %			-	206.671.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	100 %	414.393.100,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				12 Laporan	42.214.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		204.835.950,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.</i>				12 Laporan	164.456.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		209.557.150,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL						4.273.461.400,00							4.637.481.160,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						4.273.461.400,00							4.637.481.160,00	
	5.02	KEUANGAN						4.273.461.400,00							4.637.481.160,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	3.676.890.400,00						-	3.789.675.160,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	9.740.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	100 %	37.808.760,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	9.740.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		37.808.760,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	100 %			100 %	10.820.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY	100 %	12.596.800,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	10.820.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/kota se-DIY		12.596.800,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100 %			100 %	123.772.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	100 %	140.828.500,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	11.060.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		12.166.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	41.816.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		46.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	28.512.000,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		31.364.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	18.715.000,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		20.586.500,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	12.641.500,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		14.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	3.528.000,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		5.822.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		10.890.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	100 %			100 %	48.900.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	100 %	58.512.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	48.900.000,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		58.512.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	100 %			100 %	2.694.603.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	100 %	2.700.767.300,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	776.176.600,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		826.798.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	125.258.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		137.783.800,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.793.169.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		1.736.185.500,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya</i>	100 %			100 %	789.054.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	100 %	839.161.800,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				9 Unit	165.729.300,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		174.341.300,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				237 Unit	321.230.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		355.120.500,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	150.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		150.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				32 Unit	152.095.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		159.700.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	51,94 %			51,94 %	596.571.000,00						51,94 %	847.806.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>	100 %			100 %	596.571.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	100 %	847.806.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				12 Laporan	75.840.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		283.756.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.</i>				12 Laporan	520.731.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		564.050.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL						2.267.388.700,00							2.623.828.570,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.267.388.700,00							2.623.828.570,00	
	5.02	KEUANGAN						2.267.388.700,00							2.623.828.570,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 Persen			100 Persen	1.873.543.200,00						100 Persen	2.031.390.020,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	100 %			100 %	9.740.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY	100 %	33.198.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	9.740.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		33.198.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	100 %			100 %	10.820.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY	100 %	11.352.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	10.820.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		11.352.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100 %			100 %	45.310.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	100 %	50.647.300,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	5.885.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		6.473.500,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	10.898.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		12.079.100,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	3.950.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		4.345.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	11.100.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		12.210.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	3.793.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		4.887.300,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1.764.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		1.940.400,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	7.920.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		8.712.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	100 %			100 Persen	65.400.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se-DIY	100 %	71.940.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	65.400.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se-DIY		71.940.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %			100 Persen	1.163.184.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	100 %	1.227.078.820,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.638.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		1.801.800,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	442.441.200,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		486.685.320,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	39.650.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		43.615.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	679.455.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		694.976.700,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	100 %			100 Persen	579.089.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	100 %	637.173.900,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	246.393.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		271.208.300,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				45 Unit	225.096.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		247.605.600,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	70.500.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		77.550.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				66 Unit	37.100.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		40.810.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	51.94 %			51.94 %	393.845.500,00						51.94 %	592.438.550,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Terlaksananya Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>	100 %			100 %	393.845.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	100 %	592.438.550,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				12 Laporan	55.261.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		227.987.100,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.</i>				12 Laporan	338.584.500,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		364.451.450,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO						2.502.806.250,00								2.982.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.502.806.250,00								2.982.000.000,00	
	5.02	KEUANGAN						2.502.806.250,00								2.982.000.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.138.912.000,00						-		2.482.000.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %			100 %	9.740.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY	100 %	35.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9.740.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		35.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO	
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	10.820.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY	100 %	15.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO	
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	10.820.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		15.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %			100 Persen	69.178.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	100 %	95.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	15.842.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		20.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3 Paket	12.211.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		15.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					2 Paket	12.611.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		15.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	6.804.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		15.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	10.982.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		15.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					1 Dokumen	3.528.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		5.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	7.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		10.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	53.100.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	100 %	125.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	38.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		100.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	15.100.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		25.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	100 %			100 Persen	1.517.210.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	100 %	1.602.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	960.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		2.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	626.951.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		700.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	53.270.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		100.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	836.029.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		800.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya</i>	100 %			100 Persen	478.863.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	100 %	610.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	162.252.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		200.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	153.493.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		200.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	42.861.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		60.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				17 Unit	120.256.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		150.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	100 Persen			100 Persen	363.894.250,00						100 Persen	500.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100 %			100 Persen	363.894.250,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	100 %	500.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	68.502.650,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		200.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	295.391.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		300.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN						4.364.952.800,00							4.653.964.600,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						4.364.952.800,00							4.653.964.600,00	
	5.02	KEUANGAN						4.364.952.800,00							4.653.964.600,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen			100 Persen	3.601.801.200,00						100 Persen	3.691.519.200,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	9.740.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY	100 %	39.046.200,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	9.740.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY		39.046.200,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %			100 Persen	10.820.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se DIY	100 %	11.392.200,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	10.820.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY dan KPPD di Kabupaten/Kota se-DIY		11.392.200,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	66.332.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	100 %	69.649.700,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	25.612.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		26.892.600,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4 Paket	26.712.900,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		28.048.600,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket	2.185.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		2.294.300,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2 Paket	5.079.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		5.333.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					4 Paket	4.404.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		4.624.200,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	2.340.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		2.457.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %			100 Persen	24.755.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	100 %	25.992.800,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					11 Unit	24.755.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		25.992.800,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya prnyrdiaan surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %			100 Persen	2.689.074.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	100 %	2.699.384.600,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	700.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		735.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	980.608.400,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		1.040.138.900,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Laporan	69.850.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		73.342.500,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.637.916.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		1.585.168.200,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	801.078.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.	100 %	846.053.700,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	138.835.900,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		146.113.700,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				78 Unit	381.906.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		401.001.300,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	71.824.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		80.000.000,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				7 Unit	208.513.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPKA DIY, KPPD di Kabupaten/kota se-DIY, serta pemangku kepentingan terkait.		218.938.700,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	51,94 Persen			51,94 Persen	763.151.600,00						51,94 Persen	962.445.400,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Terlaksananya Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i> <i>Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>	100 %			100 Perasen 100 %	763.151.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY	100 %	962.445.400,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				12 Laporan	37.379.900,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		208.340.900,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.</i>				12 Laporan	725.771.700,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Pemangku kepentingan terkait dan masyarakat di DIY		754.104.500,00	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
J U M L A H								1.149.134.838.528,00							114.249.062.774,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						26.247.873.601,00							40.781.244.373,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						997.828.600,00							1.133.785.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						997.828.600,00							1.133.785.000,00	
1.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	<i>Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY</i>	-			80 %	997.828.600,00						-	1.133.785.000,00	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	<i>Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan</i>	-			100 %	997.828.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	ASN Pemda DIY	-	1.133.785.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY</i>				2 Dokumen	187.411.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	ASN Pemda DIY		340.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	4.01.10.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan														
			<i>Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan</i>				630 Orang	810.417.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	ASN Pemda DIY		793.785.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						25.250.045.001,00							39.647.459.373,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						25.250.045.001,00							39.647.459.373,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,5 Angka			86,5 Angka	22.272.601.301,00						86,5 Angka	20.564.574.011,00	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %			100 %	9.085.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY	100 %	188.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	2.385.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	1.700.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	15.675.308.701,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY	100 %	15.741.574.011,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				97 Orang/ Bulan	15.651.346.951,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		15.659.574.011,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	17.766.200,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	2.195.550,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		3.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	20.681.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY	100 %	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	20.681.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	355.072.650,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY	100 %	1.489.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	19.367.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		36.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	20.899.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				6 Paket	14.490.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		58.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	23.468.850,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		88.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				4 Dokumen	2.352.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	274.495.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		1.300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %			100 %	3.722.026.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY	100 %	200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	2.532.680.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				74 Unit	979.346.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	210.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	2.088.507.150,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY	100 %	2.417.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	17.032.650,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		27.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	841.210.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		890.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	1.230.264.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		1.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	401.920.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY	100 %	504.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	14.894.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		14.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				11 Unit	194.343.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		190.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				179 Unit	110.283.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	82.400.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, BKD DIY, dan ASN di BKD DIY		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	<i>Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan</i> <i>Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN</i> <i>Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi</i> <i>Persentase Keterisian Jabatan</i> <i>Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian</i> <i>Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS</i> <i>Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN</i> <i>Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN</i>	70 % 95 % 87,46 Angka 90 % 66,48 % 89,8 % 35,28 % 96,9 %			26,18 % 50 % 63,61 % 83,33 % 84,9 Angka 86 % 91 % 94,99 %	2.977.443.700,00						70 % 95 % 87,46 Angka 90 % 66,48 % 89,8 % 35,28 % 96,9 %	19.082.885.362,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<i>Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</i>	100 %			100 %	522.484.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan Masyarakat	100 %	5.597.773.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>				2 Dokumen	7.432.200,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan Masyarakat		145.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>				2 Dokumen	240.833.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan Masyarakat		3.900.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>				618 Dokumen	117.932.800,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan Masyarakat		509.773.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				4 Dokumen	122.513.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan Masyarakat		618.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</i>				2 Dokumen	33.773.400,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan Masyarakat		425.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	<i>Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN</i>	100 %			100 %	979.609.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan ASN Luar Pemda DIY	100 %	1.565.302.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah</i>				200 Dokumen	47.168.200,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan ASN Luar Pemda DIY		265.302.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>				2 Laporan	71.155.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan ASN Luar Pemda DIY		450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN</i>				1 Dokumen	861.286.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan ASN Luar Pemda DIY		850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	<i>Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN</i>	100 %			100 %	1.207.266.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan ASN Luar Pemda DIY	100 %	10.677.651.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center</i>				6 Dokumen	349.064.800,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan ASN Luar Pemda DIY		1.300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN</i>				1 Dokumen	29.662.400,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan ASN Luar Pemda DIY		265.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola</i>				1 Dokumen	205.898.200,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan ASN Luar Pemda DIY		5.400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat</i>				1 Dokumen	594.129.400,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan ASN Luar Pemda DIY		3.400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN</i>				5 Orang	5.576.450,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan ASN Luar Pemda DIY		180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			<i>Jumlah Fungsional ASN yang Dibina</i>				115 Orang	22.935.650,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan ASN Luar Pemda DIY		132.651.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	100 %			100 %	268.082.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan ASN Luar Pemda DIY	100 %	1.242.159.362,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>				4 Dokumen	24.022.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan ASN Luar Pemda DIY		63.353.803,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan</i>				12 Orang	165.994.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan ASN Luar Pemda DIY		977.205.559,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa</i>				460 Orang	20.368.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan ASN Luar Pemda DIY		27.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan</i>				545 Orang	45.107.350,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan ASN Luar Pemda DIY		160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>				1 Laporan	12.591.350,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, ASN Pemda DIY dan ASN Luar Pemda DIY		14.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
J U M L A H								26.247.873.601,00							40.781.244.373,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
- PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						25.279.485.145,00							30.091.355.157,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.039.785.000,00							2.058.123.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.039.785.000,00							2.058.123.000,00	
1.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	<i>Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi</i>	-			87 %	2.039.785.000,00						-	2.058.123.000,00	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	<i>Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan</i>	-			100 %	2.039.785.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta	-	2.058.123.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	4.01.10.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan														
			<i>Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan</i>				240 Orang	2.039.785.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		2.058.123.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						23.239.700.145,00							28.033.232.157,00	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						23.239.700.145,00							28.033.232.157,00	
1.	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	90 Angka			90 Angka	14.518.982.395,00						90 Angka	17.575.322.500,00	
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	15.024.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta	100 %	122.122.500,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	5.385.800,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		51.122.500,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				4 Dokumen	7.958.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		30.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	1.680.200,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		41.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	100 %			100 %	10.701.523.855,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta	100 %	11.656.500.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				76 Orang/ Bulan	10.678.393.855,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		11.600.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	14.330.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		31.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	4.800.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		7.500.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	4.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		18.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	100 %			100 %	13.293.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta	100 %	19.200.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	13.293.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		19.200.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	100 %			100 %	12.360.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta	100 %	275.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				2 Dokumen	10.860.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		95.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				20 Orang	1.500.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		180.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100 %			100 %	181.660.500,00			-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta	100 %	1.330.500.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	11.980.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		50.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	13.579.700,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		44.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				7 Paket	16.760.800,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		22.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	14.231.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		42.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	64.725.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		1.100.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	60.384.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		72.500.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	100 %			100 %	77.730.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta	100 %	100.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				9 Unit	77.730.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		100.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	100 %			100 %	2.789.998.440,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta	100 %	2.226.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	2.820.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		6.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	449.215.440,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		720.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	2.337.963.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		1.500.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel</i>	100 %			100 %	727.392.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta	100 %	1.846.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	24.358.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		24.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	185.835.600,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		156.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				33 Unit	11.428.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		12.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	303.550.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		1.474.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				333 Unit	202.221.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		180.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	<i>Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan</i>	99,99 %			99,99 %	8.720.717.750,00						99,99 %	10.457.909.657,00	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	<i>Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis</i>	100 %			100 %	116.073.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta	100 %	2.909.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			<i>Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun</i>				5 Dokumen	42.773.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		335.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi</i>				30 Orang	73.300.500,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		2.574.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	<i>Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	100 %			100 %	8.604.644.250,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta	100 %	7.548.909.657,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														
			<i>Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,</i>				4 Dokumen	282.351.800,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		684.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar														
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar</i>				1 Laporan	71.104.500,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		167.483.110,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga</i>				7 Dokumen	38.852.400,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		339.426.547,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>				3482 Orang	8.212.335.550,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Provinsi DI Yogyakarta		6.358.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
J U M L A H								25.279.485.145,00							30.091.355.157,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PENGHUBUNG DAERAH						13.309.490.195,00								16.096.892.799,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.653.713.800,00								5.773.392.799,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						5.653.713.800,00								5.773.392.799,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah</i>	-			100 %	5.653.713.800,00						-		5.773.392.799,00	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</i>	-			100 %	311.200.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Wisma Jogja dan Griya Jogja	-		250.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya</i>				12 Unit	311.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Wisma Jogja dan Griya Jogja			250.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	<i>Terlaksananya Dukungan Pengembangan Industri Kreatif</i>	-			100 %	1.318.385.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penurunan tingkat kemiskinan	UMKM DIY dan Masyarakat	-		1.200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif														
			<i>Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan</i>				40 Unit	1.318.385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penurunan tingkat kemiskinan	UMKM DIY dan Masyarakat		1.200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	<i>Terlaksananya dukungan penyelenggaraan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</i>	-			100 %	4.024.128.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	UMKM DIY, Seniman, OPD Terkait dan Masyarakat	-	4.323.392.799,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.09.0012	Gelar Seni Budaya Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah</i>				3 Laporan	4.024.128.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	UMKM DIY, Seniman, OPD Terkait dan Masyarakat		4.323.392.799,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7.655.776.395,00							10.323.500.000,00	
	5.07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG						7.655.776.395,00							10.323.500.000,00	
1.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	90,8 Angka			90,8 Angka	7.470.467.795,00						90,8 Angka	9.723.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	12.150.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY	100 %	58.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	7.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		40.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	1.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		4.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	1.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		4.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	2.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		10.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	100 %			100 %	5.480.594.519,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY	100 %	7.007.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				40 Orang/ Bulan	5.466.653.519,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		6.900.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	10.596.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		75.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	705.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		2.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	2.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		30.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	100 %			100 %	13.236.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY	100 %	22.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	13.236.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		22.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100 %			100 %	128.621.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY	100 %	600.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	11.190.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		30.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	27.615.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		82.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	14.616.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		30.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	2.343.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		8.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	72.856.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		450.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebeler</i>	100 %			100 %	40.840.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY	100 %	0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				7 Unit	40.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	100 %			100 %	1.438.565.676,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY	100 %	1.435.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	11.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	308.531.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	1.118.434.176,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		900.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	100 %			100 %	356.460.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY	100 %	600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	350.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		550.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				28 Unit	5.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
2.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	<i>Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY</i>	100 %			100 %	185.308.600,00						100 %	600.000.000,00	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	<i>Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya</i>	100 %			100 %	185.308.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD DIY, Tamu Penginapan, Kementerian/lembaga Pemerintah, Badan Penghubung Daerah se Indonesia, UMKM DIY, Seniman dan Masyarakat	100 %	600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan</i>				5 Laporan	113.985.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD DIY, Tamu Penginapan, Kementerian/lembaga Pemerintah, Badan Penghubung Daerah se Indonesia, UMKM DIY, Seniman dan Masyarakat		300.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pesta Seni Budaya														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pesta Seni Budaya</i>				2 Laporan	71.323.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan	Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD DIY, Tamu Penginapan, Kementerian/lembaga Pemerintah, Badan Penghubung Daerah se Indonesia, UMKM DIY, Seniman dan Masyarakat		300.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		J U M L A H							13.309.490.195,00						16.096.892.799,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT						27.251.720.750,00							25.549.792.095,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						27.251.720.750,00							25.549.792.095,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						27.251.720.750,00							25.549.792.095,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	87 Angka			87 Angka	20.960.685.100,00						87 Angka	19.143.600.295,00	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	6.949.400,00			-	-	Inspektorat DIY	100 %	6.945.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	3.697.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		5.393.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				4 Dokumen	1.960.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		256.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				5 Laporan	1.292.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan	Inspektorat DIY		1.296.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	17.525.857.870,00			-	-	Inspektorat DIY	100 %	15.412.989.945,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				98 Orang/ Bulan	17.514.904.470,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		15.369.591.645,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	7.936.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		40.320.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	3.017.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		3.077.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD</i>	100 %			100 %	14.299.400,00			-	-	Inspektorat DIY	100 %	14.299.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				6 Laporan	14.299.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		14.299.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	100 %			100 %	287.858.200,00			-	-	Inspektorat DIY	100 %	283.645.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				2 Dokumen	650.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		640.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				95 Orang	287.208.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		283.005.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	100 %			100 %	385.728.000,00			-	-	Inspektorat DIY	100 %	501.739.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1.260.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		1.155.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	13.676.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		13.631.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	38.241.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		29.379.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	7.548.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		4.005.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	235.003.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		363.569.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	90.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		90.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	100 %			100 %	14.800.000,00			-	-	Inspektorat DIY	100 %	206.350.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	14.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Inspektorat DIY		206.350.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	100 %			100 %	1.748.817.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Inspektorat DIY	100 %	1.516.130.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	2.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Inspektorat DIY		2.440.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	344.339.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		344.339.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	29.160.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.372.878.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		1.169.351.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	100 %			100 %	976.374.630,00			-	-	Inspektorat DIY	100 %	1.201.499.450,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	37.376.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		35.576.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				16 Unit	355.779.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		398.207.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				86 Unit	254.534.850,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		326.865.850,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	142.350.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		196.350.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	186.334.180,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspektorat DIY		244.500.000,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %			100 %	5.964.975.500,00						100 %	5.312.911.800,00	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<i>Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	100 % 100 %			100 %	5.196.282.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY	100 % 100 %	4.696.648.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				16 Laporan	424.767.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		318.307.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>				190 Laporan	3.195.695.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		2.910.008.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>				113 Laporan	861.578.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		856.745.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>				38 Laporan	216.164.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		215.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota</i>				21 Laporan	471.971.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		370.221.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal														
			<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk</i>				1 Kesepakatan	17.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		17.730.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>				2 Dokumen	8.375.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		8.435.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	<i>Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	100 %			100 %	768.692.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY	100 %	616.263.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>				2 Laporan	16.818.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		16.822.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>				90 Laporan	751.874.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		599.441.100,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	<i>Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan</i>	100 %			100 %	326.060.150,00						100 %	1.093.280.000,00	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	<i>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</i>	100 %			100 %	27.272.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY	100 %	320.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>				1 Rekomendasi	325.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		320.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun</i>				2 Rekomendasi	26.947.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	<i>Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	100 %			100 %	298.787.250,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY	100 %	1.092.960.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>				37 Perangkat Daerah	1.505.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		1.632.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>				37 Perangkat Daerah	2.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		2.528.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>				4 Kegiatan	292.182.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		926.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>				37 Perangkat Daerah	2.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		162.700.000,00	INSPEKTORAT
			JUMLAH					27.251.720.750,00							25.549.792.095,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI DI YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						31.302.714.723,00							37.820.413.600,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.930.000.000,00							3.993.000.000,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						3.930.000.000,00							3.993.000.000,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan</i>	-			3 Lembaga	3.930.000.000,00						-	3.993.000.000,00		
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	<i>Jumlah Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya</i>	-			5 Dokumen	3.930.000.000,00				Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Mahasiswa, Ormas, Orpol, Ormas Kepemudanaan	-	3.993.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya															
			<i>Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya</i>				5 Dokumen	3.930.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Mahasiswa, Ormas, Orpol, Ormas Kepemudanaan		3.993.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						27.372.714.723,00							33.827.413.600,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						27.372.714.723,00							33.827.413.600,00		
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	10.133.020.623,00						-	13.060.689.600,00		
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %			100 %	15.200.000,00				-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	100 %	111.108.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	5.500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		31.922.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				4 Dokumen	8.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		44.153.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	1.700.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		35.033.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	100 %			100 %	6.933.098.115,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	100 %	9.831.353.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				47 Orang/Bulan	6.909.003.115,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		9.704.721.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	8.095.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		53.427.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	12.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		26.620.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	4.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		46.585.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	12.050.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	100 %	12.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	12.050.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		12.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100 %			100 %	387.839.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	100 %	793.333.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	8.492.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		33.940.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	43.665.400,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		70.526.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	21.860.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		60.802.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	32.396.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		46.155.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	281.426.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		581.910.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	100 %			100 %	40.200.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-	100 %	177.449.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	40.200.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		177.449.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	100 %			100 %	1.214.348.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	100 %	1.411.956.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	229.640.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		316.993.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	67.464.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		52.348.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	917.244.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		1.042.615.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	100 %			100 %	1.530.285.108,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	100 %	723.340.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	46.561.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		39.676.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	192.327.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		338.640.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				67 Unit	99.601.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		146.024.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1.191.796.108,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY		199.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI	30,03 Angka			30,03 Angka	2.867.486.800,00						30,03 Angka	3.576.882.000,00	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %			100 %	2.867.486.800,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat dan Pelajar	100 %	3.576.882.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	600 Orang			0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat dan Pelajar	150 Orang	207.705.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15 Laporan			2 Laporan	100.755.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat dan Pelajar	3 Laporan	89.177.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				38 Orang	55.895.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat dan Pelajar		65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				2 Dokumen	337.208.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat dan Pelajar		375.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka</i>				1 Dokumen	395.511.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat dan Pelajar		440.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka														
			<i>Jumlah Paskibraka</i>				38 Orang	1.978.117.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat dan Pelajar		2.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	<i>Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI</i>	70,42 Angka			70,42 Angka	11.230.614.500,00						70,42 Angka	12.779.478.000,00	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	100 %			100 %	11.230.614.500,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar, Orpol	100 %	12.779.478.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	16960 Orang			700 Orang	11.061.766.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar, Orpol	3150 Orang	12.209.573.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	10 Laporan			2 Laporan	168.848.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar, Orpol	2 Laporan	569.905.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	<i>Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI</i>	100 Angka			100 Angka	198.812.400,00						100 Angka	543.855.000,00	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<i>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	100 %			100 %	198.812.400,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Organisasi Kemasyarakatan	100 %	543.855.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun</i>	5 Dokumen			1 Dokumen	33.219.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	125.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	1200 Orang			150 Orang	90.909.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Organisasi Kemasyarakatan	240 Orang	249.695.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	5 Laporan			1 Laporan	74.684.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Organisasi Kemasyarakatan	1 Laporan	168.410.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI	88,36 Angka			88,36 Angka	626.589.800,00						88,36 Angka	1.534.841.000,00	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %			100 %	626.589.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar	100 %	1.534.841.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	5 Dokumen			1 Dokumen	51.297.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar	1 Dokumen	95.711.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				180 Orang	198.639.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar		927.630.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				4 Laporan	376.652.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar		511.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<i>Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI</i>	79,03 Angka			79,03 Angka	2.316.190.600,00						79,03 Angka	2.331.668.000,00	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	100 %			100 %	2.316.190.600,00			Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY	100 %	2.331.668.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>				1 Dokumen	5.058.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY		54.375.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				9 Laporan	618.159.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat DIY		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				2 Dokumen	1.692.972.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY		2.277.293.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H								31.302.714.723,00							37.820.413.600,00	

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah DIY Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Dalam dokumen tersebut, termuat sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu

menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama menggambarkan target tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2025. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama DIY

Indikator Kinerja Utama	Baseline	Target	
	2023	2024	2025
IGI (<i>Inclusive Growth Index</i>)	6,24	6,42	6,52
Indeks Kebahagiaan	71,7**	73,41	73,98
Angka Kemiskinan	11,04	10,16	10,00-10,50
Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,07	5,1-5,6	5,3-5,8
Pendapatan Perkapita (Rp juta)	31,75	30,23	31,51
TPT	3,69	3,45-3,8	3,12-3,51
Inflasi	3,17	2-4	3,1-3,8
IPM	81,09	81,36	81,68
Indeks Pembangunan Kebudayaan	66,52*	74,78	74,98
Indeks Williamson	0,456	0,441	0,438
Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	42,2	40,09	40,13
Indeks Reformasi Birokrasi	A (88,15)	A (83,18)	A (83,78)
Opini BPK	WTP	WTP	WTP
SAKIP	AA (92,10)	AA (92,45)	AA (92,80)

Indikator Kinerja Utama	Baseline	Target	
	2023	2024	2025
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi (83,88)	Tinggi (81,66)	Tinggi (87,31-90,57)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sedang (66,29)	Sedang (63,71)	Sedang (64,19)
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	84,78	82,62	83,74
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	108,15	113,11	108,7

Ket: *Capaian 2022

**Capaian 2021

7.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan di daerah. Indikator Kinerja Daerah dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu: Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, dan Aspek Pelayanan Umum. Indikator Kinerja Daerah pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah DIY Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target	
		2023	2024	2025
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,07	5,1-5,6	5,3-5,8
2	Inflasi (%)	3,17	2-4	3,1-3,8
3	Pendapatan Per Kapita (Rp juta)	31,75	30,23	31,51
4	Indeks Williamson	0,456	0,441	0,438
5	Angka Kemiskinan	11,04	10,16	10,00 - 10,50
6	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	42,2	40,09	40,13
7	Indeks Gini	0,449	0,419	0,443 - 0,447
8	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum (%)	5,38	3,1	3,4
9	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang belum maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)	5,28	5,57	5,76

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target	
		2023	2024	2025
Fokus Kesejahteraan Sosial				
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,69	3,45-3,8	3,12-3,51
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,09	81,38 - 81,56	81,68
3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
4	Indeks Pertumbuhan Inklusif/IGI (<i>Inclusive Growth Index</i>)	6,24	6,42	6,52
5	Indeks Kebahagiaan	71,7	73,41	73,98
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	66,52*	74,78	74,98
7	Indeks Reformasi Birokrasi	A (88,15)	A (83,18)	A (83,78)
8	SAKIP	AA (92,10)	AA (92,45)	AA (92,80)
9	Harapan Lama Sekolah	15,66	15,74	15,76
10	Angka Harapan Hidup	75,18	75,18	75,21
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,67	87,76	88,77
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,87	77,37	77,67
13	Indeks Kebebasan	87,35	74,76	74,91
14	Indeks Kesetaraan	88,76	87,74	87,89
15	<i>Total Fertility Rate</i>	1,81	1,8-2,2	1,8-2,2
16	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen literasi memenuhi kompetensi minimum	55,29	76,39	77,38
17	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen numerasi memenuhi kompetensi minimum	63,4	59,52	60,52
18	Prevalensi <i>Stunting</i>	18	14,0	12,9
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi (83,88)	Tinggi (81,66)	Tinggi (87,31 - 90,57)
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Sedang (66,29)	Sedang (63,71)	Sedang (64,19)
3	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	84,87	82,62	83,74
4	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	108,15	113,11	108,7
5	Crime rate (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)	133,76	124,70	120,50
6	Indeks Kematangan SPBE	4,94	3,12	4,3
7	Persentase Desa Mandiri	65,31	62,24	69,90
8	Rasio Kewirausahaan (%)	3,23	3,7	3,8
9	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,67	0,7	0,75

7-4

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target	
		2023	2024	2025
10	Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak	96,28	98,203	98,802
11	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	363	349	355
12	Persentase Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	64,05	67,03	76,7
13	Penurunan emisi GRK (ribu CO ₂ eq)	212	2.639	2.641
14	Perwujudan pola ruang (%)	84,87	93,22	94,48
15	Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa (%)	21,89	24,23	27,51
ASPEK PELAYANAN UMUM				
Urusan Pendidikan				
1	Rata-rata Lama Sekolah	9,83	9,66	9,68
2	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMA	21,45%	50,71%	50,73%
3	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMA	12,40%	30,84%	30,86%
4	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMK	41,47%	51,94%	51,96%
5	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMK	22,00%	30,37%	30,39%
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun	91,17%	89,98%	90,00%
7	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMA	71,77%	21,94%	21,96%
8	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMA	75,66%	18,96%	18,98%
9	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMK	38,81%	14,05%	14,07%
10	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMK	51,14%	11,07%	11,09%
11	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	64,89%	36,52%	36,57%
12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 tahun disabilitas	75,34%	51,33%	51,35%
Urusan Kesehatan				
1	Indeks Keluarga Sehat	0,35	0,36	0,39
2	Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita	11,9	11,7	11,5
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak	95,49%	95,90%	96,32%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target	
		2023	2024	2025
2	Persentase Warga Negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak	97,69%	97,09%	97,41%
3	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	73,43%	85,94%	90,63%
4	Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	99,17%	98,66%	98,77%
5	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	83,87%	86,07%	90,72%
6	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral di DIY	100%	100%	100%
7	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang	58,90%	73,28%	81,92%
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni	95,67%	95,83%	95,98%
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat				
1	Persentase kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	65%	70%	75%
2	Persentase terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	60%	70%	80%
3	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	97,3%	101,4	101,3
4	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	0,65	0,71	0,76
Urusan Sosial				
1	Prosentase Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan OPD	n/a	100	100
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	25,97%	28,18%	28,32%
3	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya serta PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	57,50%	21,22%	21,51%
4	Persentase masyarakat sasaran yang mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	n/a	26,20%	26,26%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target	
		2023	2024	2025
5	Persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi kejadian bencana bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP)	n/a	61,03%	61,03%
Urusan Tenaga Kerja				
1	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	n/a	75%	75%
2	Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	n/a	67,50%	70%
3	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	2.615 Perusahaan	2.629 Perusahaan	2.639 Perusahaan
4	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	2.730 Perusahaan	2.748 Perusahaan	2.768 Perusahaan
5	Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik	n/a	65%	70%
6	Tingkat produktivitas DIY	Rp 55,44 juta/tenaga kerja	Rp 54,09 juta/tenaga kerja	Rp 56,37 juta/tenaga kerja
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak di Masyarakat	n/a	0,63	0,63
2	Persentase Keterwakilan perempuan dalam politik (DPRD, Bupati/walikota dan Bamuskal)	18,24%	18.5%	19%
3	Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY	80%	95.00%	95.50%
4	MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan)	n/a	22,9 tahun	23 tahun
Urusan Pangan				
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari (skor)	96,24	96,3	96,4
2	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	3,85%	5,13%	3,85%
3	Indeks Ketahanan Pangan (skor)	83.17	82.08	82.41
4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	10,08	13,08	9,06
Urusan Pertanian				
1	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang dan penataan agraria di daerah	52,24%	59,90%	68,33%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target	
		2023	2024	2025
2	Persentase Penyelenggaraan Penataan Agraria di daerah sesuai ketentuan	53,59%	46,53%	54,74%
Urusan Lingkungan Hidup				
1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	27,78%	25%	25,34%
2	Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota	6,52	6,11	6,03
Urusan Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil				
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	95,90%	93,96%	94,00%
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	4 lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga
2	Persentase rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3	Terpenuhinya kebijakan dan keberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	100%	100%	100%
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	Rata-rata jumlah anak per-keluarga	n/a	1,14	1,14
2	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	3 lembaga	4 lembaga	5 lembaga
Urusan Perhubungan				
1	Persentase Capaian Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY	40,30%	48,34%	60,24%
2	Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum	41,63%	48,44%	59,19%
3	Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan	39,11%	48,25%	61,29%
Urusan Komunikasi dan Informatika				
1	Persentase Jumlah Badan Publik Pemda DIY Kategori Informatif	38.46%	29.73%	35.14%
2	Indeks Kematangan Manajemen SPBE	4,64	1,92	1,97
3	Predikat pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik di DIY	Baik	Baik	Baik
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target	
		2023	2024	2025
1	Jumlah koperasi modern	11	7	9
2	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (pada tahun n)	n/a	1.500	1.550
3	Jumlah wirausaha Baru / Pemula	1.645	6.115	8.365
4	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi)	n/a	130	130
5	Jumlah omset Koperasi dan UMKM (Triliun rupiah)	17,93	18,025	18,175
6	Rasio Wirausaha baru terhadap Total Angkatan Kerja (%)	4,07	3,95	4,15
Urusan Penanaman Modal				
1	Nilai Realisasi Investasi di DIY	Rp 5,69 Triliun	Rp 3,02 Triliun	Rp 3,22 Triliun
2	Nilai Predikat Pelayanan Prima	A	A	A
Urusan Kepemudaan dan Olahraga				
1	Jumlah capaian medali pada kejuaraan <i>multievent</i>	72 medali	22 medali	24 medali
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	64,89	65,61	65,63
3	Persentase pemuda bekerja	59,33%	63,34%	64,84%
4	Peringkat yang diraih dalam Pra-POPNAS dan POPNAS	peringkat 5 besar (pra popnas)	peringkat 4 besar (pra popnas)	peringkat 8 besar (Popnas)
5	Peringkat yang diraih dalam PEPARPENAS	peringkat 9 besar	peringkat 6 besar	Peringkat 6 besar
Urusan Statistik				
1	Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah	68,44%	70%	75%
Urusan Persandian				
1	Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY	632	630	631
Urusan Kebudayaan				
1	Jumlah sumber daya kebudayaan pendukung keistimewaan yang terkelola	n/a	432	434
2	Jumlah sarana prasarana pendukung keistimewaan yang terkelola	n/a	280	282
3	Jumlah agenda budaya pendukung keistimewaan yang terkelola	n/a	248	250
4	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	5,20%	4,85%	6,09%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target	
		2023	2024	2025
5	Peningkatan jumlah penyelenggaraan <i>event</i> budaya tingkat provinsi, nasional, internasional	14 <i>event</i>	15 <i>event</i>	16 <i>event</i>
6	Peningkatan jumlah kegiatan pengembangan seni budaya dan tradisi di DIY	375 lembaga	385 lembaga	395 lembaga
Urusan Perpustakaan				
1	Persentase pemanfaatan koleksi pustaka dan arsip	n/a	22%	23%
2	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	57,86%	50%	51%
Urusan Kearsipan				
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	84,33%	51%	51,25%
Urusan Kelautan dan Perikanan				
1	Nilai Subsektor Perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) (juta rupiah)	349603 juta rupiah	368122 juta rupiah	371350 juta rupiah
2	Nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap (juta rupiah)	2.709.243 juta rupiah	2293318 juta rupiah	2305813 juta rupiah
3	Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan kelompok miskin (juta rupiah/tahun)	n/a	36 juta rupiah/tahun	36 juta rupiah/tahun
4	Nilai produksi perikanan budidaya kelompok miskin (dalam juta rupiah/tahun)	n/a	180 juta rupiah/tahun	180 juta rupiah /tahun
5	Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (skor)	n/a	40,50	46,39
6	Luas kawasan konservasi yang ditetapkan (Ha)	695,89	5670,87	5822,92
Urusan Pariwisata				
1	Lama Tinggal Wisatawan wisman / 12 bulan)	2.18 hari	2.48 hari	2.52 hari
2	Lama Tinggal Wisatawan wisnus / 12 bulan	1.35 hari	1.52 hari	1.57 hari
4	Rata-rata Spending money wisatawan mancanegara (\$)	(\$) 672	(\$) 550	(\$) 600
5	Rata-rata spending money wisatawan nusantara (rupiah)	Rp2.226.938	Rp2.400.000	Rp2.500.000
7	<i>Total Yield</i> (Jumlah wisatawan x Belanja/per hari) - Satuan (Rp.)	n/a	17,2 T	20 T
Urusan Pertanian				
1	Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (%)	1,21%	0,21%	0,21%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target	
		2023	2024	2025
2	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK) (juta rupiah)	8.179.176 juta rupiah	8.180.687. juta rupiah	8.242.042 jutarupiah
3	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)	0,017	2,01%	3,99%
4	Peningkatan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)	0,003	1,98%	1,98%
Urusan Kehutanan				
1	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	7,01%	3,15%	4,61%
2	Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan	5%	5%	5%
3	Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari	84,75%	85,91%	92,76%
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral				
1	Persentase rumah tangga berakses listrik	99,99%	99,99%	99,99%
2	Persentase pengusaha kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang	9,17%	9,23%	9,28%
3	Pengendalian Rerata Penurunan Air Muka Tanah	< 20%	< 20%	< 20%
Urusan Perdagangan				
1	Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY	8,17%	8,39%	8,44%
2	Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	4,29%	5,32%	5,38%
Urusan Perindustrian				
1	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY	11,82%	12,15%	12,20%
2	Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	4,29%	2,50%	3,00%
Urusan Transmigrasi				
1	Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi	100%	90%	90%
Sekretariat Dewan				
1	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	137,09%	96%	96%
2	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	91,38%	83%	84%
Sekretariat Daerah				

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target	
		2023	2024	2025
1	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan	100%	100%	100%
2	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung pencapaian sasaran Pemda Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	100%	100%	100%
3	Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda	n/a	40%	60%
4	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	n/a	67,5%	80%
5	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi	100%	100%	100%
6	Persentase Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
7	Persentase layanan hukum yang berkualitas	100%	100%	100%
8	Rerata Capaian Produk Hukum serta Bantuan dan Layanan Hukum yang Berkualitas	100%	100%	100%
9	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "sangat baik" (A)	100%	94,6%	94,6%
10	Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi	94,6%	80%	86,67%
11	Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan	90,04	89,10	89,20
12	Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	100	90,1	90,2
13	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dalam mendukung program Pemda (bidang infrastruktur)	33,33%	30%	60%
14	Persentase rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur) dan Persentase kualitas Pengadaan Barang Jasa	33,25%	38,69%	62,37%
15	Persentase kualitas pengadaan barang dan jasa dan persentase IKM	33,02%	64,76%	69,49%
16	Nilai rerata kuesioner layanan keprotokolan, kerumahtanggan, kepuasan masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah, dan nilai reformasi birokrasi	91,07	86,56	86,88
17	Nilai rerata kuesioner layanan keprotokolan, kerumahtanggan, kepuasan masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah, dan nilai reformasi birokrasi	91,07	86,56	86,88

7-12

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target	
		2023	2024	2025
Perencanaan Pembangunan				
1	Persentase ketercapaian tujuan perangkat daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi	n/a	85,71%	87,50%
2	Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi	98,17%	88,10%	88,89%
Keuangan				
1	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100%	100%	100%
2	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Rp16.108.924.464*	Rp9.378.609.475	Rp9.703.109.475
3	Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100%	100%	100%
Kepegawaian				
1	Indeks Profesionalitas ASN (Skor)	83,19	59,09	63,09
2	Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN	81,71%	68,75%	70,73%
Pendidikan dan Pelatihan				
1	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan dengan predikat minimal memuaskan	N/A	91%	91,5%
2	Persentase ASN yang telah mendapatkan pelatihan minimal 20 JPL dalam 1 tahun	80,39%	15%	16%
Penelitian dan Pengembangan				
1	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	81,74%	70%	75%
Penghubung Daerah				
1	Persentase layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain	92,9%	87,5%	88%
2	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	92,29 angka indeks	87,5 angka indeks	88 angka indeks
Inspektorat Daerah				
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	95,91%	91,5%	92%
2	Indeks Penilaian integritas	77,33	72,5	73
3	Nilai Kapabilitas APIP	level 3	level 3	level 3

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target	
		2023	2024	2025
Kesatuan Bangsa dan Politik				
1	Capaian Aspek Kebebasan dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) DIY	77,76	74,33	74,34
2	Rerata capaian skor 5 indikator dalam Aspek Kebebasan IDI	79,55	73,56	73,57

BAB 8 PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY Tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun kedua dari Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang merupakan pelaksanaan tahapan RPJPD periode lima tahunan keempat. Peraturan Gubernur tentang RKPD Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA-APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, Peraturan Gubernur tentang RKPD Tahun 2025 juga akan menjadi acuan dalam penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan juga acuan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2025

Yogyakarta, 8 Juli 2024

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd.

HAMENGKU BUWONO X



BAPPEDA DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ꦧꦩꦥꦢꦂꦶꦢꦶꦪ
ꦧꦩꦩꦥꦢꦂꦶꦪꦠꦶꦪ

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213

Telp: (0274) 589583, 562811 (Psw. 1209-1219)

Fax: (0274) 586712

Website: <http://bappeda.jogjaprov.go.id>

Email: bappeda@jogjaprov.go.id